SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) ;
29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 85/PMK.07/2009 ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 7/B) ;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 8/B) ;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 9/B) ;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 10/B) ;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E) ;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 2/E) ;
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 3/A) ;
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 2/A) ;
50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) ;
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D) ;
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 14/D) ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran ;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
   c. Neraca ;
   d. Laporan Operasional ;
   e. Laporan Arus Kas ;
   f. Laporan Perubahan Ekuitas ; dan
   g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	957.624.973.325,14
b. Belanja	Rp.	954.991.703.029,81
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp.	2.633.270.295,33
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	305.857.486.594,13
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Surplus/(Defisit) sebesar	Rp.	305.857.486.594,13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.16.843.021.325,14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	940.781.952.000,00
2. Realisasi	Rp.	957.624.973.325,14
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	16.843.021.325,14

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.291.647.735.564,32) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.246.639.438.594,13
2. Realisasi	Rp.	954.991.703.029,81
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp.	291.647.735.564,32)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.308.490.756.889,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan Perubahan	(Rp.	305.857.486.594,13)
2. Realisasi	Rp.	2.633.270.295,33
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	308.490.756.889,46

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	305.857.486.594,13
2. Realisasi	Rp.	305.857.486.594,13
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	305.857.486.594,13
2. Realisasi	Rp.	305.857.486.594,13
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	305.857.486.594,13
b. Pengunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	(Rp.	305.857.486.594,13)
c. Jumlah Sub Total	Rp.	0,00
d. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	Rp.	308.490.756.889,46
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	308.490.756.889,46

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	2.398.412.871.680,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	10.569.398.509,44
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	2.387.843.473.171,51

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp.	978.291.790.329,31
b. Beban Operasi	Rp.	814.916.294.444,63
Surplus / (Defisit) sebesar	Rp.	163.375.495.884,68
c. Surplus (Defisit) dari		
1. Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
2. Pos Luar Biasa	(Rp.	94.394.268.663,99)
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar	Rp.	68.981.227.220,69

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2017	Rp.	275.264.586.878,92
b. Saldo kas awal BLUD Dinas Kesehatan	Rp.	2.633.270.295,81
c. Saldo kas awal BLUD RSUD	Rp.	28.036.186.781,37
d. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	258.106.212.682,56
e. Arus kas dari aktivitas investasi aset Non Keuangan	(Rp.	255.472.942.387,23)
f. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp.	0,00)
g. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp.	0,00)
h. Saldo kas akhir per 31 Desember 2017	Rp.	308.490.756.889,46

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.351.321.386.078,12
b. Surplus (Defisit) Laporan Operasional	Rp.	68.981.227.220,69
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Akumulasi Penyusutan Sampai dengan Tahun 2016	(Rp.	0,00)
Akumulasi Amortisasi Sampai dengan Tahun 2016	(Rp.	0,00)
Lain-lain	(Rp.	32.459.140.127,30)
d. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional sebesar	Rp.	2.387.843.473.171,51

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ;
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
   Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
c. Lampiran III : Laporan Operasional ;
d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
e. Lampiran V : Neraca ;
f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas ;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan ;
h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang ;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir ;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal ;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset tetap ;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam pekerjaan ;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya ;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek ;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;

t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
213-36/2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
REKAPITULASI RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**192.013.251.000,00**	**230.608.717.369,14**	**38.595.466.369,14**	**120,10%**
4.1.1	Pajak Daerah	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	17.224.831.585,44	129,70%
4.1.2	Retribusi Daerah	15.963.010.000,00	18.407.218.016,50	2.444.208.016,50	115,31%
4.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	1.226.851.415,39	110,14%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	105.956.843.000,00	123.656.418.351,81	17.699.575.351,81	116,70%
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**679.903.441.000,00**	**638.973.881.834,00**	**(40.929.559.166,00)**	**93,98%**
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan	64.832.652.000,00	46.005.454.815,00	(18.827.197.185,00)	70,96%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	502.392.070.000,00	-	100,00%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.154.318.000,00	77.267.422.860,00	(21.886.895.140,00)	77,93%
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	13.524.401.000,00	13.308.934.159,00	(215.466.841,00)	98,41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
4.3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**68.865.260.000,00**	**88.042.374.122,00**	**19.177.114.122,00**	**127,85%**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	
4.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	19.177.114.122,00	131,62%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	100,00%
4.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau	716.850.000,00	716.850.000,00	-	100,00%
		-	-	-	
	Jumlah	**940.781.952.000,00**	**957.624.973.325,14**	**16.843.021.325,14**	**101,79%**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**555.111.460.594,13**	**351.277.112.926,31**	**(203.834.347.667,82)**	**63,28%**
5.1.1	Belanja Pegawai	410.057.049.000,00	334.828.576.837,00	(75.228.472.163,00)	81,65%
5.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	
5 1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	
5.1.4	Belanja Hibah	13.686.596.000,00	11.924.689.389,31	(1.761.906.610,69)	87,13%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.052.880.000,00	3.896.000.000,00	(4.156.880.000,00)	48,38%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	627.851.000,00	627.846.700,00	(4.300,00)	100,00%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	122.687.084.594,13	-	(122.687.084.594,13)	0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**691.527.978.000,00**	**603.714.590.103,50**	**(87.813.387.896,50)**	**87,30%**
5.2.1	Belanja Pegawai	63.861.135.690,00	56.802.981.665,00	(7.058.154.025,00)	88,95%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	346.900.453.310,00	290.933.631.925,27	(55.966.821.384,73)	83,87%
5.2.3	Belanja Modal	280.766.389.000,00	255.977.976.513,23	(24.788.412.486,77)	91,17%
	Jumlah Belanja	**1.246.639.438.594,13**	**954.991.703.029,81**	**(291.647.735.564,32)**	**76,61%**
	Surplus/ (Deflsit)	**(305.857.486.594,13)**	**2.633.270.295,33**	**308.490.756.889,46**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**Penerimaan pembiayaan**				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	-	100,00%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	
6 1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	**305.857.486.594,13**	**305.857.486.594,13**	-	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1	2	3	4	5	6
6.2	**Pengeluaran pembiayaan**				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	-	-	-	
	Pembiayaan neto	**305.857.486.594,13**	**305.857.486.594,13**	-	**100,00%**
6.3	**Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)**	-	**308.490.756.889,46**	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I.I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi

PEMERINTAH KOTA MADIUN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017

dalam jutaan rupiah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan				Belanja																						
				Bertambah / Berkurang		Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)											Realisasi (Rp.)										Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Keluarahan	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Keluarahan	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Tidak Terduga	Jumlah Belanja		
1	2	3	4	5(4-3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	URUSAN WAJIB	937.111,33	953.548,76	20.484,47	1.436,05	459.988,90	332.114,69	280.116,78	0,00	0,00	########	8.052,88	0,00	627,85	122.687,08	1.217.274,78	379.650,64	278.138,75	255.355,15	0,00	0,00	########	3.896,00	0,00	627,85	0,00	929.593,08	(287.681,70)	24.176,9
1. 01.	Pendidikan	19.992,40	19.897,98	(94,41)	99,53	228.650,68	42.769,79	43.186,01	-	-	-	-	-	-	-	314.606,48	190.667,73	37.869,86	35.951,15	-	-	-	-	-	-	-	264.488,74	(50.117,74)	84,0
1. 01. 01	Dinas Pendidikan	19.992,40	19.897,98	(94,41)	99,53	228.650,68	42.769,79	43.186,01	-	-	-	-	-	-	-	314.606,48	190.667,73	37.869,86	35.951,15	-	-	-	-	-	-	-	264.488,74	(50.117,74)	84,0
1. 02.	Kesehatan	83.646,37	80.473,66	874,34	102,92	52.699,25	124.885,64	14.724,72	-	-	-	-	-	-	-	192.309,61	47.599,60	114.409,67	12.647,00	-	-	-	-	-	-	-	174.656,28	(17.653,34)	90,8
1. 02. 01	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	8.646,37	8.899,01	252,65	102,92	32.830,57	59.230,62	3.465,16	-	-	-	-	-	-	-	95.526,35	29.478,46	49.865,73	3.219,46	-	-	-	-	-	-	-	82.563,65	(12.962,70)	86,4
02	Rumah Sakit Umum Daerah	75.000,00	71.574,65	621,70	0,00	19.868,69	65.655,02	11.259,55	-	-	-	-	-	-	-	96.783,26	18.121,15	64.543,94	9.427,54	-	-	-	-	-	-	-	92.092,63	(4.690,63)	95,1
1. 03.	Pekerjaan Umum	1.922,00	2.543,70	621,70	132,35	8.111,31	5.467,37	136.944,89	-	-	-	-	-	-	-	150.523,56	7.139,04	5.176,80	125.734,46	-	-	-	-	-	-	-	138.050,30	(12.473,26)	91,7
1. 03. 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.922,00	2.543,70	621,70	132,35	8.111,31	5.467,37	136.944,89	-	-	-	-	-	-	-	150.523,56	7.139,04	5.176,80	125.734,46	-	-	-	-	-	-	-	138.050,30	(12.473,26)	91,7
1. 04.	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan	-	-	-	-	4.445,04	4.963,51	25.033,40	-	-	-	-	-	-	-	34.441,96	3.763,25	4.476,95	23.266,53	-	-	-	-	-	-	-	31.506,72	(2.935,23)	91,4
1. 04. 01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	4.445,04	4.963,51	25.033,40	-	-	-	-	-	-	-	34.441,96	3.763,25	4.476,95	23.266,53	-	-	-	-	-	-	-	31.506,72	(2.935,23)	91,4
1. 05	KententramanDan Ketertiban Umum Serta	-	-	-	-	10.486,28	7.545,13	31.705,85	-	-	-	-	-	-	-	49.737,26	7.183,28	6.228,33	31.390,00	-	-	-	-	-	-	-	44.801,60	(4.935,65)	90,0
1. 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	7.617,72	5.466,96	3.087,50	-	-	-	-	-	-	-	16.172,18	6.136,50	4.721,58	2.789,68	-	-	-	-	-	-	-	13.647,76	(2.524,42)	84,3
02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	2.868,57	2.078,17	28.618,35	-	-	-	-	-	-	-	33.565,08	1.046,78	1.506,75	28.600,32	-	-	-	-	-	-	-	31.153,84	(2.411,24)	92,8
1. 06	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	6.744,57	6.574,20	807,27	-	-	-	-	-	-	-	14.126,04	4.352,72	5.295,22	666,50	-	-	-	-	-	-	-	10.314,45	(3.811,59)	73,0
1. 06 01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	6.744,57	6.574,20	807,27	-	-	-	-	-	-	-	14.126,04	4.352,72	5.295,22	666,50	-	-	-	-	-	-	-	10.314,45	(3.811,59)	73,0
1. 07	Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	-	-	-	-	3.327,35	3.690,41	948,00	-	-	-	-	-	-	-	7.965,77	3.027,19	3.146,01	917,79	-	-	-	-	-	-	-	7.090,99	(874,78)	89,0
1. 07 01	Dinas Tenaga Kerja	-	-	-	-	3.327,35	3.690,41	948,00	-	-	-	-	-	-	-	7.965,77	3.027,19	3.146,01	917,79	-	-	-	-	-	-	-	7.090,99	(874,78)	89,0
1. 08.	Lingkungan Hidup	235,00	331,00	96,00	140,85	11.393,04	7.658,94	4.797,12	-	-	-	-	-	-	-	23.849,09	9.996,33	5.222,72	4.181,19	-	-	-	-	-	-	-	19.400,24	(4.448,85)	81,3
1. 08 01	Kantor Lingkungan Hidup	235,00	331,00	96,00	140,85	11.393,04	7.658,94	4.797,12	-	-	-	-	-	-	-	23.849,09	9.996,33	5.222,72	4.181,19	-	-	-	-	-	-	-	19.400,24	(4.448,85)	81,3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5(4-3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	09		**Administrasi Kependudukan dan**	-	-	-	-	3.969,77	2.951,98	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	8.521,75	3.669,96	2.789,55	1.599,18	-	-	-	-	-	-	-	8.058,69	(463,05)	94,2
1.	09	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	3.969,77	2.951,98	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	8.521,75	3.669,96	2.789,55	1.599,18	-	-	-	-	-	-	-	8.058,69	(463,05)	94,2
1.	10		**Perhubungan**	1.963,49	2.022,71	59,22	103,02	8.258,95	4.493,79	2.370,25	-	-	-	-	-	-	-	15.122,99	6.518,19	4.096,83	2.271,47	-	-	-	-	-	-	-	12.886,49	(2.236,50)	85,2
1.	10	01	Dinas Perhubungan	1.963,49	2.022,71	59,22	103,02	8.258,95	4.493,79	2.370,25	-	-	-	-	-	-	-	15.122,99	6.518,19	4.096,83	2.271,47	-	-	-	-	-	-	-	12.886,49	(2.236,50)	85,2
1.	11		**Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**	-	-	-	-	4.429,35	6.796,70	8.383,90	-	-	-	-	-	-	-	19.609,94	3.798,28	6.557,17	8.225,44	-	-	-	-	-	-	-	18.580,89	(1.029,05)	94,7
1.	11	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	4.429,35	6.796,70	8.383,90	-	-	-	-	-	-	-	19.609,94	3.798,28	6.557,17	8.225,44	-	-	-	-	-	-	-	18.580,89	(1.029,05)	94,7
1.	12		**Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan**	-	-	-	-	3.691,86	3.093,49	1.560,57	-	-	-	-	-	-	-	8.345,92	3.231,95	2.543,55	1.497,08	-	-	-	-	-	-	-	7.272,58	(1.073,35)	87,1
1.	12	01	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi Dan Usaha	-	-	-	-	3.691,86	3.093,49	1.560,57	-	-	-	-	-	-	-	8.345,92	3.231,95	2.543,55	1.497,08	-	-	-	-	-	-	-	7.272,58	(1.073,35)	87,1
1.	13		**Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah**	200,43	201,94	1,51	0,75	4.293,99	10.331,29	507,79	-	-	-	-	-	-	-	15.133,07	3.594,89	9.260,59	364,30	-	-	-	-	-	-	-	13.219,79	(1.913,28)	87,3
1.	13	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	200,43	201,94	1,51	100,75	4.293,99	10.331,29	507,79	-	-	-	-	-	-	-	15.133,07	3.594,89	9.260,59	364,30	-	-	-	-	-	-	-	13.219,79	(1.913,28)	87,3
1.	14		**Perpustakaan dan Kearsipan**	-	-	-	-	2.436,62	1.169,70	614,98	-	-	-	-	-	-	-	4.221,30	1.982,91	1.061,27	569,29	-	-	-	-	-	-	-	3.613,47	(607,84)	85,6
1	14	02	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	-	2.436,62	1.169,70	614,98	-	-	-	-	-	-	-	4.221,30	1.982,91	1.061,27	569,29	-	-	-	-	-	-	-	3.613,47	(607,84)	85,6
1.	15		**Pemerintahan Umum**	-	-	-	-	12.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,50	8.785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,78	(3.858,72)	12.111,1
1.	15	01	Walikota dan Wakil Walikota	-	-	-	-	798,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798,98	561,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561,90	(237,07)	70,3
1.	15	02	DPRD	-	-	-	-	11.845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,53	8.223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,88	(3.621,64)	69,4
1.	16		**Unsur Staf**	-	-	-	-	17.331,37	20.697,53	2.434,91	-	-	-	-	-	-	-	40.463,81	15.054,35	17.095,42	1.774,50	-	-	-	-	-	-	-	33.924,27	(6.539,53)	6.074,5
1.	16	01	Sekretariat Daerah	-	-	-	-																								
1.	16	01	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	-	-	-	-	1.264,98	3.414,49	75,00	-	-	-	-	-	-	-	4.754,47	1.121,65	3.004,80	73,41	-	-	-	-	-	-	-	4.199,86	(554,60)	88,3
1.	16	01	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1.093,67	1.666,62	206,55	-	-	-	-	-	-	-	2.966,84	903,02	1.458,59	204,47	-	-	-	-	-	-	-	2.566,09	(400,75)	86,4
1.	16	01	Bagian Umum	-	-	-	-	10.784,32	9.471,35	1.827,65	-	-	-	-	-	-	-	22.083,32	9.374,27	7.280,39	1.197,24	-	-	-	-	-	-	-	17.851,90	(4.231,42)	80,8
1.	16	01	Bagian Hukum	-	-	-	-	2.418,28	1.195,48	49,00	-	-	-	-	-	-	-	3.662,77	2.058,99	1.061,52	48,22	-	-	-	-	-	-	-	3.168,73	(494,04)	86,5
1.	16	01	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	706,94	4.071,64	196,71	-	-	-	-	-	-	-	4.977,29	610,00	3.502,57	171,22	-	-	-	-	-	-	-	4.283,79	(693,50)	86,0
1.	16	01	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1.061,18	877,95	80,00	-	-	-	-	-	-	-	2.019,13	986,43	787,55	79,54	-	-	-	-	-	-	-	1.853,92	(165,22)	91,8
1.	17		**Pelayanan Administrasi Dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD**	-	-	-	-	3.647,18	24.777,88	537,31	-	-	-	-	-	-	-	28.962,37	2.667,86	14.817,85	498,85	-	-	-	-	-	-	-	17.984,56	(10.977,82)	62,1
	17	01	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	3.647,18	24.777,88	537,31	-	-	-	-	-	-	-	28.962,37	2.667,86	14.817,85	498,85	-	-	-	-	-	-	-	17.984,56	(10.977,82)	62,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5(4-3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	**18**		**Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**170,00**	237,70	67,70	**139,82**	4.120,34	3.137,92	259,98	-	-	-	-	-	-	-	7.518,24	3.651,91	2.780,20	240,00	-	-	-	-	-	-	-	6.672,11	(846,12)	88,7
1	18	01	Badan Kepegawaian Daerah	170,00	237,70	67,70	139,82	4.120,34	3.137,92	259,98	-	-	-	-	-	-	-	7.518,24	3.651,91	2.780,20	240,00	-	-	-	-	-	-	-	6.672,11	(846,12)	88,7
1.	**19**		**Penunjang Keuangan**	**827.140,16**	845.477,43	18.337,27	**339,56**	30.945,04	31.857,84	735,00	-	-	########	8.052,88	-	627,85	122.687,08	208.592,30	19.166,44	18.737,85	719,14	-	-	########	3.896,00	-	627,85	-	55.071,96	(153.520,34)	26,4
1	19	01	BPKAD	6.178,06	6.762,66	584,60	109,46	23.114,36	30.442,74	540,00	-	-	-	-	-	-	-	54.097,10	12.248,56	17.508,81	536,65	-	-	-	-	-	-	-	30.294,02	(23.803,08)	56,0
1	19	02	BPKAD (SKPKD)	762.962,10	763.279,59	317,49	100,04	-	-	-	-	-	########	8.052,88	-	627,85	122.687,08	145.054,41	-	-	-	-	-	########	3.896,00	-	627,85	-	16.448,54	(128.605,88)	11,3
1	19	03	Badan Pendapatan Daerah	58.000,00	75.435,18	17.435,18	130,06	7.830,69	1.415,10	195,00	-	-	-	-	-	-	-	9.440,79	6.917,87	1.229,04	182,49	-	-	-	-	-	-	-	8.329,40	(1.111,38)	88,2
1.	**20**		**Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	**4.127,28**	**1.116,87**	**86,95**	-	-	-	-	-	-	-	**5.331,10**	**3.701,87**	**1.003,83**	**85,52**	-	-	-	-	-	-	-	**4.791,22**	**(539,88)**	**2.602,0**
	20	01	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	4.127,28	1.116,87	86,95	-	-	-	-	-	-	-	5.331,10	3.701,87	1.003,83	85,52	-	-	-	-	-	-	-	4.791,22	(539,88)	89,8
1.	**21**		**Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**	-	-	-	-	**5.345,97**	**1.925,77**	**773,80**	-	-	-	-	-	-	-	**8.045,54**	**4.779,56**	**1.411,94**	**734,49**	-	-	-	-	-	-	-	**6.925,99**	**(1.119,55)**	**1.299,3**
	21	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	5.345,97	1.925,77	773,80	-	-	-	-	-	-	-	8.045,54	4.779,56	1.411,94	734,49	-	-	-	-	-	-	-	6.925,99	(1.119,55)	86,0
1.	**22**		**Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**	**1.841,50**	2.362,65	521,15	**377,24**	**24.969,97**	**12.775,04**	**2.104,10**	-	-	-	-	-	-	-	**39.849,10**	**22.101,59**	**11.368,15**	**2.021,26**	-	-	-	-	-	-	-	**35.491,01**	**(4.358,09)**	**696,2**
1	22	01	Kecamatan Kartoharjo	935,00	1.265,79	330,79	135,38	8.326,07	4.433,77	1.133,75	-	-	-	-	-	-	-	13.893,59	7.302,91	4.063,21	1.083,19	-	-	-	-	-	-	-	12.449,30	(1.444,29)	89,6
1	22	08	Kecamatan Manguharjo	506,50	615,40	108,90	121,50	8.295,02	4.391,08	762,85	-	-	-	-	-	-	-	13.448,95	7.202,04	3.961,38	731,73	-	-	-	-	-	-	-	11.895,16	(1.553,79)	88,4
1	22	09	Kecamatan Taman	400,00	481,46	81,46	120,36	8.348,87	3.950,18	207,50	-	-	-	-	-	-	-	12.506,56	7.596,63	3.343,57	206,35	-	-	-	-	-	-	-	11.146,55	(1.360,01)	89,1
1.	**23**		**Kesatuan Bangsa**	-	-	-	-	**3.919,19**	**3.433,90**	-	-	-	-	-	-	-	-	**7.353,09**	**3.215,94**	**2.788,99**	**0,00**	-	-	-	-	-	-	-	**6.004,93**	**(1.348,15)**	**81,6**
1.	23	01	Badan Kesbang Linmas	-	-	-	-	3.919,19	3.433,90	-	-	-	-	-	-	-	-	7.353,09	3.215,94	2.788,99	0,00	-	-	-	-	-	-	-	6.004,93	(1.348,15)	81,6
2.			**URUSAN PILIHAN**	**3.670,62**	4.076,21	**405,59**	**111,05**	13.929,29	**14.785,77**	**649,61**	-	-	-	-	-	-	-	29.364,66	**11.980,92**	**12.794,88**	**622,83**	-	-	-	-	-	-	-	**25.398,63**	**(3.966,04)**	**86,4**
2.	**01.**		**Pertanian**	**73,74**	**74,02**	**0,28**	**100,38**	**4.549,63**	**9.234,38**	**414,11**	-	-	-	-	-	-	-	**14.198,11**	**3.866,63**	**8.456,61**	**401,84**	-	-	-	-	-	-	-	**12.725,07**	**(1.473,04)**	**89,6**
2.	01.	01	Dinas Pertanian	73,74	74,02	0,28	100,38	4.549,63	9.234,38	414,11	-	-	-	-	-	-	-	14.198,11	3.866,63	8.456,61	401,84	-	-	-	-	-	-	-	12.725,07	(1.473,04)	89,6
2.	**06.**		**Perdagangan**	**3.596,87**	4.002,19	**405,32**	**111,27**	**9.379,66**	**5.551,39**	**235,50**	-	-	-	-	-	-	-	**15.166,55**	**8.114,30**	**4.338,27**	**220,99**	-	-	-	-	-	-	-	**12.673,56**	**(2.492,99)**	**83,5**
2.	06.	01	Dinas Perdagangan	3.596,87	4.002,19	405,32	111,27	9.379,66	5.551,39	235,50	-	-	-	-	-	-	-	15.166,55	8.114,30	4.338,27	220,99	-	-	-	-	-	-	-	12.673,56	(2.492,99)	83,5
Jumlah				940.781,95	957.624,97	20.890,07	101,79	473.918,18	346.900,45	280.766,39	0,00	0,00	13.686,60	8.052,88	0,00	627,85	122.687,08	1.246.639,44	391.631,56	290.933,63	255.977,98	0,00	0,00	11.924,69	3.896,00	0,00	627,85	0,00	954.991,70	(291.647,74)	76,61

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KOTA MADIUN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. Pendidikan
ORGANISASI : 1.01.01. Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**19.992.395.000,00**	**19.897.982.763,27**	**99,53%**	**(94.412.236,73)**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**19.992.395.000,00**	**19.897.982.763,27**	**99,53%**	**(94.412.236,73)**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-			
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	19.992.395.000,00	19.897.982.763,27	99,53%	(94.412.236,73)	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**19.992.395.000,00**	**19.897.982.763,27**	**99,53%**	**(94.412.236,73)**	
5	**BELANJA DAERAH**	**314.606.478.000,00**	**264.488.741.504,43**	**84,07%**	**(50.117.736.495,57)**	Perubahan daerah no 21 tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**219.446.156.000,00**	**183.052.709.656,00**	**83,42%**	**(36.393.446.344,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	219.446.156.000,00	183.052.709.656,00	83,42%	(36.393.446.344,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5.2	**Belanja Langsung**	**95.160.322.000,00**	**81.436.031.848,43**	**85,58%**	**(13.724.290.151,57)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	9.204.524.000,00	7.615.015.650,00	82,73%	(1.589.508.350,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	42.769.791.000,00	37.869.863.567,43	88,54%	(4.899.927.432,57)	
5.2.3	Belanja Modal	43.186.007.000,00	35.951.152.631,00	83,25%	(7.234.854.369,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	27.205.965.000,00	26.152.504.036,00	96,13%	(1.053.460.964,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	7.015.048.000,00	6.598.493.553,00	94,06%	(416.554.447,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	40.690.000,00	32.326.100,00	79,44%	(8.363.900,00)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.375.304.000,00	3.082.898.942,00	48,36%	(3.292.405.058,00)	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.549.000.000,00	84.930.000,00	3,33%	(2.464.070.000,00)	
	Jumlah Belanja	**314.606.478.000,00**	**264.488.741.504,43**	**84,07%**	**(50.117.736.495,57)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(294.614.083.000,00)**	**(244.590.758.741,16)**	**83,02%**	**50.023.324.258,84**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(294.614.083.000,00)**	**(244.590.758.741,16)**	**83,02%**	**50.023.324.258,84**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01. Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**8.646.366.000,00**	**8.899.013.827,26**	**102,92%**	**252.647.827,26**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**8.646.366.000,00**	**8.899.013.827,26**	**102,92%**	**252.647.827,26**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.646.366.000,00	8.899.013.827,26	102,92%	252.647.827,26	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**8.646.366.000,00**	**8.899.013.827,26**	**102,92%**	**252.647.827,26**	
5	**BELANJA DAERAH**	**95.526.352.000,00**	**82.563.648.091,95**	**86,43%**	**(12.962.703.908,05)**	Peraturan Daerah
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**24.374.152.000,00**	**21.643.715.511,00**	**88,80%**	**(2.730.436.489,00)**	No21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	24.374.152.000,00	21.643.715.511,00	88,80%	(2.730.436.489,00)	tentang perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**71.152.200.000,00**	**60.919.932.580,95**	**85,62%**	**(10.232.267.419,05)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	8.456.414.690,00	7.834.742.851,00	92,65%	(621.671.839,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	59.230.621.310,00	49.865.726.729,20	84,19%	(9.364.894.580,80)	
5.2.3	Belanja Modal	3.465.164.000,00	3.219.463.000,75	92,91%	(245.700.999,25)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.254.469.000,00	2.067.988.746,00	91,73%	(186.480.254,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.210.695.000,00	1.151.474.254,75	95,11%	(59.220.745,25)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**95.526.352.000,00**	**82.563.648.091,95**	**86,43%**	**(12.962.703.908,05)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(86.879.986.000,00)**	**(73.664.634.264,69)**	**84,79%**	**13.215.351.735,31**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	(86.879.986.000,00)	(73.664.634.264,69)	84,79%	13.215.351.735,31	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.02. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**75.000.000.000,00**	**71.574.648.715,21**	**95,43%**	**(3.425.351.284,79)**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**75.000.000.000,00**	**71.574.648.715,21**	**95,43%**	**(3.425.351.284,79)**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	75.000.000.000,00	71.574.648.715,21	95,43%	(3.425.351.284,79)	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**75.000.000.000,00**	**71.574.648.715,21**	**95,43%**	**(3.425.351.284,79)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
5	**BELANJA DAERAH**	**96.783.260.000,00**	**92.092.628.784,73**	**95,15%**	**(4.690.631.215,27)**	
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**13.613.133.000,00**	**12.453.047.187,00**	**91,48%**	**(1.160.085.813,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	13.613.133.000,00	12.453.047.187,00	91,48%	(1.160.085.813,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**83.170.127.000,00**	**79.639.581.597,73**	**95,76%**	**(3.530.545.402,27)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	6.255.554.000,00	5.668.098.800,00	90,61%	(587.455.200,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	65.655.021.000,00	64.543.943.842,73	98,31%	(1.111.077.157,27)	
5.2.3	Belanja Modal	11.259.552.000,00	9.427.538.955,00	83,73%	(1.832.013.045,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	11.086.230.000,00	9.267.179.955,00	83,59%	(1.819.050.045,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	173.322.000,00	160.359.000,00	92,52%	(12.963.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**96.783.260.000,00**	**92.092.628.784,73**	**95,15%**	**(4.690.631.215,27)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(21.783.260.000,00)**	**(20.517.980.069,52)**	**94,19%**	**1.265.279.930,48**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
	PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**		**-**	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(21.783.260.000,00)**	**(20.517.980.069,52)**	**94,19%**	**1.265.279.930,48**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. Pekerjaan Umum
ORGANISASI : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.922.000.000,00**	**2.543.695.440,00**	**132,35%**	**621.695.440,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.922.000.000,00**	**2.543.695.440,00**	**132,35%**	**621.695.440,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	1.922.000.000,00	2.543.695.440,00	132,35%	621.695.440,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**1.922.000.000,00**	**2.543.695.440,00**	**132,35%**	**621.695.440,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**150.523.562.000,00**	**138.050.300.561,00**	**91,71%**	**(11.766.215.589,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**6.028.522.000,00**	**5.244.653.507,00**	**87,00%**	**(783.868.493,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	6.028.522.000,00	5.244.653.507,00	87,00%	(783.868.493,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**144.495.040.000,00**	**132.805.647.054,00**	**91,91%**	**(10.982.347.096,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	2.082.786.000,00	1.894.387.050,00	90,95%	(188.398.950,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	5.467.365.000,00	5.176.800.786,00	94,69%	(290.564.214,00)	
5.2.3	Belanja Modal	136.944.889.000,00	125.734.459.218,00	91,81%	(10.503.383.932,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.379.054.000,00	5.087.988.718,00	94,59%	(291.065.282,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	27.765.250.000,00	24.895.101.600,00	89,66%	(2.870.148.400,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	101.167.435.000,00	93.825.264.750,00	92,74%	(7.342.170.250,00)	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.633.150.000,00	1.926.104.150,00	73,15%	-	
	Jumlah Belanja	**150.523.562.000,00**	**138.050.300.561,00**	**91,71%**	**(11.766.215.589,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(148.601.562.000,00)**	**(135.506.605.121,00)**	**91,19%**	**12.387.911.029,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Pendapatan Asli Daerah	-	-		-	
6.1.2	Dana Perimbangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(148.601.562.000,00)**	**(135.506.605.121,00)**	**91,19%**	**12.387.911.029,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
ORGANISASI : 1.04.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
						Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5	**BELANJA DAERAH**	**34.441.955.000,00**	**31.506.724.098,00**	**91,48%**	**(2.641.879.252,00)**	
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.512.001.000,00**	**2.943.000.458,00**	**83,80%**	**(569.000.542,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.512.001.000,00	2.943.000.458,00	83,80%	(569.000.542,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**30.929.954.000,00**	**28.563.723.640,00**	**92,35%**	**(2.072.878.710,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	933.041.000,00	820.249.250,00	87,91%	(112.791.750,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.963.511.000,00	4.476.947.365,00	90,20%	(486.563.635,00)	
5.2.3	Belanja Modal	25.033.402.000,00	23.266.527.025,00	92,94%	(1.473.523.325,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	8.707.401.000,00	8.490.207.630,00	97,51%	(217.193.370,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	7.212.239.000,00	5.955.909.045,00	82,58%	(1.256.329.955,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	9.050.963.000,00	8.769.810.350,00	96,89%	-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	62.799.000,00	50.600.000,00	80,57%	-	
	Jumlah Belanja	**34.441.955.000,00**	**31.506.724.098,00**	**91,48%**	**(2.641.879.252,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(34.441.955.000,00)**	**(31.506.724.098,00)**	**91,48%**	**2.641.879.252,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(34.441.955.000,00)**	**(31.506.724.098,00)**	**91,48%**	**2.641.879.252,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
						perda No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5	**BELANJA DAERAH**	**16.172.178.000,00**	**13.647.762.749,00**	**84,39%**	**(2.524.415.251,00)**	
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**5.287.407.000,00**	**3.979.737.599,00**	**75,27%**	**(1.307.669.401,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	5.287.407.000,00	3.979.737.599,00	75,27%	(1.307.669.401,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**10.884.771.000,00**	**9.668.025.150,00**	**88,82%**	**(1.216.745.850,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	2.330.311.000,00	2.156.765.000,00	92,55%	(173.546.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	5.466.960.000,00	4.721.581.350,00	86,37%	(745.378.650,00)	
5.2.3	Belanja Modal	3.087.500.000,00	2.789.678.800,00	90,35%	(297.821.200,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3.087.500.000,00	2.789.678.800,00	90,35%	(297.821.200,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**16.172.178.000,00**	**13.647.762.749,00**	**84,39%**	**(2.524.415.251,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(16.172.178.000,00)**	**(13.647.762.749,00)**	**84,39%**	**2.524.415.251,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
	PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**		**-**	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(16.172.178.000,00)**	**(13.647.762.749,00)**	**84,39%**	**2.524.415.251,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.05.02. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**33.565.080.000,00**	**31.153.840.753,00**	**92,82%**	**(2.411.159.247,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.555.952.000,00**	**759.445.306,00**	**29,71%**	**(1.796.506.694,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.555.952.000,00	759.445.306,00	29,71%	(1.796.506.694,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**31.009.128.000,00**	**30.394.395.447,00**	**98,02%**	**(614.652.553,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	312.613.000,00	287.333.000,00	91,91%	(25.280.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.078.165.000,00	1.506.745.066,00	72,50%	(571.419.934,00)	
5.2.3	Belanja Modal	28.618.350.000,00	28.600.317.381,00	99,94%	(17.952.619,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	28.387.150.000,00	28.369.197.381,00	99,94%	(17.952.619,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	21.200.000,00	21.120.000,00	99,62%	-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00%	-	
	Jumlah Belanja	**33.565.080.000,00**	**31.153.840.753,00**	**92,82%**	**(2.411.159.247,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(33.565.080.000,00)**	**(31.153.840.753,00)**	**92,82%**	**2.411.159.247,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(33.565.080.000,00)**	**(31.153.840.753,00)**	**92,82%**	**2.411.159.247,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ORGANISASI : 1.06.01. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**14.126.038.000,00**	**10.314.448.632,00**	**73,02%**	**(3.811.589.368,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**4.964.897.000,00**	**2.860.726.468,00**	**57,62%**	**(2.104.170.532,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	4.964.897.000,00	2.860.726.468,00	57,62%	(2.104.170.532,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**9.161.141.000,00**	**7.453.722.164,00**	**81,36%**	**(1.707.418.836,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.779.677.000,00	1.491.997.000,00	83,84%	(287.680.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	6.574.199.000,00	5.295.221.186,00	80,55%	(1.278.977.814,00)	
5.2.3	Belanja Modal	807.265.000,00	666.503.978,00	82,56%	(140.761.022,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	807.265.000,00	666.503.978,00	82,56%	(140.761.022,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**14.126.038.000,00**	**10.314.448.632,00**	**73,02%**	**(3.811.589.368,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(14.126.038.000,00)**	**(10.314.448.632,00)**	**73,02%**	**3.811.589.368,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(14.126.038.000,00)**	**(10.314.448.632,00)**	**73,02%**	**3.811.589.368,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
ORGANISASI : 1.07.01. Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**7.965.766.000,00**	**7.090.988.983,00**	**89,02%**	**(874.777.017,00)**	Perda No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.325.368.000,00**	**2.075.380.088,00**	**89,25%**	**(249.987.912,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.325.368.000,00	2.075.380.088,00	89,25%	(249.987.912,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**5.640.398.000,00**	**5.015.608.895,00**	**88,92%**	**(624.789.105,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.001.984.000,00	951.812.500,00	94,99%	(50.171.500,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.690.414.000,00	3.146.005.197,00	85,25%	(544.408.803,00)	
5.2.3	Belanja Modal	948.000.000,00	917.791.198,00	96,81%	(30.208.802,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	748.000.000,00	717.951.198,00	95,98%	(30.048.802,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	200.000.000,00	199.840.000,00	99,92%	(160.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**7.965.766.000,00**	**7.090.988.983,00**	**89,02%**	**(874.777.017,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(7.965.766.000,00)**	**(7.090.988.983,00)**	**89,02%**	**874.777.017,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(7.965.766.000,00)**	**(7.090.988.983,00)**	**89,02%**	**874.777.017,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1.08.01. Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**235.000.000,00**	**330.997.500,00**	**140,85%**	**95.997.500,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**235.000.000,00**	**330.997.500,00**	**140,85%**	**95.997.500,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	235.000.000,00	330.997.500,00	140,85%	95.997.500,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**235.000.000,00**	**330.997.500,00**	**140,85%**	**95.997.500,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**23.849.091.000,00**	**19.400.239.275,00**	**81,35%**	**(1.935.905.049,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**10.487.002.000,00**	**9.167.024.551,00**	**87,41%**	**(1.319.977.449,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	10.487.002.000,00	9.167.024.551,00	87,41%	(1.319.977.449,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**13.362.089.000,00**	**10.233.214.724,00**	**76,58%**	**(615.927.600,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	906.034.000,00	829.306.000,00	91,53%	(98,163,000.00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	7.658.938.000,00	5.222.719.324,00	68,19%	(235,997,109.00)	
5.2.3	Belanja Modal	4.797.117.000,00	4.181.189.400,00	87,16%	(615.927.600,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	3.797.117.000,00	3.295.621.200,00	86,79%	(501.495.800,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.000.000.000,00	885.568.200,00	88,56%	(114.431.800,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**23.849.091.000,00**	**19.400.239.275,00**	**81,35%**	**(1.935.905.049,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(23.614.091.000,00)**	**(19.069.241.775,00)**	**80,75%**	**2.031.902.549,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(23.614.091.000,00)**	**(19.069.241.775,00)**	**80,75%**	**2.031.902.549,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.09. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI : 1.09.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
5	**BELANJA DAERAH**	**8.521.748.000,00**	**8.058.694.125,00**	**94,57%**	**(463.053.875,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.561.816.000,00**	**2.323.462.657,00**	**90,70%**	**(238.353.343,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.561.816.000,00	2.323.462.657,00	**90,70%**	(238.353.343,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5.2	**Belanja Langsung**	**5.959.932.000,00**	**5.735.231.468,00**	**96,23%**	**(224.700.532,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.407.949.000,00	1.346.502.000,00	**95,64%**	(61.447.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	2.951.983.000,00	2.789.545.460,00	**94,50%**	(162.437.540,00)	
5.2.3	Belanja Modal	1.600.000.000,00	1.599.184.008,00	**99,95%**	(815.992,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.600.000.000,00	1.599.184.008,00	99,95%	(815.992,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(8.521.748.000,00)**	**(8.058.694.125,00)**	**94,57%**	**463.053.875,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
	PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**		**-**	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(8.521.748.000,00)**	**(8.058.694.125,00)**	**94,57%**	**463.053.875,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10. Perhubungan
ORGANISASI : 1.10.01. Dinas Perhubungan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang (-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.963.491.000,00**	**2.022.711.400,00**	**103,02%**	**59.220.400,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.963.491.000,00**	**2.022.711.400,00**	**103,02%**	**59.220.400,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	1.963.491.000,00	2.022.711.400,00	103,02%	59.220.400,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**1.963.491.000,00**	**2.022.711.400,00**	**103,02%**	**59.220.400,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**15.122.991.000,00**	**12.886.494.383,00**	**85,21%**	**(2.230.446.617,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**6.747.293.000,00**	**5.153.143.468,00**	**76,37%**	**(1.594.149.532,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	6.747.293.000,00	5.153.143.468,00	76,37%	(1.594.149.532,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang (-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**8.375.698.000,00**	**7.733.350.915,00**	**92,33%**	**(636.297.085,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.511.655.000,00	1.365.045.300,00	90,30%	(146.609.700,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.493.789.000,00	4.096.834.268,00	91,17%	(396.954.732,00)	
5.2.3	Belanja Modal	2.370.254.000,00	2.271.471.347,00	95,83%	(92.732.653,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2.261.204.000,00	2.172.971.347,00	96,10%	(88.232.653,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	103.000.000,00	98.500.000,00	95,63%	(4.500.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.050.000,00	-	0,00%	-	
	Jumlah Belanja	**15.122.991.000,00**	**12.886.494.383,00**	**85,21%**	**(2.230.446.617,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(13.159.500.000,00)**	**(10.863.782.983,00)**	**82,55%**	**2.289.667.017,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang (-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(13.159.500.000,00)**	**(10.863.782.983,00)**	**82,55%**	**2.289.667.017,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
ORGANISASI : 1.11.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**19.609.943.000,00**	**18.580.893.190,00**	**94,75%**	**(1.029.049.810,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.894.190.000,00**	**2.347.628.557,00**	**81,12%**	**(546.561.443,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.894.190.000,00	2.347.628.557,00	81,12%	(546.561.443,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**16.715.753.000,00**	**16.233.264.633,00**	**97,11%**	**(482.488.367,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.535.160.000,00	1.450.651.050,00	94,50%	(84.508.950,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	6.796.697.000,00	6.557.168.823,00	96,48%	(239.528.177,00)	
5.2.3	Belanja Modal	8.383.896.000,00	8.225.444.760,00	98,11%	(158.451.240,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.883.896.000,00	5.836.544.760,00	99,20%	(47.351.240,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.388.900.000,00	95,56%	(111.100.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**19.609.943.000,00**	**18.580.893.190,00**	**94,75%**	**(1.029.049.810,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(19.609.943.000,00)**	**(18.580.893.190,00)**	**94,75%**	**1.029.049.810,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(19.609.943.000,00)**	**(18.580.893.190,00)**	**94,75%**	**1.029.049.810,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12. Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
ORGANISASI : 1.12.01. Dinas Penanaman Modal, PTSP. Koperasi dan Usaha Mikro

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**8.345.922.000,00**	**7.272.576.311,98**	**87,14%**	**(1.073.345.688,02)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.911.438.000,00**	**2.532.940.518,00**	**87,00%**	**(378.497.482,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.911.438.000,00	2.532.940.518,00	87,00%	(378.497.482,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**5.434.484.000,00**	**4.739.635.793,98**	**87,21%**	**(694.848.206,02)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	780.420.000,00	699.005.800,00	89,57%	(81.414.200,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.093.493.000,00	2.543.547.392,00	82,22%	(549.945.608,00)	
5.2.3	Belanja Modal	1.560.571.000,00	1.497.082.601,98	95,93%	(63.488.398,02)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.198.371.000,00	1.146.768.601,98	95,69%	(51.602.398,02)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	362.200.000,00	350.314.000,00	96,72%	(11.886.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**8.345.922.000,00**	**7.272.576.311,98**	**87,14%**	**(1.073.345.688,02)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(8.345.922.000,00)**	**(7.272.576.311,98)**	**87,14%**	**1.073.345.688,02**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(8.345.922.000,00)**	**(7.272.575.311,98)**	**87,14%**	**1.073.345.688,02**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13. Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 1.13.01. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**200.425.000,00**	**201.936.389,00**	**100,75%**	**1.511.389,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**200.425.000,00**	**201.936.389,00**	**100,75%**	**1.511.389,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-			
4.1.2	Retribusi Daerah	200.425.000,00	201.936.389,00	100,75%	1.511.389,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**200.425.000,00**	**201.936.389,00**	**100,75%**	**1.511.389,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**15.133.069.000,00**	**13.219.786.600,00**	**87,36%**	**(1.913.282.400,00)**	Perubahan daerah
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.567.574.000,00**	**2.109.161.953,00**	**82,15%**	**(458.412.047,00)**	no 21 tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	2.567.574.000,00	2.109.161.953,00	82,15%	(458.412.047,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**12.565.495.000,00**	**11.110.624.647,00**	**88,42%**	**(1.454.870.353,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.726.418.000,00	1.485.730.000,00	86,06%	(240.688.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	10.331.287.000,00	9.260.594.885,00	89,64%	(1.070.692.115,00)	
5.2.3	Belanja Modal	507.790.000,00	364.299.762,00	71,74%	(143.490.238,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	485.790.000,00	354.299.762,00	72,93%	(131.490.238,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12.000.000,00	-	0,00%	(12.000.000,00)	
	Jumlah Belanja	**15.133.069.000,00**	**13.219.786.600,00**	**87,36%**	**(1.913.282.400,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(14.932.644.000,00)**	**(13.017.850.211,00)**	**87,18%**	**1.914.793.789,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(14.932.644.000,00)**	**(13.017.850.211,00)**	**87,18%**	**1.914.793.789,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14. Perpustakaan dan Kearsipan
ORGANISASI : 1.14.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
5	**BELANJA DAERAH**	**4.221.301.000,00**	**3.613.465.706,00**	**66,20**	**(607.835.294,00)**	Peraturan daeran no 21 tahun 2017 tentang perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.015.804.000,00**	**1.587.581.306,00**	**70,16**	**(428.222.694,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.015.804.000,00	1.587.581.306,00	70,16	(428.222.694,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**2.205.497.000,00**	**2.025.884.400,00**	**64,39**	**(179.612.600,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	420.815.000,00	395.326.000,00	71,78	(25.489.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.169.702.000,00	1.061.273.400,00	79,88	(108.428.600,00)	
5.2.3	Belanja Modal	614.980.000,00	569.285.000,00	54,94	(45.695.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	514.980.000,00	473.309.000,00	82,72	(41.671.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-	23,69	-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	95.976.000,00	66,42	(4.024.000,00)	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	0,00	-	
	Jumlah Belanja	**4.221.301.000,00**	**3.613.465.706,00**	**66,20**	**(607.835.294,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(4.221.301.000,00)**	**(3.613.465.706,00)**	**66,20**	**607.835.294,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	0,00	-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	0,00	-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	0,00	-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	(4.221.301.000,00)	(3.613.465.706,00)		607.835.294,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. Kepala Daerah dan DPRD
ORGANISASI : 1.15.01. Walikota dan Wakil Walikota

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**798.975.000,00**	**561.900.334,00**	**70,33%**	**(237.074.666,00)**	Peraturan Daerah
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**798.975.000,00**	**561.900.334,00**	**70,33%**	**(237.074.666,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	798.975.000,00	561.900.334,00	70,33%	(237.074.666,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	-	-		-	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-		-	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-		-	
5.2.3	Belanja Modal	-	-		-	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		-	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**798.975.000,00**	**561.900.334,00**	**70,33%**	**(237.074.666,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(798.975.000,00)**	**(561.900.334,00)**	**70,33%**	**237.074.666,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(798.975.000,00)**	**(561.900.334,00)**	**70,33%**	**237.074.666,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15. Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.15.02. DPRD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**11.845.527.000,00**	**8.223.883.860,00**	**69,43%**	**(3.621.643.140,00)**	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**11.845.527.000,00**	**8.223.883.860,00**	**69,43%**	**(3.621.643.140,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	11.845.527.000,00	8.223.883.860,00	69,43%	(3.621.643.140,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**-**	**-**		**-**	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-		-	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-		-	
5.2.3	Belanja Modal	-	-		-	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		-	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**11.845.527.000,00**	**8.223.883.860,00**	**69,43%**	**(3.621.643.140,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(11.845.527.000,00)**	**(8.223.883.860,00)**	**69,43%**	**3.621.643.140,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(11.845.527.000,00)**	**(8.223.883.860,00)**	**69,43%**	**3.621.643.140,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. Unsur Staf
ORGANISASI : 1.16.01.01 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**4.754.465.000,00**	**4.199.862.732,00**	**88,34%**	**(554.602.268,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**209.700.000,00**	**163.150.000,00**	**77,80%**	**(46.550.000,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	209.700.000,00	163.150.000,00	77,80%	(46.550.000,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**4.544.765.000,00**	**4.036.712.732,00**	**88,82%**	**(508.052.268,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.055.277.000,00	958.497.000,00	90,83%	(96.780.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.414.488.000,00	3.004.804.732,00	88,00%	(409.683.268,00)	
5.2.3	Belanja Modal	75.000.000,00	73.411.000,00	97,88%	(1.589.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		-	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	73.411.000,00	97,88%	(1.589.000,00)	
	Jumlah Belanja	**4.754.465.000,00**	**4.199.862.732,00**	**88,34%**	**(554.602.268,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(4.754.465.000,00)**	**(4.199.862.732,00)**	**88,34%**	**554.602.268,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**		-	
	PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(4.754.465.000,00)**	**(4.199.862.732,00)**	**88,34%**	**554.602.268,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : **1.16. Unsur Staf**
UNIT KERJA : **1.16.01.02. Bagian Organisasi**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
					-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
					-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.956.840.000,00**	**2.566.087.250,00**	**86,49%**	**(400.752.750,00)**	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**261.700.000,00**	**166.150.000,00**	**63,49%**	**(95.550.000,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	261.700.000,00	166.150.000,00	63,49%	(95.550.000,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**2.705.140.000,00**	**2.399.937.250,00**	**88,72%**	**(305.202.750,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	831.972.000,00	736.870.000,00	88,57%	(95.102.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.666.618.000,00	1.458.592.750,00	87,52%	(208.025.250,00)	
5.2.3	Belanja Modal	206.550.000,00	204.474.500,00	99,00%	(2.075.500,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	206.550.000,00	204.474.500,00	99,00%	(2.075.500,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**2.966.840.000,00**	**2.566.087.250,00**	**86,49%**	**(400.752.750,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(2.966.840.000,00)**	**(2.566.087.250,00)**	**86,49%**	**400.752.750,00**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(2.966.840.000,00)**	**(2.566.087.250,00)**	**86,49%**	**400.752.750,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. Unsur Staf
UNIT KERJA : 1.16.01.03. Bagian Umum

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**22.083.320.000,00**	**17.851.896.667,50**	**80,84%**	**(4.231.423.332,50)**	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**9.265.091.000,00**	**7.922.482.684,00**	**85,51%**	**(1.342.608.316,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	9.265.091.000,00	7.922.482.684,00	85,51%	(1.342.608.316,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**12.818.229.000,00**	**9.929.413.983,50**	**77,46%**	**(2.888.815.016,50)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.519.226.000,00	1.451.786.000,00	95,56%	(67.440.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	9.471.352.000,00	7.280.388.378,00	76,87%	(2.190.963.622,00)	
5.2.3	Belanja Modal	1.827.651.000,00	1.197.239.605,50	65,51%	(630.411.394,50)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.627.651.000,00	1.000.714.605,50	61,48%	(626.936.394,50)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	200.000.000,00	196.525.000,00	98,26%	(3.475.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**22.083.320.000,00**	**17.851.896.667,50**	**80,84%**	**(4.231.423.332,50)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(22.083.320.000,00)**	**(17.851.896.667,50)**	**80,84%**	**4.231.423.332,50**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(22.083.320.000,00)**	**(17.851.896.667,50)**	**80,84%**	**4.231.423.332,50**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.16.01. Sekretariat Daerah
UNIT KERJA : 1.16.01.04. Bagian Hukum

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	8
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**3.662.765.000,00**	**3.168.725.260,00**	**86,51%**	**(494.039.740,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**153.150.000,00**	**144.150.000,00**	**94,12%**	**(9.000.000,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	153.150.000,00	144.150.000,00	94,12%	(9.000.000,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	8
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**3.509.615.000,00**	**3.024.575.260,00**	**86,18%**	**(485.039.740,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	2.265.134.000,00	1.914.837.000,00	84,54%	(350.297.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.195.481.000,00	1.061.518.260,00	88,79%	(133.962.740,00)	
5.2.3	Belanja Modal	49.000.000,00	48.220.000,00	98,41%	(780.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	49.000.000,00	48.220.000,00	98,41%	(780.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**3.662.765.000,00**	**3.168.725.260,00**	**86,51%**	**(494.039.740,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(3.662.765.000,00)**	**(3.168.725.260,00)**	**86,51%**	**494.039.740,00**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	8
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	(3.662.765.000,00)	(3.168.725.260,00)	86,51%	494.039.740,00	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16. Pemerintahan Umum
ORGANISASI : 1.16.01. Sekretariat Daerah
UNIT KERJA : 1.16.01.05. Bagian Administrasi Perekonomian Sosial

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**4.977.285.000,00**	**4.283.785.900,00**	**86,07%**	**(693.499.100,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**259.100.000,00**	**223.550.000,00**	**86,28%**	**(35.550.000,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	259.100.000,00	223.550.000,00	86,28%	(35.550.000,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**4.718.185.000,00**	**4.060.235.900,00**	**86,06%**	**(657.949.100,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	449.838.000,00	386.448.000,00	85,91%	(63.390.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.071.641.000,00	3.502.567.900,00	86,02%	(569.073.100,00)	
5.2.3	Belanja Modal	196.706.000,00	171.220.000,00	87,04%	(25.486.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	196.706.000,00	171.220.000,00	87,04%	(25.486.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**4.977.285.000,00**	**4.283.785.900,00**	**86,07%**	**(693.499.100,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(4.977.285.000,00)**	**(4.283.785.900,00)**	**86,07%**	**693.499.100,00**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(4.977.285.000,00)**	**(4.283.785.900,00)**	**86,07%**	**693.499.100,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAH : 1.16. Unsur Staf
UNIT KERJA : 1.16.01.06 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
					-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
					-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**2.019.133.000,00**	**1.853.916.276,00**	**91,82%**	**(165.216.724,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**235.700.000,00**	**188.450.000,00**	**79,95%**	**(47.250.000,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	235.700.000,00	188.450.000,00	79,95%	(47.250.000,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**1.783.433.000,00**	**1.665.466.276,00**	**93,39%**	**(117.966.724,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	825.483.000,00	797.977.300,00	96,67%	(27.505.700,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	877.950.000,00	787.551.156,00	89,70%	(90.398.844,00)	
5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	79.937.820,00	99,92%	(62.180,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	80.000.000,00	79.937.820,00	99,92%	(62.180,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**2.019.133.000,00**	**1.853.916.276,00**	**91,82%**	**(165.216.724,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(2.019.133.000,00)**	**(1.853.916.276,00)**	**91,82%**	**165.216.724,00**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(2.019.133.000,00)**	**(1.853.916.276,00)**	**91,82%**	**165.216.724,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. **Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadp Tugas dan Fungsi DPRD**
ORGANISASI : 1.17.01. **Sekretariat DPRD**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
					-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
					-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**28.962.372.000,00**	**17.984.556.770,00**	**62,10%**	**(10.977.815.230,00)**	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.849.289.000,00**	**2.041.883.632,00**	**71,66%**	**(807.405.368,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.849.289.000,00	2.041.883.632,00	71,66%	(807.405.368,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**26.113.083.000,00**	**15.942.673.138,00**	**61,05%**	**(10.170.409.862,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	797.892.000,00	625.980.000,00	78,45%	(171.912.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	24.777.878.000,00	14.817.846.363,00	59,80%	(9.960.031.637,00)	
5.2.3	Belanja Modal	537.313.000,00	498.846.775,00	92,84%	(38.466.225,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	537.313.000,00	498.846.775,00	92,84%	(38.466.225,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**28.962.372.000,00**	**17.984.556.770,00**	**62,10%**	**(10.977.815.230,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(28.962.372.000,00)**	**(17.984.556.770,00)**	**62,10%**	**10.977.815.230,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(28.962.372.000,00)**	**(17.984.556.770,00)**	**62,10%**	**10.977.815.230,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18. Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
ORGANISASI : 1.18.01. Badan Kepegawaian Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**170.000.000,00**	**237.700.000,00**	**139,82%**	**67.700.000,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**170.000.000,00**	**237.700.000,00**	**139,82%**	**67.700.000,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	170.000.000,00	237.700.000,00	139,82%	67.700.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**170.000.000,00**	**237.700.000,00**	**139,82%**	**67.700.000,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**7.518.238.000,00**	**6.672.113.864,00**	**88,75%**	**(831.210.136,00)**	Peraturan Daerah No 21 tahun 2017 tentang perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.126.137.000,00**	**2.768.341.114,00**	**88,55%**	**(357.795.886,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.126.137.000,00	2.768.341.114,00	88,55%	(357.795.886,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**4.392.101.000,00**	**3.903.772.750,00**	**88,88%**	**(473.414.250,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	994.199.000,00	883.573.000,00	88,87%	(110.626.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.137.923.000,00	2.780.204.450,00	88,60%	(357.718.550,00)	
5.2.3	Belanja Modal	259.979.000,00	239.995.300,00	92,31%	(5.069.700,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	163.665.000,00	158.595.300,00	96,90%	(5.069.700,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	96.314.000,00	81.400.000,00	84,52%	-	
	Jumlah Belanja	**7.518.238.000,00**	**6.672.113.864,00**	**88,75%**	**(831.210.136,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(7.348.238.000,00)**	**(6.434.413.864,00)**	**87,56%**	**898.910.136,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(7.348.238.000,00)**	**(6.434.413.864,00)**	**87,56%**	**898.910.136,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. Pemerintahan Umum

ORGANISASI : 1.19.01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.178.058.000,00**	**6.762.658.573,00**	**109,46%**	**584.600.573,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**6.178.058.000,00**	**6.762.658.573,00**	**109,46%**	**584.600.573,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	6.178.058.000,00	6.762.658.573,00	109,46%	584.600.573,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum				-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus				-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai				-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya				-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus				-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya				-	
	Jumlah Pendapatan	**6.178.058.000,00**	**6.762.658.573,00**	**109,46%**	**584.600.573,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**54.097.098.000,00**	**30.294.019.474,91**	**56,00%**	**(23.803.078.525,09)**	
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**19.440.539.000,00**	**8.789.475.325,00**	**45,21%**	**(10.651.063.675,00)**	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	19.440.539.000,00	8.789.475.325,00	45,21%	(10.651.063.675,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial		-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5,2	**Belanja Langsung**	**34.656.559.000,00**	**21.504.544.149,91**	**62,05%**	**(13.152.014.850,09)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	3.673.818.000,00	3.459.088.000,00	94,16%	(214.730.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	30.442.741.000,00	17.508.810.724,91	57,51%	(12.933.930.275,09)	
5.2.3	Belanja Modal	540.000.000,00	536.645.425,00	99,38%	(3.354.575,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	340.000.000,00	336.878.000,00	99,08%	(3.122.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.767.425,00	99,88%	(232.575,00)	
	Jumlah Belanja	**54.097.098.000,00**	**30.294.019.474,91**	**56,00%**	**(23.803.078.525,09)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(47.919.040.000,00)**	**(23.531.360.901,91)**	**49,11%**	**24.387.679.098,09**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(47.919.040.000,00)**	**(23.531.360.901,91)**	**49,11%**	**24.387.679.098,09**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. Penunjang Keuangan

ORGANISASI : 1.19.02 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**762.962.099.000,00**	**763.279.592.981,46**	**100,04%**	**317.493.981,46**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**14.193.398.000,00**	**36.263.337.025,46**	**255,49%**	**22.069.939.025,46**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	110,14%	1.226.851.415,39	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.100.000.000,00	22.943.087.610,07	1092,53%	20.843.087.610,07	
4,2	**Dana Perimbangan**	**679.903.441.000,00**	**638.973.881.834,00**	**93,98%**	**(40.929.559.166,00)**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	64.832.652.000,00	46.005.454.815,00	70,96%	(18.827.197.185,00)	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	502.392.070.000,00	100,00%	-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.154.318.000,00	77.267.422.860,00	77,93%	(21.886.895.140,00)	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	13.524.401.000,00	13.308.934.159,00	98,41%	(215.466.841,00)	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**68.865.260.000,00**	**88.042.374.122,00**	**127,85%**	**19.177.114.122,00**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	131,62%	19.177.114.122,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	716.850.000,00	716.850.000,00	100,00%	-	
	Jumlah Pendapatan	**762.962.099.000,00**	**763.279.592.981,46**	**100,04%**	**317.493.981,46**	
5	**BELANJA DAERAH**	**145.054.411.594,13**	**16.448.536.089,31**	**11,34%**	**(128.605.875.504,82)**	
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**145.054.411.594,13**	**16.448.536.089,31**	**11,34%**	**(128.605.875.504,82)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	-	-		-	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	13.686.596.000,00	11.924.689.389,31	87,13%	(1.761.906.610,69)	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.052.880.000,00	3.896.000.000,00	48,38%	(4.156.880.000,00)	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	627.851.000,00	627.846.700,00	100,00%	(4.300,00)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	122.687.084.594,13	-	0,00%	(122.687.084.594,13)	
5,2	**Belanja Langsung**	**-**	**-**		**-**	
5.2.1	Belanja Pegawai	-	-		-	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	-	-		-	
5.2.3	Belanja Modal	-	-		-	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		-	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**145.054.411.594,13**	**16.448.536.089,31**	**11,34%**	**(128.605.875.504,82)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**617.907.687.405,87**	**746.831.056.892,15**	**120,86%**	**128.923.369.486,28**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**305.857.486.594,13**	**305.857.486.594,13**	**100,00**	**-**	
6.1.1	Pendapatan Asli Daerah	14.759.189.827,80	14.759.189.827,80	100,00%	-	
6.1.2	Dana Perimbangan	(62.257.218.794,00)	(62.257.218.794,00)		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.199.693.504,00	4.199.693.504,00		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	349.155.822.056,33	349.155.822.056,33		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**305.857.486.594,13**	**305.857.486.594,13**	**100,00%**	-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi)	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	**305.857.486.594,13**	**305.857.486.594,13**	**100,00%**	-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**923.765.174.000,00**	**1.052.688.543.486,28**	**113,96%**	**128.923.369.486,28**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. Penunjang Keuangan
ORGANISASI : 1.19.03. Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**58.000.000.000,00**	**75.435.177.803,44**	**130,06%**	**17.435.177.803,44**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**58.000.000.000,00**	**75.435.177.803,44**	**130,06%**	**17.435.177.803,44**	
4.1.1	Pajak Daerah	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	129,70%	17.224.831.585,44	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	210.346.218,00		210.346.218,00	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**58.000.000.000,00**	**75.435.177.803,44**	**130,06%**	**17.435.177.803,44**	
5	**BELANJA DAERAH**	**9.440.786.000,00**	**8.329.402.931,00**	**88,23%**	**(1.111.383.069,00)**	Peraturan Daerah No 21 tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**6.724.582.000,00**	**6.070.240.681,00**	**90,27%**	**(654.341.319,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	6.724.582.000,00	6.070.240.681,00	90,27%	(654.341.319,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**2.716.204.000,00**	**2.259.162.250,00**	**83,17%**	**(457.041.750,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.106.104.000,00	847.633.000,00	76,63%	(258.471.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.415.100.000,00	1.229.036.550,00	86,85%	(186.063.450,00)	
5.2.3	Belanja Modal	195.000.000,00	182.492.700,00	93,59%	(12.507.300,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	195.000.000,00	182.492.700,00	93,59%	(12.507.300,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**9.440.786.000,00**	**8.329.402.931,00**	**88,23%**	**(1.111.383.069,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**48.559.214.000,00**	**67.105.774.872,44**	**138,19%**	**18.546.560.872,44**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**48.559.214.000,00**	**67.105.774.872,44**	**138,19%**	**18.546.560.872,44**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ORGANISASI : 1.20.01. Inspektorat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**-**	**-**		**-**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**-**	**-**		**-**	
5	**BELANJA DAERAH**	**5.331.100.000,00**	**4.791.223.976,00**	**89,87%**	**(539.876.024,00)**	Peraturan Daerah No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.571.705.000,00**	**2.245.117.735,00**	**87,30%**	**(326.587.265,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	2.571.705.000,00	2.245.117.735,00	87,30%	(326.587.265,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**2.759.395.000,00**	**2.546.106.241,00**	**92,27%**	**(213.288.759,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.555.578.000,00	1.456.754.700,00	93,65%	(98.823.300,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.116.867.000,00	1.003.831.541,00	89,88%	(113.035.459,00)	
5.2.3	Belanja Modal	86.950.000,00	85.520.000,00	98,36%	(1.430.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	86.950.000,00	85.520.000,00	98,36%	(1.430.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**5.331.100.000,00**	**4.791.223.976,00**	**89,87%**	**(539.876.024,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(5.331.100.000,00)**	**(4.791.223.976,00)**	**89,87%**	**539.876.024,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**-**	**-**		**-**	
	PEMBIAYAAN NETO	**-**	**-**		**-**	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(5.331.100.000,00)**	**(4.791.223.976,00)**	**89,87%**	**539.876.024,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.21. Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
ORGANISASI : 1.21.01. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**8.045.539.000,00**	**6.925.987.185,00**	**86,08%**	**(1.119.551.815,00)**	Peraturan Daerah No
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.075.974.000,00**	**2.750.479.122,00**	**89,42%**	**(325.494.878,00)**	21 Tahun 2017 tentang
5.1.1	Belanja Pegawai	3.075.974.000,00	2.750.479.122,00	89,42%	(325.494.878,00)	Perubahan APBD 2017
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**4.969.565.000,00**	**4.175.508.063,00**	**84,02%**	**(794.056.937,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	2.269.993.000,00	2.029.076.000,00	89,39%	(240.917.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	1.925.772.000,00	1.411.938.675,00	73,32%	(513.833.325,00)	
5.2.3	Belanja Modal	773.800.000,00	734.493.388,00	94,92%	(39.306.612,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	198.800.000,00	194.171.788,00	97,67%	(4.628.212,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	575.000.000,00	540.321.600,00	93,97%	(34.678.400,00)	
	Jumlah Belanja	**8.045.539.000,00**	**6.925.987.185,00**	**86,08%**	**(1.119.551.815,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(8.045.539.000,00)**	**(6.925.987.185,00)**	**86,08%**	**1.119.551.815,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(8.045.539.000,00)**	**(6.925.987.185,00)**	**86,08%**	**1.119.551.815,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22. Kecamatan

ORGANISASI : 1.22.01. Kecamatan Kartoharjo

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**935.000.000,00**	**1.265.788.437,00**	**135,38%**	**330.788.437,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**935.000.000,00**	**1.265.788.437,00**	**135,38%**	**330.788.437,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	935.000.000,00	1.265.788.437,00	135,38%	330.788.437,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		**-**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		**-**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**935.000.000,00**	**1.265.788.437,00**	**135,38%**	**330.788.437,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**13.893.594.000,00**	**12.449.302.624,00**	**89,60%**	**(1.444.291.376,00)**	Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**7.500.435.000,00**	**6.510.841.570,00**	86,81%	**(989.593.430,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	7.500.435.000,00	6.510.841.570,00	86,81%	(989.593.430,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**6.393.159.000,00**	**5.938.461.054,00**	**92,89%**	**(454.697.946,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	825.635.000,00	792.072.000,00	95,93%	(33.563.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.433.774.000,00	4.063.207.754,00	91,64%	(370.566.246,00)	
5.2.3	Belanja Modal	1.133.750.000,00	1.083.181.300,00	95,54%	(50.568.700,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	777.000.000,00	730.414.500,00	94,00%	(46.585.500,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	356.750.000,00	352.766.800,00	98,88%	(3.983.200,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**13.893.594.000,00**	**12.449.302.624,00**	**89,60%**	**(1.444.291.376,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(12.958.594.000,00)**	**(11.183.514.187,00)**	**86,30%**	**1.775.079.813,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. **Pemerintahan Umum**

ORGANISASI : 1.22.02. **Kantor Kecamatan Manguharjo**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**506.500.000,00**	**615.401.395,00**	**121,50%**	**108.901.395,00**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**506.500.000,00**	**615.401.395,00**	**121,50%**	**108.901.395,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	506.500.000,00	615.401.395,00	121,50%	108.901.395,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
					-	
4.2	**Dana Perimbangan**	**-**	**-**		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
					-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**-**	**-**		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**506.500.000,00**	**615.401.395,00**	**121,50%**	**108.901.395,00**	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**13.448.951.000,00**	**11.895.156.683,00**	**88,45%**	**(1.553.794.317,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**7.640.291.000,00**	**6.596.340.987,00**	**86,34%**	**(1.043.950.013,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	7.640.291.000,00	6.596.340.987,00	86,34%	(1.043.950.013,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**5.808.660.000,00**	**5.298.815.696,00**	**91,22%**	**(509.844.304,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	654.732.000,00	605.704.000,00	92,51%	(49.028.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.391.083.000,00	3.961.380.696,00	90,21%	(429.702.304,00)	
5.2.3	Belanja Modal	762.845.000,00	731.731.000,00	95,92%	(31.114.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	576.595.000,00	548.941.000,00	95,20%	(27.654.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	186.250.000,00	182.790.000,00	98,14%	(3.460.000,00)	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**13.448.951.000,00**	**11.895.156.683,00**	**88,45%**	**(1.553.794.317,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(12.942.451.000,00)**	**(11.279.755.288,00)**	**87,15%**	**1.662.695.712,00**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		-	
					-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi)	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(12.942.451.000,00)**	**(11.279.755.288,00)**	**87,15%**	**1.662.695.712,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. Pemerintahan Umum

ORGANISASI : 1.22.03. Kantor Kecamatan Taman

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**400.000.000,00**	**481.455.277,50**	**120,36%**	**81.455.277,50**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**400.000.000,00**	**481.455.277,50**	**120,36%**	**81.455.277,50**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	400.000.000,00	481.455.277,50	120,36%	81.455.277,50	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
					-	
4.2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
					-	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**400.000.000,00**	**481.455.277,50**	**120,36%**	**81.455.277,50**	
					-	
5	**BELANJA DAERAH**	**12.506.557.000,00**	**11.146.550.184,00**	**89,13%**	**(1.360.006.816,00)**	Peraturan Daerah
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**7.514.123.000,00**	**6.819.050.802,00**	**90,75%**	**(695.072.198,00)**	Nomor 02 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	7.514.123.000,00	6.819.050.802,00	90,75%	(695.072.198,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
					-	
5.2	**Belanja Langsung**	**4.992.434.000,00**	**4.327.499.382,00**	**86,68%**	**(664.934.618,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	834.750.000,00	777.582.000,00	93,15%	(57.168.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.950.184.000,00	3.343.565.248,00	84,64%	(606.618.752,00)	
5.2.3	Belanja Modal	207.500.000,00	206.352.134,00	99,45%	(1.147.866,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	207.500.000,00	206.352.134,00	99,45%	(1.147.866,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**12.506.557.000,00**	**11.146.550.184,00**	**89,13%**	**(1.360.006.816,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(12.106.557.000,00)**	**(10.665.094.906,50)**	**88,09%**	**1.441.462.093,50**	
					-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**-**		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
					-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi)	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	(12.106.557.000,00)	(10.665.094.906,50)	88,09%	1.441.462.093,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.23. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ORGANISASI : 1.23.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	-	-		-	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	-	-		-	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	-	-		-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-		-	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	-	-		-	
5	**BELANJA DAERAH**	**7.353.086.000,00**	**6.004.934.365,00**	**81,67%**	**(1.348.151.635,00)**	Peraturan Daerah
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.722.236.000,00**	**2.317.733.735,00**	**85,14%**	**(404.502.265,00)**	Nomor 21 Tahun 2017
5.1.1	Belanja Pegawai	2.722.236.000,00	2.317.733.735,00	85,14%	(404.502.265,00)	tentang Perubahan
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	APBD TA 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**4.630.850.000,00**	**3.687.200.630,00**	**79,62%**	**(943.649.370,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.196.950.000,00	898.209.514,00	75,04%	(298.740.486,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.433.900.000,00	2.788.991.116,00	81,22%	(644.908.884,00)	
5.2.3	Belanja Modal	-	-		-	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-		-	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**7.353.086.000,00**	**6.004.934.365,00**	**81,67%**	**(1.348.151.635,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(7.353.086.000,00)**	**(6.004.934.365,00)**	**81,67%**	**1.348.151.635,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**		**-**	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**-**	**-**		**-**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	-	-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(7.353.086.000,00)**	**(6.004.934.365,00)**	**81,67%**	**1.348.151.635,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01. Pertanian, Pangan, Kelautan dan Peikanan
ORGANISASI : 2.01.01. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**73.744.000,00**	**74.022.400,00**	**100,38%**	**278.400,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**73.744.000,00**	**74.022.400,00**	**100,38%**	**278.400,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	58.244.000,00	52.774.400,00	90,61%	(5.469.600,00)	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15.500.000,00	21.248.000,00	137,08%	5.748.000,00	
4,2	Dana Perimbangan	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	**Dana Bagi Hasil Cukai**	-	-		-	
4,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	**Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus**	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**73.744.000,00**	**74.022.400,00**	**100,38%**	**278.400,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**14.198.114.000,00**	**12.725.069.047,00**	**89,63%**	**(1.473.044.953,00)**	Peraturan Daerah N0 21 Tahun 2017 tentang perubahan APBD TA 2017
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.687.649.000,00**	**3.038.857.203,00**	**82,41%**	**(648.791.797,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	3.687.649.000,00	3.038.857.203,00	82,41%	(648.791.797,00)	
5.1.2	Belanja Bunga		-		-	
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5.2	**Belanja Langsung**	**10.510.465.000,00**	**9.686.211.844,00**	**92,16%**	**(824.253.156,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	861.980.000,00	827.770.000,00	96,03%	(34.210.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	9.234.377.000,00	8.456.606.844,00	91,58%	(777.770.156,00)	
5.2.3	Belanja Modal	414.108.000,00	401.835.000,00	97,04%	(12.273.000,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	414.108.000,00	401.835.000,00	97,04%	(12.273.000,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-		-	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	**Pembentukan Dana Cadangan**	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6.3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(14.124.370.000,00)**	**(12.651.046.647,00)**	**89,57%**	**1.473.323.353,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. Perdagangan
ORGANISASI : 2.02.01. Dinas Perdagangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.596.874.000,00**	**4.002.190.423,00**	**111,27%**	**405.316.423,00**	
4,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.596.874.000,00**	**4.002.190.423,00**	**111,27%**	**405.316.423,00**	
4.1.1	Pajak Daerah	-	-		-	
4.1.2	Retribusi Daerah	3.394.292.000,00	3.892.099.205,00	114,67%	497.807.205,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	202.582.000,00	110.091.218,00	54,34%	(92.490.782,00)	
4,2	**Dana Perimbangan**	-	-		-	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-		-	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	-	-		-	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	-	-		-	
4.2.4	Dana Bagi Hasil Cukai	-	-		-	
4,3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	-	-		-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-		-	
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-		-	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	-		-	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Pendapatan	**3.596.874.000,00**	**4.002.190.423,00**	**111,27%**	**405.316.423,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**15.166.548.000,00**	**12.673.557.809,00**	**83,56%**	**(2.492.990.191,00)**	Peraturan Daerah No 21 tahun 2017 tentang perubahan APBD TA 2017
5,1	**Belanja Tidak Langsung**	**7.882.441.000,00**	**7.053.139.263,00**	**89,48%**	**(829.301.737,00)**	
5.1.1	Belanja Pegawai	7.882.441.000,00	7.053.139.263,00	89,48%	(829.301.737,00)	
5.1.2	Belanja Bunga	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
5.1.3	Belanja Subsidi	-	-		-	
5.1.4	Belanja Hibah	-	-		-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa	-	-		-	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	-		-	
5,2	**Belanja Langsung**	**7.284.107.000,00**	**5.620.418.546,00**	**77,16%**	**(1.663.688.454,00)**	
5.2.1	Belanja Pegawai	1.497.219.000,00	1.061.156.900,00	70,88%	(436.062.100,00)	
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	5.551.388.000,00	4.338.270.146,00	78,15%	(1.213.117.854,00)	
5.2.3	Belanja Modal	235.500.000,00	220.991.500,00	93,84%	(14.508.500,00)	
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-	
5.2.3.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	235.500.000,00	220.991.500,00	93,84%	(14.508.500,00)	
5.2.3.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	-	-		-	
5.2.3.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-		-	
5.2.3.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-	
5.2.3.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-	
	Jumlah Belanja	**15.166.548.000,00**	**12.673.557.809,00**	**83,56%**	**(2.492.990.191,00)**	
	SURPLUS / DEFISIT (-)	**(11.569.674.000,00)**	**(8.671.367.386,00)**	**74,95%**	**2.898.306.614,00**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	-	-		-	
6,1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-		-	
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/Kurang(-)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6=4-3	7
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-		-	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	
6,2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-		-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	
6.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	-	-		-	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETO	-	-		-	
6,3	**SiLPA Tahun Anggaran Berjalan**	**(11.569.674.000,00)**	**(8.671.367.386,00)**	**74,95%**	**3.017.298.446,00**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01	**Dinas Pendidikan**	**9.204.524.000,00**	**42.769.791.000,00**	**43.186.007.000,00**	**95.160.322.000,00**	**7.615.015.650,00**	**37.869.863.567,43**	**35.951.152.631,00**	**81.436.031.848,43**	**(13.629.149.801,57)**	**85,58%**
1 01 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**2.817.750.000,00**	**593.925.000,00**	-	**3.411.675.000,00**	**2.080.706.000,00**	**569.140.542,00**	-	**2.649.846.542,00**	**(761.828.458,00)**	**77,67%**
1 01 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.817.750.000,00	440.800.000,00	0,00	3.258.550.000,00	2.080.706.000,00	416.015.542,00	-	2.496.721.542,00	(761.828.458,00)	76,62%
1 01 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	153.125.000,00	0,00	153.125.000,00	-	153.125.000,00	-	153.125.000,00	-	100,00%
1 01 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**395.130.000,00**	-	**395.130.000,00**	-	**315.903.492,00**	-	**315.903.492,00**	**(79.226.508,00)**	**79,95%**
1 01 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-	144.220.450,00	-	144.220.450,00	(5.779.550,00)	96,15%
1 01 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	76.230.000,00	0,00	76.230.000,00	0,00	45.142.042,00	0,00	45.142.042,00	(31.087.958,00)	59,22%
1 01 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	168.900.000,00	0,00	168.900.000,00	0,00	126.541.000,00	0,00	126.541.000,00	(42.359.000,00)	74,92%
1 01 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**19.805.252.000,00**	**19.805.252.000,00**	-	-	**19.006.152.771,00**	**19.006.152.771,00**	**(799.099.229,00)**	**95,97%**
1 01 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	19.805.252.000,00	19.805.252.000,00	0,00	0,00	19.006.152.771,00	19.006.152.771,00	(799.099.229,00)	95,97%
1 01 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**62.060.000,00**	**40.800.000,00**	**0,00**	**102.860.000,00**	**44.634.000,00**	**27.663.100,00**	**0,00**	**72.297.100,00**	**(30.562.900,00)**	**70,29%**
1 01 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.060.000,00	40.800.000,00	0,00	102.860.000,00	44.634.000,00	27.663.100,00	0,00	72.297.100,00	(30.562.900,00)	70,29%
1 01 01 16	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**484.200.000,00**	**1.975.045.000,00**	-	**2.459.245.000,00**	**332.239.000,00**	**1.172.265.392,00**	-	**1.504.504.392,00**	**(954.740.608,00)**	**61,18%**
1 01 01 16 01	Kegiatan Sertifikasi Guru	73.600.000,00	56.750.000,00	0,00	130.350.000,00	54.700.000,00	43.511.500,00	0,00	98.211.500,00	(32.138.500,00)	75,34%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 16 02	Kegiatan Pelatihan SDM Guru PAUD di Kota Madiun	15.100.000,00	95.160.000,00	0,00	110.260.000,00	13.650.000,00	72.419.900,00	0,00	86.069.900,00	(24.190.100,00)	78,06%
1 01 01 16 03	Kegiatan Pelatihan Kompetensi Guru Kelas	85.850.000,00	596.210.000,00	0,00	682.060.000,00	18.400.000,00	153.067.400,00	0,00	171.467.400,00	(510.592.600,00)	25,14%
1 01 01 16 04	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	88.500.000,00	33.970.000,00	0,00	122.470.000,00	47.900.000,00	29.468.000,00	0,00	77.368.000,00	(45.102.000,00)	63,17%
1 01 01 16 05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan	36.600.000,00	108.400.000,00	0,00	145.000.000,00	34.014.000,00	51.216.350,00	0,00	85.230.350,00	(59.769.650,00)	58,78%
1 01 01 16 06	Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN	58.500.000,00	302.910.000,00	0,00	361.410.000,00	46.325.000,00	129.797.600,00	0,00	176.122.600,00	(185.287.400,00)	48,73%
1 01 01 16 07	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	39.200.000,00	10.200.000,00	0,00	49.400.000,00	36.400.000,00	7.391.900,00	0,00	43.791.900,00	(5.608.100,00)	88,65%
1 01 01 16 08	Kegiatan Bantuan Pendidikan S1/S2/S3 PGSD	10.100.000,00	117.580.000,00	0,00	127.680.000,00	8.400.000,00	98.250.000,00	0,00	106.650.000,00	(21.030.000,00)	83,53%
1 01 01 16 09	Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik	29.450.000,00	325.440.000,00	0,00	354.890.000,00	29.450.000,00	296.557.600,00	0,00	326.007.000,00	(28.883.000,00)	91,86%
1 01 01 16 10	Kegiatan Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	30.700.000,00	261.425.000,00	0,00	292.125.000,00	30.650.000,00	236.805.742,00	0,00	267.455.742,00	(24.669.258,00)	91,56%
1 01 01 16 11	Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Agama Islam (SMP,SMA,SMK)	16.600.000,00	67.000.000,00	0,00	83.600.000,00	12.350.000,00	53.780.000,00	0,00	66.130.000,00	(17.470.000,00)	79,10%
1 01 01 17	**Program Pendidikan Dasar**	**2.590.321.000,00**	**24.839.445.000,00**	**18.881.876.000,00**	**46.311.642.000,00**	**2.260.324.750,00**	**21.868.049.829,00**	**12.780.309.783,00**	**36.908.684.362,00**	**(9.402.957.638,00)**	**79,70%**
1 01 01 17 01	Gerakan Disiplin Siswa	46.283.000,00	94.162.000,00	0,00	140.445.000,00	35.522.000,00	50.899.900,00	0,00	86.421.900,00	(54.023.100,00)	61,53%
1 01 01 17 02	Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)	61.679.000,00	182.474.000,00	0,00	244.153.000,00	38.427.750,00	69.520.850,00	0,00	107.948.600,00	(136.204.400,00)	44,21%
1 01 01 17 03	Kegiatan Pelaksanaan USBN Pendidikan Agama	22.183.000,00	77.093.000,00	0,00	99.276.000,00	17.850.000,00	22.891.900,00	0,00	40.741.900,00	(58.534.100,00)	41,04%
1 01 01 17 04	Kegiatan Pembinaan Pengembangan Gugus TK, SD	37.110.000,00	100.623.000,00	0,00	137.733.000,00	21.608.000,00	61.190.900,00	0,00	82.798.900,00	(54.934.100,00)	60,12%
1 01 01 17 05	Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP	42.999.000,00	152.321.000,00	0,00	195.320.000,00	38.858.000,00	102.205.000,00	0,00	141.063.000,00	(54.257.000,00)	72,22%
1 01 01 17 06	Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Sekolah	16.162.000,00	74.888.000,00	0,00	91.050.000,00	9.625.000,00	34.582.250,00	0,00	44.207.250,00	(46.842.750,00)	48,55%
1 01 01 17 07	Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kantin Kejujuran SD dan SMP	10.830.000,00	42.350.000,00	0,00	53.180.000,00	10.545.000,00	31.323.500,00	0,00	41.868.500,00	(11.311.500,00)	78,73%
1 01 01 17 08	Kegiatan Best Practise Pendidikan Karakter	50.512.000,00	449.488.000,00	0,00	500.000.000,00	28.700.000,00	380.805.000,00	0,00	409.505.000,00	(90.495.000,00)	81,90%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 17 09	Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	65.437.000,00	284.618.000,00	0,00	350.055.000,00	46.655.500,00	72.821.500,00	0,00	119.477.000,00	(230.578.000,00)	34,13%
1 01 01 17 10	Kegiatan Komunitas Pembelajaran	41.100.000,00	150.834.000,00	0,00	191.934.000,00	22.144.000,00	138.142.100,00	0,00	160.286.100,00	(31.647.900,00)	83,51%
1 01 01 17 11	Kegiatan Penjaminan Mutu	40.870.000,00	167.380.000,00	0,00	208.250.000,00	23.760.000,00	102.489.400,00	0,00	126.249.400,00	(82.000.600,00)	60,62%
1 01 01 17 12	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman	304.588.000,00	4.902.755.000,00	2.281.142.000,00	7.488.485.000,00	294.527.500,00	4.470.199.811,00	1.595.918.200,00	6.360.645.511,00	(1.127.839.489,00)	84,94%
1 01 01 17 13	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo	292.575.000,00	4.053.200.000,00	1.353.184.000,00	5.698.959.000,00	285.124.000,00	3.682.803.310,00	694.773.400,00	4.662.700.710,00	(1.036.258.290,00)	81,82%
1 01 01 17 14	Kegiatan Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo	336.589.000,00	4.529.240.000,00	2.315.081.000,00	7.180.910.000,00	326.570.500,00	4.024.351.025,00	1.633.039.950,00	5.983.961.475,00	(1.196.948.525,00)	83,33%
1 01 01 17 15	Kegiatan KeBeasiswa Bakat dan Prestasi Siswa TK, SD, SMP, SMA	6.270.000,00	78.230.000,00	0,00	84.500.000,00	6.270.000,00	30.730.000,00	0,00	37.000.000,00	(47.500.000,00)	43,79%
1 01 01 17 16	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Bidang Kesenian	37.122.000,00	77.878.000,00	0,00	115.000.000,00	37.063.000,00	63.497.400,00	0,00	100.560.400,00	(14.439.600,00)	87,44%
1 01 01 17 17	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	68.590.000,00	145.208.000,00	50.000.000,00	263.798.000,00	63.040.000,00	43.058.450,00	49.930.000,00	156.034.450,00	(107.763.550,00)	59,15%
1 01 01 17 18	Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional	209.500.000,00	321.000.000,00	49.500.000,00	580.000.000,00	158.140.000,00	247.456.000,00	49.478.000,00	455.074.000,00	(124.926.000,00)	78,46%
1 01 01 17 19	Kegiatan Uji Coba Ujian Nasional SD dan SMP	98.183.000,00	170.884.000,00	0,00	269.067.000,00	84.439.000,00	170.494.000,00	0,00	254.933.000,00	(14.134.000,00)	94,75%
1 01 01 17 20	Kegiatan Olimpiade Sains SD, SMP	19.677.000,00	72.301.000,00	0,00	91.978.000,00	19.019.000,00	59.406.000,00	0,00	78.425.000,00	(13.553.000,00)	85,26%
1 01 01 17 21	Kegiatan Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP SMA/SMK Tahap I	49.900.000,00	394.190.000,00	0,00	444.090.000,00	30.000.000,00	362.455.000,00	0,00	392.455.000,00	(51.635.000,00)	88,37%
1 01 01 17 22	Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pendidikan MGMP dan KKG	41.147.000,00	221.139.000,00	0,00	262.286.000,00	27.996.500,00	180.781.700,00	0,00	208.778.200,00	(53.507.800,00)	79,60%
1 01 01 17 23	Kegiatan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	70.170.000,00	311.669.000,00	0,00	381.839.000,00	44.382.000,00	92.650.000,00	0,00	137.032.000,00	(244.807.000,00)	35,89%
1 01 01 17 24	Kegiatan Penyelenggaraan SMP Terbuka	25.875.000,00	16.125.000,00	0,00	42.000.000,00	25.875.000,00	13.125.000,00	0,00	39.000.000,00	(3.000.000,00)	92,86%
1 01 01 17 25	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 1	82.320.000,00	984.061.000,00	252.175.000,00	1.318.556.000,00	82.320.000,00	973.158.640,00	215.232.500,00	1.270.711.140,00	(47.844.860,00)	96,37%
1 01 01 17 26	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 2	61.520.000,00	673.808.000,00	45.850.000,00	781.178.000,00	60.535.000,00	613.527.854,00	10.145.000,00	684.207.854,00	(96.970.146,00)	87,59%
1 01 01 17 27	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 3	18.805.000,00	486.038.000,00	227.068.000,00	731.911.000,00	18.782.000,00	468.602.680,00	183.865.000,00	671.249.680,00	(60.661.320,00)	91,71%
1 01 01 17 28	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 4	79.148.000,00	689.057.000,00	447.104.000,00	1.215.309.000,00	78.963.000,00	673.201.895,00	408.591.500,00	1.160.756.395,00	(54.552.605,00)	95,51%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 17 29	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 5	31.323.000,00	361.997.000,00	112.400.000,00	505.720.000,00	31.313.000,00	358.189.418,00	76.590.000,00	466.092.418,00	(39.627.582,00)	92,16%
1 01 01 17 30	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 6	23.818.000,00	581.627.000,00	78.450.000,00	683.895.000,00	23.818.000,00	546.466.624,00	42.750.000,00	613.034.624,00	(70.860.376,00)	89,64%
1 01 01 17 31	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 7	29.172.000,00	632.947.000,00	208.908.000,00	871.027.000,00	29.172.000,00	602.966.610,00	172.528.500,00	804.667.110,00	(66.359.890,00)	92,38%
1 01 01 17 32	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 8	9.639.000,00	541.315.000,00	520.371.000,00	1.071.325.000,00	9.588.000,00	521.733.173,00	474.382.680,00	1.005.703.853,00	(65.621.147,00)	93,87%
1 01 01 17 33	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 9	46.214.000,00	385.964.000,00	173.245.000,00	605.423.000,00	46.110.000,00	366.177.222,00	137.545.000,00	549.832.222,00	(55.590.778,00)	90,82%
1 01 01 17 34	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 10	45.235.000,00	461.022.000,00	169.200.000,00	675.457.000,00	45.235.000,00	440.781.518,00	133.485.000,00	619.501.518,00	(55.955.482,00)	91,72%
1 01 01 17 35	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 11	30.455.000,00	435.190.000,00	195.000.000,00	660.645.000,00	30.445.000,00	412.903.373,00	158.771.000,00	602.119.373,00	(58.525.627,00)	91,14%
1 01 01 17 36	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 12	30.567.000,00	589.098.000,00	59.100.000,00	678.765.000,00	28.427.500,00	549.357.883,00	23.400.000,00	601.185.383,00	(77.579.617,00)	88,57%
1 01 01 17 37	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 13	31.406.000,00	448.374.000,00	103.450.000,00	583.230.000,00	31.311.000,00	441.810.142,00	67.482.500,00	540.603.642,00	(42.626.358,00)	92,69%
1 01 01 17 38	Kegiatan Penyelengaraan SMPN 14	24.570.000,00	384.391.000,00	92.800.000,00	501.761.000,00	24.552.000,00	340.700.601,00	53.908.000,00	419.160.601,00	(82.600.399,00)	83,54%
1 01 01 17 39	Kegiatan Lomba Siswa Teladan Tingkat SD dan SMP	50.778.000,00	114.506.000,00	0,00	165.284.000,00	23.605.500,00	50.592.200,00	0,00	74.197.700,00	(91.086.300,00)	44,89%
1 01 01 17 40	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SLB	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	-	-	(100.000.000,00)	0,00%
1 01 01 17 42	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK)	0,00	0,00	5.430.569.000,00	5.430.569.000,00	0,00	0,00	3.812.109.757,00	3.812.109.757,00	(1.618.459.243,00)	70,20%
1 01 01 17 43	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	0,00	0,00	3.864.353.000,00	3.864.353.000,00	0,00	0,00	2.143.665.700,00	2.143.665.700,00	(1.720.687.300,00)	55,47%
1 01 01 17 44	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD (DAK 2016)	0,00	0,00	752.926.000,00	752.926.000,00	0,00	0,00	642.718.096,00	642.718.096,00	(110.207.904,00)	85,36%
1 01 01 18	**Program Pendidikan Non Formal**	**151.875.000,00**	**739.375.000,00**	-	**891.250.000,00**	**147.630.000,00**	**676.941.200,00**	-	**824.571.200,00**	**(66.678.800,00)**	**92,52%**
1 01 01 18 01	Kegiatan Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)	20.352.000,00	34.648.000,00	0,00	55.000.000,00	20.290.000,00	32.323.000,00	0,00	52.613.000,00	(2.387.000,00)	95,66%
1 01 01 18 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C	19.350.000,00	63.650.000,00	0,00	83.000.000,00	19.350.000,00	63.550.000,00	0,00	82.900.000,00	(100.000,00)	99,88%
1 01 01 18 04	Kegiatan Akreditasi Pendidikan Non Formal dan PAUD	27.894.000,00	107.106.000,00	0,00	135.000.000,00	25.844.000,00	103.844.000,00	0,00	129.688.000,00	(5.312.000,00)	96,07%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 18 05	Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	13.438.000,00	135.422.000,00	0,00	148.860.000,00	13.403.000,00	134.522.800,00	0,00	147.925.800,00	(934.200,00)	99,37%
1 01 01 18 06	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Perpustakaan Sekolah Secara Periodik	26.296.000,00	18.704.000,00	0,00	45.000.000,00	26.138.000,00	18.702.500,00	0,00	44.840.500,00	(159.500,00)	99,65%
1 01 01 18 07	Kegiatan Bimbingan Teknis Exstra Kurikuler Pembina	44.545.000,00	379.845.000,00	0,00	424.390.000,00	42.605.000,00	323.998.900,00	0,00	366.603.900,00	(57.786.100,00)	86,38%
1 01 01 19	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**177.854.000,00**	**859.839.000,00**	-	**1.037.693.000,00**	**171.281.000,00**	**727.881.850,00**	-	**899.162.850,00**	**(138.530.150,00)**	**86,65%**
1 01 01 19 01	Pagelaran HAN Tingkat Kota	15.130.000,00	144.870.000,00	0,00	160.000.000,00	15.130.000,00	143.895.000,00	0,00	159.025.000,00	(975.000,00)	99,39%
1 01 01 19 02	Pagelaran Tari Masal	17.175.000,00	65.575.000,00	0,00	82.750.000,00	17.150.000,00	65.575.000,00	0,00	82.725.000,00	(25.000,00)	99,97%
1 01 01 19 04	Kegiatan Hari Anak Nasional	34.250.000,00	146.550.000,00	0,00	180.800.000,00	34.050.000,00	84.624.000,00	0,00	118.674.000,00	(62.126.000,00)	65,64%
1 01 01 19 07	Kegiatan Bantuan BOP PAUD	19.400.000,00	60.600.000,00	0,00	80.000.000,00	19.400.000,00	54.301.500,00	0,00	73.701.500,00	(6.298.500,00)	92,13%
1 01 01 19 08	Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	26.300.000,00	99.600.000,00	0,00	125.900.000,00	26.300.000,00	99.100.000,00	0,00	125.400.000,00	(500.000,00)	99,60%
1 01 01 19 09	Kegiatan Pusat Kegiatan Gugus PAUD Terpadu Kota Madiun	37.187.000,00	85.783.000,00	0,00	122.970.000,00	35.958.000,00	65.455.500,00	0,00	101.413.500,00	(21.556.500,00)	82,47%
1 01 01 19 10	Kegiatan Workshop Kurikulum TK	28.412.000,00	110.788.000,00	0,00	139.200.000,00	23.293.000,00	79.313.000,00	0,00	102.606.000,00	(36.594.000,00)	73,71%
1 01 01 19 11	Kegiatan Penyelenggaraan TK pembina	0,00	146.073.000,00	0,00	146.073.000,00	0,00	135.617.850,00	0,00	135.617.850,00	(10.455.150,00)	92,84%
1 01 01 20	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**177.844.000,00**	**575.266.000,00**	-	**753.110.000,00**	**167.958.000,00**	**485.499.550,00**	-	**653.457.550,00**	**(4.512.100,00)**	**86,77%**
1 01 01 20 01	Kegiatan Entri Data Peserta Didik, PTK dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	17.720.000,00	76.040.000,00	0,00	93.760.000,00	17.708.000,00	61.539.900,00	0,00	79.247.900,00	(14.512.100,00)	84,52%
1 01 01 20 02	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	8.150.000,00	36.850.000,00	0,00	45.000.000,00	8.150.000,00	26.852.000,00	0,00	35.002.000,00	0,00	77,78%
1 01 01 20 03	Kegiatan Asistensi Pelatihan Web/updating data pendidikan	21.824.000,00	101.916.000,00	0,00	123.740.000,00	20.710.000,00	98.566.100,00	0,00	119.276.100,00	0,00	96,39%
1 01 01 20 04	Kegiatan Operasional BOS Tingkat Kota	36.950.000,00	121.960.000,00	0,00	158.910.000,00	36.950.000,00	94.150.100,00	0,00	131.100.100,00	0,00	82,50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 20 05	Kegiatan Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	26.100.000,00	90.770.000,00	0,00	116.870.000,00	19.850.000,00	71.477.250,00	0,00	91.327.250,00	0,00	78,14%
1 01 01 20 06	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	20.250.000,00	84.580.000,00	0,00	104.830.000,00	17.820.000,00	79.006.000,00	0,00	96.826.000,00	0,00	92,36%
1 01 01 20 07	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	28.200.000,00	46.800.000,00	0,00	75.000.000,00	28.200.000,00	37.730.200,00	0,00	65.930.200,00	(25.000.000,00)	87,91%
1 01 01 20 08	Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Bantuan Beasiswa Mahasiswa	18.650.000,00	16.350.000,00	0,00	35.000.000,00	18.570.000,00	16.178.000,00	0,00	34.748.000,00	35.000.000,00	99,28%
1 01 01 21	**Program BOS**	**2.742.620.000,00**	**12.750.966.000,00**	**4.498.879.000,00**	**19.992.465.000,00**	**2.410.242.900,00**	**12.026.518.612,43**	**4.164.690.077,00**	**18.601.451.589,43**	**(1.391.013.410,57)**	**93,04%**
1 01 01 21 01	Kegiatan BOS pada SDN 01 Kartoharjo	44.440.000,00	207.995.000,00	46.854.000,00	299.289.000,00	44.440.000,00	198.961.509,20	39.631.550,00	283.033.059,20	(16.255.940,80)	94,57%
1 01 01 21 02	Kegiatan BOS pada SDN 02 Kartoharjo	6.450.000,00	56.137.000,00	19.109.000,00	81.696.000,00	6.900.000,00	48.676.803,27	17.109.000,00	72.685.803,27	(9.010.196,73)	88,97%
1 01 01 21 03	Kegiatan BOS pada SDN 03 Kartoharjo	10.800.000,00	40.690.000,00	22.400.000,00	73.890.000,00	10.400.000,00	37.863.090,16	22.139.430,00	70.402.520,16	(3.487.479,84)	95,28%
1 01 01 21 04	Kegiatan BOS pada SDN 01 Klegen	45.688.000,00	136.471.000,00	129.980.000,00	312.139.000,00	45.890.000,00	132.979.702,07	128.780.800,00	307.650.502,07	(4.488.497,93)	98,56%
1 01 01 21 05	Kegiatan BOS pada SDN 02 Klegen	19.796.000,00	56.739.000,00	57.826.000,00	134.361.000,00	19.580.000,00	56.799.954,30	53.801.370,00	130.181.324,30	(4.179.675,70)	96,89%
1 01 01 21 06	Kegiatan BOS pada SDN 03 Klegen	43.850.000,00	157.932.000,00	99.950.000,00	301.732.000,00	42.188.000,00	154.412.754,23	99.949.400,00	296.550.154,23	(5.181.845,77)	98,28%
1 01 01 21 07	Kegiatan BOS pada SDN 04 Klegen	13.072.000,00	51.651.000,00	28.270.000,00	92.993.000,00	13.072.000,00	50.820.715,69	28.270.000,00	92.162.715,69	(830.284,31)	99,11%
1 01 01 21 08	Kegiatan BOS pada SDN Oro Oro Ombo	38.640.000,00	150.595.000,00	84.480.000,00	273.715.000,00	37.890.000,00	135.802.678,84	88.556.390,00	262.249.068,84	(11.465.931,16)	95,81%
1 01 01 21 09	Kegiatan BOS pada SDN 01 Rejomulyo	14.880.000,00	51.525.000,00	28.510.000,00	94.915.000,00	13.630.000,00	49.702.111,00	28.510.000,00	91.842.111,00	(3.072.889,00)	96,76%
1 01 01 21 10	Kegiatan BOS pada SDN 02 Rejomulyo	9.164.000,00	32.427.000,00	18.688.000,00	60.279.000,00	8.240.000,00	26.149.819,49	15.750.000,00	50.139.819,49	(10.139.180,51)	83,18%
1 01 01 21 11	Kegiatan BOS pada SDN 01 Kanigoro	17.500.000,00	57.316.000,00	44.130.000,00	118.946.000,00	16.700.000,00	59.431.784,59	19.605.570,00	95.737.354,59	(23.208.645,41)	80,49%
1 01 01 21 12	Kegiatan BOS pada SDN 02 Kanigoro	20.880.000,00	84.125.000,00	37.840.000,00	142.845.000,00	20.592.000,00	78.122.850,82	38.840.000,00	137.554.850,82	(5.290.149,18)	96,30%
1 01 01 21 13	Kegiatan BOS pada SDN 03 Kanigoro	21.600.000,00	79.827.000,00	42.640.000,00	144.067.000,00	21.700.000,00	77.237.015,39	44.282.000,00	143.219.015,39	(847.984,61)	99,41%
1 01 01 21 14	Kegiatan BOS pada SDN Sukosari	6.900.000,00	29.568.000,00	15.379.000,00	51.847.000,00	6.900.000,00	27.306.060,82	14.677.000,00	48.883.060,82	(2.963.939,18)	94,28%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 21 15	Kegiatan BOS pada SDN Pilangbango	30.775.000,00	138.185.000,00	40.541.000,00	209.501.000,00	26.160.000,00	135.871.868,00	31.194.550,00	193.226.418,00	(16.274.582,00)	92,23%
1 01 01 21 16	Kegiatan BOS pada SDN 01 Tawangrejo	17.120.000,00	109.732.000,00	10.985.000,00	137.837.000,00	18.560.000,00	105.947.421,56	10.056.410,00	134.563.831,56	(3.273.168,44)	97,63%
1 01 01 21 17	Kegiatan BOS pada SDN 02 Tawangrejo	13.450.000,00	54.394.000,00	26.720.000,00	94.564.000,00	13.450.000,00	51.509.975,35	26.723.700,00	91.683.675,35	(2.880.324,65)	96,95%
1 01 01 21 18	Kegiatan BOS pada SDN Kelun	20.800.000,00	92.325.000,00	45.246.000,00	158.371.000,00	21.700.000,00	87.580.323,44	45.126.000,00	154.406.323,44	(3.964.676,56)	97,50%
1 01 01 21 19	Kegiatan BOS pada SDN 01 Manguharjo	43.860.000,00	220.121.000,00	73.766.000,00	337.747.000,00	19.710.000,00	231.156.379,70	69.592.990,00	320.459.369,70	(17.287.630,30)	94,88%
1 01 01 21 20	Kegiatan BOS pada SDN 01 Nambangan Lor	39.600.000,00	173.581.000,00	53.428.000,00	266.609.000,00	30.900.000,00	174.544.354,56	55.202.428,00	260.646.782,56	(5.962.217,44)	97,76%
1 01 01 21 21	Kegiatan BOS pada SDN 02 Nambangan Lor	16.422.000,00	66.638.000,00	27.270.000,00	110.330.000,00	16.222.000,00	64.570.359,72	26.454.495,00	107.246.854,72	(3.083.145,28)	97,21%
1 01 01 21 22	Kegiatan BOS pada SDN 01 Madiun Lor	18.480.000,00	80.265.000,00	26.379.000,00	125.124.000,00	17.680.000,00	73.765.108,19	26.378.556,00	117.763.664,19	(7.360.335,81)	94,12%
1 01 01 21 23	Kegiatan BOS pada SDN 02 Madiun Lor	18.000.000,00	106.954.000,00	11.950.000,00	136.904.000,00	18.000.000,00	95.678.377,84	11.687.348,00	125.365.725,84	(11.538.274,16)	91,57%
1 01 01 21 24	Kegiatan BOS pada SDN 03 Madiun Lor	63.960.000,00	257.291.000,00	107.641.000,00	428.892.000,00	52.980.000,00	241.029.301,18	127.399.030,00	421.408.331,18	(7.483.668,82)	98,26%
1 01 01 21 25	Kegiatan BOS pada SDN 04 Madiun Lor	44.255.000,00	171.951.000,00	88.214.000,00	304.420.000,00	43.904.000,00	165.516.466,69	67.583.990,00	277.004.456,69	(27.415.543,31)	90,99%
1 01 01 21 26	Kegiatan BOS pada SDN 05 Madiun Lor	43.106.000,00	218.161.000,00	93.033.000,00	354.300.000,00	41.774.000,00	212.624.859,26	89.057.000,00	343.455.859,26	(10.844.140,74)	96,94%
1 01 01 21 27	Kegiatan BOS pada SDN 01 Nambangan Kidul	14.740.000,00	87.995.000,00	38.435.000,00	141.170.000,00	14.740.000,00	85.732.979,63	38.415.100,00	138.888.079,63	(2.281.920,37)	98,38%
1 01 01 21 28	Kegiatan BOS pada SDN 02 Nambangan Kidul	11.100.000,00	72.647.000,00	29.240.000,00	112.987.000,00	11.100.000,00	71.466.202,27	21.918.760,00	104.484.962,27	(8.502.037,73)	92,48%
1 01 01 21 29	Kegiatan BOS pada SDN 03 Nambangan Kidul	41.100.000,00	189.347.000,00	44.584.000,00	275.031.000,00	39.900.000,00	182.098.213,56	44.583.500,00	266.581.713,56	(8.449.286,44)	96,93%
1 01 01 21 30	Kegiatan BOS pada SDN 04 Nambangan Kidul	20.310.000,00	80.688.000,00	41.775.000,00	142.773.000,00	17.935.000,00	75.655.206,73	41.769.900,00	135.360.106,73	(7.412.893,27)	94,81%
1 01 01 21 31	Kegiatan BOS pada SDN 01 Winongo	42.754.000,00	179.845.000,00	65.155.000,00	287.754.000,00	42.754.000,00	177.296.616,45	65.154.800,00	285.205.416,45	(2.548.583,55)	99,11%
1 01 01 21 32	Kegiatan BOS pada SDN 02 Winongo	10.800.000,00	55.783.000,00	7.135.000,00	73.718.000,00	11.200.000,00	53.296.869,29	9.745.000,00	74.241.869,29	523.869,29	100,71%
1 01 01 21 33	Kegiatan BOS pada SDN Ngegong	16.620.000,00	84.299.000,00	24.922.000,00	125.841.000,00	16.500.000,00	76.641.185,76	24.365.760,00	117.506.945,76	(8.334.054,24)	93,38%
1 01 01 21 34	Kegiatan BOS pada SDN Patihan	44.532.000,00	199.835.000,00	60.815.000,00	305.182.000,00	44.532.000,00	195.250.366,51	58.230.440,00	298.012.806,51	(7.169.193,49)	97,65%
1 01 01 21 35	Kegiatan BOS pada SDN 01 Pangongangan	11.600.000,00	71.099.000,00	26.376.000,00	109.075.000,00	11.600.000,00	63.148.942,39	26.376.000,00	101.124.942,39	(7.950.057,61)	92,71%
1 01 01 21 36	Kegiatan BOS pada SDN 02 Pangongangan	41.160.000,00	173.058.000,00	61.844.000,00	276.062.000,00	40.560.000,00	172.391.954,97	57.775.405,00	270.727.359,97	(5.334.640,03)	98,07%
1 01 01 21 37	Kegiatan BOS pada SDN Sogaten	23.180.000,00	102.730.000,00	32.888.000,00	158.798.000,00	22.880.000,00	98.198.754,98	32.887.710,00	153.966.464,98	(4.831.535,02)	96,96%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja	Jenis Belanja	Jenis Belanja	Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 21 38	Kegiatan BOS pada SDN 01 Taman	58.400.000,00	229.985.000,00	102.930.000,00	391.315.000,00	55.800.000,00	229.805.060,67	97.770.000,00	383.375.060,67	(7.939.939,33)	97,97%
1 01 01 21 39	Kegiatan BOS pada SDN 02 Taman	7.440.000,00	24.744.000,00	17.661.000,00	49.845.000,00	7.440.000,00	24.747.179,47	17.661.000,00	49.848.179,47	3.179,47	100,01%
1 01 01 21 40	Kegiatan BOS pada SDN 03 Taman	13.570.000,00	53.020.000,00	27.541.000,00	94.131.000,00	13.270.000,00	50.234.014,87	27.540.000,00	91.044.014,87	(3.086.985,13)	96,72%
1 01 01 21 41	Kegiatan BOS pada SDN 01 Pandean	39.980.000,00	195.145.000,00	71.732.000,00	306.857.000,00	36.980.000,00	172.074.887,40	86.670.000,00	295.724.887,40	(11.132.112,60)	96,37%
1 01 01 21 42	Kegiatan BOS pada SDN 02 Pandean	35.260.000,00	141.819.000,00	81.977.000,00	259.056.000,00	36.840.000,00	136.771.162,58	81.977.000,00	255.588.162,58	(3.467.837,42)	98,66%
1 01 01 21 43	Kegiatan BOS pada SDN Banjarejo	57.900.000,00	218.926.000,00	110.822.000,00	387.648.000,00	57.550.000,00	213.770.791,92	112.195.080,00	383.515.871,92	(4.132.128,08)	98,93%
1 01 01 21 44	Kegiatan BOS pada SDN 01 Mojorejo	15.850.000,00	55.642.000,00	56.281.000,00	127.773.000,00	15.800.000,00	72.608.999,66	34.223.000,00	122.631.999,66	(5.141.000,34)	95,98%
1 01 01 21 45	Kegiatan BOS pada SDN 02 Mojorejo	64.583.000,00	271.616.000,00	119.345.000,00	455.544.000,00	61.521.000,00	253.404.930,81	129.245.690,00	444.171.620,81	(11.372.379,19)	97,50%
1 01 01 21 46	Kegiatan BOS pada SDN 01 Manisrejo	46.320.000,00	169.873.000,00	95.510.000,00	311.703.000,00	45.384.000,00	162.856.890,84	95.510.000,00	303.750.890,84	(7.952.109,16)	97,45%
1 01 01 21 47	Kegiatan BOS pada SDN 02 Manisrejo	40.048.000,00	139.518.000,00	91.414.000,00	270.980.000,00	39.798.000,00	138.792.517,54	87.166.066,00	265.756.583,54	(5.223.416,46)	98,07%
1 01 01 21 48	Kegiatan BOS pada SDN 03 Manisrejo	21.400.000,00	77.534.000,00	50.379.000,00	149.313.000,00	22.000.000,00	70.210.198,52	55.275.800,00	147.485.998,52	(1.827.001,48)	98,78%
1 01 01 21 49	Kegiatan BOS pada SDN 04 Manisrejo	27.000.000,00	99.836.000,00	91.054.000,00	217.890.000,00	32.500.000,00	102.589.228,17	82.790.330,00	217.879.558,17	(10.441,83)	100,00%
1 01 01 21 50	Kegiatan BOS pada SDN 01 Demangan	15.248.000,00	75.681.000,00	44.380.000,00	135.309.000,00	15.248.000,00	73.619.533,92	43.137.830,00	132.005.363,92	(3.303.636,08)	97,56%
1 01 01 21 51	Kegiatan BOS pada SDN 02 Demangan	21.400.000,00	96.934.000,00	32.930.000,00	151.264.000,00	21.400.000,00	94.080.308,06	32.930.000,00	148.410.308,06	(2.853.691,94)	98,11%
1 01 01 21 52	Kegiatan BOS pada SDN 01 Josenan	22.954.000,00	97.000.000,00	35.240.000,00	155.194.000,00	22.954.000,00	95.458.987,31	35.239.000,00	153.651.987,31	(1.542.012,69)	99,01%
1 01 01 21 53	Kegiatan BOS pada SDN 02 Josenan	21.800.000,00	95.792.000,00	35.922.000,00	153.514.000,00	19.200.000,00	93.834.268,45	35.916.644,00	148.950.912,45	(4.563.087,55)	97,03%
1 01 01 21 54	Kegiatan BOS pada SDN 03 Josenan	13.580.000,00	47.008.000,00	33.250.000,00	93.838.000,00	13.580.000,00	44.574.369,90	33.250.000,00	91.404.369,90	(2.433.630,10)	97,41%
1 01 01 21 55	Kegiatan BOS pada SDN Kejuron	10.360.000,00	29.588.000,00	32.945.000,00	72.893.000,00	10.160.000,00	24.787.012,84	32.945.000,00	67.892.012,84	(5.000.987,16)	93,14%
1 01 01 21 56	Kegiatan BOS pada SDN Kuncen	10.800.000,00	46.866.000,00	18.391.000,00	76.057.000,00	10.200.000,00	43.448.900,22	19.220.300,00	72.869.200,22	(3.187.799,78)	95,81%
1 01 01 21 57	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 1	113.785.000,00	550.477.000,00	100.700.000,00	764.962.000,00	107.862.000,00	516.267.408,56	93.184.700,00	717.314.108,56	(47.647.891,44)	93,77%
1 01 01 21 58	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 2	102.500.000,00	455.620.000,00	128.420.000,00	686.540.000,00	69.779.000,00	449.055.077,74	119.382.600,00	638.216.677,74	(48.323.322,26)	92,96%
1 01 01 21 59	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 3	81.020.000,00	440.336.000,00	52.800.000,00	574.156.000,00	85.919.850,00	439.453.786,15	47.881.700,00	573.255.336,15	(900.663,85)	99,84%
1 01 01 21 60	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 4	131.156.000,00	587.116.000,00	182.542.000,00	900.814.000,00	107.990.000,00	538.619.340,68	181.165.760,00	827.775.100,68	(73.038.899,32)	91,89%
1 01 01 21 61	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 5	75.982.000,00	368.899.000,00	89.898.000,00	534.779.000,00	70.986.000,00	357.872.029,67	89.781.510,00	518.639.539,67	(16.139.460,33)	96,98%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 01 01 21 62	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 6	101.180.000,00	511.915.000,00	64.344.000,00	677.439.000,00	40.290.000,00	505.012.209,60	64.387.400,00	609.689.609,60	(67.749.390,40)	90,00%
1 01 01 21 63	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 7	101.470.000,00	535.038.000,00	138.500.000,00	775.008.000,00	59.842.000,00	454.386.469,42	121.916.100,00	636.144.569,42	(138.863.430,58)	82,08%
1 01 01 21 64	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 8	81.982.000,00	379.535.000,00	91.155.000,00	552.672.000,00	79.872.800,00	393.524.437,08	77.445.795,00	550.843.032,08	(1.828.967,92)	99,67%
1 01 01 21 65	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 9	82.200.000,00	345.728.000,00	133.400.000,00	561.328.000,00	51.005.000,00	281.122.031,53	64.434.100,00	396.561.131,53	(164.766.868,47)	70,65%
1 01 01 21 66	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 10	85.768.000,00	393.859.000,00	97.400.000,00	577.027.000,00	78.331.750,00	370.192.034,89	46.769.300,00	495.293.084,89	(81.733.915,11)	85,84%
1 01 01 21 67	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 11	51.900.000,00	466.242.000,00	145.563.000,00	663.705.000,00	42.550.000,00	533.196.653,52	108.860.000,00	684.606.653,52	20.901.653,52	103,15%
1 01 01 21 68	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 12	112.115.000,00	489.305.000,00	153.827.000,00	755.247.000,00	108.005.000,00	323.095.341,23	123.492.770,00	554.593.111,23	(200.653.888,77)	73,43%
1 01 01 21 69	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 13	65.960.000,00	501.264.000,00	154.600.000,00	721.824.000,00	27.619.000,00	389.939.890,64	137.874.455,00	555.433.345,64	(166.390.654,36)	76,95%
1 01 01 21 70	Kegiatan BOS pada SMP Negeri 14	50.325.000,00	379.183.000,00	101.628.000,00	531.136.000,00	39.702.500,00	351.933.720,67	99.869.765,00	491.505.985,67	(39.630.014,33)	92,54%
1 02 01	**Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana**	**8.456.414.690,00**	**59.230.621.310,00**	**3.465.164.000,00**	**71.152.200.000,00**	**7.834.742.851,00**	**49.865.726.729,20**	**3.219.463.000,75**	**60.919.932.580,95**	**(10.179.262.369,05)**	**85,62%**
1 02 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**574.936.000,00**	**627.717.000,00**	-	**1.202.653.000,00**	**571.334.000,00**	**543.356.433,00**	-	**1.114.690.433,00**	**(87.962.567,00)**	**92,69%**
1 02 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	574.936.000,00	213.067.000,00	0,00	788.003.000,00	571.334.000,00	200.852.211,00	0,00	772.186.211,00	(15.816.789,00)	97,99%
1 02 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	414.650.000,00	0,00	414.650.000,00	0,00	342.504.222,00	0,00	342.504.222,00	(72.145.778,00)	82,60%
1 02 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**276.222.000,00**	-	**276.222.000,00**	-	**218.500.196,00**	-	**218.500.196,00**	**(57.721.804,00)**	**79,10%**
1 02 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	10.558.000,00	0,00	10.558.000,00	0,00	7.975.000,00	0,00	7.975.000,00	(2.583.000,00)	75,54%
1 02 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	0,00	189.240.000,00	0,00	189.240.000,00	0,00	134.761.196,00	0,00	134.761.196,00	(54.478.804,00)	71,21%
1 02 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	76.424.000,00	0,00	76.424.000,00	0,00	75.764.000,00	0,00	75.764.000,00	(660.000,00)	99,14%
1 02 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**1.643.714.000,00**	**1.643.714.000,00**	-	-	**1.464.391.968,00**	**1.464.391.968,00**	**(179.322.032,00)**	**89,09%**
1 02 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	1.643.714.000,00	1.643.714.000,00	0,00	0,00	1.464.391.968,00	1.464.391.968,00	(179.322.032,00)	89,09%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**101.112.000,00**	**138.638.000,00**	-	**239.750.000,00**	**94.612.000,00**	**127.245.000,00**	-	**221.857.000,00**	**(17.893.000,00)**	**92,54%**
1 02 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	101.112.000,00	138.638.000,00	0,00	239.750.000,00	94.612.000,00	127.245.000,00	0,00	221.857.000,00	(17.893.000,00)	92,54%
1 02 01 15	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**834.109.000,00**	**14.223.094.000,00**	-	**15.057.203.000,00**	**788.761.000,00**	**13.184.847.725,00**	-	**13.973.608.725,00**	**(1.040.839.175,00)**	**92,80%**
1 02 01 15 01	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	11.342.000,00	246.563.000,00	0,00	257.905.000,00	9.210.000,00	232.930.400,00	0,00	242.140.400,00	(15.764.600,00)	93,89%
1 02 01 15 02	Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil	23.845.000,00	604.076.000,00	0,00	627.921.000,00	23.845.000,00	562.579.075,00	0,00	586.424.075,00	(41.496.925,00)	93,39%
1 02 01 15 03	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	6.474.000,00	92.848.000,00	0,00	99.322.000,00	6.439.000,00	90.785.200,00	0,00	97.224.200,00	(2.097.800,00)	97,89%
1 02 01 15 04	Kegiatan Penanggulangan masalah gizi pada balita.	73.451.000,00	599.599.000,00	0,00	673.050.000,00	72.351.000,00	538.399.975,00	0,00	610.750.975,00	(62.299.025,00)	90,74%
1 02 01 15 05	Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi	36.577.000,00	488.029.000,00	0,00	524.606.000,00	34.926.000,00	443.124.900,00	0,00	478.050.900,00	(3.800.000,00)	91,13%
1 02 01 15 06	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	23.610.000,00	1.362.118.000,00	0,00	1.385.728.000,00	23.551.000,00	1.283.263.200,00	0,00	1.306.814.200,00	(78.913.800,00)	94,31%
1 02 01 15 07	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	22.060.000,00	361.131.000,00	0,00	383.191.000,00	22.041.000,00	327.216.200,00	0,00	349.257.200,00	(33.933.800,00)	91,14%
1 02 01 15 08	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	217.545.000,00	507.228.000,00	0,00	724.773.000,00	217.533.000,00	474.215.100,00	0,00	691.748.100,00	(33.024.900,00)	95,44%
1 02 01 15 09	Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	14.350.000,00	112.859.000,00	0,00	127.209.000,00	14.050.000,00	110.530.900,00	0,00	124.580.900,00	(2.628.100,00)	97,93%
1 02 01 15 10	Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat	16.781.000,00	482.332.000,00	0,00	499.113.000,00	15.355.000,00	468.900.400,00	0,00	484.255.400,00	(14.857.600,00)	97,02%
1 02 01 15 11	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	58.345.000,00	480.484.000,00	0,00	538.829.000,00	52.195.000,00	426.758.600,00	0,00	478.953.600,00	(59.875.400,00)	88,89%
1 02 01 15 12	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	105.120.000,00	1.881.867.000,00	0,00	1.986.987.000,00	100.868.000,00	1.736.669.675,00	0,00	1.837.537.675,00	(149.449.325,00)	92,48%
1 02 01 15 13	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	46.130.000,00	410.808.000,00	0,00	456.938.000,00	39.058.000,00	401.118.050,00	0,00	440.176.050,00	(16.761.950,00)	96,33%
1 02 01 15 14	Kegiatan Pengembangan Taman Posyandu (BK.PROV)	2.400.000,00	52.600.000,00	0,00	55.000.000,00	2.400.000,00	50.369.200,00	0,00	52.769.200,00	(2.230.800,00)	95,94%
1 02 01 15 15	Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita	11.278.000,00	1.710.677.000,00	0,00	1.721.955.000,00	10.063.000,00	1.698.772.500,00	0,00	1.708.835.500,00	(13.119.500,00)	99,24%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 15 16	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	4.990.000,00	418.959.000,00	0,00	423.949.000,00	4.540.000,00	406.917.000,00	0,00	411.457.000,00	(12.492.000,00)	97,05%
1 02 01 15 17	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	2.200.000,00	275.063.000,00	0,00	277.263.000,00	2.200.000,00	266.513.000,00	0,00	268.713.000,00	(8.550.000,00)	96,92%
1 02 01 15 18	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	3.736.000,00	311.646.000,00	0,00	315.382.000,00	3.736.000,00	299.551.000,00	0,00	303.287.000,00	(12.095.000,00)	96,16%
1 02 01 15 19	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	2.800.000,00	287.193.000,00	0,00	289.993.000,00	2.800.000,00	287.070.000,00	0,00	289.870.000,00	(123.000,00)	99,96%
1 02 01 15 20	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	2.200.000,00	405.528.000,00	0,00	407.728.000,00	2.200.000,00	403.728.000,00	0,00	405.928.000,00	(1.800.000,00)	99,56%
1 02 01 15 21	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	2.200.000,00	327.744.000,00	0,00	329.944.000,00	2.200.000,00	315.941.500,00	0,00	318.141.500,00	(11.802.500,00)	96,42%
1 02 01 15 22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manguharjo (DAK)	2.200.000,00	313.800.000,00	0,00	316.000.000,00	2.200.000,00	312.349.750,00	0,00	314.549.750,00	(1.450.250,00)	99,54%
1 02 01 15 23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patihan(DAK)	5.000.000,00	374.850.000,00	0,00	379.850.000,00	5.000.000,00	370.475.000,00	0,00	375.475.000,00	(4.375.000,00)	98,85%
1 02 01 15 24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Demangan (DAK)	1.900.000,00	324.000.000,00	0,00	325.900.000,00	1.900.000,00	317.000.000,00	0,00	318.900.000,00	(7.000.000,00)	97,85%
1 02 01 15 25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banjarejo (DAK)	2.200.000,00	338.600.000,00	0,00	340.800.000,00	2.200.000,00	335.716.500,00	0,00	337.916.500,00	(2.883.500,00)	99,15%
1 02 01 15 26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Oro-Oro Ombo (DAK)	2.200.000,00	311.141.000,00	0,00	313.341.000,00	2.200.000,00	310.490.250,00	0,00	312.690.250,00	(650.750,00)	99,79%
1 02 01 15 27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawangrejo (DAK)	2.200.000,00	306.600.000,00	0,00	308.800.000,00	2.200.000,00	302.930.200,00	0,00	305.130.200,00	(3.669.800,00)	98,81%
1 02 01 15 28	Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK)	19.175.000,00	384.572.000,00	0,00	403.747.000,00	-	-	0,00	-	(403.747.000,00)	0,00%
1 02 01 15 29	Kegiatan Dukungan Manajemen BOK (DAK)	111.800.000,00	450.179.000,00	0,00	561.979.000,00	111.500.000,00	410.532.150,00	0,00	522.032.150,00	(39.946.850,00)	92,89%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 16	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**	**163.248.000,00**	**2.006.912.000,00**	-	**2.170.160.000,00**	**156.928.000,00**	**1.776.804.606,00**	-	**1.933.732.606,00**	**(226.177.444,00)**	**89,11%**
1 02 01 16 01	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	41.305.000,00	823.042.000,00	0,00	864.347.000,00	40.785.000,00	660.156.700,00	0,00	700.941.700,00	(163.405.300,00)	81,09%
1 02 01 16 02	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	23.310.000,00	105.535.000,00	0,00	128.845.000,00	19.438.000,00	99.157.050,00	0,00	118.595.050,00	0,00	92,04%
1 02 01 16 03	Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	6.825.000,00	29.304.000,00	0,00	36.129.000,00	6.825.000,00	27.553.900,00	0,00	34.378.900,00	(1.750.100,00)	95,16%
1 02 01 16 04	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	16.670.000,00	261.221.000,00	0,00	277.891.000,00	16.520.000,00	252.712.100,00	0,00	269.232.100,00	(8.658.900,00)	96,88%
1 02 01 16 05	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)	8.600.000,00	37.340.000,00	0,00	45.940.000,00	8.600.000,00	34.473.600,00	0,00	43.073.600,00	(2.866.400,00)	93,76%
1 02 01 16 06	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	2.180.000,00	35.191.000,00	0,00	37.371.000,00	2.060.000,00	34.390.550,00	0,00	36.450.550,00	(920.450,00)	97,54%
1 02 01 16 07	Kegiatan Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	40.000.000,00	51.131.000,00	0,00	91.131.000,00	40.000.000,00	38.556.000,00	0,00	78.556.000,00	(12.575.000,00)	86,20%
1 02 01 16 08	Kegistan Peningkatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Wanita Usia Subur (WUS)	1.800.000,00	32.910.000,00	0,00	34.710.000,00	1.550.000,00	32.410.000,00	0,00	33.960.000,00	(750.000,00)	97,84%
1 02 01 16 09	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	8.808.000,00	416.160.000,00	0,00	424.968.000,00	7.600.000,00	395.994.050,00	0,00	403.594.050,00	(21.373.950,00)	94,97%
1 02 01 16 10	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular	13.750.000,00	215.078.000,00	0,00	228.828.000,00	13.550.000,00	201.400.656,00	0,00	214.950.656,00	(13.877.344,00)	93,94%
1 02 01 17	**Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan**	**867.947.000,00**	**34.197.921.000,00**	**1.791.450.000,00**	**36.857.318.000,00**	**850.732.000,00**	**28.386.978.977,24**	**1.725.481.032,75**	**30.963.192.009,99**	**(5.894.125.990,01)**	**84,01%**
1 02 01 17 01	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	24.260.000,00	1.722.410.000,00	0,00	1.746.670.000,00	24.260.000,00	1.700.542.400,00	0,00	1.724.802.400,00	(21.867.600,00)	98,75%
1 02 01 17 03	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.100.000,00	59.095.000,00	0,00	61.195.000,00	1.750.000,00	54.296.800,00	0,00	56.046.800,00	(5.148.200,00)	91,59%
1 02 01 17 04	Kegiatan Pengelolaan Alat Kesehatan	1.500.000,00	76.962.000,00	0,00	78.462.000,00	1.500.000,00	66.358.803,00	0,00	67.858.803,00	(10.603.197,00)	86,49%
1 02 01 17 05	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan.	0,00	0,00	610.755.000,00	610.755.000,00	0,00	0,00	603.596.778,00	603.596.778,00	(7.158.222,00)	98,83%
1 02 01 17 06	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	54.834.000,00	236.227.000,00	0,00	291.061.000,00	53.258.000,00	223.961.300,00	0,00	277.219.300,00	(13.841.700,00)	95,24%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 17 07	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	3.152.000,00	69.666.000,00	0,00	72.818.000,00	3.152.000,00	66.366.000,00	0,00	69.518.000,00	(3.300.000,00)	95,47%
1 02 01 17 08	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	78.930.000,00	31.019.388.000,00	0,00	31.098.318.000,00	73.125.000,00	25.304.465.534,24	0,00	25.377.590.534,24	(5.720.727.465,76)	81,60%
1 02 01 17 09	Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	76.150.000,00	148.806.000,00	0,00	224.956.000,00	75.986.000,00	144.592.000,00	0,00	220.578.000,00	(4.378.000,00)	98,05%
1 02 01 17 10	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan	6.550.000,00	177.499.000,00	0,00	184.049.000,00	6.550.000,00	175.087.300,00	0,00	181.637.300,00	(2.411.700,00)	98,69%
1 02 01 17 11	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	73.750.000,00	182.002.000,00	0,00	255.752.000,00	66.238.000,00	179.371.100,00	0,00	245.609.100,00	(10.142.900,00)	96,03%
1 02 01 17 12	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kelun	0,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00	0,00	0,00	232.986.500,00	232.986.500,00	(3.152.500,00)	98,66%
1 02 01 17 13	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Pilangbango	0,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00	0,00	0,00	214.616.577,63	214.616.577,63	(21.522.422,37)	90,89%
1 02 01 17 14	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Rejomulyo	0,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00	0,00	0,00	235.882.400,00	235.882.400,00	(256.600,00)	99,89%
1 02 01 17 15	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Klegen	0,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00	0,00	0,00	207.583.477,12	207.583.477,12	(28.555.522,88)	87,91%
1 02 01 17 16	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Demangan	0,00	0,00	236.139.000,00	236.139.000,00	0,00	0,00	230.815.300,00	230.815.300,00	(5.323.700,00)	97,75%
1 02 01 17 18	Kegiatan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	21.960.000,00	17.930.000,00	0,00	39.890.000,00	21.910.000,00	13.980.000,00	0,00	35.890.000,00	(4.000.000,00)	89,97%
1 02 01 17 19	Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah	202.831.000,00	62.783.000,00	0,00	265.614.000,00	202.705.000,00	61.239.325,00	0,00	263.944.325,00	(1.669.675,00)	99,37%
1 02 01 17 20	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	189.700.000,00	180.007.000,00	0,00	369.707.000,00	189.100.000,00	172.522.350,00	0,00	361.622.350,00	(8.084.650,00)	97,81%
1 02 01 17 21	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	1.900.000,00	5.067.000,00	0,00	6.967.000,00	1.900.000,00	5.054.400,00	0,00	6.954.400,00	(12.600,00)	99,82%
1 02 01 17 22	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	-	100,00%
1 02 01 17 23	Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus	66.500.000,00	148.338.000,00	0,00	214.838.000,00	65.700.000,00	136.312.900,00	0,00	202.012.900,00	(12.825.100,00)	94,03%
1 02 01 17 24	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan Kesehatan	33.830.000,00	91.741.000,00	0,00	125.571.000,00	33.598.000,00	82.828.765,00	0,00	116.426.765,00	(9.144.235,00)	92,72%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 18	**Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD**	**5.529.594.690,00**	**4.474.309.310,00**	-	**10.003.904.000,00**	**5.050.452.851,00**	**2.857.330.191,96**	-	**7.907.783.042,96**	**(2.096.120.957,04)**	**79,05%**
1 02 01 18 01	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	697.868.240,00	470.877.760,00	0,00	1.168.746.000,00	633.404.372,00	255.346.909,00	0,00	888.751.281,00	(279.994.719,00)	76,04%
1 02 01 18 02	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan	915.145.000,00	748.755.000,00	0,00	1.663.900.000,00	878.190.064,00	418.378.586,00	0,00	1.296.568.650,00	(367.331.350,00)	77,92%
1 02 01 18 03	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	894.043.450,00	751.220.550,00	0,00	1.645.264.000,00	846.866.000,00	510.635.222,96	0,00	1.357.501.222,96	(287.762.777,04)	82,51%
1 02 01 18 04	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	1.182.263.000,00	967.307.000,00	0,00	2.149.570.000,00	901.848.756,00	565.411.120,00	0,00	1.467.259.876,00	(682.310.124,00)	68,26%
1 02 01 18 05	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	941.681.000,00	627.788.000,00	0,00	1.569.469.000,00	896.499.659,00	416.352.172,00	0,00	1.312.851.831,00	(256.617.169,00)	83,65%
1 02 01 18 06	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo.	898.594.000,00	908.361.000,00	0,00	1.806.955.000,00	893.644.000,00	691.206.182,00	0,00	1.584.850.182,00	(222.104.818,00)	87,71%
1 02 01 20	**Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga**	**385.468.000,00**	**3.285.808.000,00**	**30.000.000,00**	**3.701.276.000,00**	**321.923.000,00**	**2.770.663.600,00**	**29.590.000,00**	**3.122.176.600,00**	**(579.099.400,00)**	**84,35%**
1 02 01 20 01	Kegiatan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK, Keluarga Berencana dan Kesehatan	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	
1 02 01 20 02	Kegiatan Pelayanan KB, MKJP dan Konseling	19.024.000,00	240.976.000,00	0,00	260.000.000,00	12.274.000,00	152.423.500,00	0,00	164.697.500,00	(95.302.500,00)	63,35%
1 02 01 20 03	Kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	17.008.000,00	128.992.000,00	0,00	146.000.000,00	15.350.000,00	109.341.000,00	0,00	124.691.000,00	(21.309.000,00)	85,40%
1 02 01 20 04	Kegiatan Pemantapan Pelayanan KB dan Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota	11.034.000,00	26.192.000,00	0,00	37.226.000,00	11.034.000,00	25.392.000,00	0,00	36.426.000,00	(800.000,00)	97,85%
1 02 01 20 05	Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	33.362.000,00	226.865.000,00	30.000.000,00	290.227.000,00	24.276.000,00	119.422.400,00	29.590.000,00	173.288.400,00	(116.938.600,00)	59,71%
1 02 01 20 06	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	21.534.000,00	14.246.000,00	0,00	35.780.000,00	2.334.000,00	12.121.000,00	0,00	14.455.000,00	(21.325.000,00)	40,40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 01 20 07	Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi	9.334.000,00	42.324.000,00	0,00	51.658.000,00	3.880.000,00	25.298.000,00	0,00	29.178.000,00	(22.480.000,00)	56,48%
1 02 01 20 08	Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK)	81.400.000,00	344.050.000,00	0,00	425.450.000,00	73.950.000,00	314.784.500,00	0,00	388.734.500,00	(36.715.500,00)	91,37%
1 02 01 20 09	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga	6.418.000,00	77.958.000,00	0,00	84.376.000,00	4.468.000,00	60.167.500,00	0,00	64.635.500,00	(19.740.500,00)	76,60%
1 02 01 20 10	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	16.225.000,00	31.651.000,00	0,00	47.876.000,00	12.408.000,00	25.564.200,00	0,00	37.972.200,00	(9.903.800,00)	79,31%
1 02 01 20 11	Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS, IMP dan Keluarga Harmonis	51.478.000,00	397.930.000,00	0,00	449.408.000,00	51.316.000,00	389.092.500,00	0,00	440.408.500,00	(8.999.500,00)	98,00%
1 02 01 20 12	Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana	7.916.000,00	77.084.000,00	0,00	85.000.000,00	7.900.000,00	67.695.000,00	0,00	75.595.000,00	(9.405.000,00)	88,94%
1 02 01 20 13	Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS	12.188.000,00	129.442.000,00	0,00	141.630.000,00	10.066.000,00	74.897.250,00	0,00	84.963.250,00	(56.666.750,00)	59,99%
1 02 01 20 14	Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera	14.388.000,00	323.367.000,00	0,00	337.755.000,00	12.544.000,00	269.352.000,00	0,00	281.896.000,00	(55.859.000,00)	83,46%
1 02 01 20 15	Kegiatan Pembinaan Operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK), Sub.PPKBK dan Keluarga Kecil Bahagia dan Kesejahteraan (KKBS)-RT	5.300.000,00	587.065.000,00	0,00	592.365.000,00	5.025.000,00	586.464.500,00	0,00	591.489.500,00	(875.500,00)	99,85%
1 02 01 20 16	Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan	35.616.000,00	89.734.000,00	0,00	125.350.000,00	35.216.000,00	65.334.000,00	0,00	100.550.000,00	(24.800.000,00)	80,22%
1 02 01 20 17	Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
1 02 01 20 18	Kegiatan Orientasi dan Pembinaan Persiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	3.800.000,00	49.946.000,00	0,00	53.746.000,00	3.800.000,00	31.696.000,00	0,00	35.496.000,00	(18.250.000,00)	66,04%
1 02 01 20 19	Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	20.938.000,00	377.992.000,00	0,00	398.930.000,00	20.446.000,00	339.213.500,00	0,00	359.659.500,00	(39.270.500,00)	90,16%
1 02 01 20 20	Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja	11.625.000,00	104.231.000,00	0,00	115.856.000,00	9.606.000,00	86.643.500,00	0,00	96.249.500,00	(19.606.500,00)	83,08%
1 02 01 20 21	Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	6.880.000,00	15.763.000,00	0,00	22.643.000,00	6.030.000,00	15.761.250,00	0,00	21.791.250,00	(851.750,00)	96,24%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 02	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**6.255.554.000,00**	**65.655.021.000,00**	**11.259.552.000,00**	**83.170.127.000,00**	**5.668.098.800,00**	**64.543.943.842,73**	**9.427.538.955,00**	**79.639.581.597,73**	**(3.530.545.402,27)**	**145.69**
1 02 02 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.070.350.000,00**	-	-	**1.070.350.000,00**	**1.055.550.000,00**	-	-	**1.055.550.000,00**	**(14.800.000,00)**	**145.69**
1 02 02 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.350.000,00	0,00	0,00	1.070.350.000,00	1.055.550.000,00	0,00	0,00	1.055.550.000,00	(14.800.000,00)	98,62%
1 02 02 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**1.351.300.000,00**	**1.351.300.000,00**	-	-	**1.294.529.679,00**	**1.294.529.679,00**	**(56.770.321,00)**	**145.69**
1 02 02 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	1.351.300.000,00	1.351.300.000,00	0,00	0,00	1.294.529.679,00	1.294.529.679,00	(56.770.321,00)	95,80%
1 02 02 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**32.100.000,00**	**8.125.000,00**	-	**40.225.000,00**	**32.096.000,00**	**8.124.950,00**	-	**40.220.950,00**	**(4.050,00)**	**99,99%**
1 02 02 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	32.100.000,00	8.125.000,00	0,00	40.225.000,00	32.096.000,00	8.124.950,00	0,00	40.220.950,00	(4.050,00)	99,99%
1 02 02 06	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BLUD)	5.153.104.000,00	65.646.896.000,00	-	70.800.000.000,00	4.580.452.800,00	64.535.818.892,73	-	69.116.271.692,73	(1.683.728.307,27)	97,62%
1 02 02 06 01	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	5.153.104.000,00	65.646.896.000,00	0,00	70.800.000.000,00	4.580.452.800,00	64.535.818.892,73	0,00	69.116.271.692,73	(1.683.728.307,27)	97,62%
1 02 02 21	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**	-	-	**9.908.252.000,00**	**9.908.252.000,00**	-	-	**8.133.009.276,00**	**8.133.009.276,00**	**(1.775.242.724,00)**	**82,08%**
1 02 02 21 01	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	0,00	0,00	173.322.000,00	173.322.000,00	0,00	0,00	160.359.000,00	160.359.000,00	(12.963.000,00)	92,52%
1 02 02 21 05	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	0,00	0,00	545.285.000,00	545.285.000,00	0,00	0,00	544.284.727,00	544.284.727,00	(1.000.273,00)	99,82%
1 02 02 21 06	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (BLUD)	0,00	0,00	6.821.945.000,00	6.821.945.000,00	0,00	0,00	5.160.085.965,00	5.160.085.965,00	(1.661.859.035,00)	75,64%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 02 02 21 07	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (APBD)	0,00	0,00	2.367.700.000,00	2.367.700.000,00	0,00	0,00	2.268.279.584,00	2.268.279.584,00	(99.420.416,00)	95,80%
1 03 01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**2.082.786.000,00**	**5.467.365.000,00**	**136.944.889.000,00**	**144.495.040.000,00**	**1.894.387.050,00**	**5.176.800.786,00**	**125.734.459.218,00**	**132.805.647.054,00**	**(13.941.458.796,00)**	**(7.73)**
1 03 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.111.420.000,00**	**364.896.000,00**	-	**1.476.316.000,00**	**1.062.643.000,00**	**336.659.250,00**	-	**1.399.302.250,00**	**(77.013.750,00)**	**(7.73)**
1 03 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.111.420.000,00	251.396.000,00	0,00	1.362.816.000,00	1.062.643.000,00	224.368.150,00	0,00	1.287.011.150,00	(75.804.850,00)	94,44%
1 03 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	113.500.000,00	0,00	113.500.000,00	0,00	112.291.100,00	0,00	112.291.100,00	(1.208.900,00)	98,93%
1 03 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	**118.635.000,00**	**1.696.384.000,00**	-	**1.815.019.000,00**	**114.712.000,00**	**1.602.741.340,00**	-	**1.717.453.340,00**	**(97.565.660,00)**	**(7.73)**
1 03 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	108.635.000,00	789.816.000,00	0,00	898.451.000,00	106.528.000,00	777.936.250,00	0,00	884.464.250,00	(13.986.750,00)	98,44%
1 03 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	345.798.000,00	0,00	345.798.000,00	0,00	281.362.590,00	0,00	281.362.590,00	(64.435.410,00)	81,37%
1 03 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	10.000.000,00	560.770.000,00	0,00	570.770.000,00	8.184.000,00	543.442.500,00	0,00	551.626.500,00	(19.143.500,00)	96,65%
1 03 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**2.220.600.000,00**	**2.220.600.000,00**	-	-	**1.944.008.718,00**	**1.944.008.718,00**	**(276.591.282,00)**	87,54%
1 03 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	2.220.600.000,00	2.220.600.000,00	0,00	0,00	1.944.008.718,00	1.944.008.718,00	(276.591.282,00)	87,54%
1 03 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**58.149.000,00**	**13.501.000,00**	-	**71.650.000,00**	**58.108.000,00**	**13.332.750,00**	-	**71.440.750,00**	**(209.250,00)**	99,71%
1 03 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	58.149.000,00	13.501.000,00	0,00	71.650.000,00	58.108.000,00	13.332.750,00	0,00	71.440.750,00	(209.250,00)	99,71%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 03 01 16	**Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong**	**20.501.000,00**	**729.499.000,00**	**20.429.700.000,00**	**21.179.700.000,00**	**17.350.000,00**	**728.991.150,00**	**18.723.178.300,00**	**19.469.519.450,00**	**(1.710.180.550,00)**	**91,93%**
1 03 01 16 01	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	0,00	0,00	9.448.750.000,00	9.448.750.000,00	0,00	0,00	8.593.641.000,00	8.593.641.000,00	(855.109.000,00)	90,95%
1 03 01 16 02	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Madiun	0,00	0,00	10.032.500.000,00	10.032.500.000,00	0,00	0,00	9.391.577.000,00	9.391.577.000,00	(640.923.000,00)	93,61%
1 03 01 16 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/Gorong-gorong Kecamatan	20.501.000,00	729.499.000,00	0,00	750.000.000,00	17.350.000,00	728.991.150,00	0,00	746.341.150,00	(3.658.850,00)	99,51%
1 03 01 16 04	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.	0,00	0,00	948.450.000,00	948.450.000,00	0,00	0,00	737.960.300,00	737.960.300,00	(210.489.700,00)	77,81%
1 03 01 17	**Program Pengendalian Banjir**	**93.505.000,00**	**206.495.000,00**	**20.555.000.000,00**	**20.855.000.000,00**	**93.198.000,00**	**205.370.400,00**	**18.759.341.350,00**	**19.057.909.750,00**	**(1.736.768.650,00)**	**91,38%**
1 03 01 17 01	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	87.622.000,00	62.378.000,00	0,00	150.000.000,00	87.323.000,00	62.089.950,00	0,00	149.412.950,00	0,00	99,61%
1 03 01 17 02	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	5.883.000,00	144.117.000,00	0,00	150.000.000,00	5.875.000,00	143.280.450,00	0,00	149.155.450,00	0,00	99,44%
1 03 01 17 03	Kegiatan DED Pembangunan Daerah Tangkapan Air Pengendali Banjir Sumber Umis	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	136.110.000,00	136.110.000,00	0,00	69,80%
1 03 01 17 04	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	0,00	0,00	20.225.000.000,00	20.225.000.000,00	0,00	0,00	18.514.900.050,00	18.514.900.050,00	(1.710.099.950,00)	91,54%
1 03 01 17 05	Kegiatan DED Levelling Pompa Pandan	0,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	108.331.300,00	108.331.300,00	(26.668.700,00)	80,25%
1 03 01 18	**Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota**	**38.880.000,00**	**209.372.000,00**	**30.335.450.000,00**	**30.583.702.000,00**	**22.829.000,00**	**137.754.900,00**	**26.510.537.550,00**	**26.671.121.450,00**	**(6.224.968.000,00)**	**87,21%**
1 03 01 18 01	Kegiatan Penataan Lapangan Olah Raga.	0,00	0,00	6.101.000.000,00	6.101.000.000,00	0,00	0,00	5.801.518.950,00	5.801.518.950,00	(299.481.050,00)	95,09%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 03 01 18 03	Kegiatan Operasional Pembinaan Jasa Konstruksi	38.880.000,00	209.372.000,00	0,00	248.252.000,00	22.829.000,00	137.754.900,00	0,00	160.583.900,00	(87.668.100,00)	64,69%
1 03 01 18 04	Kegiatan Pembangunan Pujasera Sumber Umis (DED)	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	(494.700.000,00)	19,25%
1 03 01 18 05	Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum (WorkShop)	0,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	677.004.700,00	677.004.700,00	(122.995.300,00)	84,63%
1 03 01 18 06	Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan (Graha Krida Praja, Wisma Haji dan Stadion Wilis)	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	3.487.965.300,00	3.487.965.300,00	(512.034.700,00)	87,20%
1 03 01 18 11	Kegiatan Pembangunan Embung Lanjutan	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	666.545.400,00	666.545.400,00	(233.454.600,00)	74,06%
1 03 01 18 14	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Sekolah	0,00	0,00	14.961.350.000,00	14.961.350.000,00	0,00	0,00	13.039.616.450,00	13.039.616.450,00	(3.743.701.000,00)	87,16%
1 03 01 18 15	Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Dinas Kesehatan (DED)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 16	Pembangunan Gedung Instalasi Farmasi dan Gudang Obat Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 17	Kegiatan Pembangunan Paviliun Rumah Sakit (perencanaan dan MK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 18	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran (Garasi Damkar Satpol PP)	0,00	0,00	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	0,00	0,00	1.495.864.200,00	1.495.864.200,00	(314.635.800,00)	82,62%
1 03 01 18 19	Kegiatan Pembangunan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Review DED Pasar Bunga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 20	Kegiatan Pembangunan Puskesmas Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 21	Kegiatan Pembangunan Gedung Loundry Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 03 01 18 22	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
1 03 01 18 23	Kegiatan Perencanaan Saluran Lingkungan	0,00	0,00	1.354.700.000,00	1.354.700.000,00	0,00	0,00	943.702.550,00	943.702.550,00	(410.997.450,00)	69,66%
1 03 01 18 24	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pemerintah	0,00	0,00	402.600.000,00	402.600.000,00	0,00	0,00	397.300.000,00	397.300.000,00	(5.300.000,00)	98,68%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 03 01 19	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**167.689.000,00**	**73.196.000,00**	**46.604.139.000,00**	**46.845.024.000,00**	**158.956.000,00**	**62.071.000,00**	**44.142.843.300,00**	**44.363.870.300,00**	**(2.481.153.700,00)**	**94,70%**
1 03 01 19 01	Kegiatan Pembangunan Jalan Inspeksi	0,00	0,00	5.382.500.000,00	5.382.500.000,00	0,00	0,00	5.273.952.300,00	5.273.952.300,00	(108.547.700,00)	97,98%
1 03 01 19 02	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	265.553.000,00	265.553.000,00	0,00	0,00	262.428.000,00	262.428.000,00	(3.125.000,00)	98,82%
1 03 01 19 03	Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK)	0,00	0,00	15.962.000.000,00	15.962.000.000,00	0,00	0,00	15.262.763.000,00	15.262.763.000,00	(699.237.000,00)	95,62%
1 03 01 19 04	Kegiatan Survey dan Pengukuran.	16.150.000,00	245.000,00	0,00	16.395.000,00	15.000.000,00	-	0,00	15.000.000,00	(1.395.000,00)	91,49%
1 03 01 19 05	Kegiatan Pembangunan Jalan.	0,00	0,00	6.437.662.000,00	6.437.662.000,00	0,00	0,00	5.830.295.000,00	5.830.295.000,00	(607.367.000,00)	90,57%
1 03 01 19 06	Kegiatan Pembangunan Jembatan.	0,00	0,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.707.055.000,00	1.707.055.000,00	(92.945.000,00)	94,84%
1 03 01 19 07	Kegiatan Peningkatan Jalan	0,00	0,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00	7.447.600.000,00	7.447.600.000,00	(552.400.000,00)	93,10%
1 03 01 19 10	Kegiatan Pembangunan Pelengkap jalan.	0,00	0,00	8.743.674.000,00	8.743.674.000,00	0,00	0,00	8.358.750.000,00	8.358.750.000,00	(384.924.000,00)	95,60%
1 03 01 19 11	Kegiatan Monitoring Teknis	41.150.000,00	517.000,00	0,00	41.667.000,00	41.142.000,00	517.000,00	0,00	41.659.000,00	(8.000,00)	99,98%
1 03 01 19 12	Kegiatan Inspeksi Jalan	53.938.000,00	9.312.000,00	12.750.000,00	76.000.000,00	46.363.000,00	2.512.000,00	-	48.875.000,00	(27.125.000,00)	64,31%
1 03 01 19 13	Kegiatan Inspeksi Jembatan	12.338.000,00	2.662.000,00	0,00	15.000.000,00	12.338.000,00	2.662.000,00	0,00	15.000.000,00	-	100,00%
1 03 01 19 14	Kegiatan Pemutakiran Data Jalan dan Jembatan	2.963.000,00	60.037.000,00	0,00	63.000.000,00	2.963.000,00	55.957.000,00	0,00	58.920.000,00	(4.080.000,00)	93,52%
1 03 01 19 15	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	41.150.000,00	423.000,00	0,00	41.573.000,00	41.150.000,00	423.000,00	0,00	41.573.000,00	-	100,00%
1 03 01 20	**Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**96.753.000,00**	**1.295.776.000,00**	**16.800.000.000,00**	**18.192.529.000,00**	**92.603.000,00**	**1.287.243.142,00**	**15.654.550.000,00**	**17.034.396.142,00**	**(1.158.132.858,00)**	**93,63%**
1 03 01 20 01	Kegiatan Survey dan Pengukuran	16.150.000,00	398.000,00	0,00	16.548.000,00	16.150.000,00	398.000,00	0,00	16.548.000,00	-	100,00%
1 03 01 20 02	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan	0,00	0,00	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00	0,00	4.302.100.000,00	4.302.100.000,00	(297.900.000,00)	93,52%
1 03 01 20 03	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II	0,00	0,00	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	0,00	3.945.798.000,00	3.945.798.000,00	(254.202.000,00)	93,95%
1 03 01 20 04	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	0,00	0,00	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	0,00	0,00	3.524.692.000,00	3.524.692.000,00	(375.308.000,00)	90,38%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 03 01 20 05	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan Paket IV	0,00	0,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	0,00	0,00	3.881.960.000,00	3.881.960.000,00	(218.040.000,00)	94,68%
1 03 01 20 06	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Taman	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	249.863.000,00	0,00	249.863.000,00	(137.000,00)	99,95%
1 03 01 20 07	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Manguharjo	4.213.000,00	245.787.000,00	0,00	250.000.000,00	4.213.000,00	245.787.000,00	0,00	250.000.000,00	-	100,00%
1 03 01 20 08	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Kecamatan Kartoharjo	4.213.000,00	245.787.000,00	0,00	250.000.000,00	3.913.000,00	244.507.000,00	0,00	248.420.000,00	(1.580.000,00)	99,37%
1 03 01 20 09	Kegiatan Pemeliharaan jalan Ring Road.	6.096.000,00	243.904.000,00	0,00	250.000.000,00	5.246.000,00	243.904.000,00	0,00	249.150.000,00	(850.000,00)	99,66%
1 03 01 20 10	Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	3.688.000,00	146.312.000,00	0,00	150.000.000,00	3.688.000,00	146.055.242,00	0,00	149.743.242,00	(256.758,00)	99,83%
1 03 01 20 11	Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat	3.250.000,00	61.750.000,00	0,00	65.000.000,00	300.000,00	59.770.400,00	0,00	60.070.400,00	(4.929.600,00)	92,42%
1 03 01 20 12	Kegiatan Bimbingan Teknis Kebinamargaan	4.143.000,00	100.857.000,00	0,00	105.000.000,00	4.093.000,00	95.977.500,00	0,00	100.070.500,00	(4.929.500,00)	95,31%
1 03 01 20 13	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	55.000.000,00	981.000,00	0,00	55.981.000,00	55.000.000,00	981.000,00	0,00	55.981.000,00	-	100,00%
1 03 01 21	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang**	**377.254.000,00**	**878.246.000,00**	-	**1.255.500.000,00**	**273.988.050,00**	**802.636.854,00**	-	**1.076.624.904,00**	**(178.875.096,00)**	**85,75%**
1 03 01 21 01	Kegiatan Pendataan IMB	46.520.000,00	653.480.000,00	0,00	700.000.000,00	45.078.500,00	642.488.500,00	0,00	687.567.000,00	(12.433.000,00)	98,22%
1 03 01 21 02	Kegiatan Sosialisasi Konsolidasi Tanah	45.537.000,00	44.463.000,00	0,00	90.000.000,00	-	-	0,00	-	(90.000.000,00)	0,00%
1 03 01 21 03	Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	81.454.000,00	114.046.000,00	0,00	195.500.000,00	79.624.550,00	99.141.354,00	0,00	178.765.904,00	(16.734.096,00)	91,44%
1 03 01 21 04	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	122.319.000,00	27.681.000,00	0,00	150.000.000,00	96.808.000,00	22.881.000,00	0,00	119.689.000,00	(30.311.000,00)	79,79%
1 03 01 21 05	Kegiatan Survey dan Pemetaan	81.424.000,00	38.576.000,00	0,00	120.000.000,00	52.477.000,00	38.126.000,00	0,00	90.603.000,00	(29.397.000,00)	140,00
1 03 01 21 06	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	(100,00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 04 01	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**933.041.000,00**	**4.963.511.000,00**	**25.033.402.000,00**	**30.929.954.000,00**	**820.249.250,00**	**4.476.947.365,00**	**23.266.527.025,00**	**28.563.723.640,00**	**(2.366.230.360,00)**	**92,35%**
1 04 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**281.770.000,00**	**240.822.000,00**	-	**522.592.000,00**	**262.965.000,00**	**203.639.687,00**	-	**466.604.687,00**	**(55.987.313,00)**	**89,29%**
1 04 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281.770.000,00	115.822.000,00	0,00	397.592.000,00	262.965.000,00	115.527.900,00	0,00	378.492.900,00	(19.099.100,00)	95,20%
1 04 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	88.111.787,00	0,00	88.111.787,00	(36.888.213,00)	70,49%
1 04 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**138.350.000,00**	-	**138.350.000,00**	-	**137.747.051,00**	-	**137.747.051,00**	**(602.949,00)**	**99,56%**
1 04 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.397.800,00	0,00	49.397.800,00	(602.200,00)	98,80%
1 04 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	53.350.000,00	0,00	53.350.000,00	0,00	53.349.251,00	0,00	53.349.251,00	(749,00)	100,00%
1 04 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	-	100,00%
1 04 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana**	**20.184.000,00**	**1.816.000,00**	**1.178.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**19.004.000,00**	**1.816.000,00**	**1.113.567.623,00**	**1.134.387.623,00**	**(65.612.377,00)**	**94,53%**
1 04 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	20.184.000,00	1.816.000,00	1.178.000.000,00	1.200.000.000,00	19.004.000,00	1.816.000,00	1.113.567.623,00	1.134.387.623,00	(65.612.377,00)	94,53%
1 04 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**27.277.000,00**	**4.746.000,00**	-	**32.023.000,00**	**26.258.000,00**	**4.746.000,00**	-	**31.004.000,00**	**(1.019.000,00)**	**96,82%**
1 04 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27.277.000,00	4.746.000,00	0,00	32.023.000,00	26.258.000,00	4.746.000,00	0,00	31.004.000,00	(1.019.000,00)	96,82%
1 04 01 15	**Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**139.519.000,00**	**115.481.000,00**	-	**255.000.000,00**	**135.031.000,00**	**72.111.000,00**	-	**207.142.000,00**	**(47.858.000,00)**	**81,23%**
1 04 01 15 01	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	20.732.000,00	9.268.000,00	0,00	30.000.000,00	20.182.000,00	8.368.000,00	0,00	28.550.000,00	(1.450.000,00)	95,17%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 04 01 15 02	Kegiatan Fasilitasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	36.804.000,00	13.196.000,00	0,00	50.000.000,00	36.676.000,00	13.190.000,00	0,00	49.866.000,00	(134.000,00)	99,73%
1 04 01 15 03	Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pertanahan	28.763.000,00	46.237.000,00	0,00	75.000.000,00	25.000.000,00	38.958.000,00	0,00	63.958.000,00	(11.042.000,00)	85,28%
1 04 01 15 06	Kegiatan Pembuatan Naskah Akademik Ijin Lokasi	53.220.000,00	46.780.000,00	0,00	100.000.000,00	53.173.000,00	11.595.000,00	0,00	64.768.000,00	(35.232.000,00)	64,77%
1 04 01 16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**261.068.000,00**	**379.932.000,00**	**3.500.000.000,00**	**4.141.000.000,00**	**207.560.250,00**	**263.775.850,00**	**2.593.545.345,00**	**3.064.881.445,00**	**(1.076.118.555,00)**	**74,01%**
1 04 01 16 05	Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan (DAK)	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.240.481.345,00	1.240.481.345,00	(759.518.655,00)	62,02%
1 04 01 16 09	Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK	22.071.000,00	102.929.000,00	0,00	125.000.000,00	19.172.250,00	50.827.750,00	0,00	70.000.000,00	(55.000.000,00)	56,00%
1 04 01 16 10	Kegiatan Updating Data Kawasan Permukiman Kumuh	36.445.000,00	53.555.000,00	0,00	90.000.000,00	36.389.000,00	53.460.300,00	0,00	89.849.300,00	(150.700,00)	99,83%
1 04 01 16 11	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan (Pavingisasi)	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.353.064.000,00	1.353.064.000,00	(146.936.000,00)	90,20%
1 04 01 16 12	Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Ijin Perumahan	37.596.000,00	12.404.000,00	0,00	50.000.000,00	7.232.500,00	1.055.000,00	0,00	8.287.500,00	(41.712.500,00)	16,58%
1 04 01 16 13	Kegiatan Fasilitasi Rusunawa	47.271.000,00	93.729.000,00	0,00	141.000.000,00	46.421.000,00	63.222.400,00	0,00	109.643.400,00	(31.356.600,00)	77,76%
1 04 01 16 14	Kegiatan Perencanaan dan Sosialisasi RTLH	34.147.000,00	40.853.000,00	0,00	75.000.000,00	30.253.000,00	24.036.000,00	0,00	54.289.000,00	(20.711.000,00)	72,39%
1 04 01 16 15	Kegiatan Pemeliharaan MCK, IPAL Wilayah Kota Madiun	7.646.000,00	42.354.000,00	0,00	50.000.000,00	6.254.000,00	40.354.000,00	0,00	46.608.000,00	(3.392.000,00)	93,22%
1 04 01 16 16	Kegiatan BOP Infrastruktur Berbasis Masyarakat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	36.696.000,00	26.304.000,00	0,00	63.000.000,00	34.668.500,00	26.304.000,00	0,00	60.972.500,00	(2.027.500,00)	96,78%
1 04 01 16 17	Kegiatan Inventarisasi Fasum Fasos Perumahan	39.196.000,00	7.804.000,00	0,00	47.000.000,00	27.170.000,00	4.516.400,00	0,00	31.686.400,00	(15.313.600,00)	67,42%
1 04 01 17	**Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**	**203.223.000,00**	**4.082.364.000,00**	**20.355.402.000,00**	**24.640.989.000,00**	**169.431.000,00**	**3.793.111.777,00**	**19.559.414.057,00**	**23.521.956.834,00**	**(1.119.032.166,00)**	**95,46%**
1 04 01 17 01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Alun-Alun	3.750.000,00	101.250.000,00	0,00	105.000.000,00	3.700.000,00	97.901.000,00	0,00	101.601.000,00	(3.399.000,00)	96,76%
1 04 01 17 02	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	0,00	0,00	2.432.344.000,00	2.432.344.000,00	0,00	0,00	2.330.899.900,00	2.330.899.900,00	(101.444.100,00)	95,83%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 04 01 17 03	Kegiatan Pemeliharaan Taman Bantaran	3.825.000,00	101.175.000,00	0,00	105.000.000,00	3.825.000,00	97.367.400,00	0,00	101.192.400,00	(3.807.600,00)	96,37%
1 04 01 17 04	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	0,00	0,00	3.719.644.000,00	3.719.644.000,00	0,00	0,00	3.702.111.450,00	3.702.111.450,00	(17.532.550,00)	99,53%
1 04 01 17 05	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau	4.850.000,00	170.150.000,00	0,00	175.000.000,00	3.550.000,00	163.897.800,00	0,00	167.447.800,00	(7.552.200,00)	95,68%
1 04 01 17 06	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	2.850.000,00	197.150.000,00	0,00	200.000.000,00	2.850.000,00	197.081.760,00	0,00	199.931.760,00	(68.240,00)	99,97%
1 04 01 17 07	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	0,00	0,00	1.409.525.000,00	1.409.525.000,00	0,00	0,00	1.371.269.000,00	1.371.269.000,00	(38.256.000,00)	97,29%
1 04 01 17 08	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Pertamanan dan PJU	0,00	0,00	7.419.300.000,00	7.419.300.000,00	0,00	0,00	7.258.481.007,00	7.258.481.007,00	(160.818.993,00)	97,83%
1 04 01 17 09	Kegiatan Penyusunan Raperda Pengelolaan RTH	28.900.000,00	171.100.000,00	0,00	200.000.000,00	28.200.000,00	162.228.323,00	0,00	190.428.323,00	(9.571.677,00)	95,21%
1 04 01 17 10	Kegiatan Sosialisasi Pertamanan, PJU, Pemakaman	77.750.000,00	261.000.000,00	254.000.000,00	592.750.000,00	50.550.000,00	164.256.000,00	245.550.000,00	460.356.000,00	(132.394.000,00)	77,66%
1 04 01 17 11	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih).	3.500.000,00	1.378.843.000,00	9.000.000,00	1.391.343.000,00	3.500.000,00	1.250.561.924,00	8.949.000,00	1.263.010.924,00	(128.332.076,00)	90,78%
1 04 01 17 12	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan..	4.150.000,00	224.850.000,00	0,00	229.000.000,00	3.700.000,00	215.578.100,00	0,00	219.278.100,00	(9.721.900,00)	95,75%
1 04 01 17 13	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	2.850.000,00	272.150.000,00	0,00	275.000.000,00	2.850.000,00	269.296.800,00	0,00	272.146.800,00	(2.853.200,00)	98,96%
1 04 01 17 14	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP	35.387.000,00	316.627.000,00	0,00	352.014.000,00	35.312.000,00	315.385.900,00	0,00	350.697.900,00	(1.316.100,00)	99,63%
1 04 01 17 15	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman.	0,00	0,00	3.567.714.000,00	3.567.714.000,00	0,00	0,00	3.115.108.700,00	3.115.108.700,00	(452.605.300,00)	87,31%
1 04 01 17 17	Kegiatan pemeliharaan makam Pace Keras	4.250.000,00	132.350.000,00	13.400.000,00	150.000.000,00	2.375.000,00	131.155.750,00	13.400.000,00	146.930.750,00	(3.069.250,00)	97,95%
1 04 01 17 18	Kegiatan Pemeliharaan Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun	5.782.000,00	114.218.000,00	0,00	120.000.000,00	5.782.000,00	112.700.900,00	0,00	118.482.900,00	(1.517.100,00)	98,74%
1 04 01 17 19	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	4.075.000,00	195.925.000,00	0,00	200.000.000,00	2.275.000,00	190.937.000,00	0,00	193.212.000,00	(6.788.000,00)	96,61%
1 04 01 17 23	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Lapangan Demangan Madiun	6.804.000,00	358.196.000,00	35.000.000,00	400.000.000,00	6.762.000,00	345.233.020,00	34.100.000,00	386.095.020,00	(13.904.980,00)	96,52%
1 04 01 17 24	Kegiatan Prometer (Program Madiun Terang)	1.400.000,00	73.600.000,00	0,00	75.000.000,00	1.400.000,00	73.147.400,00	0,00	74.547.400,00	(452.600,00)	99,40%
1 04 01 17 25	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	2.300.000,00	1.200.000,00	96.500.000,00	100.000.000,00	2.000.000,00	1.197.200,00	95.810.000,00	99.007.200,00	(992.800,00)	99,01%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 04 01 17 26	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi (DBH-CHT)	10.800.000,00	12.580.000,00	1.398.975.000,00	1.422.355.000,00	10.800.000,00	5.185.500,00	1.383.735.000,00	1.399.720.500,00	(22.634.500,00)	98,41%
1 05 01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**2.330.311.000,00**	**5.466.960.000,00**	**3.087.500.000,00**	**10.884.771.000,00**	**2.156.765.000,00**	**4.721.581.350,00**	**2.789.678.800,00**	**9.668.025.150,00**	**(1.014.556.850,00)**	88,82%
1 05 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.484.560.000,00**	**309.464.000,00**	-	**1.794.024.000,00**	**1.403.530.000,00**	**249.884.500,00**	-	**1.653.414.500,00**	**(140.609.500,00)**	92,16%
1 05 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.484.560.000,00	135.590.000,00	0,00	1.620.150.000,00	1.403.530.000,00	97.184.200,00	0,00	1.500.714.200,00	(119.435.800,00)	92,63%
1 05 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	173.874.000,00	0,00	173.874.000,00	0,00	152.700.300,00	0,00	152.700.300,00	(21.173.700,00)	87,82%
1 05 01 02	**Program pemeliharaan**	-	**341.175.000,00**	-	**341.175.000,00**	-	**282.273.850,00**	-	**282.273.850,00**	**(58.901.150,00)**	82,74%
1 05 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-	100,00%
1 05 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	306.175.000,00	0,00	306.175.000,00	0,00	256.240.850,00	0,00	256.240.850,00	(49.934.150,00)	83,69%
1 05 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.033.000,00	0,00	11.033.000,00	(8.967.000,00)	55,17%
1 05 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**10.100.000,00**	**158.275.000,00**	**962.500.000,00**	**1.130.876.000,00**	**10.100.000,00**	**158.192.800,00**	**920.504.000,00**	**1.088.796.800,00**	**(42.079.200,00)**	**96,28%**
1 05 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	7.250.000,00	1.226.000,00	962.500.000,00	970.976.000,00	7.250.000,00	1.170.800,00	920.504.000,00	928.924.800,00	(42.051.200,00)	95,67%
1 05 01 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.850.000,00	157.050.000,00	0,00	159.900.000,00	2.850.000,00	157.022.000,00	0,00	159.872.000,00	(28.000,00)	99,98%
1 05 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**11.400.000,00**	**8.600.000,00**	-	**20.000.000,00**	**11.100.000,00**	**6.821.000,00**	-	**17.921.000,00**	(2.079.000,00)	89,61%
1 05 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11.400.000,00	8.600.000,00	0,00	20.000.000,00	11.100.000,00	6.821.000,00	0,00	17.921.000,00	(2.079.000,00)	89,61%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 05 01 15	**Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas**	**50.700.000,00**	**516.736.000,00**	-	**567.436.000,00**	**36.750.000,00**	**464.144.000,00**	-	**500.894.000,00**	**(66.542.000,00)**	**88,27%**
1 05 01 15 01	Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	1.400.000,00	78.600.000,00	0,00	80.000.000,00	1.400.000,00	78.600.000,00	0,00	80.000.000,00	-	100,00%
1 05 01 15 02	Kegiatan Pelatihan Outbond	1.650.000,00	33.350.000,00	0,00	35.000.000,00	-	31.680.000,00	0,00	31.680.000,00	(3.320.000,00)	90,51%
1 05 01 15 03	Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	46.050.000,00	335.950.000,00	0,00	382.000.000,00	33.750.000,00	294.624.000,00	0,00	328.374.000,00	(53.626.000,00)	85,96%
1 05 01 15 04	Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	1.600.000,00	68.836.000,00	0,00	70.436.000,00	1.600.000,00	59.240.000,00	0,00	60.840.000,00	(9.596.000,00)	86,38%
1 05 01 16	**Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**418.275.000,00**	**637.340.000,00**	-	**1.055.615.000,00**	**404.030.000,00**	**503.701.000,00**	-	**907.731.000,00**	**(147.884.000,00)**	**85,99%**
1 05 01 16 01	Kegiatan Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	179.500.000,00	80.500.000,00	0,00	260.000.000,00	175.485.000,00	72.684.000,00	0,00	248.169.000,00	(11.831.000,00)	95,45%
1 05 01 16 02	Kegiatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyrakat	37.310.000,00	87.970.000,00	0,00	125.280.000,00	37.285.000,00	66.865.000,00	0,00	104.150.000,00	(21.130.000,00)	83,13%
1 05 01 16 03	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.000.000,00	93.120.000,00	0,00	98.120.000,00	4.750.000,00	84.186.000,00	0,00	88.936.000,00	(9.184.000,00)	90,64%
1 05 01 16 04	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	155.800.000,00	145.930.000,00	0,00	301.730.000,00	153.495.000,00	76.846.000,00	0,00	230.341.000,00	(71.389.000,00)	76,34%
1 05 01 16 05	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	40.665.000,00	229.820.000,00	0,00	270.485.000,00	33.015.000,00	203.120.000,00	0,00	236.135.000,00	(34.350.000,00)	87,30%
1 05 01 17	**Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**	**62.925.000,00**	**26.900.000,00**	-	**89.825.000,00**	**53.475.000,00**	**23.550.000,00**	-	**77.025.000,00**	**(12.800.000,00)**	**85,75%**
1 05 01 17 01	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	62.925.000,00	26.900.000,00	0,00	89.825.000,00	53.475.000,00	23.550.000,00	0,00	77.025.000,00	(12.800.000,00)	85,75%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 05 01 18	**Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**21.325.000,00**	**188.925.000,00**	**2.125.000.000,00**	**2.335.250.000,00**	**11.850.000,00**	**148.888.200,00**	**1.869.174.800,00**	**2.029.913.000,00**	**(305.337.000,00)**	**86,92%**
1 05 01 18 01	Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	21.325.000,00	188.925.000,00	0,00	210.250.000,00	11.850.000,00	148.888.200,00	0,00	160.738.200,00	(49.511.800,00)	76,45%
1 05 01 18 02	Kegiatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran (DAMKAR), Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 05 01 18 03	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran	0,00	0,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	-	0,00	1.869.174.800,00	1.869.174.800,00	(255.825.200,00)	87,96%
1 05 01 19	**Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat**	**271.026.000,00**	**3.279.544.000,00**	-	**3.550.570.000,00**	**225.930.000,00**	**2.884.126.000,00**	-	**3.110.056.000,00**	**(238.325.000,00)**	**87,59%**
1 05 01 19 01	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.676.000,00	119.324.000,00	0,00	137.000.000,00	12.000.000,00	115.951.000,00	0,00	127.951.000,00	(9.049.000,00)	93,39%
1 05 01 19 02	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	115.525.000,00	246.295.000,00	0,00	361.820.000,00	111.105.000,00	238.688.500,00	0,00	349.793.500,00	(12.026.500,00)	96,68%
1 05 01 19 03	Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat	110.100.000,00	2.693.850.000,00	0,00	2.803.950.000,00	76.725.000,00	2.325.175.500,00	0,00	2.401.900.500,00	(402.049.500,00)	85,66%
1 05 01 19 04	Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	1.800.000,00	61.200.000,00	0,00	63.000.000,00	1.800.000,00	53.861.000,00	0,00	55.661.000,00	0,00	88,35%
1 05 01 19 05	Kegiatan Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat	25.925.000,00	158.875.000,00	0,00	184.800.000,00	24.300.000,00	150.450.000,00	0,00	174.750.000,00	184.800.000,00	94,56%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 05 02	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**312.613.000,00**	**2.078.165.000,00**	**28.618.350.000,00**	**31.009.128.000,00**	**287.333.000,00**	**1.506.745.066,00**	**28.600.317.381,00**	**30.394.395.447,00**	**(614.732.553,00)**	**98,02%**
1 05 02 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**139.078.000,00**	**469.492.000,00**	-	**608.570.000,00**	**118.787.000,00**	**285.334.556,00**	-	**404.121.556,00**	**(204.448.444,00)**	**66,41%**
1 05 02 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan	139.078.000,00	211.872.000,00	0,00	350.950.000,00	118.787.000,00	157.839.250,00	0,00	276.626.250,00	(74.323.750,00)	78,82%
1 05 02 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	257.620.000,00	0,00	257.620.000,00	0,00	127.495.306,00	0,00	127.495.306,00	(130.124.694,00)	49,49%
1 05 02 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**423.730.000,00**	-	**423.730.000,00**	-	**108.346.814,00**	-	**108.346.814,00**	**(315.383.186,00)**	**25,57%**
1 05 02 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	-	100,00%
1 05 02 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	399.550.000,00	0,00	399.550.000,00	0,00	92.013.814,00	0,00	92.013.814,00	(307.536.186,00)	23,03%
1 05 02 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana	0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	12.953.000,00	0,00	12.953.000,00	(7.847.000,00)	62,27%
1 05 02 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**28.618.350.000,00**	**28.618.350.000,00**	-	-	**28.600.317.381,00**	**28.600.317.381,00**	**(18.032.619,00)**	**99,94%**
1 05 02 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	28.618.350.000,00	28.618.350.000,00	0,00	0,00	28.600.317.381,00	28.600.317.381,00	(18.032.619,00)	99,94%
1 05 02 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**39.044.000,00**	**934.000,00**	-	**39.978.000,00**	**38.987.000,00**	**933.500,00**	-	**39.920.500,00**	**(57.500,00)**	**99,86%**
1 05 02 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39.044.000,00	934.000,00	0,00	39.978.000,00	38.987.000,00	933.500,00	0,00	39.920.500,00	(57.500,00)	99,86%
1 05 02 20	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam**	**134.491.000,00**	**1.184.009.000,00**	-	**1.318.500.000,00**	**129.559.000,00**	**1.112.130.196,00**	-	**1.241.689.196,00**	**(76.810.804,00)**	**94,17%**
1 05 02 20 01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	20.785.000,00	691.715.000,00	0,00	712.500.000,00	20.779.000,00	657.739.296,00	0,00	678.518.296,00	(33.981.704,00)	95,23%
1 05 02 20 02	Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	18.694.000,00	189.306.000,00	0,00	208.000.000,00	18.597.000,00	177.855.600,00	0,00	196.452.600,00	(11.547.400,00)	94,45%
1 05 02 20 03	Penyuluhan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	39.694.000,00	110.306.000,00	0,00	150.000.000,00	39.632.000,00	106.965.400,00	0,00	146.597.400,00	(3.402.600,00)	97,73%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 05 02 20 04	Pendataan Korban Pasca Bencana	18.050.000,00	21.950.000,00	0,00	40.000.000,00	16.984.000,00	15.090.000,00	0,00	32.074.000,00	(7.926.000,00)	80,19%
1 05 02 20 05	Mitigasi Penanggulangan Bencana	37.268.000,00	170.732.000,00	0,00	208.000.000,00	33.567.000,00	154.479.900,00	0,00	188.046.900,00	(19.953.100,00)	90,41%
1 06 01	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**1.779.677.000,00**	**6.574.199.000,00**	**807.265.000,00**	**9.161.141.000,00**	**1.491.997.000,00**	**5.295.221.186,00**	**666.503.978,00**	**7.453.722.164,00**	**(1.707.418.836,00)**	**81,36%**
1 06 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**248.030.000,00**	**490.771.000,00**	-	**738.801.000,00**	**246.734.000,00**	**316.783.850,00**	-	**563.517.850,00**	**(175.283.150,00)**	**76,27%**
1 06 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.030.000,00	347.725.000,00	0,00	595.755.000,00	246.734.000,00	178.403.850,00	0,00	425.137.850,00	(170.617.150,00)	71,36%
1 06 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	143.046.000,00	0,00	143.046.000,00	0,00	138.380.000,00	0,00	138.380.000,00	(4.666.000,00)	96,74%
1 06 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**228.213.000,00**	-	**228.213.000,00**	-	**150.282.000,00**	-	**150.282.000,00**	**(77.931.000,00)**	**65,85%**
1 06 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	44.737.000,00	0,00	44.737.000,00	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	(937.000,00)	97,91%
1 06 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	106.976.000,00	0,00	106.976.000,00	0,00	79.342.000,00	0,00	79.342.000,00	(27.634.000,00)	74,17%
1 06 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	76.500.000,00	0,00	76.500.000,00	0,00	27.140.000,00	0,00	27.140.000,00	(49.360.000,00)	35,48%
1 06 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**807.265.000,00**	**807.265.000,00**	-	-	**666.503.978,00**	**666.503.978,00**	**(140.761.022,00)**	**82,56%**
1 06 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	807.265.000,00	807.265.000,00	0,00	0,00	666.503.978,00	666.503.978,00	(140.761.022,00)	82,56%
1 06 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**40.805.000,00**	**8.695.000,00**	-	**49.500.000,00**	**40.629.000,00**	**7.873.000,00**	-	**48.502.000,00**	**(998.000,00)**	**97,98%**
1 06 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.805.000,00	8.695.000,00	0,00	49.500.000,00	40.629.000,00	7.873.000,00	0,00	48.502.000,00	(998.000,00)	97,98%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 06 01 15	**Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial**	**841.669.000,00**	**2.626.588.000,00**	-	**3.468.257.000,00**	**632.302.000,00**	**2.249.665.815,00**	-	**2.881.967.815,00**	**(586.289.185,00)**	**83,10%**
1 06 01 15 01	Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	49.214.000,00	110.835.000,00	0,00	160.049.000,00	39.252.000,00	89.238.400,00	0,00	128.490.400,00	(31.558.600,00)	80,28%
1 06 01 15 02	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Bagi PMKS	134.166.000,00	240.914.000,00	0,00	375.080.000,00	108.382.000,00	203.560.900,00	0,00	311.942.900,00	(63.137.100,00)	83,17%
1 06 01 15 03	Kegiatan Pembinaan Perintis Kemerdekaan/Keluarganya, Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	21.336.000,00	39.936.000,00	0,00	61.272.000,00	5.628.000,00	36.379.000,00	0,00	42.007.000,00	(19.265.000,00)	68,56%
1 06 01 15 04	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial..	95.224.000,00	200.896.000,00	0,00	296.120.000,00	80.166.000,00	171.894.465,00	0,00	252.060.465,00	(44.059.535,00)	85,12%
1 06 01 15 05	Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan PSM	28.932.000,00	248.548.000,00	0,00	277.480.000,00	23.000.000,00	239.318.500,00	0,00	262.318.500,00	(15.161.500,00)	94,54%
1 06 01 15 06	Kegiatan Pemantapan TAGANA	33.188.000,00	116.475.000,00	0,00	149.663.000,00	13.950.000,00	107.095.000,00	0,00	121.045.000,00	(28.618.000,00)	80,88%
1 06 01 15 07	Kegiatan Pembinaan Pelatihan Karang Taruna	40.428.000,00	70.828.000,00	0,00	111.256.000,00	26.770.000,00	66.434.000,00	0,00	93.204.000,00	(18.052.000,00)	83,77%
1 06 01 15 08	Kegiatan Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	188.718.000,00	1.165.747.000,00	0,00	1.354.465.000,00	154.504.000,00	991.034.400,00	0,00	1.145.538.400,00	(208.926.600,00)	84,57%
1 06 01 15 09	Kegiatan Pembinaan WKSBM	23.978.000,00	50.432.000,00	0,00	74.410.000,00	11.694.000,00	47.766.000,00	0,00	59.460.000,00	(14.950.000,00)	79,91%
1 06 01 15 10	Kegiatan Lomba Karang Werda Tingkat Kota dan Provinsi	41.170.000,00	67.650.000,00	0,00	108.820.000,00	19.178.000,00	59.585.000,00	0,00	78.763.000,00	(30.057.000,00)	72,38%
1 06 01 15 11	Kegiatan Pembinaan Pelatihan Panti Asuhan	26.354.000,00	27.878.000,00	0,00	54.232.000,00	11.060.000,00	25.457.900,00	0,00	36.517.900,00	(17.714.100,00)	67,34%
1 06 01 15 12	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	133.295.000,00	92.605.000,00	0,00	225.900.000,00	113.952.000,00	70.282.400,00	0,00	184.234.400,00	(41.665.600,00)	81,56%
1 06 01 15 14	Kegiatan Sunat Masal	16.658.000,00	89.968.000,00	0,00	106.626.000,00	15.758.000,00	62.933.850,00	0,00	78.691.850,00	(27.934.150,00)	73,80%
1 06 01 15 15	Kegiatan Nikah Masal	9.008.000,00	103.876.000,00	0,00	112.884.000,00	9.008.000,00	78.686.000,00	0,00	87.694.000,00	(25.190.000,00)	77,69%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 06 01 16	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	**513.421.000,00**	**2.450.359.000,00**	-	**2.963.780.000,00**	**439.068.000,00**	**1.877.847.155,00**	-	**2.316.915.155,00**	**(646.864.845,00)**	**78,17%**
1 06 01 16 01	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	122.154.000,00	217.346.000,00	0,00	339.500.000,00	122.082.000,00	209.735.000,00	0,00	331.817.000,00	(7.683.000,00)	97,74%
1 06 01 16 02	Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS	77.373.000,00	227.434.000,00	0,00	304.807.000,00	64.618.000,00	161.440.500,00	0,00	226.058.500,00	(78.748.500,00)	74,16%
1 06 01 16 03	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	20.407.000,00	115.773.000,00	0,00	136.180.000,00	17.634.000,00	100.643.000,00	0,00	118.277.000,00	(17.903.000,00)	86,85%
1 06 01 16 04	Kegiatan Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah (PPSP)	18.768.000,00	122.232.000,00	0,00	141.000.000,00	18.262.000,00	105.141.000,00	0,00	123.403.000,00	(17.597.000,00)	87,52%
1 06 01 16 05	Kegiatan Pelatihan dan Pameran Karya Perempuan di Bidang Ekonomi Kreatif	19.984.000,00	231.410.000,00	0,00	251.394.000,00	18.428.000,00	181.666.000,00	0,00	200.094.000,00	(51.300.000,00)	79,59%
1 06 01 16 06	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	33.766.000,00	596.353.000,00	0,00	630.119.000,00	33.463.000,00	557.843.300,00	0,00	591.306.300,00	(38.812.700,00)	93,84%
1 06 01 16 07	Kegiatan Pemantapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	62.627.000,00	114.993.000,00	0,00	177.620.000,00	61.713.000,00	99.753.050,00	0,00	161.466.050,00	(16.153.950,00)	90,91%
1 06 01 16 08	Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	3.350.000,00	16.950.000,00	0,00	20.300.000,00	3.300.000,00	16.512.000,00	0,00	19.812.000,00	(488.000,00)	97,60%
1 06 01 16 09	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan.	34.846.000,00	130.274.000,00	0,00	165.120.000,00	18.430.000,00	124.180.450,00	0,00	142.610.450,00	(22.509.550,00)	86,37%
1 06 01 16 10	Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas	28.971.000,00	169.584.000,00	0,00	198.555.000,00	21.521.000,00	126.235.713,00	0,00	147.756.713,00	(50.798.287,00)	74,42%
1 06 01 16 11	Kegiatan Pameran BBGRM, HKG PKK Tk Provinsi Jawa Timur dan Tk. Nasional	21.984.000,00	228.016.000,00	0,00	250.000.000,00	16.519.000,00	81.193.492,00	0,00	97.712.492,00	(152.287.508,00)	39,08%
1 06 01 16 12	Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 06 01 16 13	Kegiatan Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	69.191.000,00	279.994.000,00	0,00	349.185.000,00	43.098.000,00	113.503.650,00	0,00	156.601.650,00	(192.583.350,00)	44,85%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 06 01 17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak**	**135.752.000,00**	**769.573.000,00**	-	**905.325.000,00**	**133.264.000,00**	**692.769.366,00**	-	**826.033.366,00**	**(79.291.634,00)**	**91,24%**
1 06 01 17 01	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	28.216.000,00	139.644.000,00	0,00	167.860.000,00	26.455.000,00	126.664.456,00	0,00	153.119.456,00	(14.740.544,00)	91,22%
1 06 01 17 02	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	27.251.000,00	234.449.000,00	0,00	261.700.000,00	27.092.000,00	194.644.110,00	0,00	221.736.110,00	(39.963.890,00)	84,73%
1 06 01 17 03	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan Konvensi Hak Anak	18.188.000,00	96.397.000,00	0,00	114.585.000,00	18.060.000,00	84.755.000,00	0,00	102.815.000,00	(11.770.000,00)	89,73%
1 06 01 17 04	Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	21.542.000,00	22.598.000,00	0,00	44.140.000,00	21.270.000,00	13.744.000,00	0,00	35.014.000,00	(9.126.000,00)	79,32%
1 06 01 17 05	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	40.555.000,00	276.485.000,00	0,00	317.040.000,00	40.387.000,00	272.961.800,00	0,00	313.348.800,00	(3.691.200,00)	98,84%
1 07 01	**Dinas Tenaga Kerja**	**1.001.984.000,00**	**3.690.414.000,00**	**948.000.000,00**	**5.640.398.000,00**	**951.812.500,00**	**3.146.005.197,00**	**917.791.198,00**	**5.015.608.895,00**	**(624.789.105,00)**	**88,92%**
1 07 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**188.480.000,00**	**293.113.000,00**	-	**481.593.000,00**	**185.280.000,00**	**291.078.104,00**	-	**476.358.104,00**	**(5.234.896,00)**	**98,91%**
1 07 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.480.000,00	81.497.000,00	0,00	269.977.000,00	185.280.000,00	79.647.290,00	0,00	264.927.290,00	(5.049.710,00)	98,13%
1 07 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	211.616.000,00	0,00	211.616.000,00	0,00	211.430.814,00	0,00	211.430.814,00	(185.186,00)	99,91%
1 07 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**158.630.000,00**	-	**158.630.000,00**	-	**146.823.920,00**	-	**146.823.920,00**	**(11.806.080,00)**	92,56%
1 07 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	101.950.000,00	0,00	101.950.000,00	0,00	100.707.820,00	0,00	100.707.820,00	(1.242.180,00)	98,78%
1 07 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	29.572.000,00	0,00	29.572.000,00	0,00	19.008.100,00	0,00	19.008.100,00	(10.563.900,00)	64,28%
1 07 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	27.108.000,00	0,00	27.108.000,00	0,00	27.108.000,00	0,00	27.108.000,00	-	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 07 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**398.000.000,00**	**398.000.000,00**	-	-	**395.970.698,00**	**395.970.698,00**	**(2.029.302,00)**	99,49%
1 07 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	196.130.698,00	196.130.698,00	(1.869.302,00)	99,06%
1 07 01 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	199.840.000,00	199.840.000,00	(160.000,00)	99,92%
1 07 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**20.870.000,00**	**4.160.000,00**	-	**25.030.000,00**	**20.870.000,00**	**4.110.000,00**	-	**24.980.000,00**	(50.000,00)	99,80%
1 07 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.870.000,00	4.160.000,00	0,00	25.030.000,00	20.870.000,00	4.110.000,00	0,00	24.980.000,00	(50.000,00)	99,80%
1 07 01 15	**Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja**	**303.084.000,00**	**1.524.604.000,00**	**550.000.000,00**	**2.377.688.000,00**	**297.789.500,00**	**1.354.499.000,00**	**521.820.500,00**	**2.174.109.000,00**	**(203.579.000,00)**	91,44%
1 07 01 15 01	Kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	73.633.000,00	346.393.000,00	0,00	420.026.000,00	69.433.000,00	312.603.000,00	0,00	382.036.000,00	(37.990.000,00)	90,96%
1 07 01 15 02	Kegiatan Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	52.000.000,00	20.708.000,00	0,00	72.708.000,00	52.000.000,00	4.878.000,00	0,00	56.878.000,00	(15.830.000,00)	78,23%
1 07 01 15 03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	21.840.000,00	53.352.000,00	0,00	75.192.000,00	20.767.500,00	53.352.000,00	0,00	74.119.500,00	(1.072.500,00)	98,57%
1 07 01 15 04	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan.	10.225.000,00	89.679.000,00	0,00	99.904.000,00	10.225.000,00	85.665.000,00	0,00	95.890.000,00	(4.014.000,00)	95,98%
1 07 01 15 05	Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	48.120.000,00	15.824.000,00	0,00	63.944.000,00	48.120.000,00	15.824.000,00	0,00	63.944.000,00	-	100,00%
1 07 01 15 06	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBH-CHT)	59.902.000,00	794.702.000,00	550.000.000,00	1.404.604.000,00	59.880.000,00	794.609.000,00	521.820.500,00	1.376.309.500,00	(28.294.500,00)	97,99%
1 07 01 15 08	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja.	8.250.000,00	26.700.000,00	0,00	34.950.000,00	8.250.000,00	26.700.000,00	0,00	34.950.000,00	-	100,00%
1 07 01 15 10	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	29.114.000,00	177.246.000,00	0,00	206.360.000,00	29.114.000,00	60.868.000,00	0,00	89.982.000,00	(116.378.000,00)	43,60%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 07 01 16	**Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan**	**270.634.000,00**	**513.103.000,00**	-	**783.737.000,00**	**257.757.000,00**	**398.591.710,00**	-	**656.348.710,00**	**(127.388.290,00)**	**83,75%**
1 07 01 16 01	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	38.772.000,00	42.698.000,00	0,00	81.470.000,00	38.374.000,00	42.698.000,00	0,00	81.072.000,00	(398.000,00)	99,51%
1 07 01 16 02	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	18.694.000,00	3.106.000,00	0,00	21.800.000,00	16.996.000,00	3.106.000,00	0,00	20.102.000,00	(1.698.000,00)	92,21%
1 07 01 16 03	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	57.340.000,00	59.800.000,00	0,00	117.140.000,00	56.940.000,00	59.131.500,00	0,00	116.071.500,00	(1.068.500,00)	99,09%
1 07 01 16 04	Kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	47.894.000,00	160.712.000,00	0,00	208.606.000,00	40.894.000,00	157.344.460,00	0,00	198.238.460,00	(10.367.540,00)	95,03%
1 07 01 16 05	Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	17.256.000,00	22.129.000,00	0,00	39.385.000,00	17.198.000,00	21.129.000,00	0,00	38.327.000,00	(1.058.000,00)	97,31%
1 07 01 16 06	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DBH-CHT)	49.938.000,00	156.706.000,00	0,00	206.644.000,00	46.815.000,00	53.930.750,00	0,00	100.745.750,00	(105.898.250,00)	48,75%
1 07 01 16 07	Kegiatan Pendataan Wajib Lapor Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	31.410.000,00	57.250.000,00	0,00	88.660.000,00	31.210.000,00	51.250.000,00	0,00	82.460.000,00	(6.200.000,00)	93,01%
1 07 01 16 08	Kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK)	9.330.000,00	10.702.000,00	0,00	20.032.000,00	9.330.000,00	10.002.000,00	0,00	19.332.000,00	(700.000,00)	96,51%
1 07 01 17	**Program Ketransmigrasian**	**10.206.000,00**	**18.744.000,00**	-	**28.950.000,00**	**10.206.000,00**	**18.744.000,00**	-	**28.950.000,00**	-	100,00%
1 07 01 17 01	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	10.206.000,00	18.744.000,00	0,00	28.950.000,00	10.206.000,00	18.744.000,00	0,00	28.950.000,00	-	100,00%
1 07 01 18	**Program Pengembangan Industri Kecil Menengah**	**208.710.000,00**	**1.178.060.000,00**	-	**1.386.770.000,00**	**179.910.000,00**	**932.158.463,00**	-	**1.112.068.463,00**	**(274.701.537,00)**	80,19%
1 07 01 18 01	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat nasional	18.000.000,00	73.492.000,00	0,00	91.492.000,00	13.000.000,00	39.265.000,00	0,00	52.265.000,00	(39.227.000,00)	57,13%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 07 01 18 02	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi IKM/IRT melalui pelatihan makanan olahan	11.550.000,00	26.731.000,00	0,00	38.281.000,00	10.550.000,00	24.661.000,00	0,00	35.211.000,00	(3.070.000,00)	91,98%
1 07 01 18 03	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Industri Kecil	17.650.000,00	30.200.000,00	0,00	47.850.000,00	10.850.000,00	17.200.000,00	0,00	28.050.000,00	(19.800.000,00)	58,62%
1 07 01 18 04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan Menengah tingkat regional di Surabaya (PPUD)	16.950.000,00	61.697.000,00	0,00	78.647.000,00	10.900.000,00	35.097.000,00	0,00	45.997.000,00	(32.650.000,00)	58,49%
1 07 01 18 05	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Tingkat Nasional (INACRAFT)	13.400.000,00	121.300.000,00	0,00	134.700.000,00	13.050.000,00	96.023.700,00	0,00	109.073.700,00	(25.626.300,00)	80,98%
1 07 01 18 06	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan ketrampilan bagi IKM/IRT melalui pelatihan peningkatan Produki Souvenir	10.450.000,00	91.850.000,00	0,00	102.300.000,00	10.450.000,00	91.035.000,00	0,00	101.485.000,00	(815.000,00)	99,20%
1 07 01 18 07	Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Uji Nilai Gizi Produk Makanan Olahan	10.800.000,00	34.530.000,00	0,00	45.330.000,00	9.300.000,00	26.956.000,00	0,00	36.256.000,00	(9.074.000,00)	79,98%
1 07 01 18 08	Kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Kuliner dan Diversifikasi Produk Pangan serta Fasilitasi ljin Teknis	11.100.000,00	39.048.000,00	0,00	50.148.000,00	10.200.000,00	31.086.200,00	0,00	41.286.200,00	(8.861.800,00)	82,33%
1 07 01 18 09	Kegiatan pelatihan peningkatan Ketrampilan Teknik Perbengkelan	11.350.000,00	50.766.000,00	0,00	62.116.000,00	10.250.000,00	33.638.000,00	0,00	43.888.000,00	(18.228.000,00)	70,65%
1 07 01 18 10	Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui good	11.200.000,00	27.557.000,00	0,00	38.757.000,00	11.200.000,00	18.557.043,00	0,00	29.757.043,00	(8.999.957,00)	76,78%
1 07 01 18 11	Kegiatan Pengelolaan Energi Migas dan kegeologian	8.850.000,00	25.299.000,00	0,00	34.149.000,00	8.850.000,00	14.439.000,00	0,00	23.289.000,00	(10.860.000,00)	68,20%
1 07 01 18 12	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Pengembangan desain dan Motif Batik bagi IKM Kota Madiun (DBH-	12.450.000,00	137.550.000,00	0,00	150.000.000,00	10.450.000,00	118.925.000,00	0,00	129.375.000,00	(20.625.000,00)	86,25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 07 01 18 13	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Fasilitas Promosi Industri Kecil Menengah Kota Madiun (DBH-CHT)	27.160.000,00	343.840.000,00	0,00	371.000.000,00	24.310.000,00	292.621.520,00	0,00	316.931.520,00	(54.068.480,00)	85,43%
1 07 01 18 15	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pengembangan Desain Furniture bagi IKM/IRT Kota Madiun (DBH-CHT)	27.800.000,00	114.200.000,00	0,00	142.000.000,00	26.550.000,00	92.654.000,00	0,00	119.204.000,00	(22.796.000,00)	83,95%
1 08 01	**Dinas Lingkungan Hidup**	**906.034.000,00**	**7.658.938.000,00**	**4.797.117.000,00**	**13.362.089.000,00**	**829.306.000,00**	**5.222.719.324,00**	**4.181.189.400,00**	**10.233.214.724,00**	**(3.128.874.276,00)**	76,58%
1 08 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**507.992.000,00**	**180.648.000,00**	-	**688.640.000,00**	**496.483.000,00**	**171.847.999,00**	-	**668.330.999,00**	**(20.309.001,00)**	97,05%
1 08 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.992.000,00	120.648.000,00	0,00	628.640.000,00	496.483.000,00	111.848.000,00	0,00	608.331.000,00	(20.309.000,00)	96,77%
1 08 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	59.999.999,00	0,00	59.999.999,00	(1,00)	100,00%
1 08 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**2.765.830.000,00**	-	**2.765.830.000,00**	-	**1.543.601.414,00**	-	**1.543.601.414,00**	**(1.222.228.586,00)**	55,81%
1 08 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	79.106.105,00	0,00	79.106.105,00	(893.895,00)	98,88%
1 08 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	2.415.330.000,00	0,00	2.415.330.000,00	0,00	1.265.916.909,00	0,00	1.265.916.909,00	(1.149.413.091,00)	52,41%
1 08 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	270.500.000,00	0,00	270.500.000,00	0,00	198.578.400,00	0,00	198.578.400,00	(71.921.600,00)	73,41%
1 08 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**2.475.000,00**	**80.125.000,00**	**157.000.000,00**	**239.600.000,00**	**2.300.000,00**	**78.351.000,00**	**122.576.000,00**	**203.227.000,00**	**(36.373.000,00)**	84,82%
1 08 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	0,00	122.576.000,00	122.576.000,00	(34.424.000,00)	78,07%
1 08 01 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.475.000,00	80.125.000,00	0,00	82.600.000,00	2.300.000,00	78.351.000,00	0,00	80.651.000,00	(1.949.000,00)	97,64%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 08 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**36.308.000,00**	**2.996.000,00**	-	**39.304.000,00**	**35.962.000,00**	**2.996.000,00**	-	**38.958.000,00**	**(346.000,00)**	99,12%
1 08 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36.308.000,00	2.996.000,00	0,00	39.304.000,00	35.962.000,00	2.996.000,00	0,00	38.958.000,00	(346.000,00)	99,12%
1 08 01 15	**Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup**	**65.222.000,00**	**131.753.000,00**	-	**196.975.000,00**	**63.618.000,00**	**124.595.300,00**	-	**188.213.300,00**	**(8.761.700,00)**	95,55%
1 08 01 15 02	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	65.222.000,00	131.753.000,00	0,00	196.975.000,00	63.618.000,00	124.595.300,00	0,00	188.213.300,00	(8.761.700,00)	95,55%
1 08 01 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**61.658.000,00**	**121.842.000,00**	-	**183.500.000,00**	**48.590.000,00**	**100.532.100,00**	-	**149.122.100,00**	**(34.377.900,00)**	81,27%
1 08 01 16 01	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa	11.920.000,00	66.580.000,00	0,00	78.500.000,00	1.200.000,00	60.220.200,00	0,00	61.420.200,00	(17.079.800,00)	78,24%
1 08 01 16 02	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	39.244.000,00	15.756.000,00	0,00	55.000.000,00	38.540.000,00	15.755.900,00	0,00	54.295.900,00	(704.100,00)	98,72%
1 08 01 16 03	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	10.494.000,00	39.506.000,00	0,00	50.000.000,00	8.850.000,00	24.556.000,00	0,00	33.406.000,00	(16.594.000,00)	66,81%
1 08 01 17	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup**	**183.699.000,00**	**1.307.174.000,00**	**11.677.000,00**	**1.502.550.000,00**	**135.378.000,00**	**1.130.433.149,00**	**10.450.000,00**	**1.276.261.149,00**	**(226.288.851,00)**	84,94%
1 08 01 17 01	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	54.985.000,00	324.615.000,00	0,00	379.600.000,00	47.539.000,00	248.365.285,00	0,00	295.904.285,00	(83.695.715,00)	77,95%
1 08 01 17 02	Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	69.460.000,00	240.540.000,00	0,00	310.000.000,00	62.656.000,00	212.613.718,00	0,00	275.269.718,00	(34.730.282,00)	88,80%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 08 01 17 03	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	8.268.000,00	16.732.000,00	0,00	25.000.000,00	-	3.684.500,00	0,00	3.684.500,00	(21.315.500,00)	14,74%
1 08 01 17 04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	10.727.000,00	510.596.000,00	11.677.000,00	533.000.000,00	7.177.000,00	499.311.400,00	10.450.000,00	516.938.400,00	(16.061.600,00)	96,99%
1 08 01 17 05	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Mengenai Izin Lingkungan	20.710.000,00	60.290.000,00	0,00	81.000.000,00	6.585.000,00	57.159.550,00	0,00	63.744.550,00	(17.255.450,00)	78,70%
1 08 01 17 06	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	7.554.000,00	52.446.000,00	0,00	60.000.000,00	7.386.000,00	50.985.900,00	0,00	58.371.900,00	(1.628.100,00)	97,29%
1 08 01 17 07	Kegiatan PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)	1.100.000,00	23.900.000,00	0,00	25.000.000,00	950.000,00	19.752.796,00	0,00	20.702.796,00	(4.297.204,00)	82,81%
1 08 01 17 08	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam (SAKA KALPATARU)	7.810.000,00	34.640.000,00	0,00	42.450.000,00	-	-	0,00	-	(42.450.000,00)	0,00%
1 08 01 17 09	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	3.085.000,00	43.415.000,00	0,00	46.500.000,00	3.085.000,00	38.560.000,00	0,00	41.645.000,00	(4.855.000,00)	89,56%
1 08 01 18	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**48.680.000,00**	**3.068.570.000,00**	**4.628.440.000,00**	**7.745.690.000,00**	**46.975.000,00**	**2.070.362.362,00**	**4.048.163.400,00**	**6.165.500.762,00**	**(1.580.189.238,00)**	79,60%
1 08 01 18 01	Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Limbah B3	25.355.000,00	12.645.000,00	0,00	38.000.000,00	24.700.000,00	2.742.000,00	0,00	27.442.000,00	(10.558.000,00)	72,22%
1 08 01 18 02	Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Sampah	2.000.000,00	58.600.000,00	0,00	60.600.000,00	2.000.000,00	48.450.000,00	0,00	50.450.000,00	(10.150.000,00)	83,25%
1 08 01 18 03	Kegiatan Pemanfaatan Gas Methan di TPA Winongo	2.825.000,00	97.175.000,00	0,00	100.000.000,00	2.300.000,00	87.645.000,00	0,00	89.945.000,00	(10.055.000,00)	89,95%
1 08 01 18 04	Kegiatan Prajasih	3.500.000,00	1.064.500.000,00	0,00	1.068.000.000,00	3.500.000,00	1.024.040.000,00	0,00	1.027.540.000,00	(40.460.000,00)	96,21%
1 08 01 18 05	Kegiatan Peningkatan TPS	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	236.340.000,00	236.340.000,00	(13.660.000,00)	94,54%
1 08 01 18 06	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah	2.375.000,00	123.275.000,00	0,00	125.650.000,00	2.375.000,00	80.932.800,00	0,00	83.307.800,00	(42.342.200,00)	66,30%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 08 01 18 07	Kegiatan Pemeliharaan Container	2.500.000,00	72.500.000,00	0,00	75.000.000,00	2.500.000,00	60.700.000,00	0,00	63.200.000,00	(11.800.000,00)	84,27%
1 08 01 18 08	Kegiatan Controlled LandFill TPA Winongo	6.300.000,00	1.543.700.000,00	0,00	1.550.000.000,00	6.300.000,00	706.942.812,00	0,00	713.242.812,00	(836.757.188,00)	46,02%
1 08 01 18 09	Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Persampahan	0,00	0,00	908.720.000,00	908.720.000,00	0,00	0,00	720.218.000,00	720.218.000,00	(188.502.000,00)	79,26%
1 08 01 18 10	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan	0,00	0,00	2.099.620.000,00	2.099.620.000,00	0,00	0,00	1.930.037.500,00	1.930.037.500,00	(169.582.500,00)	91,92%
1 08 01 18 11	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pengolahan Sampah	3.825.000,00	96.175.000,00	0,00	100.000.000,00	3.300.000,00	58.909.750,00	0,00	62.209.750,00	(37.790.250,00)	62,21%
1 08 01 18 12	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	0,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	649.228.200,00	649.228.200,00	(100.771.800,00)	86,56%
1 08 01 18 14	Keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	0,00	0,00	620.100.000,00	620.100.000,00	0,00	0,00	512.339.700,00	512.339.700,00	(107.760.300,00)	82,62%
1 09 01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**1.407.949.000,00**	**2.951.983.000,00**	**1.600.000.000,00**	**5.959.932.000,00**	**1.346.502.000,00**	**2.789.545.460,00**	**1.599.184.008,00**	**5.735.231.468,00**	**(224.700.532,00)**	96,23%
1 09 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**229.028.000,00**	**523.787.000,00**	-	**752.815.000,00**	**223.737.000,00**	**522.932.200,00**	-	**746.669.200,00**	**(6.145.800,00)**	99,18%
1 09 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	229.028.000,00	293.389.000,00	0,00	522.417.000,00	223.737.000,00	292.746.900,00	0,00	516.483.900,00	(5.933.100,00)	98,86%
1 09 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	230.398.000,00	0,00	230.398.000,00	0,00	230.185.300,00	0,00	230.185.300,00	(212.700,00)	99,91%
1 09 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**207.466.000,00**	-	**207.466.000,00**	-	**163.635.900,00**	-	**163.635.900,00**	**(43.830.100,00)**	78,87%
1 09 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	23.624.000,00	0,00	23.624.000,00	(376.000,00)	98,43%
1 09 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	120.836.000,00	0,00	120.836.000,00	0,00	77.546.900,00	0,00	77.546.900,00	(43.289.100,00)	64,18%
1 09 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	62.630.000,00	0,00	62.630.000,00	0,00	62.465.000,00	0,00	62.465.000,00	(165.000,00)	99,74%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 09 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	-	-	**1.599.184.008,00**	**1.599.184.008,00**	**(815.992,00)**	99,95%
1 09 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00	1.599.184.008,00	1.599.184.008,00	(815.992,00)	99,95%
1 09 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**29.628.000,00**	**2.372.000,00**	-	**32.000.000,00**	**29.628.000,00**	**2.372.000,00**	-	**32.000.000,00**	-	100,00%
1 09 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.628.000,00	2.372.000,00	0,00	32.000.000,00	29.628.000,00	2.372.000,00	0,00	32.000.000,00	-	100,00%
1 09 01 15	**Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**	**456.894.000,00**	**357.728.000,00**	-	**814.622.000,00**	**431.874.000,00**	**344.893.000,00**	-	**776.767.000,00**	**(37.855.000,00)**	95,35%
1 09 01 15 01	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan	42.690.000,00	16.845.000,00	0,00	59.535.000,00	42.499.000,00	16.845.000,00	0,00	59.344.000,00	(191.000,00)	99,68%
1 09 01 15 02	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) updating dan pemeliharaan	85.806.000,00	83.374.000,00	0,00	169.180.000,00	85.422.000,00	74.554.000,00	0,00	159.976.000,00	(9.204.000,00)	94,56%
1 09 01 15 03	Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	59.966.000,00	28.067.000,00	0,00	88.033.000,00	54.783.000,00	27.992.000,00	0,00	82.775.000,00	(5.258.000,00)	94,03%
1 09 01 15 04	Kegiatan Pemantapan Teknis Pencetakan KTP Elektronik	18.578.000,00	13.607.000,00	0,00	32.185.000,00	18.006.000,00	13.507.000,00	0,00	31.513.000,00	(672.000,00)	97,91%
1 09 01 15 05	Kegiatan Evaluasi dan Rapat Validasi data Kependudukan	142.540.000,00	64.262.000,00	0,00	206.802.000,00	139.875.000,00	60.922.000,00	0,00	200.797.000,00	(6.005.000,00)	97,10%
1 09 01 15 06	Kegiatan Penyebaran Informasi Adminduk melalui Media Elektronik	107.314.000,00	151.573.000,00	0,00	258.887.000,00	91.289.000,00	151.073.000,00	0,00	242.362.000,00	(16.525.000,00)	93,62%
1 09 01 16	**Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil**	**190.182.000,00**	**950.277.000,00**	-	**1.140.459.000,00**	**159.393.000,00**	**925.714.360,00**	-	**1.085.107.360,00**	**(55.351.640,00)**	**95,15%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 09 01 16 01	Kegiatan Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.877.000,00	254.413.000,00	0,00	355.290.000,00	93.352.000,00	241.587.000,00	0,00	334.939.000,00	(20.351.000,00)	94,27%
1 09 01 16 02	Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	61.505.000,00	209.380.000,00	0,00	270.885.000,00	51.095.000,00	202.301.500,00	0,00	253.396.500,00	(17.488.500,00)	93,54%
1 09 01 16 09	Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	23.228.000,00	281.584.000,00	0,00	304.812.000,00	10.416.000,00	277.883.860,00	0,00	288.299.860,00	(16.512.140,00)	94,58%
1 09 01 16 10	Kegiatan Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DAK)	4.572.000,00	204.900.000,00	0,00	209.472.000,00	4.530.000,00	203.942.000,00	0,00	208.472.000,00	(1.000.000,00)	99,52%
1 09 01 17	**Program Pelayanan dan Penataan Administrasi Kependudukan**	**502.217.000,00**	**910.353.000,00**	-	**1.412.570.000,00**	**501.870.000,00**	**829.998.000,00**	-	**1.331.868.000,00**	**(80.702.000,00)**	**94,29%**
1 09 01 17 02	Kegiatan Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	75.874.000,00	19.126.000,00	0,00	95.000.000,00	75.874.000,00	19.126.000,00	0,00	95.000.000,00	-	100,00%
1 09 01 17 03	Kegiatan Pemantauan Kependudukan di wilayah Kota Madiun	26.571.000,00	49.730.000,00	0,00	76.301.000,00	26.568.000,00	49.575.000,00	0,00	76.143.000,00	(158.000,00)	99,79%
1 09 01 17 04	Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan	46.975.000,00	48.330.000,00	0,00	95.305.000,00	46.973.000,00	46.330.000,00	0,00	93.303.000,00	(2.002.000,00)	97,90%
1 09 01 17 05	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil)	20.265.000,00	90.655.000,00	0,00	110.920.000,00	20.265.000,00	90.024.000,00	0,00	110.289.000,00	(631.000,00)	99,43%
1 09 01 17 06	Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan	48.292.000,00	247.475.000,00	0,00	295.767.000,00	48.291.000,00	245.875.000,00	0,00	294.166.000,00	(1.601.000,00)	99,46%
1 09 01 17 07	Kegiatan Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan Petugas Pelayanan	184.210.000,00	34.470.000,00	0,00	218.680.000,00	184.161.000,00	34.130.000,00	0,00	218.291.000,00	(389.000,00)	99,82%
1 09 01 17 14	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KK,KTP dan AKTA-AKTA Pencatatan Sipil) (DAK)	100.030.000,00	420.567.000,00	0,00	520.597.000,00	99.738.000,00	344.938.000,00	0,00	444.676.000,00	(75.921.000,00)	85,42%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 10 01	**Dinas Perhubungan**	**1.511.655.000,00**	**4.493.789.000,00**	**2.370.254.000,00**	**8.375.698.000,00**	**1.365.045.300,00**	**4.096.834.268,00**	**2.271.471.347,00**	**7.733.350.915,00**	**(642.347.085,00)**	**92,33%**
1 10 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**883.874.000,00**	**636.331.000,00**	-	**1.520.205.000,00**	**871.034.000,00**	**615.452.919,00**	-	**1.486.486.919,00**	**(33.718.081,00)**	**97,78%**
1 10 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	883.874.000,00	486.331.000,00	0,00	1.370.205.000,00	871.034.000,00	465.468.519,00	0,00	1.336.502.519,00	(33.702.481,00)	97,54%
1 10 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	149.984.400,00	0,00	149.984.400,00	(15.600,00)	99,99%
1 10 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	**2.868.000,00**	**603.505.000,00**	-	**606.373.000,00**	**1.650.000,00**	**525.762.453,00**	-	**527.412.453,00**	**(78.960.547,00)**	**86,98%**
1 10 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	1.800.000,00	369.850.000,00	0,00	371.650.000,00	1.650.000,00	354.695.309,00	0,00	356.345.309,00	(15.304.691,00)	95,88%
1 10 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	194.723.000,00	0,00	194.723.000,00	0,00	140.053.844,00	0,00	140.053.844,00	(54.669.156,00)	71,92%
1 10 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	1.068.000,00	38.932.000,00	0,00	40.000.000,00	-	31.013.300,00	0,00	31.013.300,00	(8.986.700,00)	77,53%
1 10 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**18.750.000,00**	**715.155.000,00**	**1.229.414.000,00**	**1.963.319.000,00**	**18.100.000,00**	**712.312.800,00**	**1.174.183.947,00**	**1.904.596.747,00**	**(58.722.253,00)**	**97,01%**
1 10 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	8.875.000,00	25.103.000,00	1.229.414.000,00	1.263.392.000,00	8.875.000,00	25.103.000,00	1.174.183.947,00	1.208.161.947,00	(55.230.053,00)	95,63%
1 10 01 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	7.450.000,00	492.550.000,00	0,00	500.000.000,00	6.800.000,00	491.890.800,00	0,00	498.690.800,00	(1.309.200,00)	99,74%
1 10 01 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.425.000,00	197.502.000,00	0,00	199.927.000,00	2.425.000,00	195.319.000,00	0,00	197.744.000,00	(2.183.000,00)	98,91%
1 10 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**33.680.000,00**	**7.820.000,00**	-	**41.500.000,00**	**33.452.000,00**	**7.392.000,00**	-	**40.844.000,00**	**(656.000,00)**	**98,42%**
1 10 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.680.000,00	7.820.000,00	0,00	41.500.000,00	33.452.000,00	7.392.000,00	0,00	40.844.000,00	(656.000,00)	98,42%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 10 01 15	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ**	**72.295.000,00**	**991.118.000,00**	-	**1.063.413.000,00**	**67.382.000,00**	**879.438.800,00**	-	**946.820.800,00**	**(116.592.200,00)**	**89,04%**
1 10 01 15 01	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal, Sub Terminal dan Halte	3.300.000,00	215.713.000,00	0,00	219.013.000,00	1.850.000,00	115.133.600,00	0,00	116.983.600,00	(102.029.400,00)	53,41%
1 10 01 15 02	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Barang	63.670.000,00	175.330.000,00	0,00	239.000.000,00	63.307.000,00	170.356.000,00	0,00	233.663.000,00	(5.337.000,00)	97,77%
1 10 01 15 03	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.100.000,00	293.100.000,00	0,00	296.200.000,00	-	290.849.200,00	0,00	290.849.200,00	(5.350.800,00)	98,19%
1 10 01 15 04	Kegiatan Pemeliharaan CCTV dan SIM LLAJ	2.225.000,00	306.975.000,00	0,00	309.200.000,00	2.225.000,00	303.100.000,00	0,00	305.325.000,00	(3.875.000,00)	98,75%
1 10 01 16	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**	**14.945.000,00**	**280.305.000,00**	**1.134.790.000,00**	**1.430.040.000,00**	**14.920.000,00**	**272.665.000,00**	**1.097.287.400,00**	**1.384.872.400,00**	**(45.167.600,00)**	**96,84%**
1 10 01 16 01	Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	193.450.200,00	193.450.200,00	(6.549.800,00)	96,73%
1 10 01 16 02	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	10.300.000,00	184.950.000,00	0,00	195.250.000,00	10.300.000,00	179.699.000,00	0,00	189.999.000,00	(5.251.000,00)	97,31%
1 10 01 16 03	Kegiatan Pengadaan Paku Marka Jalan	0,00	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	192.471.900,00	192.471.900,00	(5.528.100,00)	97,21%
1 10 01 16 04	Kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan	0,00	0,00	179.790.000,00	179.790.000,00	0,00	0,00	174.845.300,00	174.845.300,00	(4.944.700,00)	97,25%
1 10 01 16 05	Kegiatan Pengadaan Delinator	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	(6.000.000,00)	89,09%
1 10 01 16 07	Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Lalu Lintas	0,00	0,00	181.100.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00	180.100.000,00	180.100.000,00	(1.000.000,00)	99,45%
1 10 01 16 09	Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan.	0,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00	57.680.000,00	(6.320.000,00)	90,13%
1 10 01 16 10	Kegiatan Pengadaan Warning Light (Flasing/Lampu Peringatan).	0,00	0,00	153.900.000,00	153.900.000,00	0,00	0,00	151.240.000,00	151.240.000,00	(2.660.000,00)	98,27%
1 10 01 16 11	Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Jalan.	1.550.000,00	23.450.000,00	0,00	25.000.000,00	1.550.000,00	23.011.000,00	0,00	24.561.000,00	(439.000,00)	98,24%
1 10 01 16 12	Kegiatan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	3.095.000,00	71.905.000,00	0,00	75.000.000,00	3.070.000,00	69.955.000,00	0,00	73.025.000,00	(1.975.000,00)	97,37%
1 10 01 16 13	Kegiatan Pembangunan Pos Pengamanan Terpadu	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	(4.500.000,00)	95,63%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 10 01 17	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**485.243.000,00**	**1.259.555.000,00**	**6.050.000,00**	**1.750.848.000,00**	**358.507.300,00**	**1.083.810.296,00**	-	**1.442.317.596,00**	**(308.530.404,00)**	82,38%
1 10 01 17 01	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan	152.682.000,00	435.987.000,00	0,00	588.669.000,00	140.270.000,00	418.900.840,00	0,00	559.170.840,00	(29.498.160,00)	94,99%
1 10 01 17 02	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan	10.200.000,00	49.800.000,00	0,00	60.000.000,00	7.700.000,00	48.668.000,00	0,00	56.368.000,00	(3.632.000,00)	93,95%
1 10 01 17 03	Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	52.584.000,00	132.416.000,00	0,00	185.000.000,00	48.984.000,00	124.766.000,00	0,00	173.750.000,00	(11.250.000,00)	93,92%
1 10 01 17 04	Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	11.100.000,00	38.900.000,00	0,00	50.000.000,00	8.600.000,00	32.178.000,00	0,00	40.778.000,00	(9.222.000,00)	81,56%
1 10 01 17 05	Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor	1.675.000,00	56.825.000,00	0,00	58.500.000,00	1.675.000,00	56.473.000,00	0,00	58.148.000,00	(352.000,00)	99,40%
1 10 01 17 06	Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	2.800.000,00	88.200.000,00	0,00	91.000.000,00	2.800.000,00	65.864.000,00	0,00	68.664.000,00	(22.336.000,00)	75,45%
1 10 01 17 07	Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	17.147.000,00	94.053.000,00	0,00	111.200.000,00	16.786.300,00	93.053.000,00	0,00	109.839.300,00	(1.360.700,00)	98,78%
1 10 01 17 08	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	71.138.000,00	78.862.000,00	0,00	150.000.000,00	-	9.695.100,00	0,00	9.695.100,00	(140.304.900,00)	6,46%
1 10 01 17 09	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	69.383.000,00	18.497.000,00	0,00	87.880.000,00	69.107.000,00	18.497.000,00	0,00	87.604.000,00	(276.000,00)	99,69%
1 10 01 17 11	Kegiatan Penyusunan Raperda Penyelenggaraan LLAJ	29.633.000,00	67.342.000,00	3.025.000,00	100.000.000,00	16.000.000,00	66.975.000,00	-	82.975.000,00	(17.025.000,00)	82,98%
1 10 01 17 12	Kegiatan Pendataan Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis	24.227.000,00	122.748.000,00	3.025.000,00	150.000.000,00	23.185.000,00	98.638.356,00	-	121.823.356,00	(28.176.644,00)	81,22%
1 10 01 17 13	Kegiatan Akreditasi Pengujian Bermotor	42.674.000,00	75.925.000,00	0,00	118.599.000,00	23.400.000,00	50.102.000,00	0,00	73.502.000,00	(45.097.000,00)	61,98%
1 11 01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**1.535.160.000,00**	**6.796.697.000,00**	**8.383.896.000,00**	**16.715.753.000,00**	**1.450.651.050,00**	**6.557.168.823,00**	**8.225.444.760,00**	**16.233.264.633,00**	**(482.488.367,00)**	97,11%
1 11 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**317.123.000,00**	**1.012.722.000,00**	-	**1.329.845.000,00**	**293.085.300,00**	**1.002.160.516,00**	-	**1.295.245.816,00**	**(34.599.184,00)**	97,40%
1 11 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	317.123.000,00	934.722.000,00	0,00	1.251.845.000,00	293.085.300,00	930.966.393,00	0,00	1.224.051.693,00	(27.793.307,00)	97,78%
1 11 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	71.194.123,00	0,00	71.194.123,00	(6.805.877,00)	91,27%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 11 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**136.950.000,00**	-	**136.950.000,00**	-	**128.427.700,00**	-	**128.427.700,00**	**(8.522.300,00)**	**93,78%**
1 11 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	34.750.000,00	0,00	34.750.000,00	0,00	34.741.650,00	0,00	34.741.650,00	(8.350,00)	99,98%
1 11 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	0,00	49.496.000,00	0,00	49.496.000,00	(1.704.000,00)	96,67%
1 11 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	44.190.050,00	0,00	44.190.050,00	(6.809.950,00)	86,65%
1 11 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**2.117.428.000,00**	**2.117.428.000,00**	-	-	**2.097.925.200,00**	**2.097.925.200,00**	**(19.502.800,00)**	**99,08%**
1 11 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	2.117.428.000,00	2.117.428.000,00	0,00	0,00	2.097.925.200,00	2.097.925.200,00	(19.502.800,00)	99,08%
1 11 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**28.448.000,00**	**13.052.000,00**	-	**41.500.000,00**	**27.942.000,00**	**13.047.000,00**	-	**40.989.000,00**	**(511.000,00)**	98,77%
1 11 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28.448.000,00	13.052.000,00	0,00	41.500.000,00	27.942.000,00	13.047.000,00	0,00	40.989.000,00	(511.000,00)	98,77%
1 11 01 15	**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**703.162.000,00**	**4.416.057.000,00**	**5.504.568.000,00**	**10.623.787.000,00**	**690.794.800,00**	**4.350.170.291,00**	**5.372.289.800,00**	**10.413.254.891,00**	**(210.532.109,00)**	**98,02%**
1 11 01 15 01	Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	83.888.000,00	139.612.000,00	0,00	223.500.000,00	83.302.000,00	138.738.249,00	0,00	222.040.249,00	(1.459.751,00)	99,35%
1 11 01 15 08	Kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	93.414.000,00	2.006.086.000,00	0,00	2.099.500.000,00	92.161.000,00	2.004.761.670,00	0,00	2.096.922.670,00	(2.577.330,00)	99,88%
1 11 01 15 09	Kegiatan Pertemuan Forum Koordinasi Kehumasan	74.908.000,00	195.092.000,00	0,00	270.000.000,00	74.869.300,00	194.245.000,00	0,00	269.114.300,00	(885.700,00)	99,67%
1 11 01 15 10	Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	65.858.000,00	169.142.000,00	0,00	235.000.000,00	65.770.000,00	160.601.997,00	0,00	226.371.997,00	(8.628.003,00)	96,33%
1 11 01 15 11	kegiatan Penerbitan Tabloid Program Pemerintah	44.430.000,00	215.570.000,00	0,00	260.000.000,00	44.375.000,00	210.575.000,00	0,00	254.950.000,00	(5.050.000,00)	98,06%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 11 01 15 12	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	77.680.000,00	492.320.000,00	0,00	570.000.000,00	77.607.500,00	489.221.200,00	0,00	566.828.700,00	(3.171.300,00)	99,44%
1 11 01 15 13	Kegiatan Optimalisasi PPID	115.480.000,00	145.920.000,00	0,00	261.400.000,00	115.429.000,00	142.146.500,00	0,00	257.575.500,00	(3.824.500,00)	98,54%
1 11 01 15 14	Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota	54.010.000,00	218.490.000,00	0,00	272.500.000,00	53.957.000,00	218.043.650,00	0,00	272.000.650,00	(499.350,00)	99,82%
1 11 01 15 18	Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat (DBH CHT)	93.494.000,00	833.825.000,00	5.504.568.000,00	6.431.887.000,00	83.324.000,00	791.837.025,00	5.372.289.800,00	6.247.450.825,00	(184.436.175,00)	97,13%
1 11 01 16	**Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**	**153.596.000,00**	**41.404.000,00**	-	**195.000.000,00**	**153.560.000,00**	**41.404.000,00**	-	**194.964.000,00**	**(36.000,00)**	**99,98%**
1 11 01 16 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	153.596.000,00	41.404.000,00	0,00	195.000.000,00	153.560.000,00	41.404.000,00	0,00	194.964.000,00	(36.000,00)	99,98%
1 11 01 17	**Program Pengembangan Tata Kelola Persandian**	**21.686.000,00**	**61.273.000,00**	-	**82.959.000,00**	**18.525.000,00**	**36.849.000,00**	-	**55.374.000,00**	**(27.585.000,00)**	**66,75%**
1 11 01 17 01	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Persandian	21.686.000,00	61.273.000,00	0,00	82.959.000,00	18.525.000,00	36.849.000,00	0,00	55.374.000,00	(27.585.000,00)	66,75%
1 11 01 18	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**311.145.000,00**	**1.115.239.000,00**	**761.900.000,00**	**2.188.284.000,00**	**266.743.950,00**	**985.110.316,00**	**755.229.760,00**	**2.007.084.026,00**	**(181.199.974,00)**	**91,72%**
1 11 01 18 01	Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang Informasi dan Komunikasi	13.439.000,00	77.973.000,00	0,00	91.412.000,00	13.089.000,00	74.068.950,00	0,00	87.157.950,00	(4.254.050,00)	95,35%
1 11 01 18 06	kegiatan Impementasi Aplikasi E-Gov	32.678.000,00	344.546.000,00	700.900.000,00	1.078.124.000,00	29.529.000,00	313.951.300,00	696.909.760,00	1.040.390.060,00	(37.733.940,00)	96,50%
1 11 01 18 11	Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	154.020.000,00	554.853.000,00	61.000.000,00	769.873.000,00	126.577.950,00	497.192.491,00	58.320.000,00	682.090.441,00	(87.782.559,00)	88,60%
1 11 01 18 12	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	87.318.000,00	72.349.000,00	0,00	159.667.000,00	74.386.000,00	63.887.175,00	0,00	138.273.175,00	(21.393.825,00)	86,60%
1 11 01 18 13	Kegiatan Penyusunan Dokumen Standart Kebijakan Layanan Transaksi Elektronik (LPSE)	23.690.000,00	65.518.000,00	0,00	89.208.000,00	23.162.000,00	36.010.400,00	0,00	59.172.400,00	(30.035.600,00)	66,33%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 12 01	**Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi Dan Usaha Mikro**	**780.420.000,00**	**3.093.493.000,00**	**1.560.571.000,00**	**5.434.484.000,00**	**699.005.800,00**	**2.543.547.392,00**	**1.497.082.601,98**	**4.739.635.793,98**	**(694.848.206,02)**	**87,21%**
1 12 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**239.020.000,00**	**469.820.000,00**	-	**708.840.000,00**	**214.320.000,00**	**442.414.711,00**	-	**656.734.711,00**	**(52.105.289,00)**	**92,65%**
1 12 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.020.000,00	308.820.000,00	0,00	547.840.000,00	214.320.000,00	286.507.044,00	0,00	500.827.044,00	(47.012.956,00)	91,42%
1 12 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	155.907.667,00	0,00	155.907.667,00	(5.092.333,00)	96,84%
1 12 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**115.000.000,00**	-	**115.000.000,00**	-	**105.756.650,00**	-	**105.756.650,00**	**(9.243.350,00)**	**91,96%**
1 12 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-	100,00%
1 12 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	30.756.650,00	0,00	30.756.650,00	(9.243.350,00)	76,89%
1 12 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	-	100,00%
1 12 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**1.560.571.000,00**	**1.560.571.000,00**	-	-	**1.497.082.601,98**	**1.497.082.601,98**	**(63.488.398,02)**	**95,93%**
1 12 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	1.198.371.000,00	1.198.371.000,00	0,00	0,00	1.146.768.601,98	1.146.768.601,98	(51.602.398,02)	95,69%
1 12 01 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	0,00	0,00	362.200.000,00	362.200.000,00	0,00	0,00	350.314.000,00	350.314.000,00	(11.886.000,00)	96,72%
1 12 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**25.220.000,00**	**4.780.000,00**	-	**30.000.000,00**	**25.220.000,00**	**4.780.000,00**	-	**30.000.000,00**	-	**100,00%**
1 12 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.220.000,00	4.780.000,00	0,00	30.000.000,00	25.220.000,00	4.780.000,00	0,00	30.000.000,00	-	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 12 01 15	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**37.780.000,00**	**185.933.000,00**	-	**223.713.000,00**	**35.604.000,00**	**157.344.081,00**	-	**192.948.081,00**	**(30.764.919,00)**	**86,25%**
1 12 01 15 01	Promosi Investasi	5.638.000,00	139.775.000,00	0,00	145.413.000,00	5.630.000,00	117.158.581,00	0,00	122.788.581,00	(22.624.419,00)	84,44%
1 12 01 15 02	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi	20.496.000,00	22.804.000,00	0,00	43.300.000,00	20.418.000,00	20.472.000,00	0,00	40.890.000,00	(2.410.000,00)	94,43%
1 12 01 15 03	Business Gathering	11.646.000,00	23.354.000,00	0,00	35.000.000,00	9.556.000,00	19.713.500,00	0,00	29.269.500,00	(5.730.500,00)	83,63%
1 12 01 16	**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**	**134.427.000,00**	**381.840.000,00**	-	**516.267.000,00**	**134.415.000,00**	**348.790.500,00**	-	**483.205.500,00**	**(33.061.500,00)**	**93,60%**
1 12 01 16 01	Surveylance ISO 9001 :2008	2.954.000,00	17.046.000,00	0,00	20.000.000,00	2.954.000,00	15.600.000,00	0,00	18.554.000,00	(1.446.000,00)	92,77%
1 12 01 16 02	Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Data Perizinan	78.050.000,00	11.950.000,00	0,00	90.000.000,00	78.050.000,00	11.950.000,00	0,00	90.000.000,00	-	100,00%
1 12 01 16 03	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Perizinan	8.599.000,00	36.401.000,00	0,00	45.000.000,00	8.599.000,00	31.631.000,00	0,00	40.230.000,00	(4.770.000,00)	89,40%
1 12 01 16 04	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Perizinan	6.192.000,00	265.075.000,00	0,00	271.267.000,00	6.192.000,00	238.441.500,00	0,00	244.633.500,00	(26.633.500,00)	90,18%
1 12 01 16 05	Kegiatan Penataan Arsip	35.900.000,00	19.100.000,00	0,00	55.000.000,00	35.888.000,00	19.100.000,00	0,00	54.988.000,00	(12.000,00)	99,98%
1 12 01 16 06	Survey Kepuasan Masyarakat	2.732.000,00	32.268.000,00	0,00	35.000.000,00	2.732.000,00	32.068.000,00	0,00	34.800.000,00	(200.000,00)	99,43%
1 12 01 17	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**105.675.000,00**	**480.161.000,00**	-	**585.836.000,00**	**98.850.000,00**	**377.622.500,00**	-	**476.472.500,00**	**(109.363.500,00)**	**81,33%**
1 12 01 17 01	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi	11.150.000,00	57.122.000,00	0,00	68.272.000,00	10.750.000,00	54.945.000,00	0,00	65.695.000,00	(2.577.000,00)	96,23%
1 12 01 17 02	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi serta penilaian kesehatan koperasi	13.000.000,00	53.315.000,00	0,00	66.315.000,00	10.275.000,00	37.486.500,00	0,00	47.761.500,00	(18.553.500,00)	72,02%
1 12 01 17 03	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Jambore Koperasi Sekolah)	17.825.000,00	180.911.000,00	0,00	198.736.000,00	17.025.000,00	141.127.000,00	0,00	158.152.000,00	(40.584.000,00)	79,58%
1 12 01 17 04	Kegiatan Monev Penyelenggaraan KUMKM	8.750.000,00	8.378.000,00	0,00	17.128.000,00	8.100.000,00	8.378.000,00	0,00	16.478.000,00	(650.000,00)	96,21%
1 12 01 17 05	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi	10.650.000,00	43.252.000,00	0,00	53.902.000,00	10.650.000,00	36.883.500,00	0,00	47.533.500,00	(6.368.500,00)	88,19%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 12 01 17 06	Kegiatan Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi	10.500.000,00	35.175.000,00	0,00	45.675.000,00	10.500.000,00	24.842.500,00	0,00	35.342.500,00	(10.332.500,00)	77,38%
1 12 01 17 07	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	11.950.000,00	30.320.000,00	0,00	42.270.000,00	10.200.000,00	20.632.000,00	0,00	30.832.000,00	(11.438.000,00)	72,94%
1 12 01 17 08	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Bagi Koperasi Wanita	10.800.000,00	27.132.000,00	0,00	37.932.000,00	10.500.000,00	22.932.000,00	0,00	33.432.000,00	(4.500.000,00)	88,14%
1 12 01 17 09	Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	11.050.000,00	44.556.000,00	0,00	55.606.000,00	10.850.000,00	30.396.000,00	0,00	41.246.000,00	(14.360.000,00)	74,18%
1 12 01 18	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM**	**238.298.000,00**	**1.455.959.000,00**		**1.694.257.000,00**	**190.596.800,00**	**1.106.838.950,00**		**1.297.435.750,00**	**(396.821.250,00)**	**76,58%**
1 12 01 18 01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dalam rangka HARKOPNAS	17.600.000,00	107.615.000,00	0,00	125.215.000,00	13.250.000,00	94.678.000,00	0,00	107.928.000,00	(17.287.000,00)	86,19%
1 12 01 18 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	18.110.000,00	58.862.000,00	0,00	76.972.000,00	17.910.000,00	56.848.400,00	0,00	74.758.400,00	(2.213.600,00)	97,12%
1 12 01 18 03	Kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM dalam Rangka HARKOP dan SMESCO	22.900.000,00	121.799.000,00	0,00	144.699.000,00	13.400.000,00	47.986.100,00	0,00	61.386.100,00	(83.312.900,00)	42,42%
1 12 01 18 04	Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional	17.000.000,00	290.424.000,00	0,00	307.424.000,00	12.000.000,00	216.378.200,00	0,00	228.378.200,00	(79.045.800,00)	74,29%
1 12 01 18 05	Kegiatan Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	10.700.000,00	30.084.000,00	0,00	40.784.000,00	10.200.000,00	22.684.000,00	0,00	32.884.000,00	(7.900.000,00)	80,63%
1 12 01 18 06	Kegiatan Pengembangan Unit Pelayanan Klinik Bisnis untuk WUB	14.900.000,00	79.431.000,00	0,00	94.331.000,00	14.900.000,00	74.610.000,00	0,00	89.510.000,00	(4.821.000,00)	94,89%
1 12 01 18 07	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	23.650.000,00	321.115.000,00	0,00	344.765.000,00	11.000.000,00	201.849.600,00	0,00	212.849.600,00	(131.915.400,00)	61,74%
1 12 01 18 08	Kegiatan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	23.700.000,00	147.415.000,00	0,00	171.115.000,00	23.500.000,00	119.093.500,00	0,00	142.593.500,00	(28.521.500,00)	83,33%
1 12 01 18 09	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	29.192.000,00	185.601.000,00	0,00	214.793.000,00	28.452.800,00	163.895.500,00	0,00	192.348.300,00	(22.444.700,00)	89,55%
1 12 01 18 10	Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	60.546.000,00	113.613.000,00	0,00	174.159.000,00	45.984.000,00	108.815.650,00	0,00	154.799.650,00	(19.359.350,00)	88,88%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 13 01	**Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga**	**1.726.418.000,00**	**10.331.287.000,00**	**507.790.000,00**	**12.565.495.000,00**	**1.485.730.000,00**	**9.260.594.885,00**	**364.299.762,00**	**11.110.624.647,00**	**(1.454.870.353,00)**	**88,42%**
1 13 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**283.814.000,00**	**182.189.000,00**	-	**466.003.000,00**	**279.672.000,00**	**164.576.329,00**	-	**444.248.329,00**	**(21.754.671,00)**	**95,33%**
1 13 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.814.000,00	83.836.000,00	0,00	367.650.000,00	279.672.000,00	67.276.392,00	0,00	346.948.392,00	(20.701.608,00)	94,37%
1 13 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	98.353.000,00	0,00	98.353.000,00	0,00	97.299.937,00	0,00	97.299.937,00	(1.053.063,00)	98,93%
1 13 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**155.000.000,00**	-	**155.000.000,00**	-	**107.555.038,00**	-	**107.555.038,00**	**(47.444.962,00)**	**69,39%**
1 13 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	34.944.925,00	0,00	34.944.925,00	(55.075,00)	99,84%
1 13 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	51.290.113,00	0,00	51.290.113,00	(23.709.887,00)	68,39%
1 13 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	21.320.000,00	0,00	21.320.000,00	(23.680.000,00)	47,38%
1 13 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	-	-	**268.213.762,00**	**268.213.762,00**	**(31.786.238,00)**	**89,40%**
1 13 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	268.213.762,00	268.213.762,00	(31.786.238,00)	89,40%
1 13 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**34.830.000,00**	**15.170.000,00**	-	**50.000.000,00**	**33.993.000,00**	**6.212.850,00**	-	**40.205.850,00**	**(9.794.150,00)**	**80,41%**
1 13 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34.830.000,00	15.170.000,00	0,00	50.000.000,00	33.993.000,00	6.212.850,00	0,00	40.205.850,00	(9.794.150,00)	80,41%
1 13 01 15	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**452.848.000,00**	**5.389.375.000,00**	**10.000.000,00**	**5.852.223.000,00**	**382.910.000,00**	**5.071.934.568,00**	**10.000.000,00**	**5.464.844.568,00**	**(387.378.432,00)**	**93,38%**
1 13 01 15 01	Lomba Vokal Keroncong dan Campur Sari	5.950.000,00	49.175.000,00	0,00	55.125.000,00	5.950.000,00	49.175.000,00	0,00	55.125.000,00	-	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 13 01 15 02	Pekan Seni Pelajar Tingkat Propinsi Jawa Timur	32.450.000,00	407.050.000,00	0,00	439.500.000,00	28.450.000,00	375.168.000,00	0,00	403.618.000,00	(35.882.000,00)	91,84%
1 13 01 15 03	Festival Pedalangan dan Pembinaan Dalang Anak Tingkat Kota Madiun	4.250.000,00	133.930.000,00	10.000.000,00	148.180.000,00	4.250.000,00	131.430.000,00	10.000.000,00	145.680.000,00	(2.500.000,00)	98,31%
1 13 01 15 04	Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya	22.750.000,00	263.250.000,00	0,00	286.000.000,00	22.750.000,00	244.850.000,00	0,00	267.600.000,00	(18.400.000,00)	93,57%
1 13 01 15 05	Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	27.850.000,00	686.235.000,00	0,00	714.085.000,00	27.850.000,00	686.135.000,00	0,00	713.985.000,00	(100.000,00)	99,99%
1 13 01 15 06	Pegelaran Wayang Kulit	27.250.000,00	586.250.000,00	0,00	613.500.000,00	27.150.000,00	586.250.000,00	0,00	613.400.000,00	(100.000,00)	99,98%
1 13 01 15 07	Pelatihan Bahasa Jawa	5.100.000,00	52.400.000,00	0,00	57.500.000,00	5.100.000,00	51.300.000,00	0,00	56.400.000,00	(1.100.000,00)	98,09%
1 13 01 15 08	Festival Seni	3.800.000,00	81.700.000,00	0,00	85.500.000,00	3.800.000,00	81.700.000,00	0,00	85.500.000,00	-	100,00%
1 13 01 15 09	Festival Pedalangan Tingkat Provinsi	10.900.000,00	104.350.000,00	0,00	115.250.000,00	9.400.000,00	95.050.000,00	0,00	104.450.000,00	(10.800.000,00)	90,63%
1 13 01 15 10	Festival Seni Karawitan Anak Tingkat Kota dan Provinsi	6.550.000,00	76.130.000,00	0,00	82.680.000,00	6.510.000,00	70.240.000,00	0,00	76.750.000,00	(5.930.000,00)	92,83%
1 13 01 15 11	Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru	5.350.000,00	54.900.000,00	0,00	60.250.000,00	5.350.000,00	43.462.500,00	0,00	48.812.500,00	(11.437.500,00)	81,02%
1 13 01 15 12	Lomba Geguritan Pitutur Luhur	5.350.000,00	54.900.000,00	0,00	60.250.000,00	5.350.000,00	44.800.000,00	0,00	50.150.000,00	(10.100.000,00)	83,24%
1 13 01 15 13	Lomba Penulisan Naskah Macapat dan Tetembangan Tembang Macapat	12.500.000,00	107.500.000,00	0,00	120.000.000,00	12.500.000,00	107.500.000,00	0,00	120.000.000,00	-	100,00%
1 13 01 15 14	Sarasehan Budaya	3.250.000,00	36.750.000,00	0,00	40.000.000,00	3.250.000,00	36.750.000,00	0,00	40.000.000,00	-	100,00%
1 13 01 15 15	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	7.100.000,00	187.900.000,00	0,00	195.000.000,00	750.000,00	144.590.000,00	0,00	145.340.000,00	(49.660.000,00)	74,53%
1 13 01 15 17	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	164.950.000,00	1.284.886.000,00	0,00	1.449.836.000,00	164.950.000,00	1.270.783.450,00	0,00	1.435.733.450,00	(14.102.550,00)	99,03%
1 13 01 15 18	Pementasan Kesenian di TMII	6.450.000,00	209.710.000,00	0,00	216.160.000,00	6.300.000,00	209.101.618,00	0,00	215.401.618,00	(758.382,00)	99,65%
1 13 01 15 19	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Kartoharjo	26.750.000,00	338.250.000,00	0,00	365.000.000,00	14.500.000,00	305.876.000,00	0,00	320.376.000,00	(44.624.000,00)	87,77%
1 13 01 15 21	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Manguharjo	40.450.000,00	462.702.000,00	0,00	503.152.000,00	15.050.000,00	417.447.000,00	0,00	432.497.000,00	(70.655.000,00)	85,96%
1 13 01 15 22	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Kec. Taman	33.848.000,00	211.407.000,00	0,00	245.255.000,00	13.700.000,00	120.326.000,00	0,00	134.026.000,00	(111.229.000,00)	54,65%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 13 01 16	**Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata**	**205.965.000,00**	**1.484.511.000,00**	**12.000.000,00**	**1.702.476.000,00**	**186.815.000,00**	**1.341.342.600,00**	-	**1.528.157.600,00**	**(174.318.400,00)**	**89,76%**
1 13 01 16 01	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisataan	26.650.000,00	370.639.000,00	0,00	397.289.000,00	18.500.000,00	338.163.500,00	0,00	356.663.500,00	(40.625.500,00)	89,77%
1 13 01 16 02	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)	55.850.000,00	321.940.000,00	0,00	377.790.000,00	54.950.000,00	295.121.500,00	0,00	350.071.500,00	(27.718.500,00)	92,66%
1 13 01 16 03	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	19.550.000,00	115.119.000,00	0,00	134.669.000,00	18.650.000,00	98.197.200,00	0,00	116.847.200,00	(17.821.800,00)	86,77%
1 13 01 16 04	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	15.250.000,00	153.564.000,00	0,00	168.814.000,00	13.750.000,00	133.960.500,00	0,00	147.710.500,00	(21.103.500,00)	87,50%
1 13 01 16 05	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	10.200.000,00	40.042.000,00	0,00	50.242.000,00	10.200.000,00	29.461.000,00	0,00	39.661.000,00	(10.581.000,00)	78,94%
1 13 01 16 06	Kegiatan Lomba Fotograpy	10.000.000,00	62.160.000,00	0,00	72.160.000,00	9.500.000,00	56.050.000,00	0,00	65.550.000,00	(6.610.000,00)	90,84%
1 13 01 16 07	Kegiatan Gebyar Batik dan Fashion Show Batik 2016	29.565.000,00	171.935.000,00	12.000.000,00	213.500.000,00	24.865.000,00	159.467.500,00	-	184.332.500,00	(29.167.500,00)	86,34%
1 13 01 16 08	Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan makanan khas	25.350.000,00	144.423.000,00	0,00	169.773.000,00	24.350.000,00	132.712.400,00	0,00	157.062.400,00	(12.710.600,00)	92,51%
1 13 01 16 09	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kemitraan di Bidang Pariwisata	13.550.000,00	104.689.000,00	0,00	118.239.000,00	12.050.000,00	98.209.000,00	0,00	110.259.000,00	(7.980.000,00)	93,25%
1 13 01 17	**Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga**	**748.961.000,00**	**3.105.042.000,00**	**185.790.000,00**	**4.039.793.000,00**	**602.340.000,00**	**2.568.973.500,00**	**86.086.000,00**	**3.257.399.500,00**	**(782.393.500,00)**	**80,63%**
1 13 01 17 01	Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota	303.508.000,00	732.096.000,00	0,00	1.035.604.000,00	283.394.000,00	709.234.000,00	0,00	992.628.000,00	(42.976.000,00)	95,85%
1 13 01 17 02	Kegiatan Pekan Olahraga SD Tingkat Provinsi	19.050.000,00	430.950.000,00	0,00	450.000.000,00	19.050.000,00	394.950.000,00	0,00	414.000.000,00	(36.000.000,00)	92,00%
1 13 01 17 03	Liga Pendidikan Sepak Bola (Tingkat SMP dan SMA/SMK)	35.305.000,00	64.695.000,00	0,00	100.000.000,00	35.305.000,00	59.450.000,00	0,00	94.755.000,00	(5.245.000,00)	94,76%
1 13 01 17 04	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	38.241.000,00	316.239.000,00	0,00	354.480.000,00	27.691.000,00	217.779.000,00	0,00	245.470.000,00	(109.010.000,00)	69,25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 13 01 17 05	Hari Olah Raga Nasional	113.916.000,00	341.084.000,00	0,00	455.000.000,00	54.926.000,00	279.793.800,00	0,00	334.719.800,00	(120.280.200,00)	73,56%
1 13 01 17 06	Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan	29.652.000,00	197.908.000,00	0,00	227.560.000,00	18.604.000,00	177.450.950,00	0,00	196.054.950,00	(31.505.050,00)	86,16%
1 13 01 17 08	Pembinaan Mental Spiritual Pemuda	10.240.000,00	81.909.000,00	0,00	92.149.000,00	9.125.000,00	81.908.750,00	0,00	91.033.750,00	(1.115.250,00)	98,79%
1 13 01 17 09	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Kartoharjo	48.405.000,00	326.595.000,00	0,00	375.000.000,00	48.120.000,00	309.175.000,00	0,00	357.295.000,00	(17.705.000,00)	95,28%
1 13 01 17 11	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Manguharjo	56.950.000,00	318.050.000,00	0,00	375.000.000,00	56.820.000,00	247.326.000,00	0,00	304.146.000,00	(70.854.000,00)	81,11%
1 13 01 17 12	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Taman	81.180.000,00	293.820.000,00	0,00	375.000.000,00	40.865.000,00	90.710.000,00	0,00	131.575.000,00	(243.425.000,00)	35,09%
1 13 01 17 13	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	12.514.000,00	1.696.000,00	185.790.000,00	200.000.000,00	8.440.000,00	1.196.000,00	86.086.000,00	95.722.000,00	(104.278.000,00)	47,86%
1 14 01	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**420.815.000,00**	**1.169.702.000,00**	**614.980.000,00**	**2.205.497.000,00**	**395.326.000,00**	**1.061.273.400,00**	**569.285.000,00**	**2.025.884.400,00**	**(179.612.600,00)**	**91,86%**
1 14 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**184.750.000,00**	**128.140.000,00**	-	**312.890.000,00**	**171.497.000,00**	**119.913.100,00**	-	**291.410.100,00**	**(21.479.900,00)**	**93,13%**
1 14 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.750.000,00	47.340.000,00	0,00	232.090.000,00	171.497.000,00	46.362.000,00	0,00	217.859.000,00	(14.231.000,00)	93,87%
1 14 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	80.800.000,00	0,00	80.800.000,00	0,00	73.551.100,00	0,00	73.551.100,00	(7.248.900,00)	91,03%
1 14 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**150.000.000,00**	-	**150.000.000,00**	-	**128.152.000,00**	-	**128.152.000,00**	**(21.848.000,00)**	**85,43%**
1 14 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.764.500,00	0,00	49.764.500,00	(235.500,00)	99,53%
1 14 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	48.503.500,00	0,00	48.503.500,00	(21.496.500,00)	69,29%
1 14 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	29.884.000,00	0,00	29.884.000,00	(116.000,00)	99,61%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 14 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**514.980.000,00**	**514.980.000,00**	-	-	**473.309.000,00**	**473.309.000,00**	**(41.671.000,00)**	**91,91%**
1 14 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	514.980.000,00	514.980.000,00	0,00	0,00	473.309.000,00	473.309.000,00	(41.671.000,00)	91,91%
1 14 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**19.400.000,00**	**600.000,00**	-	**20.000.000,00**	**19.078.000,00**	**600.000,00**	-	**19.678.000,00**	**(322.000,00)**	**98,39%**
1 14 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.400.000,00	600.000,00	0,00	20.000.000,00	19.078.000,00	600.000,00	0,00	19.678.000,00	(322.000,00)	98,39%
1 14 01 15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	**82.008.000,00**	**579.002.000,00**	**100.000.000,00**	**761.010.000,00**	**73.858.000,00**	**524.725.000,00**	**95.976.000,00**	**694.559.000,00**	**(66.451.000,00)**	**91,27%**
1 14 01 15 01	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	750.000,00	49.250.000,00	0,00	50.000.000,00	700.000,00	46.350.000,00	0,00	47.050.000,00	(2.950.000,00)	94,10%
1 14 01 15 02	Kegiatan Pengelolaan Bahan Pustaka	750.000,00	28.625.000,00	0,00	29.375.000,00	750.000,00	27.531.000,00	0,00	28.281.000,00	(1.094.000,00)	96,28%
1 14 01 15 03	Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	3.214.000,00	49.786.000,00	0,00	53.000.000,00	3.214.000,00	40.158.900,00	0,00	43.372.900,00	(9.627.100,00)	81,84%
1 14 01 15 04	Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	95.976.000,00	95.976.000,00	(4.024.000,00)	95,98%
1 14 01 15 05	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca	1.466.000,00	72.334.000,00	0,00	73.800.000,00	1.466.000,00	69.223.500,00	0,00	70.689.500,00	(3.110.500,00)	95,79%
1 14 01 15 06	Pemeliharaan Rutin Berkala Bahan Pustaka	5.158.000,00	29.842.000,00	0,00	35.000.000,00	4.358.000,00	26.669.500,00	0,00	31.027.500,00	(3.972.500,00)	88,65%
1 14 01 15 07	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Pintar	14.150.000,00	141.975.000,00	0,00	156.125.000,00	13.550.000,00	141.325.000,00	0,00	154.875.000,00	(1.250.000,00)	99,20%
1 14 01 15 08	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengelola Perpustakaan	27.060.000,00	106.180.000,00	0,00	133.240.000,00	26.610.000,00	85.342.100,00	0,00	111.952.100,00	(21.287.900,00)	84,02%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 14 01 15 09	Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Perpustakaan	28.360.000,00	22.110.000,00	0,00	50.470.000,00	22.110.000,00	21.350.000,00	0,00	43.460.000,00	(7.010.000,00)	86,11%
1 14 01 15 10	Sosialisasi, Bimtek SDM Pengelola Perpustakaan Keluar Daerah	1.100.000,00	78.900.000,00	0,00	80.000.000,00	1.100.000,00	66.775.000,00	0,00	67.875.000,00	(12.125.000,00)	84,84%
1 14 01 16	**Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah**	**134.657.000,00**	**311.960.000,00**	-	**446.617.000,00**	**130.893.000,00**	**287.883.300,00**	-	**418.776.300,00**	**(27.840.700,00)**	**93,77%**
1 14 01 16 01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	58.816.000,00	39.684.000,00	0,00	98.500.000,00	57.181.000,00	38.534.000,00	0,00	95.715.000,00	(2.785.000,00)	97,17%
1 14 01 16 02	Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika	27.790.000,00	7.160.000,00	0,00	34.950.000,00	27.190.000,00	6.960.000,00	0,00	34.150.000,00	(800.000,00)	97,71%
1 14 01 16 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah	5.016.000,00	49.984.000,00	0,00	55.000.000,00	5.016.000,00	45.926.000,00	0,00	50.942.000,00	(4.058.000,00)	92,62%
1 14 01 16 04	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	25.973.000,00	124.762.000,00	0,00	150.735.000,00	24.844.000,00	116.601.700,00	0,00	141.445.700,00	(9.289.300,00)	93,84%
1 14 01 16 06	Kegiatan Sosialisasi Bimtek SDM Pengelola Kearsipan Ke Luar Daerah	1.250.000,00	78.750.000,00	0,00	80.000.000,00	1.100.000,00	68.391.600,00	0,00	69.491.600,00	(10.508.400,00)	86,86%
1 14 01 16 07	Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kearsipan	15.812.000,00	11.620.000,00	0,00	27.432.000,00	15.562.000,00	11.470.000,00	0,00	27.032.000,00	(400.000,00)	98,54%
1 16 01	**Sekretariat Daerah**	**6.946.930.000,00**	**20.697.530.000,00**	**2.434.907.000,00**	**30.079.367.000,00**	**6.246.415.300,00**	**17.095.423.176,00**	**1.774.502.925,50**	**25.116.341.401,50**	**(4.963.025.598,50)**	**83,50%**
1 16 01.01	**Bagian Administrasi Pemerintahan Umum**	**1.055.277.000,00**	**3.414.488.000,00**	**75.000.000,00**	**4.544.765.000,00**	**958.497.000,00**	**3.004.804.732,00**	**73.411.000,00**	**4.036.712.732,00**	**(508.052.268,00)**	**88,82%**
1 16 01.01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**102.868.000,00**	**732.062.000,00**	-	**834.930.000,00**	**96.510.000,00**	**695.854.482,00**	-	**792.364.482,00**	**(42.565.518,00)**	**94,90%**
1 16 01.01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.868.000,00	577.132.000,00	0,00	680.000.000,00	96.510.000,00	573.528.972,00	0,00	670.038.972,00	(9.961.028,00)	98,54%
1 16 01.01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	154.930.000,00	0,00	154.930.000,00	0,00	122.325.510,00	0,00	122.325.510,00	(32.604.490,00)	78,96%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**28.974.000,00**	-	**28.974.000,00**	-	**26.814.250,00**	-	**26.814.250,00**	**(2.159.750,00)**	**92,55%**
1 16 01.01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-	100,00%
1 16 01.01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	18.674.000,00	0,00	18.674.000,00	0,00	16.514.250,00	0,00	16.514.250,00	(2.159.750,00)	88,43%
1 16 01.01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	-	100,00%
1 16 01.01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**17.380.000,00**	**7.620.000,00**	-	**25.000.000,00**	**17.350.000,00**	**7.620.000,00**	-	**24.970.000,00**	**(30.000,00)**	**99,88%**
1 16 01.01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.380.000,00	7.620.000,00	0,00	25.000.000,00	17.350.000,00	7.620.000,00	0,00	24.970.000,00	(30.000,00)	99,88%
1 16 01.01 15	**Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah Pemerintah Daerah**	**149.900.000,00**	**656.559.000,00**	-	**806.459.000,00**	**140.630.000,00**	**554.864.400,00**	-	**695.494.400,00**	**(110.964.600,00)**	**86,24%**
1 16 01.01 15 01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Ekonomi (Pameran Apeksi)	39.258.000,00	457.205.000,00	0,00	496.463.000,00	32.608.000,00	423.469.600,00	0,00	456.077.600,00	(40.385.400,00)	91,87%
1 16 01.01 15 02	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Bidang Pelayanan Publik (Pawitan Dirogo)	5.174.000,00	82.214.000,00	0,00	87.388.000,00	3.574.000,00	32.941.300,00	0,00	36.515.300,00	(50.872.700,00)	41,79%
1 16 01.01 15 03	Kegiatan Koordinasi Penyusunan MoU	39.268.000,00	8.340.000,00	0,00	47.608.000,00	39.248.000,00	8.340.000,00	0,00	47.588.000,00	(20.000,00)	99,96%
1 16 01.01 15 04	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahan non Departemen/Luar Negeri	66.200.000,00	108.800.000,00	0,00	175.000.000,00	65.200.000,00	90.113.500,00	0,00	155.313.500,00	(19.686.500,00)	88,75%
1 16 01.01 16	**Program Penataan Daerah Otonom Baru**	**785.129.000,00**	**1.989.273.000,00**	**75.000.000,00**	**2.849.402.000,00**	**704.007.000,00**	**1.719.651.600,00**	**73.411.000,00**	**2.497.069.600,00**	**(352.332.400,00)**	**87,63%**
1 16 01.01 16 01	Peringatan Hari Otonomi Daerah	22.944.000,00	20.412.000,00		43.356.000,00	17.984.000,00	18.949.000,00		36.933.000,00	(6.423.000,00)	85,19%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.01 16 02	Bintek Administrasi Kelurahan	16.832.000,00	132.068.000,00	0,00	148.900.000,00	16.782.000,00	124.788.400,00	0,00	141.570.400,00	(7.329.600,00)	95,08%
1 16 01.01 16 03	Kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	61.020.000,00	56.880.000,00	0,00	117.900.000,00	50.743.000,00	54.098.200,00	0,00	104.841.200,00	(13.058.800,00)	88,92%
1 16 01.01 16 04	Kegiatan Koordinasi Penentuan Tapal Batas kelurahan	33.208.000,00	56.792.000,00	0,00	90.000.000,00	33.136.000,00	56.037.000,00	0,00	89.173.000,00	(827.000,00)	99,08%
1 16 01.01 16 05	Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	17.542.000,00	54.825.000,00	0,00	72.367.000,00	17.096.000,00	53.873.300,00	0,00	70.969.300,00	(1.397.700,00)	98,07%
1 16 01.01 16 06	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	51.036.000,00	190.802.000,00	0,00	241.838.000,00	47.236.000,00	146.166.000,00	0,00	193.402.000,00	(48.436.000,00)	79,97%
1 16 01.01 16 07	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	286.100.000,00	987.430.000,00	0,00	1.273.530.000,00	273.225.000,00	924.970.000,00	0,00	1.198.195.000,00	(75.335.000,00)	94,08%
1 16 01.01 16 08	Kegiatan Pemekaran Kecamatan	45.179.000,00	22.621.000,00	75.000.000,00	142.800.000,00	24.055.000,00	21.691.000,00	73.411.000,00	119.157.000,00	(23.643.000,00)	83,44%
1 16 01.01 16 09	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil	78.680.000,00	239.312.000,00	0,00	317.992.000,00	63.805.000,00	125.498.000,00	0,00	189.303.000,00	(128.689.000,00)	59,53%
1 16 01.01 16 10	Koordinasi Penyusunan LKPJ Walikota	65.106.000,00	84.894.000,00	0,00	150.000.000,00	59.106.000,00	77.904.000,00	0,00	137.010.000,00	(12.990.000,00)	91,34%
1 16 01.01 16 11	Penyusunan LPPD, ILPPD dan EKPPD Kota Madiun	85.162.000,00	38.393.000,00	0,00	123.555.000,00	85.112.000,00	36.793.000,00	0,00	121.905.000,00	(1.650.000,00)	98,66%
1 16 01.01 16 12	Kegiatan Bimtek LPPD	22.320.000,00	104.844.000,00	0,00	127.164.000,00	15.727.000,00	78.883.700,00	0,00	94.610.700,00	(32.553.300,00)	74,40%
1 16 01.02	**Bagian Organisasi**	**831.972.000,00**	**1.666.618.000,00**	**206.550.000,00**	**2.705.140.000,00**	**736.870.000,00**	**1.458.592.750,00**	**204.474.500,00**	**2.399.937.250,00**	**(305.202.750,00)**	**88,72%**
1 16 01.02 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**86.310.000,00**	**105.830.000,00**	-	**192.140.000,00**	**83.803.000,00**	**105.589.250,00**	-	**189.392.250,00**	**(2.747.750,00)**	**98,57%**
1 16 01.02 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.310.000,00	23.780.000,00	0,00	110.090.000,00	83.803.000,00	23.629.300,00	0,00	107.432.300,00	(2.657.700,00)	97,59%
1 16 01.02 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	82.050.000,00	0,00	82.050.000,00	0,00	81.959.950,00	0,00	81.959.950,00	(90.050,00)	99,89%
1 16 01.02 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**38.950.000,00**	-	**38.950.000,00**	-	**27.539.300,00**	-	**27.539.300,00**	**(11.410.700,00)**	**70,70%**
1 16 01.02 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.969.500,00	0,00	1.969.500,00	(30.500,00)	98,48%
1 16 01.02 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00	0,00	13.725.100,00	0,00	13.725.100,00	(8.324.900,00)	62,25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.02 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	11.844.700,00	0,00	11.844.700,00	(3.055.300,00)	79,49%
1 16 01.02 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**206.550.000,00**	**206.550.000,00**	-	-	**204.474.500,00**	**204.474.500,00**	**(2.075.500,00)**	**99,00%**
1 16 01.02 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	206.550.000,00	206.550.000,00	0,00	0,00	204.474.500,00	204.474.500,00	(2.075.500,00)	99,00%
1 16 01.02 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**14.799.000,00**	**201.000,00**	-	**15.000.000,00**	**12.052.000,00**	**179.200,00**	-	**12.231.200,00**	**(2.768.800,00)**	81,54%
1 16 01.02 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.799.000,00	201.000,00	0,00	15.000.000,00	12.052.000,00	179.200,00	0,00	12.231.200,00	(2.768.800,00)	81,54%
1 16 01.02 20	**Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah**	**226.320.000,00**	**665.546.000,00**	-	**891.866.000,00**	**208.692.000,00**	**615.349.700,00**	-	**824.041.700,00**	**(67.824.300,00)**	**92,40%**
1 16 01.02 20 03	Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	24.575.000,00	32.225.000,00	0,00	56.800.000,00	23.325.000,00	30.275.000,00	0,00	53.600.000,00	(3.200.000,00)	94,37%
1 16 01.02 20 04	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	43.283.000,00	31.717.000,00	0,00	75.000.000,00	37.482.000,00	12.131.700,00	0,00	49.613.700,00	(25.386.300,00)	66,15%
1 16 01.02 20 05	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	16.850.000,00	149.850.000,00	0,00	166.700.000,00	16.841.000,00	141.152.000,00	0,00	157.993.000,00	(8.707.000,00)	94,78%
1 16 01.02 20 06	Kegiatan Gelar Pameran Pelayanan Publik Tingkat Jawa Timur	26.439.000,00	153.561.000,00	0,00	180.000.000,00	20.734.000,00	143.311.000,00	0,00	164.045.000,00	(15.955.000,00)	91,14%
1 16 01.02 20 07	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	34.208.000,00	230.858.000,00	0,00	265.066.000,00	32.197.000,00	225.333.500,00	0,00	257.530.500,00	(7.535.500,00)	97,16%
1 16 01.02 20 08	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Publik	36.137.000,00	37.163.000,00	0,00	73.300.000,00	34.422.000,00	33.913.000,00	0,00	68.335.000,00	(4.965.000,00)	93,23%
1 16 01.02 20 09	Kegiatan penyusunan pedoman tentang pakaian dinas	44.828.000,00	30.172.000,00	0,00	75.000.000,00	43.691.000,00	29.233.500,00	0,00	72.924.500,00	(2.075.500,00)	97,23%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.02 21	**Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah**	**504.543.000,00**	**856.091.000,00**	-	**1.360.634.000,00**	**432.323.000,00**	**709.935.300,00**	-	**1.142.258.300,00**	**(218.375.700,00)**	**83,95%**
1 16 01.02 21 01	Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan SAKIP SKPD	78.558.000,00	45.807.000,00	0,00	124.365.000,00	69.486.000,00	42.072.500,00	0,00	111.558.500,00	(12.806.500,00)	89,70%
1 16 01.02 21 02	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	107.556.000,00	116.811.000,00	0,00	224.367.000,00	93.831.000,00	67.786.100,00	0,00	161.617.100,00	(62.749.900,00)	72,03%
1 16 01.02 21 03	Kegiatan Pengembangan E-SAKIP	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
1 16 01.02 21 04	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	57.175.000,00	304.727.000,00	0,00	361.902.000,00	51.625.000,00	258.107.500,00	0,00	309.732.500,00	(52.169.500,00)	85,58%
1 16 01.02 21 05	Kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	214.949.000,00	185.051.000,00	0,00	400.000.000,00	205.465.000,00	164.534.200,00	0,00	369.999.200,00	(30.000.800,00)	92,50%
1 16 01.02 21 06	Kegiatan Penyusunan Desain Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	46.305.000,00	203.695.000,00	0,00	250.000.000,00	11.916.000,00	177.435.000,00	0,00	189.351.000,00	(60.649.000,00)	75,74%
1 16 01.03	**Bagian Umum**	**1.519.226.000,00**	**9.471.352.000,00**	**1.827.651.000,00**	**12.818.229.000,00**	**1.451.786.000,00**	**7.280.388.378,00**	**1.197.239.605,50**	**9.929.413.983,50**	**(2.888.815.016,50)**	77,46%
1 16 01.03 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.071.286.000,00**	**2.352.681.000,00**	-	**3.423.967.000,00**	**1.056.315.000,00**	**2.141.778.971,00**	-	**3.198.093.971,00**	**(225.873.029,00)**	**93,40%**
1 16 01.03 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.071.286.000,00	1.030.866.000,00	0,00	2.102.152.000,00	1.056.315.000,00	872.404.403,00	0,00	1.928.719.403,00	(173.432.597,00)	91,75%
1 16 01.03 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	1.321.815.000,00	0,00	1.321.815.000,00	0,00	1.269.374.568,00	0,00	1.269.374.568,00	(52.440.432,00)	96,03%
1 16 01.03 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**2.754.572.000,00**	-	**2.754.572.000,00**	-	**1.944.451.757,00**	-	**1.944.451.757,00**	**(810.120.243,00)**	**70,59%**
1 16 01.03 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	231.292.000,00	0,00	231.292.000,00	0,00	230.449.300,00	0,00	230.449.300,00	(842.700,00)	99,64%
1 16 01.03 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	1.127.912.000,00	0,00	1.127.912.000,00	0,00	650.627.648,00	0,00	650.627.648,00	(477.284.352,00)	57,68%
1 16 01.03 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	120.700.000,00	0,00	120.700.000,00	0,00	112.062.000,00	0,00	112.062.000,00	(8.638.000,00)	92,84%
1 16 01.03 02 04	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	0,00	1.274.668.000,00	0,00	1.274.668.000,00	0,00	951.312.809,00	0,00	951.312.809,00	(323.355.191,00)	74,63%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.03 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**28.250.000,00**	**1.784.750.000,00**	**1.827.651.000,00**	**3.640.651.000,00**	**19.400.000,00**	**1.146.363.950,00**	**1.197.239.605,50**	**2.363.003.555,50**	**(1.277.647.444,50)**	**64,91%**
1 16 01.03 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	1.627.651.000,00	1.627.651.000,00	0,00	0,00	1.000.714.605,50	1.000.714.605,50	(626.936.394,50)	61,48%
1 16 01.03 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	196.525.000,00	196.525.000,00	(3.475.000,00)	98,26%
1 16 01.03 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	28.250.000,00	1.784.750.000,00	0,00	1.813.000.000,00	19.400.000,00	1.146.363.950,00	0,00	1.165.763.950,00	(647.236.050,00)	64,30%
1 16 01.03 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**6.825.000,00**	**11.300.000,00**	-	**18.125.000,00**	**6.714.000,00**	**11.253.000,00**	-	**17.967.000,00**	**(158.000,00)**	**99,13%**
1 16 01.03 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.825.000,00	11.300.000,00	0,00	18.125.000,00	6.714.000,00	11.253.000,00	0,00	17.967.000,00	(158.000,00)	99,13%
1 16 01.03 19	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**412.865.000,00**	**2.568.049.000,00**	-	**2.980.914.000,00**	**369.357.000,00**	**2.036.540.700,00**	-	**2.405.897.700,00**	**(575.016.300,00)**	**80,71%**
1 16 01.03 19 01	Kegiatan Keprotokolan acara Pemerintah Kota	396.065.000,00	2.320.849.000,00	0,00	2.716.914.000,00	353.757.000,00	1.866.076.700,00	0,00	2.219.833.700,00	(497.080.300,00)	81,70%
1 16 01.03 19 02	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani sekretariat	16.800.000,00	247.200.000,00	0,00	264.000.000,00	15.600.000,00	170.464.000,00	0,00	186.064.000,00	(77.936.000,00)	70,48%
1 16 01.04	**Bagian Hukum**	**2.265.134.000,00**	**1.195.481.000,00**	**49.000.000,00**	**3.509.615.000,00**	**1.914.837.000,00**	**1.061.518.260,00**	**48.220.000,00**	**3.024.575.260,00**	**(485.039.740,00)**	**86,18%**
1 16 01.04 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**149.230.000,00**	**84.539.000,00**	-	**233.769.000,00**	**127.981.000,00**	**83.579.200,00**	-	**211.560.200,00**	**(22.208.800,00)**	**90,50%**
1 16 01.04 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.230.000,00	49.039.000,00	0,00	198.269.000,00	127.981.000,00	49.039.000,00	0,00	177.020.000,00	(21.249.000,00)	89,28%
1 16 01.04 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	34.540.200,00	0,00	34.540.200,00	(959.800,00)	97,30%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.04 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**38.548.000,00**	-	**38.548.000,00**	-	**26.652.000,00**	-	**26.652.000,00**	**(11.896.000,00)**	**69,14%**
1 16 01.04 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.464.000,00	0,00	2.464.000,00	0,00	-	0,00	-	(2.464.000,00)	0,00%
1 16 01.04 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	19.122.000,00	0,00	19.122.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	12.050.000,00	(7.072.000,00)	63,02%
1 16 01.04 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	16.962.000,00	0,00	16.962.000,00	0,00	14.602.000,00	0,00	14.602.000,00	(2.360.000,00)	86,09%
1 16 01.04 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**1.000.000,00**	-	**49.000.000,00**	**50.000.000,00**	**400.000,00**	-	**48.220.000,00**	**48.620.000,00**	**(1.380.000,00)**	97,24%
1 16 01.04 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	1.000.000,00	0,00	49.000.000,00	50.000.000,00	400.000,00		48.220.000,00	48.620.000,00	(1.380.000,00)	97,24%
1 16 01.04 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**10.752.000,00**	**6.498.000,00**	-	**17.250.000,00**	**10.752.000,00**	**6.498.000,00**	-	**17.250.000,00**	-	100,00%
1 16 01.04 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.752.000,00	6.498.000,00	0,00	17.250.000,00	10.752.000,00	6.498.000,00	0,00	17.250.000,00	-	100,00%
1 16 01.04 18	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**2.104.152.000,00**	**1.065.896.000,00**	-	**3.170.048.000,00**	**1.775.704.000,00**	**944.789.060,00**	-	**2.720.493.060,00**	**(449.554.940,00)**	85,82%
1 16 01.04 18 01	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	1.368.950.000,00	302.675.000,00	0,00	1.671.625.000,00	1.098.750.000,00	283.600.850,00	0,00	1.382.350.850,00	(289.274.150,00)	82,70%
1 16 01.04 18 02	Legislasi Daerah (Prolegda)	66.157.000,00	33.843.000,00	0,00	100.000.000,00	50.086.000,00	21.318.000,00	0,00	71.404.000,00	(28.596.000,00)	71,40%
1 16 01.04 18 03	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	130.844.000,00	360.421.000,00	0,00	491.265.000,00	130.142.000,00	305.724.410,00	0,00	435.866.410,00	(55.398.590,00)	88,72%
1 16 01.04 18 04	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	538.201.000,00	368.957.000,00	0,00	907.158.000,00	496.726.000,00	334.145.800,00	0,00	830.871.800,00	(76.286.200,00)	91,59%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.05	**Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**449.838.000,00**	**4.071.641.000,00**	**196.706.000,00**	**4.718.185.000,00**	**386.448.000,00**	**3.502.567.900,00**	**171.220.000,00**	**4.060.235.900,00**	**(657.949.100,00)**	**86,06%**
1 16 01.05 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**137.942.000,00**	**249.566.000,00**	-	**387.508.000,00**	**102.653.000,00**	**138.389.000,00**	-	**241.042.000,00**	**(146.466.000,00)**	**62,20%**
1 16 01.05 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.942.000,00	171.518.000,00	0,00	309.460.000,00	102.653.000,00	78.966.000,00	0,00	181.619.000,00	(127.841.000,00)	58,69%
1 16 01.05 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	78.048.000,00	0,00	78.048.000,00	0,00	59.423.000,00	0,00	59.423.000,00	(18.625.000,00)	76,14%
1 16 01.05 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**78.048.000,00**	-	**78.048.000,00**	-	**59.423.000,00**	-	**59.423.000,00**	**(18.625.000,00)**	**76,14%**
1 16 01.05 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	78.048.000,00	0,00	78.048.000,00	0,00	59.423.000,00	0,00	59.423.000,00	(18.625.000,00)	76,14%
1 16 01.05 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**33.042.000,00**	-	**33.042.000,00**	-	**22.165.000,00**	-	**22.165.000,00**	**(10.877.000,00)**	**67,08%**
1 16 01.05 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	(1.410.000,00)	29,50%
1 16 01.05 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	21.842.000,00	0,00	21.842.000,00	0,00	13.837.500,00	0,00	13.837.500,00	(8.004.500,00)	63,35%
1 16 01.05 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	7.737.500,00	0,00	7.737.500,00	(1.462.500,00)	84,10%
1 16 01.05 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**3.294.000,00**	-	**196.706.000,00**	**200.000.000,00**	**3.198.000,00**	-	**171.220.000,00**	**174.418.000,00**	**(25.582.000,00)**	**87,21%**
1 16 01.05 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	3.294.000,00	0,00	196.706.000,00	200.000.000,00	3.198.000,00	0,00	171.220.000,00	174.418.000,00	(25.582.000,00)	87,21%
1 16 01.05 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**12.360.000,00**	**2.640.000,00**	-	**15.000.000,00**	**12.279.000,00**	**2.493.000,00**	-	**14.772.000,00**	**(228.000,00)**	**98,48%**
1 16 01.05 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12.360.000,00	2.640.000,00	0,00	15.000.000,00	12.279.000,00	2.493.000,00	0,00	14.772.000,00	(228.000,00)	98,48%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.05 22	**Program Stabilisasi Ekonomi Daerah**	**127.373.000,00**	**690.277.000,00**	-	**817.650.000,00**	**105.500.000,00**	**635.651.200,00**	-	**741.151.200,00**	**(76.498.800,00)**	**90,64%**
1 16 01.05 22 04	Kegiatan Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai (DBH-CHT)	59.843.000,00	540.157.000,00	0,00	600.000.000,00	50.500.000,00	517.303.700,00	0,00	567.803.700,00	(32.196.300,00)	94,63%
1 16 01.05 22 05	Kegiatan Penyelenggaraan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	23.482.000,00	36.518.000,00	0,00	60.000.000,00	21.038.000,00	34.335.000,00	0,00	55.373.000,00	(4.627.000,00)	92,29%
1 16 01.05 22 06	Kegiatan Pembinaan BUMD	36.458.000,00	74.642.000,00	0,00	111.100.000,00	27.808.000,00	52.302.500,00	0,00	80.110.500,00	(30.989.500,00)	72,11%
1 16 01.05 22 07	Sosialisasi Kebijakan atau Ketentuan di Bidang LKM	7.590.000,00	38.960.000,00	0,00	46.550.000,00	6.154.000,00	31.710.000,00	0,00	37.864.000,00	(8.686.000,00)	81,34%
1 16 01.05 23	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama**	**168.869.000,00**	**3.096.116.000,00**	-	**3.264.985.000,00**	**162.818.000,00**	**2.703.869.700,00**	-	**2.866.687.700,00**	**(398.297.300,00)**	**87,80%**
1 16 01.05 23 01	Kegiatan Pengiriman Kafilah MTQ	18.894.000,00	332.106.000,00	0,00	351.000.000,00	17.194.000,00	202.819.500,00	0,00	220.013.500,00	(130.986.500,00)	62,68%
1 16 01.05 23 02	Kegiatan Peningkatan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	115.900.000,00	2.570.585.000,00	0,00	2.686.485.000,00	114.034.000,00	2.332.311.200,00	0,00	2.446.345.200,00	(240.139.800,00)	91,06%
1 16 01.05 23 03	Kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Haji	34.075.000,00	193.425.000,00	0,00	227.500.000,00	31.590.000,00	168.739.000,00	0,00	200.329.000,00	(27.171.000,00)	88,06%
1 16 01.06	**Bagian Administrasi Pembangunan**	**825.483.000,00**	**877.950.000,00**	**80.000.000,00**	**1.783.433.000,00**	**797.977.300,00**	**787.551.156,00**	**79.937.820,00**	**1.665.466.276,00**	**(117.966.724,00)**	**93,39%**
1 16 01.06 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**124.806.000,00**	**64.734.000,00**	-	**189.540.000,00**	**124.741.000,00**	**63.915.000,00**	-	**188.656.000,00**	**(884.000,00)**	**99,53%**
1 16 01.06 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.806.000,00	22.734.000,00	0,00	147.540.000,00	124.741.000,00	22.198.000,00	0,00	146.939.000,00	(601.000,00)	99,59%
1 16 01.06 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	41.717.000,00	0,00	41.717.000,00	(283.000,00)	99,33%
1 16 01.06 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**39.992.000,00**	-	**39.992.000,00**	-	**37.127.750,00**	-	**37.127.750,00**	**(2.864.250,00)**	**92,84%**
1 16 01.06 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	(175.000,00)	91,25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 16 01.06 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	20.992.000,00	0,00	20.992.000,00	0,00	18.305.550,00	0,00	18.305.550,00	(2.686.450,00)	87,20%
1 16 01.06 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	16.997.200,00	0,00	16.997.200,00	(2.800,00)	99,98%
1 16 01.06 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	-	-	**79.937.820,00**	**79.937.820,00**	**(62.180,00)**	**99,92%**
1 16 01.06 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	79.937.820,00	79.937.820,00	(62.180,00)	99,92%
1 16 01.06 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**21.950.000,00**	**3.050.000.00**	-	**25.000.000,00**	**21.950.000,00**	**1.869.500,00**	-	**23.819.500,00**	**(1.180.500,00)**	**95,28%**
1 16 01.06 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.950.000,00	3.050.000,00	0,00	25.000.000,00	21.950.000,00	1.869.500,00	0,00	23.819.500,00	(1.180.500,00)	95,28%
1 16 01.06 17	**Program Peningkatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**678.727.000,00**	**770.174.000,00**	-	**1.448.901.000,00**	**651.286.300,00**	**684.638.906,00**	-	**1.335.925.206,00**	**(112.975.794,00)**	**92,20%**
1 16 01.06 17 01	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	67.934.000,00	35.996.000,00	0,00	103.930.000,00	66.214.000,00	28.599.500,00	0,00	94.813.500,00	(9.116.500,00)	91,23%
1 16 01.06 17 02	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	87.448.000,00	223.502.000,00	0,00	310.950.000,00	84.876.000,00	208.169.500,00	0,00	293.045.500,00	(17.904.500,00)	94,24%
1 16 01.06 17 03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	138.427.000,00	138.573.000,00	0,00	277.000.000,00	128.667.000,00	82.557.300,00	0,00	211.224.300,00	(65.775.700,00)	76,25%
1 16 01.06 17 04	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi	89.888.000,00	210.112.000,00	0,00	300.000.000,00	89.887.300,00	204.382.750,00	0,00	294.270.050,00	(5.729.950,00)	98,09%
1 16 01.06 17 05	Kegiatan Operasional ULP	295.030.000,00	161.991.000,00	0,00	457.021.000,00	281.642.000,00	160.929.856,00	0,00	442.571.856,00	(14.449.144,00)	96,84%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 17 01	**Sekretariat DPRD**	**797.892.000,00**	**24.777.878.000,00**	**537.313.000,00**	**26.113.083.000,00**	**625.980.000,00**	**14.817.846.363,00**	**498.846.775,00**	**15.942.673.138,00**	**(10.170.409.862,00)**	**61,05%**
1 17 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**474.866.000,00**	**3.493.984.000,00**	-	**3.968.850.000,00**	**383.899.000,00**	**1.973.204.627,00**	-	**2.357.103.627,00**	**(1.611.746.373,00)**	**59,39%**
1 17 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.866.000,00	201.984.000,00	0,00	676.850.000,00	383.899.000,00	168.658.690,00	0,00	552.557.690,00	(124.292.310,00)	81,64%
1 17 01 01 03	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah DPRD	0,00	3.292.000.000,00	0,00	3.292.000.000,00	0,00	1.804.545.937,00	0,00	1.804.545.937,00	(1.487.454.063,00)	54,82%
1 17 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	**1.000.000,00**	**994.600.000,00**	-	**995.600.000,00**	**1.000.000,00**	**422.127.525,00**	-	**423.127.525,00**	**(572.472.475,00)**	**42,50%**
1 17 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	283.087.000,00	0,00	283.087.000,00	0,00	139.645.300,00	0,00	139.645.300,00	(143.441.700,00)	49,33%
1 17 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	447.450.000,00	0,00	447.450.000,00	0,00	216.145.650,00	0,00	216.145.650,00	(231.304.350,00)	48,31%
1 17 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	1.000.000,00	264.063.000,00	0,00	265.063.000,00	1.000.000,00	66.336.575,00	0,00	67.336.575,00	(197.726.425,00)	25,40%
1 17 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**5.250.000,00**	**323.690.000,00**	**537.313.000,00**	**866.253.000,00**	**4.950.000,00**	**225.978.000,00**	**498.846.775,00**	**729.774.775,00**	**(136.478.225,00)**	**84,24%**
1 17 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	537.313.000,00	537.313.000,00	0,00	0,00	498.846.775,00	498.846.775,00	(38.466.225,00)	92,84%
1 17 01 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.650.000,00	276.290.000,00	0,00	278.940.000,00	2.650.000,00	178.578.000,00	0,00	181.228.000,00	(97.712.000,00)	64,97%
1 17 01 03 07	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan (Review Rencana Pembangunan Gedung DPRD)	2.600.000,00	47.400.000,00	0,00	50.000.000,00	2.300.000,00	47.400.000,00	0,00	49.700.000,00	(300.000,00)	99,40%
1 17 01 04	**Program Pengelolaan Rumah Dinas**	**26.200.000,00**	**365.572.000,00**	-	**391.772.000,00**	**17.410.000,00**	**227.090.850,00**	-	**244.500.850,00**	**(147.271.150,00)**	**62,41%**
1 17 01 04 03	Kegiatan Pengelolaan Rumah Dinas Ketua DPRD	26.200.000,00	365.572.000,00	0,00	391.772.000,00	17.410.000,00	227.090.850,00	0,00	244.500.850,00	(147.271.150,00)	62,41%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 17 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**2.700.000,00**	**8.964.000,00**	-	**11.664.000,00**	**2.700.000,00**	**8.604.000,00**	-	**11.304.000,00**	**(360.000,00)**	**96,91%**
1 17 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.700.000,00	8.964.000,00	0,00	11.664.000,00	2.700.000,00	8.604.000,00	0,00	11.304.000,00	(360.000,00)	96,91%
1 17 01 15	**Program Peningkatan Kapasitas DPRD**	**287.876.000,00**	**19.591.068.000,00**	-	**19.878.944.000,00**	**216.021.000,00**	**11.960.841.361,00**	-	**12.176.862.361,00**	**(7.702.081.639,00)**	**61,26%**
1 17 01 15 01	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	59.364.000,00	5.049.359.000,00	0,00	5.108.723.000,00	56.695.000,00	2.493.812.360,00	0,00	2.550.507.360,00	(2.558.215.640,00)	49,92%
1 17 01 15 02	Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	27.920.000,00	113.370.000,00	0,00	141.290.000,00	25.882.000,00	97.065.100,00	0,00	122.947.100,00	(18.342.900,00)	87,02%
1 17 01 15 03	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	65.594.000,00	919.000.000,00	0,00	984.594.000,00	48.559.000,00	626.931.200,00	0,00	675.490.200,00	(309.103.800,00)	68,61%
1 17 01 15 04	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	44.198.000,00	356.090.000,00	0,00	400.288.000,00	22.610.000,00	186.363.500,00	0,00	208.973.500,00	(191.314.500,00)	52,21%
1 17 01 15 05	Kegiatan Reses	78.800.000,00	1.515.825.000,00	0,00	1.594.625.000,00	51.425.000,00	1.103.292.500,00	0,00	1.154.717.500,00	(439.907.500,00)	72,41%
1 17 01 15 06	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000,00	5.799.476.000,00	0,00	5.802.976.000,00	3.500.000,00	3.742.407.882,00	0,00	3.745.907.882,00	(2.057.068.118,00)	64,55%
1 17 01 15 07	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.500.000,00	4.597.164.000,00	0,00	4.600.664.000,00	3.500.000,00	2.700.420.969,00	0,00	2.703.920.969,00	(1.896.743.031,00)	58,77%
1 17 01 15 08	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	1.300.000,00	1.119.592.000,00	0,00	1.120.892.000,00	1.300.000,00	955.911.250,00	0,00	957.211.250,00	(163.680.750,00)	85,40%
1 17 01 15 09	Kegiatan Fraksi	650.000,00	44.242.000,00	0,00	44.892.000,00	650.000,00	4.557.600,00	0,00	5.207.600,00	(39.684.400,00)	11,60%
1 17 01 15 11	Kegiatan Appraisal tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun	3.050.000,00	76.950.000,00	0,00	80.000.000,00	1.900.000,00	50.079.000,00	0,00	51.979.000,00	(28.021.000,00)	64,97%
1 18 01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**994.199.000,00**	**3.137.923.000,00**	**259.979.000,00**	**4.392.101.000,00**	**883.573.000,00**	**2.780.204.450,00**	**239.995.300,00**	**3.903.772.750,00**	**(488.328.250,00)**	**88,88%**
1 18 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**243.360.000,00**	**160.243.000,00**	-	**403.603.000,00**	**208.192.000,00**	**147.119.250,00**	-	**355.311.250,00**	**(48.291.750,00)**	**88,03%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 18 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.360.000,00	73.185.000,00	0,00	316.545.000,00	208.192.000,00	60.327.250,00	0,00	268.519.250,00	(48.025.750,00)	84,83%
1 18 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	87.058.000,00	0,00	87.058.000,00	0,00	86.792.000,00	0,00	86.792.000,00	(266.000,00)	99,69%
1 18 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	**32.190.000,00**	**156.462.000,00**	-	**188.652.000,00**	**32.179.000,00**	**150.402.850,00**	-	**182.581.850,00**	**(6.070.150,00)**	**96,78%**
1 18 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00	22.235.000,00	0,00	22.235.000,00	(265.000,00)	98,82%
1 18 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	24.352.000,00	0,00	24.352.000,00	0,00	18.952.950,00	0,00	18.952.950,00	(5.399.050,00)	77,83%
1 18 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	0,00	24.405.400,00	0,00	24.405.400,00	(394.600,00)	98,41%
1 18 01 02 05	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Gedung Diklat	32.190.000,00	84.810.000,00	0,00	117.000.000,00	32.179.000,00	84.809.500,00	0,00	116.988.500,00	(11.500,00)	99,99%
1 18 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**163.665.000,00**	**163.665.000,00**	-	-	**158.595.300,00**	**158.595.300,00**	**(5.069.700,00)**	**96,90%**
1 18 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	163.665.000,00	163.665.000,00	0,00	0,00	158.595.300,00	158.595.300,00	(5.069.700,00)	96,90%
1 18 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**23.573.000,00**	**3.927.000,00**	-	**27.500.000,00**	**22.295.000,00**	**2.863.000,00**	-	**25.158.000,00**	**(2.342.000,00)**	**91,48%**
1 18 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.573.000,00	3.927.000,00	0,00	27.500.000,00	22.295.000,00	2.863.000,00	0,00	25.158.000,00	(2.342.000,00)	91,48%
1 18 01 15	**Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian**	**52.460.000,00**	**95.011.000,00**	**96.314.000,00**	**243.785.000,00**	**49.136.000,00**	**65.171.000,00**	**81.400.000,00**	**195.707.000,00**	**(48.078.000,00)**	**80,28%**
1 18 01 15 01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	45.486.000,00	77.875.000,00	0,00	123.361.000,00	42.204.000,00	55.950.000,00	0,00	98.154.000,00	(25.207.000,00)	79,57%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		(Rp)	%
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 18 01 15 02	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK	6.974.000,00	17.136.000,00	96.314.000,00	120.424.000,00	6.932.000,00	9.221.000,00	81.400.000,00	97.553.000,00	(22.871.000,00)	81,01%
1 18 01 16	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**52.216.000,00**	**158.394.000,00**	-	**210.610.000,00**	**41.661.000,00**	**143.511.500,00**	-	**185.172.500,00**	**(25.437.500,00)**	**87,92%**
1 18 01 16 01	Kegiatan Pengadaan CPNS	1.400.000,00	50.080.000,00	0,00	51.480.000,00	1.400.000,00	48.573.500,00	0,00	49.973.500,00	(1.506.500,00)	97,07%
1 18 01 16 02	Kegiatan Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	40.064.000,00	45.396.000,00	0,00	85.460.000,00	29.807.000,00	38.665.000,00	0,00	68.472.000,00	(16.988.000,00)	80,12%
1 18 01 16 03	Kegiatan Ujian Dinas	1.950.000,00	53.050.000,00	0,00	55.000.000,00	1.946.000,00	47.336.000,00	0,00	49.282.000,00	(5.718.000,00)	89,60%
1 18 01 16 04	Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	8.802.000,00	9.868.000,00	0,00	18.670.000,00	8.508.000,00	8.937.000,00	0,00	17.445.000,00	(1.225.000,00)	93,44%
1 18 01 17	**Program Penataan Aparatur**	**372.472.000,00**	**257.742.000,00**	-	**630.214.000,00**	**336.578.000,00**	**250.554.450,00**	-	**587.132.450,00**	**(43.081.550,00)**	**93,16%**
1 18 01 17 01	Kegiatan Penempatan Pegawai	372.472.000,00	257.742.000,00	0,00	630.214.000,00	336.578.000,00	250.554.450,00	0,00	587.132.450,00	(43.081.550,00)	93,16%
1 18 01 18	**Program Fasilitasi Kesejahteraan PNS**	**102.880.000,00**	**106.982.000,00**	-	**209.862.000,00**	**91.394.000,00**	**104.981.250,00**	-	**196.375.250,00**	**(13.486.750,00)**	**93,57%**
1 18 01 18 01	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS	67.156.000,00	54.658.000,00	0,00	121.814.000,00	58.666.000,00	53.508.750,00	0,00	112.174.750,00	(9.639.250,00)	92,09%
1 18 01 18 02	Kegiatan Pemberhentian PNS yang Pensiun	35.724.000,00	52.324.000,00	0,00	88.048.000,00	32.728.000,00	51.472.500,00	0,00	84.200.500,00	(3.847.500,00)	95,63%
1 18 01 19	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur**	**115.048.000,00**	**2.199.162.000,00**	-	**2.314.210.000,00**	**102.138.000,00**	**1.915.601.150,00**	-	**2.017.739.150,00**	**(296.470.850,00)**	**87,19%**
1 18 01 19 01	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III	0,00	65.250.000,00	0,00	65.250.000,00	0,00	65.247.500,00	0,00	65.247.500,00	(2.500,00)	100,00%
1 18 01 19 02	Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	0,00	56.560.000,00	0,00	56.560.000,00	0,00	56.560.000,00	0,00	56.560.000,00	-	100,00%
1 18 01 19 03	Kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional	102.612.000,00	764.088.000,00	0,00	866.700.000,00	92.376.000,00	585.230.150,00	0,00	677.606.150,00	(189.093.850,00)	78,18%
1 18 01 19 06	Kegiatan Assesment Pegawai	0,00	1.250.700.000,00	0,00	1.250.700.000,00	0,00	1.175.550.000,00	0,00	1.175.550.000,00	(75.150.000,00)	93,99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 18 01 19 09	Kegiatan Bintek/Sosialisasi/Worksho p	12.436.000,00	62.564.000,00	0,00	75.000.000,00	9.762.000,00	33.013.500,00	0,00	42.775.500,00	(32.224.500,00)	57,03%
1 19 01	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**	**3.673.818.000,00**	**30.442.741.000,00**	**540.000.000,00**	**34.656.559.000,00**	**3.459.088.000,00**	**17.508.810.724,91**	**536.645.425,00**	**21.504.544.149,91**	**(13.152.014.850,09)**	**62,05%**
1 19 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.565.420.000,00**	**23.211.580.000,00**	-	**24.777.000.000,00**	**1.472.870.000,00**	**12.304.182.970,48**	-	**13.777.052.970,48**	**(10.999.947.029,52)**	**55,60%**
1 19 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.565.420.000,00	22.761.580.000,00	0,00	24.327.000.000,00	1.472.870.000,00	11.994.292.638,48	0,00	13.467.162.638,48	(10.859.837.361,52)	55,36%
1 19 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	309.890.332,00	0,00	309.890.332,00	(140.109.668,00)	68,86%
1 19 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**250.000.000,00**	-	**250.000.000,00**	-	**220.798.446,00**	-	**220.798.446,00**	**(29.201.554,00)**	**88,32%**
1 19 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	121.492.218,00	0,00	121.492.218,00	(3.507.782,00)	97,19%
1 19 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	29.312.228,00	0,00	29.312.228,00	(25.687.772,00)	53,29%
1 19 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	69.994.000,00	0,00	69.994.000,00	(6.000,00)	99,99%
1 19 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**340.000.000,00**	**340.000.000,00**	-	-	**336.878.000,00**	**336.878.000,00**	**(3.122.000,00)**	**99,08%**
1 19 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	336.878.000,00	336.878.000,00	(3.122.000,00)	99,08%
1 19 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**42.007.000,00**	**3.100.000,00**	-	**45.107.000,00**	**41.394.000,00**	**3.100.000,00**	-	**44.494.000,00**	**(613.000,00)**	**98,64%**
1 19 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.007.000,00	3.100.000,00	0,00	45.107.000,00	41.394.000,00	3.100.000,00	0,00	44.494.000,00	(613.000,00)	98,64%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 19 01 15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.301.816.000,00**	**1.896.268.000,00**	-	**3.198.084.000,00**	**1.216.219.000,00**	**1.538.972.750,00**	-	**2.755.191.750,00**	**(442.892.250,00)**	**86,15%**
1 19 01 15 01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	22.900.000,00	77.100.000,00	0,00	100.000.000,00	22.900.000,00	68.350.000,00	0,00	91.250.000,00	(8.750.000,00)	91,25%
1 19 01 15 02	Penyusunan DPA dan DPPA	116.836.000,00	48.672.000,00	0,00	165.508.000,00	66.030.000,00	36.041.000,00	0,00	102.071.000,00	(63.437.000,00)	61,67%
1 19 01 15 03	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	180.208.000,00	195.417.000,00	0,00	375.625.000,00	180.078.000,00	140.011.050,00	0,00	320.089.050,00	(55.535.950,00)	85,22%
1 19 01 15 04	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	114.600.000,00	78.322.000,00	0,00	192.922.000,00	111.744.000,00	76.337.000,00	0,00	188.081.000,00	(4.841.000,00)	97,49%
1 19 01 15 05	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	172.568.000,00	211.727.000,00	0,00	384.295.000,00	171.433.000,00	166.541.300,00	0,00	337.974.300,00	(46.320.700,00)	87,95%
1 19 01 15 06	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	13.066.000,00	52.673.000,00	0,00	65.739.000,00	12.404.000,00	52.602.800,00	0,00	65.006.800,00	(732.200,00)	98,89%
1 19 01 15 07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	33.152.000,00	23.324.000,00	0,00	56.476.000,00	33.054.000,00	22.483.500,00	0,00	55.537.500,00	(938.500,00)	98,34%
1 19 01 15 08	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	74.976.000,00	43.674.000,00	0,00	118.650.000,00	73.156.000,00	42.014.000,00	0,00	115.170.000,00	(3.480.000,00)	97,07%
1 19 01 15 09	Pendampingan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	60.120.000,00	89.880.000,00	0,00	150.000.000,00	60.084.000,00	78.184.000,00	0,00	138.268.000,00	(11.732.000,00)	92,18%
1 19 01 15 10	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah	56.750.000,00	203.250.000,00	0,00	260.000.000,00	68.600.000,00	188.289.500,00	0,00	256.889.500,00	(3.110.500,00)	98,80%
1 19 01 15 12	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	39.030.000,00	110.970.000,00	0,00	150.000.000,00	37.866.000,00	22.445.000,00	0,00	60.311.000,00	(89.689.000,00)	40,21%
1 19 01 15 13	Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran	35.500.000,00	74.500.000,00	0,00	110.000.000,00	23.500.000,00	41.454.200,00	0,00	64.954.200,00	(45.045.800,00)	59,05%
1 19 01 15 14	Penyusunan LKPD Kota Madiun	129.040.000,00	87.402.000,00	0,00	216.442.000,00	122.568.000,00	87.319.000,00	0,00	209.887.000,00	(6.555.000,00)	96,97%
1 19 01 15 16	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	108.136.000,00	354.324.000,00	0,00	462.460.000,00	111.252.000,00	351.174.000,00	0,00	462.426.000,00	(34.000,00)	99,99%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 19 01 15 17	Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD	54.884.000,00	34.827.000,00	0,00	89.711.000,00	54.700.000,00	33.297.000,00	0,00	87.997.000,00	(1.714.000,00)	98,09%
1 19 01 15 19	Kegiatan Perumusan dan Sosialisasi Tambahan Penghasilan ASN	90.050.000,00	210.206.000,00	0,00	300.256.000,00	66.850.000,00	132.429.400,00	0,00	199.279.400,00	(100.976.600,00)	66,37%
1 19 01 16	**Program Peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah**	**288.587.000,00**	**141.719.000,00**	-	**430.306.000,00**	**281.303.000,00**	**139.949.000,00**	-	**421.252.000,00**	**(9.054.000,00)**	**97,90%**
1 19 01 16 01	Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	104.236.000,00	25.764.000,00	0,00	130.000.000,00	103.184.000,00	25.764.000,00	0,00	128.948.000,00	(1.052.000,00)	99,19%
1 19 01 16 02	Pengelolaan Administrasi Gaji	75.799.000,00	43.201.000,00	0,00	119.000.000,00	75.795.000,00	43.201.000,00	0,00	118.996.000,00	(4.000,00)	100,00%
1 19 01 16 03	Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun	44.294.000,00	9.970.000,00	0,00	54.264.000,00	38.618.000,00	8.380.000,00	0,00	46.998.000,00	(7.266.000,00)	86,61%
1 19 01 16 04	Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan	32.080.000,00	51.920.000,00	0,00	84.000.000,00	32.078.000,00	51.740.000,00	0,00	83.818.000,00	(182.000,00)	99,78%
1 19 01 16 05	Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat	32.178.000,00	10.864.000,00	0,00	43.042.000,00	31.628.000,00	10.864.000,00	0,00	42.492.000,00	(550.000,00)	98,72%
1 19 01 17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**	**475.988.000,00**	**4.940.074.000,00**	**200.000.000,00**	**5.616.062.000,00**	**447.302.000,00**	**3.301.807.558,43**	**199.767.425,00**	**3.948.876.983,43**	**(1.667.185.016,57)**	**70,31%**
1 19 01 17 01	Penghapusan Aset Daerah	66.520.000,00	72.640.000,00	0,00	139.160.000,00	63.856.000,00	39.269.000,00	0,00	103.125.000,00	(36.035.000,00)	74,11%
1 19 01 17 02	Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun	57.406.000,00	57.594.000,00	0,00	115.000.000,00	57.022.000,00	27.479.843,00	0,00	84.501.843,00	(30.498.157,00)	73,48%
1 19 01 17 03	Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun	15.100.000,00	3.930.302.000,00	0,00	3.945.402.000,00	15.100.000,00	2.562.093.928,43	0,00	2.577.193.928,43	(1.368.208.071,57)	65,32%
1 19 01 17 04	Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun	10.930.000,00	99.070.000,00	0,00	110.000.000,00	10.930.000,00	89.770.000,00	0,00	100.700.000,00	(9.300.000,00)	91,55%
1 19 01 17 05	Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	57.250.000,00	92.750.000,00	0,00	150.000.000,00	57.226.000,00	90.349.000,00	0,00	147.575.000,00	(2.425.000,00)	98,38%
1 19 01 17 06	Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah	21.314.000,00	8.686.000,00	0,00	30.000.000,00	20.600.000,00	7.760.950,00	0,00	28.360.950,00	(1.639.050,00)	94,54%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 19 01 17 07	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	12.350.000,00	7.650.000,00	0,00	20.000.000,00	11.050.000,00	6.600.000,00	0,00	17.650.000,00	(2.350.000,00)	88,25%
1 19 01 17 08	Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	1.650.000,00	84.950.000,00	0,00	86.600.000,00	1.650.000,00	83.278.655,00	0,00	84.928.655,00	(1.671.345,00)	98,07%
1 19 01 17 09	Pemeliharaan aplikasi persediaan	1.050.000,00	38.950.000,00	0,00	40.000.000,00	1.050.000,00	38.450.000,00	0,00	39.500.000,00	(500.000,00)	98,75%
1 19 01 17 10	Kegiatan Pendampingan Penatausahaan aset daerah	74.256.000,00	132.744.000,00	0,00	207.000.000,00	41.804.000,00	50.240.896,00	0,00	92.044.896,00	(114.955.104,00)	44,47%
1 19 01 17 11	Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD	36.758.000,00	38.242.000,00	0,00	75.000.000,00	36.724.000,00	38.242.000,00	0,00	74.966.000,00	(34.000,00)	99,95%
1 19 01 17 12	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	40.678.000,00	254.322.000,00	0,00	295.000.000,00	53.078.000,00	153.648.536,00	0,00	206.726.536,00	(88.273.464,00)	70,08%
1 19 01 17 13	Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG)	33.830.000,00	1.170.000,00	200.000.000,00	235.000.000,00	33.754.000,00	1.170.000,00	-	34.924.000,00	(200.076.000,00)	14,86%
1 19 01 17 14	Bintek pengelolaan barang milik daerah	46.896.000,00	121.004.000,00	0,00	167.900.000,00	43.458.000,00	113.454.750,00	199.767.425,00	356.680.175,00	188.780.175,00	212,44%
1 19 03	**Badan Pendapatan Daerah**	**1.106.104.000,00**	**1.415.100.000,00**	**195.000.000,00**	**2.716.204.000,00**	**847.633.000,00**	**1.229.036.550,00**	**182.492.700,00**	**2.259.162.250,00**	**(457.041.750,00)**	**83,17%**
1 19 03 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**230.654.000,00**	**270.774.000,00**	-	**501.428.000,00**	**204.737.000,00**	**210.811.750,00**	-	**415.548.750,00**	**(85.879.250,00)**	**82,87%**
1 19 03 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.654.000,00	182.309.000,00	0,00	412.963.000,00	204.737.000,00	174.244.892,00		378.981.892,00	(33.981.108,00)	91,77%
1 19 03 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	88.465.000,00	0,00	88.465.000,00		36.566.858,00		36.566.858,00	(51.898.142,00)	41,33%
1 19 03 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**100.840.000,00**	-	**100.840.000,00**	-	**75.414.350,00**	-	**75.414.350,00**	**(25.425.650,00)**	**74,79%**
1 19 03 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	8.063.000,00	0,00	8.063.000,00		7.250.000,00		7.250.000,00	(813.000,00)	89,92%
1 19 03 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	55.625.000,00	0,00	55.625.000,00		31.018.350,00		31.018.350,00	(24.606.650,00)	55,76%
1 19 03 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	37.152.000,00	0,00	37.152.000,00		37.146.000,00		37.146.000,00	(6.000,00)	99,98%
1 19 03 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**195.000.000,00**	**195.000.000,00**	-	-	**182.492.700,00**	**182.492.700,00**	**(12.507.300,00)**	**93,59%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 19 03 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00			182.492.700,00	182.492.700,00	(12.507.300,00)	93,59%
1 19 03 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**15.145.000,00**	**2.355.000,00**	-	**17.500.000,00**	**15.099.000,00**	**2.264.100,00**	-	**17.363.100,00**	**(136.900,00)**	**99,22%**
1 19 03 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.145.000,00	2.355.000,00	0,00	17.500.000,00	15.099.000,00	2.264.100,00		17.363.100,00	(136.900,00)	99,22%
1 19 03 18	**Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah**	**58.194.000,00**	**113.578.000,00**	-	**171.772.000,00**	**58.034.000,00**	**109.796.300,00**	-	**167.830.300,00**	**(3.941.700,00)**	97,71%
1 19 03 18 01	Kegiatan Pemeliharaan Basis data PBB	21.140.000,00	19.824.000,00	0,00	40.964.000,00	20.980.000,00	19.224.000,00		40.204.000,00	(760.000,00)	98,14%
1 19 03 18 02	Kegiatan Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak Daerah	30.584.000,00	25.224.000,00	0,00	55.808.000,00	30.584.000,00	24.574.000,00		55.158.000,00	(650.000,00)	98,84%
1 19 03 18 03	Kegiatan Pemeliharaan Frame Reklame	6.470.000,00	68.530.000,00	0,00	75.000.000,00	6.470.000,00	65.998.300,00		72.468.300,00	(2.531.700,00)	96,62%
1 19 03 19	**Program Peningkatan Pelayanan dan Manajemen pengelolaan Pajak Daerah**	**802.111.000,00**	**927.553.000,00**	-	**1.729.664.000,00**	**569.763.000,00**	**830.750.050,00**	-	**1.400.513.050,00**	**(329.150.950,00)**	80,97%
1 19 03 19 01	Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	392.161.000,00	215.090.000,00	0,00	607.251.000,00	169.092.000,00	194.550.000,00		363.642.000,00	(243.609.000,00)	59,88%
1 19 03 19 02	Kegiatan Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	35.958.000,00	247.491.000,00	0,00	283.449.000,00	35.746.000,00	196.942.700,00		232.688.700,00	(50.760.300,00)	82,09%
1 19 03 19 03	Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	32.763.000,00	257.781.000,00	0,00	290.544.000,00	32.722.000,00	244.846.200,00		277.568.200,00	(12.975.800,00)	95,53%
1 19 03 19 04	Kegiatan Cetak Massal dan Penyampaian SPPT	91.862.000,00	41.558.000,00	0,00	133.420.000,00	90.958.000,00	41.040.450,00		131.998.450,00	(1.421.550,00)	98,93%
1 19 03 19 05	Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	159.980.000,00	45.020.000,00	0,00	205.000.000,00	157.930.000,00	44.400.900,00		202.330.900,00	(2.669.100,00)	98,70%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 19 03 19 06	Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perpajakan Terpadu	8.839.000,00	116.161.000,00	0,00	125.000.000,00	6.589.000,00	106.160.800,00		112.749.800,00	(12.250.200,00)	90,20%
1 19 03 19 07	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	80.548.000,00	4.452.000,00	0,00	85.000.000,00	76.726.000,00	2.809.000,00		79.535.000,00	(5.465.000,00)	93,57%
1 20 01	**Inspektorat Daerah**	**1.555.578.000,00**	**1.116.867.000,00**	**86.950.000,00**	**2.759.395.000,00**	**1.456.754.700,00**	**1.003.831.541,00**	**85.520.000,00**	**2.546.106.241,00**	**(213.288.759,00)**	**92,27%**
1 20 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**121.234.000,00**	**144.316.000,00**	-	**265.550.000,00**	**121.207.700,00**	**137.514.100,00**	-	**258.721.800,00**	**(6.828.200,00)**	**97,43%**
1 20 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.234.000,00	32.616.000,00	0,00	153.850.000,00	121.207.700,00	25.814.100,00	0,00	147.021.800,00	(6.828.200,00)	95,56%
1 20 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	111.700.000,00	0,00	111.700.000,00	0,00	111.700.000,00	0,00	111.700.000,00	-	100,00%
1 20 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**56.892.000,00**	-	**56.892.000,00**	-	**54.854.541,00**	-	**54.854.541,00**	**(2.037.459,00)**	**96,42%**
1 20 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-	100,00%
1 20 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	24.892.000,00	0,00	24.892.000,00	0,00	22.854.541,00	0,00	22.854.541,00	(2.037.459,00)	91,81%
1 20 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-	100,00%
1 20 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**86.950.000,00**	**86.950.000,00**	-	-	**85.520.000,00**	**85.520.000,00**	**(1.430.000,00)**	**98,36%**
1 20 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	86.950.000,00	86.950.000,00	0,00	0,00	85.520.000,00	85.520.000,00	(1.430.000,00)	98,36%
1 20 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**18.628.000,00**	**1.372.000,00**	-	**20.000.000,00**	**18.568.000,00**	**1.372.000,00**	-	**19.940.000,00**	**(60.000,00)**	**99,70%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 20 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.628.000,00	1.372.000,00	0,00	20.000.000,00	18.568.000,00	1.372.000,00	0,00	19.940.000,00	(60.000,00)	99,70%
1 20 01 15	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**	**612.210.000,00**	**208.358.000,00**	-	**820.568.000,00**	**555.266.000,00**	**170.833.200,00**	-	**726.099.200,00**	**(94.468.800,00)**	**88,49%**
1 20 01 15 01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	326.000.000,00	180.518.000,00	0,00	506.518.000,00	302.000.000,00	149.641.100,00	0,00	451.641.100,00	(54.876.900,00)	89,17%
1 20 01 15 02	Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	132.900.000,00	14.100.000,00	0,00	147.000.000,00	109.068.000,00	7.701.550,00	0,00	116.769.550,00	(30.230.450,00)	79,44%
1 20 01 15 03	Kegiatan Reviu Atas Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	118.338.000,00	10.362.000,00	0,00	128.700.000,00	113.938.000,00	10.172.000,00	0,00	124.110.000,00	(4.590.000,00)	96,43%
1 20 01 15 04	Kegiatan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa	34.972.000,00	3.378.000,00	0,00	38.350.000,00	30.260.000,00	3.318.550,00	0,00	33.578.550,00	(4.771.450,00)	87,56%
1 20 01 16	**Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**53.010.000,00**	**431.705.000,00**	-	**484.715.000,00**	**46.258.000,00**	**400.099.350,00**	-	**446.357.350,00**	**(38.357.650,00)**	**92,09%**
1 20 01 16 01	Mengikuti Pelatihan Teknis Seminar, Workshop, Bimtek dan Raker	2.250.000,00	160.270.000,00	0,00	162.520.000,00	2.250.000,00	160.261.000,00	0,00	162.511.000,00	(9.000,00)	99,99%
1 20 01 16 02	Kegiatan Bimtek Peningkatan SDM Aparatur Pengawasan	27.526.000,00	135.399.000,00	0,00	162.925.000,00	23.474.000,00	126.483.350,00	0,00	149.957.350,00	(12.967.650,00)	92,04%
1 20 01 16 03	Kegiatan Pembinaan Kepatuhan terhadap Peraturan	23.234.000,00	136.036.000,00	0,00	159.270.000,00	20.534.000,00	113.355.000,00	0,00	133.889.000,00	(25.381.000,00)	84,06%
1 20 01 17	**Program Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan**	**311.454.000,00**	**58.886.000,00**	-	**370.340.000,00**	**301.880.000,00**	**54.209.300,00**	-	**356.089.300,00**	**(14.250.700,00)**	**96,15%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 20 01 17 01	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	28.920.000,00	1.080.000,00	0,00	30.000.000,00	28.892.000,00	1.080.000,00	0,00	29.972.000,00	(28.000,00)	99,91%
1 20 01 17 02	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	98.314.000,00	15.626.000,00	0,00	113.940.000,00	96.792.000,00	14.245.700,00	0,00	111.037.700,00	(2.902.300,00)	97,45%
1 20 01 17 03	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	73.280.000,00	10.520.000,00	0,00	83.800.000,00	72.109.000,00	8.483.300,00	0,00	80.592.300,00	(3.207.700,00)	96,17%
1 20 01 17 04	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	38.540.000,00	27.460.000,00	0,00	66.000.000,00	38.237.000,00	26.681.400,00	0,00	64.918.400,00	(1.081.600,00)	98,36%
1 20 01 17 05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	72.400.000,00	4.200.000,00	0,00	76.600.000,00	65.850.000,00	3.718.900,00	0,00	69.568.900,00	(7.031.100,00)	90,82%
1 20 01 18	**Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**	**439.042.000,00**	**215.338.000,00**	-	**654.380.000,00**	**413.575.000,00**	**184.949.050,00**	-	**598.524.050,00**	**(55.855.950,00)**	**91,46%**
1 20 01 18 01	Kegiatan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	32.900.000,00	3.074.000,00	0,00	35.974.000,00	32.700.000,00	2.474.000,00	0,00	35.174.000,00	(800.000,00)	97,78%
1 20 01 18 02	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	48.862.000,00	24.038.000,00	0,00	72.900.000,00	37.461.000,00	8.934.800,00	0,00	46.395.800,00	(26.504.200,00)	63,64%
1 20 01 18 03	Kegiatan Verifikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	49.450.000,00	3.850.000,00	0,00	53.300.000,00	44.639.000,00	2.524.000,00	0,00	47.163.000,00	(6.137.000,00)	88,49%
1 20 01 18 04	Kegiatan Evaluasi Sakip PD	68.610.000,00	40.924.000,00	0,00	109.534.000,00	67.200.000,00	36.690.400,00	0,00	103.890.400,00	(5.643.600,00)	94,85%
1 20 01 18 05	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kota Madiun	24.480.000,00	9.330.000,00	0,00	33.810.000,00	23.257.000,00	8.024.750,00	0,00	31.281.750,00	(2.528.250,00)	92,52%
1 20 01 18 06	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	32.192.000,00	13.384.000,00	0,00	45.576.000,00	27.900.000,00	11.588.000,00	0,00	39.488.000,00	(6.088.000,00)	86,64%
1 20 01 18 07	Kegiatan Pengendalian Gratifikasi	182.548.000,00	120.738.000,00	0,00	303.286.000,00	180.418.000,00	114.713.100,00	0,00	295.131.100,00	(8.154.900,00)	97,31%
1 21 01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**2.269.993.000,00**	**1.925.772.000,00**	**773.800.000,00**	**4.969.565.000,00**	**2.029.076.000,00**	**1.411.938.675,00**	**734.493.388,00**	**4.175.508.063,00**	**(794.056.937,00)**	**84,02%**
1 21 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**184.107.000,00**	**188.750.000,00**	-	**372.857.000,00**	**171.672.000,00**	**186.142.425,00**	-	**357.814.425,00**	**(15.042.575,00)**	**95,97%**
1 21 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.107.000,00	63.800.000,00	0,00	247.907.000,00	171.672.000,00	63.546.775,00	0,00	235.218.775,00	(12.688.225,00)	94,88%
1 21 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	124.950.000,00	0,00	124.950.000,00	0,00	122.595.650,00	0,00	122.595.650,00	(2.354.350,00)	98,12%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 21 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**108.000.000,00**	-	**108.000.000,00**	-	**55.566.700,00**	-	**55.566.700,00**	**(52.433.300,00)**	**51,45%**
1 21 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	9.344.400,00	0,00	9.344.400,00	(3.655.600,00)	71,88%
1 21 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	21.887.300,00	0,00	21.887.300,00	(13.112.700,00)	62,54%
1 21 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	24.335.000,00	0,00	24.335.000,00	(35.665.000,00)	40,56%
1 21 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**198.800.000,00**	**198.800.000,00**	-	-	**194.171.788,00**	**194.171.788,00**	**(4.628.212,00)**	**97,67%**
1 21 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	198.800.000,00	198.800.000,00	0,00	0,00	194.171.788,00	194.171.788,00	(4.628.212,00)	97,67%
1 21 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**30.280.000,00**	**7.402.000,00**	-	**37.682.000,00**	**29.770.000,00**	**7.401.350,00**	-	**37.171.350,00**	**(510.650,00)**	**98,64%**
1 21 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.280.000,00	7.402.000,00	0,00	37.682.000,00	29.770.000,00	7.401.350,00	0,00	37.171.350,00	(510.650,00)	98,64%
1 21 01 15	**Program Pengembangan Kajian dan Penelitian**	**225.695.000,00**	**61.580.000,00**	**400.000.000,00**	**687.275.000,00**	**190.082.000,00**	**52.991.300,00**	**371.818.600,00**	**614.891.900,00**	**(72.383.100,00)**	**89,47%**
1 21 01 15 01	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Eksosbud dan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	190.727.000,00	190.727.000,00	(9.273.000,00)	95,36%
1 21 01 15 02	Kegiatan Penyusunan Kajian/Penelitian Bidang Fisik dan Prasarana	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	181.091.600,00	181.091.600,00	(18.908.400,00)	90,55%
1 21 01 15 03	Kegiatan Penyusunan Data dan Potensi Kota Madiun	95.480.000,00	4.520.000,00	0,00	100.000.000,00	67.532.000,00	4.490.000,00	0,00	72.022.000,00	(27.978.000,00)	72,02%
1 21 01 15 04	Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	101.800.000,00	27.200.000,00	0,00	129.000.000,00	97.538.000,00	19.621.000,00	0,00	117.159.000,00	(11.841.000,00)	90,82%
1 21 01 15 05	Kegiatan Koordinasi Bidang Kelitbangan	28.415.000,00	29.860.000,00	0,00	58.275.000,00	25.012.000,00	28.880.300,00	0,00	53.892.300,00	(4.382.700,00)	92,48%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 21 01 16	**Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya**	**273.660.000,00**	**214.300.000,00**	-	**487.960.000,00**	**251.092.000,00**	**199.774.000,00**	-	**450.866.000,00**	**(37.094.000,00)**	**92,40%**
1 21 01 16 01	Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	69.900.000,00	65.360.000,00	0,00	135.260.000,00	52.150.000,00	61.174.400,00	0,00	113.324.400,00	(21.935.600,00)	83,78%
1 21 01 16 02	Kegiatan Penyelenggaraan Portal TKPK	33.352.000,00	22.008.000,00	0,00	55.360.000,00	33.344.000,00	22.000.000,00	0,00	55.344.000,00	(16.000,00)	99,97%
1 21 01 16 03	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	84.264.000,00	28.876.000,00	0,00	113.140.000,00	84.252.000,00	26.282.500,00	0,00	110.534.500,00	(2.605.500,00)	97,70%
1 21 01 16 04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	1.700.000,00	76.300.000,00	0,00	78.000.000,00	1.700.000,00	71.966.100,00	0,00	73.666.100,00	(4.333.900,00)	94,44%
1 21 01 16 06	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	84.444.000,00	21.756.000,00	0,00	106.200.000,00	79.646.000,00	18.351.000,00	0,00	97.997.000,00	(8.203.000,00)	92,28%
1 21 01 17	**Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**	**198.100.000,00**	**49.810.000,00**	-	**247.910.000,00**	**192.579.000,00**	**40.020.500,00**	-	**232.599.500,00**	**(15.310.500,00)**	**93,82%**
1 21 01 17 02	Penyusunan Ekonomi Dalam Angka	63.310.000,00	11.690.000,00	0,00	75.000.000,00	63.306.000,00	10.290.000,00	0,00	73.596.000,00	(1.404.000,00)	98,13%
1 21 01 17 03	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility	52.770.000,00	27.590.000,00	0,00	80.360.000,00	47.254.000,00	19.415.000,00	0,00	66.669.000,00	(13.691.000,00)	82,96%
1 21 01 17 04	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SDGs (Sustainable Development Goals)	82.020.000,00	10.530.000,00	0,00	92.550.000,00	82.019.000,00	10.315.500,00	0,00	92.334.500,00	(215.500,00)	99,77%
1 21 01 18	**Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah**	**272.314.000,00**	**191.091.000,00**	-	**463.405.000,00**	**261.258.000,00**	**144.639.350,00**	-	**405.897.350,00**	**(57.507.650,00)**	**87,59%**
1 21 01 18 01	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	63.060.000,00	73.240.000,00	0,00	136.300.000,00	58.060.000,00	63.327.700,00	0,00	121.387.700,00	(14.912.300,00)	89,06%
1 21 01 18 02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	40.850.000,00	37.755.000,00	0,00	78.605.000,00	40.494.000,00	23.993.200,00	0,00	64.487.200,00	(14.117.800,00)	82,04%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 21 01 18 03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	58.772.000,00	42.428.000,00	0,00	101.200.000,00	53.172.000,00	34.025.400,00	0,00	87.197.400,00	(14.002.600,00)	86,16%
1 21 01 18 05	Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	86.780.000,00	5.520.000,00	0,00	92.300.000,00	86.730.000,00	5.520.000,00	0,00	92.250.000,00	(50.000,00)	99,95%
1 21 01 18 06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	22.852.000,00	32.148.000,00	0,00	55.000.000,00	22.802.000,00	17.773.050,00	0,00	40.575.050,00	(14.424.950,00)	73,77%
1 21 01 19	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**1.085.837.000,00**	**1.104.839.000,00**	**175.000.000,00**	**2.365.676.000,00**	**932.623.000,00**	**725.403.050,00**	**168.503.000,00**	**1.826.529.050,00**	**(539.146.950,00)**	**77,21%**
1 21 01 19 01	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	225.782.000,00	108.068.000,00	0,00	333.850.000,00	211.017.000,00	57.617.050,00	0,00	268.634.050,00	(65.215.950,00)	80,47%
1 21 01 19 02	Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang	59.450.000,00	328.834.000,00	0,00	388.284.000,00	58.639.000,00	319.907.600,00	0,00	378.546.600,00	(9.737.400,00)	97,49%
1 21 01 19 03	Penyusunan KUA dan PPAS	140.136.000,00	85.030.000,00	0,00	225.166.000,00	131.759.000,00	33.884.400,00	0,00	165.643.400,00	(59.522.600,00)	73,57%
1 21 01 19 04	Kegiatan Bimtek/Workshop Fasilitasi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	93.229.000,00	194.086.000,00	0,00	287.315.000,00	68.490.000,00	129.773.200,00	0,00	198.263.200,00	(89.051.800,00)	69,01%
1 21 01 19 05	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	131.690.000,00	36.680.000,00	0,00	168.370.000,00	109.998.000,00	19.391.300,00	0,00	129.389.300,00	(38.980.700,00)	76,85%
1 21 01 19 06	Verifikasi Pra RKA dan Pra RKPA	108.288.000,00	39.861.000,00	0,00	148.149.000,00	60.148.000,00	7.905.200,00	0,00	68.053.200,00	(80.095.800,00)	45,94%
1 21 01 19 07	Penyusunan KUA-P dan PPAS-P	130.588.000,00	85.474.000,00	0,00	216.062.000,00	122.625.000,00	35.293.750,00	0,00	157.918.750,00	(58.143.250,00)	73,09%
1 21 01 19 08	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran	84.550.000,00	100.284.000,00	0,00	184.834.000,00	69.200.000,00	19.265.250,00	0,00	88.465.250,00	(96.368.750,00)	47,86%
1 21 01 19 09	Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	1.400.000,00	89.722.000,00	0,00	91.122.000,00	-	82.183.100,00	0,00	82.183.100,00	(8.938.900,00)	90,19%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 21 01 19 10	Kegiatan Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD	110.724.000,00	36.800.000,00	0,00	147.524.000,00	100.747.000,00	20.182.200,00	0,00	120.929.200,00	(26.594.800,00)	81,97%
1 21 01 19 11	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIPP)	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	168.503.000,00	168.503.000,00	(6.497.000,00)	96,29%
1 22 01	**Kecamatan Kartoharjo**	**825.635.000,00**	**4.433.774.000,00**	**1.133.750.000,00**	**6.393.159.000,00**	**792.072.000,00**	**4.063.207.754,00**	**1.083.181.300,00**	**5.938.461.054,00**	**(454.697.946,00)**	**92,89%**
1 22 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**475.778.000,00**	**443.171.000,00**	-	**918.949.000,00**	**451.078.000,00**	**340.522.956,00**	-	**791.600.956,00**	**(127.348.044,00)**	**86,14%**
1 22 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	475.778.000,00	269.120.000,00	0,00	744.898.000,00	451.078.000,00	222.198.866,00	0,00	673.276.866,00	(71.621.134,00)	90,39%
1 22 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	174.051.000,00	0,00	174.051.000,00	0,00	118.324.090,00	0,00	118.324.090,00	(55.726.910,00)	67,98%
1 22 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**84.522.000,00**	-	**84.522.000,00**	-	**77.506.550,00**	-	**77.506.550,00**	**(7.015.450,00)**	**91,70%**
1 22 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-	100,00%
1 22 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	32.682.000,00	0,00	32.682.000,00	0,00	27.106.550,00	0,00	27.106.550,00	(5.575.450,00)	82,94%
1 22 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00	30.400.000,00	(1.440.000,00)	95,48%
1 22 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**1.133.750.000,00**	**1.133.750.000,00**	-	-	**1.083.181.300,00**	**1.083.181.300,00**	**(50.568.700,00)**	**95,54%**
1 22 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	777.000.000,00	777.000.000,00	0,00	0,00	730.414.500,00	730.414.500,00	(46.585.500,00)	94,00%
1 22 01 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	0,00	0,00	356.750.000,00	356.750.000,00	0,00	0,00	352.766.800,00	352.766.800,00	(3.983.200,00)	98,88%
1 22 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**80.482.000,00**	**52.018.000,00**	-	**132.500.000,00**	**77.568.000,00**	**51.918.000,00**	-	**129.486.000,00**	**(3.014.000,00)**	**97,73%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.830.000,00	5.670.000,00	0,00	32.500.000,00	26.830.000,00	5.670.000,00	0,00	32.500.000,00	-	100,00%
1 22 01 05 03	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	33.693.000,00	36.307.000,00	0,00	70.000.000,00	30.779.000,00	36.207.000,00	0,00	66.986.000,00	(3.014.000,00)	95,69%
1 22 01 05 04	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	19.959.000,00	10.041.000,00	0,00	30.000.000,00	19.959.000,00	10.041.000,00	0,00	30.000.000,00	-	100,00%
1 22 01 15	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban**	**55.950.000,00**	**209.050.000,00**	-	**265.000.000,00**	**53.800.000,00**	**199.200.000,00**	-	**253.000.000,00**	**(12.000.000,00)**	**95,47%**
1 22 01 15 01	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	55.950.000,00	209.050.000,00	0,00	265.000.000,00	53.800.000,00	199.200.000,00	0,00	253.000.000,00	(12.000.000,00)	95,47%
1 22 01 16	**Program Penyelenggaraan Kelurahan**	**148.834.000,00**	**3.239.604.000,00**	-	**3.388.438.000,00**	**146.285.000,00**	**3.012.026.448,00**	-	**3.158.311.448,00**	**(230.126.552,00)**	**93,21%**
1 22 01 16 01	Penyelenggaraan Kelurahan Kartoharjo	20.190.000,00	351.643.000,00	0,00	371.833.000,00	20.180.000,00	339.543.793,00	0,00	359.723.793,00	(12.109.207,00)	96,74%
1 22 01 16 02	Penyelenggaraan Kelurahan Klegen	30.623.000,00	394.664.000,00	0,00	425.287.000,00	30.491.000,00	349.442.885,00	0,00	379.933.885,00	(45.353.115,00)	89,34%
1 22 01 16 03	Penyelenggaraan Kelurahan kanigoro	10.348.000,00	461.797.000,00	0,00	472.145.000,00	10.348.000,00	450.431.437,00	0,00	460.779.437,00	(11.365.563,00)	97,59%
1 22 01 16 04	Penyelenggaraan Kelurahan Oro-oro Ombo	16.084.000,00	394.457.000,00	0,00	410.541.000,00	13.796.000,00	355.130.749,00	0,00	368.926.749,00	(41.614.251,00)	89,86%
1 22 01 16 05	Penyelenggaraan Kelurahan Rejomulyo	15.866.000,00	408.266.000,00	0,00	424.132.000,00	15.845.000,00	397.222.778,00	0,00	413.067.778,00	(11.064.222,00)	97,39%
1 22 01 16 06	Penyelenggaraan Kelurahan Pilang Bango	13.228.000,00	337.977.000,00	0,00	351.205.000,00	13.228.000,00	316.630.992,00	0,00	329.858.992,00	(21.346.008,00)	93,92%
1 22 01 16 07	Penyelenggaraan Kelurahan Sukosari	4.240.000,00	270.986.000,00	0,00	275.226.000,00	4.236.000,00	224.692.653,00	0,00	228.928.653,00	(46.297.347,00)	83,18%
1 22 01 16 08	Penyelenggaraan Kelurahan Kelun	20.094.000,00	335.513.000,00	0,00	355.607.000,00	20.094.000,00	310.029.058,00	0,00	330.123.058,00	(25.483.942,00)	92,83%
1 22 01 16 09	Penyelenggaraan Kelurahan Tawang Rejo	18.161.000,00	284.301.000,00	0,00	302.462.000,00	18.067.000,00	268.902.103,00	0,00	286.969.103,00	(15.492.897,00)	94,88%
1 22 01 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan**	**32.586.000,00**	**137.414.000,00**	-	**170.000.000,00**	**31.786.000,00**	**130.363.800,00**	-	**162.149.800,00**	**(7.850.200,00)**	**95,38%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah		
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		(Rp)	%
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 01 17 01	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	32.586.000,00	137.414.000,00	0,00	170.000.000,00	31.786.000,00	130.363.800,00	0,00	162.149.800,00	(7.850.200,00)	95,38%
1 22 01 18	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan**	**32.005.000,00**	**267.995.000,00**	-	**300.000.000,00**	**31.555.000,00**	**251.670.000,00**	-	**283.225.000,00**	**(16.775.000,00)**	**94,41%**
1 22 01 18 01	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	23.148.000,00	176.852.000,00	0,00	200.000.000,00	22.798.000,00	163.352.000,00	0,00	186.150.000,00	(13.850.000,00)	93,08%
1 22 01 18 02	Sosialisasi Ahli Waris	8.857.000,00	91.143.000,00	0,00	100.000.000,00	8.757.000,00	88.318.000,00	0,00	97.075.000,00	(2.925.000,00)	97,08%
1 22 02	**Kecamatan Manguharjo**	**654.732.000,00**	**4.391.083.000,00**	**762.845.000,00**	**5.808.660.000,00**	**605.704.000,00**	**3.961.380.696,00**	**731.731.000,00**	**5.298.815.696,00**	**(509.844.304,00)**	**91,22%**
1 22 02 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**466.070.000,00**	**555.207.000,00**	-	**1.021.277.000,00**	**419.650.000,00**	**471.644.240,00**	-	**891.294.240,00**	**(129.982.760,00)**	**87,27%**
1 22 02 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	466.070.000,00	334.870.000,00	0,00	800.940.000,00	419.650.000,00	271.758.884,00	0,00	691.408.884,00	(109.531.116,00)	86,32%
1 22 02 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	220.337.000,00	0,00	220.337.000,00	0,00	199.885.356,00	0,00	199.885.356,00	(20.451.644,00)	90,72%
1 22 02 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**246.098.000,00**	-	**246.098.000,00**	-	**186.637.750,00**	-	**186.637.750,00**	**(59.460.250,00)**	**75,84%**
1 22 02 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	105.698.000,00	0,00	105.698.000,00	0,00	100.363.150,00	0,00	100.363.150,00	(5.334.850,00)	94,95%
1 22 02 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	95.100.000,00	0,00	95.100.000,00	0,00	50.014.600,00	0,00	50.014.600,00	(45.085.400,00)	52,59%
1 22 02 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00	0,00	36.260.000,00	0,00	36.260.000,00	(9.040.000,00)	80,04%
1 22 02 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**762.845.000,00**	**762.845.000,00**	-	-	**731.731.000,00**	**731.731.000,00**	**(31.114.000,00)**	**95,92%**
1 22 02 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	576.595.000,00	576.595.000,00	0,00	0,00	548.941.000,00	548.941.000,00	(27.654.000,00)	95,20%
1 22 02 03 03	Kegiatan Rehab Gedung/Bangunan	0,00	0,00	186.250.000,00	186.250.000,00	0,00	0,00	182.790.000,00	182.790.000,00	(3.460.000,00)	98,14%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 02 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**74.642.000,00**	**58.158.000,00**	-	**132.800.000,00**	**73.042.000,00**	**57.763.500,00**	-	**130.805.500,00**	**(1.994.500,00)**	**98,50%**
1 22 02 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.796.000,00	7.704.000,00	0,00	32.500.000,00	23.196.000,00	7.704.000,00	0,00	30.900.000,00	(1.600.000,00)	95,08%
1 22 02 05 03	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	35.950.000,00	34.250.000,00	0,00	70.200.000,00	35.950.000,00	33.855.500,00	0,00	69.805.500,00	(394.500,00)	99,44%
1 22 02 05 04	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	13.896.000,00	16.204.000,00	0,00	30.100.000,00	13.896.000,00	16.204.000,00	0,00	30.100.000,00	-	100,00%
1 22 02 15	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban**	**23.926.000,00**	**132.660.000,00**	-	**156.586.000,00**	**23.376.000,00**	**115.610.000,00**	-	**138.986.000,00**	**(17.600.000,00)**	**88,76%**
1 22 02 15 01	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	23.926.000,00	132.660.000,00	0,00	156.586.000,00	23.376.000,00	115.610.000,00	0,00	138.986.000,00	(17.600.000,00)	88,76%
1 22 02 16	**Program Penyelenggaraan Kelurahan**	**54.062.000,00**	**3.172.510.000,00**	-	**3.226.572.000,00**	**53.904.000,00**	**2.912.712.706,00**	-	**2.966.616.706,00**	**(259.955.294,00)**	**91,94%**
1 22 02 16 10	Penyelenggaraan Kelurahan Madiun Lor	6.062.000,00	374.504.000,00	0,00	380.566.000,00	6.062.000,00	340.438.379,00	0,00	346.500.379,00	(34.065.621,00)	91,05%
1 22 02 16 11	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Lor	6.000.000,00	448.884.000,00	0,00	454.884.000,00	5.942.000,00	419.568.017,00	0,00	425.510.017,00	(29.373.983,00)	93,54%
1 22 02 16 12	Penyelenggaraan Kelurahan Nambangan Kidul	6.000.000,00	403.941.000,00	0,00	409.941.000,00	5.988.000,00	380.536.757,00	0,00	386.524.757,00	(23.416.243,00)	94,29%
1 22 02 16 13	Penyelenggaraan Kelurahan Sogaten	6.000.000,00	324.799.000,00	0,00	330.799.000,00	5.970.000,00	298.205.305,00	0,00	304.175.305,00	(26.623.695,00)	91,95%
1 22 02 16 14	Penyelenggaraan Kelurahan Patihan	6.000.000,00	304.002.000,00	0,00	310.002.000,00	5.996.000,00	272.528.137,00	0,00	278.524.137,00	(31.477.863,00)	89,85%
1 22 02 16 15	Penyelenggaraan Kelurahan Winongo	6.000.000,00	373.741.000,00	0,00	379.741.000,00	5.978.000,00	338.565.305,00	0,00	344.543.305,00	(35.197.695,00)	90,73%
1 22 02 16 16	Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	6.000.000,00	283.914.000,00	0,00	289.914.000,00	5.988.000,00	262.881.460,00	0,00	268.869.460,00	(21.044.540,00)	92,74%
1 22 02 16 17	Penyelenggaraan Kelurahan Manguharjo	6.000.000,00	385.475.000,00	0,00	391.475.000,00	6.000.000,00	362.107.766,00	0,00	368.107.766,00	(23.367.234,00)	94,03%
1 22 02 16 18	Penyelenggaraan Kelurahan Ngegong	6.000.000,00	273.250.000,00	0,00	279.250.000,00	5.980.000,00	237.881.580,00	0,00	243.861.580,00	(35.388.420,00)	87,33%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 02 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan**	**28.944.000,00**	**140.556.000,00**	-	**169.500.000,00**	**28.644.000,00**	**135.606.000,00**	-	**164.250.000,00**	**(5.250.000,00)**	**96,90%**
1 22 02 17 04	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	28.944.000,00	140.556.000,00	0,00	169.500.000,00	28.644.000,00	135.606.000,00	0,00	164.250.000,00	(5.250.000,00)	96,90%
1 22 02 18	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan**	**7.088.000,00**	**85.894.000,00**	-	**92.982.000,00**	**7.088.000,00**	**81.406.500,00**	-	**88.494.500,00**	**(4.487.500,00)**	**95,17%**
1 22 02 18 01	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	7.088.000,00	85.894.000,00	0,00	92.982.000,00	7.088.000,00	81.406.500,00	0,00	88.494.500,00	(4.487.500,00)	95,17%
1 22 03	**Kecamatan Taman**	**834.750.000,00**	**3.950.184.000,00**	**207.500.000,00**	**4.992.434.000,00**	**777.582.000,00**	**3.343.565.248,00**	**206.352.134,00**	**4.327.499.382,00**	**(664.934.618,00)**	**86,68%**
1 22 03 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**568.892.000,00**	**446.881.000,00**	-	**1.015.773.000,00**	**531.982.000,00**	**260.636.712,00**	-	**792.618.712,00**	**(223.154.288,00)**	**78,03%**
1 22 03 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	568.892.000,00	242.379.000,00	0,00	811.271.000,00	531.982.000,00	131.273.773,00		663.255.773,00	(148.015.227,00)	81,76%
1 22 03 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	204.502.000,00	0,00	204.502.000,00		129.362.939,00		129.362.939,00	(75.139.061,00)	63,26%
1 22 03 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**91.948.000,00**	-	**91.948.000,00**	-	**67.206.531,00**	-	**67.206.531,00**	**(24.741.469,00)**	**73,09%**
1 22 03 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	-	100,00%
1 22 03 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	48.448.000,00	0,00	48.448.000,00		25.706.531,00		25.706.531,00	(22.741.469,00)	53,06%
1 22 03 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00		26.500.000,00		26.500.000,00	(2.000.000,00)	92,98%
1 22 03 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**207.500.000,00**	**207.500.000,00**	-	-	**206.352.134,00**	**206.352.134,00**	**(1.147.866,00)**	**99,45%**
1 22 03 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	207.500.000,00	207.500.000,00			206.352.134,00	206.352.134,00	(1.147.866,00)	99,45%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 03 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**66.703.000,00**	**51.167.000,00**	-	**117.870.000,00**	**58.186.000,00**	**40.496.000,00**	-	**98.682.000,00**	**(19.188.000,00)**	**83,72%**
1 22 03 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.650.000,00	6.850.000,00	0,00	32.500.000,00	20.340.000,00	5.766.000,00		26.106.000,00	(6.394.000,00)	80,33%
1 22 03 05 03	Penyusunan buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	25.016.000,00	35.979.000,00	0,00	60.995.000,00	23.234.000,00	26.392.000,00		49.626.000,00	(11.369.000,00)	81,36%
1 22 03 05 04	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	16.037.000,00	8.338.000,00	0,00	24.375.000,00	14.612.000,00	8.338.000,00		22.950.000,00	(1.425.000,00)	94,15%
1 22 03 15	**Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban**	**27.723.000,00**	**97.452.000,00**	-	**125.175 000,00**	**20.708.000,00**	**46.235.900,00**	-	**66.943.900,00**	**(58.231.100,00)**	**53,48%**
1 22 03 15 03	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	27.723.000,00	97.452.000,00	0,00	125.175.000,00	20.708.000,00	46.235.900,00		66.943.900,00	(58.231.100,00)	53,48%
1 22 03 16	**Program Penyelenggaraan Kelurahan**	**98.498.000,00**	**3.038.024.000,00**	-	**3.136.522.000,00**	**98.422.000,00**	**2.717.664.905,00**	-	**2.816.086.905,00**	**(320.435.095,00)**	**89,78%**
1 22 03 16 19	Penyelenggaraan Kelurahan Mojorejo	11.466.000,00	407.330.000,00	0,00	418.796.000,00	11.450.000,00	402.312.314,00		413.762.314,00	(5.033.686,00)	98,80%
1 22 03 16 20	Penyelenggaraan Kelurahan Pandean	11.472.000,00	375.519.000,00	0,00	386.991.000,00	11.468.000,00	328.876.354,00		340.344.354,00	(46.646.646,00)	87,95%
1 22 03 16 21	Penyelenggaraan Kelurahan Banjarejo	11.322.000,00	292.108.000,00	0,00	303.430.000,00	11.314.000,00	271.361.334,00		282.675.334,00	(20.754.666,00)	93,16%
1 22 03 16 22	Penyelenggaraan Kelurahan Kuncen	11.464.000,00	171.954.000,00	0,00	183.418.000,00	11.464.000,00	137.011.340,00		148.475.340,00	(34.942.660,00)	80,95%
1 22 03 16 23	Penyelenggaraan Kelurahan Manisrejo	8.300.000,00	447.891.000,00	0,00	456.191.000,00	8.290.000,00	397.969.020,00		406.259.020,00	(49.931.980,00)	89,05%
1 22 03 16 24	Penyelenggaraan Kelurahan Kejuron	9.912.000,00	374.150.000,00	0,00	384.062.000,00	9.886.000,00	325.865.946,00		335.751.946,00	(48.310.054,00)	87,42%
1 22 03 16 25	Penyelenggaraan Kelurahan Josenan	11.466.000,00	275.772.000,00	0,00	287.238.000,00	11.454.000,00	236.620.905,00		248.074.905,00	(39.163.095,00)	86,37%
1 22 03 16 26	Penyelenggaraan Kelurahan Demangan	11.336.000,00	302.220.000,00	0,00	313.556.000,00	11.336.000,00	289.884.126,00		301.220.126,00	(12.335.874,00)	96,07%
1 22 03 16 27	Penyelenggaraan Kelurahan Taman	11.760.000,00	391.080.000,00	0,00	402.840.000,00	11.760.000,00	327.763.566,00		339.523.566,00	(63.316.434,00)	84,28%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 22 03 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan**	**31.912.000,00**	**149.138.000,00**	-	**181.050.000,00**	**28.762.000,00**	**137.463.000,00**	-	**166.225.000,00**	**(14.825.000,00)**	**91,81%**
1 22 03 17 01	Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan	31.912.000,00	149.138.000,00	0,00	181.050.000,00	28.762.000,00	137.463.000,00		166.225.000,00	(14.825.000,00)	91,81%
1 22 03 18	**Program peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan/Kelurahan**	**41.022.000,00**	**75.574.000,00**	-	**116.596.000,00**	**39.522.000,00**	**73.862.200,00**	-	**113.384.200,00**	**(3.211.800,00)**	**97,25%**
1 22 03 18 01	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	41.022.000,00	75.574.000,00	0,00	116.596.000,00	39.522.000,00	73.862.200,00		113.384.200,00	(3.211.800,00)	97,25%
1 23 01	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**1.196.950.000,00**	**3.433.900.000,00**	-	**4.630.850.000,00**	**898.209.514,00**	**2.788.991.116,00**	-	**3.687.200.630,00**	**(10.674.930,00)**	**79,62%**
1 23 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**152.248.000,00**	**146.176.000,00**	-	**298.424.000,00**	**145.407.264,00**	**145.823.230,00**	-	**291.230.494,00**	**(6.840.736,00)**	**97,59%**
1 23 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.248.000,00	36.452.000,00	0,00	188.700.000,00	145.407.264,00	36.452.000,00	0,00	181.859.264,00	(6.840.736,00)	96,37%
1 23 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	109.724.000,00	0,00	109.724.000,00	0,00	109.371.230,00	0,00	109.371.230,00	0,00	99,68%
1 23 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**78.312.000,00**	-	**78.312.000,00**	-	**74.693.806,00**	-	**74.693.806,00**	**(3.618.194,00)**	**95,38%**
1 23 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	11.651.500,00	0,00	11.651.500,00	(2.748.500,00)	80,91%
1 23 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	31.632.000,00	0,00	31.632.000,00	0,00	30.954.306,00	0,00	30.954.306,00	(677.694,00)	97,86%
1 23 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	32.280.000,00	0,00	32.280.000,00	0,00	32.088.000,00	0,00	32.088.000,00	(192.000,00)	99,41%
1 23 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**17.416.000,00**	**2.584.000,00**	-	**20.000.000,00**	**17.200.000,00**	**2.584.000,00**	-	**19.784.000,00**	**(216.000,00)**	**98,92%**
1 23 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.416.000,00	2.584.000,00	0,00	20.000.000,00	17.200.000,00	2.584.000,00	0,00	19.784.000,00	(216.000,00)	98,92%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 23 01 15	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**218.432.000,00**	**601.070.000,00**	-	**819.502.000,00**	**116.856.000,00**	**540.010.812,00**	-	**656.866.812,00**	-	**80,15%**
1 23 01 15 01	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	123.958.000,00	499.042.000,00	0,00	623.000.000,00	98.282.000,00	454.252.812,00	0,00	552.534.812,00	0,00	88,69%
1 23 01 15 02	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	94.474.000,00	102.028.000,00	0,00	196.502.000,00	18.574.000,00	85.758.000,00	0,00	104.332.000,00	0,00	53,09%
1 23 01 16	**Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**309.822.000,00**	**1.332.230.000,00**	-	**1.642.052.000,00**	**227.200.000,00**	**1.126.201.350,00**	-	**1.353.401.350,00**	-	**82,42%**
1 23 01 16 01	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	85.138.000,00	562.585.000,00	0,00	647.723.000,00	78.038.000,00	441.131.500,00	0,00	519.169.500,00	0,00	80,15%
1 23 01 16 02	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	12.464.000,00	66.096.000,00	0,00	78.560.000,00	12.464.000,00	64.987.500,00	0,00	77.451.500,00	0,00	98,59%
1 23 01 16 03	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	58.170.000,00	199.435.000,00	0,00	257.605.000,00	56.670.000,00	189.468.000,00	0,00	246.138.000,00	0,00	95,55%
1 23 01 16 04	Kegiatan Pelestarian Budaya Bangsa	12.440.000,00	76.040.000,00	0,00	88.480.000,00	12.440.000,00	75.659.350,00	0,00	88.099.350,00	0,00	99,57%
1 23 01 16 05	Kegiatan Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitasi Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	10.976.000,00	63.404.000,00	0,00	74.380.000,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00%
1 23 01 16 06	Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	39.866.000,00	86.402.000,00	0,00	126.268.000,00	39.694.000,00	86.192.000,00	0,00	125.886.000,00	0,00	99,70%
1 23 01 16 07	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dalam memperkokoh NKRI dengan Penanggulangan Narkoba dan Kenakalan Remaja	78.644.000,00	210.112.000,00	0,00	288.756.000,00	15.920.000,00	201.712.000,00	0,00	217.632.000,00	0,00	75,37%
1 23 01 16 08	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	12.124.000,00	68.156.000,00	0,00	80.280.000,00	11.974.000,00	67.051.000,00	0,00	79.025.000,00	0,00	98,44%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1 23 01 17	**Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan**	**110.528.000,00**	**444.572.000,00**	-	**555.100.000,00**	**104.992.250,00**	**433.691.800,00**	-	**538.684.050,00**	-	**97,04%**
1 23 01 17 01	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Parpol	26.252.000,00	25.148.000,00	0,00	51.400.000,00	25.522.250,00	23.347.800,00	0,00	48.870.050,00	0,00	95,08%
1 23 01 17 02	Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat	46.560.000,00	303.440.000,00	0,00	350.000.000,00	42.510.000,00	299.790.000,00	0,00	342.300.000,00	0,00	97,80%
1 23 01 17 03	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda	18.146.000,00	52.554.000,00	0,00	70.700.000,00	17.740.000,00	51.024.000,00	0,00	68.764.000,00	0,00	97,26%
1 23 01 17 04	Kegiatan Fasilitasi Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM	19.570.000,00	63.430.000,00	0,00	83.000.000,00	19.220.000,00	59.530.000,00	0,00	78.750.000,00	0,00	94,88%
1 23 01 18	**Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal**	**388.504.000,00**	**828.956.000,00**	-	**1.217.460.000,00**	**286.554.000,00**	**465.986.118,00**	-	**752.540.118,00**	-	**61,81%**
1 23 01 18 01	Kegiatan Pemantauaan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13.950.000,00	51.050.000,00	0,00	65.000.000,00	10.250.000,00	48.275.000,00	0,00	58.525.000,00	0,00	90,04%
1 23 01 18 02	Kegiatan Peningkatan SDM, Sinkronisasi cegah dini dan deteksi dini terhadap gangguang kamtibmas	31.734.000,00	168.266.000,00	0,00	200.000.000,00	19.084.000,00	153.463.400,00	0,00	172.547.400,00	0,00	86,27%
1 23 01 18 03	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ijin Survey/Penelitian	9.790.000,00	35.250.000,00	0,00	45.040.000,00	9.190.000,00	32.154.000,00	0,00	41.344.000,00	0,00	91,79%
1 23 01 18 04	Kegiatan Penanganan Terpadu Gangguan Keamanan	140.440.000,00	90.120.000,00	0,00	230.560.000,00	124.640.000,00	43.036.000,00	0,00	167.676.000,00	0,00	72,73%
1 23 01 18 05	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	192.590.000,00	484.270.000,00	0,00	676.860.000,00	123.390.000,00	189.057.718,00	0,00	312.447.718,00	0,00	46,16%
2 01 01	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**861.980.000,00**	**9.234.377.000,00**	**414.108.000,00**	**10.510.465.000,00**	**827.770.000,00**	**8.456.606.844,00**	**401.835.000,00**	**9.686.211.844,00**	**(824.253.156,00)**	**92,16%**
2 01 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**244.996.000,00**	**251.074.000,00**	-	**496.070.000,00**	**234.987.000,00**	**194.972.400,00**	-	**429.959.400,00**	**(66.110.600,00)**	**86,67%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.996.000,00	95.854.000,00	0,00	340.850.000,00	234.987.000,00	95.686.150,00	0,00	330.673.150,00	(10.176.850,00)	97,01%
2 01 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	155.220.000,00	0,00	155.220.000,00	0,00	99.286.250,00	0,00	99.286.250,00	(55.933.750,00)	63,96%
2 01 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**215.527.000,00**	-	**215.527.000,00**	-	**194.502.400,00**		**194.502.400,00**	**(21.024.600,00)**	**90,25%**
2 01 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	115.100.000,00	0,00	115.100.000,00	(4.900.000,00)	95,92%
2 01 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	58.227.000,00	0,00	58.227.000,00	0,00	42.302.400,00	0,00	42.302.400,00	(15.924.600,00)	72,65%
2 01 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	0,00	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	(200.000,00)	99,46%
2 01 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	-	-	**315.500.000,00**	**315.500.000,00**	-	-	**312.791.000,00**	**312.791.000,00**	**(2.709.000,00)**	**99,14%**
2 01 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	315.500.000,00	315.500.000,00	0,00	0,00	312.791.000,00	312.791.000,00	(2.709.000,00)	99,14%
2 01 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**38.576.000,00**	**11.424.000,00**	-	**50.000.000,00**	**38.144.000,00**	**11.221.000,00**	-	**49.365.000,00**	**(635.000,00)**	**98,73%**
2 01 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.576.000,00	11.424.000,00	0,00	50.000.000,00	38.144.000,00	11.221.000,00	0,00	49.365.000,00	(635.000,00)	98,73%
2 01 01 15	**Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**	**78.284.000,00**	**2.671.311.000,00**	**22.150.000,00**	**2.771.745.000,00**	**73.009.000,00**	**2.291.896.794,00**	**21.500.000,00**	**2.386.405.794,00**	**(385.339.206,00)**	**86,10%**
2 01 01 15 01	Kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	4.975.000,00	135.125.000,00	0,00	140.100.000,00	4.375.000,00	125.834.000,00	0,00	130.209.000,00	(9.891.000,00)	92,94%
2 01 01 15 02	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian	0,00	1.809.607.000,00	0,00	1.809.607.000,00	0,00	1.495.244.544,00	0,00	1.495.244.544,00	(314.362.456,00)	82,63%
2 01 01 15 03	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan.	6.200.000,00	282.000.000,00	0,00	288.200.000,00	5.350.000,00	273.284.000,00	0,00	278.634.000,00	(9.566.000,00)	96,68%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 01 01 15 04	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	22.250.000,00	47.750.000,00	0,00	70.000.000,00	21.500.000,00	34.725.000,00	0,00	56.225.000,00	(13.775.000,00)	80,32%
2 01 01 15 05	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	12.159.000,00	76.691.000,00	0,00	88.850.000,00	11.534.000,00	69.258.750,00	0,00	80.792.750,00	(8.057.250,00)	90,93%
2 01 01 15 06	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	32.700.000,00	320.138.000,00	22.150.000,00	374.988.000,00	30.250.000,00	293.550.500,00	21.500.000,00	345.300.500,00	(29.687.500,00)	92,08%
2 01 01 16	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan**	**57.155.000,00**	**125.830.000,00**	**76.458.000,00**	**259.443.000,00**	**54.990.000,00**	**113.305.900,00**	**67.544.000,00**	**235.839.900,00**	**(23.603.100,00)**	**90,90%**
2 01 01 16 03	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	9.200.000,00	40.515.000,00	0,00	49.715.000,00	7.850.000,00	34.659.000,00	0,00	42.509.000,00	(7.206.000,00)	85,51%
2 01 01 16 04	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	4.742.000,00	56.311.000,00	60.000.000,00	121.053.000,00	4.322.000,00	54.171.900,00	57.200.000,00	115.693.900,00	(5.359.100,00)	95,57%
2 01 01 16 05	Kesehatan Masyarakat Veteriner	39.913.000,00	9.087.000,00	14.900.000,00	63.900.000,00	39.818.000,00	8.633.000,00	9.500.000,00	57.951.000,00	(5.949.000,00)	90,69%
2 01 01 16 06	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan	3.300.000,00	19.917.000,00	1.558.000,00	24.775.000,00	3.000.000,00	15.842.000,00	844.000,00	19.686.000,00	(5.089.000,00)	79,46%
2 01 01 17	**Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan/Pemasaran Hasil Perikanan**	**34.425.000,00**	**305.985.000,00**	-	**340.410.000,00**	**30.275.000,00**	**264.142.900,00**	-	**294.417.900,00**	**(45.992.100,00)**	**86,49%**
2 01 01 17 01	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	3.775.000,00	78.145.000,00	0,00	81.920.000,00	3.475.000,00	64.660.100,00	0,00	68.135.100,00	(13.784.900,00)	83,17%
2 01 01 17 02	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	3.825.000,00	45.475.000,00	0,00	49.300.000,00	2.875.000,00	25.562.500,00	0,00	28.437.500,00	(20.862.500,00)	57,68%
2 01 01 17 03	Kegiatan Pembenihan Ikan	2.850.000,00	97.150.000,00	0,00	100.000.000,00	2.550.000,00	95.196.000,00	0,00	97.746.000,00	(2.254.000,00)	97,75%
2 01 01 17 04	Kegiatan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan	23.975.000,00	85.215.000,00	0,00	109.190.000,00	21.375.000,00	78.724.300,00	0,00	100.099.300,00	(9.090.700,00)	91,67%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 01 01 18	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**408.544.000,00**	**5.653.226.000,00**	-	**6.061.770.000,00**	**396.365.000,00**	**5.386.565.450,00**	-	**5.782.930.450,00**	**(278.839.550,00)**	**95,40%**
2 01 01 18 01	Kegiatan Monev dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari	19.325.000,00	134.863.000,00	0,00	154.188.000,00	18.700.000,00	119.736.000,00	0,00	138.436.000,00	(15.752.000,00)	89,78%
2 01 01 18 02	Kegiatan Lomba Cipta Menu	20.378.000,00	454.622.000,00	0,00	475.000.000,00	19.774.000,00	364.811.600,00	0,00	384.585.600,00	(90.414.400,00)	80,97%
2 01 01 18 03	Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	32.150.000,00	49.972.000,00	0,00	82.122.000,00	31.150.000,00	32.115.000,00	0,00	63.265.000,00	(18.857.000,00)	77,04%
2 01 01 18 04	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan	25.348.000,00	119.252.000,00	0,00	144.600.000,00	25.342.000,00	79.888.250,00	0,00	105.230.250,00	(39.369.750,00)	72,77%
2 01 01 18 05	Sosialisasi Keamanan Pangan	16.318.000,00	133.257.000,00	0,00	149.575.000,00	16.213.000,00	127.715.000,00	0,00	143.928.000,00	(5.647.000,00)	96,22%
2 01 01 18 06	Kegiatan Penanganan kewaspadaan pangan dan gizi	28.820.000,00	68.755.000,00	0,00	97.575.000,00	25.496.000,00	54.749.400,00	0,00	80.245.400,00	(17.329.600,00)	82,24%
2 01 01 18 07	Kegiatan Penyusunan SPM Ketahanan Pangan	14.220.000,00	29.730.000,00	0,00	43.950.000,00	14.220.000,00	24.297.800,00	0,00	38.517.800,00	(5.432.200,00)	87,64%
2 01 01 18 08	Kegiatan Pemantauan Distribusi dan Akses pangan	11.120.000,00	46.730.000,00	0,00	57.850.000,00	10.870.000,00	20.195.000,00	0,00	31.065.000,00	(26.785.000,00)	53,70%
2 01 01 18 09	Kegiatan Subsidi Pangan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah	240.865.000,00	4.616.045.000,00	0,00	4.856.910.000,00	234.600.000,00	4.563.057.400,00	0,00	4.797.657.400,00	(59.252.600,00)	98,78%
2 02 01	**Dinas Perdagangan**	**1.497.219.000,00**	**5.551.388.000,00**	**235.500.000,00**	**7.284.107.000,00**	**1.061.156.900,00**	**4.338.270.146,00**	**220.991.500,00**	**5.620.418.546,00**	**(1.663.688.454,00)**	**77,16%**
2 02 01 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**179.965.000,00**	**298.157.000,00**	-	**478.122.000,00**	**147.060.000,00**	**251.785.150,00**	-	**398.845.150,00**	**(79.276.850,00)**	**83,42%**
2 02 01 01 01	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.965.000,00	178.585.000,00	0,00	358.550.000,00	147.060.000,00	170.476.650,00	0,00	317.536.650,00	(41.013.350,00)	88,56%
2 02 01 01 02	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0,00	119.572.000,00	0,00	119.572.000,00	0,00	81.308.500,00	0,00	81.308.500,00	(38.263.500,00)	68,00%
2 02 01 02	**Program pemeliharaan barang milik daerah**	-	**685.460.000,00**	-	**685.460.000,00**	-	**489.416.595,00**	-	**489.416.595,00**	**(196.043.405,00)**	71,40%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 02 01 02 01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	0,00	56.500.000,00	0,00	56.500.000,00	0,00	50.639.500,00	0,00	50.639.500,00	(5.860.500,00)	89,63%
2 02 01 02 02	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	0,00	519.060.000,00	0,00	519.060.000,00	0,00	340.623.095,00	0,00	340.623.095,00	(178.436.905,00)	65,62%
2 02 01 02 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	0,00	109.900.000,00	0,00	109.900.000,00	0,00	98.154.000,00	0,00	98.154.000,00	(11.746.000,00)	89,31%
2 02 01 03	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**2.300.000,00**	**61.300.000,00**	**77.500.000,00**	**141.100.000,00**	**2.300.000,00**	**60.465.000,00**	**71.511.500,00**	**134.276.500,00**	**(6.823.500,00)**	**95,16%**
2 02 01 03 01	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	0,00	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	71.511.500,00	71.511.500,00	(5.988.500,00)	92,27%
2 02 01 03 04	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.300.000,00	61.300.000,00	0,00	63.600.000,00	2.300.000,00	60.465.000,00	0,00	62.765.000,00	(835.000,00)	98,69%
2 02 01 05	**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**38.908.000,00**	**3.792.000,00**	-	**42.700.000,00**	**38.640.000,00**	**3.748.000,00**	-	**42.388.000,00**	**(312.000,00)**	**99,27%**
2 02 01 05 02	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	38.908.000,00	3.792.000,00	0,00	42.700.000,00	38.640.000,00	3.748.000,00	0,00	42.388.000,00	(312.000,00)	99,27%
2 02 01 15	**Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport serta Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**45.400.000,00**	**322.768.000,00**	-	**368.168.000,00**	**42.950.000,00**	**273.346.046,00**	-	**316.296.046,00**	**(51.871.954,00)**	**85,91%**
2 02 01 15 01	Kegiatan Pameran Dagang	15.600.000,00	188.560.000,00	0,00	204.160.000,00	15.100.000,00	155.732.200,00	0,00	170.832.200,00	(33.327.800,00)	83,68%
2 02 01 15 02	Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Produk	13.600.000,00	103.354.000,00	0,00	116.954.000,00	13.600.000,00	95.665.496,00	0,00	109.265.496,00	(7.688.504,00)	93,43%
2 02 01 15 03	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	11.300.000,00	6.500.000,00	0,00	17.800.000,00	9.350.000,00	3.661.000,00	0,00	13.011.000,00	(4.789.000,00)	73,10%
2 02 01 15 04	Kegiatan Membangun Jejaring dengan Exportir	4.900.000,00	24.354.000,00	0,00	29.254.000,00	4.900.000,00	18.287.350,00	0,00	23.187.350,00	(6.066.650,00)	79,26%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 02 01 16	**Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**	**617.750.000,00**	**495.204.000,00**	**78.000.000,00**	**1.190.954.000,00**	**261.600.000,00**	**190.503.500,00**	**76.780.000,00**	**528.883.500,00**	**(662.070.500,00)**	**44,41%**
2 02 01 16 01	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan barang yang beredar dan ijin perdagangan	76.400.000,00	24.590.000,00	0,00	100.990.000,00	37.400.000,00	14.049.000,00	0,00	51.449.000,00	(49.541.000,00)	50,94%
2 02 01 16 02	Kegiatan Sosialisasi Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	5.500.000,00	41.567.000,00	0,00	47.067.000,00	5.000.000,00	38.177.300,00	0,00	43.177.300,00	(3.889.700,00)	91,74%
2 02 01 16 03	Kegiatan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	18.200.000,00	9.236.000,00	0,00	27.436.000,00	18.200.000,00	7.655.500,00	0,00	25.855.500,00	(1.580.500,00)	94,24%
2 02 01 16 04	Pengawasan Barang Dalam Keadaan Tebungkus (BDKT)	16.600.000,00	13.536.000,00	0,00	30.136.000,00	16.600.000,00	8.435.000,00	0,00	25.035.000,00	(5.101.000,00)	83,07%
2 02 01 16 05	Kegiatan Pelaksanaan Tertib Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	501.050.000,00	406.275.000,00	78.000.000,00	985.325.000,00	184.400.000,00	122.186.700,00	76.780.000,00	383.366.700,00	(601.958.300,00)	38,91%
2 02 01 17	**Program Pembinaan PKL dan Asongan**	**11.600.000,00**	**283.925.000,00**	-	**295.525.000,00**	**10.950.000,00**	**239.223.000,00**	-	**250.173.000,00**	**(45.352.000,00)**	**84,65%**
2 02 01 17 01	Kegiatan Pembinaan PKL	5.800.000,00	166.825.000,00	0,00	172.625.000,00	5.800.000,00	140.522.000,00	0,00	146.322.000,00	(26.303.000,00)	84,76%
2 02 01 17 02	Kegiatan Pengawasan Mutu dagangan PKL melalui pelatihan kuliner	5.800.000,00	117.100.000,00	0,00	122.900.000,00	5.150.000,00	98.701.000,00	0,00	103.851.000,00	(19.049.000,00)	84,50%
2 02 01 17 03	Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL Kota Madiun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
2 02 01 18	**Program Pengelolaan Pasar Rakyat**	**601.296.000,00**	**3.400.782.000,00**	**80.000.000,00**	**4.082.078.000,00**	**557.656.900,00**	**2.829.782.855,00**	**72.700.000,00**	**3.460.139.755,00**	**(621.938.245,00)**	**84,76%**
2 02 01 18 01	Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	49.858.000,00	5.392.000,00	0,00	55.250.000,00	49.715.000,00	5.344.680,00	0,00	55.059.680,00	(190.320,00)	99,66%
2 02 01 18 02	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	30.000.000,00	1.583.600.000,00	80.000.000,00	1.693.600.000,00	18.710.000,00	1.049.862.675,00	72.700.000,00	1.141.272.675,00	(552.327.325,00)	67,39%
2 02 01 18 03	Kegiatan Program Pasar Bersih (PROPASIH)	3.100.000,00	636.900.000,00	0,00	640.000.000,00	3.100.000,00	633.085.000,00	0,00	636.185.000,00	(3.815.000,00)	99,40%
2 02 01 18 04	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	19.124.000,00	628.876.000,00	0,00	648.000.000,00	14.108.000,00	616.673.000,00	0,00	630.781.000,00	(17.219.000,00)	97,34%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Sesudah Perubahan				Realisasi				Bertambah/(Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang Dan Jasa	Modal			
1	2	7	8	9	10=7+8+9	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
2 02 01 18 05	Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional	17.404.000,00	132.596.000,00	0,00	150.000.000,00	17.404.000,00	122.860.500,00	0,00	140.264.500,00	(9.735.500,00)	93,51%
2 02 01 18 06	Kegiatan Gerakan Kembali Ke Pasar	34.690.000,00	113.270.000,00	0,00	147.960.000,00	33.934.900,00	110.267.500,00	0,00	144.202.400,00	(3.757.600,00)	97,46%
2 02 01 18 07	Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pendukung Pasar-pasar	416.980.000,00	220.288.000,00	0,00	637.268.000,00	390.555.000,00	219.268.000,00	0,00	609.823.000,00	(27.445.000,00)	95,69%
2 02 01 18 08	Kegiatan Operasi Penertiban Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Angsuran dan Sewa Tempat Jualan	1.100.000,00	25.900.000,00	0,00	27.000.000,00	1.100.000,00	20.710.000,00	0,00	21.810.000,00	(5.190.000,00)	80,78%
2 02 01 18 09	Kegiatan Pendataan Pengunjung Pasar yang dikelola Dinas Pasar	29.040.000,00	53.960.000,00	0,00	83.000.000,00	29.030.000,00	51.711.500,00	0,00	80.741.500,00	(2.258.500,00)	97,28%
	Jumlah	**63.861.135.690,00**	**346.900.453.310,00**	**280.766.389.000,00**	**691.527.978.000,00**	**56.802.981.665,00**	**290.933.631.925,27**	**255.977.976.513,23**	**603.714.590.103,50**	**(88.782.144.906,50)**	**87,30%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE			URAIAN	Jumlah Setelah perubahan	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	
						Jumlah (Rp)	%
1			2	3	4	5=4-3	6
01			**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**358.760.042.594,13**	**175.651.842.425,72**	**(183.108.200.168,41)**	**(51,04)**
01	01	15	Kepala Daerah dan DPRD	12.644.502.000,00	8.785.784.194,00	(3.858.717.806,00)	(30,52)
01	01	16	Unsur Staf	40.463.808.000,00	33.924.274.085,50	(6.539.533.914,50)	(16,16)
01	01	17	Pelayanan Administrasi Dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas Dan Fungsi DPRD	28.962.372.000,00	17.984.556.770,00	(10.977.815.230,00)	(37,90)
01	01	18	Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	7.518.238.000,00	6.672.113.864,00	(846.124.136,00)	(11,25)
01	01	19	Penunjang Keuangan	208.592.295.594,13	55.071.958.495,22	(153.520.337.098,91)	(73,60)
01	01	20	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5.331.100.000,00	4.791.223.976,00	(539.876.024,00)	(10,13)
01	01	21	Penunjang Perencanaaan, Penelitian Dan Pengembangan	8.045.539.000,00	6.925.987.185,00	(1.119.551.815,00)	(13,92)
01	01	22	Kecamatan	39.849.102.000,00	35.491.009.491,00	(4.358.092.509,00)	(10,94)
01	01	23	Kesatuan Bangsa	7.353.086.000,00	6.004.934.365,00	(1.348.151.635,00)	(18,33)
02			**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**49.737.258.000,00**	**44.801.603.502,00**	**(4.935.654.498,00)**	**(9,92)**
02	01	05	Kententraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	49.737.258.000,00	44.801.603.502,00	(4.935.654.498,00)	(9,92)
03			**FUNGSI EKONOMI**	**72.443.518.000,00**	**64.138.590.740,98**	**(8.304.927.259,02)**	**(11,46)**
03	01	10	Perhubungan	15.122.991.000,00	12.886.494.383,00	(2.236.496.617,00)	(14,79)
03	01	11	Komunikasi Informatka, Statistik dan Persandian	19.609.943.000,00	18.580.893.190,00		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1			2	3	4	5=4-3	6
03	01	12	Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8.345.922.000,00	7.272.576.311,98	(1.073.345.688,02)	(12,86)
03	02	01	Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	14.198.114.000,00	12.725.069.047,00	(1.473.044.953,00)	(10,37)
03	02	02	Perdagangan	15.166.548.000,00	12.673.557.809,00	(2.492.990.191,00)	(16,44)
04			**FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**	**23.849.091.000,00**	**19.400.239.275,00**	**(4.448.851.725,00)**	**(18,65)**
04	01	08	Lingkungan Hidup	23.849.091.000,00	19.400.239.275,00	(4.448.851.725,00)	(18,65)
05			**FUNGSI PERUMAHAN & FASILITAS UMUM**	**184.965.517.000,00**	**169.557.024.659,00**	**(15.408.492.341,00)**	**(8,33)**
05	01	03	Pekerjaan Umum	150.523.562.000,00	138.050.300.561,00	(12.473.261.439,00)	(8,29)
05	01	04	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	34.441.955.000,00	31.506.724.098,00	(2.935.230.902,00)	(8,52)
06			**FUNGSI KESEHATAN**	**192.309.612.000,00**	**174.656.276.876,68**	**(17.653.335.123,32)**	**(9,18)**
06	01	02	Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	192.309.612.000,00	174.656.276.876,68	(17.653.335.123,32)	(9,18)
07			**FUNGSI PENDIDIKAN**	**333.960.848.000,00**	**281.321.993.810,43**	**(52.638.854.189,57)**	**(15,76)**
07	01	01	Pendidikan	314.606.478.000,00	264.488.741.504,43	(50.117.736.495,57)	(15,93)
07	01	13	Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	15.133.069.000,00	13.219.786.600,00	(1.913.282.400,00)	(12,64)
07	01	14	Perpustakaan dan Kearsipan	4.221.301.000,00	3.613.465.706,00	(607.835.294,00)	(14,40)
08			**FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL**	**30.613.552.000,00**	**25.464.131.740,00**	**(5.149.420.260,00)**	**(16,82)**
08	01	06	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.126.038.000,00	10.314.448.632,00	(3.811.589.368,00)	(26,98)
08	01	07	Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	7.965.766.000,00	7.090.988.983,00	(874.777.017,00)	(10,98)
08	01	09	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.521.748.000,00	8.058.694.125,00	(463.053.875,00)	(5,43)

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**6.1**	**305.857.486.594,13**	**339.135.179.352,77**
2	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	**6.2**	(305.857.486.594,13)	(339.135.179.352,77)
3	**Sub total (1 + 2)**		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	**6.3**	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13
5	**Sub total (3 +4)**		**308.490.756.889,46**	**305.857.486.594,13**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**6.4**	-	-
7	Lain-Lain		-	-
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)**	**6.5**	**308.490.756.889,46**	**305.857.486.594,13**

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	**PENDAPATAN LO**	**8.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH LO**	**8.1.1**				
3	Hasil Pajak Daerah LO	8.1.1.1	75.968.556.063,51	65.080.072.075,90	10.888.483.987,61	16,73%
4	Hasil Retribusi Daerah LO	8.1.1.2	18.731.242.668,40	18.066.580.676,00	664.661.992,40	3,68%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	8.1.1.3	27.183.076.020,81	20.096.685.245,24	7.086.390.775,57	36,35%
6	Lain-lain PAD yang Sah	8.1.1.4	128.124.150.175,17	85.529.178.970,93	42.594.971.204,24	49,80%
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 sd 6)**		**250.007.024.927,89**	**188.772.516.968,07**	**61.234.507.959,82**	**32,55%**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER LO**	**8.1.2**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN LO**	**8.1.2.1**				
11	Bagi Hasil Pajak LO	8.1.2.1.1	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00	(6.724.240.903,00)	(19,75%)
12	Bagi Hasil Bukan Pajak LO	8.1.2.1.2	18.680.122.868,00	18.880.139.043,00	(200.016.175,00)	(1,06%)
13	Dana Alokasi Umum LO	8.1.2.1.3	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00	(8.983.219.000,00)	(1,76%)
14	Dana Alokasi Khusus LO	8.1.2.1.4	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00	(63.579.676.496,00)	(45,14%)
15	Dana Bagi Hasil Cukai LO	8.1.2.1.5	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00	899.600.202,00	7,25%
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 sd 15)**		**638.973.881.834,00**	**717.561.434.206,00**	**(78.587.552.372,00)**	**-10,95%**
17						
18	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA LO**	**8.1.2.2**				
19	Dana Otonomi Khusus LO	8.1.2.2.1	-	-		
20	Dana Penyesuaian LO	8.1.2.2.2	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(33.882.622.000,00)	(81,88%)
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 sd 20)**		**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**	**(33.882.622.000,00)**	**(81,88%)**
22						
23	**Transfer Pemerintah Provinsi LO**	**8.1.2.3**				
24	Pendapatan bagi hasil pajak LO	8.1.2.3.1	79.648.626.591,00	67.716.504.616,00	11.932.121.975,00	17,62%
25	Pendapatan bagi hasil lainnya LO	8.1.2.3.2	716.850.000,00	1.670.630.000,00	(953.780.000,00)	(57,09%)
26	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (24 sd 25)**		**80.365.476.591,00**	**69.387.134.616,00**	**10.978.341.975,00**	**(15,82%)**
27						
28	**Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)**		**726.839.358.425,00**	**828.331.190.822,00**	**(101.491.832.397,00)**	**(12,25%)**
29						
30	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO**	**8.1.3**				
31	Pendapatan Hibah LO	8.1.3.1	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(36.757.731.544,58)	(96,22%)
32	Pendapatan Darurat LO		-	-		
33	Pendapatan Lainnya LO		-	-		
34	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 sd 33)**		**1.445.406.976,42**	**38.203.138.521,00**	**(36.757.731.544,58)**	**(96,22%)**
35						
36	**JUMLAH PENDAPATAN (6 + 28 + 34)**		**978.291.790.329,31**	**1.055.306.846.311,07**	**(77.015.055.981,76)**	**(7,28%)**
37						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
38	**BEBAN**					
39	**BEBAN OPERASI**	**8.2.**				
40	Beban Pegawai	8.2.1.	391.643.256.502,00	513.543.197.481,00	(121.899.940.979,00)	(23,74%)
41	Beban Persediaan		70.507.162.300,55	85.603.768.786,53	(15.096.606.485,98)	(17,64%)
42	Beban Jasa		153.929.093.775,92	129.560.302.450,48	24.368.791.325,44	14,61%
43	Beban Pemeliharaan		17.751.317.356,00	17.178.680.528,50	572.636.827,50	3,33%
44	Beban Perjalanan Dinas		43.662.419.274,00	43.521.015.103,00	141.404.171,00	0,32%
45	Beban Bunga		-	-		
46	Beban Subsidi		-	-		
47	Beban Hibah	8.2.3.	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00	4.911.017.789,31	70,02%
48	Beban Bantuan Sosial	8.2.4.	14.984.656.810,00	8.957.848.417,00	6.026.808.393,00	67,28%
49	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	
50	Beban Penyisihan Piutang	8.2.5.	1.077.700.660,19	790.958.645,78	286.742.014,41	36,25%
51	Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	8.2.8.	-	172.622.427,05	(172.622.427,05)	00,00%
52	Beban Penyusutan	8.2.7.	101.506.978.370,00	91.165.184.133,88	10.341.794.236,12	11,34%
53	Beban Amortisasi	8.2.8.	2.037.673.624,99	2.076.171.277,33	(38.497.652,34)	(1,85%)
54	Beban Lain lain		5.891.346.381,67	8.765.424.021,96	(2.874.077.640,29)	(32,79%)
55	**Jumlah Beban Operasi (40 sd 54)**		**814.916.294.444,63**	**908.348.844.872,51**	**(93.432.550.427,88)**	**(10,88%)**
56						
57	**SURLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (36 - 55)**		**163.375.495.884,68**	**146.958.001.438,56**	**16.417.494.446,12**	**(15,02%)**
58						
59	**SURLUS (DEFISIT) DARI**					
60	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
61	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-		
62	Surplus Penyelesaian Jangka Paniang		-	-		
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-		
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-		
65	**Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg Non Operasional (61 sd 64)**		-	-		
66						
67	**SURLUS (DEFISIT) SEBELUM LUAR BIASA (57 + 65)**		**163.375.495.884,68**	**146.958.001.438,56**	**16.417.494.446,12**	**(15,02%)**
68						
69	**POS LUAR BIASA**					
70	**Pendapatan Luar Biasa**		-	-		
71	Beban Luar Biasa		94.394.268.663,99	-	94.394.268.663,99	00,00%
72	Beban Tidak Terduga		-	-		
73	**Jumlah Pos Luar Biasa (71 sd 73)**		**(94.394.268.663,99)**	-	**(94.394.268.663,99)**	**00,00%**
74						
75	**SURPLUS/ DEFISIT LO (67 + 73)**		**68.981.227.220,69**	**146.958.001.438,56**	**16.417.494.446,12**	**(49,21%)**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1	**Ekuitas Awal**	**10.1**	**2.351.321.386.078,12**	**1.783.390.753.070,32**
2	Surplus (Defisit) LO	10.2	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56
3	Dampak Kumulatif Perubahan	10.3		
4	Akumulasi Penyusutan sd tahun 2016	10.4	-	-
5	Akumulasi Amortisasi sd tahun 2016	10.5	-	-
6	Lain-lain	10.6	(32.459.140.127,30)	420.972.631.569,24
7	**Ekuitas Akhir**	**10.7**	**2.387.843.473.171,51**	**2.351.321.386.078,12**

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :

PEMERINTAH KOTA MADIUN

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
1				
2	**ASET**	**7.1**		
3	**ASET LANCAR**	**7.1.1**		
4	Kas dan Bank	7.1.1.1		
5	Kas di Kas Daerah	7.1.1.1.1	39.929.243.287,63	275.264.586.878,92
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.1.1.1.2	-	-
7	Kas di Bendahara Penerimaan	7.1.1.1.3	41.690.025,00	20.394.787,00
8	Kas di BLUD RSUD	7.1.1.1.4	23.695.743.471,85	28.036.186.781,37
9	Kas di BLUD Puskesmas/JKN	7.1.1.1.4	3.527.548.931,14	2.536.318.146,84
10	Kas Lainnya		1.296.531.173,84	2.672.067.089,70
11	Deposito Berjangka 1 Bulan		240.000.000.000,00	-
12	Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	4.560.680.557,40	3.769.953.866,00
13	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.1.1.2	(497.747.971,75)	(336.786.290,21)
14	*Piutang Pajak Daerah Netto*	7.1.1.2	*4.062.932.585,65*	*3.433.167.575,79*
15	Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	2.409.952.554,00	1.504.679.991,00
16	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.1.1.3	(479.420.814,53)	(211.958.964,70)
17	*Piutang Retribusi Daerah Netto*	7.1.1.3	*1.930.531.739,47*	*1.292.721.026,30*
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	431.090.096,00	541.181.314,00
19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.1.1.4	(215.545.048,00)	(270.590.657,00)
20	*Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto*	7.1.1.4	*215.545.048,00*	*270.590.657,00*
21	Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	35.885.862.487,70	31.083.765.577,79
22	Penyisihan Piutang Lain-Lain	7.1.1.5	(403.444.851,88)	(447.703.140,87)
23	*Piutang Lain-Lain Netto*	7.1.1.5	*35.482.417.635,82*	*30.636.062.436,92*
24	Persediaan	7.1.1.6	11.908.197.507,47	12.648.252.970,18
25	Belanja Dibayar Dimuka	7.1.1.7	2.502.473.928,43	1.521.877.477,00
26	**Jumlah Aset Lancar (5 sd 11 +13+16+19+22+23+24+25)**		**364.592.855.334,30**	**358.332.225.827,02**
27				
28	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**7.1.2**		
29	**Investasi Non Permanen**	**7.1.2.1**		
30	Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.1	22.535.722.180,36	21.282.514.160,06
31	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	7.1.2.1.2	(4.282.742.678,21)	(4.033.232.092,52)
32	*Investasi Dana Bergulir Netto*	7.1.2.1.2	*18.252.979.502,15*	*17.249.282.067,54*
33				
34	**Jumlah Investasi Non Permanen (32)**		**18.252.979.502,15**	**17.249.282.067,54**
35				
36	**Investasi Permanen**	**7.1.2.2**		
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.1.2.2.1	124.924.040.198,74	127.812.957.969,89
38	**Jumlah Investasi Permanen (37)**		**124.924.040.198,74**	**127.812.957.969,89**
39				
40	**Jumlah Investasi Jangka Panjang (34+38)**		**143.177.019.700,89**	**145.062.240.037,43**
41				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
42	**ASET TETAP**	**7.1.3**		
43	Tanah	7.1.3.1	706.768.917.129,00	746.929.754.829,00
44	Peralatan dan Mesin	7.1.3.2	425.595.976.323,50	392.197.738.239,97
45	Gedung dan Bangunan	7.1.3.3	647.411.660.877,03	715.435.055.660,95
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.1.3.4	800.578.583.757,05	705.169.609.291,00
47	Aset Tetap Lainnya	7.1.3.5	4.806.741.593,18	4.770.699.355,85
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.1.3.6	48.322.382.857,00	45.425.929.857,00
49	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(841.927.313.590,06)	(787.931.448.572,02)
50	**Jumlah Aset Tetap (43 sd 49)**		**1.791.556.948.946,70**	**1.821.997.338.661,75**
51				
52	**ASET LAINNYA**	**7.1.4**		
53	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
54	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
55	*Tagihan Penjualan Angsuran Netto*		-	-
56	Tuntutan Perbendaharaan		-	-
57	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan		-	-
58	*Tuntutan Perbendaharaan Netto*		-	-
59	Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	155.654.318,43	2.925.735.246,17
60	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.1.4.1	-	-
61	*Tuntutan Ganti Rugi Netto*	7.1.4.1	*155.654.318,43*	*2.925.735.246,17*
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.1.4.2	88.411.755.000,00	31.979.755.000,00
63	Aset Tak Berwujud	7.1.4.4	10.754.400.455,00	9.621.870.430,00
64	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	7.1.4.4	(8.986.382.169,34)	(6.948.708.544,00)
65	*Aset Tak Berwujud Netto*	7.1.4.4	*1.768.018.285,66*	*2.673.161.886,00*
66	Aset Lain-lain	7.1.4.5	23.096.004.799,04	20.891.855.064,00
67	Akumulasi penyusutan aset lain-lain	7.1.4.5	(14.345.384.704,07)	-
68	*Akumulasi penyusutan aset lain-lain Netto*	7.1.4.5	*8.750.620.094,97*	-
69	**Jumlah Aset Lainnya (53 sd 68)**		**99.086.047.699,06**	**58.470.507.196,17**
70				
71	**JUMLAH ASET (26 + 40 + 50 + 69)**		**2.398.412.871.680,95**	**2.383.862.311.722,37**
72				
73	**UTANG**	**7.2**		
74	**UTANG LANCAR**	**7.2.1**		
75	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.2.1.1	-	-
76	Pendapatan Diterima Dimuka		4.963.939.797,44	3.948.533.487,17
77	Utang Belanja	7.2.1.2	5.440.683.012,00	28.426.000.000,00
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.2.1.2	164.775.700,00	166.392.157,08
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (75 sd 78)**		**10.569.398.509,44**	**32.540.925.644,25**
80				
81	**UTANG JANGKA PANJANG**	**7.2.2**		
82	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
83	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
84	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
85	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
86	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	-
87	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
88	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 sd 87)**		-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URAIAN	CATATAN	TAHUN 2017	TAHUN 2016
89				
90	**JUMLAH KEWAJIBAN (79 +88)**		**10.569.398.509,44**	**32.540.925.644,25**
91				
92	Ekuitas	7.3.1	2.387.843.473.171,51	2.351.321.386.078,12
93	**Jumlah Ekuitas (91)**		**2.387.843.473.171,51**	**2.351.321.386.078,12**
94				
95	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (90 + 93)**		**2.398.412.871.680,95**	**2.383.862.311.722,37**

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

No	Uraian	Catatan	Tahun 2017	Tahun 2016
1	**ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	9.1		
2	**Arus Masuk Kas**	9.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1.1	75.224.831.585,44	64.045.559.079,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1.2	18.407.218.016,50	16.762.538.293,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan	9.1.1.3	13.320.249.415,39	11.172.031.994,51
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	9.1.1.4	123.151.384.225,81	81.213.040.460,93
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.1.1.5	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	9.1.1.6	18.680.122.868,00	18.880.139.043,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1.7	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	9.1.1.8	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Cukai	9.1.1.9	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.1.1.10	79.825.524.122,00	64.431.714.504,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan/Bagi Hasil	9.1.1.11	716.850.000,00	1.670.630.000,00
14	Penerimaan Dana Penyesuaian	9.1.1.12	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00
15	Penerimaan Hibah	9.1.1.13	-	-
16	Penerimaan Dana Darurat	9.1.1.14	-	-
17	Penerimaan Lainnya	9.1.1.15	-	-
18	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**957.119.939.199,14**	**998.239.570.537,80**
19	**Arus Keluar Kas**	9.1.2		
20	Pembayaran Pegawai	9.1.2.1	391.631.558.502,00	511.243.214.266,00
21	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2.2	280.472.821.815,27	257.954.754.292,44
22	Pembayaran Hibah	9.1.2.3	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	9.1.2.4	14.356.810.110,00	8.330.001.717,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	9.1.2.5	627.846.700,00	627.846.700,00
25	Pembayaran tidak tersangka			-
26	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**699.013.726.516,58**	**785.169.488.575,44**
27	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	9.1.3	**258.106.212.682,56**	**213.070.081.962,36**
28				
29	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	9.2		
30	**Arus Masuk Kas**	9.2.1		
31	Penjualan Investasi Jangka Panjang	9.2.1.1	-	-
32	Penjualan Aktiva Tetap	9.2.1.2	505.034.126,00	42.760.000,00
33	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**505.034.126,00**	**42.760.000,00**
34	**Arus Keluar Kas**	9.2.2		
35	Perolehan Modal Tanah	9.2.2.1	-	-
36	Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	9.2.2.2	103.557.504.743,48	62.160.897.084,00
37	Perolehan Modal Gedung dan Bangunan	9.2.2.3	43.416.541.452,75	53.614.816.421,00
38	Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2.4	102.648.521.200,00	127.909.902.613,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2.5	3.188.874.942,00	463.668.600,00
40	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2.6	3.166.534.175,00	2.245.420.003,00
41	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**255.977.976.513,23**	**246.394.704.721,00**
42	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	9.2.3	**(255.472.942.387,23)**	**(246.351.944.721,00)**
43				
44	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	9.3		
45	**Arus Masuk Kas**	9.3.1		
46	SiLPA Tahun anggaran yang lalu	9.3.1.1	-	-
47	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
48	Transfer dari Dana Cadangan		-	-
49	Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan		-	-
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1.2	-	4.170.000,00
51	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	**4.170.000,00**
52	**Arus Keluar Kas**	9.3.2		
53	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	-
54	Transfer ke Dana Cadangan		-	-
55	Penyertaan Modal	9.3.2.1	-	-
56	Pembayaran Utang Pokok	9.3.2.2	-	-
57	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
58	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	9.3.3	-	**4.170.000,00**
59				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian	Catatan	Tahun 2017	Tahun 2016
60	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	9.4		
61	**Arus Masuk Kas**	9.4.1		
62	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
63			0,00	0,00
64	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**
65	**Arus Keluar Kas**	9.4.2		
66	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
67			0,00	0,00
68	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**
69	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	9.4.3	**0,00**	**0,00**
70				
71	**Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode**		**2.633.270.295,33**	**(33.277.692.758,64)**
72	**Saldo Awal Kas di Kas Daerah**		**275.264.586.878,92**	**313.127.408.261,28**
73	**Saldo Awal Kas BLUD Dinas Kesehatan**		**2.536.318.146,84**	**2.011.116.501,81**
74	**Saldo Awal Kas BLUD RSUD**		**28.036.186.781,37**	**23.996.654.589,68**
75	**Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan**		**3.406.500,00**	
76	**Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan BLUD**		**16.988.287,00**	
77	**Saldo Akhir Kas**		**308.490.756.889,46**	**305.857.486.594,13**
78	**Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara**		**279.929.243.287,63**	**275.264.586.878,92**
79	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**		**6.477.000,00**	**3.406.500,00**
80	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD**		**35.213.025,00**	**16.988.287,00**
81	**Saldo Akhir Kas BLUD Dinas Kesehatan**		**3.527.548.931,14**	**2.536.318.146,84**
82	**Saldo Akhir Kas BLUD RSUD**		**23.695.743.471,85**	**28.036.186.781,37**
83	**Saldo Akhir Kas BOS**		**1.296.531.173,84**	-

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat. Setelah tahun anggaran 2017 berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 berbasis akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Kota telah menerapkan basis akuntansi akrual sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Madiun.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan, posisi aset, posisi kewajiban, posisi ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Selain itu, setiap entitas pelaporan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagai para pengguna (*stakeholders*) dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Maksud dan tujuan dari penyusunan LKPD antara lain:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaaan daerah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah.
2. Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah tercapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penerimaan Daerah;
10. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Ringkasan

Memberikan informasi mengenai LKPD Tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLk).

Bab I Pendahuluan

Memberikan informasi mengenai maksud dan tujuan serta landasan hukum penyusunan LKPD Tahun 2017

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan APBD 2017

Memberikan informasi mengenai ekonomi makro dan kebijakan keuangan APBD Tahun Anggaran 2017.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selama tahun anggaran 2017.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam menyusun LKPD Tahun 2017.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Bab VII Penjelasan Pos-Pos Neraca

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca.

Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Operasional (LO).

Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Arus Kas.

Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab XI Informasi Non Keuangan

Memberikan informasi non keuangan Pemerintah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2017 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
2

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

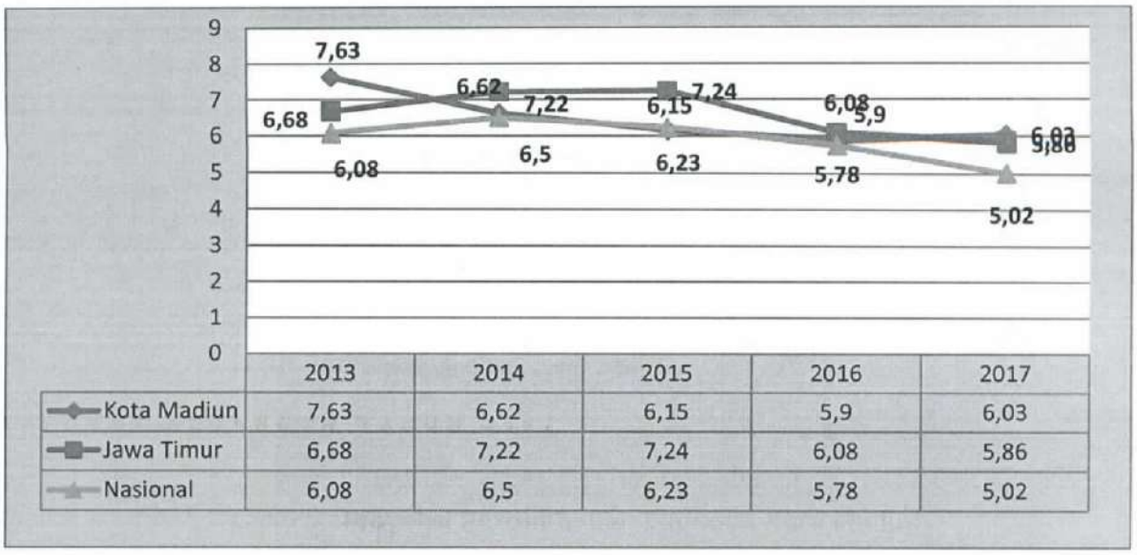
Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun mencerminkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian daerah Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) yaitu dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun



	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Madiun	7,63	6,62	6,15	5,9	6,03
Jawa Timur	6,68	7,22	7,24	6,08	5,86
Nasional	6,08	6,5	6,23	5,78	5,02

Sumber : KUA Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2013-2017 menunjukkan tren yang meningkat. Namun Pada 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sedikit mengalami penurunan yakni hanya sebesar 6,03 persen, akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan ini dikarenakan adanya dampak dari perekonomian global, Nasional dan juga regional jawa timur yang juga mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang relatif tinggi ini menggambarkan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, secara riil mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah, dan juga mencerminkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah yang baik. Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2015 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2015

Indikator	Realisasi			Proyeksi
	2013	2014	2015	2016
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,68	6,62	6,15	5,90
PDRB ADHB (juta rupiah)	8.390.362,8	9.214.205,4	10.192.067,5	11.185.109,4
PDRB ADHK (juta rupiah)	7470676,7	7.965.509,6	8.455.436,3	8.954.697,1
PDRB per Kapita (juta rupiah)	37,25	42,09	44,93	46,77
TPT (%)	6,71	6,66	6,93	6,82
IPM	66,74	67,55	68,14	68,95
Inflasi	7,52	7,4	2,75	2,25

*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Target/Proyeksi*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.2. PRODUK DOMISTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat dibawah ini.

Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2010 Sampai Tahun 2014

Tahun	PDRB (Rp)		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku (Juta)	Harga Konstan (Juta)	
2013	8.390.362,8	7.470.676,7	7,68
2014	9.214.205,4	7.965.509,6	6,62
2015	10.192.067,5	8.455.436,3	6,15
2016	11.185.109,4	8.954.697,1	5,90
2017	12.216.604,38	9.494.978,0	6,03

*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Angka Sementara*

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 8.390362,8 juta dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 7.470676,7 juta, terus meningkat hingga mencapai Rp. 12.216.604,38 juta untuk harga berlaku dan Rp. 9.494.978,0 juta untuk harga konstan pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB Kota Madiun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi di tahun tersebut dan naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi diantaranya yang cukup signifikan sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor industri pengolahan; sektor jasa; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 s/d 2014 (%)

No.	SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	1,96	1,83	1,72	1,47	1,29
2	Pertambanagan dan penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
3	Industri pengeloahan	17,74	15,81	15,53	15,41	15,52
4	Listrik, gas dan air bersih	1,21	1,17	1,14	1,10	1,07
5	Bangunan	5,20	5,61	5,56	5,46	5,22
6	Perdagangan, hotel dan restoran	43,27	44,91	45,44	46,47	47,18
7	Angkutan dan komunikasi	7,79	7,84	7,81	7,82	7,76
8	Keuangan, persewan dan jasa perusahaan	8,24	8,50	8,95	8,97	9,05
9	Jasa-jasa	14,57	14,31	13,84	13,28	12,90
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Angka Sementara*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2010 sampai tahun 2014 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa yang secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 75,56%. Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 s/d 2014 (%)

No.	SEKTOR	2010	2011	2012	2013	2014*)
1	Pertanian	2,01	1,86	1,74	1,59	1,45
2	Pertambanagan dan penggalian	0,02	0,02	0,02	0,01	0.01
3	Industri pengeloahan	17,35	16,19	16,27	16,01	16,25
4	Listrik, gas dan air bersih	1,08	1,07	1,06	1,04	1,03
5	Bangunan	4,10	4,21	4,19	4,17	4,11
6	Perdagangan, hotel dan restoran	43,27	44,34	44,60	45,72	45,89
7	Angkutan dan komunikasi	8,80	8,94	8,92	8,91	8,87
8	Keuangan, persewan dan jasa perusahaan	7,95	8,11	8,13	8,08	8,13
9	Jasa-jasa	15,43	15,27	15,06	14,47	14,26
	PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Angka Sementara*

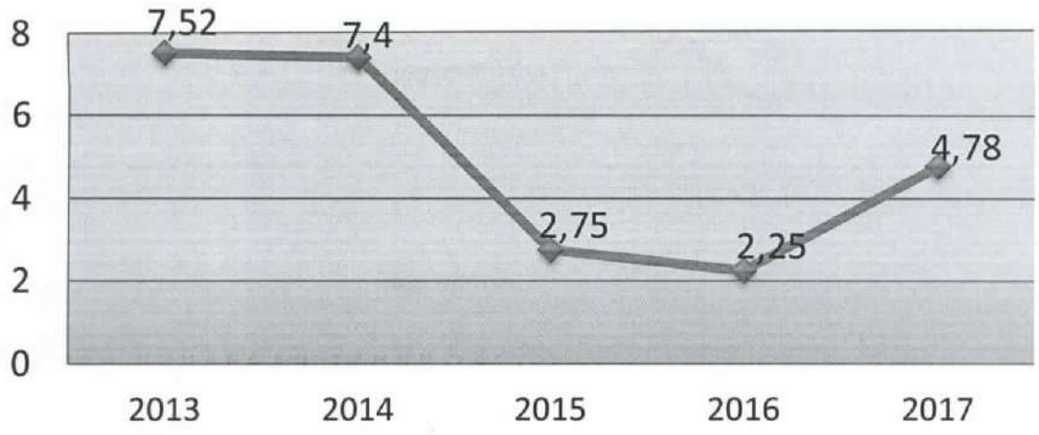
Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2014 yaitu dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 76,40%. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

2.1.3. INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2010-2014



*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Angka Sementara*

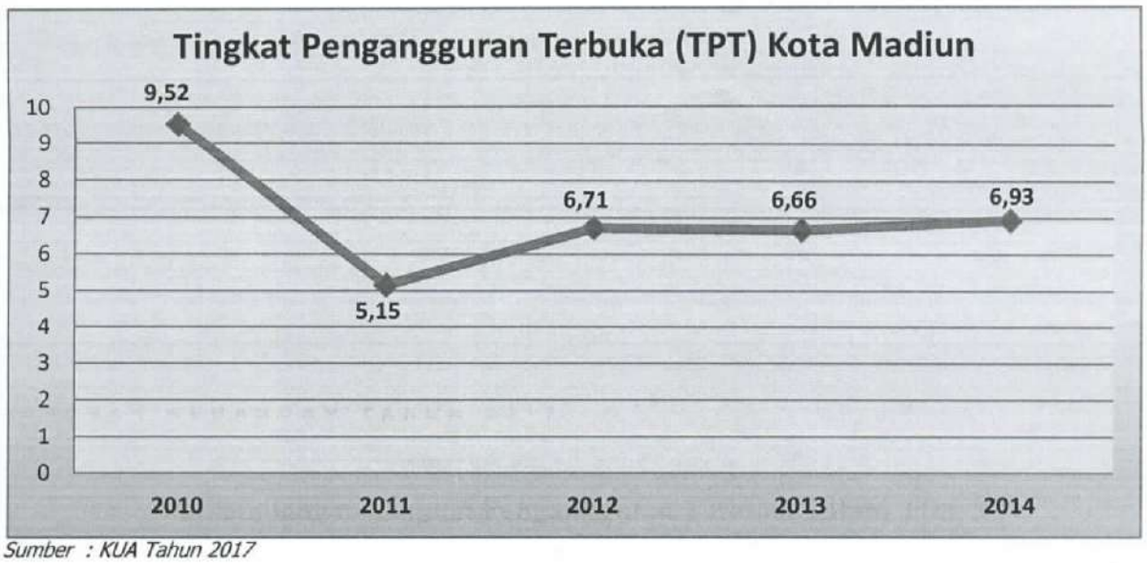
Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2013s/d 2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, inflasi sempat meningkat mencapai 7,52 persen, lalu menurun pada tahun berikutnya menjadi 7,4 persen sampai dengan tahun 2015 mencapai 2,75 persen. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kembali mencapai 2,25 persen dan pada tahun 2017 inflasi sebesar 4,78 persen. Peningkatan inflasi tersebut salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga BBM.

2.1.4. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggungjawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa SKPD harus salain mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2014



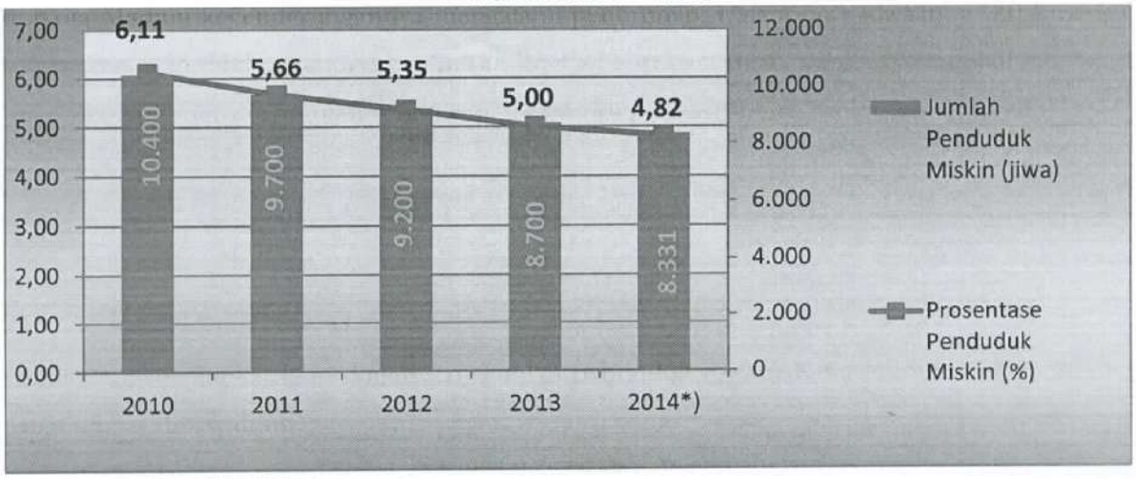
Sumber : KUA Tahun 2017

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,52 persen menjadi 6,71 persen pada tahun 2012, pada akhir tahun 2013 sedikit mengalami penurunan kembali, menjadi 6,66 persen tetapi pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar 6,93 persen. Berdasarkan pada data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun kecenderungannya mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang secara global dan Nasional yang memang mengalami penurunan yang berimbas pada ekonomi daerah kota Madiun.

2.1.5. KEMISKINAN)

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2010-2014 dapat dilihat dibawah ini.

Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2010 – 2014



*Sumber: KUA Tahun 2017 *) Angka sementara*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami penurunan, pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 4,82% Hal ini menunjukkan keberhasilannya program penanggulangan kemiskinan.

2.1.6. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2014

Indeks	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
IPM	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74
Indeks Kesehatan	76,69	77,03	77,37	78,15	78,43
Angka Harapan Hidup	72,38	72,41	72,41	72,44	72,49
Indeks Pendidikan	88,36	88,39	88,47	88,84	89,15
Angka Melek Huruf	97,79	97,80	97,84	98,15	98,30
Rata-rata Lama Sekolah	10,86	10,90	11,08	11,09	11,30
Indeks PPP	64,78	65,77	66,66	67,52	68,33
Daya Beli (000 Rp)	14.604	14.634	14.723	15.300	15.507

*Sumber : KUA Tahun 2017 *) Angka sementara*

IPM Kota Madiun pada tahun 2017 mencapai 69,74 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yang mencapai 68,95. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.
Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Karena semua komponen pendukung IPM mengalami kenaikan yaitu indeks pendidikan, indeks Kesehatan dan indeks PPP.

2.1.7. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO KOTA MADIUN 2017

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian eksternal, karena kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kota Madiun telah mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah yakni keterkaitan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan kondisi perekonomian propinsi, nasional bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan memiliki pengaruh pada perekonomian Kota Madiun.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2015-2017 dapat dilihat dalam indikator ekonomi dibawah ini.

Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2015 – 2017

	Proyeksi		
	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,15	5,90	6,03
PDRB ADHB (juta rupiah)	10.192.067,5	11.185.109,4	12.216.604,38
PDRB ADHK (juta rupiah)	8.455.436,3	8.954.697,1	9.494.978,0
PDRB per Kapita (juta rupiah)	44,77	45,61	46,45
TPT (%)	6,82	6,5	6,28
IPM	68,95	69,74	0
Inflasi	2,75	2,25	4,78

Sumber : KUA Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2016 dan 2017 diproyeksikan akan mencapai 5,90 dan 6,03 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 diperkirakan menjadi 6,5 persen dan diharapkan terus menurun sampai 6,28 persen pada tahun 2017. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 69,74 dan terus meningkat sampai 0 pada tahun 2017.

Untuk mendukung capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
b. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif
c. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal
d. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul
e. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat
f. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran
g. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan
h. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing
i. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri
j. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, selain itu otonomi daerah juga sebagai motivasi kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah.

Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2013-2014 dan proyeksi 2015-2017 menunjukkan adanya tren kenaikan yang berasal dari kenaikan pendapatan daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pertumbuhan pajak daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, disamping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

2.2.1.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

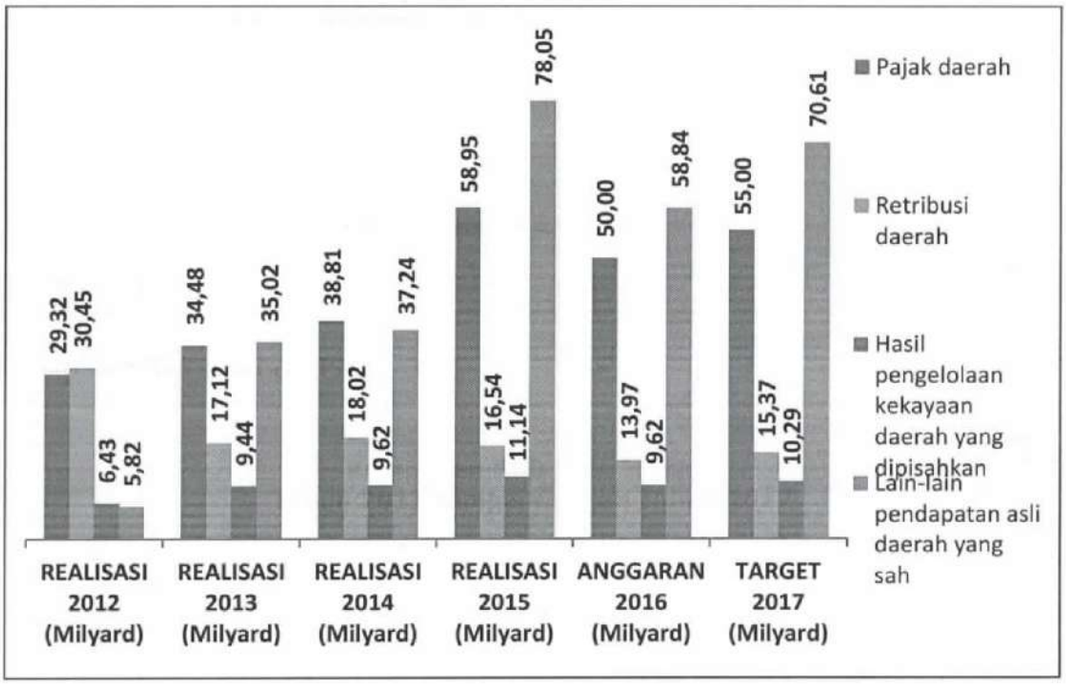
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam menentukan rencana pendapatan daerah, diupayakan untuk memperhatikan potensi yang ada dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya serta tahun berjalan. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya pengeluaran dapat dilakukan dalam bentuk belanja daerah serta pembiayaan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

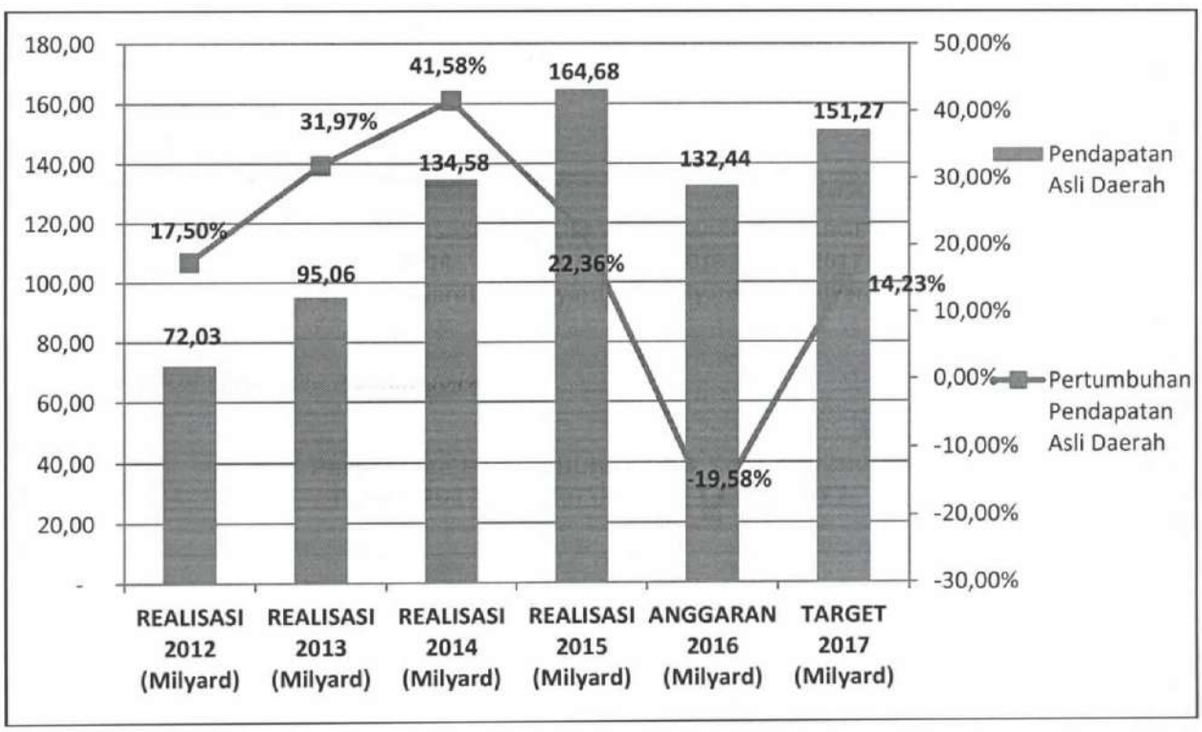
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen PAD Kota Madiun
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017



Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017



Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Komponen Lain-Lain PAD yang Sah dan Pajak Daerah merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan besarnya tingkat pendapatan asli daerah, yaitu mencapai Rp55.000.000.000,00 atau 10 % dari nilai PAD untuk Pajak Daerah danRp. 70.613.110.800,00 atau 20 % dari nilai PAD untuk Lain-Lain PAD yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Proyeksi Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2017 diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Dana Perimbangan Kota Madiun pada tahun 2017 diproyeksikan Rp. 671.272.066.000,00. Kontribusi dana alokasi umum masih mendominasi komponen dana perimbangan dengan Dana Alokasi Umum yang diproyeksikan sebesar Rp. 511.357.289.000,00 (asumsi sama dengan DAU tahun sebelumnya).

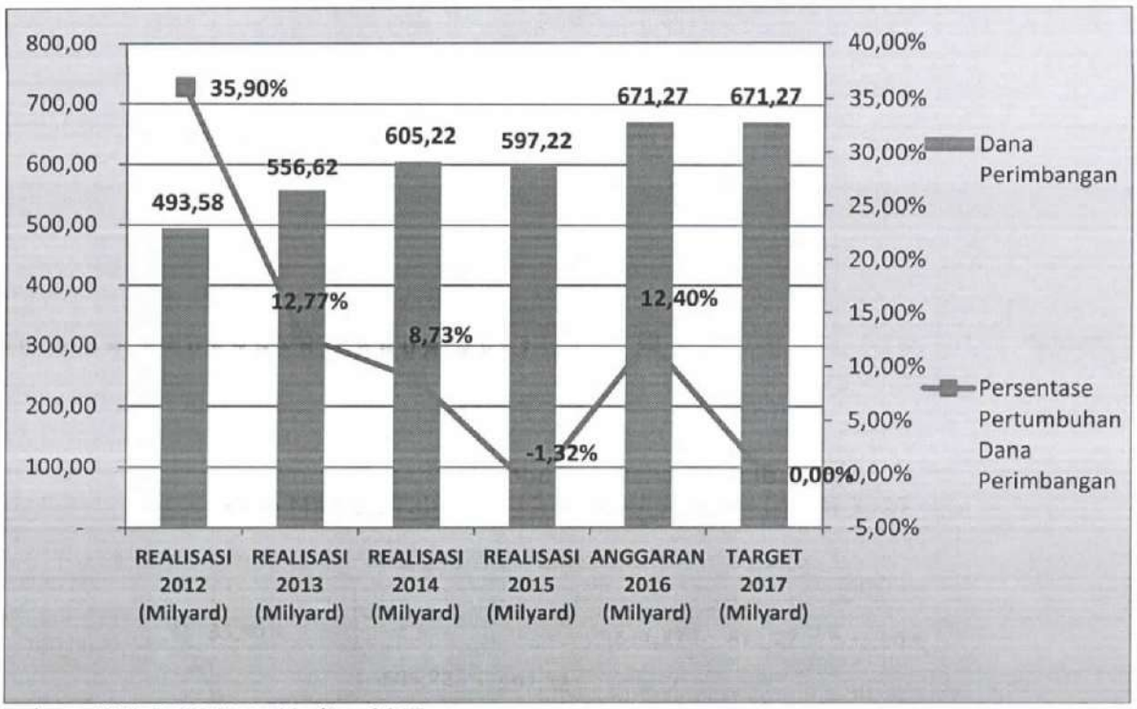
Persentase Komponen Dana Perimbangan
Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017



Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan
Kota Madiun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017



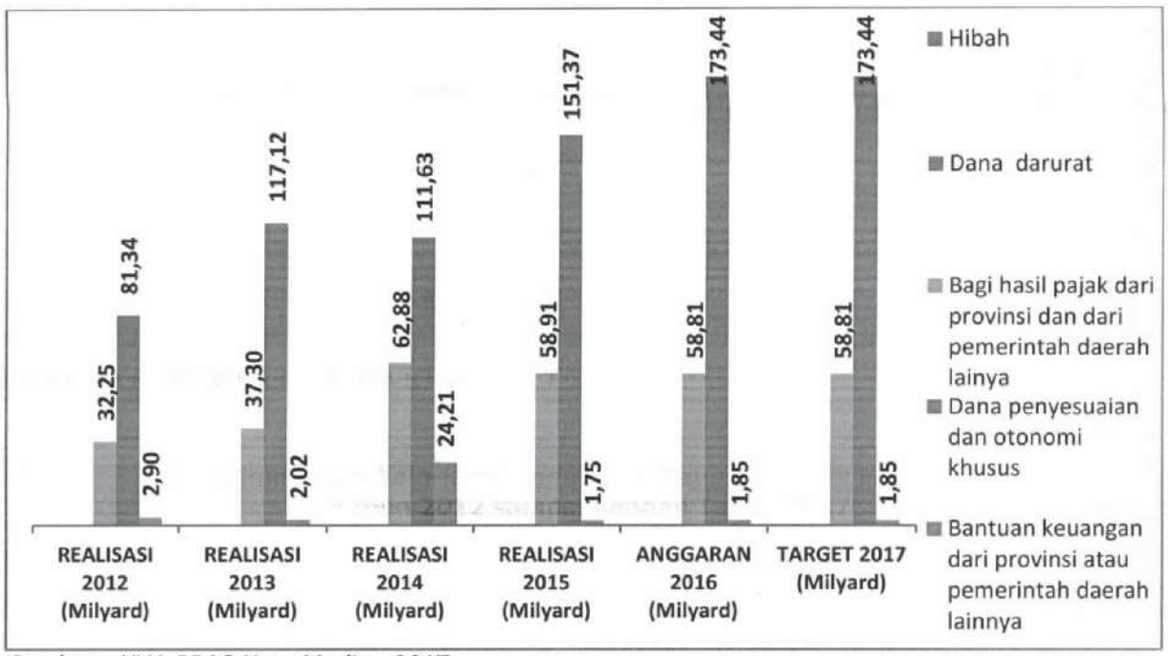
Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Proyeksi tahun 2017 menunjukkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 234.097.330.000,00 (asumsi sama dengan tahun sebelumnya). Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan dengan tahun 2016.

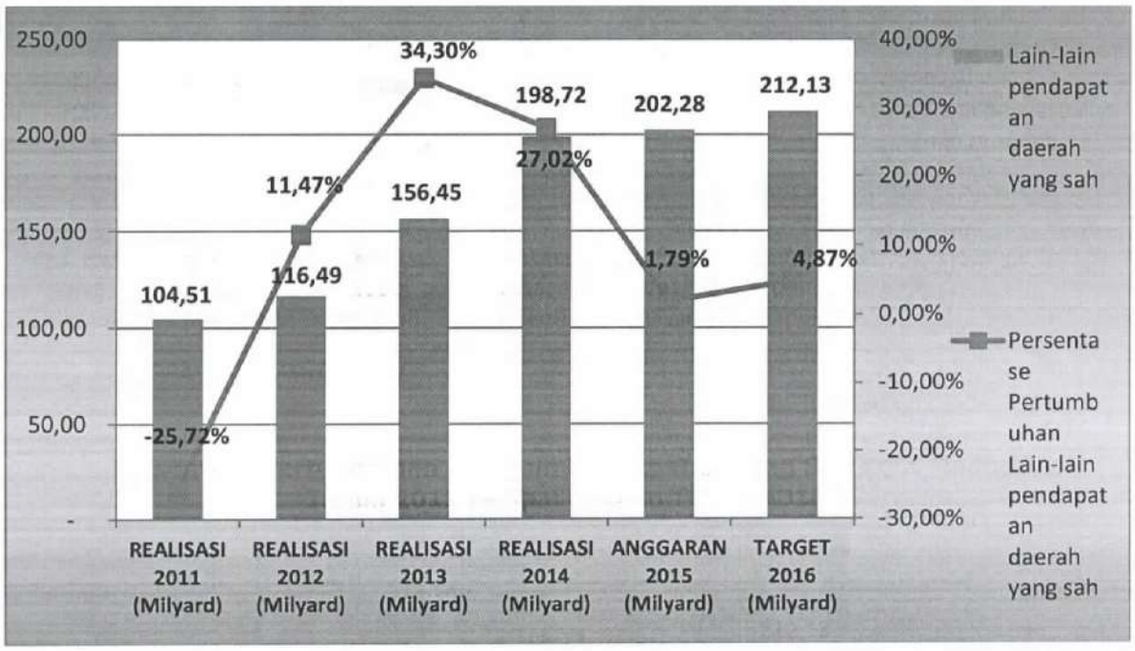
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017



Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016



Sumber : KUA PPAS Kota Madiun 2017

2.2.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

2.2.2.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2017 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah; dan (4) evaluasi capaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RKPD Kota Madiun tahun 2015. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan

maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2017 adalah **"Peningkatan Kemandirian ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi Potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang prima ".**

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengentasan kemiskinan dan oleh pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan prima di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun ketiga RPJMD Kota Madiun 2014-2019.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2017 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan.
b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan
c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah
d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
e. Peningkatan Pelayanan Publik
f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

2.3. TARGET KINERJA APBD

Sebagai bentuk dari anggaran berbasis kinerja maka setiap pengeluaran belanja daerah harus memiliki kejelasan hasil dengan ditetapkannya target-target capaian pada setiap program dan kegiatan dari urusan pemerintah. Secara ringkas target pencapaian kinerja tahun anggaran 20165 pada setiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Urusan Pangan
10. Urusan Pertanahan
11. Urusan Lingkungan Hidup
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Urusan Perhubungan\
15. Urusan Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Urusan Penanaman Modal
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
19. Urusan Statistik
20. Urusan Persandian
21. Urusan Kebudayaan
22. Urusan Perpustakaan
23. Urusan Kearsipan

2.3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

2.3.3. TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Target kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tahun anggaran 2017 dapat tercermin melalui pelaksanaan program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.1. URUSAN WAJIB

Urusan wajib di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 23 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial
7. Urusan Tenaga Kerja
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Urusan Pangan
10. Urusan Pertanahan
11. Urusan Lingkungan Hidup
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Urusan Perhubungan
15. Urusan Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Urusan Penanaman Modal
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
19. Urusan Statistik
20. Urusan Persandian
21. Urusan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22. Urusan Perpustakaan
23. Urusan Kearsipan

3.2. URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan di Pemerintah Kota Madiun terdiri dari 6 bidang kewenangan sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Urusan Perdagangan
7. Urusan Perindustrian
8. Urusan Transmigrasi

3.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Pencapaian kinerja keuangan untuk urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD disajikan dalam lampiran laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Daerah Kota Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

(01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah.

(02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

(04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.

(05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pangeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah.

(06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

(07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir.

(08) Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN

(09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya.

(10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(11) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya.

(12) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi.

(13) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya.

(14) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(15) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

(16) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 meliputi:

(17) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

(18) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

(19) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

(20) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Neraca

(21) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Operasional

(22) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Laporan Arus Kas

(23) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Laporan Perubahan Ekuitas

(24) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Catatan atas Laporan Keuangan

(25) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pendapatan

(26) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Belanja dan Beban

(27) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Aset

(28) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Kewajiban

(29) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

(30) Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Laporan Keuangan Konsolidasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 5

PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

5.1. PENDAPATAN

5.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
PAD	192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120.10%	173.235.929.827,80

Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli daerah (PAD) pada tahun 2017, terealisasi sebesar Rp230.608.717.369,14 atau mencapai 120,10% yang berarti Rp38.600.089.462,23 atau 20,10% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp192.013.251.000,00. Realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp230.613.340.462,23 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp173.235.929.827,80 terjadi kenaikan sebesar Rp57.372.787.541,34 atau 33,12%.

Perincian anggaran dan realisasi PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	129,70%	64.045.559.079,36
Retribusi Daerah	15.963.010.000,00	18.407.218.016,50	115,31%	16.762.538.293,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.093.398.000,00	13.320.249.415,39	110,14%	11.172.031.994,51
Lain-lain PAD yang sah	105.956.843.000,00	123.656.418.351,81	116,70%	81.255.800.460,93
Total	192.013.251.000,00	230.608.717.369,14	120,10%	173.235.929.827,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.1.1. Pajak Daerah

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pajak Daerah	58.000.000.000,00	75.224.831.585,44	129,70%	64.045.559.079,36

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp75.224.831.585,44 atau mencapai 129,70% yang berarti Rp17.224.831.585,44atau 29,70% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp58.000.000.000,00. Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.244.831.585,44 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 Rp64.045.559.079,36 terjadi kenaikan sebesar Rp11.179.272.506,08 atau 17,46%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Daerah	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pajak hotel	3.600.000.000,00	4.974.716.454,00	138,19%	3.997.471.040,00
2. Pajak restoran	4.950.000.000,00	7.184.100.061,77	145,13%	5.564.700.875,66
3. Pajak hiburan	930.000.000,00	1.303.023.863,00	140,11%	1.197.021.728,00
4. Pajak reklame	2.475.000.000,00	2.774.982.703,00	112,12%	2.629.612.677,50
5. Pajak penerangan jalan	16.080.000.000,00	18.503.214.981,13	115,07%	16.443.170.206,10
6. Pajak parkir	690.000.000,00	1.349.788.267,00	195,62%	935.730.053,00
7. Pajak air tanah	275.000.000,00	302.830.125,54	110,12%	299.662.989,00
8. BPHTB	13,000.000.000,00	20.375.963.778,00	156,74%	15.078.722.102,10
9. PBB	16.000.000.000,00	18.456.211.352,00	115,35%	17.899.467.408,00
Total	**58.000.000.000,00**	**75.224.831.585,44**	**129,70%**	**64.045.559.079,36**

1. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017sebesar Rp4.974.716.454,00 atau mencapai 138,19% yang berarti Rp1.374.716.454,00 atau 38,19% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.600.000.000,00. Perincian realisasi pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	16.779.250,00	16.779.250,00	100,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	4.978.440.657,00	4.957.937.204,00	99,59%
Total	**4.995.219.907,00**	**4.974.716.454,00**	**99,59%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh tingkat hunian hotel dan kesadaran wajib pajak hotel dalam melakukan pembayaran pajak hotel sesuai potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak sampai dengan tahun 2016.

Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.974.716.454,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun 2016 sebesar Rp3.997.471.040,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp977.245.414,00 atau 24,45%.

2. Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2017sebesar Rp7.184.100.061,77 atau mencapai 145,13% yang berarti Rp2.234.100.061,77 atau 45,13% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.950.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Restoran	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	100.026.968,00	24.916.418,00	24,91%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	6.999.149.520,48	6.987.945.643,77	99,84%
3. Karcis benda berharga/PP1 2017	171.238.000,00	171.238.000,00	100,00%
Total	**7.270.414.488,48**	**7.184.100.061,77**	**98,81%**

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran.

Realisasi pajak restoran tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.184.100.061,77 dibandingkan dengan realisasi pajak restoran tahun 2016 sebesar Rp5.564.700.875,66 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.619.399.186,11 atau 29,10%.

3. Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2017sebesar Rp1.303.023.863,00 atau mencapai 140,11% yang berarti Rp373.023.863,00 atau 40,11% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp930.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak hiburan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hiburan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	70.767.275,00	54.894.175,00	77,57%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	1.266.020.438,00	1.248.129.688,00	98,59%
3. Karcis	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.336.787.713,00**	**1.303.023.863,00**	**97,47%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian target kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak hiburan dalam melakukan pembayaran pajak hiburan.

Realisasi pajak hiburan tahun anggaran 2017sebesar Rp1.303.023.863,00 dibandingkan dengan realisasi pajak hiburan tahun 2016 sebesar Rp1.197.021.728,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp106.002.135,00 atau 8,86%.

4. Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.774.982.703,00 atau mencapai 112,12% yang berarti sebesar Rp299.982.703,00 atau 12,12% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.475.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Reklame	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	37.381.000,00	6.826.100,00	18,26%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	2.787.017.108,00	2.768.156.603,00	99,32%
Total	**2.824.398.108,00**	**2.774.982.703,00**	**98,25%**

Pencapaian target kinerja pajak reklame sesuai dengan potensi riil dan hasil penagihan piutang pajak reklame sampai tahun 2016.

Realisasi pajak reklame tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.774.982.703,00 dibandingkan dengan realisasi pajak reklame tahun 2016 sebesar Rp2.629.612.677,50 atau terjadi peningkatan sebesar Rp145.370.025,50 atau 5,53%.

5. Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2017 sebesar Rp18.503.214.981,13 atau mencapai 115,07% yang berarti Rp2.423.214.981,13 atau 15,07% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp16.080.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak penerangan jalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	1.408.219.478,00	1.408.219.478,00	100,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	18.713.603.982,95	17.094.995.503,13	91,35%
Total	**20.121.823.460,95**	**18.503.214.981,13**	**91,96%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian target kinerja pajak penerangan jalan dipengaruhi oleh kenaikan tarif dasar listrik dan peningkatan jumlah pelanggan listrik oleh masyarakat Kota Madiun dan pembayaran piutang pajak penerangan jalan sampai tahun 2016.

Realisasi pajak penerangan jalan tahun anggaran 2017 sebesar Rp18.503.214.981,13 dibandingkan dengan realisasi pajak penerangan jalan tahun 2016 sebesar Rp16.443.170.206,10 atau terjadi kenaikan sebesar Rp2.060.044.775,03 atau 12,53%.

6. Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.349.788.267,00 atau mencapai 195,62% yang berarti Rp659.788.267,00 atau 95,62% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp690.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Parkir	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	1.349.788.267,00	1.349.788.267,00	100,00%
Total	**1.349.788.267,00**	**1.349.788.267,00**	**100,00%**

   Hal ini sesuai dengan pendataan dan pemeriksaan terhadap potensi riil pajak parkir swasta.

   Realisasi pajak parkir tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.349.788.267,00 dibandingkan dengan realisasi pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp935.730.053,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp414.058.214,00 atau 44,25%.

7. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2017 sebesar Rp302.830.125,54 atau mencapai 110,12% yang berarti Rp27.830.125,54 atau 10,12% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp275.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Air tanah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	2.042.950,00	0,00	-
2. Pendapatan LO / SKP 2017	300.899.743,94	302.830.125,54	99,36%
Total	**302.942.693,94**	**302.830.125,54**	**100,03%**

   Pencapaian target kinerja pajak air tanah sesuai dengan potensi riil pajak air tanah. Realisasi pajak air tanah tahun anggaran 2017 sebesar Rp302.830.125,54 dibandingkan dengan realisasi pajak air tanah tahun 2016 sebesar Rp299.662.989,00 atau kenaikan sebesar Rp3.167.136,54 atau 1,06%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.375.963.778,00 atau mencapai 156,74% yang berarti Rp7.375.963.778,00atau 156,74% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp13.000.000.000,00.

   Perincian realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	20.375.963.778,00	20.375.963.778,00	100,00%
Total	**20.375.963.778,00**	**20.375.963.778,00**	**100,00%**

   Pencapaian target kinerja bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dipengaruhi adanya permohonan pengalihan hak atas tanah dan bangunan baik melalui proses waris, pembagian hak bersama, hibah dan transaksi jual beli. Namun demikian potensi ini sangat tergantung jumlah transaksi jual beli tanah dan atau bangunan yang terjadi di masyarakat. Semakin banyak transaksi yang terjadi semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

   Realisasi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.375.963.778,00 dibandingkan dengan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2016 sebesar Rp15.078.722.102,10 atau terjadi peningkatan sebesar Rp5.297.241.675,90 atau 35,13%.

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2017sebesar Rp18.456.211.352,00 atau mencapai 115,35% yang berarti Rp2.456.211.352,00 atau 15,35% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp16.000.000.000,00.

   Perincian realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	2.134.179.815,00	1.463.042.134,00	68,56%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	19.073.326.203,00	16.993.169.218,00	89,09%
Total	**21.207.506.018,00**	**18.456.211.352,00**	**87,03%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pencapaian target kinerja PBB dipengaruhi adanya peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan petugas penagih piutang PBB sampai dengan tahun 2016

Realisasi pajak PBB tahun anggaran 2017sebesar Rp18.456.211.352,00 dibandingkan dengan realisasi pajak PBB tahun 2016 sebesar Rp17.899.467.408,00 atau terjadi kenaikansebesar Rp556.743.944,00 atau 3,11%.

5.1.1.2. Retribusi Daerah

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Retribusi Daerah	**15.963.010.000,00**	**18.407.218.016,50**	**115,31%**	**16.759.131.293,00**

Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp18.407.218.016,50 atau 115,31% yang berarti Rp2.444.208.016,50 atau 15,31% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp15.963.010.000,00. Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp18.407.218.016,50dibandingkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2016 sebesar Rp16.759.131.793,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.644.679.723,50 atau lebih tinggisebesar 9,81%.

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perbandingan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beberapa SKPD tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga disajikan kembali beberapa SKPD sesuai struktur organisasi pada tahun anggaran 2016.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi Daerah SKPD	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas PU TR	**1.922.000.000,00**	**2.543.695.440,00**	**132,35 %**	**1.890.860.587,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	422.000.000,00	961.998.440,00	277,96%	704.464.587,00
c. Perizinan tertentu	1.500.000.000,00	1.581.697.000,00	105,45%	1.186.396.000,00
DLH	**235.000.000,00**	**330.997.500,00**	**140,85%**	**419.238.000,00**
a. Jasa Umum	206.000.000,00	202.657.500,00	98,38%	347.488.000,00
b. Jasa Usaha	29.000.000,00	128.340.000,00	442,55%	71.750.000,00
Dinas Perhubungan	**1.963.491.000,00**	**2.022.711.400,00**	**103,02%**	**3.255.233.350,00**
a. Jasa Umum	1.611.880.000,00	1.679.171.500,00	104,17%	1.652.224.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Jasa Usaha	348.551.000,00	340.959.900,00	97,82%	1.599.769.350,00
c. Perizinan tertentu	3.060.000,00	2.580.000,00	84,31%	3.240.000,00
Dinas Budparpora	**200.425.000,00**	**201.936.389,00**	**100,75%**	**1.511.389,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
b. Jasa Usaha	200.425.000,00	201.936.389,00	100,75%	0,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00%	0,00
BagianPemerintahan	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**1.877.027.296,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
b. Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00%	1.877.027.296,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00%	0,00
BKD	**170.000.000,00**	**237.700.000,00**	**139,82%**	**253.650.000,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
b. Jasa Usaha	170.000.000,00	237.700.000,00	139,82%	253.650.000,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD	**6.178.058.000,00**	**6.762.658.573,00**	**109,46%**	**2.576.864.692,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	6.178.058.000,00	6.762.658.573,00	109,46%	2.576.864.692,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Kec Kartoharjo	**935.000.000,00**	**1.265.788.437,00**	**135,38%**	**1.117.054.840,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	935.000.000,00	1.265.788.437,00	135,38%	1.117.054.840,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Kec Manguharjo	**506.500.000,00**	**615.401.395,00**	**121,50%**	**591.396.810,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	506.500.000,00	615.401.395,00	121,50%	591.396.810,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Kec Taman	**400.000.000,00**	**481.455.277,50**	**120,36%**	**517.161.100,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	400.000.000,00	481.455.277,50	120,36%	517.161.100,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Pertanian& KP	**58.244.000,00**	**52.774.400,00**	**90,61%**	**57.334.000,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa Usaha	58.244.000,00	52.774.400,00	90,61%	57.334.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Perdagangan	**3.394.292.000,00**	**3.892.099.205,00**	**114,67%**	**3.537.626.554,00**
a. Jasa Umum	0,00	,00	00,00%	3.537.626.554,00
b. Jasa Usaha	3.320.414.000,00	3.818.220.705,00	114,99%	0,00
c. Perizinan tertentu	73.878.000,00	73.878.500,00	100,00%	0,00
Dinas Perindag	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**669.091.064,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
b. Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00%	181.949.064,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	0,00%	487.142.000,00
Dinas Pasar	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3.537.626.554,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00	0,00%	3.537.626.554,00
b. Jasa Usaha	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	**15.963.010.000,00**	**18.407.218.016,50**	**115,31%**	**16.762.538.293,00**

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU TR)

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum .

b. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga .

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp314.150.000,00 atau mencapai 232.70% yang berarti Rp179.150.000,00 atau 132,70% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar 135.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	314.150.000,00	314.150.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**314.150.000,00**	**314.150.000,00**	**100,00%**

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp314.150.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

daerahtahun 2016 sebesar Rp464.730.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp150.580.000,00 atau 32,40%.

☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp647.848.440,00 atau mencapai 225,73% atau yang berarti Rp360.848.440,00 atau 125,73% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp287.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	647.848.440,00	647.848.440,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0.00	0,00	0.00%
Total	**647.848.440,00**	**647.848.440,00**	**100,00%**

Hal ini disebabkan karena pembayaran beberapa sewa kios baru dibayarkan tahun 2017. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2017 sebesar Rp647.848.440,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2016 sebesar Rp239.734.587,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp408.113.853,00 atau 36,56%.

c. Retribusi perizian tertentu berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

☑ Realisasi retribusi IMB sebesar Rp1.581.697.000,00 atau mencapai 105,45% yang berarti Rp81.697.000,00 atau 5,45% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00. Perincian realisasi retribusi IMB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi IMB	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.581.697.000,00	1.581.697.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.581.697.000,00**	**1.581.697.000,00**	**100,00%**

Realisasi retribusi IMB tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.581.697.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi IMB tahun 2016 sebesar Rp1.186.396.000,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp395.301.000,00 atau 33,32% lebih tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

a. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

☑ Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp202.657.500,00 atau mencapai 98,38 % yang berarti Rp3.342.500,00 atau 1,62% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp206.000.000,00.

Perincian realisasi pelayanan persampahan/kebersihan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pelayanan persampahan/ kebersihan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	202.657.500,00	202.657.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**202.657.500,00**	**202.657.500,00**	**100,00%**

Realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2017 sebesar Rp202.657.500,00 dibandingkan dengan realisasi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2016 sebesar Rp347.488.000,00 atau terjadi Penurunan sebesar Rp144.830.500,00 atau 41,68%.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

☑ Realisasi tempat rekreasidan olahraga sebesar Rp128.340.000,00 atau mencapai 442,55% yang berarti Rp99.340.000,00 atau 342,55% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp 29.000.000,00.

Perincian realisasi tempat hiburan rakyat dan olahraga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tempat hiburan rakyat dan olahraga	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	86.360.000,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	438.098.000,00	128.340.000,00	29,29%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**524.458.000,00**	**128.340.000,00**	**24,47%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penurunan ini terjadi karena penyewa alun alun di batasi untuk keperluan pemerintah saja.Realisasi tempat hiburan rakyat dan olahraga tahun anggaran 2017 sebesar Rp128.340.000,00 dibandingkan dengan realisasi tempat hiburan rakyat dan olahraga tahun 2016 sebesar Rp71.750.000,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp56.590.000,00 atau 78,87%.

c. Dinas Lingkungan Hidup tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

2 Dinas Perhubungan

a. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

☑ Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.083.821.500,00 atau mencapai 97,92% yang berarti Rp23.058.500,00 atau 2,08% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.106.880.000,00.

Perincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.083.821.500,00	1.083.821.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.083.821.500,00**	**1.083.821.500,00**	**100,00%**

Pencapaian target kinerja retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan potensi riil.

Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun anggaran 2017sebesar Rp1.083.821.500,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2016 sebesar Rp1.101.234.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp17.502.500,00 atau2,08 %.

☑ Realisasi retribusi penguji kendaraan bermotor sebesar Rp595.350.000,00 atau mencapai 117,89% yang berarti Rp90.350.000,00 atau 17,89% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp505.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	595.350.000,00	595.350.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**595.350.000,00**	**595.350.000,00**	**100,00%**

Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun anggaran 2017sebesar Rp595.350.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor tahun 2016 sebesar Rp550.900.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp44.450.000,00 atau 8,07 %.

b. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah,retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp135.521.100,00 atau mencapai Rp64.792.100,00 yang berarti 191,61% atau 91,61% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp70.729.000,00.

Perincian realisasi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pemakaian Kekayaan Daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	135.521.100,00	135.521.100,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**135.521.100,00**	**135.521.100,00**	**100,00%**

Realisasi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp135.521.100,00 terdiri dari realisasi pemakaian bahu badan jalan dan retribusi gudang/kios ex terminal barang dan sesuai dengan potensi riil.

☑ Retribusi terminal sebesar Rp886.000,00 mencapai 100% dari target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp886.000,00.

Perincian realisasi terminal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terminal	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	886.000,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	0,00	886.000,00	0,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**886.000,00**	**886.000,00**	**100,00%**

Hal ini sangat dipengaruhi karena retribusi terminal telah melimpah ke pusat sehingga mempengaruhi realisasi retribusi terminal mengalami penurunan.Realisasi terminal tahun anggaran 2017 sebesar Rp886.000,00 dibandingkan dengan realisasi terminal tahun 2016 sebesar Rp1.215.758.850,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.214.872.850,00 .

☑ Realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp204.552.800,00 atau mencapai 73,86% yang berarti Rp72.383.200,00 atau 26,14% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp276.936.000,00.

Perincian realisasi tempat parkir khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tempat parkir khusus	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	204.552.800,00	204.552.800,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**204.552.800,00**	**204.552.800,00**	**100,00%**

Realisasi ini sesuai potensi riil. Retribusi tempat khusus parkir meliputi lahan parkir parkir Sumber Umis. Hal ini sesuai dengan potensi riil.

Realisasi tempat parkir khusus tahun anggaran 2017sebesar Rp204.552.800,00 dibandingkan dengan realisasi tempat parkir khusus tahun 2016 sebesar Rp380.604.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp176.051.200,00 atau 46,25 %.

c. Retribusi perizinan tertentu berupa retribusi izin trayek.

☑ Realisasi izin trayek sebesar Rp2.580.000,00 atau mencapai 84,31% yang berarti Rp480.000,00 atau 15,69% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.060.000,00.

Perincian realisasi izin trayek untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Izin trayek	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**100,00%**

Penurunan realisasi ini disebabkan karena menurunnya jumlah armada angkutan kota dan menurunnya jumlah penumpang sehingga menyebabkan pengusaha angkutan kota maupun koperasi pengelola angkutan kota enggan untuk meremajakan armadanya bahkan menghentikan operasi angkutan kotanya.

Realisasi izin trayek tahun anggaran 2017sebesar Rp2.580.000,00 dibandingkan dengan realisasi izin trayek tahun 2016 sebesar Rp3.240.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp660.000,00 atau 20,37%.

4. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Budparpora)

a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

☑ Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp201.936.389,00 atau mencapai 100,75% yang berarti Rp1.511.389,00 atau 0,75% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp200.425.000,00.

Perincian realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	201.936.389,00	201.936.389,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**201.936.389,00**	**201.936.389,00**	**100,00%**

Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun anggaran 2017 sebesar Rp201.936.389,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2016 sebesar Rp181.949.064,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp19.987.325,00 atau 10,99%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

a. BKD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp237.700.000,00 atau mencapai 139,82% yang berarti Rp67.700.000,00 atau 39,82% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp170.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	237.700.000,00	237.700.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**237.700.000,00**	**237.700.000,00**	**100,00%**

Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan volume kegiatan yang menggunakan gedung diklat baik dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di wilayah Kota Madiun.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp237.700.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp253.650.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp15.950.000,00 atau 6.29%.

c. BKD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)

a. BPKAD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum .

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp6.762.658.573,00 atau mencapai 109,46% yang berarti Rp584.600.573,00 atau 9,46% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.178.058.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	64.115.500,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	6.698.543.073,00	6.762.658.573,00	100,96%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00,	00,00%
Total	**6.762.658.573,00**	**6.762.658.573,00**	**100,00%**

Realisasi ini terdiri atas perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan CARREFOUR yang dikelola oleh PT. KELOLA TAMA PROPERTY yang penerimaannya melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah untuk kawasan hiburan Suncity Festival oleh PT. INDRACO. Kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh retribusi sewa tanah dan bangunan Gedung Graha Bhakti Praja berdasarkan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Madiun dengan CV. SOHANTO ADI PERKASA tentang Penyewaan Gedung Graha Bakti dan sewa plaza madiun/sri ratu yang telah habis masa berlakunya BOT nya sejak tanggal 8 Agustus 2016.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.762.658.573,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp2.576.864.692,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp4.185.793.881,00 atau 16,24%.

c. BPKAD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

7. Kecamatan Kartoharjo

☑ Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum .

☑ Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.265.788.437,00 atau mencapai 135,38% yang berarti Rp330.788.437,00 atau 35,38% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp935.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.158.487.945,00	335.509.315,00	28,96%
3. Pendapatan diterima dimuka	930.279.122,00	930.279.122,00	100,00%
Total	**2.088.767.066,11**	**1.265.788.437,00**	**60,60%**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh kecamatan kartoharjo berupa sewa bengkok untuk ditanami padi. Realisasi pendapatan sewa tanah bengkok dipengaruhi adanya kenaikan dari harga dasar di masing – masing kelurahan (peserta lelang)

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.265.788.437,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp1.117.054.840,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp148.733.597,00 atau 113%.

c. Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

8. Kecamatan Manguharjo

a. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp615.401.395,00 atau mencapai 121,50% yang berarti Rp108.901.395,00 atau 21,50% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp506.500.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016			
2. Pendapatan LO 2017	601.710.456,25	161.912.938,75	26,91%
3. Pendapatan diterima dimuka	453.488.456,25	453.488.456,25	100,00%
Total	**1.055.198.912,50**	**615.401.395,00**	**58,32%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Manguharjo meliputi sewa tanah bengkok yang ditanami padi di 7 kelurahan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh hasil lelang harga sewa bengkok.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp615.401.395,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp591.396.810,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp24.004.585,00 atau 4,06%.

c. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

9. Kecamatan Taman

a. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp481.455.277,50 atau mencapai 120.36% yang berarti Rp81.455.277,50 atau 20,36% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp400.000.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	506.546.769,37	137.313.819,00	27,11%
3. Pendapatan diterima dimuka	344.141.458,13	344.141.458,13	100,00%
Total	**850.688.227,50**	**481.455.277,50**	**56,60%**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola oleh Kecamatan Taman meliputi sewa tanah yang ditanami padi. Kenaikan tersebut sesuai hasil lelang harga sewa bengkok.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp481.455.277,50 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp517.161.100,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp308.435.635,63 atau 6,90%.

c. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong hewan.

☑ Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp14.532.400,00 atau mencapai 100,03% yang berarti Rp4.400,00 atau 0,03% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.14.528.000,00.

Perincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	14.532.400,00.	14.532.400,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**14.532.400,00**	**14.532.400,00**	**100,00%**

Hai ini sesuai dengan potensi riil yang menyewa kios pasar ikan.

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp14.532.400,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2016 sebesar Rp14.534.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp1.600,00 atau 0,01 %.

☑ Realisasi retribusi rumah potong hewan sebesar Rp38.242.000,00 atau mencapai 87,48% yang berarti Rp5.474.000,00 atau 12,52% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.43.716.000,00.

Perincian realisasi retribusi rumah potong hewanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi rumah potong hewan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	38.242.000,00	38.242.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**38.242.000,00**	**38.242.000,00**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penurunan realisasi ini disebabkan karena jumlah sapi dan kambing yang dipotong berkurang.

Realisasi retribusi rumah potong hewan tahun anggaran 2017 sebesar Rp38.242.000,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi rumah potong hewan tahun 2016 sebesar Rp42.800.000,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp4.558.000,00 atau 7,95%.

c. Dinas Pertanian tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

11. Dinas Perdagangan

a. Retribusi jasa umum berupa retribusi pelayanan pasar .

☑ Realisasi retribusi pasar sebesar Rp3.818.220.705,00 atau mencapai 114,99% yang berarti Rp497.806.705,00 atau 14,99% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.320.414.000,00.

Perincian realisasi retribusi pasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pasar	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	712.295.938,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	3.892.099.205,00	3.801.071.622,00	97,66%
3. Karcis/Benda berharga/PP1	0,00	0,00	0,00%
4. Pendapatan diterima dimuka	17.149.083,00	17.149.083,00	100,00%
Total	**4.621.544.226,00**	**3.818.220.705,00**	**82,62%**

Hal ini sesuai dengan potensi riil. Realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.818.220.705,00 dibandingkan dengan realisasi retribusi pasar tahun 2016 sebesar Rp3.537.626.554,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp280.594.151,00 atau 7,93%.

b. Dinas Perdagangan tidak mengelola retribusi jasa usaha sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa usaha.

c. Retribusi perizinan tertentu berupa retribusi izin gangguan.

☑ Realisasi izin gangguan sebesar Rp73.878.500,00 atau mencapai 100,00% dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp73.878.000,00.

Perincian realisasi izin gangguan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Izin Gangguan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	73.878.500,00	73.878.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**73.878.500,00**	**73.878.500,00**	**100,00%**

5.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	**12.093.398.000,00**	**13.320.249.415,39**	**110,14%**	**11.172.031.994,51**

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp13.320.249.415,39 atau 110,14% yang berarti Rp1.226.851.415,39 atau 10,14% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp12.093.398.000,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1 PDAM	3.641.963.000,00	5.435.226.084,00	149,24%	3.641.963.206,00
2 BPR Bank Daerah	1.595.935.000,00	2.034.451.737,11	127,48%	1.595.935.527,51
3 Aneka Usaha	198.705.000,00	0,00	0,00%	169.362.900,00
4 Bank Jatim	6.656.795.000,00	5.850.571.594,28	87,89%	5.764.770.361,00
Total	**12.093.398.000,00**	**13.320.249.415,39**	**110,14%**	**11.172.031.994,51**

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2017 sebesar Rp5.435.226.084,00 atau mencapai 149,24% yang berarti lebih tinggi daritarget anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.641.963.000.000,00.

   Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PDAM	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO2017	5.435.226.084,00	5.435.226.084,00	100,00%
Total	**5.435.226.084,00**	**5.435.226.084,00**	**100,00%**

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2017 dari PDAM dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Per 31 Desember 2017 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 55% dari laba bersih setelah pajak.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2017 sebesar Rp5.435.226.084,00 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun 2016 sebesar Rp3.641.963.206,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.793.262.878,00 atau 49,24%.

2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.034.451.737,11 atau mencapai 127,48%yang berarti Rp438.516.737,11 atau 27,48% yang berarti lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.595.935.000,00.

   Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr BPR Bank Daerah	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	2.034.451.737,11	2.034.451.737,11	100,00%
Total	**2.034.451.737,11**	**2.034.451.737,11**	**100,00%**

Penetapan target anggaran tahun anggaran 2017 dari PD. BPR Bank Daerah dihitung berdasarkan perolehan laba bersih setelah pajak berdasarkan Laporan Keuangan PD. Bank Pasar Per 31 Desember 2016 yang telah diaudit. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah, harus menyetorkan ke kas daerah sebesar 50% dari laba bersih setelah pajak

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerahtahun anggaran 2017sebesar Rp2.034.451.737,11dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerahtahun 2016 sebesar Rp1.595.935.527,51 atau terjadi peningkatan sebesar Rp438.516.209,60 atau 27,48%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2017 tidak ada realisasi dikarenakan mengalami kerugian. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usahatahun anggaran 2017target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp198.705.000,00.

   Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usahauntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PD Aneka Usaha	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0.00	0.00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	0,00	0,00	0.00%
Total	**0,00**	**0,00**	**0.00%**

   Penetapan target anggaran tahun anggaran 2017 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Aneka Usaha 2014 Per 31 Desember 2016 yang telah diaudit berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012.

4. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatimtahun anggaran 2017sebesar Rp5.850.571.594,28atau mencapai 87,89% yang berarti Rp806.223.405,72 atau 12,11 lebih rendah daritarget anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.656.795.000,00.

   Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatimuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PT Bank Jatim	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0.00	0.00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	5.850.571.594,28	5.850.571.594,28	100,00%
Total	**5.850.571.594,28**	**5.850.571.594,28**	**100,00 %**

   Realisasi ini berdasarkan Surat dari Direksi Bank Jatim Pusat Surabaya nomor 057/238.4/DJE/DJ/SR/Surat tanggal 21 Maret 2018 perihal Pembagian Deviden PT Bank Jatim Tahun Buku 2017 yang memuat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2017 Berita Acara Keputusan RUPS Nomor 22 tanggal 20 Pebruari 2018.

   Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatimtahun anggaran 2017sebesar Rp5.850.571.594,28dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatimtahun 2016 sebesar Rp5.764.770.361,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp85.801.233,00 atau 1,49%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain PAD yang sah	105.956.843.000,00	123.656.418.351,81	116,70%	81.255.800.460,93

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp123.656.418.351,81atau 116,70% yang berarti Rp17.699.575.351,81 atau 16,70% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp105.956.843.000,00. Perincian anggaran dan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1 Dinas Pendidikan	**19.992.395.000,00**	**19.897.982.763,27**	**99,52%**	**6.442.070.771,07**
a. Hasl penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. Pendapatan Blud	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	19.992.395.000,00	19.897.982.763,27	99,52%	0,00
2 Dinas Kesehatan	**8.646.366.000,00**	**8.899.013.827,26**	**102,92%**	**6.442.070.771,07**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. Pendapatan BLUD	8.646.366.000,00	8.899.013.827,26	102,92%	6.442.070.771,07
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
3 RSUD	**75.000.000.000,00**	**71.574.648.715,21**	**95,43%**	**61.972.313.190,0 0**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00	71.574.648.715,21	95,43%	61.972.313.190,0 0
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
4 BAPENDA	**0,00**	**210.346.218,00**	**0,00%**	**112.994.461,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	210.346.218,00	00,00%	112.994.461,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5 BPKAD (SKPKD)	**2.100.000.0000,00**	**22.943.087.610,07**	**1093,53%**	**12.595.045.263,77**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	505.034.126,00	00,00%	42.760.000,00
b. Jasa giro	2.000.000.000,00	4.899.121.759,45	244,96%	9.865.639.654,18
c. Pendapatan Bunga Deposito		9.367.745.843,24		
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	100.000.000,00	120.021.113,74	120,02%	133.896.720,88
e. Pendapatan lain-lain	0,00	6.470.345.612,74	00,00%	1.472.505.366,00
f. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	1.580.819.154,90	00,00%	0,00
g. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
h. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
6 Dinas Pertanian KP	**15.500.000,00**	**21.248.000,00**	**137,08%**	**14.629.000,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	15.500.000,00	21.248.000,00	137.08%	14.629.000,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
6 Dinas Perdagangan	**202.582.000,00**	**110.091.218,00**	**54,34%**	**118.747.775,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	202.582.000,00	110.091.218,00	54,34%	118.747.775,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%	0,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
g. Pendapatan BOS	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	**105.956.843.000,00**	**123.656.418.351,81**	**116.70%**	**81.255.800.460,93**

1. Dinas Pendidikan

a. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Pendidikantidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD

g. Pendapatan BOS berupa pendapatan BOS

☑ Realisasi pendapatan bossebesar Rp19.897.982.763,27 atau mencapai 99,52% yang berarti Rp94.412.236,73 atau0,47% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp19.992.395.000,00.

Perincian realisasi pendapatan BOSPendidikanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan BOS	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	19.897.982.763,27	19.897.982.763,27	100,00%
Total	**19.897.982.763,27**	**19.897.982.763,27**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas

☑ Realisasi pendapatan blud puskesmas sebesar Rp8.899.013.827,26 atau mencapai 102,92% yang berarti Rp252.647.827,26 atau 2,92% lebih tinggidari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp8.646.366.000,00.

Perincian realisasi pendapatan BLUD Puskesmas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan BLUD Puskesmas	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	8.899.013.827,26	8.899.013.827,26	100,00%
Total	**8.899.013.827,26**	**8.899.013.827,26**	**100,00%**

Realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2017 sebesar Rp8.899.013.827,26 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud puskesmas tahun anggaran 2016 sebesar Rp6.442.070.771,07 terdapat peningkatan sebesar Rp2.456.943.056,19 atau 38,14%.

3. RSUD

a. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. RSUD tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. RSUD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. RSUD tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

☑ Realisasi pendapatan blud RSUD sebesar Rp71.574.648.715,21 atau mencapai 95,43% yang berarti Rp3.425.351.284,79 atau 4,57% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.000.000.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian realisasi pendapatan BLUD RSUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan BLUD RSUD	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	10.436.792.851,00	10.436.792.851,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	61.137.855.864,21	61.137.855.864,21	100,00%
Total	**71.574.648.715,21**	**71.574.648.715,21**	**100,00%**

Realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2017 sebesar Rp71.574.648.715,21 dibandingkan dengan realisasi pendapatan blud RSUD tahun anggaran 2016 terdapat sebesar Rp61.972.313.190,09 kenaikan sebesar Rp9.602.335.525,12 atau 15,49%.

4. BadanPendapatan Daerah.

a. Pendapatan lain-lain berupa denda keterlambatan.

☑ Realisasi pendapatan lain-lain2017berupa denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp210.346.218,00realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB tidak dianggarkan dalam dalam APBD tahun anggaran 2017karena realisasi denda keterlambatan pembayaran PBB tidak dapat diprediksi perolehannya.

Perincian realisasi pendapatan lain-lain Dinas Pendapatan Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Lain-lain	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	210.346.218,00	210.346.218,00	100,00%
Total	**210.346.218,00**	**210.346.218,00**	**100,00%**

5. BPKAD (SKPKD)

a. BPKAD tidak terdapat pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Pendapatan jasa giro.

☑ Realisasi pendapatan jasa giro sebesar Rp4.899.121.759,45 atau mencapai 244,96% yang berarti Rp2.899.121.759,45 atau 144,96% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Perincian realisasi pendapatan jasa giro untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan jasa giro	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	4.899.121.759,45	4.899.121.759,45	100,00%
Total	**4.899.121.759,45**	**4.899.121.759,45**	**100,00%**

Realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.899.121.759,45 dibandingkan dengan realisasi pendapatan jasa giro tahun anggaran 2016 sebesar Rp9.865.639.654,18terdapat penurunan sebesar Rp4.966.517.894,73 atau 50,34%.

c. Pendapatan Bunga Deposito.

☑ Realisasi pendapatan bunga deposito sebesar Rp9.367.745.843,24 realisasi pendapatan bunga deposito tidak dianggarkan dalam dalam APBD tahun anggaran 2017.

Perincian realisasi pendapatan bunga depositountuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan jasa giro	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	9.367.745.843,24	9.367.745.843,24	100,00%
Total	**9.367.745.843,24**	**9.367.745.843,24**	**100,00%**

d. BPKAD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

e. Pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

☑ Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKKsebesar Rp120.021.113,74 atau mencapai 120,02% yang berarti Rp20.021.113,74atau 20,02% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.000.000,00.

Perincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKKuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	120.021.113,74	120.021.113,74	100,00%
Total	**120.021.113,74**	**120.021.113,74**	**100,00%**

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKKtahun anggaran 2017 sebesar Rp120.021.113,74 dibandingkan dengan realisasi pendapatan hasil pengelolaan dana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

bergulir LKKtahun anggaran 2016 sebesar Rp133.896.720,88 terdapat penurunan sebesar Rp13.875.607,14 atau 10,36%.

f. Pendapatan lain-lain.

☑ Realisasi pendapatan lain-lain sebesar Rp6.470.345.612,74. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2017.Pendapatan lain lain antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.

Perincian realisasi pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan lain-lain	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	6.470.345.612,74	6.470.345.612,74	100,00%
Total	**6.470.345.612,74**	**6.470.345.612,74**	**100,00%**

g. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

☑ Realisasi pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.580.819.154,90. Pendapatan ini tidak di anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017karena merupakan pendapatan yang tidak bisa diprediksi di tahun 2017. Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan antara lain pengembalian belanja tahun lalu baik hasil temuan BPK maupun Inspektorat.

Perincian realisasi pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan lain-lain	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.580.819.154,90	1.580.819.154,90	100,00%
Total	**1.580.819.154,90**	**1.580.819.154,90**	**100,00%**

h. BPKAD tidak mengelola pendapatan BLUD.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

☑ Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp21.248.000,00 atau mencapai 137,08% yang berarti Rp5.748.000,00 atau 37.08% lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp15.500.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan penjualan hasil perikanan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	21.248.000,00	21.248.000,00	100,00%
Total	**21.248.000,00**	**21.248.000,00**	**100,00%**

Realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2017 sebesar Rp21.248.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan penjualan hasil perikanan tahun anggaran 2016 sebesar Rp14.629.000,00. terdapat peningkatan sebesar Rp6.619.000,00 atau 45,25%.

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan jasa giro.
c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.
e. Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan lain-lain
f. Dinas Pertaniandan Ketahanan Pangan tidak mengelola Pendapatan BLUD

7. Dinas Perdagangan

a. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
b. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan jasa giro.
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
   ☑ Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp110.091.218,00 atau mencapai 54,34% atau 45,66% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp202.582.000,00.

   Perincian realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan angsuran/cicilan penjualan	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	110.091.218,00	110.091.218,00	100,00%
Total	**110.091.218,00**	**110.091.218,00**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2017 sebesar Rp110.091.218,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan angsuran/cicilan penjualan tahun anggaran 2016 sebesar Rp188.747.775,00 terdapat penurunan sebesar Rp8.656.557,00 atau 7,29%.

d. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.
e. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan lain-lain
f. Dinas Perdagangan tidak mengelola Pendapatan BLUD

5.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	**679.903.441.000,00**	**638.973.881.834,00**	**93,98%**	**717.561.434.206,00**

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan pada tahun anggaran 2017, terealisasi sebesar Rp638.973.881.834,00mencapai 93,98% yang berarti Rp40.929.559.166,00atau 6,02% lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp679.903.441.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana permbangan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp638.973.881.834,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp717.561.434.206,00 terjadi penurunan sebesar Rp78.587.552.372,00 atau 10,95%.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – dana permbanganuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi hasil pajak	33.286.390.000,00	27.325.331.947,00	82,09%	34.049.572.850,00
Bagi hasil SDA	31.546.262.000,00	18.680.122.868,00	59,22%	18.880.139.043,00
DAU	502.392.070.000,00	502.392.070.000,00	100,00%	511.375.289.000,00
DAK	99.154.318.000,00	77.267.422.860,00	77,93%	140.847.099.356,00
Bagi hasil cukai	13.524.401.000,00	13.308.934.159,00	98,41%	12.409.333.957,00
Total	**679.903.441.000,00**	**638.973.881.834,00**	**93.98 %**	**717.561.434.206,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.2.1.1.Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Pajak	33.286.390.000,00	27.325.331.947,00	82,09%	34.049.572.850,00

Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp27.325.331.947,00 atau mencapai 82,09% yang berarti Rp5.961.058.053,00atau 17,91% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar 33.286.390.000,00. Realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp27.325.331.947,00 dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil tahun anggaran 2016 sebesar Rp34.049.572.850,00 terjadi penurunan sebesarRp6.724.240.903,00 atau 19,75%. Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi pajak Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana bagi hasil pajak merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
PBB	1.428.600.000,00	3.349.095.520,00	234,43%	8.174.408.541,00
PPh Pasal 21,25,29	31.857.790.000,00	23.976.236.427,00	75,26%	25.875.164.309,00
Total	**33.286.390.000,00**	**27.325.331.947,00**	**82,09%**	**34.049.572.850,00**

- ☑ Realisasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp3.349.095.520,00 atau 234,43% yang berarti Rp1.920.495.520,00 atau 134,43% lebih tinggidibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017.
- ☑ Realisasi bagi hasil Pajak Penghasilan Pasal 25, 29 dan 21 sebesar Rp23.976.236.427,00 atau75,26% yang berarti Rp7.881.553.573,00 atau 24,74% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017.

5.1.2.1.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	31.546.262.000,00	18.680.122.868,00	59,22%	18.880.139.043,00

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp18.680.122.868,00 atau 59,22% yang berarti Rp12.866.139.132,00 atau 40,78% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp31.546.262.000,00. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

anggaran 2016 adalah sebesar Rp18.880.139.043,00 terjadi penurunan sebesar Rp200.016.175,00 atau 1,06%.Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena sangat tergantung realisasi sumber daya alam yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang telah masuk ke kas negara. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan realisasi dana bagi hasil bukan pajak/SDA merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Sumber daya hutan	256.546.000,00	143.143.376,00	55,80%	131.785.267,00
Pungutan hasil Perikanan	1.493.124.000,00	447.937.200,00	30,00%	452.025.539,00
Pertambangan minyak& gas bumi	29.686.908.000,00	18.012.118.856,00	60,67%	18.236.167.816,00
Pertambangan umum Royalti	84.064.000,00	58.865.576,00	70,02%	1.969.500,00
SDA Panas Bumi	25.620.000,00	18.057.860,00	70,48%	58.190.921,00
Total	**31.546.262.000,00**	**18.680.122.868,00**	**59,22%**	**18.880.139.043,00**

☑ Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutansebesar Rp 143.143.376,00 atau 55,80% yang berarti Rp113.402.624,00 atau 44,20% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017.Realisasi bagi hasil dari iuran Provisi Sumber Daya Hutan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp131.785.267,00 terjadi peningkatan sebesar Rp11.358.109,00 atau 8,62%.Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutanmerupakan pendapatan yang *uncontrolable.*

☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp447.937.200,00 atau30,00% yang berarti Rp1.045.186.800,00 atau 70,00% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017. Realisasi ini dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Realisasi bagi Hasildari Pungutan Hasil Perikanan tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp452.025.539,00 terjadi penurunan sebesar Rp4.088.339,00 atau0,90%. Pendapatan yang berasal dari Realisasi bagi hasil dari iuran Provinsi Sumber Daya Hutanmerupakan pendapatan yang *uncontrolable.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum ,Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp18.012.118.856,00 atau 60,67% yang berarti Rp11.674.789.144,00 atau39,33%lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum,Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollabe*. Realisasi bagi hasil dari pertambangan umum,Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2016sebesar Rp18.236.167.816,00 terjadi penurunansebesar Rp224.048.960,00 atau 1,23%.

☑ Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Royalti sebesar Rp58.865.576,00 atau 70,02% yang berarti Rp25.198.424,00 atau29,98% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp84.064.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyebab terjadinya penurunan tersebut disebabkan mengingat pendapatan bagi hasil dari Pertambangan Umum Royalti merupakan pendapatan yang *uncontrollabe*.

☑ Realisasi Bagi Hasil dariSumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp18.057.860,00 atau 70,48% yang berarti Rp7.562.140,00 atau 29,52% lebihrendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp25.620.000,00. Realisasi dihitung berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan bagi hasil dariSumber Daya Alam Panas Bumi merupakan pendapatan yang *uncontrollabe*.

5.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
DAU	502.392.070.000,00	502.392.070.000,00	100,00%	511.375.289.000,00

Realisasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp502.392.070.000,00 yang mencapai 100,00% atau yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp502.392.070.000,00.Realisasi DAU tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp502.392.070.000,00 dibandingkan dengan realisasi DAUtahun anggaran 2016 terjadi penurunan sebesar Rp8.983.219.000,00 atau 1,76%.Pendapatan yang berasal dari dana alokasi umum merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi umum merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah hanya menyajikan data-data berkaitan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penghitungan dana alokasi umum namun tidak berhak menentukan seberapa besar dana yang akan diterima.

5.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
DAK	99.154.318.000,00	77.267.422.860,00	77,93%	140.847.099.356,00

Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp77.267.422.860,00yang berarti 77,93% yang berarti Rp21.886.895.140,00 atau 22,07 % lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp99.154.318.000.000,00.Realisasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp140.847.099.356.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp63.579.676.496,00 atau 45,14% lebihrendah pada tahun anggaran 2017.Pendapatan yang berasal dari dana alokasi khusus merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan dana alokasi khusus merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah pusat.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

DAK	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Reguler :				
Pendidikan	8.347.647.000,00	6.678.116.750,00	80,00%	789.366.000,00
Jalan	15.725.783.000,00	15.055.093.000,00	95.74%	0,00
Kesehatan	0,00	0,00	0,00%	1.193.673.000,00
Air minum	0,00	0,00	0,00%	274.857.000,00
Sanitasi	1.299.079.000,00	1.141.702.000,00	87,89%	224.883.000,00
Lingkungan hidup	0,00	118.740.000,00	0,00%	1.058.055.000,00
Keluarga berencana	0,00	2.596.779.000,00	0,00%	165.909.000,00
Transportasi darat	0,00	14.920.000,00	0,00%	130.974.000,00
Kelautan & perikanan	0,00	0,00	0,00%	705.120.000,00
Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00%	2.159.016.000,00
Rujukan	4.629.630.000,00	1.388.889.000,00	30,00%	1.276.371.000,00
Farmasi	0,00	0,00	0,00%	976.566.000,00
Kedaulatan pangan	0,00	282.700.000,00	0,00%	0,00
Non Reguler :				
Insfrastruktur	0,00	0,00	0,00%	68.134.908.356,00
Fisik Tambahan	3.013.139.000,00	0,00	0,00%	0,00
Non Fisik :				
BO P PAUD	5.107.800.000,00	5.107.800.000,00	100,00%	2.148.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TPG	55.844.416.000,00	40.498.327.650,00	72,52%	59.469.241.000,00
Tunj.peng.guru	1.068.000.000,00	587.400.000,00	55,00%	0,00
TPG Non Profesi	0,00.	0,00	0,00%	546.800.000,00
BOP Kesehatan	2.586.560.000,00	2.816.718.460,00	108,90%	1.310.250.000,00
JamPerSal	403.747.000,00	0,00	0,00%	0,00
BOP KB	425.450.000,00	277.170.000,00	65,15%	283.110.000,00
Kependudukan	703.067.000,00	703.067.000,00	100,00%	0,00
Total	**99.154.318.000,00**	**77.267.422.860,00**	**77,93%**	**140.847.099.356,00**

5.1.2.1.5.Bagi Hasil Cukai

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bagi hasil cukai	**13.524.401.000,00**	**13.308.934.159,00**	**98,41%**	**12.409.333.957,00**

Realisasi dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp13.308.934.159,00 atau mencapai 98.41% yang berarti 1,59% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp13.524.401.000,00. Realisasi dana dana bagi Cukai tahun anggaran 2017 sebesar Rp13.308.934.159,00dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil cukai pada tahun anggaran 2016terjadi kenaikan sebesar Rp899.600.202,00 atau 7,25%.

5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**7.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**100,00%**	**41.382.622.000,00**

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100.00% yang berarti sesuai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp7.500.000.000,00.

Perincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dana penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00
Total	**7.500.000.000,00**	**7.500.000.000,00**	**100,00%**	**41.382.622.000,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana otonomi khusus	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat – lainnya tahun anggaran 2017berupa dana otonmi khusus. Demikian halnya pada tahun anggaran 2016 juga tidak menerima dana otonomi khusus.

5.1.2.2.2 Dana Penyesuaian

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana penyesuaian	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00

Realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun anggaran 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00 atau 100,00% yang berarti sama dengan anggaran yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00. Realisasi pendapatan realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00 dibandingkan realisasi pendapatan dana penyesuaian tahun anggaran 2016 sebesar Rp41.382.622.000,00 lebih rendah sebesar Rp33.882.622.000,00 hal ini dipengaruhi oleh adanya Peraturan Presiden No 137 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017 lampiran XVIII DAK Non Fisik. bahwa pada tahun anggaran 2016 alokasi tunjangan profesi guru yang semula di dana penyesuaian dialokasikan ke dana alokasi khusus non fisik.

Perincian anggaran dan realisasi dana penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dana penyesuaian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana insentif daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00
Tunjangan profesi guru	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00%	41.382.622.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Transfer Pemerintah Provinsi	60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	131,62%	64.431.714.504,00

Penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah provinsi - dana perimbangan pada tahun anggaran 2017, terealisasi sebesar Rp79.825.524.122,00 mencapai 131,62% yang berarti Rp19.177.114.122,00atau 31,62% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp64.648.410.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana permbangan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp79.825.524.122,00dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah provinsi – dana perimbangan tahun anggaran 2016 sebesar Rp64.431.714.504,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.393.809.618,00 atau 23,89%.

5.1.2.3.1Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dana bagi hasil pajak provinsi	60.648.410.000,00	79.825.524.122,00	131,62%	64.431.714.504,00

Realisasi dana bagi hasil pajak dari propinsi tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp79.825.524.122,00 mencapai 131,62% yang berarti Rp19.177.114.122,00 atau 31,62% lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.648.410.000,00.Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi merupakan pendapatan yang *uncontrolable* karena menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Dengan demikian, kenaikan maupun penurunan bagi hasil pajak dari propinsi merupakan kewenangan penuh dari pemerintah provinsi. Realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2017 sebesar Rp79.825.524.122,00 dibandingkan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2016 sebesar Rp64.431.714.504,00.atau terjadi kenaikan sebesar Rp15.393.809.618,00 atau 23,89%.
Perincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsiuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. PKB	19.575.936.000,00	22.431.402.785,00	114.59%	21.893.810.000,00
2. BBNKB	12.291.172.000,00	11.577.516.645,00	94,19%	12.488.731.185,00
3. BBKB	14.758.539.000,00	15.629.605.878,00	105,90%	13.956.105.144,00
4. Air Permukaan	174.043.000,00	215.413.062,00	123,77%	207.490.272,00
5. Pajak Rokok	13.848.720.000,00	29.971.585.752,00	216,42%	15.885.577.903,00
Total	**60.648.410.000,00**	**79.825.524.122,00**	**131,62%**	**64.431.714.504,00**

1. Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2017sebesar Rp22.431.402.785.000,00 atau mencapai 114,59% yang berarti Rp2.855.466.785,00atau 14,59% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp19.575.936.000,00.

   Perincian realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	4.164.501.942,00	4.164.501.942,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	22.606.507.627,00	18.266.900.843,00	80,80%
Total	**26.771.009.569,00**	**22.431.402.785,00**	**83,79%**

   Realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2017sebesar Rp22.431.402.785,00 dibandingkan dengan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2016 sebesar Rp21.893.810.000,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp537.592.785,00 atau 2,46%.

2. Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)tahun anggaran 2017sebesar Rp11.577.516.645,00 atau mencapai 94,19% yang berarti Rp713.655.355,00atau 5,81% lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp12.291.172.000,00.

   Perincian realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	1.925.015.111,00	1.925.015.111,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	12.004.518.164,00	9.652.501.534,00	80,41%
Total	**13.929.533.275,00**	**11.577.516.645,00**	**83,11%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)tahun anggaran 2017sebesar Rp11.577.516.645,00 dibandingkan dengan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun 2016 sebesar Rp12.488.731.185,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp911.214.540,00 atau 7.30%.

3. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)tahun anggaran 2017sebesar Rp15.629.605.878,00 atau mencapai 105,90% yang berarti Rp871.066.878,00atau 5,90% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp14.758.539.000,00.

Perincian realisasi pajak bahan bakar kendaraan brmontoruntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermontor	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	2.480.366.741,00	2.480.366.741,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	16.062.387.517,00	13.149.239.137,00	81,86%
Total	**18.542.754.258,00**	**15.629.605.878,00**	**84,29%**

Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun anggaran 2017sebesar Rp15.629.605.878,00 dibandingkan dengan realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2016 sebesar Rp13.956.105.144,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp1.673.500.734,00 atau 11,99%.

4. Realisasi pajak air permukaantahun anggaran 2017sebesar Rp215.413.062,00 atau mencapai 123,77% yang berarti Rp41.370.062,00atau 23,77% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp174.043.000,00.

Perincian realisasi pajak pemanfaatan airuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak pemanfaatan air	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	45.501.910,00	45.501.910,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	208.069.047,00	169.911.152,00	81,66%
Total	**253.570.957,00**	**215.413.062,00**	**84,95%**

Realisasi pajak pemanfaatan air tahun anggaran 2017sebesar Rp215.413.062,00 dibandingkan dengan realisasi pajak pemanfaatan air tahun 2016 sebesar Rp207.490.272,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp7.922.790,00 atau 3.82%.

5. Realisasi pajak rokoktahun anggaran 2017sebesar Rp29.971.585.752,00 atau mencapai 216,42% yang berarti Rp16.122.865.752,00atau 116,42% lebih tinggi dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp13.848.720.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian realisasi pajak rokok untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak rokok	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (3/2)
1. Piutang tahun 2016	5.125.764.047,00	5.125.764.047,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	29.524.218.321,00	24.845.821.705,00	84,15%
Total	**34.649.982.368,00**	**29.971.585.752,00**	**86,50%**

Realisasi pajak rokok tahun anggaran 2017sebesar Rp29.971.585.752,00 dibandingkan dengan realisasi pajak rokok tahun 2016 sebesar Rp15.885.577.903,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp14.086.007.849,00 atau 23.89%.

5.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Lain-lain pendapatan yang sah	**716.850.000,00**	**716.850.000,00**	**100,00%**	**1.670.630.000,00**

Penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2017, terealisasi sebesar Rp716.850.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sama dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp716.850.000,00. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp716.850.000,00 dibandingkan dengan lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.670.630.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp953.780.000,00 atau 57,09%.

Perincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bantuan keuangan propinsi	716.850.000,00	716.850.000,00	100.00%	1.670.630.000,00
Total	**716.850.000,00**	**716.850.000,00**	**100.00%**	**1.670.630.000,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pendapatan Dana Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan dana hibah tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2016.

5.1.3.2Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Lainnya

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemda Lainnya	716.850.000,00	716.850. 000,00	100,00%	1.670.630. 000,00

Realisasi pendapatan bantuan keuangan dari propinsi tahun anggaran 2017 sebesar Rp716.850.000,00 atau mencapai 100,00% yang berarti sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp 716.850.000,00. Realisasi bantuan keuangan dari provinsi tahun aggaran 2017 sebesar Rp716.850.000,00 dibandingkan dengan realiasi bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.670.630.000,00terjadi penurunan sebesar Rp953.780.000,00 atau 57,09%. Perincian anggaran dan realisasi bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran2017	Realisasi2017	%	Realisasi2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyelenggaraan pendidikan madraah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	476.850.000,00	100,00%	473.250.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	10.000.000,00
Operasional pendidikan BOP (LIFE SKILL)	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
Seleksi pendidik dan kependidikan berprestasi	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM SLTA)	0,00	0,00	0,0%	562.380.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	75.000.000,00	100,0%	100.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar.	0,00	0,00	0,00%	30.000.000,00
Lomba Kompetensi Siswa dan Lomba Jawara SMK Tingkat Kota	0,00	0,00	0,00%	300.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%	60.000.000,00
Seleksi Kepala sekolah berwawasan Lingkungan	0,00	0,00	0,00%	20.000.000,00
Anugrah Konstitusi bagi guru PKn	0,00	0,00	0,00%	15.000.000,00
Keg. Seleksi & Pembinaan Guru & Tenaga Kependidikan PAUD & Dikmas Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	15.000.000,00
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000.,00	100,00%	0,00
Total	**716.850.000,00**	**716.850.000,00**	**100,00%**	**1.670.630.000,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2. BELANJA

5.2.1. BELANJA OPERASI

5.2.1.1. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai	**473.918.184.690,00**	**391.631.558.502,00**	**82,64%**	**511.243.214.266,00**

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp391.631.558.502,00 atau 82,64% yang berarti Rp82.286.626.188,00 atau 17,36% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp473.918.184.690,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 terjadi penurunan sebesar Rp119.611.655.764,00 atau sebesar 23,39 %.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Tdk Langsung	410.042.049.000,00	334.822.576.837,00	81,65%	457.736.983.096,00
2. Langsung	50.281.317.000,00	44.604.337.114,00	88,72%	45.571.655.700,00
3. BLUD	10.852.198.690,00	9.794.401.651,00	89,57%	7.934.575.470,00
4. BOS	2.742.620.000,00	2.410.242.900,00	87,17%	0,00
Total	**473.918.184.690,00**	**391.631.558.502,00**	**82,64%**	**511.243.214.266,00**

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perbandingan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beberapa SKPD tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga disajikan kembali beberapa SKPD sesuai struktur organisasi pada tahun anggaran 2016.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	228.650.680.000,00	190.667.725.306,00	83,39%	309.888.670.825,00
Dinas Kesehatan KB	32.830.566.690,00	29.478.458.362,00	89,79%	25.854.939.831,00
RSUD	19.868.687.000,00	18.121.145.987,00	91,20%	17.058.483.673,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas PU TR	8.111.308.000,00	7.139.040.557,00	88,01%	7.180.172.987,00
Dinas Perkim	4.445.042.000,00	3.763.249.708,00	84,66%	0,00
Dinas Satpol PP	7.617.718.000,00	6.136.502.599,00	80,56%	3.939.250.867,00
BPBD	2.868.565.000,00	1.046.778.306,00	36,49%	2.057.707.835,00
Dinas Sosial	6.744.574.000,00	4.352.723.468,00	64,54%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	3.327.352.000,00	3.027.192.588,00	90,98%	0,00
Dinas LH	11.393.036.000,00	9.996.330.551,00	87,74%	1.723.335.204,00
Dispendukcapil	3.969.765.000,00	3.669.964.657,00	92,45%	3.500.081.902,00
Dinas Perhubungan	8.258.948.000,00	6.518.188.768,00	78,92%	8.544.802.598,00
Dinas Infokom	4.429.350.000,00	3.798.279.607,00	85,75%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	3.691.858.000,00	3.231.946.318,00	87,54%	1.895.541.856,00
Dinas Budparpora	4.293.992.000,00	3.594.891.953,00	83,72%	0,00
Dinas Perpustakaan	2.436.619.000,00	1.982.907.306,00	81,38%	1.752.853.548,00
Walikota/Wakil	798.975.000,00	561.900.334,00	70,33%	726.229.228,00
DPRD	11.845.527.000,00	8.223.883.860,00	69,43%	6.796.418.337,00
Bagian Pemerintahan	1.264.977.000,00	1.121.647.000,00	88,67%	859.552.000,00
Bagian Organisasi	1.093.672.000,00	903.020.000,00	82,57%	996.010.500,00
Bagian Umum	10.784.317.000,00	9.374.268.684,00	86,93%	10.196.401.530,00
Bagian Hukum	2.418.284.000,00	2.058.987.000,00	85,14%	1.378.199.000,00
Bagian Perekkesra	708.938.000,00	609.998.000,00	86.04%	881.374.000,00
Bagian Adbang	1.061.183.000,00	986.427.300,00	92,96%	898.375.000,00
Sekretariat DPRD	3.647.181.000,00	2.667.863.632,00	73,15%	2.261.542.566,00
BKD	4.120.336.000,00	3.651.914.114,00	88,63%	3.954.880.312,00
BPKAD	23.114.357.000,00	12.248.563.325,00	52,99%	15.014.563.097,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	7.830.686.000,00	6.917.873.681,00	88,34%	7.636.437.272,00
Inspektorat	4.127.283.000,00	3.701.872.435,00	89,69%	4.303.853.446,00
BAPPEDA	5.345.967.000,00	4.779.555.122,00	89,40%	6.192.831.237,00
Kec Kartoharjo	8.326.070.000,00	7.302.913.570,00	87,71%	8.170.491.295,00
Kec Manguharjo	8.295.023.000,00	7.202.044.987,00	86,82%	8.076.055.284,00
Kec Taman	8.348.873.000,00	7.596.632.802,00	90,99%	8.185.646.415,00
Bakesbangpol	3.919.186.000,00	3.215.943.249,00	82,06%	3.275.795.140,00
Dinas Pertanian KP	4.549.629.000,00	3.866.627.203,00	84,99%	3.598.634.955,00
Dinas Perdagangan	9.379.660.000,00	8.114.296.163,00	86,51%	7.953.477.279,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	10.284.328.415,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	4.114.957.456,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	1.094.724.300,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	6.907.408.090,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	4.089.186.986,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**473.918.184.690,00**	**391.631.558.502,00**	**82,64%**	**511.243.214.266,00**

5.2.1.1.1 Belanja Pegawai Tidak Langsung (BTL)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BTL	**410.057.049.000,00**	**334.828.576.837,00**	**81,65%**	**457.736.983.096,00**

Realisasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2017 sebesar Rp334.822.576.837,00 atau 81,65% yang berarti Rp75.234.472.163,00 atau 18,35% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp410.057.049.000,00. Jumlah belanja pegawai tidak langsung tersebut merupakan jumlah anggaran dan realisasi setelah memperhitungkan reklas belanja pegawai tidak langsung dari dana blud. Belanja pegawai tidak langsung yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan dan insentif. Realisasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2017 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tidak langsung tahun anggaran 2016 terjadi penurunan sebesar Rp122.914.406.259,00 atau sebesar 36,71%.

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perbandingan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beberapa SKPD tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga disajikan kembali beberapa SKPD sesuai struktur organisasi pada tahun anggaran 2016.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai BTL Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	219.446.156.000,00	183.052.709.656,00	74,89%	301.676.925.425,00
Dinas Kesehatan KB	24.374.152.000,00	21.643.715.511,00	94,06%	19.901.068.361,00
Dinas Kesehatan KB BLUD	(0,00)	(0,00)	0,00%	(0,00)
RSUD	13.604.133.000,00	12.447.047.187,00	97,78%	11.997.540.673,00
RSUD BLUD	(9.000.000,00)	(6.000.000,00)	66,66%	(6.000.000,00)
Dinas PU TR	6.028.522.000,00	5.244.653.507,00	91,80%	5.717.192.487,00
Dinas Perkim	3.512.001.000,00	2.943.000.458,00	96,08%	0,00
Dinas Satpol PP	5.287.407.000,00	3.979.737.599,00	95,84%	2.212.295.867,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPBD	2.555.952.000,00	759.445.306,00	88,56%	1.772.927.935,00
Dinas Sosial	4.964.897.000,00	2.860.726.468,00	86,48%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	2.325.368.000,00	2.075.380.088,00	86,48%	0,00
Dinas LH	10.487.002.000,00	9.167.024.551,00	89,06%	0,00
Dispendukcapil	2.561.816.000,00	2.323.462.657,00	91,85%	2.375.311.302,00
Dinas Perhubungan	6.747.293.000,00	5.153.143.468,00	92,45%	7.054.629.598,00
Dinas Infokom	2.894.190.000,00	2.347.628.557,00	92,45%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	2.911.438.000,00	2.532.940.518,00	98,45%	1.513.607.856,00
Dinas Budparpora	2.567.574.000,00	2.109.161.953,00	98,45%	0,00
Dinas Perpustakaan	2.015.804.000,00	1.587.581.306,00	92,40%	1.372.023.548,00
Walikota/Wakil	798.975.000,00	561.900.334,00	99,66%	726.229.228,00
DPRD	11.845.527.000,00	8.223.883.860,00	95,66%	6.796.418.337,00
Bagian Pemerintahan	209.700.000,00	163.150.000,00	86,39%	251.550.000,00
Bagian Organisasi	261.700.000,00	166.150.000,00	76,13%	212.150.000,00
Bagian Umum	9.265.091.000,00	7.922.482.684,00	93,56%	8.922.256.130,00
Bagian Hukum	153.150.000,00	144.150.000,00	86,61%	150.150.000,00
Bagian Perekkesra	259.100.000,00	223.550.000,00	89,65%	220.750.000,00
Bagian Adbang	235.700.000,00	188.450.000,00	88,75%	191.150.000,00
Sekretariat DPRD	2.849.289.000,00	2.041.883.632,00	83,52%	1.880.229.666,00
BKD	3.126.137.000,00	2.768.341.114,00	92,31%	2.819.494.312,00
BPKAD	19.440.539.000,00	8.789.475.325,00	45,86%	11.356.629.097,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	6.724.582.000,00	6.070.240.681,00	93,72%	6.713.978.272,00
Inspektorat	2.571.705.000,00	2.245.117.735,00	94,31%	2.622.719.446,00
BAPPEDA	3.075.974.000,00	2.750.479.122,00	96,47%	2.887.193.237,00
Kec Kartoharjo	7.500.435.000,00	6.510.841.570,00	90,85%	7.440.027.895,00
Kec Manguharjo	7.640.291.000,00	6.596.340.987,00	93,80%	7.412.908.284,00
Kec Taman	7.514.123.000,00	6.819.050.802,00	94,15%	7.387.733.415,00
Bakesbangpol	2.722.236.000,00	2.317.733.735,00	84,61%	2.387.817.890,00
Dinas Pertanian KP	3.687.649.000,00	3.038.857.203,00	92,07%	3.100.479.955,00
Dinas Perdagangan	7.882.441.000,00	7.053.139.263,00	93,68%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	9.674.502.415,00
KLH	0,00	0,00	0,00%	1.328.247.204,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	2.590.573.956,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	205.517.500,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	4.864.224.040,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	2.992.972.486,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	7.007.557.279,00
Total	**410.057.049.000,00**	**334.828.576.837,00**	**81,65%**	**457.736.983.096,00**

5.2.1.1.2 Belanja Pegawai Langsung (BL)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BL	**63.861.135.690,00**	**56.802.981.665,00**	**88,94%**	**53.506.231.170,00**

Realisasi belanja pegawai langsung tahun anggaran 2017 sebesar Rp44.604.337.11400 atau 88,94% yang berarti Rp7.058.154.025,00 atau 11,06% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp63.861.135.690,00. Jumlah belanja pegawai langsung tersebut merupakan jumlah anggaran dan realisasi setelah memperhitungkan reklas belanja pegawai langsung dari dana blud. Belanja pegawai langsung yang terdiri dari belanja honorarium PNS, honorarium non PNS, dan lembur. Realisasi belanja pegawai langsung tahun anggaran 2017 sebesar Rp44.604.337.114,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai langsung tahun anggaran 2016 sebesar Rp53.506.231.170,00 terjadi kenaikan sebesar Rp8.901.894.056,00 atau sebesar 19,95%.

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perbandingan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 beberapa SKPD tidak dapat diperbandingkan secara langsung sehingga disajikan kembali beberapa SKPD sesuai struktur organisasi pada tahun anggaran 2016.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai BL Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	9.204.524.000,00	7.615.015.650,00	82,73%	8.211.745.400,00
		(2.410.242.900,00)		
Dinas Kesehatan KB	8.456.414.690,00	7.834.742.851,00	94,06%	5.953.870.470,00
		(5.050.452.851,00)		
RSUD	6.255.554.000,00	5.668.098.800,00	97,78%	5.060.943.000,00
		(4.737.948.800,00)		
Dinas PU TR	2.082.786.000,00	1.894.387.050,00	91,80%	1.462.980.500,00
Dinas Perkim	933.041.000,00	820.249.250,00	96,08%	0,00
Dinas Satpol PP	2.330.311.000,00	2.156.765.000,00	95,84%	1.726.955.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPBD	312.613.000,00	287.333.000,00	88,56%	284.779.900,00
Dinas Sosial	1.779.677.000,00	1.491.997.000,00	86,48%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	1.001.984.000,00	951.812.500,00	86,48%	0,00
Dinas LH	906.034.000,00	829.306.000,00	89,06%	0,00
Dispendukcapil	1.407.949.000,00	1.346.502.000,00	91,85%	1.124.770.600,00
Dinas Perhubungan	1.511.655.000,00	1.365.045.300,00	92,45%	1.490.173.000,00
Dinas Infokom	1.535.160.000,00	1.450.651.050,00	92,45%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	780.420.000,00	699.005.800,00	98,45%	381.934.000,00
Dinas Budparpora	1.726.418.000,00	1.485.730.000,00	98,45%	0,00
Dinas Perpustakaan	420.815.000,00	395.326.000,00	92,40%	380.830.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Pemerintahan	1.055.277.000,00	958.497.000,00	86,39%	608.002.000,00
Bagian Organisasi	831.972.000,00	736.870.000,00	76,13%	783.860.500,00
Bagian Umum	1.519.226.000,00	1.451.786.000,00	93,56%	1.274.145.400,00
Bagian Hukum	2.265.134.000,00	1.914.837.000,00	86,61%	1.228.049.000,00
Bagian Perekkesra	449.838.000,00	386.448.000,00	89,65%	660.624.000,00
Bagian Adbang	825.483.000,00	797.977.300,00	88,75%	707.225.000,00
Sekretariat DPRD	797.892.000,00	625.980.000,00	83,52%	381.312.900,00
BKD	994.199.000,00	883.573.000,00	92,31%	1.135.386.000,00
BPKAD	3.673.818.000,00	3.459.088.000,00	45,86%	3.657.934.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	1.106.104.000,00	847.633.000,00	93,72%	922.459.000,00
Inspektorat	1.555.578.000,00	1.456.754.700,00	94,31%	1.681.134.000,00
BAPPEDA	2.269.993.000,00	2.029.076.000,00	96,47%	3.305.638.000,00
Kec Kartoharjo	825.635.000,00	792.072.000,00	90,85%	730.463.400,00
Kec Manguharjo	654.732.000,00	605.704.000,00	93,80%	663.147.000,00
Kec Taman	834.750.000,00	777.582.000,00	94,15%	797.913.000,00
Bakesbangpol	1.196.950.000,00	898.209.514,00	84,61%	887.977.250,00
Dinas Pertanian KP	861.980.000,00	827.770.000,00	92,07%	498.155.000,00
Dinas Perdagangan	1.497.219.000,00	1.061.156.900,00	93,68%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	609.826.000,00
KLH	0,00	0,00	0,00%	395.088.000,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	1.524.383.500,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	889.206.800,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	2.043.184.050,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	1.096.214.500,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	945.920.000,00
Total	**63.861.135.690,00**	**56.802.981.665,00**	**88,94%**	**53.506.231.170,00**

5.2.1.1.3 Belanja Pegawai BLUD

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pegawai BLUD	**10.852.198.690,00**	**9.794.401.651,00**	**90,25%**	**7.934.575.470,00**

Realisasi belanja pegawai blud tahun anggaran 2017 sebesar Rp9.794.401.651,00 atau 90,27% yang berarti Rp1.057.797.039,00 atau 9,74% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam blud tahun anggaran sebesar Rp10.843.198.690,00. Belanja pegawai BLUD merupakan jumlah anggaran dan realisasi hasil reklas belanja pegawai tidak langsung dan belanja langsung yang dibayar melalui dana BLUD. Belanja pegawai blud yang terdiri dari belanja pegawai blud Dinas Kesehatan dan belanja pegawai blud RSUD. Realisasi belanja pegawai blud tahun anggaran 2017 sebesar Rp9.794.401.651,00 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2016 sebesar Rp7.934.575.470,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.859.826.181,00 atau sebesar 18,98%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja pegawai yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai BLUD Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Kesehatan KP	5.529.594.690,00	5.050.452.851,00	91,33%	3.626.832.470,00
Reklas BTL	0,00	0,00	0,00%	0,00
Reklas BL	0,00	0,00	0,00%	0,00
RSUD	5.313.604.000,00	4.737.948.800,00	898,16%	4.301.743.000,00
Reklas BTL	9.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	6.000.000,00
Reklas BL	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**10.852.198.690,00**	**9.794.401.651,00**	**90,25%**	**7.934.575.470,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2.1.1.4. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Pegawai BOS	2.742.620.000,00	2.410.242.900,00	87,88%	2.521.583.215,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo belanja pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Belanja pegawai BOS mengakui belanja pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Belanja pegawai BOS mengakui belanja pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Belanja pegawai BOS meliputi belanja pegawai BOS SDN, belanja pegawai BOS SMPN. Belanja pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 4,42%.

Perincian belanja pegawai BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai BOS	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
1. Pegawai BOS SDN	1.505.277.000,00	1.440.488.000,00	95,69%	1.513.798.865,00
2. Pegawai BOSSMPN	1.237.343.000,00	969.754.900,00	78,37%	1.002.610.700,00
3. Pegawai BOS SMAN&SMKN	0,00	0,00		5.173.650,00
4. Pegawai BOS SMKN	0,00	0,00		0,00
Total	**2.742.620.000,00**	**2.410.242.900,00**	**87,88%**	**2.521.583.215,00**

Belanja Pegawai BOS sebesar Rp2.410.819.900,00 merupakan belanja pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing-masing rekening BOS sekolah negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2.1.2. Belanja Barang Jasa

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	335.424.479.310,00	280.472.821.815,27	83,62%	257.954.754.292,44

Realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp280.472.821.815,27 atau 83,62% yang berarti Rp54.951.657.494,73 atau 16,38% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp335.424.479.310,00. Belanja barang jasa tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja barang jasa setelah memperhitungkan hasil konversi belanja barang jasa yang diklasifikasikan ke belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp280.472.821.815,27 dibandingkan dengan realisasi belanja barang jasa tahun anggaran 2016 sebesar Rp257.954.754.292,44 terjadi kenaikan sebesar Rp22.518.067.522,83 atau terjadi kenaikan sebesar 8,03%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa setelah memperhitungkan reklas ke belanja hibah serta belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Barang Jasa	264.087.885.000,00	211.505.839.278,15	80,08%	208.251.798.592,00
Reklas ke Hibah	0,00	0,00	00,00%	(2.118.540.000,00)
Reklas ke Bansos	(11.475.974.000,00)	(10.460.810.110,00)	91,15%	(3.874.316.717,00)
Barang Jasa BLUD	70.125.330.310,00	67.401.274.034,69	96,11%	55.695.812.417,44
Barang Jasa BOS	12.687.238.000,00	12.026.518.612,43	94,79%	0,00
Total	**335.424.479.310,00**	**280.472.821.815,27**	**83,62%**	**257.954.754.292,44**

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa setelah memperhitungkan reklas ke belanja hibah serta belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Nama SKPD	Barang Jasa Sebelum Reklas	Reklas ke Hibah	Reklas ke Bantuan Sosial	Barang Jasa Setelah Reklas
1	2	3	4	5 = (2 – 3 – 4)
Dinas Pendidikan	37.869.863.567,43	0,00	55.030.000,00	37.749.833.567,43
Dinas Kesehatan KB	49.865.726.729,20	0,00	2.100.775.656,00	47.764.951.073,20
Dinas Kesehatan KB BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	64.543.943.842,73			64.543.943.842,73
RSUD BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	5.176.800.786,00			5.176.800.786,00
Dinas Perkim	4.476.947.365,00	0,00	0,00	4.476.947.365,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Satpol PP	4.721.581.350,00	0,00	0,00	4.721.581.350,00
BPBD	1.506.745.066,00	0,00	0,00	1.506.745.066,00
Dinas Sosial	5.295.221.186,00	0,00	81.690.000,00	5.213.531.186,00
Dinas Tenaga Kerja	3.146.005.197,00	0,00	42.748.460,00	3.103.256.737,00
Dinas LH	5.222.719.324,00	0,00	0,00	5.222.719.324,00
Dispendukcapil	2.789.545.460,00	0,00	0,00	2.789.545.460,00
Dinas Perhubungan	4.096.834.268,00	0,00	58.457.000,00	4.038.377.268,00
Dinas Infokom	6.557.168.823,00	0,00	0,00	6.557.168.823,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	2.543.547.392,00	0,00	0,00	2.534.547.392,00
Dinas Budparpora	9.260.594.885,00	0,00	671.040.000,00	8.589.554.885,00
Dinas Perpustakaan	1.061.273.400,00	0,00	17.375.000,00	1.043.898.400,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	3.004.804.732,00	0,00	0,00	3.004.804.732,00
Bagian Organisasi	1.458.592.750,00	0,00	0,00	1.458.592.750,00
Bagian Umum	7.280.388.378,00	0,00	15.000.000,00	7.265.388.378,00
Bagian Hukum	1.061.518.260,00	0,00	0,00	1.061.518.260,00
Bagian Perekkesra	3.502.567.900,00	0,00	545.200.200,00	2.957.367.700,00
Bagian Adbang	787.551.156,00	0,00	0,00	787.551.156,00
Sekretariat DPRD	14.817.846.363,00	0,00	0,00	14.817.846.363,00
BKD	2.780.204.450,00	0,00	0,00	2.780.204.450,00
BPKAD	17.508.810.724,91	0,00	0,00	17.508.810.724,91
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	1.229.036.550,00	0,00	373.765.500,00	855.271.050,00
Inspektorat	1.003.831.541,00	0,00	0,00	1.003.831.541,00
BAPPEDA	1.411.938.675,00	0,00	0,00	1.411.938.675,00
Kec Kartoharjo	4.063.207.754,00	0,00	0,00	4.063.207.754,00
Kec Manguharjo	3.961.380.696,00	0,00	0,00	3.961.380.696,00
Kec Taman	3.343.565.248,00	0,00	0,00	3.343.565.248,00
Bakesbangpol	2.788.991.116,00	0,00	285.411.500,00	2.503.579.616,00
Dinas Pertanian KP	8.456.606.844,00	0,00	6.137.142.294,00	2.319.464.550,00
Dinas Perdagangan	4.338.270.146,00	0,00	77.174.500,00	4.261.095.646,00
Total	**290.933.631.925,27**	**0,00**	**10.460.810.110,00**	**280.472.821.815,27**

Perincian anggaran dan realisasi belanja barang jasa yang berasal dari belanja BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Belanja Barang Jasa BLUD Per SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Kesehatan	4.470.309.310,00	2.857.330.191,96	63.91%	2.990.036.656,04
RSUD	65.655.021.000,00	64.543.943.842,73	96.47%	53.405.775.761,40
Total	**70.125.330.310,00**	**67.401.274.034,69**	**96,11%**	**55.695.812.417,44**

5.2.1.3. Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	**13.686.596.000,00**	**11.924.689.389,31**	**87,13%**	**7.013.671.600,00**

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2017 sebesar Rp11.924.689.389,31atau 87,13% yang berarti Rp1.761.906.610,69 atau 12,87% lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp13.686.596.000,00. Realisasi belanja hibah tersebut merupakan realiasi belanja hibah pada belanja tidak langsung setelah memperhitungkan reklas dari belanja barang jasa pada belanja langsung SKPD dan reklas barang/jasa yang dikoversi ke belanja hibah yang didanai BLUD.

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah setelah memperhitungkan reklas dari belanja barang jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Hibah	13.686.596.000,00	11.924.689.389,31	87,13%	4.895.131.600,00
Reklas dr barang jasa	0,00	0,00	00,00%	2.118.540.000,00
Hibah BLUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	**13.686.596.000,00**	**11.924.689.389,31**	**87,13%**	**7.013.671.600,00**

Perincian anggaran dan realisasi belanja hibah yang berasal dari belanja tidak langsung pada BPKAD selaku SKPD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hibah SKPKD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
KORPRI	250.000.000,00	45.309.300,00	18,12%	0,00
KONI	800.000.000,00	594.902.900,00	74,36%	0,00
Pramuka	274.150.000,00	273.973.600,00	99,94%	55.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PMI	287.232.000,00	287.232.000,00	100,00%	239.800.000,00
MUI	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00%	90.000.000,00
BAZ	130.400.000,00	130.400.000,00	100,00%	106.600.000,00
KPUD	1.589.800.000,00	1.150.457.589,31	72,36%	0,00
Dewan Pendidikan	145.350.000,00	145.350.000,00	100,00%	25.105.000,00
Panwaslu	1.171.184.000,00	1.171.184.000,00	100,00%	0,00
Pengamanan Polresta	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%	350.000.000,00
Dewan Kesenian	100.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
Bantuan Operasional PAUD (DAK)	5.043.000.000,00	4.420.200.000,00	87,65%	2.143.960.000,00
Kelompok Pelayanan Lanjut Usia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	15.000.000,00
ORKEMAS/LSM	0,00	0,00	0,00%	5.000.000,00
DENPOM	100.000.000,00	0,00	0,00%	167.153.600,00
KODIM	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	198.263.000,00
POLRESTA	205.380.000,00	205.380.000,00	100,00%	600.000.000,00
BOSDA MaDin	953.700.000,00	873.900.000,00	91,63%	899.250.000,00
Badan Wakaf Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00
PGRI	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	0,00
LKP2 TPA / TPQ	1.596.400.000,00	1.586.400.000	99,37%	0,00
DEKOPINDA	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00
Total	**13.686.596.000,00**	**11.924.689.389,31**	**87,12%**	**4.895.131.600,00**

5.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	**20.156.705.000,00**	**14.984.656.810**	**74,34%**	**8.957.848.417,00**

Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2017 sebesar 14.984.656.810,00 atau 74,34% yang berarti Rp5.172.048.190,00 atau 25,66% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.156.705.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut merupakan realiasi belanja bantuan sosial dan realisasi belanja bantuan keuangan pada belanja tidak langsung setelah memperhitungkan reklas dari belanja barang jasa pada belanja langsung SKPD dan reklas barang/ jasa konversi ke bantuan sosial yang didanai BLUD .

Perincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial setelah memperhitungkan belanja bantuan keuangan dan reklas dari belanja barang jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial	8.052.880.000,00	3.896.000.000,00	48,38%	4.455.685.000,00
Bantuan keuangan	627.851.000,00	627.846.700,00	100,00%	627.846.700,00
Reklas dr barang jasa	11.475.974.000,00	10.460.810.110,00	91,15%	3.874.316.717,00
Bansos BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**20.156.705.000,00**	**14.984.656.810,00**	**74,34%**	**8.957.848.417,00**

Perincian realisasi belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun Anggaran 2017 dan realisasi tahun anggaran 2016 dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) tersaji pada tabel di bawah ini.

Bantuan Sosial SKPKD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Bantuan Sosial yang tidak dapat di rencanakan	2.543.380.000,00	177.000.000,00	6,96%	75.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	4.155.900.000,00	2.428.950.000,00	58,45%	3.046.240.000,00
Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	1.353.600.000,00	1.290.050.000,00	95,31%	1.334.445.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	627.851.000,00	627.846.700,00	100,00%	0,00
Total	**8.680.731.000,00**	**4.523.846.700,00**	**52,11%**	**4.445.685.000,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja bantuan sosial yang berasal dari reklas belanja barang jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Bansos dr Reklas Barang Jasa SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	96.700.000,00	55.030.000,00	56,90%	230.900.000,00
Dinas Kesehatan KB	2.291.581.000,00	2.100.775.656,00	91,67%	1.464.935.056,00
RSUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Sosial	94.300.000,00	81.690.000,00	86,62%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	45.000.000,00	42.748.460,00	94,99%	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perhubungan	60.043.000,00	58.457.000,00	97,35%	28.291.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Budparpora	742.600.000,00	671.040.000,00	90,36%	0,00
Dinas Perpustakaan	21.500.000,00	17.375.000,00	80,81%	83.497.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Umum	115.000.000,00	15.000.000,00	13,04%	134.463.636,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Perekkesra	681.625.000,00	545.200.200,00	79,98%	313.765.000,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	432.575.000,00	373.765.500,00	86,40%	413.824.500,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00%	108.540.000,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00%	128.000.000,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00%	119.840.000,00
Bakesbangpol	356.000.000,00	285.411.500,00	80,17%	16.500.000,00
Dinas Pertanian KP	6.460.900.000,00	6.137.142.294,00	94,98%	596.470.600,00
Dinas Perdagangan	78.150.000,00	77.174.500,00	98,75%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	0,00
KLH				5.000.000,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	122.733.025,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	61.196.900,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	46.360.000,00
Total	**11.475.974.000,00**	**10.460.810.110,00**	**91,15%**	**3.874.316.717,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2.2. BELANJA MODAL

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal	**280.766.389.000,00**	**255.977.976.513,23**	**91,17%**	**246.394.704.721,00**

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp255.977.976.513,23 atau 91,17% yang berarti Rp24.788.412.486,77 atau 8,83% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp280.766.389.000,00.Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja Modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp255.977.976.513,23 dibandingkan dengan realisasi belanja Modal tahun anggaran 2016 sebesar Rp 246.394.704.721,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.583.271.792,23 atau terjadi kenaikan sebesar 25,96%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 SKPD Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00
Peralatan & mesin	109.296.730.000,00	103.557.504.743,48	94,75%	62.160.897.084,00
Gedung & bangunan	48.284.754.000,00	43.416.541.452,75	87,34%	53.614.816.421,00
Jalan, irigasi, jaringan	110.280.288.000,00	102.648.521.200,00	93,08%	127.909.902.613,00
Aset tetap lainnya	6.485.304.000,00	3.188.874.942,00	49,17%	463.668.600,00
Aset lainnya	6.419.313.000,00	3.166.534.175,00	49,60%	2.245.420.003,00
Total	**280.766.389.000,00**	**255.977.976.513,23**	**91,17%**	**246.394.704.721,00**

5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Tanah	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 terdapat alokasi anggaran untuk belanja kegiatan pengadaan tanah ringroad timur, namun sampai akhir tahun anggaran 2017 kegiatan tidak direalisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Peralatan dan Mesin	**109.296.730.000,00**	**103.557.504.743,48**	**94,75%**	**62.160.897.084,00**

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2017 sebesar Rp103.557.504.743,48 atau 94,75% yang berarti Rp5.739.225.256,52 atau 5,25% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp109.296.730.000,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar Rp103.557.504.743,48 dibandingkan dengan belanja modal peralatan dan mesin tahun 2016 sebesar Rp62.160.897.084,00 terjadi kenaikan sebesar Rp41.396.607.659,48 atau 39,98%.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	99.627.857.000,00	96.699.213.584.48	97,06%	62.033.402.934,00
Belanja modal BLUD	8.173.230.000,00	5.454.615.644,00	66,73%	127.494.150,00
Belanja modal BOS	1.495.628.000,00	1.403.675.515,00	93,85%	0,00
Total	**109.296.730.000,00**	**103.557.504.743,48**	**94,75%**	**62.160.897.084,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal peralatan dan mesin setelah memperhitungkan reklas ke belanja modal peralatan dan mesin yang didanai BLUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Modal Peralatan dan Mesin SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	25.710.337.000,00	24.748.828.521,00	96,26%	21.016.732.887,00
BOS	1.495.628.000,00	1.403.675.515,00	93,85%	0,00
Dinas Kesehatan KB	2.254.469.000,00	2.067.988.746,00	91,73%	994.906.850,00
RSUD	2.913.000.000,00	3.812.564.311,00	96,55%	19.521.131.309,00
BLUD	8.173.230.000,00	5.454.615.644,00	66,73%	127.494.150,00
Dinas PU TR	5.379.054.000,00	5.087.988.718,00	94,59%	1.015.058.500,00
Dinas Perkim	8.707.401.000,00	8.490.207.630,00	97,51%	0,00
Dinas Satpol PP	3.087.500.000,00	2.789.678.800,00	90,35%	82.880.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPBD	28.387.150.000,00	28.369.197.381,00	99,94%	3.761.327.900,00
Dinas Sosial	807.265.000,00	666.503.978,00	82,56%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	748.000.000,00	717.951.198,00	95,98%	0,00
Dinas LH	3.797.117.000,00	3.295.621.200,00	91,02%	0,00
Dispendukcapil	1.600.000.000,00	1.599.184.008,00	99,95%	608.431.000,00
Dinas Perhubungan	2.261.204.000,00	2.172.971.347,00	96,10%	4.227.396.797,00
Dinas Infokom	5.883.896.000,00	5.836.544.760,00	99,20%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	1.198.371.000,00	1.146.768.601,98	95,69%	135.828.713,00
Dinas Budparpora	485.790.000,00	354.299.762,00	72,93%	0,00
Dinas Perpustakaan	514.980.000,00	473.309.000,00	91,91%	405.919.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	44.326.500,00
Bagian Organisasi	206.550.000,00	204.474.500,00	99,00%	184.128.000,00
Bagian Umum	1.627.651.000,00	1.000.714.605,50	61,48%	4.044.931.093,00
Bagian Hukum	49.000.000,00	48.220.000,00	98,41%	0,00
Bagian Perekkesra	196.706.000,00	171.220.000,00	87,04%	48.780.000,00
Bagian Adbang	80.000.000,00	79.937.820,00	99,92%	91.017.000,00
Sekretariat DPRD	537.313.000,00	498.846.775,00	92,84%	215.352.500,00
BKD	163.665.000,00	158.595.300,00	96,90%	91.920.500,00
BPKAD	340.000.000,00	336.878.000,00	99,08%	459.279.700,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	195.000.000,00	182.492.700,00	93,59%	152.926.450,00
Inspektorat	86.950.000,00	85.520.000,00	98,36%	223.066.000,00
BAPPEDA	198.800.000,00	194.171.788,00	97,67%	446.270.150,00
Kec Kartoharjo	777.000.000,00	730.414.500,00	94,00%	557.219.000,00
Kec Manguharjo	576.595.000,00	548.941.000,00	95,20%	525.011.000,00
Kec Taman	207.500.000,00	206.352.134,00	99,45%	135.450.000,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pertanian KP	414.108.000,00	401.835.000,00	97,04%	327.631.500,00
Dinas Perdagangan	235.500.000,00	220.991.500,00	93,84%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	911.412.800,00
KLH	0,00	0,00	0,00%	1.125.674.444,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	137.333.941,00
BPM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	201.716.800,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	92.823.500,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	147.627.000,00
Total	**109.296.730.000,00**	**103.557.504.743,48**	**94,75%**	**62.160.897.084,00**

5.2.2.3. Belanja Modal Gedung & Bangunan

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Gedung dan Bangunan	**48.284.754.000,00**	**43.416.541.452,75**	**89,92%**	**53.614.816.421,00**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2017 sebesar Rp43.416.541.452,75 atau 89,92% yang berarti Rp4.868.212.547,25 atau 10,08% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran sebesar Rp49.709.354.000,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, seperti pembangunan gedung DPRD karena terjadi pemutusan kontrak sehingga tidak direalisasi sebesar Rp20.575.000.000,00

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 SKPD Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Gedung dan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	48.111.432.000,00	43.256.182.452,75	89,90%	53.540.036.621,00
Belanja modal BLUD	173.322.000,00	160.359.000,00	92,52%	74.779.800,00
Total	**48.284.754.000,00**	**43.416.541.452,75**	**89,92%**	**53.614.816.421,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Modal Gedung dan Bangunan SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	7.015.048.000,00	6.598.493.553,00	78,18%	15.103.273.595,00
Dinas Kesehatan KB	1.210.695.000,00	1.151.474.254,75	95,11%	5.422.235.000,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	7.570.828.128,00
RSUD BLUD	173.322.000,00	160.359.000,00	92,52%	74.779.800,00
Dinas PU TR	27.765.250.000,00	24.895.101.600,00	89,66%	4.638.244.460,00
Dinas Perkim	7.212.239.000,00	5.955.909.045,00	82,58%	
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPBD	0,00	0,00	0,00%	172.340.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	
Dinas Tenaga Kerja	200.000.000,00	199.840.000,00	99,92%	
Dinas LH	1.000.000.000,00	885.568.200,00	88,56%	
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	485.128.000,00
Dinas Perhubungan	103.000.000,00	98.500.000,00	95,63%	
Dinas Infokom	2.500.000.000,00	2.388.900.000,00	95,56%	
Dinas PM, PTSP/KPPT	362.200.000,00	350.314.000,00	96,72%	96.020.000,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00%	
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	
DPRD	0,00	0,00	0,00%	
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	
Bagian Umum	200.000.000,00	196.525.000,00	98,26%	263.702.100,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00%	
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00%	
BKD	0,00	0,00	0,00%	
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	
Bependa	0,00	0,00	0,00%	
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00%	
Kec Kartoharjo	356.750.000,00	352.766.800,00	98,88%	1.546.932.000,00
Kec Manguharjo	186.250.000,00	182.790.000,00	98,14%	705.087.000,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00%	
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00%	
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00%	2.981.654.900,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	
DKP	0,00	0,00	0,00%	9.612.758.888,00
KLH	0,00	0,00	0,00%	
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	384.759.000,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	1.688.289.750,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	2.868.783.800,00
Total	**48.284.754.000,00**	**43.416.541.452,75**	**89,92%**	**53.614.816.421,00**

5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**110.280.288.000,00**	**102.648.521.200,00**	**93,08%**	**127.909.902.613,00**

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2017 sebesar Rp102.648.521.200,00 atau 93,08% yang berarti Rp7.631.766.800,00 atau 6,92% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp110.280.288.000,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 SKPD Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Jalan, irigasi dan	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	110.280.288.000,00	102.648.521.200,00	93,08%	127.909.902.613,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**110.280.288.000,00**	**102.648.521.200,00**	**93,08%**	**127.909.902.613,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	40.690.000,00	32.326.100,00	79,44%	237.052.700,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00%	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PU TR	101.167.435.000,00	93.825.264.750,00	92,74%	114.282.622.063
Dinas Perkim	9.050.963.000,00	8.769.810.350,00	96,89%	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPBD	21.200.000,00	21.120.000,00	99,62%	34.840.000,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	26.400.000,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00%	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00%	11.061.781.050,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	2.015.942.500,00
KLH	0,00	0,00	0,00%	251.264.300,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**110.280.288.000,00**	**102.648.521.200,00**	**93.08%**	**127.909.902.613,00**

5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Tetap Lainnya	**6.485.304.000,00**	**3.188.874.942,00**	**49,17%**	**463.668.600,00**

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.188.874.942,00 atau 49,17% yang berarti Rp3.296.429.058,00 atau 50,83% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.485.304.000,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Aset tetap lainnya	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	3.482.053.000,00	427.860.380,00	12,28%	463.668.600,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Belanja modal BOS	3.003.251.000,00	2.761.014.562,00	91,93%	0,00
Total	**6.485.304.000,00**	**3.188.874.942,00**	**49,17%**	**463.668.600,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset tetap lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	3.372.053.000,00	321.884.380,00	9,54%	204.585.600,00
BOS	3.003.251.000,00	2.761.014.562,00	91,93%	0,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00%	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Budparpora	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	0,00
Dinas Perpustakaan	100.000.000,00	95.976.000,00	95,97%	259.083.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00%	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00%	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00%	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
DKP	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	0,00%	0,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	0,00%	0,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**6.485.304.000,00**	**3.188.874.942,00**	**49,17%**	**463.668.600,00**

5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Modal Aset Lainnya	**6.419.313.000,00**	**3.166.534.175,00**	**49,33%**	**2.245.420.003,00**

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2017 sebesar Rp3.166.534.175,00 atau 49,33% yang berarti Rp3.252.778.825,00 atau 50,67% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp6.419.313.000,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak dan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena pertimbangan tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian anggaran dan realisasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 SKPD Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Modal Aset lainnya	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja modal APBD	6.419.313.000,00	3.166.534.175,00	49,33%	2.245.420.003,00
Belanja modal BLUD	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total	**6.419.313.000,00**	**3.166.534.175,00**	**49,33%**	**2.245.420.003,00**

Perincian anggaran dan realiasi belanja modal aset lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :

Modal Aset Lainnya SKPD	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Dinas Pendidikan	2.549.000.000,00	84.930.000,00	48,38%	201.510.203,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	00,00%	0,00
RSUD	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas PU TR	2.633.150.000,00	1.926.104.150,00	73,14%	280.508.700,00
Dinas Perkim	62.799.000,00	50.600.0000,00	80,57%	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	00,00%	0,00
BPBD	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00%	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Perhubungan	8.050.000,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Budparpora	12.000.000,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	00,00%	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	00,00%	0,00
DPRD	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bagian Pemerintahan	75.000.000,00	73.411.000,00	97,88%	213.412.500,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	00,00%	44.400.000,00
Bagian Umum	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	00,00%	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Adbang	0,00	0,00	00,00%	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	00,00%	0,00
BKD	96.314.000,00	81.400.000,00	84,51%	0,00
BPKAD	200.000.000,00	199.767.425,00	99,88%	262.263.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bependa	0,00	0,00	00,00%	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	00,00%	0,00
BAPPEDA	575.000.000,00	540.321.600,00	93,96%	1.243.325.600,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	00,00%	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	00,00%	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	00,00%	0,00
DKP	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00	00,00%	0,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00	00,00%	0,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	00,00%	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	00,00%	0,00
Total	**6.419.313.000,00**	**3.166.534.175,00**	**49,33%**	**2.245.420.003,00**

5.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

5.2.3.1. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Belanja Tidak Terduga	**122.687.084.594,13**	**00,00**	**0,00%**	**0,00**

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 tidak merealisasi belanja tidak terduga tahun anggaran 2017 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp122.687.084.594,13.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.3. PEMBIAYAAN

5.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
SiLPA	305.857.486.594,13	305.857.486.594,13	100,00%	339.135.179.352,77

Anggaran dan realisasi tahun anggran 2017 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sebesar Rp305.857.486.594,13. Sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2016 adalah sebesar realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebesar Rp305.857.486.594,13 dibandingkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2016 sebesar Rp339.135.179.352,77 terjadi penurunan sebesar Rp33.277.692.758,64 atau 10,88%.

5.3.1.2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 tidak mengalokasikan anggaran penerimaan pinjaman daerah tahun anggaran 2017 sehingga tidak terdapat realisasi penerimaan pinjaman daerah pada tahun anggaran 2017.

5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00%	4.170.000,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 tidak mengalokasikan anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2017.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	00,00	0,00%	00,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan berupa anggaran penyertaan modal pemerintah daerah sehingga pada tahun anggaran 2017 tidak terdapat realisasi penyertaan modal pemerintah daerah tahun anggaran 2017. Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Daerah sebesar pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp12.106.967.705.

5.3.2.2. Pembayaran Pokok Utang

Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4 = (3/2)	5
Pembayaran Pokok Utang	0,00	00,00	0,00%	0,00

Pemerintah Kota Madiun pada tahun anggaran 2017 tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan berupa anggaran pembayaran pokok utang karena tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok utang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
6

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

6.1. SAL Awal

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 1 Januari	305.857.486.594,13	339.135.179.352,77

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa anggaran lebih (SAL) milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dan pada tanggal 1 Januari 2016.

6.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	305.857.486.594,13	339.139.349.352,77

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

6.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tersebut merupakan jumlah sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun berjalan.

6.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

6.5. SAL Akhir

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
SAL Akhir	308.490.756.889,46	305.857.486.594,13

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. SAL akhir diperoleh dari SAL awal, penggunaan SAL, Sisa lebih//kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, dan lain-lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB 7

PENJELASAN POS-POS NERACA

7.1. ASET

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset	**2.398.412.871.680,95**	**2.383.862.311.722,37**

Jumlah aset merupakan jumlah saldo aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp14.550.579.958,58.

Perincian aset milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset lancar	364.592.855.334,30	358.332.225.827,03
Investasi	143.177.019.700,89	145.062.240.037,43
Aset Tetap	1.791.556.948.946,70	1.821.997.338.661,75
Aset Lainnya	99.086.047.699,06	58.470.507.196,17
Total	**2.398.412.871.680,95**	**2.383.862.311.722,37**

7.1.1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Lancar	**364.592.854.980,30**	**358.332.225.827,03**

Jumlah asetlancar merupakan jumlah saldo aset lancar milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp6.260.629.507,28.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian aset lancar milik Pemerintah Kota Madiunpada tanggal 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Lancar	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Kas di kas daerah	39.929.243.287,63	275.264.586.878,92
2. Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
3. Kas di bendahara penerimaan	41.690.025,00	20.394.787,00
4. Kas di BLUD RSUD	23.695.743.471,85	28.036.186.781.37
5. Kas di BLUD Puskesmas	3.527.548.931,14	2.536.318.146.84
6. Kas Lainnya	1.296.531.173,84	2.672.067.089,70
7. Deposito Berjangka 1 Bulan	240.000.000.000,00	0,00
8. Piutang Pajak Daerah	4.560.680.557,40	3.769.953.866,00
9 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(497.747.971,75)	(336.786.290,21)
10. Piutang Retribusi Daerah	2.409.952.554,00	1.504.679.991,00
11 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(479.420.814,53)	(211.958.964,70)
12. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	431.090.096,00	541.181.314,00
13 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(215.545.048,00)	(270.590.657,00)
14. Piutang Lain-lain	35.885.862.487,70	31.083.765.577,79
15. Penyisihan Piutang Lain-Lain	(403.444.851,88)	(447.703.140,87)
16. Persediaan	11.908.197.507,47	12.648.252.970,18
17. Belanja Dibayar Dimuka	2.502.473.928,43	1.521.877.477,00
Total	**364.592.855.334,30**	**358.332.225.827,32**

7.1.1.1. Kas dan Bank

7.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di Kas Daerah	**39.929.243.287,63**	**275.264.586.878,92**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Kas di kas daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terdiri dari rekening giro pada Bank Jatim 0051021333 Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun dan rekening giro pada Bank Jatim 0051028111 Rekening Penampungan BPHTB.

Perincian kas di kas daerah milik Pemerintah Kota Madiunpada tanggal 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas di Kas Daerah	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Bank Jatim 0051021333	39.929.243.287,63	275.264.586.878,92
2 Bank Jatim0051028111	0,00	0,00
Total	**39.929.243.287,63**	**275.264.586.878,92**

7.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Tidakterdapat jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun berupa sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

7.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di Bendahara Penerimaan	**41.690.025,00**	**20.394.787,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas di bendahara penerimaanSKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun atas pendapatan yang telah diterima dan belum disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian kas di bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2017dan tanggal 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas di bendahara penerimaan per SKPD	2017	2016
1	2	3
Dinas Pendidikan	0,00	0,00
Dinas Kesehatan dan KB	0,00	0,00
RSUD	35.213.025,00	16.988.287,00
Dinas Pekerjaan Umum TR	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00
Badan Penanggulan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Sosial, PP	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	6.477.000,00	3.406.500,00
Dinas Infokom	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00
Walikota/WakilWalikota	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00
Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesra	0,00	0,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Dinas Pertanian dan KP	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00
Total	**41.690.025,00**	**20.394.787,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.1.1.4. Kas di BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di BLUD RSUD	**23.695.743.471,85**	**28.036.186.781,37**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD milik Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari saldo tunai dan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016.

Perincian kas di kas BLUD RSUD milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas di Kas BLUD RSUD	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Giro Bank Jatim	4.905.562.370,65	27.011.008.967,37
2. Tabungan PD Bank Daerah	0,00	1.025.177.814,00
3. Tabungan Bank Madiri	117.362.226,00	0,00
4. Tabungan BNI	50.125.884,00	0,00
5. Tabungan BRI	92.225.991,20	0,00
6. Depositi Bank Jatim	11.030.467.000,00	0,00
7. Depositi Bank Mandiri	2.500.000.000,00	0,00
8. Depositi Bank BRI	2.500.000.000,00	0,00
9. Deposito Bank BNI	2.500.000.000,00	0,00
Total	**23.695.743.471,85**	**28.036.186.781,37**

7.1.1.1.5. Kas di BLUD Puskesmas/JKN

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di BLUD	**3.527.548.931,14**	**2.536.318.146,84**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas/JKN di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun yang terdiri dari saldo tunai dan saldo bank pada tanggal 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016.

Perincian kas di kas BLUD Puskesmas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas di Kas BLUD Puskesmas/JKN	Tahun 2017	Tahun 2016
1. BLUD Puskesmas Patihan	444.403.955,51	226.762.773,11
2. BLUD Puskesmas Manguharjo	758.738.862,12	634.198.364,88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	BLUD Puskesmas Banjarejo	1.003.389.353,68	649.268.848,12
4.	BLUD Puskesmas Demangan	427.915.077,03	281.621.388,60
5.	BLUD Puskesmas Oro-Oro Ombo	612.115.699,05	564.111.811,69
6.	BLUD Puskesmas Tawangrejo	280.965.619,75	180.354.960,44
	Total	**3.527.548.931,14**	**2.536.318.146,84**

7.1.1.1.6. Kas Lainnya

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas Lainnya	**1.296.531.173,84**	**2.672.067.089,70**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas lainnya berupa sisa kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN, SMPN di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Sisa dana BOS SDN dan SMPN serta bunga bank atas rekening BOS merupakan sisa kas yang dapat dipergunakan untuk operasional sekolah pada tahun berikutnya.
Perincian kas di kas lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember2017dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Kas Lainnya	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Sisa Dana BOS SMAN dan SMKN		2.158.880.825,00
2. Sisa Dana BOS SDN	141.502.793,30	83.710.091,70
3. Sisa Dana BOS SMPN	1.155.028.380,54	129.476.173,00
4 Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Total	**1.296.531.173,84**	**2.672.067.089,70**

7.1.1.1.7. Deposito

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Deposito	**240.000.000.000,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah deposito berjangka 1 bulan Pemerintah Kota Madiun pada Bank Jatim Cabang Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Tidak terdapat saldo deposito berjangka 1 (satu) bulan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016karena telah dicairkan semua dan telah dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Madiun.

Nomor Bilyet Deposito Bank Jatim	Tahun 2017	Tahun 2016
1. 324517	20.000.000.000,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	324522	20.000.000.000,00	0,00
3	324523	20.000.000.000,00	0,00
4.	324525	20.000.000.000,00	0,00
5.	324535	20.000.000.000,00	0,00
6.	324536	20.000.000.000,00	0,00
7.	324540	20.000.000.000,00	0,00
8.	324863	20.000.000.000,00	0,00
9.	324865	20.000.000.000,00	0,00
10.	324870	20.000.000.000,00	0,00
11.	324872	20.000.000.000,00	0,00
12.	324873	20.000.000.000,00	0,00
	Total	**240.000.000.000,00**	**0,00**

7.1.1.2. Piutang Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang Pajak Daerah	**4.560.680.557,40**	**3.769.953.866,00**

Jumlah saldo piutang pajak daerah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah yang belum tertagih pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perubahan piutang pajak daerah per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang Pajak Daerah	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Pajak hotel	6.149.250,00	4.711.638.657,00	4.701.919.454,00	15.868.500,00
Pajak rumah kos	10.630.000,00	266.802.000,00	272.477.000,00	4.955.000,00
Pajak restoran	100.026.968,00	7.170.387.520,48	7.184.100.061,77	86.413.427,18
Pajak hiburan	70.767.275,00	1.266.020.438,00	1.303.023.863,00	33.764.350,00
Pajak reklame	37.381.000,00	2.787.017.108,00	2.775.302.703,00	49.105.405,00
Pajak penerangan jalan	1.408.219.478,00	18.713.603.982,95	18.503.214.981,13	1.618.609.480,82
Pajak parkir	0,00	1.349.788.267,00	1.349.788.267,00	0,00
Pajak air tanah	2.600.080,00	300.899.743,94	302.830.125,54	669.728,40
PBB	2.134.179.815,00	19.073.326.203,00	18.456.211.352,00	2.751.294.666,00
BPHTB	0,00	20.375.963.778,00	20.375.963.778,00	0,00
Piutang Pajak Daerah 2017	**3.769.953.866,00**	**76.015.447.698,37**	**75.224.831.585,44**	**4.560.680.557,40**
			Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2017	**497.747.971,75**
			Piutang Pajak Daerah Neto 2017	**4.062.932.585,65**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan data-data piutangpajak daerah tersebut di atas terdapat hal-hal yang harus dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi pajak hotel tahun 2017 terdapat lebih setor sebesar Rp47,00, pada wajib pajak Amaris. Realisasi pajak hotel tahun 2017 yang seharusnya Rp4.974.396.454,00 telah dibukukan sebesar Rp4.974.716.454,00, sehingga terjadi selisih Rp320.000,00. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan petugas pungut dalam memasukan kode rekening yang seharusnya masuk dalam pajak reklame dibukukan kedalam pajak rumah kost yang terdapat dalam pajak hotel. Kesalahan pembukuan tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2017 wajib pajak an. Toko Mirasa.
b. Realisasi pajak restoran tahun 2017 terjadi lebih setor sebesarRp99.000,47 terjadi pada wajib pajak Desert and Drink sebesar Rp5,00, Warung The Java sebesar Rp98.901,47 dan The Cemiland sebesar Rp9,00.
c. Realisasi pajak hiburan tahun 2017 terdapat lebih setor sebesar Rp500,00 terdapat pada wajib pajak Galaksi Gym.
d. Realisasi pajak reklame terjadi selisih Rp320.000,00 hal ini dikarenakan adanya kesalahan petugas pungut dalam memasukan kode rekening yang seharusnya masuk dalam pajak reklame dibukukan kedalam pajak rumah kost yang terdapat dalam pajak hotel. Kesalahan pembukuan tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2017 wajib pajak an. Toko Mirasa.
e. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017 terdapat lebih setor sebesar Rp10.000,00 pada wajib pajak Mulia Textil.
f. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN terdapat kelebihan setor sejumlah Rp1.001,00 pada Wajib Pajak PT. Multipolar, Tbk.
g. Pajak air bawah tanah terjadi kelebihan setor sebesar Rp30,00 yang terdiri dari wajib pajak Herlin Astuti Ningsih dengan NPWPD 1.003.00.122.03.02 pembayaran untuk bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp20,00, dan wajib pajak Hotel Sarangan Permai dengan NPWPD 1.003.00129.02.03 pembayaran untuk bulan April sampai dengan Juni 2017 sebesar Rp10,00 terhadap SKP yang telah diterbitkan.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	Diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak daerah per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak hotel	15.868.500,00	0,00	0,00	15.868.500,00
Pajak rumah kos	4.955.000,00	0,00	0,00	4.955.000,00
Pajak restoran	11.302.877,18	350.000,00	74.760.550,00	86.413.427,18
Pajak hiburan	17.891.250,00	0,00	15.873.100,00	33.764.350,00
Pajak reklame	18.550.505,00	6.137.200,00	24.417.700,00	49.105.405,00
Pajak penerangan jalan	1.618.609.480,82	0,00	0,00	1.618.609.480,82
Pajak parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak air tanah	112.598,40	0,00	557.130,00	669.728,40
PBB	1.423.438.964,00.	639.350.330,00	688.505.372,00	2.751.294.666,00
BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah 2017	**3.110.729.175,40**	**645.837.530,00**	**804.113.852,00**	**4.560.680.557,40**
Penyisihan Piutang Pajak Daerah 2017	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan Pajak DaerahTahun 2017	31.107.291,75	64.583.753,00	402.056.926,00	**497.747.971,75**
Piutang Pajak Daerah Netto Tahun 2017	**3.079.621.883,65**	**581.253.777,00**	**402.056.926,00**	**4.062.932.585,65**

7.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang Retribusi Daerah	**2.409.952.554,00**	**1.504.679.991,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi daerah di lingkungan Pemeritah Kota Madiun yang belum tertagih dan belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2017.

Perincian perubahan piutang retribusi daerah per 31 Desember 2017 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang Retribusi Daerah	**1**	**2**	**3**	**4 = 1 + 2 – 3**
1. Dinas PU dan TR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	**67.500.000,00**	**0,00**	**67.500.000,00**	**0,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	67.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dinas Perhubungan	**12.150.000,00**	**0,00**	**1.160.500,00**	**10.989.500,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	12.150.000,00	0,00	1.160.500,00	10.989.500,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dinas Budparpora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BKD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BPKAD	**405.870.231,00**	**56.933.983,00**	**64.115.500,00**	**398.688.714,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	405.870.231,00	56.933.983,00	64.115.500,00	398.688.714,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kec Kartoharjo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kec Taman	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kec Taman	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dinas Pertanian & KP	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dinas Perdagangan	**1.019.159.760,00**	**1.583.319.300,00**	**602.204.720,00**	**2.000.274.340,00**
Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Usaha	1.019.159.760,00	1.583.319.300,00	602.204.720,00	2.000.274.340,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah 2017	**1.504.679.991,00**	**1.640.253.283,00**	**734.980.720,00**	**2.409.952.554,00**
			Penyisihan Piutang Retribusi Daerah 2017	**(479.420.814,53)**
			Piutang Retribusi Daerah Netto 2017	**1.930.531.739,47**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi daerah per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang Retribusi Daerah				
1. Dinas PU dan TR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dinas Perhubungan	0,00	2.430.000,00	8.559.500,00	10.989.500,00
4. Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BPKAD	56.933.983,00	49.582.920,00	292.171.811,00	398.688.714,00
7. Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dinas Pertanian & KP	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dinas Perdagangan	989.969.900,00	479.418.480,00	530.885.960,00	2.000.274.340,00
Total Piutang Retribusi 2017	**1.046.903.883,00**	**531.431.400,00**	**831.617.271,00**	**2.409.952.554,00**
Penyisihan Piutang Retribusi 2017	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan Piutang Retribusi 2017	10.469.038,83	53.143.140,00	415.808.635,50	(479.420.814,33)
Piutang Retribusi Netto 2017	**1.036.434.844,17**	**478.288.260,00**	**415.808.635,50**	**1.930.531.739,67**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	431.090.096,00	541.181.314,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2017 dan tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan tagihan atas penjualan bedak pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2017.

Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2017	541.181.314,00	0,00	110.091.218,00	431.090.096,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2017	270.590.657,00	0,00	55.045.609,00	215.545.048,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2017			215.545.048,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pasar Logam	0,00	0,00	110.545.700,00	110.545.700,00
Pasar Mojorejo Lama	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Mojorejo Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Srijaya I	0,00	0,00	20.967.130,00	20.967.130,00
Pasar Srijaya II	0,00	0,00	170.288.000,00	170.288.000,00
Pasar Kawak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar Sleko	0,00	0,00	30.482.600,00	30.482.600,00
Pasar Jalan Opak	0,00	0,00	40.200.000,00	40.200.000,00
Pasar Kanigoro	0,00	0,00	58.606.666,00	58.606.666,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2017	**0,00**	**0,00**	**431.090.096,00**	**431.090.096,00**
Penyisihan 2017	1%	10%	50%	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 2017	**0,00**	**0,00**	**215.545.048,00**	**215.545.048,00**
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto 2017	**0,00**	**0,00**	**215.545.048,00**	**215.545.048,00**

7.1.1.5. Piutang Lain-lain

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang Lain-lain	**35.885.862.487,70**	**31.083.765.577,79**

Jumlah tersebut merupakan jumlah piutang lain-lain yang seharusnya diterima Pemerintah Kota Madiun tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember2016. Piutang lain-lain terdiri dari bagian lancar investasi dana bergulir, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang DBH pajak propinsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang Lain-Lain	1	2	3	4 = (1 + 2 -3)
Bagian lancar investasi dana bergulir	90.992.300,00	0,00	0,00	90.992.300,00
Bagian lancar tuntutan ganti rugi	188.325.016,51	0,00	188.325.016,51	0,00
Piutang Denda retribusi pemakaian kekayaan daerahDLH	18.860.000,00	0,00	18.860.000,00	0,00
Piutang bagi hasil laba BUMD	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70
Piutang DBH pajak &SP III	14.498.223.816,00	14.321.326.285,00	14.498.223.816,00	14.321.326.285,00
Piutang Klaim BLUD	10.436.792.851,00	15.561.302.672,00	10.436.792.851,00	15.561.302.672,00
Piutang Lain-Lain 2017	**31.083.765.577,79**	**35.794.870.187,70**	**30.992.773.277,79**	**35.885.862.487,70**
		Penyisihan Piutang lain lain 2017		**(403.444.851,88)**
		Piutang Lain-Lain Netto 2017		**35.482.417.635,82**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi pada 1 Januari 2017 berasal dari saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi tahun 2016 sebesar Rp188.325.016,51 dikoreksi direklas ke aset lain-lain – tuntutan ganti rugi sebesar Rp188.325.016,51 sehingga pada tanggal 31 Desember 2017 bersaldo nol.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Piutang lain-lain				
Bagian lancar investasi dana bergulir	0,00	0,00	90.992.300,00	90.992.300,00
Piutang bagi hasil laba BUMD	5.912.241.230,70	0,00	0,00	5.912.241.230,70
Piutang DBH pajak &SP III	14.321.326.285,00	0,00	0,00	14.321.326.285,00
Piutang Klaim BLUD	15.561.302.672,00	0,00	0.00	15.561.302.672,00
Jumlah Piutang Lain-lain 2017	**35.794.870.187,70**	**0,00**	**90.992.300,00**	**35.885.862.487,70**
Penyisihan 2017	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan Piutang Lain-lain 2017	357.948.701,88	0,00	45.496.150,00	(403.444.851,88)
Piutang Lain-Lain Netto 2017	**35.436.921.485,82**	**0,00**	**45.496.150,00**	**35.482.417.635,82**

7.1.1.5.1.Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir	**90.992.300,00**	**90.992.300,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo jumlah bagian lancar investasi dana bergulir yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi dari investasi dana bergulir tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pada tahun 2017 bagian lancar investasi dana bergulir tersebut merupakan investasi dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, Usaha Mikro yang telah jatuh tempo sedangkan pada tahun 2016 di kelola oleh Dinas Perdangangan Koperasi dan Pariwisata.

Perincian perubahan investasi dana bergulir per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	55.190.100,00	0,00	3.870.000,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	14.440.000,00	0,00	0,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	21.772.200,00	0,00	300.000,00	21.472.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2017	**95.162.300,00**	**0,00**	**4.170.000,00**	**90.992.300,00**
	Penyisihan Bagian Lancar Invstasi Dana Bergulir 2017			45.496.150,00
	Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2017			**45.496.150,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Klasifikasi Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir				
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro				
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2002	0,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2004	0,00	0,00	51.320.100,00	51.320.100,00
Industri Kecil Menengah Dana Bergulir 2005	0,00	0,00	14.440.000,00	14.440.000,00
Koperasi dan UKM Dana Bergulir 2006	0,00	0,00	21.472.200,00	21.472.200,00
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir 2017	**0,00**	**0,00**	**90.992.300,00**	**90.992.300,00**
Penyisihan 2017	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan bagian lancar investasi dana bergulir 2017	**0,00**	**0,00**	**45.496.150,00**	**45.496.150,00**
Bagian Lancar Investasi Dana Bergulir Netto 2017	**0,00**	**0,00**	**45.496.150,00**	**45.496.150,00**

7.1.1.5.2.Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	188.325.016,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah saldo bagian lancar tuntutan ganti rugi yang akan jatuh dalam jangka waktu 1 tahun yang akan datang, yang diperoleh dari reklasifikasi tuntutan ganti rugi tetapi belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Bagian lancar tuntutan ganti rugi yang tersaji pada tahun 2016, pada tahun 2017 dikoreksi dan direklas ke aset lain-lain tuntutan ganti rugi.

7.1.1.5.3.Piutang Bagi Hasil Laba BUMD

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang Bagi Hasil Laba BUMD	**5.912.241.230,70**	**5.850.571.594,28**

Jumlah saldo piutang bagi asil laba usaha BUMD tersebut merupakan jumlah piutang bagi hasil laba usaha BUMD atas deviden yang seharusnya diakui dan dicatat sebagai hak Pemerintah Kota Madiun pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Piutang bagi hasil laba usaha BUMD terdiri dari bagian atas laba usaha Laporan Keuangan Audited PDAM, PD. Bank Daerah, PD. Aneka Usaha dan deviden dari Bank Jatim. Perincian perubahan piutang bagi hasil laba usaha BUMD per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang Bagi Hasil Laba BUMD				
PDAM	0,80	0,00	0,00	0,00
PD Bank Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Jatim	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70
Piutang Bagi Hasil Laba BUMD 2017	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70
			Penyisihan Piutang BUMD2017	59..122.412,31
			Piutang BUMD Netto 2017	**5.853.118.818,39**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang Bagi Hasil Laba Usaha BUMD per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
PD BPR Bank Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PD Aneka Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
Bank Jatim	5.912.241.230,70	0,00	0,00	5.912.241.230,70
	5.912.241.230,70	**0,00**	**0,00**	**5.912.241.230,70**
Penyisihan Piutang BUMD 2017	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan Piutang BUMD 2017	59..122.412,31	**0,00**	0,00	59..122.412,31
Piutang BUMDNetto2017	**5.853.118.818,39**	**0,00**	0,00	**5.853.118.818,39**

7.1.1.5.4.Piutang BLUD

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang BLUD	**15.534.772.692,00**	**10.436.792.851,00**

Jumlah saldo piutang BLUD tersebut merupakan jumlah tagihan piutang BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Madiunyang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Piutang BLUD terdiri dari Piutang BLUD pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun

Perincian perubahan Piutang BLUD per 31 Desember 2017 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang BLUD				
RSUD				
BPJS	10.436.792.851,00'	15.534.772.692,00	10.436.792.851,00	15.534.772.692,00
Inhealth	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamkesda	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamkesmasta	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. KAI	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. INKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD 2017	10.436.792.851,00'	15.534.772.692,00	10.436.792.851,00'	15.534.772.692,00
			Penyisihan Piutang BLUD 2017	**155.347.726,92**
			Piutang BLUD Netto 2017	**15.379.424.965,08**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang BLUD per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
RSUD				
BPJS	15.534.772.692,00	0,00	0,00	15.534.772.692,00
Inhealth	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamkesda	0,00	0,00	0,00	0,00
Jamkesmasta	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. KAI	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. INKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD 2017	15.534.772.692,00	**0,00**	**0,00**	15.534.772.692,00
Penyisihan Piutang BLUD	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan Piutang BLUD 2017	**155.347.726,92**	0,00	0,00	**155.347.726,92**
Piutang BLUD Netto 2017	**15.379.424.965,08**	**0,00**	**0,00**	**15.379.424.965,08**

7.1.1.5.5.Piutang DBH Pajak Provinsi

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi	**14.321.326.285,00**	**14.498.223.816,00**

Jumlah saldo piutang DBH Pajak Propinsi tersebut merupakanjumlah tagihan piutang DBH Pajak dan SP III Provinsi yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Piutang DBH Pajak Propinsi tersebut disebabkan karena penetapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang DBH Pajak Provinsi definitif baru terbit pada tanggal 28 Desember 2017.

Perincian perubahan Piutang DBH Pajak Propinsi per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Piutang DBH Pajak Propinsi				
Pajak Kendaraan Bermotor	4.164.501.942,00	175.104.822,00	0,00	4.339.606.764,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.925.015.111,00	427.001.519,00	0,00	2.352.016.630,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.480.366.741,00	432.781.639,00	0,00	.2.913.148.380,00
Pajak Air Permukaan	45.501.910,00	0,00	7.344.015,00	38.157.895,00
Pajak Rokok	5.882.838.112,00	0,00	8438.488.173,00	4.678.396.616,00
Piutang DBH Pajak Provinsi 2017	14.498.223.816,00	1.034.887.980.00	8.445.832.188,00	14.321.326.285,00
		Penyisihan Piutang DBH Pajak 2017		**143.213.262,85**
		Piutang DBH Pajak Neto 2017		**14.178.113.022,15**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur Piutang DBH Pajak Propinsi per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Pajak Kendaraan Bermotor	4.339.606.764.00	0,00	0,00	4.339.606.764.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.352.016.630.00	0,00	0,00	2.352.016.630.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.913.148.380.00	0,00	0,00	2.913.148.380.00
Pajak Air Permukaan	38.157.895.00	0,00	0,00	38.157.895.00
Pajak Rokok	4.678.396.616,00	0,00	0,00	4.678.396.616,00
Piutang DBH Pajak Propinsi 2017	**14.321.326.285.00**	**0,00**	**0,00**	**14.321.326.285.00**
Penyisihan Piutang DBH Pajak Propinsi	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan piutang DBH Pajak Propinsi 2017	**143.213.262,85**	0,00	0,00	143.213.262,85
Piutang DBH Pajak Propinsi Netto 2017	**14.178.113.022,15**	**0,00**	**0,00**	**14.178.113.022,15**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.1.6. Persediaan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Persediaan	**11.908.197.507,47**	**12.648.252.970,18**

Jumlah tersebut merupakan jumlah persediaan yang masih tersisa berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) yang terdiri dari persediaan obat dan persediaan barang pakai habis pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian saldo persediaan Per 31 Desember 2017 tersaji pada tabel di bawah ini

No	Persediaan	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Persediaan Obat	8.988.358.016,79	9.100.637.395,17
2	Persediaan Bahan Pakai Habis	2.919.819.490,68	3.547.615.575,01
	Jumlah	**11.908.197.507,47**	**12.648.252.970,18**

Persediaan obat pada Dinas Kesehatan terdiri dari sisa persediaan obat pada gudang perbekalan dan seluruh puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2017. Persediaan obat pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri seluruh sisa persediaan obat termasuk di seluruh ruang/poli di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang belum terpakai sampai dengan 31 Desember 2017.

Perincian saldo persediaan obat Per 31 Desember 2017sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

No	Persediaan Obat	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Kesehatan	5.545.916.191,79	5.668.734.307,17
	Kedaluwarsa	(60.987.365)	(8.011.084.551,17)
2	RSUD	3.340.579.655,00	2.343.722.764,00
	Kedaluwarsa	(2.690.004,00)	(1.372.520)
3	Dinas Pertanian	101.862.170,00	0,00
	Kedaluwarsa	(0,00)	(0,00)
	Jumlah	**8.988.358.016,79**	**9.100.637.395,17**

Persediaan bahan pakai habis meliputi alat tulis kantor, barang cetakan, karcis, pakaian dinas dan alat-alat Kontrasepsi. Perincian persediaan bahan pakai habis Per SKPD per 31 Desember 2016 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) sebagaimana tersaji dibawah ini.

No	Persediaan Bahan Pakai Habis	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	0,00	1.151.459.385,56
4	RSUD	0,00	1 .942.490.944,95

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5	Dinas Pekerjaan Umum	0,00	935.000,00
6	Bappeda	0,00	0,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	96.030.246,50
8	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	0,00	0,00
9	Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	553.141.482,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	0,00	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
13	Kantor Satpol PP	0,00	0,00
14	Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00
15	DPRD	0,00	0,00
16	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00
17	Bagian Admistrasi Pemerintahan	0,00	0,00
18	Bagian Hukum	0,00	0,00
19	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
20	Bagian Administrasi Perekonomian Sosial	0,00	0,00
21	Bagian Organisasi	0,00	0,00
22	Bagian Umum	0,00	377.177.475,00
23	Bagian Humas	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD	0,00	0,00
26	BPKAD SKPKD	0,00	0,00
27	Inspektorat	0,00	0,00
28	Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00
29	Kecamatan Taman	0,00	0,00
30	Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00
32	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)	0,00	375.000,00
33	Dinas Pendapatan Daerah	0,00	15.724.063,00
34	BPM, KB dan Ketahanan Pangan	0,00	446.079.936,00
35	Dinas Pertanian	0,00	48.380.473,00
36	Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00
37	Dinas Pasar	0,00	4.001.793,00
	Jumlah	**0,00**	**3.547.615.575,01**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017. Perincian persediaan bahan pakai habis Per SKPD per 31 Desember 2017 berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) sebagaimana tersaji dibawah ini.

No	Persediaan Bahan Pakai Habis	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan dan KB	470.434.734,86	1.151.459.385,56
3	RSUD	1.213.094.676,82	854.310.720,95
4	Dinas Pekerjaan Umum	195.000,00	935.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
6	Dinas Satpol PP	0,00	0,00
7	Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00
8	Dinas Sosial, PP, PA / BPM & KB	0,00	0,00
9	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian & Trans	2.103.550,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	655.606.232,00	553.141.482,00
12	Dinas Perhubungan	181.598.120,00	96.030.246,50
13	Dinas Informasi dan Komunikasi	0,00	0,00
14	Dinas PM,PTSP,Koperasi,Usaha Mikro/KPPT	358.000,00	375.000,00
15	Dinas Budparpora	0,00	0,00
16	Dinas Perpustkaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00
17	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00
18	DPRD	0,00	0,00
19	Bagian Admistrasi Pemerintahan	0,00	0,00
20	Bagian Organisasi	0,00	0,00
21	Bagian Umum	353.449.750,00	377.177.475,00
22	Bagian Hukum	0,00	0,00
23	Bagian Administrasi Perekonomian & Kesra	0,00	0,00
24	Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	7.500.000,00
27	BPKAD SKPD	0,00	0,00
28	BPKAD SKPKD	0,00	0,00
29	Badan Pendapatan Daerah	29.428.663,00	15.724.063,00
30	Inspektorat	0,00	0,00
31	Bappeda	0,00	0,00
32	Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33	Kecamatan Manguharjo	570.250,00	0,00
34	Kecamatan Taman	0,00	0,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
36	Dinas Pertanian dan KB	5.230.326,00	48.380.473,00
37	Dinas Perdagangan	7.770.188,00	4.001.793,00
	Jumlah	**2.919.819.490,68**	**3.547.615.575,01**

7.1.1.7. Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Belanja Dibayar Dimuka	**2.502.473.928,43**	**1.521.877.477,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja asuransi dibayar dimuka pada akhir tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.Pada tahun 2017 asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017sesuai Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor: 027/PPK/3163/401.202/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang meliputi polis asuransi kebakaran *(property all risk)*, polis asuransi gempa bumi, dan polis asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan pada tahun 2016asuransi yang telah dibayar tersebut memiliki masa manfaat 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016 sesuaiSurat Perjanjian Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. Asuransi Sinar Mas Nomor : 027/PPK/4551/401.207/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang meliputi polis asuransi kebakaran *(property all risk)*, polis asuransi gempa bumi.

7.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Investasi Jangka Panjang	**143.177.019.700,89**	**145.062.240.037,43**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi jangka panjang milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian investasi jangka panjang Per 31 Desember 2017sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

No	Investasi Jangka Panjang	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Investasi Non Permanen	18.252.979.502,15	17.249.282.067,54
2	Investasi Permanen	123.037.629.334,14	127.812.957.969,89
	Jumlah	**141.290.608.836,29**	**145.062.240.037,43**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Investasi Non Permanen	18.252.979.502,15	17.249.282.067,54

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanennetto setelah memperhitungkan cadangan penyisihan milik Pemerintah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

7.1.2.1.1.Investasi Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Investasi Dana Bergulir	22.535.722.180,36	21.282.514.160,06

Jumlah tersebut merupakan jumlah investasi non permanen kepada Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang terdiri dari modal yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemupukan modal setelah memperhitungkan penyisihan piutang LKK sampai dengan 31 Desember 2017.

Perincian investasi dana bergulir LKK Per 31 Desember 2017sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.

No	Investasi Dana Bergulir LKK	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Modal Pemerintah Kota Madiun	12.233.825.000,00	12.233.825.000,00
2	Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi	1.161.342.067,00	1.161.342.067,00
3	Penambahan dana CCB di Kel. Kelun	0,00	0,00
4	Pemupukan Modal dari Laba Usaha	7.887.347.093,06	6.523.651.539,44
5	Pemupukan Modal dari Dana Sosial dan Pendidikan	0,00	1.363.691.807,70
6	Koreksi selisih lebih/kurang	1.854,20	0,00
7	Laba / Rugi LKK Kota Madiun	1.253.206.166,10	0,00
8	**Jumlah Investasi Dana Bergulir LKK**	**22.535.722.180,36**	**21.282.514.160,06**
9	**Cadangan Penyisihan Piutang LKK**	**(4.282.742.678,21)**	**(4.033.232.092,52)**
10	***Investasi Dana Bergulir LKK Netto***	**18.252.979.502,15**	**17.249.282.067,54**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa perguliran nilai Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.535.722.180,36. Nilai tersebut termasuk modal yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nilai pemupukan modal, Koreksi selisih lebih/kurang Rp1.854,20 beserta Laba yang diperoleh LKK. Rincian laba berasal dari total LKK yang mendapatkan laba sebesar Rp1.262.126.991,10 dikurangi dengan LKK yang rugi sebesar Rp8.920.825,00 maka diperoleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

laba keseluruhan sebesar Rp1.253.206.166,10. Selain itu, nilai penyisihan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.282.742.678,21 tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Perincian investasi non permanen-dana bergulir Per 31 Desember 2017 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Dana Bergulir LKK				
Modal	13.395.167.067,00	0,00	0,00	13.395.167.067,00
Pemupukan Modal	7.887.347.093,06	0,00	0,00	7.887.347.093,06
Koreksi selisih lebih/kurang		4.697,40	2.854,20	1.854,20
Laba atau Rugi LKK		1.262.126.991,10	(8.920.825,00)	1.253.206.166,10
Dana Bergulir LKK 2017	**21.282.514.160,06**	**2.153.699.250,24**	**(8.104.000,00)**	**22.535.722.180,36**
		Penyisihan Dana Bergulir LKK 2017		**(4.282.742.678,21**
		Dana Bergulir LKK Neto 2017		**18.252.979.502,15**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, investasi non permanen tahun 2017 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV). LKK mengklasifikasikan pinjaman dana yang digulirkan kepada masyarakat sesuai kategori yaitu lancar, kurang lancar dan macet.

Perincian investasi non permanen berupainvestasi dana bergulir Per 31 Desember 2017tersaji dalam tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Investasi Dana Bergulir LKK				
Kec Kartoharjo				
Kanigoro	1.775.228.412,50	283.531.812,50	0,00	2.058.760.225,00
Tawangrejo	571.615.845,00	0,00	(277.500,00)	571.338.345,00
Rejomulyo	585.339.472,00	0,00	(5.414.850,00)	579.924.622,00
Pilangbango	780.331.243,80	79.071.015,20	0,00	859.402.259,00
Oro-Oro Ombo	706.673.867,30	38.992.742,70	0,00	745.666.610,00
Sukosari	677.312.646,00	31.388.640,00	0,00	708.701.286,00
Kelun	990.637.740,00	60.787.200,00	0,00	1.051.424.940,00
Kartoharjo	898.541.327,27	18.748.132,73	0,00	917.289.460,00
Klegen	506.391.149,70	3.669.408,30	(1.859.900,00)	510.060.558,00
Kec Manguharjo				
Ngegong	887.551.284,00	100.229.387,00	0,00	987.780.671,00
Sogaten	596.641.938,00	16.513.068,38	0,00	613.155.006,38

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Madiun Lor	675.094.002,31	13.032.697,81	0,00	688.126.700,12
Patihan	581.804.174,00	18.892.670,00	0,00	600.696.844,00
Nambangan Kidul	1.173.883.071,50	63.085.810,00	0,00	1.236.968.881,50
Manguharjo	753.250.614,00	9.943.720,00	0,00	763.194.334,00
Pangongangan	651.798.700,00	28.264.000,00	(2.640,00)	680.060.060,00
Nambangan Lor	668.049.455,00	8.766.475,00	0,00	676.815.930,00
Winongo	565.566.982,10	10.916.261,90	0,00	576.483.244,00
Kec Taman				
Demangan	375.774.105,00	0,00	(3.228.475,00)	372.545.630,00
Taman	653.374.438,40	12.107.901,40	0,00	665.482.339,80
Kuncen	676.975.677,80	50.734.280,00	(1,80)	727.709.956,00
Banjarejo	1.033.435.564,60	61.652.639,90	0,00	1.095.088.204,50
Josenan	890.519.844,00	78.132.118,00	0,00	968.651.962,00
Kejuron	788.704.932,40	54.410.511,00	0,00	843.115.443,40
Mojorejo	1.348.067.958,78	160.356.091,68	0,00	1.508.424.050,46
Pandean	803.978.135,40	48.591.055,00	(1,40)	852.569.189,00
Manisrejo	665.971.579,20	10.314.050,00	(200,00)	676.285.429,20
Investasi Dana Bergulir LKK 2017	**21.282.514.160,06**	**1.262.131.688,50**	**(8.923.668,20)**	**22.535.722.180,36**
			Penyisihan Investasi Dana Bergulir LKK 2017	(4.282.742.678,21)
			Investasi Dana Bergulir LKK Neto 2017	**18.252.979.502,15**

Uraian penjelasan mengenai penambahan dan pengurangan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir dari tabel di atas adalah penambahan atas Laba LKK tahun 2017 sebesar Rp1.262.126.991,10 yang belum didistribusikan untuk pemupukan modal sebesar 60%, insentif pengurus sebesar 12%, insentif pengawas sebesar 8%, insentif karyawan sebesar 10%, serta PAD sebesar 10%.

Penambahan yang lainnya merupakan koreksi selisih kurang pada tahun 2016 sebesar Rp4.697,40 karena kesalahan membuku dengan perincian :

Perubahan 2017	Saldo 31 Des 2016 (berdasarkan LHP BPK)	Saldo 01 Jan 2017	Koreksi Selisih Kurang
Pilangbango	780.331.243,80	780.331.244,00	0,20
Oro-oro Ombo	706.673.867,30	706.673.868,00	0,70
Klegen	506.391.149,70	506.391.150,00	0,30
Manguharjo	753.250.614,00	753.255.284,00	4.670,00
Winongo	565.566.982,10	565.567.007,00	24,90
Taman	653.374.438,40	653.374.438,80	0,40
Banjarejo	1.033.435.564,60	1.033.435.565,50	0,90
Jumlah	**4.999.023.859,90**	**4.999.028.557,30**	**4.697,40**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengurangan atas rugi LKK tahun 2017 sebesar Rp8.920.825,00.

Pengurangan yang lainnya merupakan koreksi selisih lebih pada tahun 2016 sebesar Rp2.843,20 karena kesalahan membuku dengan perincian :

Perubahan 2017	Saldo 31 Des 2016 (berdasarkan LHP BPK)	Saldo 01 Jan 2017	Koreksi Selisih Lebih
Pangongangan	651.798.700,00	651.796.060,00	2.640,00
Kuncen	676.975.677,80	676.975.676,00	1,80
Pandean	803.978.135,40	803.978.134,00	1,40
Manisrejo	665.971.579,20	665.971.579,20	200,00
Jumlah	**2.798.724.092,40**	**2.798.721.449,20**	**2.843,20**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut:

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 – 1 tahun	Lancar	1%
2	1 – 2 tahun	Kurang lancar	10%
3	diatas 2 tahun	Macet	50%

Khusus klarifikasi umur piutang investasi non permanen dana bergulir LKK penyisihan dilakukan berdasarkan jumlah piutang yang beredar pada LKK bukan berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang investasi non pemanen LKK Per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Klasifikasi Umur Piutang	≤ 1 tahun	> 1 th < 2 th	> 2 Tahun	Jumlah
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK				
Kec Kartoharjo				
Kanigoro	1.297.630.000,00	314.978.000,00	267.428.000,00	1.880.036.000,00
Kartoharjo	235.250.000,00	44.700.000,00	193.726.700,00	473.676.700,00
Sukosari	364.283.000,00	121.595.000,00	190.398.020,00	676.276.020,00
Oro Oro Ombo	344.174.000,00	46.850.000,00	327.212.752,00	718.236.752,00
Tawang rejo	34.700.000,00	25.232.000,00	501.188.870,00	561.120.870,00
Kelun	394.853.000,00	271.575.000,00	354.186.400,00	1.020.614.400,00
Pilangbango	436.253.000,00	118.035.000,00	249.118.750,00	803.406.750,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rejomulyo	53.216.000,00	12.381.800,00	265.878.850,00	331.476.650,00
Klegen	81.350.000,00	16.790.000,00	390.568.000,00	488.708.000,00
Kec Manguharjo				
Manguharjo	267.080.000,00	68.015.000,00	402.630.000,00	737.725.000,00
Nambangan Kidul	261.426.000,00	72.020.000,00	415.512.750,00	748.958.750,00
Winongo	146.250.000,00	31.650.000,00	376.607.750,00	554.507.750,00
Ngegong	652.637.941,00	180.945.278,00	121.191.973,00	954.775.192,00
Sogaten	185.983.000,00	65.001.000,00	220.613.445,00	471.597.445,00
Pangongangan	334.430.000,00	50.673.000,00	273.244.000,00	658.347.000,00
Patihan	139.640.000,00	34.260.000,00	380.974.670,00	554.874.670,00
Madiun Lor	193.895.500,00	93.807.000,00	379.759.850,00	667.462.350,00
Nambangan Lor	192.300.000,00	12.250.000,00	461.152.802,00	665.702.802,00
Kec Taman				
Josenan	696.699.000,00	107.956.000,00	94.449.000,00	899.104.000,00
Taman	193.722.000,00	42.476.000,00	255.834.500,00	492.032.500,00
Pandean	337.195.000,00	64.387.000,00	424.150.500,00	825.732.500,00
Mojorejo	1.097.344.000,00	151.870.000,00	161.531.250,00	1.410.745.250,00
Manisrejo	236.930.000,00	50.030.000,00	378.867.000,00	665.827.000,00
Kejuron	299.685.500,00	67.200.500,00	325.565.300,00	692.451.300,00
Kuncen	262.639.000,00	138.125.000,00	137.750.000,00	538.514.000,00
Banjarejo	519.824.500,00	178.337.000,00	176.960.500,00	875.122.000,00
Demangan	0,00	18.372.500,00	173.893.500,00	192.266.000,00
Piutang Dana Bergulir LKK 2017	**9.259.390.441,00**	**2.399.512.078,00**	**7.900.395.132,(**	**19.559.297.651,00**
Penyisihan piutang LKK	**1%**	**10%**	**50%**	
Penyisihan piutang Dana Bergulir LKK2017	**92.593.904,41**	**239.951.207,80**	**3.950.197.566,00**	**4.282.742.678,21**
Investasi Non Permanen Dana Bergulir LKK Neto 2017	**9.166.796.536,59**	**2.159.560.870,20**	**3.950.197.566,00**	**15.276.554.972,79**

7.1.2.1.2.Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Penyisihan Kerugian Dana Bergulir	**4.282.742.678,21**	**4.033.232.092,52**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyisihan piutang dana bergulir investasi non permanen pada LKK di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada akhir tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, menyatakan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penyajian atas investasi non permanen berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value* (NRV)). Berdasarkan perhitungan penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebagaiamana tersebut di atas. Pemerintah Kota Madiun menyajikan nilai penyisihan tidak berdasarkan nilai investasi non permanen – investasi dana bergulir yang sesungguhnya yaitu dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) dari perolehan modal pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Penyisihan tersebut dihitung berdasarkan nilai piutang yang beredarpada seluruh LKK , bukan dihitung berdasarkan jumlah nilai investasi non permanen LKK. Perincian penyisihan investasi non permanen berupainvestasi dana bergulir Per 31 Desember 2017tersaji dalam tabel di bawah ini.

No	Penyisihan Piutang	Tahun 2017	Tahun 2016
1	Penyisihan Piutang Lancar	92.593.904,41	97.027.813,22
2	Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	239.951.207,80	216.255.157,80
3	Penyisihan Piutang Macet	3.950.197.566,00	3.719.389.121,50
	Jumlah	**4.282.742.678.21**	**4.033.232.092,52**

7.1.2.2. Investasi Permanen

7.1.2.2.1.Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Penyertaan Modal Pemda	**124.924.040.198,74**	**127.812.957.969,89**

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2017. Pencatatan investasi permanen pada BUMD Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang disetorkan ke kas daerah. Sedangkan investasi permanen pada Bank Jatim menggunakan *cost method* sehingga investasi dicatat sebesar modal yang ditempatkan pada Bank Jatim. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Perubahan 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Penyertaan Modal Pemda				
PDAM	45.431.034.019,80	10.310.194.057,00	8.292.183.385,00	47.449.044.691,80
PD. BPR Bank Daerah Saldo Awal	38.666.115.767,67			
Koreksi Saldo Awal	2.104.671.474,38			
PD BPR Bank Daerah	40.770.787.242,05	2.749.499.888,00	2.034.451.737,11	41.485.835.392,94
PD Aneka Usaha	10.199.701.432,42	639.491.661,00	8.468.111.092,42	2.473.053.364,00
Bank Jatim	33.516.106.750,00	0.00	0.00	33.516.106.750,00
Jumlah	**127.812.957.969,89**	**15.803.857.080,38**	**18.794.746.214,53**	**124.924.040.198,74**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perusahaan Daerah Air Minum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2014 Tentang PDAM ditetapkan modal disetor sebesar Rp50.000.000.000,00. Yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan pelayanan umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2014 tentang PDAM, Pasal 70 ayat (2) laba bersih PDAM setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%. Nilai penyertaan modal PDAM sebesar Rp.15.525.563.148,50. Modal awal PDAM terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp200.099.148,50 ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dan/ atau sumber-sumber lain yang sah.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yang telah diinvestasikan dalam perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2017. Pencatatan investasi permanen pada PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menggunakan *equity method* sehingga setiap tahun investasi permanen akan bertambah sebesar laba perusahaan dan akan berkurang sebesar laba yang telah didistribusikan sesuai dengan peruntukannnya. Perincian investasi permanen Per 31 Desember 2017tersaji pada tabel di bawah ini.

Penyertaan Modal pada PDAM

Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun, dan terakhir diubah dengan Perda No. 17 Tahun 2001	200,099,148.50
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1993/1994 pasal No. 2P.0.172.01-002 disetor tanggal 04 Maret 1994	4.000.000,00
Anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 1994/1995 pasal No. 2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2.000.000,00
Pelunasan hutang RPD No. RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No. 4017-IND, PPP No. SLA-114/DP3/1999 oleh Pemerintah Kota Madiun dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 4 tahun 2002	5.969.273.000,00
Bantuan Modal sesuai SK Walikota No. 18 Tahun 2002	2.000.000.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	486.610.000,00
Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan Sektor Air Bersih Kota Madiun (Berita Acara Pemerihtah Kota Madiun No : 650/202/413.109/2000 tanggal 2 Januari 2001) terdiri dari : a. Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjan 2.757 m sebesar 49.148.000 b. Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 m lengkap dengan panel dan pompa 1 unit sebesar 99.990.000,00 c. Pompa submersible kapasitas 40l/dt H= 40 m, 2 unit dan motor protektor 2 unt sebesar 118.734.000,00	267.872.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun sesuai BAC 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dan Direktur PDAM)	281.500.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-AB sesuai BA No. 650/001A/413.401/2005 (antara Walikota dan	173,500,000.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktur PDAM)	
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota madiun Sesuai Berita Acara No. 050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota dan Direktur PDAM) dengan perincian : a. Sumur Dalam 312.513.000,00 b. Pompa Submerble 247.041.000,00 c. Jaringa Perpipaan 1.087.614.000,00 d. Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa 135.383.000,00 e. Instalasi Gas Chlor 82.642.000,00 f. Pagar keliling Instalasi Sumur 128.5356.000,00	1.993.728.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa barang Sesuai Berita Acara No. 030/3180/401.024/2007 berupa : a. Alat-2 Pengolahan Air 69.300.000,00 b. Jaringan Pipa Distribusi 463.850.000,00 c. Sumur-sumur 352.137.000,00	885.287.000,00
Bantuan dari Pemerintah Kota Madiun berupa hasil kegiatan pembangunan saluran pemukiman dan jaringan air bersih kota Madiun sesuai Berita Acara Nomor : 050/880/401.109/2008 denga rincian : a. Sumur-sumur 515.999.000,00 b. Peralatan Pompa 67.331.000,00 c. Alat-alat Pengolahan Air 158.774.000,00 d. Jaringan pipa distribusi 826.925.000,00	1.569.029.000,00
Berita Acara Serah Terima Konstruksi Jaringan Air Milik Pemerintah Kota Madiun No. 028/802/401.012/2009 tertanggal 2 September 2009 berupa : a. Pengadan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi serta pembuatan MCK 7 (tujuh) 434.220.000,00 b. Pengadaan generator set 150 kva 399.645.000,00 c. Pembuatan sumur dalam lengkap dengan pompa q=30 liter per detik 287.900.000,00 d. Sambungan rumah murah 570.900.000,00	1.692.665.000,00
Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Milik Pemerintah Kota Madiun No. 030/1333/401.012/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan dan pemasangan Jaringan Pipa Transmisi 632.478.000,00 b. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi 830.742.000,00 c. Pemasangan sambungan rumah 695.447.500,00	2.158.667.500,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/2246/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)	543.431.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/785/401.109/2011 tentang Berita acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan sistim distribusi air minum (DAK)	775.782.000,00
Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK), Jaringan pipa Distribusi, Meter Air Induk dan Sambungan Rumah	1.089.956.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat :	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Koreksi penenyertaan modal pemerintah pusat per 31 desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :		8.094.640.663,00
a. Bantuan meter air dari Direktorat teknik penyehatan departemen penyehatan umum sebesar	30.970.000,00	
b Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1972 sd 1979 sebesar	127.445.650,00	
c. Sarana dan prasarana air bersih dari PPSAB JATIM tahun 1983 sd 1991 sebesar	3.243.396.718,00	
d. Bantuan tangki air dari PPSB Jatim sebesar	39.985.000,00	
e. Bantuan dari PPSPB tahun 1994 sebesar	374.220,00	
f. Bantuan Pipa dari PPSAB 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-Jatim/30/97 sebesar	26.164.575,00	
h. Bantuan Pipa GMS,SOCK GI dari PPSAB tanggal 29 Maret 1999 sebesar	2.544.000,00	
i. Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa pipaACP 250 diameter 240 sebesar	11.419.200,00	
j. Berita Acara tangal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam sebesar	180.744.300,00	
k. Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimpin proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahun anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :		
- Sebuah sumur dalam	223.419.000	
- Pipa distribusi ukuran 2Q dan 4Q	329.373.000	
- Pipa distribusi ukuran 4Q dan 6Q	224.268.000	
l. Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim. Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007.		
m. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor,75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desember 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan	1.819.915.900	
n. Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan	14.238.700	
o. Berita Acara Serah Terima Nomor.10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	1.633.162.300	
Penyertaan Modal Pemerintah Jawa Timur :		
Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut :		168.346.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Berita Acara Serah Terima Nomor : 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Pemukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50Q+Accesoris=2.511 M dan Pipa GI 50Q+Accesoris=-30m	100.000.000	
b. Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp379.700 sehingga totalnya	68.346.000	
		27.982.787.163,00
Penambahan Nilai Investasi Permanen Sebelum tahun 2012		2.292.905.299,00
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		**30.275.692.462,00**
Penam nilai inves permanet selama th 2012 dan 2013		850.389.361,20
a. Laba Tahun 2011	4.251.946.806,00	
b. Deviden dari laba tahun 2011 (PAD)	(2.338.570.743,30)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(212.597.340,30)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(425.194.680,60)	
e. Jasa Produksi	(425.194.680,60)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/211/401.101/2013		1.089.956.000,00
Koreksi Cadangan		(173.890.609,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2012		295.902.693,75
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2012		**32.338.049.907,95**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2012 dan 2013		909.569.900,35
a. Laba Tahun 2012	4.547.849.501,75	
b. Deviden dari laba tahun 2012 (PAD)	(2.501.317.225,96)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(227.392.475,09)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(454.784.950,18)	
e. Jasa Produksi	(454.784.950,18)	
Penambahn Modal Pemerintah Kota Madiun sesuai Berita Acara No. 050/1642/401.501/2013		53.855.000,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2013		117.827.232,17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2013		**33.419.302.040,47**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2013 dan 2014		933.135.346,80
a. Laba Tahun 2013	4.665.676.734,00	
b. Deviden dari laba tahun 2013 (PAD)	(2.566.122.203,70)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(233.283.836,70)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(466.567.673,40)	
e. Jasa Produksi	(466.567.673,40)	
f. Koreksi Cadangan		(168.299.732,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2014		1.804.284.737,73
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2014		**35.988.422.393,00**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2014 dan 2015		1.293.992.294,60
a. Laba Tahun 2014	6.469.961.473,00	
b. Deviden dari laba tahun 2014 (PAD)	(3.558.478.810,15)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(323.498.073,65)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(646.996.147,30)	
e. Jasa Produksi	(646.996.147,30)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(823.200.000,00)
Penyertaan dari Pemda sesuai Berita Acara No. :		
No. 050/088/401.501/2015		1.457.833.000,00
No. 050/359/401.501/2014		1.129.206.000,00
No. 050/361/401.501/2014		15.000.000,00
Penyertaan Dari Pemerinth Jatim sesuai Berita Acara:		
Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013		1.633.162.300,00
Penambahan nilai investasi permanen th 2015		151.789.812,86
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015		**40.846.205.800,46**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2015 dan 2016		1.324.350.257,00
a. Laba Tahun 2015	6.621.751.285,00	
b. Deviden dari laba tahun 2015 (PAD)	(3.641.963.206,75)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(331.087.564,25)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(662.175.128,50)	
e. Jasa Produksi	(662.175.128,50)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum	0,00	
Penambahan nilai investasi permanen th 2016		3.260.477.959,54
Saldo Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2016		**45.431.034.017,00**
Penambahan nilai investasi permanen selama th 2016 dan 2017		1.976.445.848,80
a. Laba Tahun 2016	9.882.229.244,00	
b. Deviden dari laba tahun 2016 (PAD)	(5.435.226.084,20)	
c. Dana Sosial & Pendidikan	(494.111.462,20)	
d. Dana Pensiun dan Sokongan	(988.222.924,40)	
e. Jasa Produksi	(988.222.924,40)	
f. Sambungan Gratis dari dangan umum		(386.399.991,00)
g. Koreksi Penyertaan Modal Pusat		1.633.162.300,00
h. Koreksi pengurangan modal pemth Jatim		(1.633.162.300,00)
Penambahan nilai investasi permanen th 2017		427.964.812,37
Penyertaan Modal PDAM 2017		**47.449.044.687,17**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. Bank Daerah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 6 ditetapkan modal dasar sebesar Rp25.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2008 sebesar Rp8.000.032.295,00. Pada tahun 2009 penyertaan modal kepada PD.BPR Bank Daerah Kota Madiun bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah serta petani binaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka membantu permodalan dengan memberikan suku bunga rendah sebagai pengganti dana perguliran yang selama ini dikucurkan melalui SKPD yang membidangi koperasi, UMKM, pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun, Pasal 95 ayat (2) laba bersih PD.BPR Bank Daerah setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk daerah sebesar 50%. Penyajian rincian saldo awal tahun 2016 atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun telah terjadi kesalahan sehingga perlu dilakukan koreksi/penyesuaian sehingga jumlah yang tersaji pada neraca lembar muka (*on face*) dengan penjelasan yang tersaji dalam catatan atas Laporan Keuangan menjadi sesuai.

Perincian penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah Per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Daerah

1	Setoran modal dasar Pemerintah Kota Madiun	8.000.032.295,00
2	Setoran penyertaan modal fasilitas kredit lunak	1.200.000.000,00
3	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010 a. Laba Tahun 2009 1.893.174.388,00 b. Deviden Tahun 2010 (946.587.194,00)	951.248.871,57
4	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011 a. Laba Tahun 2010 1.986.322.456,00 b. Deviden Tahun 2011 (1.026.471.596,22)	959.850.859,78
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2011 dan tahun 2012 a. Laba Tahun 2011 2.435.268.004,00 b. Deviden Tahun 2012 (1.217.634.001,52)	1.217.634.002,48
6	Koreksi penambahan penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah atas laba bersih karena kesalahan perhitungan, % jasa produksi tahun 2011 dikurangi dari perhitungan dengan pencatatan metode ekuitas	2.166.864.219,10
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012dan tahun 2013 a. Laba Tahun 2012 2.826.010.104,00 b. Deviden Tahun 2013 (1.413.005.051,95)	1.413.005.052,05
8	Koreksi penambahan penyertaan modal PD. BPR Bank Daerah atas laba bersih karena kesalahan perhitungan, % jasa produksi tahun 2012 dikurangi dari perhitungan dengan pencatatan metode ekuitas	282.601.010,39
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun	1.412.224.787,58

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2013 dan tahun 2014 a. Laba Tahun 2013 2.824.449.575,00 b. Deviden Tahun 2014 (1.412.224.787,42)	
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2014 dan tahun 2015 a. Laba Tahun 2014 3.262.926.995,00 b. Deviden Tahun 2015 (1.631.463.497,39)	1.631.463.497,61
11	Koreksi atas laba usaha tahun 2014 (LK Audited) yang kurang catat sebagai penambah penyertaan modal tahun 2015	71.055.940,00
12	Tambahan Penyertaan Modal secara tunai berdasarkan SP2D Nomor :900/SPP-LS/052/401.207/2015 tanggal 24 Nopember 2015	12.106.967.705,00
13	Tambahan Penyertaan Modal berupa Hibah Tanah dengan nilai buku 492.400.000,00 berdasarkan BA Nomor : 028/1938/401.207/2015Tanggal 5 Oktober 2015 dengan nilai appraisal 3.693.000.000,00	3.693.000.000,00
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2015 dan tahun 2016 a. Laba Tahun 2015 3.191.871.055,00 b. Deviden Tahun 2016 (1.595.935.527,51)	1.595.935.527,49
15	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017 a. Laba Tahun 2016 4.068.903.474,00 b. Deviden Tahun 2017 (2.034.451.737,11)	2.034.451.736,89
16	Penambahan nilai investasi permanent selama tahun 2017	2.749.499.888,00
	a. Laba Tahun 2017 2.749.499.888,00	
	Penyertaan Modal PD BPR Bank Daerah 2017	**41.485.835.392,94**

PD. Aneka Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pasal 5, modal awal perusahaan terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU dan dapat ditambah dari penyisihan sebagain anggaran keuangan daerah dan atau sumber-sumber lain yang sah. Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Pasal 45 ayat (1) laba bersih PD Aneka Usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan bagian laba/deviden untuk APBD sebesar 55%.Perincian penyertaan modal PD Aneka Usaha Per 31 Desember 2017 tersaji dibawah ini.

Penyertaan Modal pada PD Aneka Usaha

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran modal awal Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha.	4.085.502.000,00
2	Penyertaan modal pembangunan SPBU pada tahun 2007 tertuang dalam Berita Acara serah terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan peningkatan sarana praarna aparatur sub kegiatan perencanaan pengawasan teknik serta lanjutan pembangunan SPBU tahun anggaran 2005 – tahun anggaran 2007 Nomor: 050/5689/401.015/2007 Tanggal 19 Desember 2007	4.489.766.850,00
3	Rugi Tahun – tahun sebelumnya	(2.307.352.895,00)
4	**Saldo Awal Tahun 2008**	**6.267.915.955,00**
5	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun	282.884.044.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2008 dan tahun 2009		
	a. Laba Tahun 2008	423.402.038,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(176.266.244,00)	
	c. Kenaikan cadangan	35.748.250,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(474.431.588,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**6.076.368.411,00**
6	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2009 dan tahun 2010		228.277.463,00
	a. Laba Tahun 2009	550.651.565,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(423.402.038,00)	
	c. Kenaikan cadangan	101.027.936,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(838.470.116.00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**5.466.175.758,00**
7	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2010 dan tahun 2011		90.552.939,00
	a. Laba Tahun 2010	531.074.191,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(550.651.565,00)	
	c. Kenaikan cadangan	110.130.313,00	
	d. Pengurangan laba ditahan		(1.059.866.296,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.496.862.401,00**
8	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2011 dan tahun 2012		(241.533.518,69)
	a. Laba Tahun 2011	389.896.947,31	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(531.074.191,00)	
	c. Kenaikan cadangan	(100.356.275,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.255.328.882,31**
9	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2012 dan tahun 2013		105.556.865,00
	a. Laba Tahun 2012	361.281.487,00	
	b. Deviden	(214.443.320,85)	
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(175.453.626,15)	
	d. Kenaikan cadangan	134.172.325,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.360.885.747,31**
10	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2013 dan tahun 2014		21.380.797,00
	a. Laba Tahun 2013	310.405.987,00	
	b. Deviden	(198.704.817,85)	
	c. Sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(162.576.669,15)	
	d. Kenaikan cadangan	72.256.297,00	
	e. Koreksi saldo laba		(188.648.413,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**4.193.618.131,31**
11	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2014 dan tahun 2015		(109.968.733,85)
	a. Laba Tahun 2014	138.356.057,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(248.324.790,85)	
	c. Koreksi saldo laba		(1.956.299.461,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**2.127.349.938,46**
12	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun		24.628.851,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2015 dan tahun 2016		
	a. Laba Tahun 2015	307.932.523,00	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(283.303.672,00)	
	Saldo Perubahan Ekuitas		**2.151.978.787,46**
13	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanent selama tahun 2016 dan tahun 2017		(420.388.449,00)
	a. Laba Tahun 2016	(171.962.931,00)	
	b. Deviden, sosial pendidikan, sokongan, jasa produksi	(246.346.018,00)	
	c. Koreksi saldo laba		(2.079.500,00)
	Saldo Perubahan Ekuitas		**1.731.590.338,46**
14	Penambahan dan pengurangan nilai investasi permanen selama tahun 2017		741.463.024,00
	a. Laba Tahun 2017	741.463.024,00	
	Saldo Perubahan Ekuitas		
	Total Penyertaan Modal PD Aneka Usaha 2017		**2.473.053.362,46**

PT. Bank Jatim

Berdasarkan Surat Penyampaian Lembar Saham dari PT. Bank Jatim bahwa bukti kepemilikan saham Pemerintah Kota Madiun pada PT. Bank Jatim adalah Rp33.516.106.750,00 termasuk sebesar Rp3.125.106.750,00 merupakan cadangan yang dikonversi menjadi Saham sesuai Surat dari PT. Bank Jatim: 050/019/Dir/Djl-Dn Tanggal 25 Juli 2014.

Perincian penyertaan modal pada PT. Bank Jatim Per 31 Desember 2017 tersaji dalam dibawah ini.

Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran sampai dengan tanggal 1 September 2008	890.000.000,00
2	Setoran tanggal 20 April 2009	1.000.000.000,00
3	Setoran tanggal 22 Pebruari 2010	1.000.000,00
4	Setoran tanggal 21 Pebruari 2012	1.000.000.000,00
5	Setoran tanggal 27 Oktober 2012	7.500.000.000,00
6	Setoran tanggal 17 Pebruari 2014	20.000.000,000,00
7	Cadangan yang dikonversi saham	3.125.106.750,00
	Total Penyertaan Modal PT Bank Jatim 2017	**33.516.106.750,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Tetap	**1.791.556.948.946,70**	**1.821.997.338.661,75**

Jumlah aset tetap merupakan aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Perincian aset tetap milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Aset Tetap	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Tanah	706.768.917.129,00	746.929.754.829,00
2. Peralatan dan mesin	425.595.976.323,50	392.197.738.239,97
3. Gedung dan bangunan	647.411.660.877,03	715.435.055.660,95
4. Jalan, irigasi dan jaringan	800.578.583.757,05	705.169.609.291,00
5. Aset tetap lainnya	4.806.741.593,18	4.770.699.355,85
6. Konstruksi dalam pengerjaan	48.322.382.857,00	45.425.929.857,00
Aset Tetap	**2.633.484.262.536,76**	**2.609.928.787.233,77**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(841.927.313.590,06)**	**(787.931.448.572,02)**
Jumlah Aset Tetap Netto	**1.791.556.948.946,70**	**1.821.997.338.661,75**

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun dan Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun menerapkan penyusutan atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan umur ekonomis masing-masing aset tetap. Sedangkan aset tetap lainnya tidak disusutkan sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

7.1.3.1. Tanah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Tanah	**706.768.917.129,00**	**746.929.754.829,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian mutasi aset tetap tanah pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Tanah	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dikmudora	58.002.337.900,00	0,00	0,00	58.002.337.900,00
Kantor Perpustakaan dan Arda	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Dinas Kesehatan	1.795.117.000,00	0,00	0,00	1.795.117.000,00
RSUD	15.390.000.000,00	0,00	0,00	15.390.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum	28.055.606.600,00	306.085.055.120,00	0,00	334.140.661.720,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinhukominfo	6.319.793.000,00	0,00	0,00	6.319.793.000,00
DKP	4.667.000.000,00	0,00	0,00	4.667.000.000,00
Kantor Lingkungan Hidup	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
Dukcapil	197.606.760,00	0,00	0,00	197.606.760,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	415.834.000,00	0,00	0,00	415.834.000,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	101.888.000,00	0,00	0,00	101.888.000,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Bagian Umum	15.576.385.000,00	0,00	0,00	15.576.385.000,00
Bagian Humas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.173.756.000,00	0,00	0,00	1.173.756.000,00
BPKAD SKPD	45.501.375.868,00	74.115.630.006,00	0,00	119.617.005.874,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	63.847.576.450,00	0,00	0,00	63.847.576.450,00
Kecamatan Taman	49.385.166.285,00	0,00	0,00	49.385.166.285,00
Kecamatan Manguharjo	54.664.855.040,00	0,00	0,00	54.664.855.040,00
Badan Kepegawaian Daerah	459.930.000,00	0,00	0,00	459.930.000,00
KPPT	29.920.800,00	0,00	0,00	29.920.800,00
Dinas Pendapatan Daerah	147.200.000,00	0,00	0,00	147.200.000,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	349.400.000,00	0,00	0,00	349.400.000,00
Dinas Pertanian	365.135.000,00	0,00	0,00	365.135.000,00
Dinas Perindagkoppar	4.040.000.000,00	0,00	0,00	4.040.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Pasar	15.386.386.000,00	0,00	0,00	15.386.386.000,00
Tanah 2016	**366.729.069.703,00**	**380.200.685.126,00**	**0,00**	**746.929.754.829,00**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap tanah pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Tanah	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	58.002.337.900,00	0,00	18.810.000,00	57.983.527.900,00
Dinas Kesehatan KB	1.795.117.000,00	0,00	0,00	1.795.117.000,00
RSUD	15.390.000.000,00	0,00	0,00	15.390.000.000,00
Dinas PU TR	334.140.661.720,00	0,00	0,00	334.140.661.720,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	101.888.000,00	0,00	0,00	101.888.000,00
Dinas Sosial	349.400.000,00	210.250.000,00	0,00	559.650.000,00
Dinas Tenaga Kerja	415.834.000,00	0,00	210.250.000,00	205.584.000,00
Dinas LH	41.800.000,00	4.667.000.000,00	41.800.000,00	4.667.000.000,00
Dispendukcapil	197.606.760,00	0,00	0,00	197.606.760,00
Dinas Perhubungan	6.319.793.000,00	0,00	0,00	6.319.793.000,00
Dinas Infokom	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	29.920.800,00	0,00	0,00	29.920.800,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Bagian Umum	15.576.385.000,00	0,00	0,00	15.576.385.000,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	1.173.756.000,00	0,00	0,00	1.173.756.000,00
BKD	459.930.000,00	0,00	0,00	459.930.000,00
BPKAD	119.617.005.874,00	60.610.000,00	0,00	119.677.615.874,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	147.200.000,00	0,00	0,00	147.200.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	63.847.576.450,00	0,00	0,00	63.847.576.450,00
Kec Manguharjo	54.664.855.040,00	0,00	0,00	54.664.855.040,00
Kec Taman	49.385.166.285,00	0,00	0,00	49.385.166.285,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	365.135.000,00	0,00	0,00	365.135.000,00
Dinas Perdagangan	15.386.386.000,00	4.040.000.000,00	0,00	19.426.386.000,00
Saldo Awal Tanah 2017	**738.222.754.829,00**	**8.992.860.000,00**	**285.860.000,00**	**746.929.754.829,00**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap tanah selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap tanah pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Tanah	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	57.983.527.900,00	0,00	30.797.150.000,00	27.186.377.900,00
Dinas Kesehatan KB	1.795.117.000,00	0,00	0,00	1.795.117.000,00
RSUD	15.390.000.000,00	0,00	0,00	15.390.000.000,00
Dinas PU TR	334.140.661.720,00	5.213.522.700,00	0,00	339.354.184.420,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	101.888.000,00	0,00	0,00	101.888.000,00
Dinas Sosial	559.650.000,00	0,00	0,00	559.650.000,00
Dinas Tenaga Kerja	205.584.000,00	0,00	0,00	205.584.000,00
Dinas LH	4.667.000.000,00	0,00	0,00	4.667.000.000,00
Dispendukcapil	197.606.760,00	0,00	0,00	197.606.760,00
Dinas Perhubungan	6.319.793.000,00	0,00	0,00	6.319.793.000,00
Dinas Infokom	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	29.920.800,00	0,00	0,00	29.920.800,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	15.576.385.000,00	0,00	0,00	15.576.385.000,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sekretariat DPRD	1.173.756.000,00	0,00	0,00	1.173.756.000,00
BKD	459.930.000,00	0,00	0,00	459.930.000,00
BPKAD	119.677.615.874,00	0,00	14.833.546.000,00	104.844.069.874,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	147.200.000,00	0,00	0,00	147.200.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	63.847.576.450,00	256.335.600,00	0,00	64.103.912.050,00
Kec Manguharjo	54.664.855.040,00	0,00	0,00	54.664.855.040,00
Kec Taman	49.385.166.285,00	0,00	0,00	49.385.166.285,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	365.135.000,00	0,00	0,00	365.135.000,00
Dinas Perdagangan	19.426.386.000,00	0,00	0,00	19.426.386.000,00
Tanah 2017	**746.929.754.829,00**	**5.469.858.300,00**	**45.630.696.000,00**	**706.768.917.129,00**

Pada tahun 2017 penyajian aset tetap tanah di atas masih terdapat bidang tanah senilai Rp5.221.800.000,00 berupa tanah Terminal Purboyo yang direncanakan untuk diserahkan ke Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan. Serah terima masih dalam proses sehingga masih tercatat pada KIB A Dinas Perhubungan. Terhadap aset tetap tanah lebih disajikan sebesar Rp5.221.800.000,00 akan dilakukan proses serah terima dan penyesuaian pada tahun berikutnya.

7.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Peralatan dan Mesin	**425.595.976.323,50**	**392.197.738.239,97**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Peralatan dan Mesin	1	2	3	4
Dikmudora	62.202.370.167,57	24.833.712.324,00	3.450.878.689,72	83.585.203.801,85
Kantor Perpustakaan dan Arda	2.730.948.664,00	405.919.000,00	0	3.136.867.664,00
Dinas Kesehatan	31.284.561.829,33	998.106.850,00	324.200.000,00	31.958.468.679,33
RSUD	87.144.505.078,32	23.334.021.959,00	660.762.498,83	109.817.764.538,49
Dinas Pekerjaan Umum	19.503.106.321,96	3.000.722.300,00	125.984.281,08	22.377.844.340,88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bappeda	1.812.523.100,00	446.270.150,00	0,00	2.258.793.250,00
Dinhukominfo	9.949.046.087,16	4.227.396.797,00	3.302.112.300,00	10.874.330.584,16
DKP	12.804.277.650,00	911.412.800,00	00,00	13.715.690.450,00
Kantor Lingkungan Hidup	4.349.446.636,00	1.125.674.444,00	0,00	5.475.121.080,00
Dukcapil	2.245.433.551,23	608.431.000,00	1.150.000,00	2.852.714.551,23
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1.337.232.685,17	0,00	0,00	1.337.232.685,17
Bakesbangpol	1.206.344.900,00	0,00	0,00	1.206.344.900,00
Kantor Satpol PP	2.059.760.325,00	82.880.000,00	0,00	2.142.640.325,00
BPBD	3.726.175.315,00	32.187.327.900,00	4.903.288,70	35.908.599.926,30
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	393.123.900,00	44.326.500,00	5.688.456,56	431.761.943,44
Bagian Hukum	575.589.880,00	0,00	0,00	575.589.880,00
Bagian Adm Pembangunan	724.749.430,00	91.017.000,00	9.900.000,00	805.866.430,00
Bagian Adm Pereksos	549.735.700,00	49.985.000,00	1.205.000,00	598.515.700,00
Bagian Organisasi	1.506.290.020,00	346.607.772,00	7.920.000,00	1.844.977.792,00
Bagian Umum	20.278.516.003,49	4.044.931.093,00	817.090.000,00	23.506.357.096,49
Bagian Humas	786.234.700,00	137.333.941,00	186.450,00	923.382.191,00
Sekretariat DPRD	3.200.274.160,26	215.352.500,00	3.080.000,00	3.412.546.660,26
BPKAD SKPD	2.657.901.366,74	1.601.729.700,00	76.388.000,00	4.183.243.066,74
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	1.519.647.064,90	225.002.000,00	0,00	1.744.649.064,90
Kecamatan Kartoharjo	2.795.001.988,04	557.219.000,00	10.701.067,53	3.341.519.920,51
Kecamatan Taman	2.503.537.565,92	494.506.500,00	136.366.000,00	2.861.678.065,92
Kecamatan Manguharjo	3.316.244.115,00	525.011.000,00	67.425.923,90	3.773.829.191,10
Badan Kepegawaian Daerah	2.603.786.075,00	98.544.500,00	0,00	2.702.330.575,00
KPPT	878.626.400,00	163.742.713,00	10.588.461,50	1.031.780.651,50
Dinas Pendapatan Daerah	1.979.595.338,70	152.926.450,00	0,00	2.132.521.788,70
BPM,KB & Ketahanan Pangan	3.349.999.975,00	226.584.025,00	12.360.950,00	3.564.223.050,00
Dinas Pertanian	2.930.850.599,00	327.631.500,00	1.732.500,00	3.256.749.599,00
Dinas Perindagkoppar	1.746.114.187,00	92.823.500,00	0,00	1.838.937.687,00
Dinas Pasar	2.872.034.110,00	147.627.000,00	0	3.019.661.110,00
Peralatan dan Mesin 2016	**299.523.584.889,79**	**101.704.777.218,00**	**9.030.623.867,82**	**392.197.738.239,97**
		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2016		**(241.104.038.057,02)**
		Peralatan dan Mesin Netto 2016		**151.093.700.182,95**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap peralatan dan mesin pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Peralatan dan Mesin	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	83.585.203.801,85	1.414.869.143,50	253.397.788,87	84.746.675.156,48
Dinas Kesehatan KB	31.958.468.679,33	2.473.410.051,00	121.030.080,00	34.310.848.650,33
RSUD	109.817.764.538,49	3.850.000,00	0,00	109.821.614.538,49
Dinas PU TR	22.377.844.340,88	11.150.776,67	18.746.500,50	22.370.248.617,05
Dinas Perkim	0,00	2.619.394.811,62	0,00	2.619.394.811,62
Dinas Satpol PP	2.142.640.325,00	4.612.957.850,00	0,00	6.755.598.175,00
BPBD	35.908.599.926,30	3.850.000,00	4.605.257.100,00	31.307.192.826,30
Dinas Sosial	3.564.223.050,00	333.624.610,78	2.462.564.669,00	1.435.282.991,78
Dinas Tenaga Kerja	1.337.232.685,17	227.443.162,76	360.829.148,67	1.203.846.699,26
Dinas LH	5.475.121.080,00	11.431.161.570,00	2.487.201.153,82	14.419.081.496,18
Dispendukcapil	2.852.714.551,23	3.850.000,00	0,00	2.856.564.551,23
Dinas Perhubungan	10.874.330.584,16	3.850.000,00	873.799.900,00	10.004.380.684,16
Dinas Infokom	0,00	2.856.461.790,50	65.505.825,00	2.790.955.965,50
Dinas PM, PTSP/KPPT	1.031.780.651,50	274.216.705,00	0,00	1.305.997.356,50
Dinas Budparpora	0,00	1.362.491.495,28	0,00	1.362.491.495,28
Dinas Perpustakaan	3.136.867.664,00	17.261.380,00	162.840.000,00	2.991.289.044,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	431.761.943,44	3.850.000,00	0,00	435.611.943,44
Bagian Organisasi	1.844.977.792,00	3.850.000,00	1.158.899.248,92	689.928.543,08
Bagian Umum	23.506.357.096,49	559.659.259,06	658.937.301,75	23.407.079.053,80
Bagian Hukum	575.589.880,00	3.850.000,00	0,00	579.439.880,00
Bagian Perekkesra	598.515.700,00	3.850.000,00	0,00	602.365.700,00
Bagian Adbang	805.866.430,00	3.850.000,00	0,00	809.716.430,00
Sekretariat DPRD	3.412.546.660,26	6.399.909,00	0,00	3.418.946.569,26
BKD	2.702.330.575,00	6.447.041,67	0,00	2.708.777.616,67
BPKAD	4.183.243.066,74	372.695.804,00	137.500.000,00	4.418.438.870,74
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	2.132.521.788,70	6.399.909,00	0,00	2.138.921.697,70
Inspektorat	1.744.649.064,90	3.850.000,00	0,00	1.748.499.064,90
BAPPEDA	2.258.793.250,00	3.850.000,00	0,00	2.262.643.250,00
Kec Kartoharjo	3.341.519.920,51	325.497.484,05	0,00	3.667.017.404,56
Kec Manguharjo	3.773.829.191,10	277.657.387,39	0,00	4.051.486.578,49
Kec Taman	2.861.678.065,92	341.539.855,42	0,00	3.203.217.921,34
Bakesbangpol	1.206.344.900,00	3.850.000,00	0,00	1.210.194.900,00
Dinas Pertanian KP	3.256.749.599,00	14.366.109,00	0,00	3.271.115.708,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perdagangan	3.019.661.110,00	284.353.338,83	31.140.400,00	3.272.874.048,83
Saldo awal Peralatan dan Mesin 2017	**375.719.727.911,97**	**29.875.659.444,53**	**13.397.649.116,53**	**392.197.738.239,97**
		Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2017		**(241.104.038.057,02)**
			Saldo Awal Peralatan dan Mesin Netto 2017	**151.093.700.182,95**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap peralatan dan mesin pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Peralatan dan Mesin	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	84.746.675.156,48	27.235.635.949,07	39.820.120.213,64	72.162.190.891,91
Dinas Kesehatan KB	34.310.848.650,33	2.122.885.327,00	100.419.995,16	36.333.313.982,17
RSUD	109.821.614.538,49	9.442.579.955,00	48.021.520,43	119.216.172.973,06
Dinas PU TR	22.370.248.617,05	5.087.988.718,00	7.008.751,12	27.451.228.583,93
Dinas Perkim	2.619.394.811,62	8.670.233.130,00	24.823.900,00	11.264.804.041,62
Dinas Satpol PP	6.755.598.175,00	2.789.678.800,00	1.485.000,00	9.543.791.975,00
BPBD	31.307.192.826,30	28.949.562.973,00	28.452.335.000,00	31.804.420.799,30
Dinas Sosial	1.435.282.991,78	666.503.978,00	0,00	2.101.786.969,78
Dinas Tenaga Kerja	1.203.846.699,26	717.951.198,00	29.690.400,00	1.892.107.497,26
Dinas LH	14.419.081.496,18	3.295.621.200,00	395.832.610,00	17.318.870.086,18
Dispendukcapil	2.856.564.551,23	1.597.523.064,60	4.650.641,61	4.449.436.974,22
Dinas Perhubungan	10.004.380.684,16	2.172.971.347,00	1.086.688.910,00	11.090.663.121,16
Dinas Infokom	2.790.955.965,50	5.836.544.760,00	10.126.593,34	8.617.374.132,16
Dinas PM, PTSP/KPPT	1.305.997.356,50	1.146.768.601,98	6.655.126,06	2.446.110.832,42
Dinas Budparpora	1.362.491.495,28	354.299.762,00	149.547.800,00	1.567.243.457,28
Dinas Perpustakaan	2.991.289.044,00	473.309.000,00	63.734.023,70	3.400.864.020,30
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	435.611.943,44	0,00	0,00	435.611.943,44
Bagian Organisasi	689.928.543,08	204.474.500,00	0,00	894.403.043,08
Bagian Umum	23.407.079.053,80	1.000.714.605,50	863.230.000,00	23.544.563.659,30
Bagian Hukum	579.439.880,00	48.220.000,00	0,00	627.659.880,00
Bagian Perekkesra	602.365.700,00	171.220.000,00	0,00	773.585.700,00
Bagian Adbang	809.716.430,00	79.937.820,00	0,00	889.654.250,00
Sekretariat DPRD	3.418.946.569,26	498.846.775,00	15.675.000,00	3.902.118.344,26
BKD	2.708.777.616,67	158.595.300,00	0,00	2.867.372.916,67
BPKAD	4.418.438.870,74	336.878.000,00	1.148.950.000,00	3.606.366.870,74
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	2.138.921.697,70	182.492.700,00	0,00	2.321.414.397,70
Inspektorat	1.748.499.064,90	85.520.000,00	0,00	1.834.019.064,90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAPPEDA	2.262.643.250,00	194.171.788,00	1.500.000,00	2.455.315.038,00
Kec Kartoharjo	3.667.017.404,56	829.134.740,00	194.594.984,89	4.301.557.159,67
Kec Manguharjo	4.051.486.578,49	647.661.240,00	79.640.000,00	4.619.507.818,49
Kec Taman	3.203.217.921,34	305.072.374,00	0,00	3.508.290.295,34
Bakesbangpol	1.210.194.900,00	0,00	0,00	1.210.194.900,00
Dinas Pertanian KP	3.271.115.708,00	401.835.000,00	5.308.052,67	3.667.642.655,33
Dinas Perdagangan	3.272.874.048,83	220.991.500,00	17.547.500,00	3.476.318.048,83
Peralatan dan Mesin 2017	**392.197.738.239,97**	**105.925.824.106,15**	**72.527.586.022,62**	**425.595.976.323,50**
			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 2017	**(266.747.824.243,02)**
			Peralatan dan Mesin Netto 2017	**158.848.152.080,48**

Pada tahun 2017 penyajian aset peralatan dan mesin di atas masih terdapat aset peralatan dan mesin pada 1 (satu) SLBN, 6 (enam) SMAN dan 5 (lima) SMKN di wilayah Kota Madiun yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 91 item aset peralatan dan mesin senilai Rp146.245.062,67. Selain ini, masih terdapat pula 197 item aset peralatan dan mesin senilai Rp336.036.204,35 pada pihak lain (sekolah swasta dan instansi lain) sehingga masih tercatat pada KIB B Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Terhadap aset tetap peralatan dan mesin lebih disajikan sebesar Rp146.245.062,67 dan sebesar Rp336.036.204,35 akan dilakukan proses serah terima dan penyesuaian pada tahun berikutnya.

7.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Gedung dan Bangunan	**647.411.660.877,03**	**715.435.055.660,95**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian mutasi gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Gedung dan Bangunan	1	2	3	4
Dikmudora	215.569.108.096,00	15.358.136.595,00	1.301.838.445,00	229.625.406.246,00
Kantor Perpustakaan dan Arda	850.859.600,00	0,00	0,00	850.859.600,00
Dinas Kesehatan	26.108.827.668,00	5.422.235.000,00	0,00	31.531.062.668,00
RSUD	38.418.962.661,00	7.836.607.928,00	5.796.534.450,00	40.459.036.139,00
Dinas Pekerjaan Umum	87.052.131.344,00	4.718.511.852,00	986.887.400,00	90.783.755.796,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinhukominfo	11.702.248.853,00	3.302.112.300,00	904.006.000,00	14.100.355.153,00
DKP	19.451.173.009,00	9.612.758.888,00	890.247.000,00	28.173.684.897,00
Kantor Lingkungan Hidup	2.923.726.361,00	00,00	0,00	2.923.726.361,00
Dukcapil	6.962.402.000,00	485.128.000,00	10.472.000,00	7.437.058.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	2.131.985.443,00	384.759.000,00	0,00	2.516.744.443,00
Bakesbangpol	758.590.000,00	0,00	0,00	758.590.000,00
Kantor Satpol PP	2.172.331.000,00	0,00	0,00	2.172.331.000,00
BPBD	834.162.000,00	172.340.000,00	0,00	1.006.502.000,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	322.981.900,00	0,00	0,00	322.981.900,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pembangunan	254.790.000,00	0,00	0,00	254.790.000,00
Bagian Adm Pereksos	116.600.000,00	0,00	0,00	116.600.000,00
Bagian Organisasi	115.182.150,00	0,00	0,00	115.182.150,00
Bagian Umum	13.554.357.110,00	263.702.100,00	0,00	13.818.059.210,00
Bagian Humas	381.057.000,00	0,00	0,00	381.057.000,00
Sekretariat DPRD	3.521.496.275,00	0,00	0,00	3.521.496.275,00
BPKAD SKPD	13.723.011.870,00	39.519.108.000,00	52.920.000,00	53.189.199.870,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	21.557.302.875,00	4.384.063.500,00	47.278.000,00	25.894.088.375,00
Kecamatan Taman	12.040.007.464,00	0,00	0,00	12.040.007.464,00
Kecamatan Manguharjo	18.281.899.057,00	705.087.000,00	0,00	18.986.986.057,00
Badan Kepegawaian Daerah	2.770.549.529,00	0,00	0,00	2.770.549.529,00
KPPT	799.059.551,00	96.020.000,00	0,00	895.079.551,00
Dinas Pendapatan Daerah	1.279.607.000,00	0,00	0,00	1.279.607.000,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	2.969.212.000,00	0,00	0,00	2.969.212.000,00
Dinas Pertanian	14.350.927.480,95	5.276.510.900,00	2.837.131.500,00	16.790.306.880,95
Dinas Perindagkoppar	1.067.394.500,00	1.688.289.750,00	0,00	2.755.684.250,00
Dinas Pasar	104.202.191.046,00	2.868.783.800,00	75.919.000,00	106.995.055.846,00
Gedung dan Bangunan 2016	**626.244.134.842,95**	**102.094.154.613,00**	**12.903.233.795,00**	**715.435.055.660,95**
			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2016	**(120.716.626.244,00)**
			Gedung dan Bangunan Netto 2016	**594.718.429.416,95**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Gedung dan Bangunan	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	229.625.406.246,00	72.450.736,00	202.435.904,00	229.495.421.078,00
Dinas Kesehatan KB	31.531.062.668,00	776.640.000,00	0,00	32.307.702.668,00
RSUD	40.459.036.139,00	0,00	0,00	40.459.036.139,00
Dinas PU TR	90.783.755.796,00	0,00	0,00	90.783.755.796,00
Dinas Perkim	0,00	18.056.212.713,00	0,00	18.056.212.713,00
Dinas Satpol PP	2.172.331.000,00	0,00	0,00	2.172.331.000,00
BPBD	1.006.502.000,00	0,00	0,00	1.006.502.000,00
Dinas Sosial	2.969.212.000,00	363.445.000,00	776.640.000,00	2.556.017.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.516.744.443,00	0,00	363.445.000,00	2.153.299.443,00
Dinas LH	2.923.726.361,00	12.375.798.345,00	2.589.616.897,00	12.709.907.809,00
Dispendukcapil	7.437.058.000,00	0,00	0,00	7.437.058.000,00
Dinas Perhubungan	14.100.355.153,00	202.435.904,00	0,00	14.302.791.057,00
Dinas Infokom	0,00	496.239.150,00	0,00	496.239.150,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	895.079.551,00	0,00	0,00	895.079.551,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	850.859.600,00	0,00	0,00	850.859.600,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	322.981.900,00	0,00	0,00	322.981.900,00
Bagian Organisasi	115.182.150,00	0,00	115.182.150,00	0,00
Bagian Umum	13.818.059.210,00	0,00	0,00	13.818.059.210,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	116.600.000,00	0,00	0,00	116.600.000,00
Bagian Adbang	254.790.000,00	0,00	0,00	254.790.000,00
Sekretariat DPRD	3.521.496.275,00	0,00	0,00	3.521.496.275,00
BKD	2.770.549.529,00	0,00	0,00	2.770.549.529,00
BPKAD	53.189.199.870,00	1.396.846.300,00	0,00	54.586.046.170,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	1.279.607.000,00	0,00	0,00	1.279.607.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	25.894.088.375,00	125.840.000,00	0,00	26.019.928.375,00
Kec Manguharjo	18.986.986.057,00	0,00	0,00	18.986.986.057,00
Kec Taman	12.040.007.464,00	0,00	0,00	12.040.007.464,00
Bakesbangpol	758.590.000,00	0,00	758.590.000,00	0,00
Dinas Pertanian KP	16.790.306.880,95	0,00	0,00	16.790.306.880,95
Dinas Perdagangan	106.995.055.846,00	2.755.684.250,00	505.256.300,00	109.245.483.796,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Saldo Awal Gedung dan Bangunan 2017	684.124.629.513,95	36.621.592.398,00	5.311.166.251,00	715.435.055.660,95
	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2017			(120.716.626.244,00)
	Saldo Awal Gedung dan Bangunan Netto 2017			594.718.429.416,95

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Gedung dan Bangunan	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	229.495.421.078,00	19.683.360.003,00	71.088.381.181,00	178.090.399.900,00
Dinas Kesehatan KB	32.307.702.668,00	1.159.474.254,75	8.000.000,00	33.459.176.922,75
RSUD	40.459.036.139,00	160.359.000,00	0,00	40.619.395.139,00
Dinas PU TR	90.783.755.796,00	24.895.101.600,00	20.730.131.600,00	94.948.725.796,00
Dinas Perkim	18.056.212.713,00	6.012.309.045,00	1.420.506.844,00	22.648.014.914,00
Dinas Satpol PP	2.172.331.000,00	1.495.864.200,00	0,00	3.668.195.200,00
BPBD	1.006.502.000,00	0,00	0,00	1.006.502.000,00
Dinas Sosial	2.556.017.000,00	0,00	0,00	2.556.017.000,00
Dinas Tenaga Kerja	2.153.299.443,00	206.237.000,00	0,00	2.359.536.443,00
Dinas LH	12.709.907.809,00	885.568.200,00	0,00	13.595.476.009,00
Dispendukcapil	7.437.058.000,00	0,00	0,00	7.437.058.000,00
Dinas Perhubungan	14.302.791.057,00	1.097.287.400,00	228.266.011,67	15.171.812.445,33
Dinas Infokom	496.239.150,00	2.388.900.000,00	0,00	2.885.139.150,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	895.079.551,00	350.314.000,00	0,00	1.245.393.551,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	850.859.600,00	0,00	0,00	850.859.600,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	322.981.900,00	0,00	0,00	322.981.900,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	13.818.059.210,00	196.525.000,00	196.525.000,00	13.818.059.210,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	116.600.000,00	0,00	0,00	116.600.000,00
Bagian Adbang	254.790.000,00	0,00	0,00	254.790.000,00
Sekretariat DPRD	3.521.496.275,00	0,00	0,00	3.521.496.275,00
BKD	2.770.549.529,00	0,00	0,00	2.770.549.529,00
BPKAD	54.586.046.170,00	397.300.000,00	39.442.720.000,00	15.540.626.170,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	1.279.607.000,00	0,00	0,00	1.279.607.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	26.019.928.375,00	734.933.770,00	174.539.600,00	26.580.322.545,00
Kec Manguharjo	18.986.986.057,00	1.587.968.430,00	0,00	20.574.954.487,00
Kec Taman	12.040.007.464,00	4.014.173.550,00	0,00	16.054.181.014,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	16.790.306.880,95	0,00	0,00	16.790.306.880,95
Dinas Perdagangan	109.245.483.796,00	0,00	0,00	109.245.483.796,00
Gedung dan Bangunan 2017	**715.435.055.660,95**	**65.265.675.452,75**	**133.289.070.236,67**	**647.411.660.877,03**
			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 2017	**(114.942.074.544,00)**
			Gedung dan Bangunan Netto 2017	**532.469.586.333,03**

Pada tahun 2017 penyajian gedung dan bangunan di atas masih terdapat aset gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain berupa penambahan ruang kelas baru dan rehabilitasi pada sekolah swasta maupun bangunan pada instansi pemerintah lain sebanyak 31 item aset gedung dan bangunan senilai Rp.4.800.111.999,00 dengan perincian sebagaimana berikut :

No	SKPD	Jenis Aset	Peruntukan	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMA Muhammadiyah	90.748.800,00
2	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMA PSM	202.493.000,00
3	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMA Muhammadiyah	309.394.700,00
4	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMA St. Bonaventura	404.966.000,00
5	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK Gamaliel 2	177.391.000,00
6	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK St. Bonaventura 2	177.391.000,00
7	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK Penerbangan Antariksa	177.391.000,00
8	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK St. Bonaventura 1	177.391.000,00
9	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK Taman Siswa 2	266.094.000,00
10	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK Cokroaminoto 2	266.094.000,00
11	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SMK Sore	266.094.000,00
12	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK Cokroaminoto 2	143.294.000,00
13	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK PGRI 2	143.294.000,00
14	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK Sore	143.294.000,00
15	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK Gamaliel 2	143.294.000,00
16	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK PGRI 2	143.294.000,00
17	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMK Taman Siswa 2	211.941.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Kesehatan Lain-lain	MAN 1	4.261.808,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Kesehatan Lain-lain	MAN 1	4.261.808,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMP Muhammadiyah	95.112.000,00
21	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMP St. Yusuf	96.884.615,00
22	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMP PSM	193.769.230,00
23	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SMPLB Dharma Wanita	193.769.230,00
24	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SD Kartika	92.610.000,00
25	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SDI Hudan Linnas	92.610.000,00
26	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SD Muhammadiyah	133.044.000,00
27	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	SDLB Dharma Wanita	185.220.000,00
28	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SD Muhammadiyah	86.816.000,00
29	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SD Al Husna	86.816.000,00
30	Dinas Pendidikan	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain	SD St. Maria 2	86.816.000,00
31	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Kesehatan Lain-lain	MIN Bhakti Ibu	4.261.808,00
			Jumlah	**4.800.111.999,00**

Selain itu terdapat 28 unit gedung dan bangunan senilai Rp3.791.453.607,00 berupa gedung dan bangunan Terminal Purboyo yang direncanakan untuk diserahkan ke Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan. Serah terima masih dalam proses sehingga masih tercatat pada KIB C Dinas Perhubungan.

Terdapat pula sebanyak 5 unit gedung dan bangunan senilai Rp21.309.040,00 berupa tempat sampah yang masih tercatat pada KIB C Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya diserahkan ke Pemerintah Povinsi Jawa Timur dengan perincian sebagai berikut:

a. 2 unit dibangun di SMAN 4
b. 1 unit dibangun di SMAN 6
c. 1 unit dibangun di SMKN 2
d. 1 unit dibangun di SMKN 3.

Pada tahun 2017, penyajian aset tetap gedung dan bangunan lebih disajikan sebesar Rp8.612.874.646,00 = (Rp4.800.111.999,00 + Rp3.791.453.607,00 + Rp21.309.040,00) akan dilakukan proses serah terima dan penyesuaian pada tahun berikutnya.

7.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**800.578.583.757,05**	**705.169.609.291,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Jalan, irigasi dan jaringan	**1**	**2**	**3**	**4**
Dikmudora	1.189.954.136,00	670.632.609,00	13.477.597,00	1.847.109.148,00
Kantor Perpustakaan dan Arda	6.565.600,00	0,00	0,00	6.565.600,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	364.485.000,00	3.900.432.750,00	0,00	4.264.917.750,00
Dinas Pekerjaan Umum	519.013.448.060,00	114.409.747.063,00	5.534.545.865,00	627.888.649.258,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinhukominfo	2.626.807.000,00	0,00	0,00	2.626.807.000,00
DKP	49.372.971.100,00	2.015.942.500,00	0,00	51.388.913.600,00
Kantor Lingkungan Hidup	626.552.360,00	251.264.300,00	0,00	877.816.660,00
Dukcapil	0,00	10.472.000,00	0,00	10.472.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	48.500.000,00	34.840.000,00	34.840.000,00	48.500.000,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	1.707.990.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	1.707.990.000,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Humas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD SKPD	0,00	1.095.080.000,00	0,00	1.095.080.000,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	247.151.499,00	0,00	0,00	247.151.499,00
Kecamatan Taman	89.774.948,00	0,00	0,00	89.774.948,00
Kecamatan Manguharjo	96.606.078,00	0,00	0,00	96.606.078,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
KPPT	28.410.000,00	0,00	0,00	28.410.000,00
Dinas Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	3.561.815.500,00	11.061.781.050,00	2.403.956.000,00	12.219.640.550,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Perindagkoppar	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Dinas Pasar	716.705.200,00	0,00	0,00	716.705.200,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2016	579.706.236.481,00	133.476.592.272,00	8.013.219.462,00	705.169.609.291,00
			Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan 2016	**(426.110.784.271,00)**
			Jalan, irigasi dan jaringan Netto 2016	**279.058.825.020,00**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Jalan, irigasi dan jaringan	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	1.847.109.148,00	357.515.237,00	0,00	2.204.624.385,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	4.264.917.750,00	0,00	0,00	4.264.917.750,00
Dinas PU TR	627.888.649.258,00	0,00	0,00	627.888.649.258,00
Dinas Perkim	0,00	48.177.537.800,00	0,00	48.177.537.800,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	877.816.660,00	3.211.375.800,00	614.435.255,00	3.474.757.205,00
Dispendukcapil	10.472.000,00	0,00	0,00	10.472.000,00
Dinas Perhubungan	2.626.807.000,00	0,00	0,00	2.626.807.000,00
Dinas Infokom	0,00	1.707.990.000,00	0,00	1.707.990.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	28.410.000,00	0,00	0,00	28.410.000,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	6.565.600,00	0,00	0,00	6.565.600,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	1.707.990.000,00	0,00	1.707.990.000,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPKAD	1.095.080.000,00	5.097.360,00	0,00	1.100.177.360,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	247.151.499,00	72.522.223,00	0,00	319.673.722,00
Kec Manguharjo	96.606.078,00	28.503.052,00	0,00	125.109.130,00
Kec Taman	89.774.948,00	150.797.383,00	0,00	240.572.331,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	12.219.640.550,00	0,00	0,00	12.219.640.550,00
Dinas Perdagangan	716.705.200,00	8.856.323,00	356.323,00	725.205.200,00
Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2017	**653.772.195.691,00**	**53.720.195.178,00**	**2.322.781.578,00**	**705.169.609.291,00**
	Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2017			**(426.110.784.271,00)**
	Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan Netto 2017			**279.058.825.020,00**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Jalan, irigasi dan jaringan	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	2.204.624.385,00	29.721.100,00	969.650.378,00	1.264.695.107,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	4.264.917.750,00	0,00	0,00	4.264.917.750,00
Dinas PU TR	627.888.649.258,00	93.825.264.750,00	6.208.113.700,00	715.505.800.308,00
Dinas Perkim	48.177.537.800,00	10.010.291.694,00	183.458.999,95	58.004.370.494,05
Dinas Satpol PP	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	0,00
BPBD	48.500.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	48.500.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	3.474.757.205,00	0,00	0,00	3.474.757.205,00
Dispendukcapil	10.472.000,00	0,00	0,00	10.472.000,00
Dinas Perhubungan	2.626.807.000,00	0,00	0,00	2.626.807.000,00
Dinas Infokom	1.707.990.000,00	0,00	0,00	1.707.990.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	28.410.000,00	0,00	0,00	28.410.000,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	6.565.600,00	0,00	0,00	6.565.600,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	1.100.177.360,00	0,00	1.095.080.000,00	5.097.360,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	319.673.722,00	0,00	0,00	319.673.722,00
Kec Manguharjo	125.109.130,00	0,00	0,00	125.109.130,00
Kec Taman	240.572.331,00	0,00	0,00	240.572.331,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	12.219.640.550,00	0,00	0,00	12.219.640.550,00
Dinas Perdagangan	725.205.200,00	0,00	0,00	725.205.200,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 2017	**705.169.609.291,00**	**103.891.585.544,00**	**8.482.611.077,95**	**800.578.583.757,05**
		Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan 2017		**(460.237.414.803,00)**
		Jalan, irigasi dan jaringan Netto 2017		**340.341.168.954,05**

7.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Tetap Lainnya	**4.806.741.593,18**	**4.770.699.355,85**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap lainnya yang dimiliki dan dikuasai oleh badan/dinas/kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2016. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun.

Perincian mutasi aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Aset Tetap Lainnya	1	2	3	4
Dikmudora	4.372.648.910,99	2.287.657.696,00	2.167.163.196,00	4.493.143.410,99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kantor Perpustakaan dan Arda	0,00	259.083.000,00	248.211.055,14	10.871.944,86
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinhukominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
DKP	239.894.000,00	0,00	0,00	239.894.000,00
Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Humas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
BPKAD SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kecamatan Taman	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya 2016	**4.639.332.910,99**	**2.546.740.696,00**	**2.415.374.251,14**	**4.770.699.355,85**
			Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya 2016	**0,00**
			Aset Tetap Lainnya Netto 2016	**4.770.699.355,85**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap aset tetap lainnya pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Aset Tetap Lainnya	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	4.493.143.410,99	0,00	0,00	4.493.143.410,99
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	0,00	239.894.000,00	0,00	239.894.000,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	10.871.944,86	0,00	0,00	10.871.944,86
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
BKD	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Saldo Awal Aset tetap Lainnya 2017	**4.530.805.355,85**	**239.954.000,00**	**60.000,00**	**4.770.699.355,85**
		Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya 2017		**0,00**
			Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Netto 2017	**4.770.699.355,85**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap aset tetap lainnya selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap aset tetap lainnya pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desem 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Aset Tetap Lainnya	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3**
Dinas Pendidikan	4.493.143.410,99	3.265.504.167,00	3.364.253.666,99	4.394.393.911,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkim	239.894.000,00	0,00	0,00	239.894.000,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	1.660.943,40	0,00	1.660.943,40
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	158.640.300,00	25.509.506,08	133.130.793,92
Dinas Perpustakaan	10.871.944,86	95.976.000,00	95.976.000,00	10.871.944,86
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sekretariat DPRD	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
BKD	16.400.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset tetap Lainnya 2017	**4.770.699.355,85**	**3.521.781.410,40**	**3.485.739.173,07**	**4.806.741.593,18**
			Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya 2017	0,00
			Aset Tetap Lainnya Netto 2017	**4.806.741.593,18**

7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**48.322.382.857,00**	**45.425.929.857,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah konstruksi dalam pengerjaan bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	2	3	4
Dikmudora	76.755.200,00	0,00	0,00	76.755.200,00
Kantor Perpustakaan dan Arda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	263.248.300,00	218.832.500,00	263.248.300,00	218.832.500,00
Dinas Pekerjaan Umum	1.308.361.800,00	574.770.850,00	127.125.000,00	1.756.007.650,00
Bappeda	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinhukominfo	0,00	0,00	0,00	0,00
DKP	56.400.000,00	890.247.000,00	0,00	946.647.000,00
Kantor Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	15.251.233.282,00	0,00	0,00	15.251.233.282,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Humas	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	27.067.354.225,00	0,00	0,00	27.067.354.225,00
BPKAD SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD SKPKD	58.650.000,00	0,00	58.650.000,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	6.745.250,00	109.100.000,00	6.745.250,00	109.100.000,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 2016	**44.088.748.057,00**	**1.792.950.350,00**	**455.768.550,00**	**45.425.929.857,00**
		Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan 2016		**(0,00)**
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Netto 2016		**45.425.929.857,00**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	76.755.200,00	0,00	0,00	76.755.200,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	218.832.500,00	0,00	0,00	218.832.500,00
Dinas PU TR	1.756.007.650,00	0,00	0,00	1.756.007.650,00
Dinas Perkim	0,00	946.647.000,00	0,00	946.647.000,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	15.251.233.282,00	0,00	0,00	15.251.233.282,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	27.067.354.225,00	0,00	0,00	27.067.354.225,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	109.100.000,00	0,00	0,00	109.100.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017	**44.479.282.857,00**	**946.647.000,00**	**0,00**	**45.425.929.857,00**
		Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017		**(0,00)**
		Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan Netto 2017		**45.425.929.857,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	76.755.200,00	97.775.450,00	0,00	174.530.650,00
Dinas Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD	218.832.500,00	0,00	0,00	218.832.500,00
Dinas PU TR	1.756.007.650,00	2.855.077.550,00	0,00	4.611.085.200,00
Dinas Perkim	946.647.000,00	0,00	56.400.000,00	890.247.000,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	15.251.233.282,00	0,00	0,00	15.251.233.282,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	27.067.354.225,00	0,00	0,00	27.067.354.225,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	109.100.000,00	0,00	0,00	109.100.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017	**45.425.929.857,00**	**2.952.853.000,00**	**56.400.000,00**	**48.322.382.857,00**
		Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan 2017		**(0,00)**
		Konstruksi Dalam Pengerjaan Netto 2017		**48.322.382.857,00**

Berdasarkan perincian mutasi kontruksi dalam pengerjaan tersebut di atas, mutasi kurang tersebut disebabkan karena pada tahun 2017 telah selesai pembangunannya sehingga harus direklas ke aset tetap gedung dan bangunan. Sedangkan mutasi tambah pada beberapa SKPD dapat disebabkan adanya sejumlah kegiatan perencanaan, atau DED, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum selesai dilaksanakan/belum dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017 yang diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	DED Perencanaan Gedung Dinas Pendidikan	2015	16.340.800,00
2	Perencanaan Rehab SDN 01 Kartoharjo	2015	16.340.800,00
3	Perencanaan Rehab SDN Sukosari	2017	14.989.850,00
4	Perencanaan Rehab SDN 02 Manisrejo	2017	27.595.200,00
5	Perencanaan Rehab SDN 03 Madiun Lor	2015	16.340.800,00
6	Perencanaan Rehab SDN 05 Madiun Lor	2015	16.340.800,00
7	Perencanaan Rehab SDN 02 Winongo	2015	11.392.000,00
8	Perencanaan Rehab SDN 04 Nambangan Kidul	2017	27.595.200,00
9	Perencanaan Rehab SMPN 10	2017	27.595.200,00
	Jumlah		**174.530.650,00**

2. Rumah Sakit Umum Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Gedung Laundry	2014	110.718.450,00
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Sumber Air Bersih	2014	41.616.000,00
3	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Farmasi dan Gudang Obat	2014	66.498.050,00
		Jumlah	**218.832.500,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	DEDJalan dan Jembatan	2013	145.500.000,00
2	DED Kantong Lumpur Setia Budi	2013	36.500.000,00
3	DED Saluran Kartini	2013	46.000.000,00
4	DED Saluran Slamet Riyadi	2013	32.000.000,00
5	SID Pintu Air Pengendali Banjir	2013	144.200.000,00
6	Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan Kapten Saputro	2014	48.500.000,00
7	DED Pelengkap Jalan Bogowonto-Pandan	2014	48.500.000,00
8	DED Pelengkap Jalan Kalimosodo-Pasopati	2014	47.250.000,00
9	DED Jalandan Jembatan	2014	197.450.000,00
10	DED Jalan dan Jembatan	2014	48.400.000,00
11	Perencanaan Pembangunan dan Penataan Road Race	2014	24.475.000,00
12	DED Perencanaan Jembatan Sri Rejeki	2014	48.550.000,00
13	Perencanaan Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan P-APBD	2015	25.155.000,00
14	DED Normalisasi Saluran Wilayah Dumai	2015	48.800.000,00
15	DED Normalisasi Saluran Asabri Selo	2015	33.800.000,00
16	DED Normalisasi Saluran Wilayah Demangan	2015	56.886.800,00
17	Perencanaan Normalisasi Saluran Jl.Sri Gading Cs (Kec.Kartoharjo)	2015	48.026.000,00
18	Perencanaan Normalisasi Saluran Jl.Campursari cs (Kec.Manguharjo)	2015	36.344.000,00
19	Perencanaan Normalisasi Saluran Jl.Tunggul Nogo Kel.Josenan cs (Kec.Taman)	2015	64.900.000,00
20	DED Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Indoor dan Lapangan Bola Voli	2016	395.229.650,00
21	DED Saluran Lingkungan Jl. Sugiyo Pranoto	2016	52.508.700,00
22	Perencanaan peningkatan jalan ring road	2016	42.330.000,00
23	Perencanaan peningkatan jl.Puspowarno, jl.Sumatra, jl.Jawa, jl.Perintis Kemerdekaan, Jl.Kalimantan dan Jl.Sulawesi	2016	42.372.500,00
24	Perencanaan Peningkatan Jl.Imam Bonjol dan Jl.Wonosari	2016	42.330.000,00
25	DED Normalisasi Saluran BumiMas	2017	114.751.000,00
26	DED Normalisasi Saluran Kartini	2017	166.547.200,00
27	DED Normalisasi Saluran Kalisono	2017	169.068.000,00
28	DED Normalisasi Saluran Manisrejo	2017	85.259.800,00
29	DED Normalisasi Saluran Slarangan	2017	158.322.400,00
30	DED Saluran Lingkungan Rejomulyo	2017	44.011.900,00
31	DED Levelling Pompa Pandan	2017	108.331.300,00
32	DED Pembangunan Daerah Tangkapan Air Pengendali Banjir Sumber Umis	2017	136.110.000,00
33	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Pangongangan	2017	30.616.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

34	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Ngegong	2017	30.395.150,00
35	DED Saluran Lingkungan Kel.Sogaten	2017	30.708.000,00
36	DED Saluran Lingkungan Kel.NambanganKidul	2017	32.136.000,00
37	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Nambangan Lor	2017	39.430.000,00
38	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jl.Paket I	2017	52.760.000,00
39	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jl. PaketII	2017	52.230.000,00
40	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Paket III	2017	52.230.000,00
41	Perencanaan Bangunan Pelengkap Perum Bumi Antariksa	2017	52.448.000,00
42	Perencanaan Pembangunan JalanTembus Pagu Indah-Widodo Kencono II	2017	52.760.000,00
43	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Banjarejo	2017	32.057.800,00
44	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Klegen	2017	32.036.000,00
45	PerencanaanPembangunan Jalan kel.Kelun	2017	32.086.000,00
46	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Pandean	2017	33.680.000,00
47	PerencanaanPembangunan Jalan kel.Kanigoro	2017	32.003.000,00
48	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Josenan	2017	32.035.000,00
49	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Mojorejo	2017	32.035.000,00
50	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Patihan	2017	32.160.000,00
51	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Manisrejo	2017	39.840.000,00
52	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.MadiunLor	2017	31.955.000,00
53	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Taman	2017	39.944.000,00
54	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Sukosari	2017	30.676.800,00
55	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Pilangbango	2017	31.649.000,00
56	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Kuncen	2017	30.395.000,00
57	Perencanaan Pembangunan Jalan kel.Manguharjo	2017	39.840.000,00
58	Penyusunan Dokumen Re-Design Pembangunan Embung Pilangbango	2017	666.545.400,00
59	Saluran Tawangrejo	2017	39.920.000,00
60	Saluran Demangan	2017	32.096.000,00
61	Saluran kel.RT.Pandean	2017	30.672.000,00
62	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Kejuron	2017	32.035.000,00
63	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Rejomulyo	2017	39.920.000,00
64	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Winongo	2017	36.326.800,00
65	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Kartoharjo	2017	33.459.000,00
66	DED Saluran Lingkungan Kelurahan Oro-oro mbo	2017	33.596.000,00
		Jumlah	**4.611.085.200,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	Perencanaan bantaran kali madiun	2016	404.955.000,00
2	Perencanaan gapura pintu masuk	2016	485.292.000,00
		Jumlah	**890.247.000**

5. Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	Perencanaan Pembangunan Embung 100%	2014	5.400.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Embung 79,628%	2014	14.944.264.528,00
3	Pengawasan Pembangunan Embung 79,628%	2014	301.568.754,00
		Jumlah	**15.251.233.282,00**

Total biaya pembangunan embung Pilangbango sebesar Rp15.251.233.282,00 terdiri dari perencanaan sebesar Rp5.400.000,00 pelaksanaan sebesar Rp14.944.264.528,00 dan pengawasan sebesar Rp301.568.754.000,00

Pada Tahun 2014 perencanaan Pembangunan Embung sebesar Rp5.400.000,00, jasa Konsultansi penyusunan Dokumen DED pembangunan Pilangbango yang dilaksanakan pada tahun 2012 berdasarkan SPK Nomor 050/PA/572/401.206/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp138.600.000.000 dalam jangka waktu pekerjaan 60 hari kalender.

Konsultan pengawasan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 050/PA/179/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp378.722.000,00 dalam jangka waktu pekerjaan 270 hari kalender.

Pelaksana pekerjaan ditunjuk berdasarkan SPK Nomor 050/PA/181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.767.600.000 dalam jangka waktu 270 hari kalender.

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango kota Madiun dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 050/181/401.206/2014 dengan nilai kontrak Rp. 18.767.600.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak selama 270 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 22 Desember 2014.

Dalam proses waktu pelaksanaan kegiatan saat fisik mencapai kemajuan kurang lebih 85% terjadi permasalahan berupa bangunan konstruksi dinding beton penahan bangunan embung mengalami pergeseran sehingga mengakibatkan pasangan dinding penahan yang terbuat dari batu kali mengalami keretakan. Pada saat mulai terjadinya pergeseran, BPBD mengambil langkah cepat dengan mengadakan rapat koordinasi antara pelaksana, konsultan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengawas, konsultan perencana, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Dinas Pekerjaan Umum untuk membahas langkah-langkah preventif sehingga hasil dari rapat koordinasi tersebut telah disepakati untuk memohon bantuan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 November 2014 Nomor 360/824/401.206/2014 dan tanggal 18 November 2014 tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang datang ke lokasi untuk mengadakan penelitian sekaligus dengan saran teknis untuk tidak melaksanakan kegiatan diatas dinding beton yang bergeser dan secara lisan dapat mengerjakan yang lain. Pada tanggal 1 Desember 2014 BPBD di undang untuk mendengarkan presentasi dari tim ahli dikampus Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang sebagai draf final atas hasil penelitian. Penjelasan secara lisan bahwa Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango sementara boleh diberi perkuatan namun secara normatif perlu segera diadakan redesain yang harus disiapkan oleh konsultan perencana.

Mempertimbangkan waktu berakhirnya kontrak dan dalam rangka menyelamatkan aset negara maka terus ditindaklanjuti dengan permohonan estimasi kuantitas dan kualitas Kegiatan Pembangunan Embung Kota Madiun tanggal 12 Desember 2014 Nomor 050/051/401.206/2014 kepada Institut Teknoloagi Surabaya (ITS). Paparan hasil penelitian dari pihak ITS telah disampaikan bahwa embung pilangbango perlu segera dibuatkan perkuatan dengan tiang pancang dalam rangka menstabilkan struktur tanah namun normatif hasil kajian dari tim ahli ITS baru selesai tanggal 23 Desember 2014 sehingga hal ini sudah melampaui batas akhir kontrak dan rekomendasi untuk dipasang tiang pancang tidak tercantum dalam item RAB pada kontrak yang telah ditandatangani. Menurut perhitungan dari tim ahli kebutuhan dana untuk menambah ruang lingkup bangunan embung berupa pasangan tiang pancang termasuk konstruksi diatasnya sekitar Rp4.500.000.000,00.

Pada tanggal 24 Desember 2014 BPBD dan dinas instansi terkait menyikapi kondisi tersebut di atas mengadakan konsultasi dengan LKPP di Jakarta untuk mohon informasi sekaligus solusi yang memungkinkan sebagai langkah-langkah yang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Disamping itu pelaksana mengkaji lebih lanjut bahwa untuk pengerjaan tiang pancang sebesar Rp4.500.000.000,00 tersebut tidak tercantum dalam kontraktual sehingga pelaksana menyatakan keberatan dan tidak sanggup untuk pengerjaan sehingga memilih untuk mengundurkan diri karena apabila menggunakan addendum kontrak dengan menambah dana maksimal 10% dari nilai kontrak awal Rp1.876.760.000,00 sehingga kegiatan pembangunan embung tersebut memang tidak dapat diselesaikan, Bahwa mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada huruf B.5 angka 38, 39, 40 dan 41 maka pengunduran diri yang disebabkan permintaan mengerjakan item pekerjaan diluar kontrak memang tidak diatur dalam SSUK. SSUK hanya mengatur pemutusan kontrak oleh PA sebagaimana diatur pada B.5 angka 40 atau pemutusan kontrak oleh penyedia sebagaimana diatur dalam huruf B.5 angka 41.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Menyikapi permasalahan tersebut Kepala BPBD Kota Madiun melayangkan surat kepada Direktur Penanganan Masalah Hukum pada LKPP di Jakarta dengan surat Nomor 050/1034/401.206/2014 tanggal 29 Desember 2014, surat Nomor 050/1034/401.206/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan surat Nomor 050/008/401.206/2014 tanggal 5 Januari 2015.

Menanggapi ketiga surat dari BPBD Kota Madiun tersebut oleh Direktur Penanganan Masalah Hukum pada LKPP memberikan pendapat dengan surat tanggapan tanggal 20 Januari 2016 Nomor 1156/D.4.3/1/2015 yang isinya sebagai berikut :

a. Bilamana alasan penyedia menolak melanjutkan pelaksanaan kontrak karena tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tambahan (item baru) atas hasil justifikasi tim ahli maka PPK, jika kontrak diputus maka tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan penyedia. Penyedia tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (2) Perpres 70 Tahun 2012 termasuk pengenaan sanksi daftar hitam.
b. Untuk perpanjangan waktu yang menggunakan sumber dana tahun tunggal tidak diperkenakan melewati tahun anggaran berikutnya.
c. Jika berdasarkan pertimbangan teknis dari tim ahli yang menyatakan bahwa untuk memperkuat konstruksi pembangunan embung harus diberikan tiang pancang, dan bilamana pekerjaan pembangunan embung akan mengalami keretakan bila tidak diberikan tiang pancang (kesalahan desain), maka PPK dapat menghentikan sementara atau menghentikan sama sekali (permanen) dengan mekanisme pengurangan volume pekerjaan melalui addendum kontrak.
d. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai atau sebagaimana cara pembayaran yang tertuang dalam kontrak.
e. Penambahan pekerjaan tiang pancang yang dilakukan melalui penambahan ruang lingkup hanya dapat dilakukan bilamana melalui mekanisme perubahan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.
f. Terkait dengan sisa pekerjaan sebesar 15% dan penambahan tiang pancang yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 maka :
    1) Pada prinsipnya dilakukan dengan kontrak baru melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
    2) Bilamana terjadi perubahan perencanaan, yang masih menjadi tanggung jawab perencana maka perencana melakukan perubahan desain tanpa menuntut pembayaran.

Berdasarkan kajian tim ahli baik dari Universitas Brawijaya dan ITS serta tanggapan dari LKPP maka Kepala BPBD selaku PA melayangkan surat kepada pelaksana dengan surat Nomor 050/III/401.206/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan embung pilangbango tidak dapat dilanjutkan sesuai kontrak Nomor 050/181/401.206/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan kemajuan fisik yang dilaporkan oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

konsultan pengawas 84,628% sebagai dasar akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai yang disepakati.

Dalam upaya tindak lanjut Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango agar diketahui oleh instansi fungsional yang mempunyai otoritas terkait analisa keuangan yang menyangkut batas akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, maka Kepala BPBD Kota Madiun menyampaikan permohonan review pelaksanaan kontrak kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur di Surabaya dengan Nomor surat 050/199/401.206/2015 tanggal 27 Januari 2015 terkait permasalahan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango agar BPKP dapat membantu melakukan review atas pelaksanaan kontrak. Namun mengingat padatnya jadwal kegiatan BPKP dan sebagian pejabat fungsional banyak yang mutasi keluar daerah maka BPKP belum dapat secara resmi datang ke Kota Madiun untuk melaksanakan review pelaksanaan kontrak. Seiring berjalannya waktu, Kejaksaan Negeri Kota Madiun telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala BPBD dengan Nomor B-33/0.5.14/lId/1/02/2015 tanggal 5 Februari 2015 untuk dimintai keterangan terkait dengan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dan surat panggilan saksi Nomor SP.115/05.14/Fd.1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kegiatan konsultan perencanaan dalam Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango sampai dengan 2 April 2015. Permasalahan tersebut masih dalam proses penyelidikan untuk konstruksi Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dan DED Pembangunan Embung Pilangbango oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Pada tanggal 3 Maret 2015 BPBD menyampaikan surat teguran kepada pelaksana dengan Nomor: 050/44/401.206.2015 perihal teguran perbaikan pembangunan embung atas kewajiban untuk segera memperbaiki/membenahi pekerjaan yang rusak. Pada tanggal 24 maret 2015 dari BPKP telah menghadap Walikota terkait kordinasi sekaligus melihat kondisi di lapangan Kegiatan Pembangunan Embung Pilangbango dalam upaya tindak lanjut surat Walikota tanggal 27 Januari 2015 No.050/199/401.206/2015.

6. Sekretariat DPRD dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	Pembangunan Gedung DPRD	2015	27.067.354.225,00
		Jumlah	**27.067.354.225,00**

Berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 11 Mei 2015 Nomor: 050/PA/778/401.040/2015 Pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun. Berdasarkan surat perjanjian tersebut, PPK telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. memberikan surat teguran tanggal 30 Nopember 2015 Nomor: 050/2145/401.040/2016 (SCM I)
b. memberikan surat teguran tanggal 11 Desember 2015 Nomor: 050/2254/401.040/2016 (SCM II).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. memberikan surat teguran tanggal 17 Desember 2015 Nomor: 050/2323/401.040/2016 (SCM III).
d. rapat PPK dengan atasan beserta pihak terkait tanggal 23 Desember 2015, bahwa pelaksana diberikan kesempatan 50 hari kalender untuk menyelesaikan sisa pekerjaan.
e. Surat permohonan pelaksana tanggal 24 Desember 2015 Nomor: 024/SP/AJP-MDN/XII/2015 mengenai pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung DPRD dan denda 1/1000 per hari dan menyampaikan perpanjangan jaminan pelaksanaan
f. PPK telah melakukan pemutusan pemutusan kontrak kegiatan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tanggal 19 Pebruari 2016 Nomor: 050/341/401.040/2016

7. Dinas Pertanian dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	Jumlah
1	Perencanaan Saluran Irigasi Kec Manguharjo	2016	54.400.000,00
2	Perencanaan Saluran Irigasi Kec Kartoharjo	2016	54.700.000,00
		Jumlah	**109.100.000,00**

7.1.4. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Lainnya	**122.417.814.572,47**	**65.419.215.740,56**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo aset lainnya milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Aset Lainnya	Tahun 2017	Tahun 2016
1. Tuntutan Ganti Rugi	155.654.318,43	2.925.735.246,17
2. Kemitraan dengan pihak ketiga	88.411.755.000,00	31.979.755.000,00
3. Aset tidak berwujud	10.754.400.455,00	9.621.870.430,00
4. Aset lain-lain	23.096.004.799,04	20.891.855.064,39
Jumlah bruto	**122.417.814.572,47**	**65.419.215.740,56**

7.1.4.1. Tuntuan Ganti Rugi (TGR)

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	**155.654.318,43**	**2.925.735.246,17**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo tuntutan ganti rugi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 kerugian daerah yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(SKTJM) dan Surat Kesanggupan Membayar dari Pihak Ketiga di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

7.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Jumlah kemitraan dengan pihak ketiga milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang terdiri dari Bangun Guna Serah (BOT) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

Perincian mutasi kemitraan dengan pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1	2	3	4
Bangun Guna Serah (BOT)	46.731.505.000,00	0,00	14.751.750.000,00	31.979.755.000,00
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	0.00	56.432.000.000,00	0,00	56.432.000.000,00
	46.731.505.000,00	**56.432.000.000,00**	**14.751.750.000,00**	**88.411.755.000,00**

7.1.4.2.1. Bangun Guna Serah (BOT)

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Bangun Guna Serah (BOT)	**31.979.755.000,00**	**46.731.505.000,00**

Jumlah bangun guna serah merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar. investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi bangun guna serah (BOT) pada tanggal 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Bangun Guna Serah (BOT)	1	2	3	4
Carrefour	8.500.000.000.00	0,00	0,00	8.500.000.000.00
Taman Hiburan Rakyat /THR	10.406.250.000.00	0,00	0,00	10.406.250.000.00
Kawasan Suncity	13.073.505.000.00	0,00	0,00	13.073.505.000.00
	46.731.505.000,00	**0,00**	**14.751.750.000,00**	**31.979.755.000,00**

Perincian penggunaan bangun guna serah (BOT) sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (Carrefour)	Jangka waktu 15 tahun 10 bulan atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. S.Parman (eks terminal). sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 644.1/03/401.013/2008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Nomor : 001/III/KTP/2008.
2	PT. KELOLA TAMA PROPERTI (THR)	Jangka waktu 15 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Slamet Riyadi. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT KELOLA TAMA PROPERTI Nomor : 556/08/401.013/2008 Nomor : 001/XII/KTP/2008.
3	PT. INDRACO (Kawasan Hiburan/Wisata. Perdagangan dan Hotel)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah milik Pemerintah Kota Madiun di Jl.Pelita Tama. sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT INDRACO Nomor : 415.4/14/401.011/2010 Nomor : 02/SPK-IND/X/2010

7.1.4.2.2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	**56.432.000.000,00**	**0,00**

Jumlah kerja sama pemanfaatan merupakan jumlah aset yang tidak termasuk aset lancar. investasi dan aset tetap Pemerintah Kota Madiun atas tanah dan bangunan Plaza Lawu Madiun yang terletak di Jalan Pahlawan Madiun pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dibangun melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Perincian mutasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) pada tanggal 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)	**1**	**2**	**3**	**4**
Plaza Lawu Madiun	0,00	56.432.000.000,00	0,00	56.432.000.000.00
	0,00	**56.432.000.000,00**	**0,00**	**56.432.000.000.00**

Perincian Kerja Sama Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu
1.	PT. SRI TANAYA MEGATAMA (Kerjasama Pemanfaatan Plaza Lawu Madiun)	Jangka waktu 30 tahun atas penyerahan tanah dan bangunan beserta utilitas penunjang gedung Plaza Lawu Madiun milik Pemerintah Kota Madiun di Jl. Pahlawan No.47 Madiun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dengan PT. SRI TANAYA MEGATAMA Nomor : 030/4/401.202/2017 Nomor : 003/STM-LP/HO/XII/2017 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut, Pemerintah Kota Madiun setiap tahun mendapatkan kontribusi tetap sebesar Rp.1.250.000.000 terhitung mulai tahun 2017 dan setiap 5 tahun sekali mengalami kenaikan sebesar 5% dari nilai kontribusi tetap, dan kontribusi profit sharing sebesar 7,5%. Selain ini, PT. SRI TANAYA MEGATAMA menginvestasikan dananya sebesar Rp31.121.145.004 untuk melakukan renovasi Plaza Lawu Madiun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2017	Tahun 201
Aset Tidak Berwujud	**10.754.400.455,00**	**9.621.870.430,0**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tidak berwujud berupa pengadaan software, kajian sejenisnya yang dipergunakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun pada tangg Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian mutasi aset tidak berwujud pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah i

Perubahan di tahun 2016	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Sald 31 Desember 201
Aset Tidak Berwujud	1	2	3	
Dikmudora	134.235.000,00	201.510.203,00	151.580.203,00	184.165.000,0
Kantor Perpustakaan dan Arda	0,00	0	0,00	0,0
Dinas Kesehatan	244.800.000,00	0,00	0,00	244.800.000,0
RSUD	222.931.000,00	0,00	0,00	222.931.000,0
Dinas Pekerjaan Umum	458.184.500,00	1.023.657.750,00	0,00	1.481.842.250,0
Bappeda	2.331.518.900,00	1.243.325.600,00	0,00	3.574.844.500,0
Dinhukominfo	98.900.000,00	0,00	0,00	98.900.000,0
DKP	297.713.000,00	0,00	0,00	297.713.000,0
Kantor Lingkungan Hidup	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,0
Dukcapil	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,0
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	161.925.000,00	0,00	0,00	161.925.000,0
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,0
Kantor Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,0
BPBD	0,00	34.840.000,00	0,00	34.840.000,0
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,0
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,0
Bagian Adm Pemerintahan	0,00	213.412.500,00	0,00	213.412.500,0
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,0
Bagian Adm Pembangunan	107.350.000,00	0,00	0,00	107.350.000,0
Bagian Adm Pereksos	0,00	0,00	0,00	0,0
Bagian Organisasi	721.165.000,00	56.732.980,00	0,00	777.897.980,0
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,0
Bagian Humas	0,00	0,00	0,00	0,0
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,0
BPKAD SKPD	641.380.000,00	262.263.000,00	0,00	903.643.000,0
BPKAD SKPKD				
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kecamatan Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	47.750.000,00	0,00	0,00	47.750.000,00
KPPT	673.893.000,00	0,00	0,00	673.893.000,00
Dinas Pendapatan Daerah	194.451.000,00	0,00	0,00	194.451.000,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindagkoppar	79.660.600,00	0,00	0,00	79.660.600,00
Dinas Pasar	211.351.600,00	0,00	0,00	211.351.600,00
Aset Tidak Berwujud 2016	**6.737.708.600,00**	**3.035.742.033,00**	**151.580.203,00**	**9.621.870.430,00**
			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2016	**(6.948.708.545,00)**
			Aset Tidak Berwujud Netto 2016	**2.673.161.885,00**

Terhitung mulai tahun 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset tidak berwujud pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Tanah	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	184.165.000,00	0,00	0,00	184.165.000,00
Dinas Kesehatan KB	244.800.000,00	0,00	0,00	244.800.000,00
RSUD	222.931.000,00	0,00	0,00	222.931.000,00
Dinas PU TR	1.481.842.250,00	0,00	0,00	1.481.842.250,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	34.840.000,00	0,00	0,00	34.840.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	161.925.000,00	0,00	0,00	161.925.000,00
Dinas LH	53.500.000,00	297.713.000,00	0,00	351.213.000,00
Dispendukcapil	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
Dinas Perhubungan	98.900.000,00	0,00	0,00	98.900.000,00
Dinas Infokom	0,00	680.232.980,00	0,00	680.232.980,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	673.893.000,00	78.105.300,00	0,00	751.998.300,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	213.412.500,00	0,00	0,00	213.412.500,00
Bagian Organisasi	777.897.980,00	44.400.000,00	724.632.980,00	97.665.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	107.350.000,00	0,00	0,00	107.350.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	47.750.000,00	0,00	0,00	47.750.000,00
BPKAD	903.643.000,00	0,00	0,00	903.643.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	194.451.000,00	0,00	0,00	194.451.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	3.574.844.500,00	0,00	0,00	3.574.844.500,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	211.351.600,00	1.555.300,00	0,00	212.906.900,00
Saldo Awal Aset Tidak Berwujud 2017	**9.244.496.830,00**	**1.102.006.580,00**	**724.632.980,00**	**9.621.870.430,00**
		Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2017		**(6.948.708.545,00)**
		Saldo Awal Aset Tidak Berwujud Netto 2017		**2.673.161.885,00**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset tidak berwujud selama tahun 2017

Perincian mutasi aset tidak berwujud pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Aset Tidak Berwujud	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	184.165.000,00	84.930.000,00	0,00	269.095.000,00
Dinas Kesehatan KB	244.800.000,00	0,00	0,00	244.800.000,00
RSUD	222.931.000,00	0,00	0,00	222.931.000,00
Dinas PU TR	1.481.842.250,00	1.926.104.150,00	1.926.104.150,00	1.481.842.250,00
Dinas Perkim	0,00	50.600.000,00	0,00	50.600.000,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	34.840.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	34.840.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	161.925.000,00	4.000.000,00	0,00	165.925.000,00
Dinas LH	351.213.000,00	0,00	0,00	351.213.000,00
Dispendukcapil	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00
Dinas Perhubungan	98.900.000,00	0,00	0,00	98.900.000,00
Dinas Infokom	680.232.980,00	98.100.000,00	0,00	778.332.980,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas PM, PTSP/KPPT	751.998.300,00	0,00	0,00	751.998.300,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	213.412.500,00	73.411.000,00	0,00	286.823.500,00
Bagian Organisasi	97.665.000,00	0,00	0,00	97.665.000,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	107.350.000,00	0,00	0,00	107.350.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	47.750.000,00	81.400.000,00	0,00	129.150.000,00
BPKAD	903.643.000,00	199.767.425,00	0,00	1.103.410.425,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	194.451.000,00	0,00	0,00	194.451.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	3.574.844.500,00	540.321.600,00	0,00	4.115.166.100,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	212.906.900,00	0,00	0,00	212.906.900,00
Aset Tidak Berwujud 2017	**9.621.870.430,00**	**3.268.634.175,00**	**2.136.104.150,00**	**10.754.400.455,00**
			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2017	**(8.986.382.169,34)**
			Aset Tidak Berwujud Netto 2017	**1.768.018.285,66**

7.1.4.4. Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Aset Lain-Lain	**23.096.004.799,04**	**20.891.855.064,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset lain-lain berupa reklas aset tetap yang rusak berat dan belum dihapuskan serta aset tetap yang akan diserahkan ke pihak lain sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Per 31 Desember 2017.

Perincian mutasi aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Aset Lain-Lain	1	2	3	4
Dikmudora	2.490.021.270,00	138.435.945,00	0,00	2.628.457.215,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Aset Lain-Lain	1	2	3	4
Kantor Perpustakaan dan Arda	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Dinas Kesehatan	6.700.000,00	323.000.000,00	6.700.000,00	323.000.000,00
RSUD	271.675.900,00	510.069.700,00	0,00	781.745.600,00
Dinas Pekerjaan Umum	11.093.199.241,00	3.137.582.173,00	0,00	14.230.781.414,00
Bappeda	111.799.750,00	0,00	0,00	111.799.750,00
Dinhukominfo	4.723.000,00	0,00	0,00	4.723.000,00
DKP	720.250.000,00	0,00	0,00	720.250.000,00
Kantor Lingkungan Hidup	4.941.000,00	0,00	0,00	4.941.000,00
Dukcapil	73.190.000,00	0,00	0,00	73.190.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	18.468.825,00	0,00	0,00	18.468.825,00
Bakesbangpol	26.425.500,00	0,00	0,00	26.425.500,00
Kantor Satpol PP	27.565.200,00	0,00	0,00	27.565.200,00
BPBD	156.089.000,00	0,00	0,00	156.089.000,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adm Pemerintahan	29.609.000,00	0,00	0,00	29.609.000,00
Bagian Hukum	9.055.750,00	0,00	0,00	9.055.750,00
Bagian Adm Pembangunan	22.345.000,00	0,00	0,00	22.345.000,00
Bagian Adm Pereksos	3.076.000,00	0,00	1.205.000,00	1.871.000,00
Bagian Organisasi	30.240.000,00	0,00	0,00	30.240.000,00
Bagian Umum	27.962.000,00	336.540.000,00	0,00	364.502.000,00
Bagian Humas	11.308.500,00	0,00	0,00	11.308.500,00
Sekretariat DPRD	661.341.935,00	0,00	0,00	661.341.935,00
BPKAD SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD SKPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Kartoharjo	21.582.375,00	0,00	0,00	21.582.375,00
Kecamatan Taman	28.088.300,00	0,00	0,00	28.088.300,00
Kecamatan Manguharjo	79.075.200,00	0,00	0,00	79.075.200,00
Badan Kepegawaian Daerah	26.925.500,00	0,00	6.624.000,00	20.301.500,00
KPPT	27.914.000,00	0,00	27.914.000,00	0,00
Dinas Pendapatan Daerah	257.173.500,00	0,00	0,00	257.173.500,00
BPM,KB & Ketahanan Pangan	229.340.000,00	7.000.000,00	14.350.000,00	221.990.000,00
Dinas Pertanian	2.858.000,00	0,00	0,00	2.858.000,00
Dinas Perindagkoppar	21.076.500,00	0,00	0,00	21.076.500,00
Dinas Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perubahan di tahun 2017	Saldo 1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2016
Aset Lain-Lain	1	2	3	4
	16.496.020.246,00	4.452.627.818,00	56.793.000,00	20.891.855.064,00
			Aset Lain-Lain 2016	20.891.855.064,00

Terhitung mulai tahun anggaran 2017 terdapat perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sehingga perlu menyesuaikan saldo awal masing-masing SKPD pada awal Januari 2017.

Perincian mutasi saldo awal aset lain-lain pada tanggal 1 Januari 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan So Awal 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 1 Januari 2017
Aset Lain-Lain	1	2	3	4 = (1 + 2 – 3)
Dinas Pendidikan	2.628.457.215,00	0,00	0,00	2.628.457.215,00
Dinas Kesehatan KB	323.000.000,00	25.055.000,00	0,00	348.055.000,00
RSUD	781.745.600,00	0,00	0,00	781.745.600,00
Dinas PU TR	14.230.781.414,00	0,00	0,00	14.230.781.414,00
Dinas Perkim	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
Dinas Satpol PP	27.565.200,00	152.000.000,00	0,00	179.565.200,00
BPBD	156.089.000,00	0,00	152.000.000,00	4.089.000,00
Dinas Sosial	221.990.000,00	0,00	25.670.000,00	196.320.000,00
Dinas Tenaga Kerja	18.468.825,00	0,00	0,00	18.468.825,00
Dinas LH	4.941.000,00	674.250.000,00	4.941.000,00	674.250.000,00
Dispendukcapil	73.190.000,00	0,00	0,00	73.190.000,00
Dinas Perhubungan	4.723.000,00	0,00	473.000,00	4.250.000,00
Dinas Infokom	0,00	44.756.500,00	0,00	44.756.500,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	29.609.000,00	0,00	0,00	29.609.000,00
Bagian Organisasi	30.240.000,00	0,00	30.000.000,00	240.000,00
Bagian Umum	364.502.000,00	0,00	2.975.000,00	361.527.000,00
Bagian Hukum	9.055.750,00	0,00	0,00	9.055.750,00
Bagian Perekkesra	1.871.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00
Bagian Adbang	22.345.000,00	0,00	0,00	22.345.000,00
Sekretariat DPRD	661.341.935,00	0,00	0,00	661.341.935,00
BKD	20.301.500,00	0,00	0,00	20.301.500,00
BPKAD	0,00	4.941.000,00	0,00	4.941.000,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	257.173.500,00	0,00	0,00	257.173.500,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	111.799.750,00	0,00	0,00	111.799.750,00
Kec Kartoharjo	21.582.375,00	0,00	0,00	21.582.375,00
Kec Manguharjo	79.075.200,00	0,00	0,00	79.075.200,00
Kec Taman	28.088.300,00	0,00	0,00	28.088.300,00
Bakesbangpol	26.425.500,00	0,00	0,00	26.425.500,00
Dinas Pertanian KP	2.858.000,00	615.000,00	0,00	3.473.000,00
Dinas Perdagangan	0,00	21.076.500,00	0,00	21.076.500,00
	20.139.220.064,00	**968.694.000,00**	**216.059.000,00**	**20.891.855.064,00**
			Saldo Awal Aset Lain-Lain 2017	**20.891.855.064,00**

Berikut ini disajikan perincian mutasi aset lain-lain selama tahun 2017

Perincian mutasi aset lain-lain pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Perubahan Tahun 2017	Saldo 1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2017
Aset Lain-Lain	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 + 2 – 3)**
Dinas Pendidikan	2.628.457.215,00	134.685.655,00	2.160.725.769,96	602.417.100,04
Dinas Kesehatan KB	348.055.000,00	8.000.000,00	331.595.000,00	24.460.000,00
RSUD	781.745.600,00	0,00	0,00	781.745.600,00
Dinas PU TR	14.230.781.414,00	5.273.952.300,00	448.000,00	19.504.285.714,00
Dinas Perkim	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00
Dinas Satpol PP	179.565.200,00	0,00	4.100.000,00	175.465.200,00
BPBD	4.089.000,00	0,00	3.189.000,00	900.000,00
Dinas Sosial	196.320.000,00	0,00	93.765.000,00	102.555.000,00
Dinas Tenaga Kerja	18.468.825,00	0,00	16.648.825,00	1.820.000,00
Dinas LH	674.250.000,00	0,00	140.000.000,00	534.250.000,00
Dispendukcapil	73.190.000,00	0,00	2.294.000,00	70.896.000,00
Dinas Perhubungan	4.250.000,00	0,00	750.000,00	3.500.000,00
Dinas Infokom	44.756.500,00	0,00	6.741.500,00	38.015.000,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	29.609.000,00	0,00	3.107.000,00	26.502.000,00
Bagian Organisasi	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Bagian Umum	361.527.000,00	0,00	346.047.000,00	15.480.000,00
Bagian Hukum	9.055.750,00	0,00	2.037.000,00	7.018.750,00
Bagian Perekkesra	1.871.000,00	0,00	1.871.000,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Adbang	22.345.000,00	0,00	7.420.000,00	14.925.000,00
Sekretariat DPRD	661.341.935,00	0,00	7.187.000,00	654.154.935,00
BKD	20.301.500,00	0,00	4.423.500,00	15.878.000,00
BPKAD	4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	257.173.500,00	0,00	0,00	257.173.500,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	111.799.750,00	0,00	14.297.750,00	97.502.000,00
Kec Kartoharjo	21.582.375,00	0,00	8.412.375,00	13.170.000,00
Kec Manguharjo	79.075.200,00	0,00	14.704.200,00	64.371.000,00
Kec Taman	28.088.300,00	0,00	4.440.800,00	23.647.500,00
Bakesbangpol	26.425.500,00	0,00	19.029.500,00	7.396.000,00
Dinas Pertanian KP	3.473.000,00	0,00	3.473.000,00	0,00
Dinas Perdagangan	21.076.500,00	0,00	10.600.000,00	10.476.500,00
	20.891.855.064,00	**5.416.637.955,00**	**3.212.488.219,96**	**23.096.004.799,04**
			Aset Rusak Berat 2017	**23.096.004.799,04**
			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat) 2017	**(14.345.384.704,07)**
				8.750.620.094,97

Mutasi penambahan aset lain-lain selama tahun 2017 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ reklas dari aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya yang rusak berat sehingga tidak dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan
- ☑ koreksi aset lain-lain seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.
- ☑ perolehan non APBD seperti perolehan yang berasal dari mutasi antar skpd, hibah dari pusat, hibah dari provinsi, dana BOS, dana blockgrand, komite sekolah, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi tetapi tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan karena rusak berat/tidak dimanfaatkan atau berlebih .

Perincian mutasi penambahan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Penambahan selama 2017	Reklas dari aset tetap	Koreksi aset lain-lain	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan2017
Aset Lain-Lain	**1**	**2**	**3**	**4 = (1 +2 +3)**
Dinas Pendidikan	134.685.655,00	0,00	0,00	134.685.655,00
Dinas Kesehatan KB	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RSUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PU TR	5.273.952.300,00	0,00	0,00	5.273.952.300,00
Dinas Perkim	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penambahan selama 2017	Reklas dari aset tetap	Koreksi aset lain-lain	Perolehan non APBD	Saldo mutasi penambahan2017
Aset Lain-Lain	1	2	3	4 = (1 +2 +3)
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Infokom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas PM, PTSP/KPPT	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Budparpora	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Walikota/Wakil	0,00	0,00	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Perekkesra	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bependa	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian KP	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.416.637.955,00	**0,00**	**0,00**	**5.416.637.955,00**

Mutasi pengurangan aset lain-lain selama tahun 2017 berasal dari beberapa hal yaitu:

- ☑ Penghapusan aset rusak berat.
- ☑ koreksi aset lain-lain berupa tetap rusak berat ke aset tetap karena masih dipergunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- ☑ koreksi aset lain-lain seperti koreksi karena belum tercatat, kurang catat, salah catat, atau kesalahan posting.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
8

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8.1. PENDAPATANLO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan LO	978.291.790.329,31	1.055.306.846.311 ,07	(7,30%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan LO terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer LO dan lain-lain pendapatan yang sah LO. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 7,30%.

Perincian pendapatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	32,44%
Pendapatan Transfer LO	726.839.358.425,00	828.331.190.822,00	(12,25%)
Lain-lain Pendapatan yang sah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22%)
Jumlah	978.291.790.329,31	1.055.306.846.311,07	(7,30%)

8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAHLO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Asli Daerah LO	250.007.024.927,89	188.772.516.968,07	32,44%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan asli daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan asli daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari pajak daerah LO, retribusi daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan lain-lain PAD yang sah LO. Pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp188.772.516.968,07 terjadikenaikan sebesar 32,44%.

Perincian pendapatan asli daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Asli Daerah LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak Daerah LO	75.968.556.063,51	65.080.072.075,90	16,73%
2. Retribusi Daerah LO	18.731.242.668,40	18.066.580.676,00	3,68%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO	27.183.076.020,81	20.096.685.245,24	35,26%
4. Lain-lain PAD yang sah LO	128.124.150.175,17	85.529.178.970,93	49,80%
Jumlah	**250.007.024.927,89**	**188.772.516.968,07**	**32,44%**

8.1.1.1. Pajak DaerahLO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pajak Daerah LO	**75.968.556.063,51**	**65.080.072.094,90**	**16,73%**

Jumlah pendapatan pajak daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan pajak daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan pajak daerah LO terdiri dari pajak hotel LO, pajak restoran LO, pajak hiburan LO, pajak reklame LO, pajak penerangan jalan LO, pajak parkir LO, pajak air tanah LO, BPHTB LO dan PBB LO. Pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 16,73%.

Perincian pendapatan pajak daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan Pajak Daerah LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pajak hotel	4.978.440.704,00	4.012.770.290,00	24,06%
2. Pajak restoran	7.170.486.520,95	5.582.685.748,20	28,44%
3. Pajak hiburan	1.266.020.938,00	1.211.623.403,00	4,49%
4. Pajak reklame	2.740.024.894,67	2.623.486.627,50	4,44%
5. Pajak penerangan jalan	18.713.604.893,90	16.428.405.859,10	13,91%
6. Pajak parkir	1.349.788.267,00	935.730.053,00	44,25%
7. Pajak air tanah	300.899.773,94	301.705.939,00	(0,27%)
8. BPHTB	20.375.963.778,00	15.078.722.102,10	35,13%
9. PBB	19.073.326.203,00	18.904.942.053,00	0,89%
Total	**75.968.556.063,51**	**65.080.072.074,90**	**16,73%**

1. Pendapatan pajak hotel LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp4.978.440.657,00. Pendapatan pajak hotel LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp.4.962.572.204,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak hotel sebesar Rp15.868.500,00. Pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp4.978.440.657,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hotel LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp4.012.770.290,00 terjadi kenaikan sebesar 24,06%
2. Pendapatan pajak restoran LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan karcis pajak restoran yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp7.170.387.520,48. Pendapatan pajak restoran LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp7.165.531.520,95 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak restoran sebesar Rp11.302.877,18. Pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp7.170.387.520,48 dibandingkan dengan pendapatan pajak restoran LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp5.582.530.748,20 terjadi kenaikan sebesar 28,44%.
3. Pendapatan pajak hiburan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp1.266.020.438,00. Pendapatan pajak hiburan LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.254.718.060,82 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

hiburan sebesar Rp17.891.250,00. Pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.266.020.438,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak hiburan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.211.778.403,00 terjadi kenaikan sebesar 4,49%.

4. Pendapatan pajak reklame LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp2.740.024.894,67. Pendapatan pajak reklame LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.721.474.389,67 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak reklame sebesar Rp18.550.505,00 dan Pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp1.046.367.799,17. Pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.740.024.894,67 dibandingkan dengan pendapatan pajak reklame LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.623.486.627,50 terjadi kenaikan sebesar 4,44%.
5. Pendapatan pajak penerangan jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Potongan Pajak Penerangan Jalan dari PLN dan non PLN yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp18.713.603.982,95. Pendapatan pajak penerangan jalan LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp17.094.995.413,08 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.618.609.480,82. Pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp18.713.603.982,95 dibandingkan dengan pendapatan pajak penerangan jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp16.428.405.859,10 terjadi kenaikan sebesar 13,91%.
6. Pendapatan pajak parkir LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp1.349.788.267,00 Pendapatan pajak parkir LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.349.788.267,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak parkir sebesar Rp0,00 Pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.349.788.267,00 dibandingkan dengan pendapatan pajak parkir LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp935.730.053,00 terjadi kenaikan sebesar 44,25%.
7. Pendapatan pajak air tanah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp300.899.743,94. Pendapatan pajak air tanah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp300.787.175,54 sedangkan sisanya masih menjadi piutang pajak air tanah sebesar Rp112.598,40. Pendapatan pajak air tanah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp300.899.743,94 dibandingkan dengan pendapatan pajak air tanah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp301.705.939,00 terjadi penurunan sebesar 0,27%.

8. Pendapatan BPHTB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp20.375.963.778,00 Pendapatan BPHTB LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp19.073.326.203,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang BPHTB sebesar Rp0,00. Pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp20.375.963.778,00 dibandingkan dengan pendapatan BPHTB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp15.078.722.102,10 terjadi kenaikan sebesar 35,13%.
9. Pendapatan PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diterbitkan untuk masa pajak tahun 2017 adalah sebesar Rp19.039.792.220,00. Pendapatan PBB LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp18.952.524.814,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang PBB sebesar Rp1.423.438.964,00 Pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp18.456.211.352,00 dibandingkan dengan pendapatan PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp18.904.942.053,00 terjadi kenaikan sebesar 0,89%.

8.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Retribusi Daerah LO	18.731.242.668,40	18.066.580.676,00	3,68%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan retribusi daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan retribusi daerah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan retribusi daerah LO terdiri dari retribusi jasa umum LO, retribusi usaha LO, retribusi perizinan tertentu LO. Pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 3,68%.

Perincian pendapatan retribusi daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi Daerah LO Per SKPD	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dinas PU dan TR	**2.358.218.181,67**	**2.047.500.287,00**	**15,18%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	00,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	776.521.181,67	861.104.287,00	(9,82%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	1.581.697.000,00	1.186.396.000,00	33,32%
2. DLH	**244.637.500,00**	**438.098.000,00**	**(44,16%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	202.657.500,00	347.488.000,00	(41,68%)
b. Retribusi Jasa Usaha LO	41.980.000,00	90.610.000,00	(53,67%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
3. Dinas Perhubungan	**2.021.550.900,00**	**3.255.233.350,00**	**(37,90%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	1.679.171.500,00	1.652.224.000,00	1,63%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	339.799.400,00	1.599.769.300,00	(78,76%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	2.580.000,00	3.240.000,00	(20,37%)
4.Dinas Budparpora	**201.936.389,00**	**0,00**	**0,00%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0.00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	201.936.389,00	0,00	0.00%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
5. Bagian Pemerintahan	**1.407.770.472,00**	**2.007.434.970,67**	**(29,87%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0.00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	1.407.770.472,00	2.007.434.970,67	(29,87%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
6. BKD	**237.700.000,00**	**253.650.000,00**	**(6,29%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	237.700.000,00	253.650.000,00	(6,29%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
7. BPKAD	**5.665.826.071,00**	**2.451.370.501,00**	**131,13%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	5.665.826.071,00	2.451.370.501,00	131,13%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
8. Kecamatan Kartoharjo	**1.158.487.944,11**	**1.184.252.380,83**	**(2,18%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	1.158.487.944,11	1.184.252.380,83	(2,18%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
9. Kecamatan Taman	**506.546.769,37**	**564.438.707,00**	**(10,26%)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	506.546.769,37	564.438.707,00	(10,26%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
10. Kecamatan Manguharjo	**601.710.456,25**	**578.414.569,17**	**4,03%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	601.710.456,25	578.414.569,17	(4,03%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
11. Dinas Pertanian dan KP	**52.773.300,00**	**54.532.562,00**	**(3,23%)**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	52.773.300,00	54.532.562,00	(3,23%)
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
12. Dinas Perdagangan	**4.274.084.685,00**	**0,00**	**0,00%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	4.200.206.185,00	0,00	0,00%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	73.878.000,00	0,00	0,00%
13. Dinas Perindagkoppar	**0,00**	**669.091.064,00**	**0,00%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	0,00	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	0,00	181.949.064,00	0,00%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	487.142.000,00	0,00%
14. Dinas Pasar	**0,00**	**4.561.054.014,33**	**0,00%**
a. Retribusi Jasa Umum LO	0,00	4.561.054.014,33	0,00%
b. Retribusi Jasa Usaha LO	0,00	0,00	0,00%
c. Retribusi Perizinan tertentu LO	0,00	0,00	0,00%
Total	**18.731.242.668,40**	**18.066.580.676,00**	**3,68%**

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PU dan TR)

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp314.150.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp128.672.741,67 sedangkan sisanya merupakan retribusi pemakaian kekayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

daerah LO dari pendapatan diterima dimuka tahun 2016. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp314.150.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp464.750.000,00 terjadi penurunan sebesar 32,40%.

☑ Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp647.848.440,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp647.848.440,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp239.734.587,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp239.734.587,00 terjadi kenaikan sebesar 170,24%.

c. Retribusi perizian tertentu LO berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) LO.

☑ Retribusi IMB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan IMB yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp1.581.697.000,00. Pendapatan retribusi IMB LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.581.697.000,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang retribusi IMB sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.581.697.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi IMB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.186.396.000,00 terjadi penurunan sebesar 33,32%.

2. Dinas Perhubungan

a. Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO dan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO.

☑ Retribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran dari juru parkir untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp1.083.821.500,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.083.821.500,00 sedangkan sisanya di kas bendahara penerimaan karena setoran akhir tahun baru dapat disetorkan pada awal tahun 2017 sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.083.821.500,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan parkir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

di tepi jalan umum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.101.324.000,00 terjadi penurunan sebesar 1,59%.

☑ Retribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor yang telah dilakukan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp595.530.000,00. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp595.530.000,00 sedangkan sisanya di kas bendahara penerimaan karena setoran akhir tahun baru dapat disetorkan pada awal tahun 2017 sebesar Rp0,00.Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp595.530.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp550.900.000,00 terjadi kenaikan sebesar 8,10%.

b. Retribusi jasa usaha LO terdiri dari retribusi terminal LO dan retribusi tempat parkir khusus LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi terminal yang terpakai untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp135.521.100,00. Pendapatan retribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp135.521.100,00.sedangkan sisanya di kas bendahara penerimaan karena setoran akhir tahun baru dapat disetorkan pada awal tahun 2017 sebesar Rp0,00. Pendapatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp135.521.100,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar 0,00.

☑ Retribusi terminal LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan karcis retribusi terminal yang terpakai untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp886.000,00. Pendapatan retribusi terminal LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp886.000,00 sedangkan sisanya di kas bendahara penerimaan karena setoran akhir tahun baru dapat disetorkan pada awal tahun 2017 sebesar Rp6.477.000,00. Pendapatan retribusi terminal LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesarRp886.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi terminal LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.217.268.850,00 terjadi penurunan sebesar 99.93%. Hal ini dipengaruhi adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan terminal menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat yaitu Kementerian Perhubungan.

☑ Retribusi tempat parkir khusus LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2017 adalah sebesar Rp204.552.800,00.Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp204.552.800,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang retribusi tempat parkir khusus sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp204.552.800,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi tempat parkir khusus LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp384.010.500,00 terjadi penurunan sebesar 46.73%.

c. Retribusi perizian tertentu LO berupa retribusi izin trayek LO.

☑ Retribusi izin trayek LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan izin trayek yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp2.580.000,00 Pendapatan retribusi izin trayek LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.580.000,00 sedangkan sisanya masih menjadi piutang retribusi izin trayek sebesar Rp0,00. Pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.580.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi izin trayek LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp3.240.000,00 terjadi penurunan sebesar 25,58%.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

a. Retribusi jasa umum LO terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO.

☑ Retribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan karcis retribusi parkir/setoran untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp202.657.500,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp202.657.500,00. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp202.657.500,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp347.488.000,00 terjadi kenaikan sebesar 41,68%.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO.

☑ Retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp128.340.000,00. Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp128.340.000,00 Sedangkan sisanya masih menjadi piutang retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO sebesar Rp0,00 Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp128.340.000,00 dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan pendapatan retribusi tempatrekreasi dan olah raga LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp71.750.000,00 terjadi penurunan sebesar 78,87%.

c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

4. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Bagian Pemerintahan)

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar 0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar 0,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar 0,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.007.434.970,67.Untuk tahun 2017 Bagian Adminiatrsi Pemerintahan Umum sudah tidak mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah.

c. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)

a. BPKAD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp6,762,658,573,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp6,762,658,573,00. Yang menjadi Pendapatan diterima di muka tahun 2017 sebesar Rp1.957.131.680,00 Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp6,762,658,573,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.576.864.692,00 terjadi kenaikan sebesar 162,44%.

c. BPKAD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Kecamatan Kartoharjo

a. Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp1.265.788.437,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp1.265.788.437,00.Yang menjadi Pendapatan diterima di muka tahun 2017 sebesar Rp930.279.122,89. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.265.788.437,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.117.054.840,00 terjadi kenaikan sebesar 13,31%.

c. Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

7. Kecamatan Taman

a. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp481.455.277,50. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp481.455.277,50. Yang menjadi Pendapatan diterima di muka tahun 2017 sebesar Rp344.141.458,13. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp481.455.277,50 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp517.161.100,00 terjadi penrunan sebesar 6,90%.

c. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

8. Kecamatan Manguharjo

a. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp615.401.395,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp615.401.395,00. Yang menjadi Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar Rp453.488.546,25 Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp615.401.395,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp591.396.810,00 terjadi kenaikan sebesar 4,06%.

c. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

9. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

a. BKD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp237.700.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp237.700.000,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp237.700.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp253.650.000,00 terjadi penurunan sebesar 6,29%.

c. BKD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Dinas Pertanian tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum LO.

b. Retribusi jasa usaha LO berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah LO dan retribusi rumah potong hewan LO.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp14.532.400,00Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp14.532.400,00.Yang menjadi Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rp8.942.733,00. Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp14.532.400,00dibandingkan dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp14.534.000,00terjadi penurunan sebesar 0,01%.

☑ Retribusi rumah potong hewan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp38.242.000,00. Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp38.242.000,00 Pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp38.242.000,00 dibandingkan dengan pendapatan retribusi rumah potong hewan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp42.800.000,00 terjadi penurunan sebesar 10,60%.

c. Dinas Pertanian tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu LO.

8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	**27.183.076.020,81**	**20.096.685.245,24**	**36.35%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LOdan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 35,84 %.

Perincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PDAM	15.745.420.141,00	13.526.491.251,08	16,40%
2. BPR Bank Daerah	4.783.951.625,11	5.985.934.974,63	(20,08%)
3. Aneka Usaha	741.463.024,00	584.259.019,53	26,91%
4. Bank Jatim	5.912.241.230,70	0,00	0,00%
Total	**27.183.076.020,81**	**20.096.685.245,24**	**36,26%)**

1. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PDAM Tahun 2016 adalah sebesar Rp15.745.420.141,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp5.435.226.084,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp15.745.420.141,00 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp13.526.491.251,08terjadi kenaikan sebesar 16,40%.
2. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan BPR Bank Daerah Tahun 2016 adalah sebesar Rp4.783.951.625,11. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp2.034.451.737,11. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp4.783.951.625,11 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp5.985.934.974,63terjadi penurunan sebesar 20,08%.
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan PD Aneka Usaha LOTahun 2017 adalah sebesar Rp741.463.024,00.Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LO tahun 2017 tersebut yang belum disetor ke kas daerah sebesar 0,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp741.463.024,00dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dipisahkan dari PD Aneka Usaha LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp584.259.019,53 terjadi kenaikan sebesar 26,91%.

4. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank jatim yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan laba bersih yang tersaji pada Laporan Keuangan Bank Jatim LO Tahun 2017 adalah sebesar Rp5.912.241.230,70. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO tahun 2017 tersebut yang belum disetor ke kas daerah sebesar 0,00. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp5.912.241.230,70 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Bank Jatim LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Lain-lain PAD Yang Sah LO	128.124.150.175,17	85.529.178.970,93	49,80%

Jumlah pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp128.124.150.175,17 merupakan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipisahkan yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2017. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2017 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan LO, jasa giro LO, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO, hasil pengelolaan dana bergulir LO, pendapatan lain-lain LO, dan pendapatan BLUD LO. Pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp85.529.178.970,93 terjadi kenaikan sebesar 49,80%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Lain-lain PAD Yang Sah LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dinas Pendidikan	19.506.950.655,96	0,00	0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%
f. Pendapatan BOS	19.506.950.655,96	0,00	00,00%
2. Dinas Kesehatan	**8.899.013.827,26**	**6.442.070.771,07**	**38,14%**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%
f. Pendapatan BLUD	8.899.013.827,26	6.442.070.771,07	38,14%
3. RSUD	**76.672.628.556,21**	**66.371.907.785,09**	**15,52%**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%
f. Pendapatan BLUD	76.672.628.556,21	66.371.907.785,09	15,52%
4. BAPENDA	**210.346.218,00**	**112.994.461,00**	**86,16%**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%
e. Pendapatan lain-lain	210.346.218,00	112.994.461,00	86,16%
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00	00,00%
5. BPKAD (SKPKD)	**22.787.432.937,74**	**12.595.045.263,77**	**80,92%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	505.034.126,00	42.760.000,00	1081%
b. Jasa giro	4.899.121.759,45	9.865.639.654,18	(50,34%)
c. Pendapatan bunga deposito	9.367.745.843,24	0,00	0,00%
d. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	00,00%
e. Hasil pengelolaan dana bergulir	120.021.113,74	133.896.720,88	(10,36%)
f. Pendapatan lain-lain (di kurangi setoran TGR)155.654.672,33	6.314.690.940,41	1.472.505.366,00	328,84%
g. Pendapatan dari denda keterlambatanpengembalian	1.580.819.154,90	1.080.243.522,71	46,34%
6. Dinas Pertanian	**21.248.000,00**	**14.629.000,00**	**45,25%**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	00,00%
b. Jasa giro	0,00	0,00	00,00%
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	21.248.000,00	14.629.000,00	45,25%
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	00,00%
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00	00,00%
f. Pendapatan BLUD Puskesmas	0,00	0,00	00,00%
g. Pendapatan BLUD RSUD	0,00		
Total	**128.124.150.175,17**	**85.529.178.970,93**	**49,80%**

1. Dinas Pendidikan

a. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sehingga tidak mempunyai pendapatan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LO.

b. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan jasa giro sehingga tidak mempunyai pendapatan jasa giro LO.

c. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO.

d. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga tidak mempunyai pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO.

e. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan lain-lain sehingga tidak mempunyai pendapatan lain-lain LO.

f. Pendapatan BOS LO berupa pendapatan BOS SD dan SMP LO

☑ Pendapatan BOS LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan saldo awal BOS tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2017 dan dana BOS yang ditransfer kemasing-masing SD dan SMP selama tahun 2017 adalah sebesar Rp19.506.950.655,96. Pendapatan BLUD Puskesmas LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas BLUD sebesar Rp19.506.950.655,96 ,sedangkan sisanya masih menjadi piutang BOS LO sebesar Rp0,00. Pendapatan BOS LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp19.506.950.655,96dibandingkan dengan pendapatan BOS LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016Sebesar 0,00.

2. Dinas Kesehatan

a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sehingga tidak mempunyai pendapatan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LO.

b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan jasa giro sehingga tidak mempunyai pendapatan jasa giro LO

c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencanatidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO.

d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga tidak mempunyai pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO.

e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan lain-lain sehingga tidak mempunyai pendapatan lain-lain LO.

f. Pendapatan BLUD LO berupa pendapatan BLUD Puskesmas LO

☑ Pendapatan BLUD Puskesmas LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp8.899.013.827,26. Pendapatan BLUD Puskesmas LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas BLUD sebesar Rp8.899.013.827,26 sedangkan sisanya masih menjadi piutang BLUD Puskesmas sebesar Rp0,00. Pendapatan BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp8.899.013.827,26 dibandingkan dengan pendapatan BLUD Puskesmas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp6.442.070.771,07terjadi kenaikan 38,14%.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

a. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sehingga tidak mempunyai pendapatan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LO.

b. RSUD tidak mengelola pendapatan jasa giro sehingga tidak mempunyai pendapatan jasa giro LO

c. RSUD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga tidak mempunyai pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO.

e. RSUD tidak mengelola pendapatan lain-lain sehingga tidak mempunyai pendapatan lain-lain LO.

f. Pendapatan BLUD LO berupa pendapatan BLUD RSUD LO.

☑ Pendapatan BLUD RSUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa pelayanan kesehatan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp76.672.628.556,21. Pendapatan BLUD RSUD LO tahun 2017 tersebut yang telah disetor ke kas BLUD sebesar Rp76.672.628.556,21 sedangkan sisanya masih menjadi piutang BLUD RSUD sebesar Rp15.561.302.672,00. Pendapatan BLUD RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp76.672.628.556,21dibandingkan dengan pendapatan BLUD RSUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp66.371.907.785,99terjadi kenaikan sebesar 15,52%.

4. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

a. Dinas Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sehingga idak mempunyai pendapatan penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan LO.

b. Dinas Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan jasa giro sehingga tidak mempunyai pendapatan jasa giro LO

c. Dinas Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO.

d. Dinas Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga tidak mempunyai pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO.

e. Dinas Pendapatan Daerah mengelola pendapatan lain-lain sehingga tidak mempunyai pendapatan lain-lain LO.

Pendapatan lain-lain LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp210.346.218,00. Pendapatan lain-lain LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp210.346.218,00.dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp112.994.461,00 terjadi kenaikan sebesar 86,16%.

f. Pendapatan BLUD LO berupa pendapatan BLUD Puskesmas LO.

Dinas Pendapatan Daerah tidak mengelola pendapatan BLUD sehingga tidak mempunyai pendapatan BLUD LO.

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku SKPKD)

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan aset hasil penghapusan LO.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

☑ Pada tahun 2017 tidak terdapat pendapatan aset hasil penghapusan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan jasa pelayanan kesehatan untuk masa tahun 2017. Pendapatan aset hasil penghapusan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp505.034.126,00 dibandingkan dengan pendapatan penjualan aset tetap hasil penghapusan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp42.760.000,00 terjadi kenaikan sebesar 1081%.

b. Pendapatan jasa giro LO berupa pendapatan jasa giro RKUD dan jasa giro pemegang kas LO

☑ Pendapatan jasa giro LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp4.899.121.759,45. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp4.899.121.759,45 dibandingkan dengan pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp9.865.639.654,18 terjadi penurunan sebesar 50,34%.

☑ Pendapatan jasa deposito LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan jasa giro RKUD dan seluruh bendahara pengeluaran non BLUD untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp9.367.745.843,24. Pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp9.367.745.843,24 dibandingkan dengan pendapatan jasa giro LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar 0,00 terjadi kenaikan sebesar 0,00%.

c. BPKAD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO.

d. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir berupa pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) LO.

☑ Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan persentasi bagian hasil atas laba LKK menurut Laporan Keuangan LKK di seluruh kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp120.021.113,74. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp120.021.113,74 dibandingkan dengan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp133.896.720,88 terjadi penurunan sebesar 10,36%.

e. Pendapatan lain-lain LO berupa pendapatan lain-lain LO yang tidak dialokasikan target anggarannya.

☑ Pendapatan lain-lain LOyang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2017 adalah sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rp6.314.690.940,41. Pendapatan lain-lain LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp6.314.690.940,41. Dibandingkan dengan pendapatan lain-lain LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.472.505.366,00terjadi kenaikan sebesar 328,84%.

☑ Pendapatan dari pengembalian Pemerintah Kota Madiun untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp1.580.819.154,90. dibandingkan dengan Pendapatan dari pengembalian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.080.243.522,71 terjadi kenaikan sebesar 46,34%.

f. BPKAD tidak mengelola pendapatan BLUD sehingga tidak mempunyai pendapatan pendapatan BLUD LO.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan LO.

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan jasa giro sehingga tidak mempunyai pendapatan jasa giro LO

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sehingga tidak mempunyai pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan LO

☑ Pendapatan penjualan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan jasa pelayanan kesehatan untuk masa tahun 2017 adalah sebesar Rp21.248.000,00. Pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp21.248.000,00 dibandingkan dengan pendapatan penjualan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp14.629.000,00 terjadi kenaikan sebesar 45,25%.

d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sehingga tidak mempunyai pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO.

e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan lain-lain sehingga tidak mempunyai pendapatan lain-lain LO.

f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan BLUD sehingga tidak mempunyai pendapatan pendapatan BLUD LO.

8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Transfer LO	726.839.358.425,00	828.331.190.822,00	(12,25%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan transfer LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah untuk tahun berjalan. Pendapatan transfer LO terdiri transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO, transfer pemerintah pusat – lainnya LO, dan transfer pemerintah provinsi LO. Pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp828.331.190.822,00 terjadi penurunan sebesar 12,25%.

Perincian pendapatan transfer LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Transfer LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Transfer Pemerinta Pusat – Dana Perimbangan LO	638.973.881.834,00	717.561.434.206,00	(10,95%)
2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(81,88%)
3. Transfer Pemerintah Provinsi LO	80.365.476.591,00	69.387.134.616,00	15,82%)
Total	**726.839.358.425,00**	**828.331.190.822,00**	**(12,25%)**

8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	**638.973.881.834,00**	**717.561.434.206,00**	**(10,95%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO terdiri bagi hasil pajak LO, bagihasil bukan pajak/SDA LO, DAU LO, DAK LO dan bagi hasil cukai LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 10,95%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Bagi hasil pajak LO	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00	(19,75%)
2. Bagi hasil SDA LO	18.680.122.868,00	18.880.139.043,00	0%
3. DAU LO	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00	(1,76%)
4. DAK LO	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00	(45,14%)
5. Bagi hasil cukai LO	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00	7,25%
Total	638.973.881.834,00	717.561.434.206,00	(10,95%)

8.1.2.1.1.Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Bagi Hasil Pajak LO	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00	(19,75)%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri bagi hasil PBB LO, bagi hasil PPh Pasal 21, 25 dan 29 LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp27.325.331.947,00 dibandingkan pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp34.049.572.850,00 terjadi penurunan sebesar 19,75%.

Perincian pendapatan bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PBB LO	3.349.095.520,00	8.174.408.541,00	(59,03%)
2. PPh Pasal 21,25,29 LO	23.976.236.427,00	25.875.164.309,00	(7,34%)
Total	27.325.331.947,00	34.049.572.850,00	(19.75%)

1. Pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak-PBB LO dari pemerintah pusat sebesar Rp8.174.408.541,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp3.349.095.520,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pajak-PBB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp8.174.408.541,00 terjadi penurunan sebesar 59,03%.

2. Pendapatan dana bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO dari pemerintah pusat sebesar Rp23.976.236.427,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp25.875.164.309,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak - PPh Pasal 21, 25, 29 LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp25.875.164.309,00 terjadi penurunan sebesar 7,34%.

8.1.2.1.2.Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO	**18.680.122.868,00**	**18.880.139.043,00**	**(1,06%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDALO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDA LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDA LO terdiri bagi hasil sumber daya hutan LO, dana bagi hasil pungutan hasil perikanan LO, dan bagi hasil pertambangan umum migas LO. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017sebesar Rp18.680.122.868,00 dibandingkan 31 Desember 2016 sebesar Rp18.880.139.043,00 terjadi penurunan sebesar 1,06%.

Perincian pendapatan dana bagi hasil bukan pajak/SDA LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Sumber daya hutan	143.143.376,00	131.785.267,00	8,62%
2. Pungutan hasil Perikanan	447.937.200,00	452.025.539,00	(0,90%)
3. Pertambangan umum migas	18.012.118.856,00	18.236.167.816,00	(1,23%)
4.Pertambangan Umum Royalti	58.865.576,00	1.969.500,00	2.888,86%
5.SDA Panas Bumi	18.057.860,00	58.190.921,00	(68,97%)
Total	**18.680.122.868,00**	**18.880.139.043,00**	**(1,06%)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp143.143.376,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp143.143.376,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-sumber daya hutan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp131.785.267,00 terjadi kenaikan sebesar 8,62%.
2. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO dari pemerintah pusat sebesar Rp447.937.200,00untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp447.937.200,00dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pungutan hasil perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp452.025.539,00 terjadi penurunan sebesar 0,90%.
3. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO dari pemerintah pusat sebesar Rp18.012.118.856,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp18.012.118.856,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak-pertambangan umum migas LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp18.236.167.816,00 terjadi penurunan sebesar 1,23%.
4. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil Pertambangan umum royalti LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil Pertambangan umum royalti dari pemerintah pusat sebesar Rp58.865.576,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil Pertambangan umum royalti untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp58.865.576,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil Pertambangan umum royalti untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.969.500,00 terjadi kenaikan sebesar 2.888,86%.
5. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi LO dari pemerintah pusat sebesar Rp18.057.860,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp18.057.860,00 dibandingkan dengan pendapatan dana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

bagi hasil bukan pajak- Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp58.190.921,00 terjadi penurunan sebesar 68,97%.

8.1.2.1.3.Dana Alokasi Umum (DAU) LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Alokasi Umum LO	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00	(1,76%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAU LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember2016. Pendapatan DAU LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAU LOuntuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017sebesar Rp502.392.070.000,00 apabila dibandingkan pendapatan DAU LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp511.375.289.000,00 terjadi penurunan sebesar 1,76%.

8.1.2.1.4.Dana Alokasi Khusus (DAK) LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA LO	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00	(45,14%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan DAK LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan DAK LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan DAK LO terdiri DAK bidang pendidikan LO, DAK bidang kesehatan LO, DAK bidang jalan LO, DAK bidang air minum LO, DAK bidang sanitasi LO, DAK bidang lingkungan hidup LO, DAK bidang keluarga berencna, DAK bidang transportasi darat LO, DAK bidang kelautan dan perikanan, DAK bidang pertanian LO, dan DAK bidang perdagangan LO. Pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp77.267.422.860,00 dibandingkan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp140.847.099.356,00 terjadi penurunan sebesar 45,14%.

Perincian pendapatan DAK LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dana Alokasi Khusus (DAK) LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Reguler :			
Pendidikan	6.678.116.750,00	789.366.000,00	746.01%
Jalan	15.055.093.000,00	0,00	0,00%
Kesehatan	0,00	1.193.673.000,00	0,00%
Air minum	0,00	274.857.000,00	0,00%
Sanitasi	1.141.702.000,00	224.883.000,00	407,69%
Lingkungan hidup	118.740.000,00	1.058.055,000,00	(88,78%)
Keluarga berencana	2.596.779.000,00	165.909.000,00	(1465,18%)
Transportasi darat	14.920.000,00	130.974.000,00	(88.61%)
Kelautan & perikanan	0,00	705.120.000,00	0,00%
Perdagangan	0,00	0,00	0,00%
Pertanian	0,00	2.159.016.000,00	0,00%
Rujukan	1.388.889.000,00	1.276.371.000,00	8,82%
Farmasi	0,00	976.566.000,00	0,00%
Kedaulatan pangan	282.700.000,00	0,00	0,00%
Non Reguler :			
Insfrastruktur	0,00	68.134.908.356,00	0,00%
Fisik Tambahan	0,00	0,00	0,00%
Non Fisik :			
BO P PAUD	5.107.800.000,00	2.148.000.000,00	137.79%
TPG	40.498.327.650,00	59.469.241.000,00	(31,90%)
Tunj.peng.guru	587.400.000,00	0,00	0,00%
TPG Non Profesi	0,00	546.800.000,00	0,00%
BOP Kesehatan	2.816.718.460,00	1.310.250.000,00	114.98%
JamPerSal	0,00	0,00	0,00%
BOP KB	277.170.000,00	283.110.000,00	(2,10%)
Kependudukan	703.067.000,00	0,00	0,00%
Total	**77.267.422.860,00**	**140.847.099.356,00**	**45,14%**

1. Pendapatan DAK bidang pendidikan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang pendidikan LOsebesar Rp6.678.116.750,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang pendidikan LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp6.678.116.750,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang pendidikan LOuntuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp789.366.000,00 terjadi kenaikan sebesar 746,01%.

2. Pendapatan DAK bidang Kesehatan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang Kesehatan LO sebesar Rp0,00untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang Kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00di bandingkan dengan pendapatan DAK bidang Kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.193.673.000,00.
3. Pendapatan DAK bidang infrastruktur /jalan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang jalan LO sebesar Rp15.055.093.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang infrastruktur /jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp15.055.093.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang jalan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.
4. Pendapatan DAK bidang air minum LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang air minum LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang air minum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang air minum LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp274.857.000,00.
5. Pendapatan DAK bidang sanitasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang sanitasi LO sebesar Rp1.141.702.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang sanitasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.141.702.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang sanitasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp224.883.000,00,00 terjadi kenaikan sebesar 407,69%.
6. Pendapatan DAK bidang lingkungan hidup LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang lingkungan hidup LOsebesar Rp118.740.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang lingkungan hidup LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp118.740.000,00dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang lingkungan hidup LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.001.520.000,00 terjadi penurunan sebesar 88,78%.
7. Pendapatan DAK bidang keluarga berencana LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang keluarga berencana LO sebesar Rp2.596.779.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang keluarga berencana LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.596.779.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

keluarga berencana LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp165.909.000,00 terjadi kenaikan sebesar 1.465,18%.

8. Pendapatan DAK bidang keselamatan transportasi darat LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang keselamatan transportasi darat LO sebesar Rp14.920.000,00untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang keselamatan transportasi darat LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp14.920.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang keselamatan transportasi darat LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp130.974.000,00 terjadi penurunan sebesar 88,61%.
9. Pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang kelautan dan perikanan LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.349.216.000,00.
10. Pendapatan DAK non reboisasi bidang pertanian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK non reboisasi bidang pertanian LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK non reboisasi bidang pertanian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan non reboisasi DAK bidang pertanian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.159.016.000,00.
11. Pendapatan DAK bidang rujukan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang rujukan LO sebesar Rp1.388.889.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang rujukan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp1.388.889.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang rujukan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.276.371.000,00 terjadi kenaikan sebesar 8,82%.
12. Pendapatan DAK bidang Farmasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang Farmasi LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp976.566.000,00.
13. Pendapatan DAK bidang kedaulatan pangan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang kedaulatan pangan LO sebesar Rp282.700.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang kedaulatan panganLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp282.700.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang kedaulatan panganLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. Pendapatan DAK bidang infrastruktur LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang infrastruktur LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang infrastruktur LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang infrastruktur LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp68.134.908.356,00.
15. Pendapatan DAK bidang Fisik Tambahan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK Fisik Tambahan LO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang Fisik Tambahan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang Fisik TambahanLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.
16. Pendapatan DAK bidang BO P PAUD LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang BO P PAUD LO sebesar Rp5.107.800.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang BO P PAUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp5.107.800.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang BO P PAUD LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.148.000.000,00 terjadi kenaikan sebesar 137,79%.
17. Pendapatan DAK bidang TPG LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang TPG LO sebesar Rp40.498.327.650,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang TPG LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar RpRp40.498.327.650,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang TPG LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp59.469.241.000,00 terjadi penurunan sebesar 31,90%.
18. Pendapatan DAK bidang tunjangan penghasilan guru LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang tunjangan penghasilan guru LO sebesar Rp587.400.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang tunjangan penghasilan guruLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp587.400.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang tunjangan penghasilan guruLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.
19. Pendapatan DAK bidang TPG non Profesi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang TPG non ProfesiLO sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang TPG non ProfesiLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang TPG non ProfesiLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp546.800.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

20. Pendapatan DAK bidang BOP Kesehatan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang BOP KesehatanLO sebesar Rp2.816.718.460,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang BOP KesehatanLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.816.718.460,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang BOP Kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp1.310.250.000,00 terjadi kenaikan sebesar 114,98%.
21. Pendapatan DAK bidang BOP KB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran DAK bidang BOP KB LO sebesar Rp277.170.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang BOP KBLO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp277.170.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang BOP KB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp283.110.000,00 terjadi penurunan sebesar 2,10%.
22. Pendapatan DAK bidang kependudukan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan setoran DAK bidang kependudukan LO sebesar Rp703.067.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan DAK bidang kependudukan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp703.067.000,00 dibandingkan dengan pendapatan DAK bidang kelautan dan perikanan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00

8.1.2.1.5.Bagi Hasil Cukai LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bagi Hasil Cukai LO	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00	7,25%

Jumlah pendapatan bagi hasil cukai LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan bagi hasil cukai LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan bagi hasil cukai LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp12.409.333.957,00 terjadi kenaikan sebesar 7,25%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.2.2.Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(81,88%)

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO terdiri dana otonomi khusus LO dan dana penyesuaian LO. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp41.382.622.000,00 terjadi penurunan sebesar 81,88%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. DAK otonomi khusus LO	0,00	0,00	0,00%
2. Dana penyesuaian LO	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(81,88)%
Total	**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**	**(81,88)%**

8.1.2.2.1.Dana Otonomi Khusus LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Otonomi Khusus LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pemerintah Kota Madiun tidak mempunyai pendapatan dana otonomi khusus LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.2.2.2 Dana Penyesuaian

8.1.2.2.2.Dana Penyesuaian LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Penyesuaian LO	**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**	**(81,88%)**

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat-dana penyesuaian LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana penyesuaian LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana penyesuaian LOterdiri dana insentif daerah (DID) LO dan dana tambahan penghasilan bagi guru dan tunjangan profesi guru LO. Pendapatan dana penyesuaian LOuntuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 81,88%.

Perincian pendapatan dana penyesuaian LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dana insentif daerah (DID) LO	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00	(81,88%)
2. Tambahan penghasilan bagi guru dan tunjangan profesi guru LO	0,00	0,00	0,00%
Total	**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**	**(81,88%)**

1. Pendapatan dana insentif daerah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana insentif daerah LOsebesar Rp7.500.000.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana insentif daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp7.500.000.000,00dibandingkan dengan pendapatan dana insentif daerah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp41.382.622.000,00 terjadi penurunan sebesar 81,88%.

Pendapatan tambahan penghasilan bagi guru dan tunjangan profesi guru LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Presiden No 137 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017 lampiran XVIII DAK Non Fisik, bahwa pada tahun anggaran 2017 alokasi tunjangan profesi guru yang semula di dana penyesuaian dialokasikan ke dana alokasi khusus non fisik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.2.3.Transfer Pemerintah Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Transfer Pemerintah Provinsi LO	**80.365.476.591,00**	**69.387.134.616,00**	**15,82%**

Jumlah pendapatan transfer pemerintah provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yangmenambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO terdiri dana bagi hasil pajak LO dan dana bagi hasil lainnya LO. Pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 15,82%.

Perincian pendapatan transfer pemerintah provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Provinsi LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Dana bagi hasil pajak LO	79.648.626.591,00	67.716.504.616,00	17,62%)
2. Dana bagi hasil lainnya LO	716.850.000,00	1.670.630.000,00	(57,09%)
Total	**80.365.476.591,00**	**69.387.134.616,00**	**15,82%**

8.1.2.3.1.Dana Bagi Hasil Pajak LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Bagi Pajak LO	**79.648.626.591,00**	**67.716.504.616,00**	**17.62%**

Jumlah pendapatan dana bagi hasil pajak LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO terdiri pajak kendaraan bermotor(PKB) LO, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) LO, pajak pemanfaatan air permukaan LO, dan pajak rokok LO. Pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 17,62%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian pendapatan dana bagi hasil pajak LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. PKB LO	22.431.402.785,00	21.893.810.000,00	2,46%
2. BBNKB LO	11.577.516.645,00	12.488.731.185,00	(7,30%)
3. Pajak bahan bakar kendaran bermotor LO	15.629.605.878,00	13.956.105.144,00	11,99%
4. Pajak air permukaan LO	215.413.062,00	207.490.272,00	3,82%
5. Pajak Rokok LO	29.794.688.221,00	15.885.577.903,00	88,67%
Total	**79.648.626.591,00**	**67.716.504.616,00**	**17,62%**

1. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil PKB LO sebesar Rp22.431.402.785,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp22.431.402.785,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil PKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp21.893.810.000,00 terjadi kenaikan sebesar 2,46%.
2. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil BBNKB LO sebesar Rp11.577.516.645,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp11.577.516.645,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil BBNKB LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp12.488.731.185,00 terjadi penurunan sebesar 7,30%.
3. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO sebesar Rp15.629.605.878,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017sebesar Rp15.629.605.878,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp13.956.105.144,00 terjadi kenaikan sebesar 11,99%.
4. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

setoran dana bagi hasil pajak air permukaan LO sebesar Rp215.413.062,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp215.413.062,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak air permukaan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp207.490.272,00 terjadi kenaikan sebesar 3,82%.

5. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan setoran dana bagi hasil pajak rokok LO sebesar Rp29.794.688.221,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp29.794.688.221,00 dibandingkan dengan pendapatan dana bagi hasil pajak rokok LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp15.885.577.903,00 terjadi kenaikan sebesar 86,67%.

8.1.2.3.2.Dana Bagi Hasil Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dana Bagi Lainnya LO	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**	**(57,09%)**

Jumlah pendapatan dana bagi hasil lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana bagi hasil lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan dana bagi hasil lainnya LO berupa bantuan keuangan dari provinsi LO. Pendapatan dana bagi hasil lainnya LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 57,09%.

Perincian pendapatan dana bagi hasil lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Lainnya LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Bantuan keuangan dari provinsi LO	716.850.000,00	1.670.630.000,00	(57,09%)
2. Bagi hasil lainnya LO	00,00	00,00	0,00%
Total	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**	**(57,09%)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.2.3.2.1.Bantuan Keuangan dari Provinsi LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**	**57,09%**

Jumlah pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun yang sudah diterima oleh kas daerah. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO berupa bantuan keuangan penyelenggaaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasto LO, bantuan keuangan pelaksanan hari aksara LO, bantuan keuangan community college LO, bantuan keuangan peningkatan mutu pendidikan SMK LO, bantuan keauangan seleksi pendidik dan kependidikan berprestasi LO, bantuan keuangan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) SLTA LO, bantuan keuangan BOP Madiun LO, bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO, bantuan keuangan peningkatan puskesmas rawat inap menjadi rawat inap standar LO, bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO. Pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 57,09%.

Perincian pendapatan bantuan keuangan dari provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bantuan Keuangan dari Provinsi LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Penyelenggaraan pendidikan madraah diniyah dan guru swasta LO	476.850.000,00	473.250.000,00	0,76%
Pelaksanaan hari aksara LO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
Operasional pendidikan BOP (LIFE SKILL) LO	0,00	15.000.000,00	0,00%
Seleksi pendidik dan kependidikan berprestasi LO	0,00	20.000.000,00	0,00%
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM SLTA) LO	0,00	562.380.000,00	0,0%
BOP Madin LO	75.000.000,00	100.000.000,00	(25,00%)
Peringkatan Hari Jadi Provinsi LO	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00%
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar. LO	0,00	30.000.000,00	0,00%
Lomba Kompetensi Siswa dan Lomba Jawara SMK Tingkat Kota LO	0,00	300.000.000,00	0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengembangan Taman Posyandu LO	55.000.000,00	60.000.000,00	(8,33%)
Seleksi Kepala sekolah berwawasan Lingkungan LO	0,00	20.000.000,00	0,00%
Anugrah Konstitusi bagi guru PKn LO	0,00	15.000.000,00	0,00%
Keg.Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD & Diknas Berprestasi LO	20.000.000,00	15.000.000,00	33.33%
Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat Inap	25.000.000,00	0,00	0,00%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.000.0000,00	0,00	0,00%
Total:	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**	**57,09%**

1. Pendapatan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp476.850.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp473.250.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 lebih tinggi sebesar 0,76%.
2. Pendapatan bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp10.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp10.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan pelaksanaan hari aksara LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sama.
3. Pendapatan bantuan keuangan Pendidikan BOP (LIFE SKILL)yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp15.000.000,00untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan Pendidikan BOP (LIFE SKILL) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00
4. Pendapatan bantuan keuangan Seleksi pendidik dan kependidikanberprestasi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp20.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan Seleksi pendidik dan kependidikanberprestasi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Pendapatan bantuan keuangan bantuan khusus siswa miskin (BKSM SLTA) LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp562.380.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan bantuan khusus siswa miskin (BKSM SLTA) LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
6. Pendapatan bantuan keuangan BOP madin LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp75.000.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan bantuan keuangan BOP madin LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp100.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan BOP madin LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp25.000.000,00 terjadi penurunan sebesar25,00%.
7. Pendapatan bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00 untuk masa tahun 2017. Pendapatan bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp50.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan peningkatan hari jadi provinsi LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016adalah sama.
8. Pendapatan bantuan keuangan peningkatan puskesmas rawat iniap menjadi puskesmas rawat inap standar LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp30.000.000,00untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan peningkatan puskesmas rawat inap menjadi puskesmas rawat inap standar LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
9. Pendapatan bantuan keuangan lomba Kompetensi Siswa dan Lomba Jawara SMK Tingkat Kota LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp300.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan lomba Kompetensi Siswa dan Lomba Jawara SMK Tingkat Kota LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
10. Pendapatan bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp60.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp55.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan pengembangan taman posyandu LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016terjadi penurunan sebesar 8,22%.

11. Pendapatan bantuan seleksi kepala sekolah berwawasan lingkungan LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp20.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan seleksi kepala sekolah berwawasan lingkungan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
12. Pendapatan bantuan Anugerah Konstitusi bagi guru PKn LOyang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp15.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan Bantuan Anugerah Konstitusi bagi guru PKn LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00.
13. Pendapatan bantuan seleksi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Diknas berpretasi LOyang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiunberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp15.000.000,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan seleksi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Diknas berpretasi LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp20.000.000,00 dibandingkan dengan pendapatan bantuan keuangan seleksi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Diknas berpretasi LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2016lebih besar 33,33%.
14. Pendapatan bantuan Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap LOyang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2016. Pendapatan bantuan Setoran Bantuan Provinsi Honor 1 Dokter Puskesmas Rawat Inap LOuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp25.000.000,00 .
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan LOyang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 untuk masa tahun 2016. Peningkatan Pelayanan Kesehatan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp 5.000.000,00 .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22)%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun pada tahun 2017 tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO terdiri pendapatan hibah LO, pendapatan darurat LO, pendapatan lainnya LO. Pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar 96,22%.

Perincian pendapatan lain-lain pendapatan yang sah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pendapatan hibah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22%)
2. Pendapatan darurat LO	0,00	0,00	0,00%
3. Pendapatan lainnya LO	0,00	0,00	0,00%
Total	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22%)

8.1.3.1.Pendapatan Dana Hibah LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Dana Hibah LO	1.445.406.976,42	38.203.138.521,00	(96,22%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana hibah LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016Pendapatan dana hibah LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pendapatan dana hibah terdiri pendapatan hibah tugas pembantuan dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah dekonsentrasi dari provinsi, pendapatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

hibah dari bantuan operasional sekolah (BOS) SMA LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah SMK LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SMPN LO, pendapatan hibah bantuan operasional sekolah (BOS) SDN LO, pendapatan hibah blockgrant LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah pusat LO, pendapatan hibah barang dari pemerintah provinsi Lo, pendapatan hibah barang dari komite LO, pendapatan hibah lainnya LO. Pendapatan dana hibahLO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp17.921.569.178,00 terjadi kenaikan sebesar 96,22%.

Perincian pendapatan dana hibah LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Dana Hibah LO	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Hibah dana tugas pembantuan LO	0,00	0,00	0,00%
2. Hibah dana dekonsentrasi LO	0,00	0,00	0,00%
3. Hibah dana BOS P dan K	0,00	35.150.729.544,00	0,00%
6. Hibah dana blockgrant LO	0,00	0,00	0,00%
7. Hibah barang dari komite LO	0,00	0,00	0,00%
4. Hibah barang Dinkes dr pusat LO	245.316.006,00	0,00	0,00%
5. Hibah barang RSUD dr BANK JATIM LO	175.400.000,00	2.893.479.000,00	(93,94%)
6. Hibah barang Bagian Organisasi dari pusat LO	0,00	148.412.752,00	0,00%
7. Hibah barang KPPT dari pusat LO	0,00	0,00	0,00%
8. Hibah barang BPM dari pusat LO	0,00	10.517.225,00	0,00%
9. Hibah barang Dinas Pasar dari pusat LO	0,00	0,00	0,00%
10. Hibah barang BPBD dari pusat LO	349.245.592,00	0,00	0,00%
11. Hibah lainnya LO	0,00	0,00	0,00%
23. Hibah uang dari kementerian Pendidikan	125.000.000,00	0,00	0,00%
24. Hibah barang dari kementerian Pendidikan	550.445.378,42	0,00	0,00%
Total	**1.445.406.976,42**	**38.203.138.521,00**	**96,22%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.1.3.2.Pendapatan Darurat LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Darurat LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan dana daruratLO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan dana darurat LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pemerintah Kota Madiun tidak mempunyai pendapatan darurat LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016.

8.1.3.3.Pendapatan Lainnya LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Pendapatan Lainnya LO	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pendapatan lainnya LO yang seharusnya diakui menjadi hak Pemerintah Kota Madiun yang menambah ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Pendapatan lainnya LO mengakui penerimaan yang merupakan hak pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah kas sudah diterima atau belum oleh kas daerah pada tahun berjalan. Pemerintah Kota Madiun tidak mempunyai pendapatan lainnya LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2. BEBAN OPERASI

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Operasi	**814.916.294.444,63**	**908.348.844.872,51**	**(10,29%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi beban yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Beban operasi merupakan beban yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum, pemakaian/konsumsi aset, penurunan nilai aset sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyisihan kerugian investasi non permanen, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tidak berwujud dan beban lain lain.Beban operasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 terjadi penurunansebesar (10,29%).

Perincian beban operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Operasi	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban pegawai	391.643.256.502,00	513.543.197.481,00	(23,74%)
2. Beban persediaan	70.507.162.300,55	85.603.768.786,53	(17,37%)
3. Beban jasa	153.929.093.775,92	129.560.302.450,48	14,61%
4. Beban pemeliharaan	17.751.317.356,00	17.178.680.528,50	3,33%
5. Beban perjalanan dinas	43.662.419.274,00	43.521.015.103,00	0,32%
6. Beban bunga	0,00	0,00	0,00%
7. Beban subsidi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban hibah	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00	70,02%
9. Beban bantuan sosial	14.984.656.810,00	8.957.848.417,00	67,28%
10. Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%
11. Beban Penyisian Piutang	1.077.700.660,19	790.958.645,78	36,25%
12. Beban Penyisian Kerugian Investasi Non Permanen	0,00	172.622.427,05	00,00%
13. Beban Penyusutan	101.506.978.370,00	91.165.184.133,00	11,34%
14. Beban Amortisasi	2.037.673.624,99	2.076.171.277,33	(1,85%)
15. Beban Lain-Lain	5.891.346.381,67	8.765.424.021,97	(32,79)%
Jumlah	**814.916.294.444,63**	**908.348.844.872,51**	**(10,29%)**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.1. Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai	**391.643.256.502,00**	**513.543.197.481,00**	**(23,74%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Beban pegawai mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai belanja tidak langsung yang didanai dari APBD tahun anggaran 2017, beban pegawai belanja langsung yang didanai APBD tahun anggaran 2017, beban pegawai yang didanai BLUD, beban pegawai yang didanai dari BOS, beban pegawai yang didanai dari blockgrant, beban pegawai yang didanai dari komite sekolah, beban pegawai yang didanai dari dana tugas pembantuan, beban pegawai yang didanai dari dekonsentrasi, beban pegawai lainnya. Beban pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar (23,74%).

Perincian beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pegawai	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Tdk Langsung	334.822.576.837,00	450.027.007.626,00	(25,60%)
2. Langsung	44.616.035.114,00	53.281.631.170,00	(14,39%)
3. BLUD	9.794.401.651,00	7.712.975.470,00	26,91%
4. BOS	2.410.242.900,00	2.521.583.215,00	(4,42%)
Jumlah	**391.643.256.502,00**	**513.543.197.481,00**	**(23,74%)**

8.2.1.1. Beban Pegawai Tidak Langsung

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai Tidak Langsung	**334.822.576.837,00**	**450.027.007.626,00**	**(25,60%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo pegawai tidak langsung yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2017untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban pegawai tidak langsung mengakui beban yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai terdiri dari beban gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah. Beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar (25,60%).

Perincian beban pegawai tidak langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pegawai Tidak Langsung Per SKPD	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	183.052.709.656,00	301.676.925.425,00	(39,32%)
Dinas Kesehatan KB	21.643.715.511,00	19.901.068.361,00	8,76%
Dinas Kesehatan KB BLUD	(0,00)		
RSUD	12.453.047.187,00	11.991.540.673,00	3,85%
RSUD BLUD	(6.000.000,00)		
Dinas PU TR	5.244.653.507,00	5.717.192.487,00	(8,27%)
Dinas Perkim	2.943.000.458,00	0,00	0,00%
Dinas Satpol PP	3.979.737.599,00	2.212.295.867,00	79,89%
BPBD	759.445.306,00	1.772.927.935,00	(57,16%)
Dinas Sosial	2.860.726.468,00	0,00	0,00%
Dinas Tenaga Kerja	2.075.380.088,00	0,00	0,00%
Dinas LH	9.167.024.551,00	0,00	0,00%
Dispendukcapil	2.323..462.657,00	2.375.311.302,00	(2,18%)
Dinas Perhubungan	5.153.143.468,00	7.054.629.598,00	(26,95%)
Dinas Infokom	2.347.628.557,00	0,00	0,00%
Dinas PM, PTSP/KPPT	2.532.940.518,00	1.513.607.856,00	67,34%
Dinas Budparpora	2.109.161.953,00	0,00	0,00%
Dinas Perpustakaan	1.587.581.306,00	1.372.023.548,00	(15,71%)
Walikota/Wakil	561.900.334,00	726.229.228,00	(22,63%)
DPRD	8.223.883.860,00	6.796.418.337,00	21,00%
Bagian Pemerintahan	163.150.000,00	251.550.000,00	(35,14%)
Bagian Organisasi	166.150.000,00	212.150.000,00	(21,68%)
Bagian Umum	7.922.482.684,00	8.922.256.130,00	(11,21%)
Bagian Hukum	144.150.000,00	150.150.000,00	4,00%
Bagian Perekkesra	223.550.000,00	220.750.000,00	1,27%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Adbang	188.450.000,00	191.150.000,00	1,41%
Sekretariat DPRD	2.041.883.632,00	1.880.229.666,00	8,60%
BKD	2.768.341.114,00	2.819.494.312,00	(1,81%)
BPKAD	8.789.475.325,00	11.356.629.097,00	(22,60%)
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00	00,00%
Bependa	6.070.240.681,00	6.713.978.272,00	(9,59%)
Inspektorat	2.245.117.735,00	2.622.719.446,00	(14,40%)
BAPPEDA	2.750.479.122,00	2.887.193.237,00	(4,74%)
Kec Kartoharjo	6.510.841.570,00	7.440.027.895,00	(12,49%)
Kec Manguharjo	6.596.340.987,00	7.412.908.284,00	(11,02%)
Kec Taman	6.819.050.802,00	7.387.733.415,00	(7,70%)
Bakesbangpol	2.317.733.735,00	2.387.817.890,00	(2,96%)
Dinas Pertanian KP	3.038.857.203,00	3.100.479.955,00	(1,99%)
Dinas Perdagangan	7.053.139.263,00	0,00	00,00%
DKP	0,00	9.674.502.415,00	00,00%
KLH	0,00	1.328.247.204,00	00,00%
Dinas Nakersos	0,00	2.590.573.956,00	00,00%
Bagian Humas Protokol	0,00	205.517.500,00	00,00%
BPKM, KB & Ketan	0,00	4.864.224.040,00	00,00%
Dinas Perindagkoppar	0,00	2.992.972.486,00	00,00%
Dinas Pasar	0,00	7.007.557.279,00	00,00%
Total	**334.822.576.837,00**	**450.027.007.626,00**	**(25,60%)**

8.2.1.2. Beban Pegawai Langsung

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai Langsung	**44.616.035.114,00**	**55.803.214.385,00**	**(20,05%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai langsung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2017untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban pegawai langsung mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai langsung terdiri dari beban honorarium PNS, beban honorarium non PNS, beban uang lembur. Beban pegawai langsung untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi Penurunan sebesar (20,05%).

Perincian beban pegawai langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pegawai Langsung Per SKPD	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Dinas Pendidikan	7.626.713.650,00	10.733.328.615,00	28,94%
Dana BOS	(2.410.242.900,00)	(2.521.583.215,00)	4,42%
Dinas Kesehatan KB	7.834.742.851,00	5.953.871.470,00	53,34%
Dana BLUD	(5.050.452.851,00)	(3.626.832.470,00)	10,95%
RSUD	5.668.098.800,00	4.839.343.000,00	80,78%
Dana BLUD	(4.737.948.800,00)	(4.086.143.000,00)	15,95%
Dinas PU TR	1.894.387.050,00	1.462.980.500,00	29,49%
Dinas Perkim	820.249.250,00	0,00	00,00%
Dinas Satpol PP	2.156.765.000,00	1.726.955.000,00	24,89%
BPBD	287.333.000,00	284.779.900,00	0,90%
Dinas Sosial	1.491.997.000,00	0,00	00,00%
Dinas Tenaga Kerja	951.812.500,00	0,00	00,00%
Dinas LH	829.306.000,00	0,00	00,00%
Dispendukcapil	1.346.502.000,00	1.124.770.600,00	19,71%
Dinas Perhubungan	1.365.045.300,00	1.490.173.000,00	(8,40%)
Dinas Infokom	1.450.651.050,00	381.934.000,00	279,82%
Dinas PM, PTSP/KPPT	699.005.800,00	0	00,00%
Dinas Budparpora	1.485.730.000,00	1.228.049.000,00	20,98%
Dinas Perpustakaan	395.326.000,00	380.830.000,00	3,81%
Walikota/Wakil	0,00	0,00	00,00%
DPRD	0,00	0,00	00,00%
Bagian Pemerintahan	958.497.000,00	608.002.000,00	57,65%
Bagian Organisasi	736.870.000,00	783.860.500,00	(5,99%)
Bagian Umum	1.451.786.000,00	1.274.145.400,00	13,94%
Bagian Hukum	1.914.837.000,00	1.228.049.000,00	55,93%
Bagian Perekkesra	386.448.000,00	660.624.000,00	(41,50%)
Bagian Adbang	797.977.300,00	707.225.000,00	12,83%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sekretariat DPRD	625.980.000,00	381.312.900,00	64,16%
BKD	883.573.000,00	663.147.000,00	33,23%
BPKAD	3.459.088.000,00	3.657.934.000,00	(5,44%)
BPKAD (SKPKD)	0,00		00,00%
Bependa	847.633.000,00	922.459.000,00	(8,11%)
Inspektorat	1.456.754.700,00	1.681.134.000,00	(13,35%)
BAPPEDA	2.029.076.000,00	3.305.638.000,00	(38,62%)
Kec Kartoharjo	792.072.000,00	730.463.400,00	8,43%
Kec Manguharjo	605.704.000,00	663.147.000,00	(8,66%)
Kec Taman	777.582.000,00	797.913.000,00	(2,55%)
Bakesbangpol	898.209.514,00	887.977.250,00	101,15%
Dinas Pertanian KP	827.770.000,00	498.155.000,00	66,17%
Dinas Perdagangan	1.061.156.900,00	0,00	00,00%
DKP	0,00	606.826.000,00	00,00%
KLH	0,00	395.088.000,00	00,00%
Dinas Nakersos	0,00	1.524.383.500,00	00,00%
Bagian Humas Protokol	0,00	889.206.800,00	00,00%
BPKM, KB & Ketan	0,00	2.043.184.050	00,00%
Dinas Perindagkoppar	0,00	1.096.214.500,00	00,00%
Dinas Pasar	0,00	945.920.000,00	00,00%
Total	**44.616.035.114,00**	**55.803.214.385,00**	**(20,05%)**

8.2.1.3. Beban Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BLUD	**9.794.401.651,00**	**7.712.972.470,00**	**26,99%**

Jumlah beban pegawai BLUD yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban pegawai blud mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BLUD terdiri dari beban pegawai BLUD Puskesmas dan beban pegawai blud RSUD. Beban pegawai BLUD untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 26,99%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian beban pegawai BLUDuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pegawai BLUD	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Puskesmas Manguharjo	893.644.000,00	682.043.490,00	31,02%
2. Puskesmas Banjarejo	846.866.000,00	638.913.300,00	32,55%
3. Puskesmas Oro-oro Ombo	901.848.756,00	584.787.460,00	54,22%
4. Puskesmas Demangan	878.190.064,00	646.565.840,00	35,82%
5. Puskesmas Tawangrejo	896.499.659,00	670.335.480,00	33,74%
6. Puskesmas Patihan	633.404.372,00	404.186.900,00	56,71%
7. RSUD	4.743.948.800,00	4.086.143.000,00	16,10%
Total	**9.794.401.651,00**	**7.712.975.470,00**	**26,99%**

8.2.1.4. Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pegawai BOS	**2.410.242.900,00**	**2.521.583.215,00**	**4,42%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pegawai BOS yang seharusnya dibayar atau menjadi kewajiban Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS mengakui beban pegawai yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan BOS pendidikan dasar dan menengah negeri yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pegawai BOS meliputi beban pegawai BOS SDN, beban pegawai BOS SMPN. Beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi Penurunan sebesar 4,42 %.

Perincian beban pegawai BOS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Beban Pegawai BOS	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Pegawai BOS SDN	1.440.488.000,00	1.513.798.865,00	(4,84%)
2. Pegawai BOSSMPN	969.754.900,00	1.002.610.700,00	(3,28%)
3. Pegawai BOS SMAN&SMKN	0,00	5.173.650,00	00,00%
4. Pegawai BOS SMKN	0,00	0,00	00,00%
Total	**2.410.242.900,00**	**2.521.583.215,00**	**(4,42%)**

Beban Pegawai BOS sebesar Rp2.410.819.900,00 merupakan beban pegawai yang tidak dikeluarkan melalui rekening kas daerah tetapi dilaksanakan di masing masing rekening BOS sekolah negeri.

8.2.2. Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Persediaan	**70.507.162.300,55**	**85.603.768.786,53**	**(17.64%)**

Jumlah bebanpersediaanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp70.507.162.300,55 merupakan konsumsi/pemakaian persediaanoleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2017. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban persediaan mengakui konsumsi/pemakaian persediaan yang berasal dari sisa persediaan tahun lalu, hasil pengadaan dana APBD tahun anggaran 2017, hasil pengadaan dana BOS, hasil pengadaan dana BLUD, hasil pengadaan blockgrant, hasil pengadaan komite sekolah, hasil pengadaan tugas pembantuan, hasil pengadaan dekonsentrasi, hibah barang persediaan lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2017. Beban persediaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunan sebesar (17,64%).

Perincian beban persediaanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban persediaan sisa th lalu	0,00	8.430.857.090,17	0,00%
2. Beban persediaan apbd	22.782.856.340,70	34.206.680.335,82	(33,40)%
3. Beban persediaan BLUD	35.892.264.212,96	29.698.943.169,54	20,85%
4. Beban persediaan BOS	11.832.041.746,89	13.267.287.691,00	(10,82)%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5.	Beban persediaan blockgrant	0,00	0,00	0,00%
6.	Beban persediaan komite	0,00	0,00	0,00%
7.	Beban persediaan	0,00	0,00	0,00%
8.	Beban persediaan dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
9.	Beban persediaan lainnya	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**70.507.162.300,55**	**85.603.768.786,53**	**(17,64%)**

8.2.3. Beban Jasa

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Jasa	**153.929.093.775,92**	**129.560.302.450,48**	**18,81%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban jasa atas penggunaan jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016.Beban jasa mengakui penggunaan jasa yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban jasa mengakuipenggunaan jasa yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2017, dana BOS, hasil dana BLUD,dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama berjalan. Beban jasa untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 18,81%.

Perincian beban jasauntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Jasa	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban jasa apbd	120.190.496.199,61	129.560.302.450,48	(7,23%)
2. Beban jasa BLUD	28.352.682.877,73	0,00	0,00%
3. Beban jasa BOS	5.385.914.698.58	0,00	0,00%
4. Beban jasa blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban jasa komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban jasa tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban jasa dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban jasa dana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	**153.929.093.775,92**	**129.560.302.450,48**	**18,81%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.4. Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Pemeliharaan	**17.751.317.356,00**	**17.178.680.528,50**	**3,33%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban pemeliharaaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban pemeliharaan mengakui beban yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan mengakui pengeluaran biaya pemeliharaan yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2017, dana BOS, hasil dana BLUD,dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, hibah jasa lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 3,33%. Perincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Pemeliharaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
1. Beban pemeliharaan apbd	13.454.371.363,94	11.047.442.319,00	(21,79%)
2. Beban pemeliharaan BLUD	2.206.709.445,00	813.414.114,50	171,29%
3. Beban pemeliharaan BOS	2.090.236.547,06	5.317.823.095,00	(60,69%)
4. Beban pemeliharaan blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban pemeliharaan komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban pemeliharaan tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
7. Beban pemeliharaan dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
8. Beban pemeliharaandana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	**17.751.317.356,00**	**17.178.680.528,50**	**3,33%**

8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Perjalanan Dinas	**43.662.419.274,00**	**43.521.015.103,00**	**0,32%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tersebut merupakan saldo beban perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban perjalanan dinas mengakui beban perjalanan dinas yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban perjalanan dinas mengakui pengeluaran biaya perjalanan dinas yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2017, dana BLUD, dana BOS, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2017. Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 0,32%.

Perincian beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Beban perjalanan dinas apbd	41.426.382.975,00	41.452.760.568,00	0,06%
2. Beban perjalanan dinas BLUD	949.617.499,00	1.350.833.256,00	(29,70%)
3. Beban perjalanan dinas BOS	1.286.418.800,00	717.421.279,00	79,31%
4. Beban perjalanan dinas blockgrant	0,00	0,00	0,00%
5. Beban perjalanan dinas komite	0,00	0,00	0,00%
6. Beban perjalanan dinas tugas	0,00	0,00	0,00%
7. Beban perjalanan dinas	0,00	0,00	0,00%
8. Beban perjalanan dinasdana lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	**43.662.419.274,00**	**43.521.015.103,00**	**0,32%**

8.2.6. Beban Bunga

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
Beban Bunga	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bunga yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tidak mempunyai beban.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.7. Beban Subsidi

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban subsidi yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tidak mempunyai beban subsidi.

8.2.8. Beban Hibah

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Hibah	11.924.689.389,31	7.013.671.600,00	70.02%

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban hibah yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban hibahmengakui beban hibah yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibahmengakui hibah berasal dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) APBD tahun anggaran 2017 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2017, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban hibahuntuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 70,02%.

Perincian beban hibahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Hibah	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
1. Beban hibah BPKAD (SKPKD)	11.924.689.389,31	4.895.131.600,00	143,60%
2. Beban hibah reklas dr belanja barang jasa apbd	0,00	2.118.540.000,00	117,06%
3. Beban basos BLUD	0,00	0,00	0,00%
4. Beban bantsos BOS	0,00	0,00	0,00%
5. Beban hibahblockgrant	0,00	0,00	0,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.	Beban hibah komite sekolah	0,00	0,00	0,00%
7.	Beban hibahtugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
8.	Beban hibahdekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
9.	Beban hibahdana lainnya	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**11.924.689.389,31**	**7.013.671.600,00**	**70,02%**

8.2.9. Beban Bantuan Sosial

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
Beban Bantuan Sosial	**14.984.656.810,00**	**8.957.848.417,00**	**67,28%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban bantuan sosial yang harus dibayar/dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016.Beban bantuan sosial mengakui beban bantuan sosial yang merupakan kewajiban pemerintah Kota Madiun tanpa mempertimbangkan apakah sudah dibayar atau belum sebagai akibat aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun berjalan. Beban bantuan sosial mengakui bantuan sosial berasal dari belanja tidak langsung BPKAD (SKPKD) APBD tahun anggaran 2017 dan reklas dari belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang berasal dari dana APBD tahun anggaran 2017, dana BOS, dana BLUD, dana blockgrant, dana komite sekolah, dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi, dana lainnya yang dipergunakan untuk aktivitas operasional pemerintahan yang terjadi selama tahun 2017. Beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 67,28%.

Perincian beban bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
	1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1.	Beban bansos BPKAD (SKPKD)	4.523.846.700,00	4.455.685.000,00	1,53%
2.	Beban bansos reklas dr belanja barang jasa apbd	10.460.810.110,00	4.502.163.417,00	132,35%
3.	Beban basos BLUD	0,00	0,00	0,00%
4.	Beban bantsos BOS	0,00	0,00	0,00%
5.	Beban bansos blockgrant	0,00	0,00	0,00%
6.	Beban bansos komite sekolah	0,00	0,00	0,00%
7.	Beban bansos tugas pembantuan	0,00	0,00	0,00%
8.	Beban bansos dekonsentrasi	0,00	0,00	0,00%
9.	Beban bansosdana lainnya	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**14.984.656.810,00**	**8.957.848.417,00**	**67,28%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.10. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Penyisihan Piutang	**1.077.700.660,19**	**790.958.645,78**	**36,25%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan piutang yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban penyisihan piutang mengakuipenyisihan piutang berasal dari penyisihan piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah dan penyisihan piutang lain-lain. Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 36,25%.

Perincian beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Penyisihan piutang	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
1. Pajak Daerah	160.961..681,54	131.296.540,21	22,59,%
2. Retribusi Daerah	451.744.257,82	422.080.716,51	7,03%
3. Piutang lain-lain	464.994.720,83	237.581.389,06	95,72%
Jumlah	**1.077.700.660,19**	**790.958.645,78**	**36,25%**

8.2.11. Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Penyisihan Kerugian Investasi Non Permanen	**0,00**	**172.622.427,05**	**(0,00)%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyisihan kerugian investasi non permanenbiaya yang diestimasikan berdasarkan umur piutang oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016.Beban penyisihan kerugian investasi non permanenmengakui penyisihan kerugian investasi non permanen berasal dari penyisihan kerugian investasi non permanenatas piutang Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) di 27 kelurahan di Kota Madiun. Beban penyisihan kerugian investasi non permanenuntuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar0,00 %.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.12. Beban Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%)
Beban Penyusutan Aset Tetap	**101.506.978.370,00**	**91.165.184.133,88**	**11,34%**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban penyusutan aset tetap akibat penurunan nilai aset tetap yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2017 Aset tetap lainnya tidak disusutkan. Beban penyusutan aset tetap terdiri dari penyisihan aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan gedung dan bangunan, penyusutan jalan, irigasi dan jaringan. Beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi kenaikan sebesar 11,34%.

Perincian beban penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Beban Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
1. Peralatan dan Mesin	53.594.194.180,00	46.675.480.205,00	14,82%
2. Gedung dan Bangunan	13.602.431.605,00	14.997.611.566,00	(9,30)%
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.310.352.585,00	29.492.092.362,88	16,34%
4. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	**101.506.978.370,00**	**91.165.184.133,88**	**11,34%**

8.2.13. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**2.037.673.624,99**	**2.076.171.277,33**	**(1,85%)**

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban amortisasi aset tidak berwujud akibat penurunan nilai aset tidak berwujud yang diestimasikan berdasarkan umur ekonomis aset tidak berwujud oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 sebesar Rp2.037.673.624,99. Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan beban amortisasi aset tidak berwujud untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.076.171.277,33 terjadi penurunan sebesar 1,85%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8.2.14. Beban Lain-Lain

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Lain-lain	5.891.346.381,67	8.765.424.021,96	(32,79%)

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo beban lain-lain beban atas reklas pengadaan aset tetap yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap oleh Pemerintah Kota Madiun yang mengurangi ekuitas Pemerintah Kota Madiununtuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016. Beban lain-lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan 31 Desember 2016 terjadi penurunansebesar 32,79%.

8.2.15. Beban Luar Biasa

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Prosentase %
1	2	3	4=(2/3x100%)-100%
Beban Luar biasa	94.394.268.663,99	0,00	00,00%

Jumlah tersebut merupakan beban lain-lainluar biasa yang berasal dari nilai bersih aset tetap sekolahSMAN,SMKN dan SDLB yang di serahkan Provinsi Jawa Timur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
9

PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

9.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan sehingga memperoleh penerimaan pendapatan yang berarti menambah kas dan atau mengeluarkan belanja yang berarti mengurangi kas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan.

9.1.1. ARUS KAS MASUK

9.1.1.1. Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Penerimaan Pajak Daerah	75.224.831.585,44	64.045.559.079,36

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan pajak daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Daerah	Penerimaan2017	Penerimaan 2016
1	2	3
1. Pajak hotel	4.974.716.454,00	3.997.471.040,00
2. Pajak restoran	7.184.100.061,77	5.564.700.875,66
3. Pajak hiburan	1.303.023.863,00	1.197.021.728,00
4. Pajak reklame	2.774.982.703,00	2.629.612.677,50
5. Pajak penerangan jalan	18.503.214.981,13	16.443.170.206,10
6. Pajak parkir	1.349.788.267,00	935.730.053,00
7. Pajak air tanah	302.830.125,54	299.662.989,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. BPHTB	20.375.963.778,00	15.078.722.102,10
9. PBB	18.456.211.352,00	17.899.467.408,00
Total	**75.224.831.585,44**	**64.045.559.079,36**

1. Penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2017sebesar Rp4.974.716.454,00. Perincian penerimaan pajak hotel untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hotel	Jumlah	Realisasi2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	16.779.250,00	16.779.250,00	100,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	4.978.440.657,00	4.957.617.204,00	100,42%
Total	**4.995.219.907,00**	**4.974.716.454,00**	**100,41%**

2. Penerimaan pajak restoran tahun anggaran 2017sebesar RP7.184.100.061,77.Perincian penerimaan pajak restoran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Restoran	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	100.026.968,00	24.916.418,00	401,45%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	6.999.149.520,48	6.987.945.643,77	100,16%
3. Karcis benda berharga/PP1 2017	171.238.000,00	171.238.000,00	100,00%
Total	**7.270.414.488,48**	**7.184.100.061,77**	**101,20%**

3. Penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2017sebesar Rp1.303.023.863,00.Perincianpenerimaan pajak hiburanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Hiburan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	70.767.275,00	54.894.175,00	128,92%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	1.266.020.438,00	1.248.129.688,00	101,43%
3. Karcis	0,00	0,00	00,00%
Total	**1.336.787.713,00**	**1.303.023.863,00**	**102,59%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Penerimaan pajak reklame tahun anggaran 2017sebesar Rp2.774.982.703,00.Perincian penerimaan pajak reklame untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Reklame	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	37.381.000,00	6.826.100,00	547,62%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	2.787.017.108,00	2.768.156.603,00	100,68%
Total	**2.824.398.108,00**	**2.774.982.703,00**	**101,78%**

5. Penerimaan pajak penerangan jalan tahun anggaran 2017sebesar Rp18.503.214.981,13.Perincianpenerimaan pajak penerangan jalanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Penerangan jalan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	1.408.219.478,00	1.408.219.478,00	100,00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	18.713.603.982,95	17.094.995.503,13	109,46%
Total	**20.121.823.460,95**	**18.503.214.981,13**	**108,74%**

6. Penerimaan pajak parkir tahun anggaran 2017sebesar Rp1.349.788.267,00. Perincian penerimaan pajak parkir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Parkir	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%-
2. Pendapatan LO / SKP 2017	1.349.788.267,00	1.349.788.267,00	100,00%
Total	**1.349.788.267,00**	**1.349.788.267,00**	**100,00%**

7. Penerimaan pajak air tanah tahun anggaran 2017sebesar Rp302.830.125,54. Perincian penerimaan pajak air tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Air tanah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	2.042.950,00	0,00	0,00%-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pendapatan LO / SKP 2017	300.899.743,94	302.830.125,54	99,36%
Total	**302.942.693,94**	**302.830.125,54**	**100,03%**

8. Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun anggaran 2017sebesar Rp20.375.963.778,00Perincianpenerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunanuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0.00%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	20.375.963.778,00	20.375.963.778,00	100,00%
Total	**20.375.963.778,00**	**20.375.963.778,00**	**100,00%**

9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2017sebesar Rp18.456.211.352,00.Perincianpenerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB)untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak bumi dan bangunan (PBB)	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	2.134.179.815,00	1.463.042.134,00	145,87%
2. Pendapatan LO / SKP 2017	19.073.326.203,00	16.993.169.218,00	112,24%
Total	**21.207.506.018,00**	**18.456.211.352,00**	**114,94%**

9.1.1.2. Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Retribusi Daerah	**18.407.218.016,50**	**16.762.538.293,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan retribusi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017.

Perincian anggaran dan penerimaan pendapatan retribusi daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi Daerah SKPD	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1 Dinas PU	**2.543.695.440,00**	**1.890.860.587,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	961.998.440,00	704.464.587,00
c. Perizinan tertentu	1.581.697.000,00	1.186.396.000,00
2 Dinas Perhubungan	**2.022.711.400,00**	**3.251.826.850,00**
a. Jasa Umum	1.679.171.500,00	1.652.224.000,00
b. Jasa Usaha	340.959.900,00	1.599.769.350,00
c. Perizinan tertentu	2.580.000,00	3.240.000,00
3 Dinas Lingkungan Hidup	**330.997.500,00**	**419.238.000,00**
a. Jasa Umum	202.657.500,00	347.488.000,00
b. Jasa Usaha	128.340.000,00	71.750.000,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
4 Bagian Pemerintahan	**0,00**	**1.877.027.296,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	0,00	1.877.027.296,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
5 BPKAD	**6.762.658.573,00**	**2.576.864.692,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	6.762.658.573,00	2.576.864.692,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
6 Kec Kartoharjo	**1.265.788.437,00**	**1.117.054.840,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	1.265.788.437,00	1.117.054.840,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
7 Kec Taman	**481.455.277,50**	**517.161.100,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	481.455.277,50	517.161.100,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
8 Kec Manguharjo	**615.401.395,00**	**591.396.810,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	615.401.395,00	591.396.810,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9 BKD	**237.700.000,00**	**253.650.000,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	237.700.000,00	253.650.000,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
10 Dinas Pertanian	**52.774.400,00**	**57.334.000,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	52.774.400,00	57.334.000,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
11 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	**201.936.389,00**	**669.091.064,00**
a. Jasa Umum	0,00	0,00
b. Jasa Usaha	201.936.389,00	181.949.064,00
c. Perizinan tertentu	0,00	487.142.000,00
12 Dinas Perdagangan	**3.818.220.705,00**	**3.537.626.554,00**
a. Jasa Umum	3.818.220.705,00	3.537.626.554,00
b. Jasa Usaha	0,00	0,00
c. Perizinan tertentu	0,00	0,00
Total	**18.407.218.016,50**	**16.762.538.293,00**

1. Dinas Pekerjaan Umum(Dinas PU)

a. Dinas Pekerjaan Umum tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum .

b. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga .

☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp314.150.000,00. Perincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	314.150.000,00	314.150.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	00,00%
Total	**314.150.000,00**	**314.150.000,00**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

☑ Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp647.848.440,00.

Perincian penerimaanretribusi tempat rekreasi dan olah ragauntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	647.848.440,00	647.848.440,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0.00	0,00	0,00%
Total	**647.848.440,00**	**647.848.440,00**	**100,00%**

c. Retribusi perizian tertentu berupa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

☑ Penerimaan retribusi IMB sebesar Rp1.581.697.000,00. Perincian penerimaan retribusi IMB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi IMB	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.581.697.000,00	1.581.697.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.581.697.000,00**	**1.581.697.000,00**	**100,00%**

2 Dinas Perhubungan

a. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor .

☑ Penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.078.430.500,00. Perincian penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.083.821.500,00	1.083.821.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.083.821.500,00**	**1.083.821.500,00**	**100,00%**

☑ Penerimaan retribusi penguji kendaraan bermotor sebesar Rp595.350.000,00. Perincian penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	595.350.000,00	595.350.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**595.350.000,00**	**595.350.000,00**	**100,00%**

b. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi tempat parkir khusus.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp135.521.100,00.Perincian penerimaanpemakaian kekayaan daerahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Terminal	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	135.521.100,00	135.521.100,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**135.521.100,00**	**135.521.100,00**	**100,00%**

☑ Retribusi terminal sebesar Rp886.000,00. Perincian penerimaan terminal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Terminal	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	886.000,00	886.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**886.000,00**	**886.000,00**	**100,00%**

☑ Penerimaan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp203.466.800,00. Perincian penerimaan tempat parkir khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tempat parkir khusus	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	204.552.800,00	204.552.800,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**204.552.800,00**	**204.552.800,00**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Retribusi perizian tertentu berupa retribusi izin trayek.

☑ Penerimaan izin trayek sebesar Rp2.580.000,00. Perincian penerimaan izin trayek untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Izin trayek	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**2.580.000,00**	**2.580.000,00**	**100,00%**

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

a. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

☑ Penerimaanretribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp202.657.500,00. Perincian penerimaan pelayanan persampahan/kebersihan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pelayanan persampahan/ kebersihan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	202.657.500,00	202.657.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**202.657.500,00**	**202.657.500,00**	**100,00%**

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

☑ Penerimaantempat hiburan rakyat dan olahraga sebesar Rp128.340.000,00. Perincian penerimaan tempat hiburan rakyat dan olahraga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Tempat hiburan rakyat dan olahraga	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	128.340.000,00	128.340.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**128.340.000,00**	**128.340.000,00**	**100,00%**

c. Dinas Lingkungan Hidup tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi perizinan tertentu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)

a. BPKAD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum .

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp6.762.658.573,00.Perincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	405.870.231,00	355.160.128,00	114,28%
2. Pendapatan LO 2017	5.729.941.571,00	4.805.526.893,00	119,23%
3. Pendapatan diterima dimuka	1.957.131.680,00	1.957.131.680,00,	100,00%
Total	**8.092.943.482,00**	**6.762.658.573,00-**	**119,67%**

c. BPKAD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

5. Kecamatan Kartoharjo

☑ Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum .

☑ Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.265.788.437,00. Perincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	1.158.487.944,11	335.509.314,11	345,29%
3. Pendapatan diterima dimuka	930.279.122,89	930.279.122,89	100,00%
Total	**2.088.767.067,00**	**1.265.788.437,00**	**165,02%**

c. Kecamatan Kartoharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

6. Kecamatan Manguharjo

a. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp615.401.395,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian penerimaanretribusi pemakaian kekayaan daerahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	601.710.456,25	161.912.848,75	371,62%
3. Pendapatan diterima dimuka	453.488.546,25	453.488.546,25	100,00%
Total	**1.055.199.002,50**	**615.401.395,00**	**171,46%**

c. Kecamatan Manguharjo tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

7. Kecamatan Taman

a. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp481.455.277,50

Perincian penerimaanretribusi pemakaian kekayaan daerahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,36	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	506.546.769,37	137.313.819,37	368,90%
3. Pendapatan diterima dimuka	344.141.458,13	344.141.458,13	100.00%
Total	**850.688.227,50**	**481.455.277,50**	**176,69%**

c. Kecamatan Taman tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

8. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

a. BKD tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah.

☑ Penerimaanretribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp237.700.000,00. Perincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	237.700.000,00	237.700.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**237.700.000,00**	**237.700.000,00**	**100,00%**

c. BKD tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi rumah potong hewan.

☑ Penerimaanretribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp14.532.400,00. Perincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	14.532.400,00	14.532.400,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	00,00%
Total	**14.532.400,00**	**14.532.400,00**	**100,00%**

☑ Penerimaan retribusi rumah potong hewan sebesar Rp38.242.000,00. Perincian penerimaan retribusi rumah potong hewan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi rumah potong hewan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	38.242.000,00	38.242.000,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**38.242.000,00**	**38.242.000,00**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola retribusi perizinan tertentu sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi perizinan tertentu.

10. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

a. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga tidak mengelola retribusi jasa umum sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha berupa retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

☑ Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp201.936.389,00. Perincian penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	201.936.389,00	201.936.389,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**201.936.389,00**	**201.936.389,00**	**100,00%**

11. Dinas Perdagangan

a. Retribusi jasa umum berupa retribusi pelayanan pasar.

☑ Penerimaan retribusi pasar sebesar Rp3.818.220.705,00. Perincian penerimaan retribusi pasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Retribusi pasar	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	712.295.938	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	3.892.099.205,00	3.801.071.622,00	102,39%
3. Karcis/Benda Berharga/PP1	0,00	0,00	0,00%
4. Pendapatan diterima dimuka	17.149.083,00	17.149.083,00	100,00%
Total	**4.621.544.226,00**	**3.818.220.705,00**	**121.03%**

b. Dinas Perdagangan tidak mengelola retribusi jasa usaha sehingga tidak mempunyai penerimaan pendapatan retribusi jasa usaha.

c. Retribusi perizinan tertentu.

☑ Penerimaan retribusi perizinan tertentusebesar Rp73.878.500,00. Perincian penerimaan retribusi pasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

☑

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Retribusi Perizinan tertentu	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	73.878.500,00	73.878.500,00	100,00%
3. Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00%
Total	**1.073.878.500,00**	**73.878.500,00**	**100,00%**

9.1.1.3. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	**13.320.249.415,39**	**11.172.031.994,51**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	2	3
1 PDAM	5.435.226.084,00	3.558.478.810,00
2 BPR Bank Daerah	2.034.451.737,11	1.631.463.497,39
3 Aneka Usaha	0,00	341.446.292,85
4 Bank Jatim	5.850.571.594,28	5.611.936.914,22
Total	**13.320.249.415,39**	**11.172.031.994,51**

1. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM tahun anggaran 2017sebesar Rp5.435.226.084,00. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PDAM	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	5.435.226.084,00	5.435.226.084,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	10.310.194.057,00	0,00	0,00%
Total	**15.745.420.141,00**	**5.435.226.084,00**	**289,69%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah tahun anggaran 2017sebesar Rp2.034.451.737,11. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BPR Bank Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr BPR Bank Daerah	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	2.034.451.737,11	2.034.451.737,11	100.00%
2. Pendapatan LO 2017	2.034.451.737,11	0,00	0.00%
Total	**2.034.451.737,11**	**2.034.451.737,11**	**100,00%**

3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha tahun anggaran 2017sebesar Rp0,00. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PD Aneka Usaha untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PD Aneka Usaha	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	00,00%
2. Pendapatan LO 2017	639.491.661,00	0,00	00,00%
Total	**639.491.661,00**	**0,00**	**00,00%**

4. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim tahun anggaran 2017sebesar Rp5.850.571.594,00. Perincian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dr PT Bank Jatim	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	5.850.571.594,00	5.850.571.594,00	100,00%
Total	**5.850.571.594,00**	**5.850.571.594,00**	**100,00%**

9.1.1.4. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan lain-lain PAD yang sah	**123.151.384.225,81**	**81.213.040.460,93**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah dan kas blud yang berasal dari penerimaan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah selama tahununtuk periode yang berakhir 31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Desember 2017 dan 31 Desember 2016 setelah dikurangi reklas ke Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

Perincian penerimaan pendapatan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Lain-Lain PAD yang sah Per SKPD	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	3	5
1 Dinas Pendidikan	**19.897.982.763,27**	**0,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00
g. Pendapatan BOS	19.897.982.763,27	0,00
1 Dinas Kesehatan	**8.899.013.827,26**	**6.196.245.828,94**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00
f. Pendapatan BLUD	8.899.013.827,26	6.196.245.828,94
2 RSUD	**71.574.648.715,21**	**52.726.130.370,48**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00
f. Pendapatan BLUD	71.574.648.715,21	52.726.130.370,48
3 BAPENDA	**210.346.218,00**	**112.994.461,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	210.346.218.,00	112.994.461,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00
4 BPKAD (SKPKD)	**22.438.053.484,07**	**12.552.585.263,77**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	4.899.121.759,45	9.865.639.654,18
c. Pendapatan dari bunga deposito	9.367.745.843,24	0,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	120.021.113,74	133.896.720,88.
e. Pendapatan lain-lain	8.051.164.767,64	2.553.048.888,71
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00
5 Dinas Pertanian	**21.248.000,00**	**14.629.000,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	21.248.000,00	14.629.000,00.
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00
6 Dinas Perdagangan	**110.091.218,00**	**118.747.775,00**
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	0,00	0,00
b. Jasa giro	0,00	0,00
c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	110.091.218,00	118.747.775,00
d. Hasil pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00
e. Pendapatan lain-lain	0,00	0,00
f. Pendapatan BLUD	0,00	0,00
Total	**123.151.384.225,81**	**81.213.040.460,93**

1. Dinas Pendidikan

a. Dinas Pendidikantidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Dinas Pendidikantidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Dinas Pendidikantidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Dinas Pendididkantidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Pendidikantidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Dinas Pendidikan tidak mengelola pendapatan BLUD

g. Pendapatan BOS berupa pendapatan BOSdari Sekolah dasar (SD) dan Sekolah menengah Pertama (SMP)

☑ Penerimaan pendapatan BOS sebesar 19.897.982.763,27Perincian penerimaan pendapatan BOSuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan BLUD Puskesmas	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0.00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	19.897.982.763,27	19.897.982.763,27	100,00%
Total	**19.897.982.763,27**	**19.897.982.763,27**	**100,00%**

2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD Puskesmas

☑ Penerimaan pendapatan blud puskesmas sebesar Rp8.899.013.827,26.Perincian penerimaan pendapatan BLUD Puskesmas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan BLUD Puskesmas	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0.00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	8.899.013.827,26	8.899.013.827,26	100,00%
Total	**8.899.013.827,26**	**8.899.013.827,26**	**100,00%**

3. RSUD

a. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. RSUD tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. RSUD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. RSUD tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. RSUD tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Pendapatan BLUD berupa pendapatan BLUD RSUD

☑ Penerimaan pendapatan blud RSUD sebesar Rp71.574.648.715,21. Dan koreksi tambah atas temuan BPK kas bendahara penerimaan BLUD sebesar 16.988.287,00 Perincian penerimaan pendapatan BLUD RSUD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pendapatan BLUD RSUD	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	10.436.792.851,00	10.436.792.851,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	61.137.855.864,21	61.137.855.864.21	100,00%
Total	**71.574.648.715,21**	**71.574.648.715,21**	**100,00%**

4. **Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)**

Realisasi pendapatan lain-lain 2017Badan Pendapatan Daerah hasil dari denda keterlambatan pembayaran PBB sebesar Rp210.346.218,00. Perincian realisasi pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan Lain-lain	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	210.346.218,00	210.346.218,00	100,00%
Total	**210.346.218,00**	**210.346.218,00**	**100,00%**

5. **BPKAD (SKPKD)**

a. pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

☑ Penerimaan pendapatan hasil penjualan aset daerah sebesar Rp505.034.126,00. Perincian penerimaan pendapatan jasa giro untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan jasa giro	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	505.034.126,00	505.034.126,00	100,00%
Total	**505.034.126,00**	**505.034.126,00**	**100,00%**

b. Pendapatan jasa giro.

☑ Penerimaan pendapatan jasa giro sebesar Rp4.899.121.759,45. Perincian penerimaan pendapatan jasa giro untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan jasa giro	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	4.899.121.759,45	4.899.121.759,45	100,00%
Total	**4.899.121.759,45**	**4.899.121.759,45**	**100,00%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. BPKAD tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Pendapatan hasil bunga deposito.

☑ Penerimaan pendapatan hasil bunga deposito sebesar Rp9.367.745.843,24. Perincian penerimaan pendapatan bunga depositountuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan bunga deposito	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	9.367.745.843,24	9.367.745.843,24	100.00%
Total	**9.367.745.843,24**	**9.367.745.843,24**	**100.00%**

e. Pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir berupa pendapatan dari LKK.

☑ Penerimaan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK sebesar Rp133.896.000,00. Perincian penerimaan pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LKK	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	120.021.113,74	120.021.113,74	100.00%
Total	**120.021.113,74**	**120.021.113,74**	**100.00%**

f. Pendapatan lain-lain.

☑ Penerimaan pendapatan lain-lain sebesar Rp8.051.164.767,64. Perincian penerimaan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan lain-lain	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	8.051.164.767,64	8.051.164.767,64	100,00%
Total	**8.051.164.767,64**	**8.051.164.767,64**	**100,00%**

g. BPKAD tidak mengelola pendapatan BLUD.

6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berupa penjualan hasil perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

☑ Penerimaan pendapatan penjualan hasil perikanan sebesar Rp21.248.000,00. Perincian penerimaan pendapatan penjualan hasil perikanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan penjualan hasil perikanan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	21.248.000,00	21.248.000,00	100,00%
Total	**21.248.000,00**	**21.248.000,00**	**100,00%**

b. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak mengelola Pendapatan BLUD

7. Dinas Perdagangan

a. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

b. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan jasa giro.

c. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

☑ Penerimaan pendapatan angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp110.091.218,00. Perincian penerimaan pendapatan angsuran/cicilan penjualan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pendapatan angsuran/cicilan penjualan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	0,00	0.,00	0,00%
2. Pendapatan LO 2017	110.091.218,00	110.091.218,00	100,00%
Total	**110.091.218,00**	**110.091.218,00**	**100,00%**

d. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan hasil pengeloaan dana bergulir.

e. Dinas Perdagangan tidak mengelola pendapatan lain-lain

f. Dinas Perdagangan tidak mengelola Pendapatan BLUD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.1.1.5. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	**27.325.331.947,00**	**34.049.572.850,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	2	3
PBB	3.349.095.520,00	8.174.408.541,00
PPh Pasal 21,25,29	23.976.236.427,00	25.875.164.309,00
Total	**27.325.331.947,00**	**34.049.572.850,00**

9.1.1.6. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	**18.680.122.868,00**	**18.880.139.043,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Sumber daya hutan	143.143.376,00	131.785.267,00
Pungutan hasil Perikanan	447.937.200,00	452.025.539,00
Pertambangan migas	18.012.118.856,00	18.236.167.816,00
Pertambangan umum Royalti	58.865.576,00	1.969.500,00
Pertambangan umum migas	18.057.860,00	58.190.921,00
Total	**18.680.122.868,00**	**18.880.139.043,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.1.1.7. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Alokasi Umum	502.392.070.000,00	511.375.289.000,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi umum dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.1.1.8. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan pendapatan dana alokasi khusus (DAK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

DAK	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	2	3
Pendidikan	6.678.116.750,00	789.366.000,00
Kesehatan	0,00	1.193.673.000,00
Jalan	15.055.093.000,00	0,00
Air minum	0,00	274.857.000,00
Sanitasi	1.141.702.000,00	224.883.000,00
Lingkungan hidup	118.740.000,00	1.058.055.000,00
Keluarga berencana	2.596.779.000,00	165.909.000,00
Transportasi darat	14.920.000,00	130.974.000,00
Kelautan & perikanan	0,00	705.120.000,00
Kedaulatan pangan	282.700.000,00	0,00
Pertanian	0,00	2.159.016.000,00
Rujukan	1.388.889.000,00	1.276.371.000,00
Farmasi	0,00	976.566.000,00
Insfrastruktur	0,00	68.134.908.356,00
BOP PAUD	5.107.800.000,00.	2.148.000.000,00.
TPG	40.498.327.650,00	59.469.241.000,00
TPG Non Profesi	587.400.000,00	546.800.000,00
BOP Kesehatan	2.816.718.460,00	1.310.250.000,00
Jampersal	0,00	0,00
BOP KB	277.170.000,00	283.110.000,00
Dana Pelayanan Administrasi	703.067.000,00	0,00
Total	77.267.422.860,00	140.847.099.356,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.1.1.9. Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai	13.308.934.159,00	12.409.333.957,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil cukai dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.1.1.10. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	79.825.524.122,00	64.431.714.504,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsiuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	2	3
1. PKB	22.431.402.785,00	21.893.810.000,00
2. BBNKB	11.577.516.645,00	12.488.731.185,00
3. BBKB	15.629.605.878,00	13.956.105.144,00
4. Pajak pemanfaatan air permukaan	215.413.062,00	207.490.272,00
5. Pajak Rokok	29.971.585.752,00	15.885.577.903,00
Total	79.825.524.122,00	64.431.714.504,00

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun anggaran 2017sebesar Rp22.431.402.785,00. Perincian penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	4.164.501.942,00	4.164.501.942,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	22.606.507.627,00	18.266.900.843,00	123,75%
Total	26.771.009.569,00	22.431.402.785,00	119,34%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tahun anggaran 2017sebesar Rp11.577.516.645,00. Perincian penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	1.925.015.111,00	1.925.015.111,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	12.004.518.164,00	9.652.501.534,00	124,37%
Total	**13.929.533.275,00**	**11.577.516.645,00**	**120,32%**

3. Penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tahun anggaran 2017sebesar Rp15.629.605.878,00. Perincian penerimaan pajak pemanfaatan airuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak bahan bakar kendaraan	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	2.480.366.741,00	2.480.366.741,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	16.062.387.517,00	13.149.239.137,00	122,15%
Total	**18.542.754.258,00**	**15.629.605.878,00**	**118,63%**

4. Penerimaan pajak pemanfaatan air tahun anggaran 2017sebesar Rp215.413.062,00. Perincian penerimaan pajak pemanfaatan airuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak pemanfaatan air	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	45.501.910,00	45.501.910,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	208.069.047,00	169.911.152,00	122,46%
Total	**253.570.957,00**	**215.413.062,00**	**117,71%**

5. Penerimaan pajak rokok tahun anggaran 2017sebesar Rp29.971.585.752,00. Perincian penerimaan pajak rokokuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 tersaji pada tabel dibawah ini.

Pajak rokok	Jumlah	Penerimaan2017	%
1	2	3	4 = (2/3)
1. Piutang tahun 2016	5.125.764.047,00	5.125.764.047,00	100,00%
2. Pendapatan LO 2017	29.524.218.321,00	24.845.821.705,00	118,83%
Total	**34.649.982.368,00**	**29.971.585.752,00**	**115,61%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.1.1.11. Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan bantuan keuangan provinsi dari Pemerintah Provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan bantuan keuangan dari provinsi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Realisasi2017	Realisasi2016
Penyelenggaraan pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta	476.850.000,00	473.250.000,00
Pelaksanaan hari aksara	10.000.000,00	10.000.000,00
Operasional Pendidikan BOP (LIFE SKILL)	0,00	15.000.000,00
Seleksi pendidik dan kependidikan berprestasi	0,00	20.000.000,00
Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM SLTA)	0,00	562.380.000,00
BOP Madin	75.000.000,00	100.000.000,00
Peringkatan Hari Jadi Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar.	0,00	30.000.000,00
Lomba Kompetensi siswa dan lomba jawara SMK tingkat kota	0,00	300.000.000,00
Pengembangan Taman Posyandu	55.000.000,00	60.000.000,00
Seleksi kepala sekolah berwawasan lingkungan	0,00	20.000.000,00
Anugrah Konstitusi bagi guru PKn	0,00	15.000.000,00
Kegiatan seleksi & pembinaan Guru & tenaga pendidikan PAUD & Dikmas Berprestasi	20.000.000,00	15.000.000,00
Setoran Bantuan propinsi Honor 1 Dokter Pusk.rawat inap	25.000.000,00	0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	0,00
Total	**716.850.000,00**	**1.670.630.000,00**

9.1.1.12. Penerimaan Dana Penyesuaian

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan Dana Penyesuaian	**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2016. Perincian penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dana penyesuaian	Realisasi2017	Realisasi2016
Dana insentif daerah	7.500.000.000,00	41.382.622.000,00
Tunjangan profesi guru	0,00	0,00
Total	**7.500.000.000,00**	**41.382.622.000,00**

9.1.2. ARUS KAS KELUAR

9.1.2.1. Pembayaran Pegawai

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran pegawai	**391.631.558.502,00**	**511.243.214.266,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluardari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Perincian penerimaan belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Belanja Pegawai	Penerimaan2017	Penerimaan2016
1	3	5
1. Belanja pegawai belanja tidak langsung	334.822.576.837,00	457.736.983.096,00
2. Belanja pegawai belanja langsung	44.604.337.114,00	45.571.655.700,00
3. Belanja pegawai BLUD	9.794.401.651,00	7.934.575.470,00
4. Belanja Pegawai BOS	2.410.242.900,00	0,00
Total	**391.631.558.502,00**	**511.243.214.266,00**

9.1.2.2. Pembayaran Barang dan Jasa

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran barang dan Jasa	**280.472.821.815,27**	**257.954.754.292,44**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran pembayaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian pengeluaran barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Barang jasa	214.505.839.278,15	208.251.798.592,00
Reklas ke hibah	0,00	(2.118.540.000,00)
Reklas ke bantuan sosial	(10.460.810.110,00)	(3.874.316.717,00)
Barang jasa BLUD	64.401.274.034,69	55.695.812.417,44
Barang jasa BOS	12.026.518.612,43	0,00
Total	**280.472.821.815,27**	**257.954.754.292,44**

9.1.2.3. Pembayaran Hibah

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran hibah	**11.924.689.389,31**	**7.013.671.600,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran pembayaran hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.Perincian pengeluaran hibahuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Realisasi2017	Realisasi2016
Hibah	11.924.689.389,31	4.895.131.600,00
Reklas dr barang jasa jasa	0,00	2.118.540.000,00
Hibah BLUD	0,00	0,00
Total	**11.924.689.389,31**	**7.013.671.600,00**

9.1.2.4. Pembayaran Bantuan Sosial

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran Bantuan Sosial	**14.356.810.110,00**	**8.330.001.717,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.Perincian pengeluaran bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Bantuan Sosial	3.896.000.000,00	4.455.685.000,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Reklas dr barang jasa	10.460.810.110,00	3.874.316.717,00
Bansos BLUD	0,00	0,00
Total	**14.356.810.110,00**	**8.330.001.717,00**

9.1.2.5. Pembayaran Bantuan Keuangan

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran Bantuan Keuangan	**627.846.700,00**	**627.846.700,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran pembayaran bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.Perincian pengeluaran bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel dibawah ini.

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Hibah	627.846.700,00	627.846.700,00
Reklas dr barang jasa jasa	0,00	0,00
Bantuan keuangan BLUD	0,00	0,00
Total	**627.846.700,00**	**627.846.700,00**

9.1.2.6. Pembayaran Belanja Tidak Terduga

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Pembayaran belanja tidak terduga	**0,00**	**0,00**

Tidak ada arus kas keluar dari kas daerah yang berasal dari pengeluaran pembayaran tidak terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.1.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31 Desember2017	31 Desember2016
Arusk kas bersih dari aktivitas operasi	**258.106.212.682,56**	**213.070.081.962,36**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arusk kas masuk	957.119.939.199,14	998.239.570.537,80
Arusk kas keluar	(699.013.726.516,58)	(785.169.488.575,44)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas operasi	**258.106.212.682,56**	**213.070.081.962,36**

9.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas netto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan di masa yang akan datang.

9.2.1. ARUS KAS MASUK

9.2.1.1 Penjualan Investasi Jangka Panjang

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Penjualan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan Investasi Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.2.1.2 Penjualan Aktiva Tetap

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Penjualan Aktiva Tetap	505.034.126,00	42.760.000,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi antara lain berasal dari penjualan aktiva tetap untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.2.2. ARUS KAS KELUAR

9.2.2.1.Perolehan Modal Tanah

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan Modal Tanah	0,00	0,00

Tidak ada arus kas keluar dari kas daerahdan kas blud yang berasal dari perolehan modal tanah untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.2.2.2.Perolehan Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	103.557.504.743,48	62.160.897.084,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perolehan modal peralatan dan mesin untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Perolehan Modal Peralatan dan Mesin	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Belanja modal peralatan dan mesin APBD	95.699.213.584,48	62.033.402.934,00
Belanja modal peralatan dan mesin BLUD	6.454.615.644,00	127.494.150,00
Belanja modal peralatan dan mesin BOS	1.403.675.515,00	0,00
Total	**103.557.504.743,48**	**62.160.897.084,00**

9.2.2.3.Perolehan Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan modal gedung dan bangunan	**43.416.541.452,75**	**53.614.816.421,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perolehan modal gedung dan bangunan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Pengeluaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Belanja modal gedung dan bangunan APBD	43.256.182.452,75	53.540.036.621,00
Belanja modal gedung dan bangunan BLUD	160.359.000,00	74.779.800,00
Belanja modal gedung dan bangunan BOS	0,00	0,00
Total	**43.416.541.452,75**	**53.614.816.421,00**

9.2.2.4.Perolehan Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan	**102.648.521.200,00**	**127.909.902.613,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari perolehan modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian perolehan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Perolehan Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan APBD	102.648.521.200,00	127.909.902.613,00
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BLUD	0,00	0,00
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan BOS	0,00	0,00
Total	**102.648.521.200,00**	**127.909.902.613,00**

9.2.2.5.Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan modal aset tetap lainnya	**3.188.874.942,00**	**463.668.600,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perolehan modal aset tetap lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

PerolehanBelanja Modal Aset Tetap Lainnya	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Belanja modal aset tetap lainnya APBD	476.252.280,00	463.668.600,00
Belanja modal aset tetap lainnya BLUD	0,00	0,00
Belanja modal aset tetap lainnya BOS	2.761.014.562,00	0,00
Total	**3.188.874.942,00**	**463.668.600,00**

9.2.2.6.Perolehan Modal Aset lainnya

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Perolehan modal aset lainnya	**3.166.534.175,00**	**2.245.420.003,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perolehan modal aset lainnya untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Perolehan Modal Aset lainnya	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Belanja modal aset lainnya APBD	3.166.534.175,00	2.245.420.003,00
Belanja modal aset lainnya BLUD	0,00	0,00
Belanja modal aset lainnya BOS	0,00	0,00
Total	**3.166.534.175,00**	**2.245.420.003,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.2.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arusk kas bersih dari aktivitas investasi	**(255.472.942.387,23)**	**(246.351.944.721,00)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arusk kas masuk	0,00	42.760.000,00
Arusk kas keluar	(255.472.942.387,23)	(246.394.704.721,00)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas investasi	**(255.472.942.387,23)**	**(246.351.944.721,00)**

9.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan Surplus (Defisit) anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak yang terkait terhadap arus kas di masa yang akan datang.

9.3.1. ARUS KAS MASUK

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas pendanaan antara lain berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016yang bukan merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan melainkan sebagai saldo awal kas tahun 2017 dan tahun 2016, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

9.3.1.1.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	**0,00**	**4.170.000,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk ke kas daerah yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.3.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan antara lain untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang pinjaman dan obligasi, dan pemberian pinjaman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.3.2.1.Penyertaan Modal Pemda

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Pengeluaran penyertaan modal pemda	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran penyertaan modal pemdauntuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian pengeluaran penyertaan modal pemda untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Penyertaan modal kepada PDAM	0,00	0,00
Penyertaan modal kepada PD. BPR Bank Daerah	0,00	0,00
Penyertaan modal kepada PD. Aneka Usaha	0,00	0,00
Belanja modal kepada PT. Bank Jatim	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

9.3.2.2.Pembayaran Pokok Utang

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Pengeluaran pembayaran pokok utang	**0,00**	**0,00**

Tidak ada arus kas keluar dari kas daerah dan kas blud yang berasal dari pengeluaran pembayaran pokok utang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

9.3.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Desember2017	31 Desember 2016
Arusk kas bersih dari aktivitas pendanaan	**0,00**	**4.170.000,00**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arusk kas masuk	0,00	4.170.000,00
Arusk kas keluar	0,00	0,00
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan	**0,00**	**4.170.000,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dan digunakan oleh pihak ketiga dan tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

9.4.1. ARUS KAS MASUK

9.4.1.1.Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Penerimaan2017	Penerimaan2016
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)	**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitorisyang berasal dari penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUD dan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian penerimaan PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Penerimaan PFK dan Sisa Uang Persediaan	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)	37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
Sisa Uang Persediaan	0,00	0,00
Total	**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**

9.4.2. ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

9.4.2. ARUS KAS KELUAR

9.4.2.1.Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**

Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitorisyang berasal dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) yang dipotong melalui SP2D LS oleh BUDdan sisa uang persediaan yang baru disetor pada tahun berikutnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian pengeluaran PFK dan sisa uang persediaan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016tersaji pada tabel di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengeluaran PFK dan Sisa Uang Persediaan	Pengeluaran2017	Pengeluaran2016
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
Sisa Uang Persediaan	0,00	0,00
Total	**37.091.114.404,26**	**25.938.063.146,55**

9.4.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember2016
Arusk kas bersih dari aktivitas transitoris	**0,00**	**0,00**

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris. Perincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitorisuntuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arus kas masuk	37.091.114.404,26	25.938.063.146,55
Arus kas keluar	(37.091.114.404,26	(25.938.063.146,55)
Jumlah aliran kas bersih dari aktivitas transitoris	**0,00**	**0,00**

9.5. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan (penurunan) kas bersih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016merupakan penjumlahan yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Perincian kenaikan (penurunan) kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	258.106.212.682,56	213.070.081.962,36
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(255.472.942.387,23)	(246.351.944.721,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	4.170.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	0,00	0,00
Jumlah kenaikan (penurunan) kas	**2.633.270.295,33**	**(33.277.692.758,64)**

9.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016merupakan saldo awal kas Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas ditambah Saldo Kas Daerah dan saldo awal kas. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut juga menunjukkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA) tahun berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perincian saldo akhir kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kenaikan (penurunan) bersih kas	2.633.270.295,33	(33.277.692.758,64)
Saldo awal kas daerah dan Saldo awal kas di bendahara pengeluaran	275.264.586.878,92	313.127.408.261,28
Saldo awal kas di BLUD Dinas Kesehatan	2.536.318.146,84	2.011.116.501,81
Saldo awal kas di BLUD RSUD	28.036.186.781,37	23.996.654.589,68
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan	3.406.500,00	0,00
Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD	16.988.287,00	0,00
Jumlah saldo akhir kas	**308.490.756.889,46**	**305.857.486.594,13**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
10

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas awal	2.351.321.386.078,12	1.783.390.753.070,32

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas milik Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016.

10.2. Surplus (Defisit) LO

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Surplus (Defisit) LO	68.981.227.220,69	146.958.001.438,56

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) yang berasal dari Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

10.3. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tersebut terjadi karena adanya perubahan kebijakan akuntansi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berbasis cash toward accrual ke basis accrual. Dampak kumulatif ini antara lain disebabkan, Pemerintah Kota Madiun belum menerapkan penyusutan dan amortisasi sehingga seluruh akun aset tetap yang sesuai ketentuan harus disusutkan maka harus diperhitungkan akumulasi penyusutannya dan akumulasi amortisasi, adanya koreksi-koreksi yang berdampak langsung terhadap ekuitas sehingga berdampak kepada penyajian saldo ekuitas.

Perincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2017 tersaji pada tabel di bawah ini.

Perincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tersaji pada tabel dibawah ini.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	3	5
1. Akumulasi penyusutan sd tahun 2016	0,00	0,00
2. Akumulasi amortisasi sd tahun 2016	0,00	0,00
3. Lain-lain	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

10.3.1. Akumulasi Penyusutan sd Tahun 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Akumulasi penyusutan sd tahun 2016	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi penyusutan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi penyusutan sampai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Koreksi akumulasi penyusutan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dinas Dikmudora	0,00	0,00
Perpusataan & arda	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00
Dinas PU	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAPPEDA	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
DKP	0,00	0,00
Kantor LH	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00
Kepala Daerah/Wakil	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00
Bagian Pereksos	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00
Bagian Humas Protokol	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00
KPPT	0,00	0,00
Dipenda	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10.3.2. Akumulasi Amortisasi sd Tahun 2017

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Akumulasi amortisasi sd tahun 2016	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari akumulasi amortisasi sampai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Koreksi akumulasi amortisasi	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dinas Dikmudora	0,00	0,00
Perpusataan & arda	0,00	0,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00
RSUD	0,00	0,00
Dinas PU	0,00	0,00
BAPPEDA	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
DKP	0,00	0,00
Kantor LH	0,00	0,00
Dispendukcapil	0,00	0,00
Dinas Nakersos	0,00	0,00
Bakesbangpol	0,00	0,00
BPBD	0,00	0,00
DPRD	0,00	0,00
Kepala Daerah/Wakil	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	0,00	0,00
Bagian Hukum	0,00	0,00
Bagian Adbang	0,00	0,00
Bagian Pereksos	0,00	0,00
Bagian Organisasi	0,00	0,00
Bagian Umum	0,00	0,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Humas Protokol	0,00	0,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
BPKAD	0,00	0,00
Inspektorat	0,00	0,00
Kec Kartoharjo	0,00	0,00
Kec Taman	0,00	0,00
Kec Manguharjo	0,00	0,00
BKD	0,00	0,00
KPPT	0,00	0,00
Dipenda	0,00	0,00
BPKAD (SKPKD)	0,00	0,00
Kantor Satpol PP	0,00	0,00
BPKM, KB & Ketan	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00
Dinas Perindagkoppar	0,00	0,00
Dinas Pasar	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**

10.3. 3. Lain-lain

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Lain-lain	**(32.459.140.127,30)**	**420.972.631.569,24**

Jumlah tersebut merupakan jumlah perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi perubahan ekuitas secara langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Perincian perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, koreksi ekuitas yang berasal dari lain-lain yang mempengaruhi secara langsung sampai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini.

Koreksi Lain-Lain	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dinas Dikmudora	8.434.855.093,21	1.974.135.126,18
Perpustakaan & arda	(46.863.541,00)	(42.525.996,87)
Dinas Kesehatan	1.211.726.164,33	1.808.205.099,99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RSUD	(674.297.690,49)	264.605.035,93
Dinas PU	(26.614.825.091,83)	305.753.339.793,69
BAPPEDA	(103.129.775,00)	2,09
Dinas Perhubungan	(223.806.785,00)	(529.498.019,79)
Dinas Perumahan dan Pemukiman	0,00	0,00
Kantor LH	17.823.258.906,18	102.219.010,82
Dispendukcapil	(67.507.283,00)	(27.073.090,68)
Dinas Nakersos	(448.214.602,91)	(410.586.637,08)
Bakesbangpol	(465.902.326,00)	(4,75)
BPBD	(2.967.697.694,00)	(86.108.231,41)
DPRD	0,00	0,00
Kepala Daerah/Wakil	0,00	0,00
Bagian Pemerintahan	(47.604.004,00)	(0,57)
Bagian Hukum	(3.938.750,00)	(0,14)
Bagian Adbang	(11.844.999,00)	0,00
Bagian Pereksos	3.080.000,00	0,00
Bagian Organisasi	(1.222.613.756,60)	(14.714.039,89)
Bagian Umum	(570.261.774,69)	(117.866.329,43)
Dinas Infokom	91.165.486,00	0,00
Sekretariat DPRD	(648.900.901,00)	2.109.998,45
BPKAD	2.603.410.288,50	101.059.354.306,56
Inspektorat	3.080.014,00	1.936.005,25
Kec Kartoharjo	899.479.591,05	3.273.279.211,13
Kec Taman	4.398.441.395,42	421.876.343,50
Kec Manguharjo	1.596.391.299,39	582.247.642,46
BKD	(15.143.861,33)	17.207.383,67
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi	18.680.383.765,84	657.997,08
Bapenda	(1.212.759.145,84)	2,53
BPKAD (SKPKD)	(39.218.229.504.77)	7.396.004.163,54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dinas Satpol PP	4.289.797.028,00	(26.054.999,00)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	(18.589.937.120,76)	2.152.598.999,66
Dinas Pertanian	10.874.439,00	(2.608.069.082,36)
Dinas Perdagangan	648.395.009,00	25.351.878,68
Dinas Budparpora	0,00	0,00
Total	**(32.459.140.127,30)**	**420.972.631.569,24**

10.4. Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas akhir	**2.387.843.473.171,51**	**2.351.321.386.078,12**

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas akhir milik Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. Ekuitas akhir diperoleh dari hasil penjumlahan saldo awal ditambah surplus (defisit) LO, dan memperhitungkan dampak kumulatif sebagai akibat dari perubahan kebijakan akuntansi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB
11

INFORMASI NON KEUANGAN

11.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA MADIUN

11.1.1 Keadaan Geografis

Kota Madiun secara geografis memiliki luas wilayah 33,23 km^2 dan terletak pada koordinat 111^0 sampai 112^0 Bujur Timur dan 7^0 sampai 8^0 Lintang Selatan, yang secara administratif terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Sedangkan secara administratif, Kota Madiun dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun ;
b. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun ;
c. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ;
d. Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Kota Madiun merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 63 M di atas permukaan air laut. Daerah kota dilintasi Kali Madiun yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Ngawi dan selanjutnya bermuara ke Laut Jawa. Kali Madiun membelah Kota Madiun menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kota Bagian Timur 82% dan Kota Bagian Barat 18%.

11.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Madiun dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan tetapi tetap menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun tahun 2012 mencapai 172.421 jiwa terdiri atas 83.192 penduduk laki-laki dan 89.229 penduduk perempuan. Sedangkan, rata-rata kepadatan penduduk/Km^2 di Kota Madiun sebesar 5.189 jiwa/km^2.

Kecamatan Taman adalah kecamatan paling padat. Sebanyak 73.286 penduduk mendiami wilayah Kecamatan Taman yang seluas 12,46 km^2, sehingga kepadatannya 5.882 penduduk/km^2.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah penduduk yang tinggal di dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 49.812 jiwa dan 49.323 jiwa. Dengan luas wilayah masing-masing 10,04 km² dan 10,73 km², maka kepadatan penduduk kedua kecamatan tersebut adalah 4.961 dan 4.597 penduduk/ km².

11.1.3 Potensi Unggulan Daerah

Kota Madiun relatif tidak mempunyai sumber daya alam yang langsung dapat dikelola dan menjadi potensi daerah sebagai modal peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang. Namun secara historis dan geografis, Kota Madiun mempunyai posisi yang strategis sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) untuk Jawa Timur Bagian Barat.

Guna menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki, Kota Madiun sejak tahun 2001 telah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur kota secara berkesinambungan sesuai dengan prioritas dan kemampuan Daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan pembangunan dibidang perdagangan jasa, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang perhubungan, bidang industri dan pariwisata, serta bidang aparatur pemerintah. Dengan harapan mendukung peran Kota Madiun sebagai Pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dan dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

11.2 ORGANISASI

Pemerintah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2014 - 2019 terdiri dari:
Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2014 - 2019 terdiri dari:

a. Pimpinan Eksekutif
   1. Walikota Madiun : H. Bambang Irianto, SH, MM
   2. Wakil Walikota Madiun : Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum
b. Pimpinan Legislatif
   1. Ketua DPRD : Drs.Istono, M.Pd
   2. Wakil Ketua DPRD : Didik Yulianto
   3. Wakil Ketua DPRD : Sukoyo

Unsur Pimpinan Pemerintah Kota Madiun periode 2014 – 2019 pada tahun 2017 terjadi perubahan kepemimpinan untuk periode 2017 – 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.35-3514 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri Dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Negeri Nomor:132.35-8146 Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

a. Pimpinan Eksekutif
   1. Walikota Madiun : H.Sugeng Rismiyanto, SH, M.Hum
   2. Wakil Walikota Madiun : Drs. H. Armaya

Sedangkan untuk Pimpinan Legislatif Kota Madiun periode 2014 – 2019 pada tahun 2017 terjadi kekosongan wakil ketua DPRD karena meninggal dunia dan sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilakukan pergantian.

b. Pimpinan Legislatif
   1. Ketua DPRD : Drs.Istono, M.Pd
   2. Wakil Ketua DPRD : Didik Yulianto
   3. Wakil Ketua DPRD : (Almarhum) Sukoyo

Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Walikota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tersebut yaitu:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
3. Dinas Kesehatan
4. Rumah Sakit Umum Daerah
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. BAPPEDA
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9. Kantor Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
12. Badan Kesbang Linmas
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. DPRD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. Walikota dan Wakil Walikota
17. Sekretariat DPRD
18. Sekretariat Daerah
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20. Inspektorat
21. Kecamatan Kartoharjo
22. Kecamatan Taman
23. Kecamatan Manguharjo
24. Badan Kepegawaian Daerah
25. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
26. Dinas Pendapatan Daerah
27. Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan
28. Dinas Pertanian
29. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
30. Dinas Pasar

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan ;
2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
9. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi ;
10. Dinas Lingkungan Hidup ;
11. Dinas Perhubungan ;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
13. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro ;
14. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga ;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
16. Walikota/Wakil Walikota ;
17. DPRD ;
18. Sekretariat Daerah ;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Sekretariat DPRD ;
20. Badan Kepegawaian Daerah ;
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
22. Badan Pendapatan Daerah ;
23. Inspektorat ;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
25. Kecamatan Kartoharjo ;
26. Kecamatan Manguharjo ;
27. Kecamatan Taman ;
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
29. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
30. Dinas Perdagangan.

Pada tanggal 28 Desember 2017, Pemerintah Kota Madiun telah melantik seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk mengisi jabatan-jabatan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR :36 TAHUN 2018
TANGGAL :21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun pengakuan piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1.	Piutang Pajak	2017	3.769.953.866,00	76.015.447.698,37	75.224.831.585,44	4.560.569.978,93
2.	Piutang Retribusi	2017	1.504.679.991,00	1.640.253.283,00	734.980.720,00	2.409.952.554,00
3.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2017	541.181.314,00	-	110.091.218,00	431.090.096,00
4.	Piutang Lain - Lain	2017	31.083.765.577,79	35.794.870.187,70	30.992.773.277,79	35.885.862.487,70
Jumlah			36.899.580.748,79	113.450.571.169,07	107.062.676.801,23	43.287.475.116,63

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian	Tahun pengakuan piutang	Penyisihan Piutang
1	2	3	4
1.	Piutang Pajak	2017	(497.747.971,75)
2.	Piutang Retribusi	2017	(479.420.814,33)
3.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2017	(403.444.851,88)
4.	Piutang Lain - Lain	2017	(215.545.048,00)
	Jumlah		(1.380.613.637,96)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Klasifikasi Umur Piutang	Tahun pengakuan piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo per 31 desember 2017	Penyisihan	Nilai bersih piutang dana bergulir
1	2	3						4
1.	Investasi dana Bergulir	2017	21.282.514.160,06	1.262.126.991,10	8.918.970,80	22.535.722.180,36	(4.282.742.678,21)	18.252.979.502,15
Jumlah			**21.282.514.160,06**	**1.262.126.991,10**	**8.918.970,80**	**22.535.722.180,36**	**(4.282.742.678,21)**	**18.252.979.502,15**

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XI : PERTURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

KOTA MADIUN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		PDAM	PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL	Penyertaan Modal	47.449.044.691,80	47.449.044.691,80	-	47.449.044.691,80	-			47.449.044.691,80
2		PD Bank Pasar		Penyertaan Modal	41.485.835.393,00	41.485.835.393,00		41.485.835.393,00	-			41.485.835.393,00
3		PD Aneka Usaha		Penyertaan Modal	2.473.053.364,00	2.473.053.364,00		2.473.053.364,00	-			2.473.053.364,00
4		Bank Jatim		Saham	33.516.106.750,00	33.516.106.750,00		33.516.106.750,00	-			33.516.106.750,00
	JUMLAH				**124.924.040.198,80**	**124.924.040.198,80**	-	**124.924.040.198,80**	-	-	-	**124.924.040.198,80**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

(Dalam Rupiah)

No.	U r a i a n	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	746.929.754.829,00	5.469.858.300,00	45.630.696.000,00	706.768.917.129,00
2	Peralatan dan Mesin	392.197.738.239,97	105.925.829.106,15	72.527.586.022,62	425.595.981.323,50
3	Gedung dan Bangunan	715.435.055.660,95	65.265.675.452,75	133.289.070.236,67	647.411.660.877,03
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	705.169.609.291,00	103.891.585.544,00	8.482.611.077,95	800.578.583.757,05
5	Aset Tetap Lainnya	4.770.699.355,85	3.521.781.410,40	3.485.739.173,07	4.806.741.593,18
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.425.929.857,00	2.952.853.000,00	56.400.000,00	48.322.382.857,00
		2.609.928.787.233,77	**287.027.582.813,30**	**263.472.102.510,31**	**2.633.484.267.536,76**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP LAINNYA	TOTAL ASET TETAP
1	2	3	4	5	6	5	6 = 3 + 4 - 5
1	ASET TETAP	706.768.917.129,00	425.595.976.323,50	647.411.660.877,03	800.578.583.757,05	4.806.741.593,18	2.585.161.879.679,76
		706.768.917.129,00	**425.595.976.323,50**	**647.411.660.877,03**	**800.578.583.757,05**	**4.806.741.593,18**	**2.585.161.879.679,76**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2017

(Dalam Rupiah)

No.	U r a i a n	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.425.929.857,00	2.952.853.000,00	56.400.000,00	48.322.382.857,00
		45.425.929.857,00	**2.952.853.000,00**	**56.400.000,00**	**48.322.382.857,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Aset Lainnya	99.086.047.699,66	-	-	99.086.047.700
	Jumlah	**99.086.047.699,66**	-	-	**99.086.047.699,66**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN

DAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo akhir	Sisa dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nihil						
Jumlah								

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2		3	4	5
	Nihil				-
			JUMLAH	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 36TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2		3	4	5
	JUMLAH				

Nihil

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi sampai dengan akhir Tahun n	Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun berikutnya
			Realisasi Tahun n-2	Realisasi Tahun n-1	Realisasi Tahun n		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nihil					
JUMLAH			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 36 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA MADIUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA TAMAN SARI - KOTA MADIUN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Certified Public Accountants

BANG SURABAYA 1
Nomor Izin Usaha KAP : KEP-444/KM.1/2009
nyar Rejo IV / 4 Surabaya 60118, Indonesia
e : (031) 5939787 Fax : (031) 5945616 ; E-mail kaphadori@yahoo.co.id
Sugiarto Adi & Rekan is a member of International A world - wide organization of accounting firms and business advisers

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

	Halaman
ERNYATAAN MANAJEMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN PDAM IRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN	i
APORAN AUDITOR INDEPENDEN	1
APORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN :	
Neraca tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	2
Laporan Laba-Rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	3
Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	4
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016	5
ATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN

JL. Sulawesi No. 18 TELP. (0351) 464205, 458923, 456442 FAX. (0351) 454958
E-mail : pdamkotamadiun@yahoo.co.id, website : www.pdamkotamadiun.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. Bambang Irianto
Alamat Kantor	: Jl. Sulawesi No. 18, Madiun
Alamat Rumah (Sesuai KTP)	: Jl. Gubuk Manis No. 12, Madiun
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Agung Santoso, SE
Alamat Kantor	: Jl. Sulawesi No. 18, Madiun
Alamat Rumah (Sesuai KTP)	: Jl. Bayangkara RT 10 / RW III, Madiun
Jabatan	: Direktur Administrasi dan Keuangan
Nama	: Suwarso
Alamat Kantor	: Jl. Sulawesi No. 18, Madiun
Alamat Rumah (Sesuai KTP)	: Jl. Tanjung Manis XII/7, Madiun
Jabatan	: Direktur Teknik

atakan bahwa:

Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun;

Laporan keuangan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ;

a. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun

dan pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, 24 Pebruari 2018

Direktur Utama	Direirektur Teknik	Direktur Administrasi Dan Keuangan
PDAM Tirta Taman Sari	PDAM Tirta Taman Sari	PDAM Tirta Taman Sari
Kota Madiun	Kota Madiun	Kota Madiun
Drs. Bambang Irianto	Suwarso, ST, SH	Agung Santoso, SE
NPP. 62 00 82	NPP. 64 00 40	NPP. 63 00 87

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

oran No : 17/LAI-PDAM-TTS/Sby1/II/2018

negang Saham, Badan Pengawas dan Direksi
usahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari
a Madiun

ni telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Kota Madiun tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan itas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu tisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

ggung jawab manajemen atas laporan keuangan

najemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini uai dengan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) di onesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manjemen untuk mungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, k yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

ggung jawab auditor

ggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu openi atas laporan keuangan ini dasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang tapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar tersebut mengharuskan kami untuk matuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh akinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian terial.

tu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-ka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada timbangan auditor,termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam oran keuangan,baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam akukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang van dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur it yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas fektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas patan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat manajemen, serta pengevaluasian atas keseluruhan penyajian laporan keuangan.

BANG SURABAYA 1 Nomor Izin Usaha KAP : KEP-444/KM.1/2009
nyar Rejo IV / 4 Surabaya 60118, Indonesia
e : (031) 5939787 Fax : (031) 5945616 ; E-mail kaphadori@yahoo.co.id
iarto Adi & Rekan is a member of International A world - wide organization of accounting firms and business advisers.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Certified Public Accountants

ni yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk nyediakan basis bagi opini audit kami.

ni
nurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal g material, Neraca perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari Kota Madiun ggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir a tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas lik di Indonesia.

atuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, i lakukan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh an Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan laporannya diterbitkan secara terpisah gan nomor 17A/Kep-PDAM-TTS/Sby1/2018 dan 17B/Kep-PDAM-TTS/Sby1/2018 tanggal 24 ruari 2018.

HADORI SUGIARTO ADI &REKAN

iharto,SE,MSA,Ak,CA,CPA
Akuntan Publik No. AP. 1237

baya, 24 Februari 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

ASET	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
SET LANCAR			
Kas dan setara kas	2b,3	21,197,714,015	19,562,392,855
Piutang Usaha Neto	2d,4		
- Pihak Berelasi		0	0
- Pihak Ketiga		3,845,649,516	3,901,363,139
Piutang Non Usaha	2d,5		
- Pihak Berelasi		0	15,152,200
- Pihak Ketiga		0	0
Persediaan	2g,6	995,761,518	572,949,895
Pajak Dibayar Dimuka	2m,7a	0	0
Jumlah Aset Lancar		26,039,125,049	24,051,858,089
SET TIDAK LANCAR	2j,8		
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 37.257.074.740 pada tahun 2017 dan Rp. 34.048.578.066 pada tahun 2016		27,064,001,024	26,986,098,543
Aset Dalam Penyelesaian	9	7,472,050	5,264,600
Aset Tidak Berfungsi	10	3,354,000	4,811,000
Jumlah Aset Tidak Lancar		27,074,827,074	26,996,174,143
JUMLAH ASET		53,113,952,123	51,048,032,231

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
NERACA (LANJUTAN)
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

KEWAJIBAN & EKUITAS	Catatan	2017 Rp	2016 Rp
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	11	0	0
Hutang pajak	2m,7b	398,687,698	438,928,002
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	27,451,275	54,292,585
Pendapatan Diterima Dimuka	13	68,208,400	111,458,400
Jumlah Kewajiban Lancar		494,347,373	604,678,987
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Dana Cadangan	14	5,170,560,063	5,012,319,227
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		5,170,560,063	5,012,319,227
EKUITAS	15		
Modal Dasar		200,099,149	200,099,149
Penyertaan Pemerintah Kota Madiun		22,549,194,500	22,549,194,500
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat		8,094,640,663	6,461,478,363
Penyertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		168,346,000	1,801,508,300
Saldo Cadangan Dana Umum		6,126,570,319	4,536,524,461
Saldo Laba		10,310,194,057	9,882,229,244
Jumlah Ekuitas		47,449,044,687	45,431,034,017
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**53,113,952,123**	**51,048,032,231**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN LABA-RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	Catatan	2017	2016
		Rp	Rp
Pendapatan Usaha	2l,16	36,056,328,070	35,390,040,991
Beban Langsung Usaha	2l,17	9,799,021,184	10,021,216,403
Laba Kotor Usaha		26,257,306,886	25,368,824,588
Beban Usaha	2l,18		
- Biaya Administrasi dan Umum		14,640,912,435	13,751,549,114
Laba Operasional		11,616,394,451	11,617,275,474
Pendapatan (Biaya) Lain - lain			
- Pendapatan Lain - lain	2l,19	1,710,575,065	1,234,373,005
- Biaya Lain - lain	2l,20	14,828,190	14,585,332
Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-lain Neto		1,695,746,875	1,219,787,673
Laba Bersih Sebelum Pajak		13,312,141,326	12,837,063,146
Taksiran Pajak Penghasilan	2m,7c		
- Pajak Penghasilan		3,001,947,269	2,954,833,902
Laba Bersih Setelah Pajak		10,310,194,057	9,882,229,244

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	Catatan	Modal Dasar	Penyertaan Pemerintah Kota Madiun	Penyertaan Pemerintah Pusat	Penyertaan Pemerintah Propinsi Jatim	Cadangan Dana Umum	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal (1 Januari 2016)	15	200,099,149	22,549,194,500	6,461,478,363	1,801,508,300	3,212,174,205	6,621,751,285	40,846,205,799
Laba yang dibagikan tahun 2016 atas laba tahun 2015								
- APBD 55 %		-	-	-	-	-	(3,641,963,206)	(3,641,963,206)
- Cadangan Dana Umum 20 %		-	-	-	-	1,324,350,257	(1,324,350,257)	0
- Dana Sosial & Pendidikan 5 %		-	-	-	-	-	(331,087,564)	(331,087,564)
- Dana Pensiun dan Sokongan 10 %		-	-	-	-	-	(662,175,128)	(662,175,128)
- Jasa Produksi 10 %		-	-	-	-	-	(662,175,128)	(662,175,128)
Laba Rugi Tahun Berjalan		-	-	-	-	-	9,882,229,244	9,882,229,244
SALDO 31 DESEMBER 2016		200,099,149	22,549,194,500	6,461,478,363	1,801,508,300	4,536,524,462	9,882,229,246	45,431,034,017
Laba yang dibagikan tahun 2017 atas laba tahun 2016								
- APBD 55 %		-	-	-	-	-	(5,435,226,084)	(5,435,226,084)
- Cadangan Dana Umum 20 %		-	-	-	-	1,976,445,849	(1,976,445,849)	0
- Dana Sosial & Pendidikan 5 %		-	-	-	-	-	(494,111,462)	(494,111,462)
- Dana Pensiun dan Sokongan 10 %		-	-	-	-	-	(988,222,924)	(988,222,924)
- Jasa Produksi 10 %		-	-	-	-	-	(988,222,924)	(988,222,924)
Cadangan dana umum yang dikompensasikan ke sambungan pelanggan gratis						(386,399,991)		(386,399,991)
Koreksi penyertaan Modal				1,633,162,300	(1,633,162,300)			
Laba Rugi Tahun Berjalan		-	-	-	-	-	10,310,194,057	10,310,194,057
SALDO 31 DESEMBER 2017		200,099,149	22,549,194,500	8,094,640,663	168,346,000	6,126,570,320	10,310,194,059	47,449,044,687

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	2017 Rp	2016 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
- Laba Bersih Setelah Pajak	10,310,194,057	9,882,229,244
- Penyesuaian :		
- Penyisihan Piutang Usaha	20,235,883	38,600,450
- Penyusutan Aset Tetap	2,768,090,880	3,208,496,674
Laba (Rugi) Sebelum Perubahan Modal Kerja	13,098,520,820	13,129,326,368
- Perubahan Modal Kerja :		
- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Usaha	35,477,740	(532,426,730)
- (Kenaikan) / Penurunan Piutang Non Usaha	15,152,200	90,651,346
- (Kenaikan) / Penurunan Persediaan	(422,811,623)	(1,611,866)
- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Usaha	0	0
- Kenaikan / (Penurunan) Hutang Pajak	(40,240,304)	(192,350,840)
- Kenaikan / (Penurunan) By. Yang Masih Harus Dibayar	(26,841,310)	23,548,220
- Kenaikan / (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	(43,250,000)	(26,750,000)
Kas dihasilkan Dari Operasi	(482,513,297)	(638,939,870)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Jumlah I)	**12,616,007,523**	**12,490,386,499**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- (Kenaikan) / Penurunan Aset Tetap	(2,845,993,365)	(2,967,611,767)
- (Kenaikan) / Penurunan Aset Tetap Dalam Pelaksanaan	(750,450)	6,703,150
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Jumlah II)	**(2,846,743,815)**	**(2,960,908,617)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Kenaikan / (Penurunan) Dana Cadangan	158,240,836	968,262,693
- Kenaikan / (Penurunan) Laba ditahan	(8,292,183,387)	(5,297,401,029)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (Jumlah III)	**(8,133,942,551)**	**(4,329,138,336)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas (Jumlah I+II+III)	1,635,321,158	5,200,339,546
Kas dan Setara Kas Awal Periode	19,562,392,855	14,362,053,307
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	21,197,714,015	19,562,392,855

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

U M U M

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 Tahun 1977, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No.13 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Kota Madiun No.17 Tahun 2001 tanggal 15 September 2001. Terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No.10 tahun 2011.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.501/219/2014 tanggal 1 September 2014 bertambah nama dan ganti logo yang semula Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun menjalankan fungsi - fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan umum / jasa
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum
3. Memupuk pendapatan

c. Susunan Badan Pengawas dan Direksi

Struktur organisasi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 21 tahun 2002 tanggal 9 September 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun terdiri dari Direksi,Kepala Bagian,Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Badan Pengawas dan Dewan Direksi sebagai berikut :

Badan Pengawas :

Ketua	:	R. Andriono Waskito Murti, SH Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.821-401.014/265/2010 tertanggal 28 Oktober 2010. Masa Bakti 1 Nopember 2010 sampai dengan 31 Maret 2012.Dan telah diperbaharui sesuai Surat Keputusan Wali Kota Madiun No.539-401.205/54/2012 tanggal 30 Maret 2012 masa jabatannya diperpanjang 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015, dan diangkat kembali dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 539-401.14/58/2015 tertanggal 01 April 2015, dengan masa jabatan periode 01 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2018
Sekretaris	:	M Thohir Rochani, BSc Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.014/40/2015 tertanggal 27 Februari 2015, masa Bakti 1 Maret 2015 sampai dengan 28 Februari 2018.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Anggota	:	Bambang Sulis Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.014/41/2015 tertanggal 09 Maret 2015, selama tiga tahun terhitung mulai tanggal 01 April 2015 s/d 31 Maret 2018.

Dalam menjalankan tugas, Badan Pengawas dibantu Sekretaris yang ditetapkan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun	:	Budi Wibowo,SH Pengangkatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Daerah Kota Madiun, sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Madiun No.3/DP/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014. Masa Bakti 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017. Sesuai surat keputusan Dewan Pengawas No.03/DP/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017mengangkat kembali dengan masa jabatan mulai
Kepala bagian umum PDAM Kota Madiun	:	Siswanto, SE Pengangkatan Kepala Bagian Umum PDAM TIRTA TAMAN SARI sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Madiun No.2/DP/X/2014 tertanggal 11 Oktober 2014. Masa Bakti 11 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2017.Sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas No.02/DP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 mengangkat kembali dengan masa jabatan mulai tanggal 11 Oktober 2017 s/d 10 Oktober
Dewan Direksi :		
Direktur Utama	:	Drs. Bambang Irianto Pengangkatan Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.205/01/K/2013 tertanggal 4 Januari 2013. Masa Bakti 4 Januari 2014 sampai dengan 4 Januari 2017, dan diangkat kembali sesuai surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.023/2/K/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan masa jabatan Direksi selama 4 (emapat) tahun ,mulai 6 Januari 2017 sampai dengan 6 Januari 2020.
Direktur Administrasi dan Keuangan	:	Agung Santoso,SE Pengangkatan Direktur Umum sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.205/02/K/2013 tertanggal 4 Januari 2013. Masa Bakti 4 Januari 2013 sampai dengan 4 Januari 2017, dan diangkat kembali sesuai surat keputusan Walikota Madiun No.539-401.023/3/K/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan masa jabatan Direksi selama 4 (emapat) tahun mulai 6 Januari 2017 sampai dengan 6 Januari 2020.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Direktur Teknik	:	Suwarso, ST, SH Pengangkatan Direktur Teknik sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.539-401.025/30/K/2011 tertanggal 2 Mei 2011. Masa Bakti Mei 2011 sampai dengan Mei 2015. Dan telah di perbaharui sesuai Keputusan Walikota Madiun No.539-401.205/19/K/2015 tertanggal 30 April 2015, dengan masa bakti 2 Mei 2015 samapai dengan 2 Mei 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan mempunyai jumlah karyawan masing-masing sebanyak 138 orang dan 150 orang.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun buku 2016 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan angka komparatif tahun 2015 dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode tidak langsung. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan investasi jangka pendek sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu - waktu bisa di cairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya".

c. Transaksi - transaksi dengan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak - pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa sebagaimana diatur SAK ETAP Bab 28, "Pengungkapan pihak - pihak yang mempunyai hubungan istimewa".
Semua transaksi - transaksi signifikan dengan pihak - pihak tertentu sebagai transaksi hubungan istimewa dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau berbeda apabila dilakukan dengan pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

d. Piutang Usaha

Piutang Disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman dan data historis selama tiga tahun terakhir, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang tak tertagih sebagai berikut kecuali untuk pelanggan HANKAM dan PEMDA :

Umur Piutang 1 - 3 bulan	:	0 %
Umur Piutang 4 - 6 bulan	:	30 %
Umur Piutang 7 - 12 bulan	:	50 %
Umur Piutang 13 - 24 bulan	:	75 %
Umur Piutang diatas 24 bulan	:	100 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak.
Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termyn.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang telah disahkan oleh pemberi kerja atau yang mewakilinya yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara progress phisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal neraca.

g. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode First In Fisrt Out (FIFO). Pencatatan persediaan dilakukan dengan Phsycal inventory method.

h. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

i. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi perusahaan.

Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehannya. Setelah perolehan awal properti investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan properti investasi meliputi harga pembelian dan pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung.

j. Aset Tetap dan Penyusutan

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu harga beli termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Penyusutan aktiva tetap kelompok bangunan disusutkan berdasarkan persentase tetap dari nilai perolehan, sedangkan aktiva tetap lainnya disusutkan dengan persentase tetap dari nilai buku sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Besarnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan atas jenisnya adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Tarif	Metode Penyusutan
Instalasi Sumber Air	5 % / tahun	Garis Lurus /Straight - Line Method
Instalasi Perpompaan :		
Bangunan Instalasi Pompa	5 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Instalasi Pompa Lainnya	10 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Instalasi Pengolahan :		
Bangunan Instalasi Pengolahan	5 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Reservoair dan Tangki	5 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Alat Pengolahan Air	10 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Instalasi Transmisi dan Distribusi :		
Bangunan Reservoir dan Saluran Transmisi & Distribusi	5 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Pipa Dinas, Kran Umum,Saluran Air Pemadam Kebakaran dan saluran Transmisi dan Distribusi lainnya.	10 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Meter Air dan Instalasi Meter	10 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Instalasi Tertier & Accessories	25 % / tahun	Saldo Menurun / Declining Balance
Instalasi Tertier Ex Pelanggan	25 % / tahun	Saldo Menurun / Declining Balance
Instalasi Umum :		
Bangunan	5 % / tahun	Garis lurus /Straight - Line Method
Kendaraan Bermotor	50 % / tahun	Saldo Menurun / Declining Balance
Inventaris Kantor Golongan I	50 % / tahun	Saldo Menurun / Declining Balance
Inventaris Kantor Golongan II	25 % / tahun	Saldo Menurun / Declining Balance

k. **Sewa**

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Seluruh pendapatan baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diukur berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Beban diakui pada saat terjadinya

m. **Pajak Penghasilan**

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terhutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

n. **Kewajiban Imbalan Kerja**

PDAM Kota Madiun dalam memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan selain memberikan imbalan yang bersifat rutin berupa gaji dan jaminan kesejahteraan lain, juga ikut program baik yang diwajibkan perundang - undangan juga ikut program lainnya dengan pihak ketiga. Imbalan Kerja yang diberikan PDAM Kota Madiun kepada karyawan terdiri dari :

Pada saat masih bekerja, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun selain memberikan gaji dan kesejahteraan juga mengikutkan program Jaminan Sosial dan program Jaminan Kesehatan yang bersifat wajib diantaranya :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- PT. JAMSOSTEK program yang dikuti program jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan premi bulanannya ditanggung PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun 4,89% sedangkan ditanggung karyawan 2%.
- BPJS Kesehatan premi per bulan sebesar 4,5 % dari gaji pokok ditambah tunjangan tetap per orang per bulan , masing masing ditanggung perusahaan sebesar 4 % sedangkan karyawan sebesar 0,5 % dan yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan adalah yang bersangkutan,suami atau isteri dan anak maksimum 3 (tiga) anak.

Imbalan Pasca Kerja, PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sesuai dengan kemampuan keuangan dalam rangka penyelesaian imbalan pasca kerja pada saat karyawan pensiun, menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan PT. Asuransi Jiwasraya sesuai perjanjian kerjasama Nomor : 842.1/401.401/100/2005 tanggal 22 Desember 2005 berupa :

- Program Iuran Pasti, dengan premi 15% dari Phdp ditanggung Perusahaan dan 5% dari Phdp ditanggung karyawan.
- Program Asuransi Tabungan Hari Tua Kumpulan, yang preminya per triwulan sebesar Rp. 53.267.237 ditanggung perusahaan semua.

Tambahan manfaat pensiun sesuai keputusan Pendiri Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi) No. 842.1/KEP.48-PDAM/2014 tanggal 1 Desember 2014 tercatat sebagai mitra pendiri dengan nomor regester 351 dengan premi sebesar 12,10% dari PHdp ditanggung perusahaan dan 5 % Phdp ditanggung karyawan.

o. Pengeluaran Barang Modal dan Biaya

Batasan pengeluaran biaya yang diklasifikasikan atau diperlalukan sebagai pengeluaran barang modal adalah sebagai berikut :

- Barang modal yang diperlukan untuk digunakan dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
- Mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan batasan jumlah diatas Rp.200.000, sedangkan pengeluaran untuk penggantian komponen mesin / instalasi yang bersifat pemeliharaan rutin dan tidak menambah umur ekonomis diperlakukan sebagai biaya.

p. Pembagian Laba

Berdasarkan Perda Kodya Dati II Madiun No.13 Tahun 1997 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, kemudian diubah dengan Perda Nomor 17 Tahun 2001 dan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bab XIV pasal 70 pembagian laba setelah diaudit dan dikurangi pajak dihitung sebagai berikut :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	55%
- Cadangan Umum	20%
- Dana Sosial dan Pendidikan	5%
- Dana Pensiun dan Sokongan	10%
- Jasa Produksi	10%

KAS DAN SETARA KAS

Saldo Kas dan setara kas tahun 2017 dan 2016 terdiri dari :

	2017		2016
Kas :			
Kas Kecil	Rp 5,000,000	Rp	5,000,000
Kas	Rp 171,716,822	Rp	74,861,707
Jumlah	Rp 176,716,822	Rp	79,861,707

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bank :				
- Bank Jatim	Rp	2,851,748,803	Rp	1,335,148,263
- Simpeda Bank Jatim	Rp	445,057,502	Rp	285,573,323
- Tabanas Bank Mandiri	Rp	0	Rp	0
- Tabungan PD BPR Bank Daerah	Rp	214,362,013	Rp	555,166,868
- Tabanas Bank Rakyat Indonesia	Rp	61,486,682	Rp	210,408,427
- Tabungan BTPN	Rp	348,342,193	Rp	1,096,234,267
Jumlah	Rp	3,920,997,193	Rp	3,482,531,148
Setara Kas				
Deposito berjangka :				
Deposito PD BPR Bank Daerah Madiun	Rp	5,400,000,000	Rp	6,300,000,000
Deposito Bank Mandiri	Rp	600,000,000	Rp	1,600,000,000
Deposito Bank Rakyat Indonesia	Rp	8,000,000,000	Rp	5,000,000,000
Deposito Bank Jatim	Rp	3,100,000,000	Rp	3,100,000,000
Jumlah	Rp	17,100,000,000	Rp	16,000,000,000
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp	**21,197,714,015**	Rp	**19,562,392,855**

Deposito Bank Pasar Kota Madiun sebesar Rp 5.400.000.000,- merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu kurang/sama dengan tiga bulan sesuai dengan sertifikat No. 001156 tanggal 16 April 2014 sebesar Rp 600.000.000,- No. 001232 tanggal 5 Agustus 2014 Sebesar Rp 400.000.000,00,- No. 001 235 tanggal 6 Agustus 2014 sebesar Rp 400.000.000,- No. 001271 tanggal 11 September 2014 sebesar Rp.400.000.000,- No. 001272 tanggal 12 September 2014 sebesar Rp 400.000.000,- No. 001304 tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp. 600.000.000,00.- sertifikat No. 001457 tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp 600.000.000,- sertifikat No. 001735 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- dan sertifikat No. 001759 tanggal 6 September 2016 sebesar Rp 1.000.000.000.,-
Deposito Bank Mandiri Cabang Madiun sebesar Rp 600.000.000,- merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka watu kurang/sama dengan tiga bulan sesuai dengan sertifikat No. AD 849676 tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp 600.000.000,-

Deposito Bank Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 8.000.000.000,- merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka watu kurang/sama dengan tiga bulan sebanyak 7 (lima) lembar masing masing senilai Rp. 1.000.000.000 dengan nomor sertifikat 387401000994401 tanggal 31 Mei 2016, No 387401001034408 tanggal 1 September 2016, No.387401001095404 tanggal 20 Januari 2017, No 387401001127405 tanggal 16 Maret 2017, No. 387401001046405 tanggal 11 September 2017, no 635701000456400 tanggal 5 Oktober 2017, no 388001901268402 serta sertifikat no 387401001185403 tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp.500.000.000, sertifikat no 387401001191404 tanggal 24 Agustus 2017 Rp.500.000.000,-

Deposito Bank Jatim Kota Madiun sebesar Rp 3.100.000.000,- merupakan investasi dalam bentuk deposito dengan jangka waktu kurang /sama dengan tiga bulan sesuai dengan sertifikat No. 167992 tanggal 7 Mei 2014 Sebesar Rp 1.850.000.000 - No. 168027 Tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp

Ingkat suku bunga deposito pada tahun 2017 dan 2016 masing masing sebesar 8 % dan 6,75 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

Pengembangan usaha air kemasan dengan merek aeta PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk sementara tidak berproduksi karena mempunyai persamaan dari segi fonetik dengan merek heta mulik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor IDM000303743 untuk barang sejenis berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek dan penolakan menggunakan air kemasasan merek aeta tersebut, sesuai keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PIUTANG USAHA

Saldo Piutang usaha tahun 2017 dan 2016 terdiri dari :

		2017		2016
Pihak berelasi	Rp	0	Rp	0
Pihak ketiga :				
- Piutang Air	Rp	3,859,697,760	Rp	3,937,560,240
- Piutang Non Air	Rp	14,489,100	Rp	8,079,000
- Piutang Ragu - ragu	Rp	145,394,080	Rp	109,419,440
Jumlah Piutang Usaha	Rp	4,019,580,940	Rp	4,055,058,680
- Cadangan Penyisihan Piutang	Rp	(173,931,424)	Rp	(153,695,541)
Jumlah Piutang (Neto)	Rp	3,845,649,516	Rp	3,901,363,139

Perhitungan penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
		Rp	Rp
1 - 3 bulan	0 %	3,713,370,040	0
4 - 6 bulan	30 %	77,612,730	23,283,819
7 - 12 bulan	50 %	83,204,090	41,602,045
13 - 24 bulan	75 %	145,394,080	109,045,560
Diatas 24 bulan	100 %	0	0
Jumlah		4,019,580,940	173,931,424

Perhitungan penyisihan piutang usaha per 31 Desember 2016 sebagai berikut :

Umur Piutang	% Penyisihan	Piutang Usaha	Penyisihan Piutang
		Rp	Rp
1 - 3 bulan	0 %	3,779,325,690	0
4 - 6 bulan	30 %	57,629,070	17,288,721
7 - 12 bulan	50 %	108,684,480	54,342,240
13 - 24 bulan	75 %	109,419,440	82,064,580
Diatas 24 bulan	100 %	0	0
Jumlah		4,055,058,680	153,695,541

Mutasi penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut :

	2017	2016
	Rp	Rp
- Saldo Awal	153,695,541	110,028,139
- Penambahan	20,235,883	43,667,402
- Pengurangan	0	0
Jumlah	173,931,424	153,695,541

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

PIUTANG NON USAHA

Piutang lain - lain tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	2017	2016
	Rp	Rp
Pihak berelasi	0	15,152,200
Pihak ketiga	0	0
Jumlah	0	15,152,200

Piutang non usaha pihak berelasi pada tahun 2017 sudah tidak mempunyai piutang usaha dan sudah dilunasi pada tahun 2017.adalah untuk bantuan Modal Pinjaman ke Koperasi PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun yaitu KPRI Wahana Tirta Artha , sesuai perjanjian No. 900-401.501/09/2014 tanggal 4 Januari 2014, selama 3 tahun 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

PERSEDIAAN

Saldo Persediaan tahun 2017 dan 2016 terdiri dari :

	2017		2016	
- Alat Tulis Kantor	Rp	64,687,663	Rp	53,742,375
- Pipa dan Asesoris	Rp	306,825,228	Rp	357,907,040
- Water Mater	Rp	262,461,155	Rp	155,996,280
- Persediaan Suku Cadang	Rp	357,163,072	Rp	0
- Lain - lain	Rp	4,624,400	Rp	5,304,200
Jumlah	Rp	995,761,518	Rp	572,949,895

PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Dimuka
Saldo pajak dibayar dimuka tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017		2016	
- PPh Pasal 25	Rp	0	Rp	0
Jumlah	Rp	0	Rp	0

b. Hutang Pajak
Saldo hutang pajak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

	2017		2016	
- PPh Pasal 21	Rp	73,541,500	Rp	27,129,100
- PPh Pasal 23	Rp	0	Rp	0
- PPh Pasal 25	Rp	246,524,580	Rp	231,185,000
- PPh Pasal 29	Rp	43,652,309	Rp	180,613,902
- PPN	Rp	34,969,309	Rp	0
Jumlah	Rp	398,687,698	Rp	438,928,002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Pajak Penghasilan

		2017		2016
- Pajak Kini	Rp	3,001,947,269	Rp	2,954,833,902
Jumlah	Rp	3,001,947,269	Rp	2,954,833,902

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba-rugi komersial dengan laba-rugi fiskal adalah sebagai berikut :

		2017		2016
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp	13,312,141,326	Rp	12,837,063,146
Koreksi Fiskal Positif :				
Beban Pakaian Dinas	Rp	172,612,950	Rp	180,491,825
Beban Representatif	Rp	15,000,000	Rp	75,000,000
Biaya Penyisihan piutang	Rp	20,235,883	Rp	38,600,450
Beban Olah Raga	Rp	30,328,000	Rp	60,356,500
Beban Kesehatan	Rp	257,081,971	Rp	223,681,533
Sumbangan	Rp	89,034,500	Rp	68,558,900
Perpajakan	Rp	137,725,442	Rp	203,448,752
Jumlah Koreksi Fiskal Positif	Rp	722,018,746	Rp	850,137,960
Laba Setelah Koreksi Fiskal Positif	Rp	14,034,160,072	Rp	13,687,201,106
Koreksi Fiskal Negatif :				
Beban Penyusutan	Rp	349,159,654	Rp	214,713,723
Pendapatan Jasa Giro & Bunga Deposito	Rp	862,362,112	Rp	824,316,386
Jumlah Koreksi Fiskal Negatif	Rp	1,211,521,765	Rp	1,039,030,109
Laba Kena Pajak	Rp	12,822,638,307	Rp	12,648,170,997

Perhitungan PPh Badan Tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

- Pendapatan Kotor	Rp	37,766,903,135	Rp	36,624,413,996
- Laba Kena Pajak	Rp	12,822,638,307	Rp	12,648,170,997
- Penghasilan Kena Pajak Fasilitas (4,8 M : Pendapatan Kotor) x Laba Kena Pajak	Rp	1,629,698,460	Rp	1,657,670,776
- Penghasilan Kena Pajak Non Fasilitas (laba Kena Pajak- Penghasilan Kena Pajak Fasilitas)	Rp	11,192,939,847	Rp	10,990,500,221
- Pajak Terutang Fasilitas (50 % x 25 % x PKP Fasilitas)	Rp	203,712,307	Rp	207,208,847
- Pajak Terutang Non Fasilitas (25 % x PKP Non Fasilitas	Rp	2,798,234,962	Rp	2,747,625,055
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	Rp	3,001,947,269	Rp	2,954,833,902
Kredit Pajak PPh psl 25	Rp	2,711,770,380	Rp	2,543,035,000
PPh pasal 25 dibayar Januari 2018		246,524,580		0
PPh pasal 25 dibayar Januari 2017		0		231,185,000
PPh badan Kurang (Lebih) Bayar	Rp	43,652,309	Rp	180,613,902

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

AM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

ASET TETAP

Aset tetap tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

2017

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah & Hak atas tanah	854,218,953	0	0	854,218,953
Instalasi Sumber Air	8,408,897,413	347,138,950	0	8,756,036,363
Instalasi Perpompaan	8,392,305,120	818,094,600	0	9,210,399,720
Instalasi Pengolahan Air	2,097,256,798	20,750,000	0	2,118,006,798
Instalasi Transmisi & Distribusi	36,311,368,891	1,378,791,519	0	37,690,160,410
Bangunan / Gedung	2,966,895,956	15,291,500	0	2,982,187,456
Peralatan & Perlengkapan	268,133,330	6,345,000	0	274,478,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	1,893,637,849	43,800,000	0	1,937,437,849
Inventaris Kantor	3,050,458,974	215,781,796	0	3,266,240,770
Jumlah	64,243,173,284	2,845,993,365	0	67,089,166,648
Akumulasi Penyusutan	Rp	Rp	Rp	Rp
Instalasi Sumber Air	3,817,212,740	398,516,794	0	4,215,729,534
Instalasi Perpompaan	4,840,589,701	395,819,624	0	5,236,409,325
Instalasi Pengolahan Air	954,718,867	83,749,925	0	1,038,468,792
Instalasi Transmisi & Distribusi	21,074,373,541	1,417,885,698	0	22,492,259,239
Bangunan / Gedung	2,100,547,820	122,114,981	0	2,222,662,801
Peralatan & Perlengkapan	248,806,940	19,784,652	0	268,591,592
Kendaraan Alat Pengangkutan	1,668,799,112	118,981,135	0	1,787,780,247
Inventaris Kantor	2,552,026,023	211,238,071	0	2,763,264,094
Jumlah	37,257,074,744	2,768,090,880	0	40,025,165,624
Nilai buku bersih	26,986,098,540			27,064,001,024

2016

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah & Hak atas tanah	854,218,953	0	0	854,218,953
Instalasi Sumber Air	7,714,717,113	694,180,300	0	8,408,897,413
Instalasi Perpompaan	7,706,655,120	685,650,000	0	8,392,305,120
Instalasi Pengolahan Air	1,845,799,558	251,457,240	0	2,097,256,798
Instalasi Transmisi & Distribusi	35,272,785,663	1,038,583,228	0	36,311,368,891
Bangunan / Gedung	2,917,021,956	49,874,000	0	2,966,895,956
Peralatan & Perlengkapan	268,133,330	0	0	268,133,330
Kendaraan Alat Pengangkutan	1,837,077,849	56,560,000	0	1,893,637,849
Inventaris Kantor	2,859,151,974	191,307,000	0	3,050,458,974
Jumlah	61,275,561,516	2,967,611,768	0	64,243,173,283

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

)AM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
\TATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

Akumulasi Penyusutan	Rp	Rp	Rp	Rp
Instalasi Sumber Air	3,377,868,396	439,344,343	0	3,817,212,740
Instalasi Perpompaan	4,401,857,294	438,732,407	0	4,840,589,701
Instalasi Pengolahan Air	875,186,155	79,532,711	0	954,718,867
Instalasi Transmisi & Distribusi	19,425,205,414	1,649,168,127	0	21,074,373,541
Bangunan / Gedung	1,950,397,999	150,149,821	0	2,100,547,820
Peralatan & Perlengkapan	239,427,482	9,379,458	0	248,806,940
Kendaraan Alat Pengangkutan	1,477,120,703	191,678,409	0	1,668,799,112
Inventaris Kantor	2,301,514,623	250,511,400	0	2,552,026,023
Jumlah	34,048,578,066	3,208,496,676	0	37,257,074,740
Nilai buku bersih	**27,226,983,450**			**26,986,098,543**

Semua aset tetap perusahaan Daerah Air Minum Kota Madjun tidak diasuransikan dari segala resiko kerugian sehingga tidak ada jaminan ganti rugi jika terjadi musibah kebakaran atau gempa bumi.

9 **ASET TETAP DALAM PENYELESAIAN**

Saldo Aset tetap dalam penyelesaian tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Instalasi Sumber Air	Rp	4,271,150	Rp	0
Instalasi Transmisi dan Distribusi	Rp	0	Rp	5,264,600
Bangunan dan Gedung	Rp	3,200,900	Rp	0
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	Rp	7,472,050	Rp	5,264,600

Aset dalam penyelesaian adalah pembangunan instalasi sumber air dan rumah dinas operator,ruah panel dan chlor yang belum selesai pembangunannya pada tahun 2017

0 **ASET TIDAK BERFUGSI**

Saldo Aset tidak berfungsi tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Water mater bekas	Rp	0	Rp	4,811,000
Kendaraan Roda Dua	Rp	3,354,000	Rp	0
Jumlah Aset Tidak Berfungsi	Rp	3,354,000	Rp	4,811,000

I1 **HUTANG USAHA**

Saldo hutang usaha tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
CV Mufakat	Rp	0	Rp	0
CV Tirta Niaga	Rp	0		0
Jumlah Hutang Usaha	Rp	0	Rp	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
ATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
NTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

12. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo Biaya Yang Masih Harus Dibayar tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	2017		2016
Biaya Retribusi Air	Rp 19,979,225	Rp	21,505,555
Lain Lain	Rp 7,472,050	Rp	32,787,030
Jumlah	**Rp 27,451,275**	**Rp**	**54,292,585**

13. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo Pendapatan diterima dimuka tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	2017		2016
- Pendapatan Sewa Ruko	Rp 68,208,400	Rp	111,458,400
Jumlah	**Rp 68,208,400**	**Rp**	**111,458,400**

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.68.208.400 adalah pendapatan diterima dimuka atas menyewakan Ruko Jl. Srijaya Madiun, menyewakan lahan di Jl. Manggis Ngrowo Madiun, Menyewakan Ruko dan Kios di Jl. Musi Madiun dan menyewakan Ruko di Pasar Sleko Madiun.

14. DANA CADANGAN

Saldo Dana cadangan tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	2017		2016
- Cadangan Dana Sosial & Pendidikan	Rp 2,601,040,381	Rp	2,106,928,919
- Cadangan Dana Pensiun	Rp 2,569,519,681	Rp	2,905,390,308
Jumlah	**Rp 5,170,560,063**	**Rp**	**5,012,319,227**

Jumlah tersebut merupakan dana cadangan yang dibentuk dari pembagian laba berdasarkan Perda No. 13 tahun 1997, dan dirubah lagi dengan Perda No. 17 tahun 2001. Perubahan terakhir dengan Perda No. 10

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun No. 15 tahun 2011 bahwa penggunaan sumbangan dana pensiun dan sokongan.ditetapkan setiap tahun.

15. EKUITAS

Saldo Ekuitas pada tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

	2017		2016
- Modal Dasar	Rp 200,099,149	Rp.	200,099,149
- Penyertaan Pemerintah Kota Madiun	Rp 22,549,194,500	Rp.	22,549,194,500
- Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	Rp 8,094,640,663	Rp.	6,461,478,363
- Penyertaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Rp 168,346,000	Rp.	1,801,508,300
- Cadangan Dana Umum	Rp 6,126,570,319	Rp.	4,536,524,461
- Saldo Laba	Rp 10,310,194,057	Rp	9,882,229,244
Jumlah	**Rp 47,449,044,687**	**Rp**	**45,431,034,017**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- **Modal Dasar**
  Jumlah Modal Dasar Perusahaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Madiun Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun dan diubah dengan Perda No.17 Tahun 2001 serta terakhir diubah melalui Perda no 10 tahun 2011.

- **Penyertaan Pemda Kota Madiun**
  Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Pemda Kota Madiun per 31 Desember 2017 dan 2016 terinci sebagai berikut :

	Rp
- Anggaran Pemda Tahun 1993/1994 pasal No.2P.0.172.01-002 disetor tanggal 5 Maret 1994	4,000,000
- Anggaran Pemda Tahun 1994/1995 pasal No.2P.5.202-002 disetor tanggal 20 Maret 1995	2,000,000
- Pelunasan hutang RPD No.RDA-210/DP3/1994 dan Loan IBRD No.4017-IND, PPP No.SLA-114/DP3/1999 oleh pemerintah kota Madiun dengan SK Walikota Madiun No.4 tahun 2002.	5,969,273,000
- Bantuan Modal SK Walikota No.2 Tahun 2002	2,000,000,000
- Bantuan dari Pemda Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/73/413.401/2003 (antara Walikota dengan Direktur PDAM)	486,610,000
- Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan atas Hasil Pembangunan sektor air bersih Kota Madiun (Berita Acara antara Pemerintah Kota Madiun dengan PDAM Kota Madiun No.650/202/413.109/2001 tanggal 2 januari 2001) terdiri dari :	
- Pipa Distribusi PK 50 Ø sepanjang 2.757 M	49,148,000
- Instalasi Gas Chlor 1 unit, pompa panel kapasitas 40 l/dt H=30 M lengkap dengan panel dan kabel 1unit	99,990,000
- Pompa Submersible kapasitas 40l/dt H = 40 M 2 unit dan motor protektor 2 unit	118,734,000
- Bantuan dari Pemda Kota Madiun sesuai BAC Nomor 650/825/413.401/2003 (antara Walikota dengan Direktur PDAM)	281,500,000
- Bantuan dari Pemda Kota Madiun atas pengelolaan dan pemanfaatan atas hasil PDP SB-SB sesuai BA No.650/001a/413.401/2005 (antara Walikota dengan Direktur PDAM)	173,500,000
- Berita Acara Serah terima yang dananya dari ABT Pasca Bencana Sektor Sumber Daya Air tahun anggaran 2004 Kota Madiun Sesuai Berita Acara No.050/1800a/401.109/2005 (antara Walikota Madiun dengan Direktur PDAM) dengan perincian Sbb :	
- Sumur Dalam Rp 312,513,000	
- Pompa Submerble Rp 247,041,000	
- Jaringan Perpipaan Rp 1,087,614,000	
- Pemb R.Jaga Operator/Panel Pompa Rp 135,383,000	
- Instalasi Gas Chlor Rp 82,642,000	
- Perdagangan keliling Instalasi Sumur Rp 128,535,000	1,993,728,000
- Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Hasil Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Saluran Pemukiman dan Jaringan Air Bersih Kota Madiun No.050/880/401.109/2008.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Sumur-sumur	Rp	515,999,000	
- Peralatan Pompa	Rp	67,331,000	
- Alat - alat Pengolahan Air	Rp	158,774,000	
- Jaringan Pipa Distribusi	Rp	826,925,000	1,569,029,000

- Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No.030/3180/401.024/2007

- Alat - alat Pengolahan Air	Rp	69,300,000	
- Jaringan Pipa Distribusi	Rp	463,850,000	
- Sumur-sumur	Rp	352,137,000	885,287,000

- Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No.028/802/401.012/2009

- Generator 150 kva	Rp	399,645,000	
- Jaringan Pipa Distribusi	Rp	434,220,000	
- Sambungan Rumah Murah	Rp	570,900,000	
- Sumur-sumur	Rp	287,900,000	1,692,665,000

- Berita Acara Serah Terima antara Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM No.030/1333/401.012/2010

- Jaringan Pipa Distribusi	Rp	1,463,220,000	
- Sambungan Rumah Murah	Rp	695,447,500	2,158,667,500

- Berita Acara Serah Terima antara PU ke pada Walikota Madiun No.050/PA/8211/401.109/2010 — 543,431,000
  - Jaringan Pipa Distribusi
- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No.050/785/401.109/2011 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut : — 775,782,000

- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/211/401.101/2013 tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

- Jaringan Pipa Distribusi	Rp	262,692,000	
- Pemasangan Water Meter Induk	Rp	93,994,000	
- Pemasangan Sambungan Rumah	Rp	733,270,000	1,089,956,000

- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/1642/401.501/2013 .tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) senilai — 53,855,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/361/401.501/2014 .tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) senilai 15,000,000

- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/359/401.501/2014 .tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

  - Pembuatan sumur dalam Rp 306,000,000
  - Pengembangan Jaringan Rp 323,206,000

  1,129,206,000

- Berita Acara Serah Terima Walikota Madiun dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun No. 050/088/401.501/2015 .tentang Berita Acara Serah Terima pemanfaatan/pengelolaan hasil kegiatan pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

  - Pembuatan dua unit sumur dalam Rp 1,021,961,000
  - Pengembangan Jaringan Rp 435,872,000

  1,457,833,000

Jumlah 22,549,194,500

- **Penyertaan Modal Pemerintah Pusat**

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat per 31 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut :

	Rp
- Bantuan Meter Air dari Direktorat Teknik Penyehatan Departemen Pekerjaan Umum	30,970,000
- Sarana dan Prasarana Air Bersih dari PPSAB Jatim Tahun 1972 s/d 1979	127,445,650
- Sarana dan Prasarana Air Bersih dari PPSAB Jatim Tahun 1983 s/d 1991	3,243,396,718
- Bantuan Mobil Tangki Air dari PPSAB Jatim	39,985,000
- Bantuan dari PPSAB Jatim Tahun 1994	374,220
- Bantuan Pipa dari PPSAB tahun 1997 tanggal 10 Agustus 1997 No.PDB-JATIM/30/97	26,164,675
- Bantuan Pipa GMS,SOCK GI dari PPSAB tanggal 29 Maret 1999	2,544,000
- Surat Perintah Mengeluarkan Barang dari kantor proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur tertanggal 18 Oktober 1999 No.PL.03.01.03.Ca.13.01/X/99-006 berupa pipa ACP 250 diameter 240.	11,419,200
- Berita Acara tangal 9 Nopember 1999 No.01/BA/P4/1999 Antara pemimpin proyek peningkatan prasarana pemukiman Jawa Timur dengan Direktur Utama PDAM Kota Madiun berupa sebuah sumur dalam.	180,744,300
- Berita Acara tanggal 31 Maret 2000 No.SPL.050/2238/413.109/2000 antara pemimpin proyek program penyediaan dan pengelolaan air bersih SPL OECF INP 23 LG tahun anggaran 1999/2000 dengan Walikota Madiun berupa :	
- Sebuah sumur dalam	223,419,000
- Pipa distribusi ukuran 2 Ø dan 4 Ø	329,373,000
- Pipa distribusi ukuran 4 Ø dan 6 Ø	224,268,000
- Kendaraan dinas truk tangki air minum bantuan Pemerintah Pusat Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Satker PKP air minum Jatim, Berita Acara Serah Terima Sementara No.02/BAST_PBS/PKP-AM/XII/2007.	187,220,000
- Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara Nomor: 75/bast/pk-pam.jt/2009 tanggal 15 Desmber 2009 antara kepala satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minumi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pekerjaan perpipaan	1,819,915,900

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Bukti pengeluaran barang No.157/mdn/pkp/-am/III/2010 tertanggal 3 Maret 2010 dari kantor Cipta Karya Pengembangan Kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur berupa perpipaan.	14,238,700
- Berita Acara Serah Terima Nomor: 10/BAST/PK-PAM.JT/2013 tanggal 30 Desember 2013 antara kepala Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengelolaan air minum senilai	1,633,162,300
Jumlah	**8,094,640,663**

- **Penyertaan Propinsi Jawa Timur**
  Penyertaan Propinsi Jawa Timur yang belum ditentukan statusnya per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut :

Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/638.3/121/PP/2005 tanggal 12 Desember 2005 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pengadaan dan pemasangan pipa PVC S12,5 50 Ø+Accesoris = 2.511 M dan Pipa Gi 50 Ø+Accesoris = -30 m.	100,000,000
Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/PK121/2007 tanggal 12 Juli 2007 antara kepala sub dinas pengembangan perkotaan dinas pemukiman propinsi Jawa Timur dengan Direktur PDAM Kota Madiun berupa pemasangan sambungan rumah sebanyak 180 sambungan per sambungan Rp. 379.700.	68,346,000
Jumlah	**168,346,000**

6. **PENDAPATAN USAHA**
   Saldo Pendapatan usaha tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Pendapatan Air :				
- Pendapatan Harga Air	Rp	31,888,967,770	Rp	30,954,801,441
- Pendapatan Jasa Administrasi	Rp	2,224,568,650	Rp	2,824,479,050
Jumlah Pendapatan Air	Rp	34,113,536,420	Rp	33,779,280,491
Pendapatan Non Air :				
- Pendapatan Sambungan Baru	Rp	798,000,000	Rp	564,200,000
- Pendapatan Sambungan Kembali	Rp	543,907,500	Rp	484,147,250
- Pendapatan Denda	Rp	600,884,150	Rp	562,413,250
Jumlah Pendapatan Non Air	Rp	1,942,791,650	Rp	1,610,760,500
Total Pendapatan Usaha	**Rp**	**36,056,328,070**	**Rp**	**35,390,040,991**

7. **BEBAN LANGSUNG USAHA**
   Saldo Beban langsung usaha tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Biaya Sumber Air dan Perpompaan :				
- Biaya Operasional	Rp	4,568,775,004	Rp	4,334,933,233
- Biaya Pemeliharaan	Rp	209,012,967	Rp	275,973,734
- Biaya Penyusutan	Rp	794,336,419	Rp	878,076,750
- Biaya Air Baku	Rp	231,105,580	Rp	228,594,025
Jumlah Biaya Sumber Air dan Perpompaan	Rp	5,803,229,970	Rp	5,717,577,742

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
N ATAS LAPORAN KEUANGAN
ERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

a Pengolahan Air :				
Biaya Operasional	Rp	221.542.850	Rp	289.030.500
Biaya Pemeliharaan	Rp	8.440.913	Rp	9.512.943
Biaya Penyusutan	Rp	83.749.926	Rp	79.532.711
Jumlah Biaya Pengolahan Air	Rp	313.733.688	Rp	378.076.154
a Transmisi dan Distribusi :				
Biaya Operasional	Rp	1.932.771.816	Rp	1.718.001.519
Biaya Pemeliharaan	Rp	331.400.011	Rp	558.392.862
Biaya Penyusutan	Rp	1.417.885.698	Rp	1.649.168.127
Jumlah Biaya Transmisi dan Distribusi	Rp	3.682.057.526	Rp	3.925.562.508
Total Beban Langsung Usaha	**Rp**	**9.799.021.184**	**Rp**	**10.021.216.403**

YA UMUM DAN ADMINISTRASI
do Biaya umum dan administrasi tahun 2017 dan 2016 sebagai berjkut :

		2017		2016
Biaya Operasional Umum	Rp	9.034.141.435	Rp	8.882.141.040
Biaya Kantor	Rp	510.096.815	Rp	475.829.250
Biaya Langganan	Rp	452.546.780	Rp	559.854.900
Biaya Penelitian & Pengembangan	Rp	208.769.139	Rp	217.026.580
Biaya Pemeliharaan	Rp	357.463.061	Rp	390.595.869
Biaya penyisihan Piutang Usaha	Rp	20.235.883	Rp	38.600.450
Biaya Penyusutan	Rp	472.118.840	Rp	601.719.087
Biaya Umum lainnya	Rp	3.585.540.482	Rp	2.585.781.938
Jumlah	**Rp**	**14.640.912.435**	**Rp**	**13.751.549.114**

NDAPATAN LAIN - LAIN
ıdapatan Lain - lain tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Jasa Giro / Bunga Deposito	Rp	862.362.112	Rp	812.733.486
Pendapatan Lainnya	Rp	848.212.953	Rp	421.639.519
Penjualan air kemasan Aeta	Rp	0	Rp	0
Jumlah	**Rp**	**1.710.575.065**	**Rp**	**1.234.373.005**

ıdapatan lain lain berasal dari atas pendapatan sewa ruko dan lahan, penjualan air galon dan penerimaan retribusi

YA LAIN - LAIN
/a Lain - lain tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut :

		2017		2016
Biaya Administrasi Bank	Rp	14.828.190	Rp	14.585.332
Lain Lain	Rp	0	Rp	0
Jumlah	**Rp**	**14.828.190**	**Rp**	**14.585.332**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
N ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 dan 2016

GGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

ajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang diselesaikan pada gal 12 Januari 2018.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

RABAYA 1
IV/I
787 (Hunting) Fax 031-5945616

Surabaya, 28 Pebruari 2018

Kepada Yth.
PDAM Tirta Taman Sari
Kota Madiun
di
MADIUN

BUKTI TANDA TERIMA

nya ity	Uraian *Description*	Keterangan *Remarks*
at)	LAPORAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PDAM TIRTA TAMAN SARI - KOTA MADIUN TAHUN 2017	**Mohon Diterima Dengan Baik**

mpir ditandatangani / dikirim kembali sebagai bukti penerimaan
ledge the receipt by returning / send to us the attach duly signed

Penerima,
ent signature

PISUKARJO

Hormat kami,
Your sincerely

Mareta Tri Surya Permata, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
No. :013/02/LH/II/18
dan
LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2017

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

	Hal.
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Neraca	1 - 2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5 - 6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KOTA MADIUN
PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN
Jln. Imam Bonjol No. 70 Telepon (0351) 452589 Fax. (0351) 453296
e-mail. bpr_kota_madiun@yahoo.com, web. www.bprkotamadiun.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PD. BPR. BANK DAERAH KOTA MADIUN

mi yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama	:	Ahmadu Malik Dana Logistia, S.Kom., M.M
Alamat kantor	:	Jl. Imam Bonjol No. 70, Kota Madiun
Alamat rumah sesuai KTP	:	Jl. Panjang Punjung RT 21 RW 04 No. 123 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun
Jabatan	:	Direktur Utama

tuk dan atas nama Direksi PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN sebagai pihak yang tanggungjawab atas PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN menyatakan bahwa:

PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

Dengan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris, Direksi PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif 1 Januari 2010;

Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana disajikan pada laporan keuangan terlampir;

Laporan keuangan PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

Semua informasi dalam laporan keuangan PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN telah membuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan oleh Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dewan Direksi PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN, serta sistem pengendalian internal dalam PD BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, 19 Februari 2018



Ahmadu Malik Dana Logistia, S.Kom., M.M
Direktur Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

: 013 / 02 / LH / II / 18

pada
, Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
mam Bonjol No. 70
diun

mi telah mengaudit laporan keuangan PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TA MADIUN ("Bank") terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan a-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

nggung jawab manajemen atas laporan keuangan

najemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai gan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta Pedoman Akuntansi Bank kreditan Rakyat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk mungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang ebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

nggung jawab auditor

nggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan lit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan blik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut as dari kesalahan penyajian material.

Suatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

itu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan gungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, masuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan h kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan gendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk ancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan ijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta gevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

ni yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu is bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

is untuk opini wajar dengan pengecualian

agaimana yang diungkapkan pada Catatan 21 dan 14 atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan belum ngakui kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Standar Akuntansi uangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 mengenai "Imbalan Kerja".

a tanggal 31 Desember 2017 terdapat pembentukan cadangan kesejahteraan dan jasa produksi yang ebet dari saldo laba, yang menurut SAK ETAP Bab 19 mengenai "Ekuitas" hendaknya diperhitungkan a laporan laba rugi tahun berjalan. Pada tanggal 31 Desember 2017, pembentukan cadangan tersebut atat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No.7 Tahun 2009 yang berpedoman pada Peraturan nteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah erah. Catatan akuntansi terkait pembebanan atas pembentukan dana cadangan tersebut tidak erkenankan berdasarkan SAK ETAP. Oleh karena itu, kami tidak dapat menerapkan prosedur audit secara madai, dan yang menurut pendapat kami, perlakuan akuntansi tersebut hendaknya dicatat sesuai dengan K ETAP.

ini

urut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar gan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, isi keuangan **PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN** tanggal Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, ai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hal lain ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

lain

oran keuangan Bank tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, udit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini dengan modifikasian atas laporan keuangan ebut pada tanggal 31 Januari 2017. Opini dengan modifikasian atas Bank yang belum menerapkan ndar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 mengenai "Imbalan ja" dan belum menerapkan SAK ETAP Bab 19 mengenai "Ekuitas", atas pembentukan cadangan ejahteraan dan jasa produksi yang didebet dari saldo laba.

NDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO
gistered Public Accountants

HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Lilik Hartatik, SE, Ak, CPA, CA, BKP.
Akuntan Publik No. AP. 1069

abaya, 19 Februari 2018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

NERACA

31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
Kas	3	303.043.100	284.943.900
Pendapatan bunga yang akan diterima	4	724.857.788	802.256.566
Penempatan pada bank lain	5		
Pihak ketiga		21.475.780.159	24.464.743.862
Penyisihan kerugian		(105.978.811)	(120.186.811)
		21.369.801.348	24.344.557.051
Kredit yang diberikan	6		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		722.727.760	1.079.110.013
Pihak ketiga		58.499.340.218	54.161.052.501
Penyisihan kerugian		(2.953.243.273)	(2.316.678.896)
		56.268.824.705	52.923.483.618
Aset tetap - bersih	7	4.494.495.560	914.728.980
Aset tidak berwujud - bersih	8	26.953.151	45.142.208
Aset lain-lain	9	165.629.180	238.385.089
TOTAL ASET		**83.353.604.832**	**79.553.497.412**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera	10	255.415.988	452.097.252
Utang bunga	11	154.237.978	146.728.454
Utang pajak	12	9.787.941	54.298
Simpanan nasabah	13		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.957.420.895	1.564.993.587
Pihak ketiga		44.106.010.697	43.931.509.944
		46.063.431.592	45.496.503.531
JUMLAH KEWAJIBAN		46.482.873.499	46.095.383.535

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

NERACA (Lanjutan)

31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
EKUITAS			
Modal disetor	1, 15	25.000.000.000	21.307.000.000
Saldo laba	2, 16		
Cadangan umum		4.567.876.728	3.957.541.207
Cadangan tujuan		4.551.871.072	4.123.185.552
Belum ditentukan tujuannya		2.750.983.533	4.070.387.118
		11.870.731.333	12.151.113.877
JUMLAH EKUITAS		36.870.731.333	33.458.113.877
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**83.353.604.832**	**79.553.497.412**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	17		
Kontraktual		10.768.827.993	10.880.937.996
Amortisasi provisi		865.556.032	880.644.462
		11.634.384.025	11.761.582.458
Beban bunga	18		
Kontraktual		3.392.526.288	3.252.218.584
Premi penjaminan simpanan		89.321.983	82.580.180
		3.481.848.271	3.334.798.764
Pendapatan bunga - bersih		8.152.535.754	8.426.783.694
Pendapatan operasional lainnya	19	91.772.169	155.618.403
Jumlah pendapatan operasional		8.244.307.923	8.582.402.097
Beban penyisihan kerugian/penyusutan	20	894.055.854	243.416.670
Beban pemasaran	21	84.977.500	53.843.000
Beban umum dan administrasi	22	3.536.848.356	3.048.736.628
Beban operasional lainnya	23	172.633.484	165.907.328
Jumlah beban operasional		4.688.515.194	3.511.903.626
LABA OPERASIONAL		3.555.792.729	5.070.498.471
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	24		
Pendapatan non operasional		120.783.825	120.108.386
Beban non operasional		(53.651.725)	(72.327.085)
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH		67.132.100	47.781.301
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		3.622.924.829	5.118.279.772
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	12a, b		
Pajak kini		873.424.941	1.049.376.298
LABA BERSIH		2.749.499.888	4.068.903.474

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal		Saldo laba			Jumlah
		Modal disetor	Tambahan modal	Cadangan umum	Cadangan tujuan	Belum ditentukan tujuannya	
Saldo 31 Desember 2015	**1, 15**	**9.200.032.295**	**12.106.967.705**	**3.478.760.548**	**3.644.404.893**	**3.193.354.699**	**31.623.520.140**
Dana setoran modal	15	12.106.967.705	(12.106.967.705)	-	-	-	-
Setoran ke Pemerintah Daerah	2, 16	-	-	-	-	(1.595.935.527)	(1.595.935.527)
Pembentukan cadangan	2, 16	-	-	478.780.659	478.780.659	(957.561.318)	-
Dana kesejahteraan	2, 14, 16	-	-	-	-	(319.187.105)	(319.187.105)
Jasa produksi	2, 16	-	-	-	-	(319.187.105)	(319.187.105)
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	4.068.903.474	4.068.903.474
Saldo 31 Desember 2016	**1, 15**	**21.307.000.000**	**-**	**3.957.541.207**	**4.123.185.552**	**4.070.387.118**	**33.458.113.877**
Dana setoran modal	15	3.693.000.000	-	-	-	-	3.693.000.000
Setoran ke Pemerintah Daerah	2, 16	-	-	-	-	(2.034.451.735)	(2.034.451.735)
Pembentukan cadangan	2, 16	-	-	610.335.521	610.335.521	(1.220.671.042)	
Penggunaan cadangan tujuan	16	-	-	-	(181.650.001)	-	(181.650.001)
Dana kesejahteraan	2, 14, 16	-	-	-	-	(406.890.348)	(406.890.348)
Jasa produksi	2, 16	-	-	-	-	(406.890.348)	(406.890.348)
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	2.749.499.888	2.749.499.888
Saldo 31 Desember 2017	**1, 16**	**25.000.000.000**	**-**	**4.567.876.728**	**4.551.871.072**	**2.750.983.533**	**36.870.731.333**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Laba bersih		2.749.499.888	4.068.903.474
Penyesuaian:			
Penyisihan kerugian aset produktif untuk:			
Kredit yang diberikan	6, 20	656.970.877	-
Penyusutan aset tetap	7, 20	211.395.920	202.274.486
Hapus buku kredit yang diberikan		(20.406.500)	-
Pemulihan penyisihan aset produktif		(14.208.000)	(98.688.316)
Amortisasi:			
Sewa	22	88.334.400	79.168.000
Aset tidak berwujud	8, 20	25.689.057	41.142.184
Provisi kredit yang diberikan	17	(865.556.032)	(880.644.462)
Arus kas sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi		**2.831.719.610**	**3.412.155.366**
Perubahan aset dan kewajiban operasi:			
Pendapatan bunga yang akan diterima		77.398.778	(63.445.708)
Penempatan pada bank lain		(500.000.000)	(3.500.000.000)
Kredit yang diberikan		(3.116.349.432)	(4.292.650.500)
Aset lain-lain		(15.578.491)	(60.666.274)
Kewajiban segera		(196.681.264)	156.950.558
Utang bunga		7.509.524	4.209.270
Utang pajak		9.733.643	(56.221.019)
Simpanan nasabah		566.928.061	2.952.424.192
Simpanan dari bank lain		-	(4.448.875)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		**(516.969.572)**	**(1.451.692.990)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	7	(3.791.162.500)	(327.194.000)
Pembelian aset tidak berwujud	8	(7.500.000)	(6.000.000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(3.798.662.500)	(333.194.000)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan modal disetor	16	3.693.000.000	-
Setoran ke Pemerintah Daerah	16	(2.034.451.735)	(1.595.935.527)
Jasa produksi	16	(406.890.348)	(319.187.105)
Dana kesejahteraan	16	(406.890.348)	(319.187.105)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		**844.767.569**	**(2.234.309.737)**
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(3.470.864.503)	(4.019.196.727)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		20.719.687.762	24.738.884.489
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**17.248.823.259**	**20.719.687.762**
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			
Kas dan setara kas terdiri dari:			
Kas	3	303.043.100	284.943.900
Giro	5	280.017.882	427.381.706
Tabungan	5	6.565.762.277	4.157.362.156
Deposito dengan jangka waktu paling lama 3 bulan	5	10.100.000.000	15.850.000.000
Jumlah kas dan setara kas		**17.248.823.259**	**20.719.687.762**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

I. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun ('Bank'), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Tingkat II Madiun No. 15L/38 tanggal 15 Desember 1938. Peraturan tersebut diubah dengan peraturan Bank Pasar Kotapraja Madiun No. 105/DPRD/1960 tanggal 5 November 1960 dan Peraturan Daerah No. 6 tahun 1973 yang merupakan unit usaha Perusahaan Daerah Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, Bank diubah menjadi Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Madiun No. 16 tahun 1981 tanggal 6 Oktober 1981 yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Februari 1983 No. 40/P/tahun 1983, diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tahun 1983 seri C tanggal 18 April 1983 No. 2/C.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun No. 3 tanggal 14 Juni 1997 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 278/P tahun 1997 tanggal 20 Mei 1997, Bank diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun. Perubahan tersebut telah mendapat ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan keputusan No. 552/KM-17/1997 tanggal 20 Oktober 1997. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun No. 3 tahun 2004 tanggal 9 Maret 2004, telah dilakukan perubahan nama Bank menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Madiun.

Perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2009.

Perubahan nama BPR menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun telah disetujui oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 12/1/SK.PBI/DKBU/Kd/2010 tanggal 18 Januari 2010.

Sesuai dengan pasal 5, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 tahun 2009, maksud dan tujuan pendirian Bank adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

I. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2) Memberikan kredit sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan mikro;
3) Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Lembaga Keuangan / Lembaga lainnya;
4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya;
5) Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
6) Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 70 Madiun. Pada tanggal 31 Desember 2017 Bank memiliki 8 (delapan) Kantor Kas, yaitu:

1) Kantor Kas Pasar Sleko, beralamat di Jl. Musi No. 1 Madiun.
2) Kantor Kas Pasar Besar, beralamat di Jl. Panglima Sudirman Madiun
3) Kantor Kas Taman, beralamat di Jl. Ciliwung No. 85 Madiun.
4) Kantor Kas Manguharjo, Jl. Puspo Warno, Ngegong, Manguharjo, Madiun.
5) Kantor Kas Urip Sumoharjo, Jl. Urip Sumoharjo No.306-C, Kel. Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo, Madiun
6) Kantor Kas Manisrejo, Jl. Dungus Manis No.18-20, Kel. Manisrejo, Kec. Taman Kota, Madiun
7) Kantor Kas Soekarno-Hatta, Jl. Soekarno-Hatta, Kel Demangan, Kec. Taman, Madiun
8) Kantor Kas Bok Malang, Jl. Pilang Dwija, Kel. Pilangbango, Kec. Kartoharjo, Madiun

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah karyawan Bank masing-masing sebanyak 25 dan 27 orang (tidak diaudit).

b. Dewan Pengawas dan Direksi

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 susunan Dewan Pengawas dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Dewan Pengawas		
Ketua	: Drs. Maidi, S.H., MM., M.Pd.	: Drs. Maidi, S.H., MM., M.Pd.
Anggota	: Rusdiyanto, S.H. M.Hum	: Rusdiyanto, S.H. M.Hum
Direksi		
Direktur Utama	: Ahmadu Malik Dana Logistia, S.Kom, MM.	: Agung Prijono, SE
Direktur	:-	: Ari Soetanti, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. INFORMASI UMUM (Lanjutan)

b. Dewan Pengawas dan Direksi

Susunan pengurus Bank pada tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Walikota Madiun No. 539-401.023/48/K/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama.

Susunan pengurus Bank telah dicatat dalam administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-37/KO.0402/2017 tanggal 21 November 2017.

Susunan pengurus Bank pada tahun 2016 sesuai dengan Keputusan Walikota Madiun tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut :

- Dewan Pengawas sesuai Keputusan Walikota Madiun No. 539-401.014/65/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- Direktur Utama sesuai Keputusan Walikota Madiun No.539-401.205/39/K/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- Direktur sesuai Keputusan Walikota Madiun No.539-401.205/77/K/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Susunan pengurus Bank telah dicatat dalam administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan No.S-286/KO.042/2016 tanggal 15 September 2016.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting, Bank berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain seperti yang dijelaskan pada kebijakan akuntansi untuk masing-masing akun tersebut.

Manajemen Bank berpedoman pula pada pemenuhan kewajiban terkait pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi triwulanan sesuai dengan PBI No. 15/3/PBI/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

b. Transaksi hubungan istimewa

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP Bab 28 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Pendapatan bunga yang akan diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari aset produktif dengan kualitas lancar (*performing)* yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

d. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain terdiri dari tabungan dan deposito berjangka yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian yang telah dibentuk.

e. Kredit yang diberikan

Saldo kredit yang diberikan disajikan di neraca sebesar pokok kredit dikurangi dengan provisi serta ditambah dengan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian kredit. Penyisihan tersebut merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase yang ditetapkan dari saldo kredit yang diberikan pada tanggal neraca berdasarkan penggolongan kualitas kredit yang diberikan. Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan.

Pendapatan provisi dan komisi serta biaya transaksi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan provisi dan administrasi yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Kredit diklasifikasikan "*non-performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "*non-performing*" tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Kredit dihapuskan pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut sudah tidak akan tertagih lagi. Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbuku diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

f. Penyisihan kerugian aset produktif

Aset produktif Bank terdiri dari penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan.

Bank membentuk penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan penelaahan terhadap kualitas masing-masing aset produktif, komitmen dan kontinjensi sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

f. Penyisihan kerugian aset produktif (lanjutan)

Pembentukan penyisihan kerugian aset produktif ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang dirubah dengan PBI No. 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011. Aset produktif diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori dengan besarnya persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase
Lancar	0,5
Kurang lancar	10
Diragukan	50
Macet	100

Persentase penyisihan aset produktif di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar, yang diterapkan terhadap saldo aset produktif tersebut.

Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditempatkan di bank lain.

g. Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Tanah tidak disusutkan. Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)* dan aset tetap selain tanah dan bangunan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda *(double declining balance method)* berdasarkan masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Masa Manfaat
Bangunan	20 tahun
Kendaraan bermotor	4 dan 8 tahun
Inventaris kantor	4 dan 8 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

h. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik.

Piranti Lunak Komputer

Lisensi peranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat peranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaat (4 tahun) dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program peranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi peranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Bank dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tidak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, program SID dan *maintenance* serta aplikasi perbankan sehubungan dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan aplikasi laporan bulanan Otoritas Jasa Keuangan.

Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

i. Aset lain-lain

Aset lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain terdiri dari beban dibayar dimuka, persediaan barang cetakan dan lain-lain, dimana diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

j. Kewajiban segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang telah jatuh tempo atau menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah pemberi amanat maupun tidak. Kewajiban segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan oleh Bank.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain
Simpanan merupakan kewajiban kepada nasabah dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank yang bersangkutan.

Simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain diakui sebesar kewajiban kepada nasabah dan bank lain dikurangi dengan saldo biaya transaksi yang dapat diatribusikan yang belum diamortisir. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan diamortisasi dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu simpanan atau estimasi masa manfaat yang ditetapkan oleh Bank dan diakui sebagai beban bunga simpanan.

Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut.

l. Imbalan kerja
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 mewajibkan perusahaan untuk membayar imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, bilamana ketentuan dalam Undang-Undang terpenuhi.

Dalam ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 adalah program imbalan pasti.

Sesuai SAK ETAP Bab 23 mengenai " Imbalan Kerja " bahwa Bank harus mengakui biaya atas seluruh imbalan kerja yang menjadi hak pekerja akibat dari jasa yang diberikan kepada Bank selama periode pelaporan sebagai kewajiban atau sebagai beban.

Beban atau kewajiban imbalan kerja yang harus disediakan dihitung dengan memakai asumsi masa kerja, sisa masa kerja, pertumbuhan gaji dan tingkat suku bunga. Kewajiban imbalan pasti diukur pada nilai terdiskonto.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Bank belum mengakui dan mencatat besaran nilai beban serta kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan SAK ETAP Bab 23.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

m. Penggunaan laba

Sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 tahun 2009 pada pasal 95 ditetapkan penggunaan laba bersih Bank sebagai berikut:

- Bagian laba untuk Daerah	50%
- Cadangan umum	15%
- Cadangan tujuan	15%
- Dana kesejahteraan	10%
- Jasa produksi	10%

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Bank menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berdasarkan standar tersebut pada Bab 19 tentang Ekuitas, paragraf 29 diatur bahwa saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Bank belum menerapkan standar akuntansi tersebut.

n. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana Bank pada aset produktif. Pendapatan bunga meliputi pendapatan bunga kontraktual, amortisasi provisi dan administrasi serta pendapatan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, dikurangi amortisasi biaya-biaya yang terkait langsung dengan penanaman dana Bank pada aset produktif yang ditanggung oleh Bank (biaya transaksi). Amortisasi provisi dan administrasi serta biaya-biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penanaman dana Bank dalam aset produktif.

Amortisasi provisi dan biaya administrasi serta amortisasi biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kualitas penanaman dana, apakah termasuk kategori *performing* atau *non performing*.

Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan penanaman dana Bank pada aset produktif.

Beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana. Beban bunga meliputi beban bunga kontraktual dan amortisasi biaya transaksi yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana. Amortisasi biaya transaksi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu penghimpunan dana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan dan beban bunga kontraktual diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan bunga kontraktual atas aset produktif dihentikan pada saat aset produktif tersebut diklasifikasikan sebagai *non performing* (kurang lancar, diragukan dan macet). Pendapatan bunga kontraktual dari aset produktif yang diklasifikasikan sebagai *non performing* dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat pendapatan tersebut diterima *(cash basis)*.

Seluruh penerimaan kas yang berhubungan dengan kredit *non-performing* yang digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan kas di atas pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga kontraktual dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Pendapatan bunga kontraktual dari kredit kategori *performing* yang telah diakui Bank sebagai pendapatan namun belum diterima secara kas dibukukan pada akun pendapatan bunga yang akan diterima.

Beban bunga kontraktual dari penghimpunan dana Bank yang telah diakui sebagai beban namun belum dibayarkan kepada nasabah maupun kreditur dibukukan pada akun utang bunga.

Pendapatan dan biaya lainnya dicatat secara akrual yaitu saat timbulnya pendapatan dan beban yang bersangkutan.

o. Pajak penghasilan

Bank mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Bank harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Bank tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

p. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, Bank tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontinjensi jika praktis dilakukan.

3. KAS

Akun ini merupakan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 303.043.100,- dan Rp 284.943.900,-.

4. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	2017	2016
Bunga kredit yang diberikan	672.325.540	709.368.563
Bunga penempatan pada bank lain	52.532.248	92.888.003
	724.857.788	**802.256.566**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2017	2016
Pihak ketiga		
Giro		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	280.017.882	427.381.706
Tabungan		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.529.217.807	815.804.781
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.255.369.060	1.568.823.071
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	806.850.984	150.000.650
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	707.259.032	536.254.002
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	244.420.561	365.820.107
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.644.833	565.456.369
PT Bank Shinhan Indonesia	-	155.203.176
	6.565.762.277	4.157.362.156
Deposito berjangka		
Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Artha Kencana	4.000.000.000	3.500.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	3.550.000.000	5.850.000.000
PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	2.000.000.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.030.000.000	5.030.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Polatama Kusuma	900.000.000	900.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Sapadhana	800.000.000	800.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo	800.000.000	500.000.000
PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota	500.000.000	1.000.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Arthaya Indotama Pusaka	500.000.000	500.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras	300.000.000	300.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Arthaya Aditama Utama	250.000.000	-
PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun	-	1.500.000.000
	14.630.000.000	19.880.000.000
Jumlah	21.475.780.159	24.464.743.362
Penyisihan kerugian	(105.978.811)	(120.186.811)
Jumlah - bersih	**21.369.801.348**	**24.344.557.051**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penempatan pada Bank lain dalam bentuk deposito berjangka pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 30.000.000,- merupakan *sinking fund* atas keanggotaan APEX.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:	2017	2016
Giro	0,50%	1,50%
Tabungan	2,83%	2,44%
Deposito berjangka	8,46%	8,83%

Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal tahun	120.186.811	124.645.294
Pemulihan penyisihan selama tahun berjalan (lihat Catatan 19)	(14.208.000)	(4.458.483)
Saldo akhir tahun	**105.978.811**	**120.186.811**

Kolektibilitas penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 tergolong lancar.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kredit yang diberikan menurut jenis:

	2017				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
Kontraktual					
Modal kerja	293.331.600	-	-	-	293.331.600
Investasi	196.713.900	-	-	-	196.713.900
Konsumsi	247.207.600	-	-	-	247.207.600
	737.253.100	-	-	-	737.253.100
Provisi yang belum diamortisasi	(14.525.340)	-	-	-	(14.525.340)
Sub jumlah	722.727.760	-	-	-	722.727.760
Pihak ketiga:					
Kontraktual					
Modal kerja	23.719.883.432	543.231.750	1.218.004.200	1.810.537.200	27.291.656.582
Investasi	10.637.241.100	170.185.600	119.323.700	526.543.100	11.453.293.500
Konsumsi	19.050.801.550	8.749.100	100.988.800	1.576.361.300	20.736.900.750
	53.407.926.082	722.166.450	1.438.316.700	3.913.441.600	59.481.850.832
Provisi yang belum diamortisasi	(926.992.450)	(12.191.882)	(22.556.896)	(20.769.386)	(982.510.614)
Sub jumlah	52.480.933.632	709.974.568	1.415.759.804	3.892.672.214	58.499.340.218
Jumlah	53.203.661.392	709.974.568	1.415.759.804	3.892.672.214	59.222.067.978
Penyisihan kerugian	(270.740.218)	(26.016.605)	(244.571.450)	(2.411.915.000)	(2.953.243.273)
Jumlah - bersih	**52.932.921.174**	**683.957.963**	**1.171.188.354**	**1.480.757.214**	**56.268.824.705**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

a. Kredit yang diberikan menurut jenis: (lanjutan)

	2016				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
Kontraktual					
Modal kerja	395.999.200	-	-	-	395.999.200
Investasi	284.974.900	-	-	-	284.974.900
Konsumsi	419.720.000	-	-	-	419.720.000
	1.100.694.100	-	-	-	1.100.694.100
Provisi yang belum diamortisasi	(21.584.087)	-	-	-	(21.584.087)
Sub jumlah	1.079.110.013	-	-	-	1.079.110.013
Pihak ketiga:					
Kontraktual					
Modal kerja	23.529.256.300	113.102.200	142.638.000	981.225.900	24.766.222.400
Investasi	13.013.383.700	93.710.400	27.350.300	344.049.800	13.478.494.200
Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor	748.779.100	-	-	210.993.300	959.772.400
Konsumsi	14.614.117.800	17.658.200	66.760.400	1.176.694.800	15.875.231.200
	51.905.536.900	224.470.800	236.748.700	2.712.963.800	55.079.720.200
Provisi yang belum diamortisasi	(905.651.434)	(3.635.518)	(1.937.222)	(7.443.525)	(918.667.699)
Sub jumlah	50.999.885.466	220.835.282	234.811.478	2.705.520.275	54.161.052.501
Jumlah	52.078.995.479	220.835.282	234.811.478	2.705.520.275	55.240.162.514
Penyisihan kerugian	(265.031.400)	(12.534.600)	(45.649.850)	(1.993.463.046)	(2.316.678.896)
Jumlah - bersih	**51.813.964.079**	**208.300.682**	**189.161.628**	**712.057.229**	**52.923.483.618**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Kredit yang diberikan menurut sektor ekonomi:

	2017				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
Kontraktual					
Pertanian	10.000.000	-	-	-	10.000.000
Jasa	178.921.900	-	-	-	178.921.900
Lainnya	548.331.200	-	-	-	548.331.200
	737.253.100	-	-	-	737.253.100
Provisi yang belum diamortisasi	(14.525.340)	-	-	-	(14.525.340)
Sub jumlah	722.727.760	-	-	-	722.727.760
Pihak ketiga:					
Kontraktual					
Pertanian	5.130.283.932	52.798.050	32.350.400	91.300.400	5.306.732.782
Perdagangan	13.840.426.400	495.071.700	878.741.500	1.044.783.100	16.259.022.700
Jasa	11.485.384.800	401.911.500	5.250.000	93.204.800	11.985.751.100
Lain-lain	23.140.980.950	80.735.200	248.373.500	2.460.254.600	25.930.344.250
	53.597.076.082	1.030.516.450	1.164.715.400	3.689.542.900	59.481.850.832
Provisi yang belum diamortisasi	(926.992.450)	(12.191.882)	(22.556.896)	(20.769.386)	(982.510.614)
Sub jumlah	52.670.083.632	1.018.324.568	1.142.158.504	3.668.773.514	58.499.340.218
Jumlah	53.392.811.392	1.018.324.568	1.142.158.504	3.668.773.514	59.222.067.978
Penyisihan kerugian	(270.740.218)	(26.016.605)	(244.571.450)	(2.411.915.000)	(2.953.243.273)
Jumlah - bersih	**53.122.071.174**	**992.307.963**	**897.587.054**	**1.256.858.514**	**56.268.824.705**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Kredit yang diberikan menurut sektor ekonomi:

	2017				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
Kontraktual					
Pertanian	10.000.000	-	-	-	10.000.000
Jasa	178.921.900	-	-	-	178.921.900
Lainnya	548.331.200	-	-	-	548.331.200
	737.253.100	-	-	-	737.253.100
Provisi yang belum diamortisasi	(14.525.340)	-	-	-	(14.525.340)
Sub jumlah	722.727.760	-	-	-	722.727.760
Pihak ketiga:					
Kontraktual					
Pertanian	5.130.283.932	52.798.050	32.350.400	91.300.400	5.306.732.782
Perdagangan	13.840.426.400	495.071.700	878.741.500	1.044.783.100	16.259.022.700
Jasa	11.485.384.800	401.911.500	5.250.000	93.204.800	11.985.751.100
Lain-lain	23.140.980.950	80.735.200	248.373.500	2.460.254.600	25.930.344.250
	53.597.076.082	1.030.516.450	1.164.715.400	3.689.542.900	59.481.850.832
Provisi yang belum diamortisasi	(926.992.450)	(12.191.882)	(22.556.896)	(20.769.386)	(982.510.614)
Sub jumlah	52.670.083.632	1.018.324.568	1.142.158.504	3.668.773.514	58.499.340.218
Jumlah	53.392.811.392	1.018.324.568	1.142.158.504	3.668.773.514	59.222.067.978
Penyisihan kerugian	(270.740.218)	(26.016.605)	(244.571.450)	(2.411.915.000)	(2.953.243.273)
Jumlah - bersih	**53.122.071.174**	**992.307.963**	**897.587.054**	**1.256.858.514**	**56.268.824.705**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Kredit yang diberikan menurut sektor ekonomi: (lanjutan)

	2016				
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa:					
Kontraktual					
Jasa	221.434.400	-	-	-	221.434.400
Lainnya	879.259.700	-	-	-	879.259.700
	1.100.694.100	-	-	-	1.100.694.100
Provisi yang belum diamortisasi	(21.584.087)	-	-	-	(21.584.087)
Sub jumlah	1.079.110.013	-	-	-	1.079.110.013
Pihak ketiga:					
Kontraktual					
Pertanian	4.933.636.900	-	-	189.475.200	5.123.112.100
Perindustrian	3.768.000	-	-	-	3.768.000
Perdagangan	13.159.254.000	103.828.200	133.755.800	696.330.300	14.093.168.300
Jasa	11.994.185.300	6.750.000	-	29.369.800	12.030.305.100
Lain-lain	21.814.692.700	113.892.600	102.992.900	1.797.788.500	23.829.366.700
	51.905.536.900	224.470.800	236.748.700	2.712.963.800	55.079.720.200
Provisi yang belum diamortisasi	(905.651.434)	(3.635.518)	(1.937.222)	(7.443.525)	(918.667.699)
Sub jumlah	50.999.885.466	220.835.282	234.811.478	2.705.520.275	54.161.052.501
Jumlah	52.078.995.479	220.835.282	234.811.478	2.705.520.275	55.240.162.514
Penyisihan kerugian	(265.031.400)	(12.534.600)	(45.649.850)	(1.993.463.046)	(2.316.678.896)
Jumlah - bersih	**51.813.964.079**	**208.300.682**	**189.161.628**	**712.057.229**	**52.923.483.618**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

c. Kredit yang diberikan menurut jangka waktu:

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit.

	2017	2016
Kurang dari atau sama dengan 6 bulan	3.038.626.500	1.571.424.300
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	3.528.215.050	2.417.577.700
Lebih dari 12 sampai 24 bulan	6.393.024.750	6.552.472.400
Lebih dari 24 bulan	47.259.237.632	45.638.939.900
Sub jumlah	60.219.103.932	56.180.414.300
Provisi yang belum diamortisasi	(997.035.954)	(940.251.786)
Jumlah	59.222.067.978	55.240.162.514
Penyisihan kerugian	(2.953.243.273)	(2.316.678.896)
Jumlah - bersih	**56.268.824.705**	**52.923.483.618**

d. Kredit yang diberikan menurut sisa umur jatuh tempo:

Sisa umur jatuh tempo kredit diklasifikasikan berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh tempo kredit.

	2017	2016
Kurang dari atau sama dengan 6 bulan	6.695.854.750	5.137.060.900
Lebih dari 6 sampai 12 bulan	4.408.586.450	2.885.930.400
Lebih dari 12 sampai 24 bulan	9.063.924.250	8.586.847.400
Lebih dari 24 bulan	40.050.738.482	39.570.575.600
Sub jumlah	60.219.103.932	56.180.414.300
Provisi yang belum diamortisasi	(997.035.954)	(940.251.786)
Jumlah	59.222.067.978	55.240.162.514
Penyisihan kerugian	(2.953.243.273)	(2.316.678.896)
Jumlah - bersih	**56.268.824.705**	**52.923.483.618**

e. Tingkat suku bunga kredit yang diberikan rata-rata per tahun adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kredit yang diberikan	15,72%	17,14%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6 KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2017 untuk pihak ketiga sebesar Rp 7.174.540.084,- dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 3.587.270.042,- sedangkan BMPK pada tanggal 31 Desember 2016 untuk pihak ketiga sebesar Rp 6.361.776.070,- dan untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebesar Rp 3.180.888.035,.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat pemberian kredit yang melanggar atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia.

g. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, jumlah kredit *non performing* adalah sebesar Rp 6.073.924.750 ,- dan Rp 3.174.183.300,- atau sebesar 10,09% dan 5,65% dari kredit yang diberikan.

h. Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal tahun	2.316.678.896	2.410.908.729
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (lihat Catatan 20)	656.970.877	-
Hapus buku selama tahun berjalan	(20.406.500)	-
Pemulihan kredit selama tahun berjalan (lihat Catatan 19)	-	(94.229.833)
Saldo akhir tahun	**2.953.243.273**	**2.316.678.896**

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

i. Ikhtisar kredit yang dihapusbukukan:

	2017	2016
Saldo awal tahun	498.172.545	501.444.045
Hapus buku selama tahun berjalan	20.406.500	-
Koreksi saldo hapus buku negatif	45.000	-
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku (lihat Catatan 19)	(6.337.500)	(3.271.500)
Saldo akhir tahun	512.286.545	498.172.545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. ASET TETAP

HARGA PEROLEHAN	SALDO 31-Des-2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2017
Tanah	-	3.693.000.000	-	3.693.000.000
Bangunan	813.384.110	14.660.000	-	828.044.110
Kendaraan Bermotor	622.602.000	-	-	622.602.000
Inventaris Kantor	1.204.593.527	83.502.500	-	1.288.096.027
Jumlah	2.640.579.637	3.791.162.500	-	6.431.742.137

AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO 31-Des-2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2017
Bangunan	252.488.839	37.851.846	-	290.340.685
Kendaraan Bermotor	543.769.542	31.619.148	-	575.388.690
Inventaris Kantor	929.592.276	141.924.926	-	1.071.517.202
Jumlah	1.725.850.657	211.395.920	-	1.937.246.577
Nilai Buku	**914.728.980**			**4.494.495.560**

HARGA PEROLEHAN	SALDO 31-Des-2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2016
Bangunan	795.997.110	17.387.000	-	813.384.110
Kendaraan Bermotor	587.922.000	34.680.000	-	622.602.000
Inventaris Kantor	929.466.527	275.127.000	-	1.204.593.527
Jumlah	2.313.385.637	327.194.000	-	2.640.579.637

AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO 31-Des-2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-2016
Bangunan	215.220.829	37.268.010	-	252.488.839
Kendaraan Bermotor	502.756.481	41.013.061	-	543.769.542
Inventaris Kantor	805.598.861	123.993.415	-	929.592.276
Jumlah	1.523.576.171	202.274.486	-	1.725.850.657
Nilai Buku	**789.809.466**			**914.728.980**

Jumlah beban penyusutan aset tetap adalah sebesar Rp 211.395.920,- dan Rp 202.274.486,- masing-masing untuk tahun 2017 dan 2016 (lihat Catatan 20).

Sesuai Surat Keputusan Walikota Madiun No.028-401.207/206/2015 tertanggal 29 Juli 2015 tentang "Penyertaan Modal Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun Kepada Badan Usaha Milik Daerah". Surat tersebut menetapkan bahwa Penyertaan Modal Daerah Berupa sebagian tanah milik Pemerintah Kota Madiun yang terletak di Jalan Imam Bonjol 70 Madiun dengan nilai sebesar Rp 3.693.000.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. ASET TETAP (Lanjutan)

- Sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun No. 01/HGB/BPN-12.03/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang "Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PD BPR Bank Daerah Kota Madiun atas Tanah di Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Keputusan tersebut antara lain memberikan Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Madiun.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau kejadian yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

8. ASET TIDAK BERWUJUD

Rincian aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:	2017	2016
Harga perolehan	128.550.000	121.050.000
Akumulasi amortisasi	(101.596.849)	(75.907.792)
Nilai buku - bersih	**26.953.151**	**45.142.208**

	2017	2016
Saldo awal	45.142.208	80.284.392
Penambahan	7.500.000	6.000.000
Beban amortisasi aset tidak berwujud (lihat Catatan 22)	(25.689.057)	(41.142.184)
Saldo akhir	**26.953.151**	**45.142.208**

9. ASET LAIN - LAIN

	2017	2016
Sewa dibayar dimuka	129.583.400	204.885.800
Persediaan barang cetakan	35.134.530	32.597.539
Asuransi dibayar dimuka	911.250	901.750
Jumlah	**165.629.180**	**238.385.089**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. KEWAJIBAN SEGERA

	2017	2016
Pajak penghasilan:		
Pasal 25	87.056.000	87.056.000
Pasal 4 ayat 2	58.541.610	57.491.228
Pasal 21	19.936.410	2.591.903
Pasal 23	2.000	8.858
	165.536.020	147.147.989
Titipan nasabah	41.084.068	257.358.113
Titipan bendahara	18.295.900	26.740.850
Lainnya	30.500.000	20.850.300
Jumlah	**255.415.988**	**452.097.252**

Titipan bendahara merupakan *fee* kerjasama antara Bank dengan bendahara instansi lain dalam rangka penyaluran kredit kepada debitur.

Lainnya merupakan titipan *fee* audit, premi penjaminan yang masih harus dibayar, titipan listrik dan telepon bulan Desember.

11. UTANG BUNGA

Akun ini merupakan saldo utang bunga deposito pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 154.237.978,- dan Rp 146.728.454,-.

12. UTANG PAJAK

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan pasal 29 dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 9.787.941,- dan Rp 54.298,-.

a. Beban pajak penghasilan badan	2017	2016
Pajak kini (lihat Catatan 12b)	873.424.941	1.049.376.298

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. UTANG PAJAK (Lanjutan)

b. Pajak penghasilan badan	2017	2016
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi	3.622.924.829	5.118.279.772
Koreksi fiskal		
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan	656.970.877	-
Pemeliharaan dan bahan bakar kendaraan	59.344.359	62.593.278
Promosi	57.377.500	-
Penyusutan aset tetap	11.911.042	-
Kegiatan keagamaan	5.150.000	5.075.000
Konsumsi	3.493.000	23.019.980
Parcel	2.136.600	3.322.745
Olahraga	999.000	10.408.700
Sumbangan dan lain-lain	600.000	39.772.160
Pendapatan bunga penempatan pada bank lain	(39.631.181)	(30.077.304)
Lain-lain	-	10.425.400
Penghasilan kena pajak	4.381.276.025	5.242.819.731
Dibulatkan	**4.381.276.000**	**5.242.819.000**

Taksiran pajak penghasilan:	2017	2016
12,5% x Rp 1.775.152.467,-	221.894.058	-
25 % x Rp 2.606.123.533,-	651.530.883	-
12,5% x Rp 2.090.627.621,-	-	261.328.453
25 % x Rp 3.152.191.379,-	-	788.047.845
Jumlah pajak kini (lihat Catatan 12a)	**873.424.941**	**1.049.376.298**
Kredit pajak		
Pajak penghasilan pasal 25	863.637.000	1.049.322.000
Pajak penghasilan pasal 29	**9.787.941**	**54.298**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak untuk tahun fiskal 1995 hingga 2007.

Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

13. SIMPANAN NASABAH

a. Berdasarkan jenisnya simpanan nasabah terdiri dari:	2017	2016
Tabungan		
Kontraktual		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	359.920.895	414.993.587
Pihak ketiga	12.006.200.697	13.110.826.544
Jumlah tabungan	12.366.121.592	13.525.820.131
Deposito berjangka		
Kontraktual		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	1.597.500.000	1.150.000.000
Pihak ketiga	32.099.810.000	30.820.683.400
Jumlah deposito berjangka	33.697.310.000	31.970.683.400
Jumlah simpanan	**46.063.431.592**	**45.496.503.531**

b. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp 1.176.000.000,- dan Rp 804.650.000,-.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:	2017	2016
Tabungan	3,98%	3,79%
Deposito berjangka	6,40%	6,55%

d. Klasifikasi deposito berdasarkan jangka waktu:	2017	2016
Jangka waktu 1 bulan	1.034.500.000	773.300.000
Jangka waktu 3 bulan	3.684.310.000	4.489.810.000
Jangka waktu 6 bulan	8.704.000.000	9.804.973.400
Jangka waktu 12 bulan	20.274.500.000	16.902.600.000
Jumlah	**33.697.310.000**	**31.970.683.400**

e. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, simpanan yang memperoleh suku bunga melebihi suku bunga yang ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan masing-masing sebesar Rp 13.449.500.000,- dan Rp 11.096.500.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2l, Bank belum menghitung dan mencatat imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 13 dan SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Bank memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 tahun 2009.

Jasa produksi

Bank memberikan jasa produksi yang dialokasikan 10% dari saldo laba kepada Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan. Estimasi besarnya cadangan tersebut ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 tahun 2009.

Imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja

Bank memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada karyawan dengan masa kerja tertentu yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Bank, jasa pengabdian bagi dewan pengawas dan direksi Bank serta mengikutsertakan karyawan dan direksi Bank dalam program asuransi Tunjangan Hari Tua (THT).

Pembayaran jasa-jasa tersebut diatas dan premi asuransi THT didebet dari dana kesejahteraan karyawan, yang setiap tahunnya dibentuk melalui alokasi dari saldo laba yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No.7 tahun 2009 dan sebagian dibukukan sebagai beban pada tahun berjalan.

Alokasi pembentukan dan penggunaan dana kesejahteraan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal tahun	-	-
Pembentukan dari dana kesejahteraan (lihat Catatan 16)	406.890.348	319.187.105
Pembentukan dari beban tahun berjalan (lihat Catatan 22)	370.900.233	94.918.134
Pembayaran premi asuransi hari tua ke Asuransi Jiwasraya	(168.045.775)	(210.406.151)
Pembayaran penghargaan kepada pegawai (lihat Catatan 22)	(370.900.233)	(94.918.134)
Pengalokasian tabungan dan deposito	(238.844.573)	(108.780.954)
Alokasi pembentukan dan penggunaan	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Saldo jasa pengabdian yang terakumulasi pada simpanan tabungan di Bank UMKM Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 765.131.809,- dan Rp 694.858.779,-. Sedangkan saldo jasa pengabdian yang terakumulasi pada *Saving Plan* Asuransi Jiwasraya pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 991.037.579,- dan Rp 1.091.710.591,-.

Jasa pengabdian	2017	2016
Saldo awal	694.858.779	586.077.825
Penambahan	238.844.573	108.780.954
Pengurangan	(168.571.543)	-
Saldo jasa pengabdian pada Bank UMKM Jawa Timur	**765.131.809**	**694.858.779**

Saving plan	2017	2016
Saldo awal	1.091.710.591	881.304.440
Penambahan	168.045.775	210.406.151
Pengurangan	(268.718.787)	-
Saldo *saving plan* asuransi jiwasraya	**991.037.579**	**1.091.710.591**

15. MODAL DISETOR

Modal disetor pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Modal dasar	25.000.000.000	25.000.000.000
Modal belum ditempatkan	-	(3.693.000.000)
Modal ditempatkan dan disetor	**25.000.000.000**	**21.307.000.000**

Pada tahun 2017, sertifikat Hak Pakai Nomor 54 tahun 2015 dengan luas 2.462 m2 dengan nilai sebesar Rp3.693.000.000,- merupakan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditkan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun. Penyetoran modal saham tersebut telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-356/KO.042/2017 tanggal 14 Juli 2017.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun No. 22 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015 terdapat tambahan modal disetor sebesar Rp 12.106.967.705,- dari Pemerintah Daerah Kota Madiun. Atas tambahan modal disetor tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-55/KO.36/2016 tanggal 25 Januari 2016, sehingga saldo modal disetor menjadi sebesar Rp 21.307.000.000,-.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16. PENGGUNAAN SALDO LABA

Penggunaan laba bersih tahun buku 2016 dan 2015 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 7 tahun 2009, tanggal 26 Mei 2009, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun pasal 95.

Alokasi penggunaan saldo laba tahun buku 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pemerintah Daerah Kota Madiun	2.034.451.735	1.595.935.527
Cadangan umum	610.335.521	478.780.659
Cadangan tujuan	610.335.521	478.780.659
Dana kesejahteraan pegawai (lihat Catatan 14)	406.890.348	319.187.105
Jasa Produksi	406.890.348	319.187.105
Jumlah	**4.068.903.473**	**3.191.871.055**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 terdapat penggunaan cadangan kesejahteraan dan jasa produksi yang didebet dari saldo laba, yang menurut SAK ETAP Bab 19 mengenai "Ekuitas" seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tahun 2017 terdapat penggunaan cadangan tujuan sebesar Rp 181.650.000,- untuk pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai surat No. 580/82/401.502/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang permohonan penggunaan cadangan tujuan yang disampaikan kepada Walikota Madiun. Sampai dengan tanggal audit surat yang disampaikan Bank masih proses menunggu jawaban.

17. PENDAPATAN BUNGA

	2017	2016
Kontraktual		
Kredit yang diberikan	9.428.387.359	9.244.123.958
Deposito	1.241.046.445	1.541.517.082
Tabungan	95.146.958	92.908.009
Giro	4.247.231	2.388.947
	10.768.827.993	10.880.937.996
Amortisasi provisi		
Kredit yang diberikan	865.556.032	880.644.462
Jumlah	**11.634.384.025**	**11.761.582.458**

18. BEBAN BUNGA

	2017	2016
Kontraktual		
Deposito berjangka	2.749.634.240	2.633.875.267
Tabungan	642.892.048	618.343.317
	3.392.526.288	3.252.218.584
Premi penjaminan simpanan	89.321.983	82.580.180
Jumlah	**3.481.848.271**	**3.334.798.764**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2017	2016
Denda	44.812.554	25.166.133
Administrasi tabungan	26.244.115	28.351.954
Pemulihan penyisihan aset produktif penempatan pada bank lain (lihat Catatan 5)	14.208.000	4.458.483
Penerimaan kembali kredit yang dihapus buku (lihat Catatan 6i)	6.337.500	3.271.500
Jasa Transaksi	170.000	140.500
Pemulihan penyisihan aset produktif kredit yang diberikan (lihat Catatan 6h)	-	94.229.833
Jumlah	**91.772.169**	**155.618.403**

20. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN/PENYUSUTAN	2017	2016
Penyisihan kerugian kredit yang diberikan (lihat Catatan 6h)	656.970.877	-
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 7)	211.395.920	202.274.486
Amortisasi aset tidak berwujud (lihat Catatan 8)	25.689.057	41.142.184
Jumlah	**894.055.854**	**243.416.670**

21. BEBAN PEMASARAN

Akun ini merupakan biaya iklan dan promosi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 84.977.500,- dan Rp 53.843.000,-.

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	2017	2016
Beban tenaga kerja *)	2.817.587.037	2.355.946.451
Telepon, listrik dan air	120.966.144	98.967.797
Operasional kendaraan kantor	100.029.611	96.275.975
Keperluan kantor	91.433.160	93.125.800
Sewa	88.334.400	79.168.000
Pemeliharaan dan perbaikan	77.967.275	69.722.180
Pendidikan	72.101.640	75.486.500
Alat tulis kantor	64.981.359	71.536.795
Penagihan	64.152.300	62.859.100
Pajak	13.105.904	12.173.604
Premi asuransi	11.965.526	12.320.776
Perjalanan dinas	8.664.000	16.474.650
Lainnya	5.560.000	4.679.000
Jumlah	3.536.848.356	3.048.736.628

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)	2017	2016
*) Beban tenaga kerja		
Gaji dan upah	2.161.428.246	2.009.527.431
Penghargaan pegawai (lihat Catatan 14)	370.900.233	94.918.134
Tunjangan hari raya	193.727.058	159.003.061
Honorarium dewan pengawas	86.400.000	86.400.000
Lembur	5.131.500	6.097.825
Jumlah	**2.817.587.037**	**2.355.946.451**

23. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	2017	2016
Pakaian dinas	61.497.500	54.373.750
Jasa profesional	46.868.775	40.700.000
Otoritas jasa keuangan	35.129.675	40.316.615
Konsumsi	20.105.500	23.120.880
Lain-lain	9.032.034	7.396.083
Jumlah	**172.633.484**	**165.907.328**

24. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	2017	2016
Pendapatan non operasional		
Refund premi asuransi	120.783.825	120.108.386
Beban non operasional		
Sumbangan	27.944.100	43.094.905
Iuran perhimpunan	13.200.000	13.200.000
Kegiatan keagamaan	5.150.000	5.075.000
Denda	4.507.625	100.000
Corporate social responsibility	2.850.000	-
Perbarindo	-	10.408.700
Pengurusan tanah gedung	-	448.480
Sub jumlah	53.651.725	72.327.085
Jumlah pendapatan non operasional - bersih	**67.132.100**	**47.781.301**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat hubungan istimewa
- Pengurus Bank (lihat Catatan 1)
- Perorangan yang merupakan anggota keluarga dekat dari pengurus Bank
- Pemegang saham Bank

Transaksi hubungan istimewa
Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut manajemen, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada karyawan dan Pengurus bank.

Transaksi dan saldo dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta persentase terhadap masing-masing total transaksi dan saldo akun-akun yang terkait, terinci sebagai berikut:

	2017	2016
Aset		
Kredit yang diberikan	737.253.100	1.100.694.100
Kewajiban		
Simpanan nasabah	1.957.420.895	1.564.993.587
Persentase terhadap jumlah aset		
Kredit yang diberikan	0,88%	1,38%
Persentase terhadap jumlah kewajiban		
Simpanan nasabah	4,21%	3,40%

26. KONTINJENSI

	2017	2016
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1.885.893.612	1.518.255.554
Kredit yang dihapusbuku	512.286.545	498.172.545

27. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Modal Inti	35.495.981.389	31.423.662.140
Modal Pelengkap	376.719.029	385.218.211
Jumlah Modal Bank	35.872.700.418	31.808.880.351
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	51.118.645.089	52.692.789.194
Modal Minimum (8% X ATMR)	4.089.491.607	4.215.423.136
Rasio KPMM (CAR)	**70,18%**	**60,37%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. *LOAN TO DEPOSIT RATIO* (LDR)

I. Simpanan pihak ke III		
a. Simpanan Berjangka	33.697.310.000	31.970.683.400
b. Tabungan	12.366.121.592	13.525.820.131
II. Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan	-	-
III Modal Pinjaman	-	-
IV Modal Inti	35.495.981.389	31.423.662.140
Jumlah Dana (JD)	81.559.412.981	76.920.165.671
V. Jumlah Kredit yang Diberikan (JK)	60.219.103.932	56.180.414.300
L D R (JK : JD) x 100%	**73,83%**	**73,04%**

9. *RETURN ON ASSET* (ROA) DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO)

I. Total laba 12 bulan terakhir	3.622.924.829	5.118.279.772
II. Rata-rata Volume Usaha	80.449.335.441	75.951.692.174
Return on Asset **(ROA)**	**4,50%**	**6,74%**
I. Pendapatan Operasional	11.726.156.194	11.917.200.861
II. Beban Operasional	8.170.363.465	6.846.702.390
BOPO	**69,68%**	**57,45%**

10. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No.24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

31. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-18/KO.0402/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengangkatan Anggota Direktur Utama dan Teguran Terkait Kepengurusan menetapkan bahwa:

- Pelanggaran atas tidak dilakukannya pengangkatan kembali Ari Soetanti,SE sebagai Direktur karena melanggar Pasal 25 ayat 1 dan Pasal 33 Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang BPR
- Pelanggaran dikarenakan Ketua Dewan Pengawas yaitu Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd belum memiliki sertifikasi kelulusan dari Lembaga Sertifikasi Profesi sehingga melanggar Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 99 Peraturan OJK.

32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang diselesaikan pada tanggal 19 Februari 2018.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ABDUL GHONIE & REKAN
Registered Public Accountants

PD ANEKA USAHA KOTA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

REPRESENTASI MANAJEMEN ii

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN iii

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Neraca 1
2. Laporan Laba Rugi 2
3. Laporan Perubahan Ekuitas 3
4. Laporan Arus Kas 4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Penjelasan Umum 5-6
2. Kebijakan Akuntansi 6-7
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 8-12

STRUKTUR DAN RASIO KEUANGAN

1. Struktur Laporan Neraca 13
2. Struktur Laporan Laba Rugi 14
3. Analisis Rasio Laporan Keuangan 15

LAMPIRAN

1. Daftar Aset Tetap dan Penyusutan 16-32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

REPRESENTASI MANAJEMEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KOTA MADIUN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
JL. Jendral Ahmad Yani No. 11, Madiun 63121 Telpon (0351) 452550
E-mail :pdau.madiun@gmail.com, website : http//www.mad.unkot.go.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ir. Sutrisno
Alamat Kantor	: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 11, Madiun 63121
Telepon	: -
Jabatan	: DirekturUtama

Menyatakanbahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2017 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
2. Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP).
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun telah dimuat secara lengkap dan benar
4. Laporan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung awab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, 27 Februari 2018
A.n. Direksi
Wakili Direksi

Ir. Sutrisno
Direktur Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ABDUL GHONIE & REKAN
Registered Public Accountants
Izin KAP No. KEP- 129/KM. 1/2016
Graha Satria I 3rd Floor Suite 304, Jl. RS. Fatmawati No.5
Jakarta 12430
Telp. : (021) 751 1744
Fax. : (021) 751 1743

Laporan Auditor Independen

No : 33/AGR-4/AI/2.2018

Kepada Yth:
Dewan Komisaris dan Direksi
PD ANEKA USAHA KOTA MADIUN

Kami telah mengaudit laporan keuangan PD Aneka Usaha Kota Madiun terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ABDUL GHONIE & REKAN
Registered Public Accountants
Izin KAP No. KEP- 129/KM. 1/2016

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini wajar tanpa pengecualian

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD Aneka Usaha Kota Madiun tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Jakarta, 27 Februari 2018

Kantor Akuntan Publik
Abdul Ghonie & Rekan

Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, Msi, CPA, CA, CMA
N.R.A.P AP. 0744

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2017

Dengan Angka Pembanding Per 31 Desember 2016 *(audited)*

	catatan	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
S E T			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.2, 3	787.049.890	547.782.353
Piutang Usaha	2.3, 4	80.342.226	55.055.495
Persediaan	2.4, 5	760.856.335	302.967.327
Uang Muka Pembelian	6	387.040.000	368.144.000
Jumlah Aset Lancar		**2.015.288.451**	**1.273.949.175**
Aset Tetap	2.5, 7		
Tanah		194.930.000	194.930.000
Gedung		3.447.214.237	3.439.208.737
Mesin SPBU Basuki Rahmad		1.085.607.052	1.085.607.052
Mesin SPBU Mayjend Sungkono		1.910.916.751	1.586.099.151
Kendaraan		21.200.000	21.200.000
Mesin Cetak		1.086.196.500	1.086.196.500
Peralatan Kantor Cetak		126.257.150	126.257.150
Peralatan Kantor SPBU Basuki Rahmad		56.558.350	54.514.850
Peralatan Kantor SPBU Mayjend Sungkono		22.833.200	21.491.200
Total Harga Perolehan		7.951.713.240	7.615.504.640
Akumulasi Penyusutan		(7.041.829.519)	(6.894.736.585)
Nilai Buku Aset Tetap		**909.883.721**	**720.768.055**
OTAL ASET		**2.925.172.172**	**1.994.717.230**
EWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Hutang Jangka Pendek	2.6, 8	188.991.918	-
Hutang Lain-lain	2.6, 9	263.126.890	263.126.890
Jumlah Kewajiban		**452.118.808**	**263.126.890**
Ekuitas	10		
Modal awal		8.575.268.850	8.575.268.850
Cadangan Umum		59.507.005	59.507.005
Rugi Tahun-tahun Sebelumnya		(6.903.185.515)	(6.731.222.584)
Laba tahun berjalan		741.463.024	(171.962.931)
Jumlah Ekuitas		**2.473.053.364**	**1.731.590.340**
OTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.925.172.172**	**1.994.717.230**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
Dengan Angka Pembanding Tahun 2016 *(audited)*

	catatan	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
PENDAPATAN	2.7, 11		
Percetakan		90.721.480	150.158.638
SPBU I		14.047.628.456	7.370.924.738
SPBU II		51.469.903.096	35.992.676.870
		65.608.253.032	**43.513.760.246**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2.7, 12		
Percetakan		-	-
SPBU I		13.444.756.755	7.128.055.641
SPBU II		49.172.857.162	34.748.657.100
		62.617.613.917	**41.876.712.741**
LABA KOTOR		**2.990.639.115**	**1.637.047.505**
BEBAN USAHA	2.7, 13		
Percetakan		200.397.024	222.368.323
SPBU I		279.312.505	278.022.981
SPBU II		1.315.967.432	980.903.125
Beban Administrasi dan Umum		601.517.153	396.710.453
		2.397.194.114	**1.878.004.882**
LABA (RUGI) BERSIH OPERASI		**593.445.001**	**(240.957.377)**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2.7, 14		
Pendapatan Lain-lain		149.186.770	69.996.792
(Beban) Lain-lain		(1.168.746)	(1.002.346)
		148.018.024	**68.994.446**
LABA (RUGI) BERSIH SESUDAH PAJAK		**741.463.024**	**(171.962.931)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
Dengan Angka Pembanding Tahun 2016 *(Audited)*

KETERANGAN	Modal Kerja (Dalam Rupiah)	Cadangan Umum (Dalam Rupiah)	Rugi (Dalam Rupiah)	Laba (Dalam Rupiah)	JUMLAH (Dalam Rupiah)
Saldo Per 1 Januari 2016	7.519.769.640	-	(5.675.723.374)	307.932.523	2.151.978.789
Alokasi laba tahun 2015	-	61.586.505	-	(307.932.523)	(246.346.018)
Koreksi	1.055.499.210	(2.079.500)	(1.055.499.210)	-	(2.079.500)
Laba Tahun Berjalan	-	-	(171.962.931)	-	(171.962.931)
Saldo Per 31 Desember 2016	**8.575.268.850**	**59.507.005**	**(6.903.185.515)**	**-**	**1.731.590.340**
Laba Tahun Berjalan				741.463.024	741.463.024
Saldo Per 31 Desember 2017	**8.575.268.850**	**59.507.005**	**(6.903.185.515)**	**741.463.024**	**2.473.053.364**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
dengan Angka Pembanding Tahun 2016 *(audited)*

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
Laba Bersih Periode Berjalan	741.463.024	(171.962.931)
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas :		
Penyusutan aset tetap	147.092.934	282.913.981
Laba Bersih Sebelum Perubahan Modal Kerja	888.555.958	110.951.050
(Penurunan)/Kenaikan :		
Piutang Usaha	(25.286.731)	(31.281.202)
Persediaan	(457.889.008)	143.225.390
Uang Muka Pembelian	(18.896.000)	(22.704.000)
Hutang Jangka Pendek	188.991.918	-
Hutang lain-lain	-	(86.250.763)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**575.476.137**	**113.940.475**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :		
Penambahan/penurunan aset tetap	(336.208.600)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**(336.208.600)**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN :		
Rugi tahun sebelumnya	-	1.055.499.210
Koreksi Modal Awal	-	(1.055.499.210)
Alokasi laba tahun lalu	-	(248.425.518)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**(248.425.518)**
(Penurunan)/Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**239.267.537**	**(134.485.043)**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	547.782.353	682.267.396
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**787.049.890**	**547.782.353**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. UMUM

1.1 Sejarah berdirinya dan kedudukan perusahaan

Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kota Madiun (yang selanjutnya disebut perusahaan) berkedudukan di Jalan A.Yani No. 11 Kota Madiun merupakan Badan Usaha Millik Pemerintah Kota Madiun yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun No. 3 Tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 yang kemudian diperbarui dengan Peratuan Daerah (Perda) Kota Madiun No. 5 Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Perusahan Daerah Aneka Usaha untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Tujuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha sesuai Perda Kota Madiun No. 5 pasal 3 dan 4 tahun 2012 adalah menyelenggarakan usaha percetakan, perbengkelan dan SPBU serta untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memupuk pendapatan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhir Tahun 2017 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun memiliki karyawan tetap sejumlah 20 orang dan 12 orang karyawan tidak tetap.

Perusahaan telah memperoleh :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 503.4/033-PM/P.2/401.303/2015 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun tanggal 18 Juni 2015.
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Perusahaan Lain nomor : 13.13.1.47.00035, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2019, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Madiun.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor : 02.301.631.4-621.000 dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun tanggal 19 Juni 2003.
4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-208/WPJ.11/KP.1203/2003 dari Kantor Pelayanan Pajak Madiun tanggal 7 Agustus 2003.
5. Izin Gangguan (HO) tempat usaha no. 503/ 048/ 401.303/ 2013 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 31 Januari 2013.

1.2 Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Perda Kota Madiun No. 5 Tahun 2012 Perusahaan mempunyai kegiatan usaha dalam bidang:

a. Percetakan Daerah
b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yaitu: SPBU I di Jalan Basuki Rahmad Madiun dan SPBU II di Jalan Mayjend Sungkono Madiun

1.3 Modal

Berdasarkan Keputusan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Modal Awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha, bahwa modal awal yang diserahkan adalah senilai Rp 4.085.502.000,- dan diserahkan bertahap yang dapat dirinci sebagai berikut:

-	Tahap I	Rp 100.000.000	
-	Tahap II	Rp 571.872.000	
-	Tahap III	Rp 1.000.000.000	
-	Tahap IV	Rp 2.000.000.000	
-	Tahap V	Rp 413.630.000	
	Total Penyerahan Modal Awal		Rp 4.085.502.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kemudian pada Tahun 2007 diserahkan lagi modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun oleh Walikota Madiun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/ Pengelolaan Hasil Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Serta Lanjutan Pembangunan SPBU Lanjutan Tahun Anggaran 2005 Nomor 050/5689/401.015/2007, dengan rincian sebagai berikut:

-	Bangunan SPBU	Rp 4.352.456.850	
-	Biaya Operasional/kas	Rp 137.310.000	
	Total Penyerahan Modal kedua		Rp 4.489.766.850

Sehingga dapat diperoleh nilai modal Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah sebesar Rp 8.575.268.850,- ekuivalen dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan berupa tanah dan bangunan, peralatan mesin cetak, fasilitas alat perbengkelan dan fasilitas pelayanan SPBU.

1.4 Struktur Organisasi dan Susunan Direksi

Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Madiun No. 539-401.023/19/K/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai berikut:

a. Badan Pengawas
   Ketua : Hidayat, S.E.
b. Direksi
   Direktur Utama : Ir. Sutrisno

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi terpenting yang dianut oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan :

2.1 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PD Aneka Usaha Madiun disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas dan menggunakan konsep biaya historis.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, aktivitas investasi dan pendanaan.

2.2 Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan sebagai kriteria kas dan setara kas.

2.3 Piutang Usaha

Piutang dicatat berdasarkan nilai brutonya dan dapat ditagih seluruhnya sehingga perusahaan tidak melakukan penyisihan penurunan nilai piutang atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.4 Persediaan

Pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan sedangkan penilaian persediaan ditentukan dengan metode *first in-first out (FIFO)*.

2.5 Aset Tetap

Aset tetap dibukukan berdasarkan harga perolehan, pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan yang jumlahnya relatif kecil dibebankan ke laba rugi, sedangkan pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya cukup material, dibukukan sebagai penambahan nilai aset tetap yang bersangkutan (dikapitalisir). Aset tetap tersebut diatas disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut sebagai berikut:

Bangunan	20 tahun
Mesin dan peralatan	10 tahun
Peralatan kantor	10 tahun

2.6 Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai jatuh temponya. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang berdasarkan tenggang waktu penyelesaiaannya.

2.7 Pendapatan dan Beban

Pengakuan terhadap pendapatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi (realisasinya) yaitu pada saat penyerahan produk kepada pembeli. Harga pokok pendapatan dan beban usaha diakui pada saat terjadinya manfaat *(accrual basis)*.

2.8 Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Dalam hal ini, perusahaan termasuk dalam kriteria wajib pajak dengan peredaran tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), sehingga atas pendapatan dari unit percetakan merupakan obyek pajak final. Sedangankan penjualan dari unit SPBU juga masuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh final. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 24 tentang "Pajak Penghasilan".

2.9 Pembagian Laba Usaha

Sesuai dengan Perda Kota Madiun No. 5 bab XIV pasal 70 tahun 2012 yang mengatur tentang Penetapan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	55%
b.	Cadangan Umum	20%
c.	Sosial dan Pendidikan	5%
d.	Jasa Produksi	10%
e.	Sumbangan dana pensiun dan sokongan	10%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
PENJELASAN NERACA		
3 KAS DAN SETARA KAS	**787.049.890**	**547.782.353**
Perkiraan kas dan setara kas terdiri dari :		
Kas:		
Percetakan	1.524.100	5.122.781
SPBU I	96.500.000	-
SPBU II	371.048.000	124.538.503
Bank:		
Bank Jatim no rek. 51038703	519.771	109.018.663
Bank Jatim no rek. 0051038711	159.261	47.303.723
Bank Jatim no rek. 0051038738	202.283	91.542.184
Bank Jatim no rek. 0051024052	91.539.705	90.908.422
Bank Jatim no rek. 0051038720	117.772	27.920.725
Bank Mandiri I no 1440004215007	2.024.135	3.213.166
Bank Mandiri II no144-00-0466909-6	190.806.495	3.390.049
Bank Mandiri III no 144-00-0988106-8	-	14.550.053
Bank Pasar/ BPR Bank Daerah no.01.41.0173701	22.608.368	20.274.084
Deposito Bank Pasar	10.000.000	10.000.000
4 PIUTANG USAHA	**80.342.226**	**55.055.495**
Perkiraan piutang usaha terdiri dari :		
Percetakan	25.445.750	4.145.500
SPBU I		
Piutang PDAM (SPBU I)	-	347.500
Piutang Dinas Pasar (SPBU I)	-	1.224.000
Piutang Karyawan (SPBU I)	19.464.595	14.138.000
SPBU II	35.431.881	26.326.031
Piutang Karyawan (SPBU II)	-	7.456.000
Piutang Karyawan Jamsostek dan Askes	-	1.418.464
5 PERSEDIAAN	**760.856.335**	**302.967.327**
Perkiraan persediaan terdiri dari :		
SPBU I:		
Solar	65.011.910	48.224.600
Pertamax	75.435.000	-
Pertalite	127.138.500	44.830.950
Dexlite	8.185.350	-
SPBU II:		
Premium	-	54.287.912
Solar	74.462.720	37.540.130
Pertamax	124.443.675	71.596.935
Pertalite	239.307.375	46.486.800
Dexlite	46.871.805	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
6 UANG MUKA PEMBELIAN	**387.040.000**	**368.144.000**
Perkiraan uang muka pembelian terdiri dari :		
DO belum terkirim:		
Solar	39.440.000	39.464.000
Pertalite	228.000.000	269.400.000
Pertamax	64.200.000	59.280.000
Dexlite	55.400.000	-
7 ASET TETAP	**909.883.721**	**720.768.055**
Perkiraan aset tetap terdiri dari :		
Harga Perolehan:		
Tanah	194.930.000	194.930.000
Gedung	3.447.214.237	3.439.208.737
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.085.607.052	1.085.607.052
Mesin SPBU Mayjend Sungkono	1.910.916.751	1.586.099.151
Kendaraan	21.200.000	21.200.000
Mesin Cetak	1.086.196.500	1.086.196.500
Peralatan Kantor Cetak	126.257.150	126.257.150
Peralatan Kantor SPBU Basuki Rahmad	56.558.350	54.514.850
Peralatan Kantor SPBU Mayjend Sungkono	22.833.200	21.491.200
	7.951.713.240	**7.615.504.640**
Akumulasi Penyusutan		
Gedung	(3.047.587.715)	(2.930.524.816)
Mesin SPBU Basuki Rahmad	(1.085.607.052)	(1.085.607.052)
Mesin SPBU Mayjend Sungkono	(1.608.787.111)	(1.586.099.152)
Kendaraan	(21.200.000)	(21.200.000)
Mesin Cetak	(1.086.076.500)	(1.086.016.500)
Peralatan Kantor Cetak	(125.075.430)	(124.429.155)
Peralatan Kantor SPBU Basuki Rahmad	(49.313.683)	(44.916.520)
Peralatan Kantor SPBU Mayjend Sungkono	(18.182.027)	(15.943.390)
	(7.041.829.519)	**(6.894.736.585)**
8 HUTANG JANGKA PENDEK	**188.991.918**	**-**
Perkiraan hutang jangka pendek terdiri dari :		
Hutang Bank	187.499.800	-
Hutang PPh 21	527.400	-
Hutang PPh Final	964.718	-
9 HUTANG LAIN-LAIN	**263.126.890**	**263.126.890**
Perkiraan hutang lain-lain terdiri dari :		
Sosial dan Pendidikan	121.873.117	121.873.117
Dana Pensiun & sokongan	141.253.773	141.253.773

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
10 EKUITAS	**2.473.053.364**	**1.731.590.340**
Perkiraan ekuitas terdiri dari :		
Modal awal		
Tahap I	100.000.000	100.000.000
Tahap II	571.872.000	571.872.000
Tahap III	1.000.000.000	1.000.000.000
Tahap IV	2.000.000.000	2.000.000.000
Tahap V	413.630.000	413.630.000
Tahap VI	4.489.766.850	4.489.766.850
Cadangan Umum	59.507.005	59.507.005
Rugi Tahun-tahun Sebelumnya	(6.903.185.515)	(6.731.222.584)
Laba Periode berjalan	741.463.024	(171.962.931)
. PENJELASAN LABA RUGI		
11 PENDAPATAN	**65.608.253.032**	**43.513.760.246**
Perkiraan pendapatan terdiri dari :		
Percetakan:		
Cetak	90.721.480	150.158.638
	90.721.480	**150.158.638**
SPBU I:		
Premium	-	5.320.439.770
Solar	4.713.007.711	1.441.749.493
Pertamax	1.089.772.230	608.735.475
Pertalite	7.249.684.015	-
Dexlite	995.164.500	-
	14.047.628.456	**7.370.924.738**
SPBU II:		
Premium	370.391.984	8.505.817.540
Solar	9.142.108.087	6.714.642.010
Pertamax	12.238.825.045	20.772.217.320
Pertalite	29.238.043.820	-
Dexlite	480.534.160	-
	51.469.903.096	**35.992.676.870**
12 BEBAN POKOK PENJUALAN	**62.617.613.917**	**41.876.712.741**
Perkiraan beban pokok penjualan terdiri dari :		
Percetakan	-	-
SPBU I:		
Persediaan Awal	93.055.550	118.221.191
Pembelian	13.627.471.965	7.102.890.000
Persediaan Akhir	(275.770.760)	(93.055.550)
	13.444.756.755	**7.120.055.641**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
SPBU II:		
Persediaan Awal	209.911.777	327.971.526
Pembelian	49.448.030.960	34.630.597.351
Persediaan Akhir	(485.085.575)	(209.911.777)
	49.172.857.162	**34.748.657.100**
13 BEBAN OPERASIONAL	**2.397.194.114**	**1.878.004.882**
Perkiraan beban operasional terdiri dari :		
Percetakan :		
Beban Produksi	36.537.940	19.480.500
Beban Jasa	16.836.000	116.239.660
Beban pegawai	49.485.536	67.279.023
Beban kantor	9.179.066	17.892.140
Beban Pemasaran	720.000	-
Beban pemeliharaan	78.058.500	1.477.000
Beban pajak	9.579.982	-
	200.397.024	**222.368.323**
SPBU I :		
Beban produksi	31.608.158	25.144.312
Beban Pegawai	109.791.190	108.873.466
Beban Representasi	-	56.323.626
Beban kantor	22.315.079	24.871.227
Beban Pemeliharaan	43.675.300	7.158.040
Beban Pajak	413.280	8.192.580
Beban penyusutan bahan bakar	71.509.499	47.459.730
	279.312.505	**278.022.981**
SPBU II :		
Beban produksi	122.171.458	111.586.253
Beban pegawai	413.569.297	352.784.394
Beban kantor	112.115.300	102.795.767
Beban pemeliharaan	304.913.680	91.481.100
Beban pajak	26.636.561	18.377.261
Beban penyusutan bahan bakar	336.561.136	303.878.350
	1.315.967.432	**980.903.125**
Beban Administrasi dan Umum		
Beban penghasilan direktur	62.529.168	41.967.114
Beban honor badan pengawas	24.465.237	8.054.624
Beban honor staf sekretaris badan pengawas	75.831.041	-
Beban HR Penjaga Kantor dan petugas kebersihan	13.000.000	-
Beban tunjangan sosial	40.320.216	3.435.000
Beban seragam dinas	18.804.500	2.482.624
Beban hari-hari besar nasional	23.079.500	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2017 (Dalam Rupiah)	2016 (Dalam Rupiah)
Beban representatif	44.489.599	-
Beban pendidikan dan pelatihan	62.193.750	7.956.550
Beban audit	25.000.000	30.000.000
Beban rekrutment	15.500.000	-
Beban penyusutan aset tetap	147.092.934	282.913.981
Beban retribusi	270.000	19.900.561
Beban honor pembina	39.551.208	-
Beban Promosi	9.390.000	-
	601.517.153	**396.710.453**
14 PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN	**148.018.024**	**68.994.446**
Perkiraan pendapatan/ (beban) lain-lain terdiri dari :		
Pendapatan jasa giro	4.784.031	69.996.792
Selisih penilaian persediaan	96.440.104	-
Pendapatan lain-lain	15.962.634	-
Pendapatan Sewa	32.000.000	-
Beban administrasi bank	1.168.746	1.002.346

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

STRUKTUR DAN RASIO KEUANGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN
STRUKTUR NERACA
PER 31 DESEMBER 2017
Dengan Angka Pembanding Per 31 Desember 2016 *(audited)*

	2017 (Dalam Rupiah)	%	2016 (Dalam Rupiah)	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	787.049.890	26,91%	547.782.353	27,46%
Piutang Usaha	80.342.226	2,75%	55.055.495	2,76%
Persediaan	760.856.335	26,01%	302.967.327	15,19%
Uang Muka Pembelian	387.040.000	13,23%	368.144.000	18,46%
Jumlah Aset Lancar	**2.015.288.451**	**68,89%**	**1.273.949.175**	**63,87%**
Aset Tetap				
Tanah	194.930.000	6,66%	194.930.000	9,77%
Gedung	3.447.214.237	117,85%	3.439.208.737	172,42%
Mesin SPBU Basuki Rahmad	1.085.607.052	37,11%	1.085.607.052	54,42%
Mesin SPBU Mayjend Sungkono	1.910.916.751	65,33%	1.586.099.151	79,51%
Kendaraan	21.200.000	0,72%	21.200.000	1,06%
Mesin Cetak	1.086.196.500	37,13%	1.086.196.500	54,45%
Peralatan Kantor Cetak	126.257.150	4,32%	126.257.150	6,33%
Peralatan Kantor SPBU Basuki Rahmad	56.558.350	1,93%	54.514.850	2,73%
Peralatan Kantor SPBU Mayjend Sungkono	22.833.200	0,78%	21.491.200	1,08%
Total Harga Perolehan	7.951.713.240	271,84%	7.615.504.640	381,78%
Akumulasi Penyusutan	(7.041.829.519)	-240,73%	(6.894.736.585)	-345,65%
Nilai Buku Aset Tetap	**909.883.721**	**31,11%**	**720.768.055**	**36,13%**
TOTAL ASET	**2.925.172.172**	**100%**	**1.994.717.230**	**100%**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
Kewajiban				
Hutang Jangka Pendek	188.991.918	6,46%	-	0,00%
Hutang Lain-lain	263.126.890	9,00%	263.126.890	13,19%
Jumlah Kewajiban	**452.118.808**	**15,46%**	**263.126.890**	**13,19%**
Ekuitas				
Modal awal	8.575.268.850	293,15%	8.575.268.850	429,90%
Cadangan Umum	59.507.005	2,03%	59.507.005	2,98%
Rugi Tahun-tahun Sebelumnya	(6.903.185.515)	-235,99%	(6.731.222.584)	-337,45%
Laba tahun berjalan	741.463.024	25,35%	(171.962.931)	-8,62%
Jumlah Ekuitas	**2.473.053.364**	**84,54%**	**1.731.590.340**	**86,81%**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**2.925.172.172**	**100%**	**1.994.717.230**	**100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN
STRUKTUR LAPORAN LABA RUGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
Dengan Angka Pembanding Tahun 2016 *(audited)*

	2017 (Dalam Rupiah)	%	2016 (Dalam Rupiah)	%
PENDAPATAN				
Percetakan	90.721.480	0,14%	150.158.638	0,35%
SPBU I	14.047.628.456	21,41%	7.370.924.738	16,94%
SPBU II	51.469.903.096	78,45%	35.992.676.870	82,72%
	65.608.253.032	**100%**	**43.513.760.246**	**100%**
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Percetakan	-	0,00%	-	0,00%
SPBU I	13.444.756.755	20,49%	7.128.055.641	16,38%
SPBU II	49.172.857.162	74,95%	34.748.657.100	79,86%
	62.617.613.917	**95,44%**	**41.876.712.741**	**96,24%**
LABA KOTOR	**2.990.639.115**	**4,56%**	**1.637.047.505**	**3,76%**
BEBAN USAHA				
Percetakan	200.397.024	0,31%	222.368.323	0,51%
SPBU I	279.312.505	0,43%	278.022.981	0,64%
SPBU II	1.315.967.432	2,01%	980.903.125	2,25%
Beban Administrasi dan Umum	601.517.153	0,92%	396.710.453	0,91%
	2.397.194.114	**3,65%**	**1.878.004.882**	**4,32%**
LABA (RUGI) BERSIH OPERASI	**593.445.001**	**0,90%**	**(240.957.377)**	**-0,55%**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-lain	149.186.770	0,23%	69.996.792	0,16%
(Beban) Lain-lain	(1.168.746)	0,00%	(1.002.346)	0,00%
	148.018.024	**0,23%**	**68.994.446**	**0,16%**
LABA (RUGI) BERSIH SESUDAH PAJAK	**741.463.024**	**1,13%**	**(171.962.931)**	**-0,40%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PD. ANEKA USAHA KOTA MADIUN

ANALISA RASIO

PER 31 DESEMBER 2017

Dengan Angka Pembanding Tahun 2016 *(audited)*

				2017	2016
LOAN SAFETY RATIOS					
CURRENT RATIO					
	Aset Lancar	:	Kewajiban Lancar		
Rp	2.015.288.451	: Rp	452.118.808	446%	484,16%
QUICK RATIO					
	Aset lancar - Persediaan	:	Kewajiban Lancar		
Rp	1.254.432.116	: Rp	452.118.808	277%	369,02%
DEBT TO EQUITY RATIO					
	Total Kewajiban	:	Ekuitas		
Rp	452.118.808	: Rp	2.473.053.364	18%	15,20%
PROFITABILITY RATIOS					
RETURN ON SALES					
	Laba Bersih	:	Penjualan		
Rp	741.463.024	: Rp	65.608.253.032	1%	-0,40%
RETURN ON ASSET					
	Laba Bersih	:	Total Aset		
Rp	741.463.024	: Rp	2.925.172.172	25%	-8,62%
RETURN ON EQUITY					
	Laba Bersih	:	Ekuitas		
Rp	741.463.024	: Rp	2.473.053.364	30%	-9,93%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN

PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA" KOTA MADIUN

TAHUN 2017

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
I	**Tanah**								
1	Tanah Cetak	2001		194.930.000	-	194.930.000	-	-	194.930.000
	Nilai Tanah			**194.930.000**	-	**194.930.000**	-	-	**194.930.000**
II	**Gedung**								
1	Gedung Cetak	2001	5	238.730.000	238.730.000	-	-	238.730.000	-
2	Cuci Mobil	2011	5	83.800.000	25.140.000	58.660.000	4.190.000	29.330.000	54.470.000
3	Canopy	2006	5	364.439.613	291.551.691	72.887.922	18.221.981	309.773.672	54.665.941
4	Kantor dan kios	2006	5	208.569.892	166.855.914	41.713.978	10.428.495	177.284.408	31.285.484
5	Mushola	2006	5	177.166.962	141.733.570	35.433.392	8.858.348	150.591.918	26.575.044
6	Pagar keliling dan saluran	2006	5	392.373.897	313.899.118	78.474.779	19.618.695	333.517.813	58.856.084
7	Landscaping	2006	5	827.555.122	662.044.098	165.511.024	41.377.756	703.421.854	124.133.268
8	Lambang pertamina	2006	5	40.608.569	32.486.856	8.121.713	2.030.428	34.517.284	6.091.285
9	Rumah genset dan locker	2006	5	142.839.574	114.271.659	28.567.915	7.141.979	121.413.638	21.425.936
10	Pekerjaan pagar	2003	5	130.845.000	130.845.000	-	-	130.845.000	-
11	Paving k-375	2003	5	147.118.138	147.118.138	-	-	147.118.138	-
12	Ban Jalan	2003	5	7.003.973	7.003.973	-	-	7.003.973	-
13	Pekerjaan Taman	2003	5	18.150.000	18.150.000	-	-	18.150.000	-
14	Kios/ Kantor (4x8) m2	2003	5	68.913.572	68.913.572	-	-	68.913.572	-
15	Rumah Genset	2003	5	6.600.000	6.600.000	-	-	6.600.000	-
16	Musholla Ukuran 4x4 m2	2003	5	37.464.937	37.464.937	-	-	37.464.937	-
17	Sumur pantau (2 buah)	2003	5	5.940.000	5.940.000	-	-	5.940.000	-
18	Halaman Rambu-rambu	2003	5	39.600.000	39.600.000	-	-	39.600.000	-
19	Pondasi Kanopi (8x16) m2	2003	5	26.992.217	26.992.217	-	-	26.992.217	-
20	Kanopi (8x16) m2	2003	5	342.836.011	342.836.011	-	-	342.836.011	-
21	Jembatan	2003	5	26.383.275	26.383.275	-	-	26.383.275	-
22	Kanopi Pemadam kebakaran	2003	5	8.712.000	8.712.000	-	-	8.712.000	-
23	Saluran luar SPBU dan Pertamina	2006	5	96.565.985	77.252.789	19.313.197	4.828.299	82.081.088	14.484.897
24	Perolehan Pebruari 2017	Peb 2017	5	8.005.500	-	-	366.919	366.919	7.638.581
	Nilai Gedung			**3.447.214.237**	**2.930.524.816**	**508.683.921**	**117.062.899**	**3.047.587.716**	**399.626.521**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
III	**Mesin SPBU Basuki Rahmad**								
1	Pekerjaan Persiapan	2003	10	7.625.000	7.625.000	-	-	7.625.000	-
2	Mesin Genset	2003	10	18.562.500	18.562.500	-	-	18.562.500	-
3	Olie Catcher	2003	10	4.704.480	4.704.480	-	-	4.704.480	-
4	Perpipaan	2003	10	69.894.000	69.894.000	-	-	69.894.000	-
5	Pemasangan PLN	2003	10	22.110.000	22.110.000	-	-	22.110.000	-
6	Instalasi listrik, air, dan penerangan	2003	10	45.327.902	45.327.902	-	-	45.327.902	-
7	Tangki timbun 20 kl (4 unit)	2003	10	393.201.600	393.201.600	-	-	393.201.600	-
8	Pndaso Gril	2003	10	4.345.770	4.345.770	-	-	4.345.770	-
9	Besi Roodter	2003	10	3.960.000	3.960.000	-	-	3.960.000	-
10	Grounding and Bounding	2003	10	3.715.800	3.715.800	-	-	3.715.800	-
11	Shelteroil 8 drum	2003	10	8.712.000	8.712.000	-	-	8.712.000	-
12	Pemadam kebakaran	2003	10	33.000.000	33.000.000	-	-	33.000.000	-
13	Dispensing Pump digital (2 unit)	2003	10	457.380.000	457.380.000	-	-	457.380.000	-
14	Tera meterologi	2003	10	4.356.000	4.356.000	-	-	4.356.000	-
15	Stabilizer	2003	10	8.712.000	8.712.000	-	-	8.712.000	-
	Nilai Mesin SPBU Basuki Rahmad			**1.085.607.052**	**1.085.607.052**	**-**	**-**	**1.085.607.052**	**-**
IV	**Mesin SPBU Mayjend. Sungkono**								
1	Shelter sepeda motor	2006	10	61.678.834	61.678.834	-	-	61.678.834	-
2	Instalisasi SPBU	2006	10	1.179.037.174	1.179.037.174	-	-	1.179.037.174	-
3	Ganti oli dan gas elpiji	2006	10	345.383.143	345.383.144	(0)	-	345.383.144	(0)
4	Penambahan Januari 2017	Jan 2017	10	6.500.000	-	-	650.000	650.000	5.850.001
5	Penambahan Pebruari 2017	Peb 2017	10	2.567.100	-	-	235.318	235.318	2.331.783
6	Penambahan Maret 2017	Mrt 2017	10	50.462.500	-	-	4.205.208	4.205.208	46.257.292
7	Penambahan April 2017	Aprl 2017	10	50.588.000	-	-	3.794.100	3.794.100	46.793.901
8	Penambahan Mei 2017	Mei 2017	10	203.500.000	-	-	13.566.667	13.566.667	189.933.334
9	Penambahan Juni 2017	Juni 2017	10	1.200.000	-	-	70.000	70.000	1.130.001
10	Mesin SPBU	31-Oct-17	10	10.000.000	-	-	166.667	166.667	9.833.334
	Nilai Mesin SPBU Mayjend Sungkono			**1.910.916.751**	**1.586.099.152**	**(0)**	**22.687.959**	**1.608.787.111**	**302.129.644**
V	**Kendaraan**								
1	Spd Motor Honda Win	2003	10	10.100.000	10.100.000	-	-	10.100.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
2	Spd Motor Honda Supra X	2003	10	11.100.000	11.100.000	-	-	11.100.000	-
	Nilai Kendaraan			**21.200.000**	**21.200.000**	-	-	**21.200.000**	-
VI	**Mesin Cetak**								
1	Mesin Cetak risograph	2001	10	77.950.000	77.950.000	-	-	77.950.000	-
2	Mesin potong manual	2001	10	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	-
3	Komputer	2001	10	8.100.000	8.100.000	-	-	8.100.000	-
4	Hand press	2001	10	2.300.000	2.300.000	-	-	2.300.000	-
5	Mesin cetak offset ryobi 500k	2002	10	312.000.000	312.000.000	-	-	312.000.000	-
6	Mesin cetak offset toko 820	2002	10	75.000.000	75.000.000	-	-	75.000.000	-
7	Mesin potong DQ	2002	10	35.750.000	35.750.000	-	-	35.750.000	-
8	Mesin nomerator heidelberg	2002	10	64.750.000	64.750.000	-	-	64.750.000	-
9	Mesin cetak master plat	2002	10	23.000.000	23.000.000	-	-	23.000.000	-
10	Mesin sablon	2002	10	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-
11	Nomerator manual	2002	10	3.200.000	3.200.000	-	-	3.200.000	-
12	Mesin steples	2002	10	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	-
13	Mesin cetak komuri	2003	10	343.600.000	343.600.000	-	-	343.600.000	-
14	Mesin cetak hamada	2003	10	40.000.000	40.000.000	-	-	40.000.000	-
15	Risso collater	2003	10	33.880.000	33.880.000	-	-	33.880.000	-
16	Travo pemanas	2003	10	11.000.000	11.000.000	-	-	11.000.000	-
17	Mesin foto copy	2003	10	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-
18	Staples max	2003	10	695.000	695.000	-	-	695.000	-
19	Staples max	2003	10	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-
20	Staples max	2003	10	200.000	200.000	-	-	200.000	-
21	Staples max	2003	10	650.000	650.000	-	-	650.000	-
22	Staples max	2003	10	600.000	600.000	-	-	600.000	-
23	Staples max	2003	10	580.000	580.000	-	-	580.000	-
24	Staples max	2003	10	575.000	575.000	-	-	575.000	-
25	Komputer	2003	10	5.091.500	5.091.500	-	-	5.091.500	-
26	Komputer	2003	10	4.975.000	4.975.000	-	-	4.975.000	-
27	Printer HP Desk jet 34200	2003	10	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
28	Laser HP jet 5100	2003	10	15.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000	-
29	Peralatan numerator	2009	10	600.000	420.000	180.000	60.000	480.000	120.000
	Nilai Mesin Cetak			**1.086.196.500**	**1.086.016.500**	**180.000**	**60.000**	**1.086.076.500**	**120.000**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
/II	Peralatan Kantor Cetak								
1	AC Ruang Setting	2001	10	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
2	Almari besi	2001	10	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-
3	Kursi tamu 1 set	2001	10	800.000	800.000	-	-	800.000	-
4	Kursi kayu panjang	2002	10	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
5	Meja operator	2002	10	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	-
6	Meja panjang	2002	10	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-
7	Meja kerja laci	2002	10	3.500.000	3.500.000	-	-	3.500.000	-
8	Kursi lipat besi	2002	10	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000	-
9	Kursi kayu	2002	10	1.680.000	1.680.000	-	-	1.680.000	-
10	Lemari kayu 3 pintu	2002	10	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-
11	Rak besi	2002	10	1.600.000	1.600.000	-	-	1.600.000	-
12	Tinta	2002	10	3.450.000	3.450.000	-	-	3.450.000	-
13	Stamvet	2002	10	1.465.000	1.465.000	-	-	1.465.000	-
14	Cartride toner printer HP Laser	2002	10	700.000	700.000	-	-	700.000	-
15	Astor etching solution	2002	10	400.000	400.000	-	-	400.000	-
16	Stamvet	2002	10	202.000	202.000	-	-	202.000	-
17	Kertas	2002	10	20.380.000	20.380.000	-	-	20.380.000	-
18	Kunci kantor	2003	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
19	Peralatan listrik	2003	10	218.400	218.400	-	-	218.400	-
20	Peralatan mesin	2003	10	34.000	34.000	-	-	34.000	-
21	Jepitan plat mesin	2003	10	235.000	235.000	-	-	235.000	-
22	Belt mesin	2003	10	53.700	53.700	-	-	53.700	-
23	Balut pisau potong	2003	10	6.000	6.000	-	-	6.000	-
24	Sepatu mesin	2003	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
25	Alat tulis kantor	2003	10	1.072.870	1.072.870	-	-	1.072.870	-
26	Kunci ring pas	2003	10	37.500	37.500	-	-	37.500	-
27	Pesawat telpon	2003	10	94.250	94.250	-	-	94.250	-
28	Kaca film mobil dinas	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
29	Setrika listrik	2003	10	85.000	85.000	-	-	85.000	-
30	Korden kantor	2003	10	1.238.500	1.238.500	-	-	1.238.500	-
31	Kompor gas	2003	10	560.000	560.000	-	-	560.000	-
32	Aqua set	2003	10	59.000	59.000	-	-	59.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
33	Selang	2003	10	136.000	136.000	-	-	136.000	-
34	Mesin ketik	2003	10	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
35	Almari dapur	2003	10	750.000	750.000	-	-	750.000	-
36	Peralatan dapur	2003	10	1.360.500	1.360.500	-	-	1.360.500	-
37	TV	2003	10	1.365.000	1.365.000	-	-	1.365.000	-
38	Disket	2003	10	93.000	93.000	-	-	93.000	-
39	Buku colour	2003	10	250.000	250.000	-	-	250.000	-
40	Peralatan tukang	2003	10	363.280	363.280	-	-	363.280	-
41	Brankas	2003	10	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
42	Peralatan mesin pompa	2003	10	85.000	85.000	-	-	85.000	-
43	Alat pemadam kebakaran	2003	10	1.912.500	1.912.500	-	-	1.912.500	-
44	Meja triplek	2003	10	573.500	573.500	-	-	573.500	-
45	Alat tulis kantor	2003	10	954.200	954.200	-	-	954.200	-
46	Kaca mesin cetak	2003	10	71.500	71.500	-	-	71.500	-
47	Bendera	2003	10	54.500	54.500	-	-	54.500	-
48	Refil printer	2003	10	450.000	450.000	-	-	450.000	-
49	Pisau mesin potong	2003	10	40.000	40.000	-	-	40.000	-
50	Pigura	2003	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
51	Filter solar	2003	10	55.000	55.000	-	-	55.000	-
52	Komputer	2003	10	3.650.000	3.650.000	-	-	3.650.000	-
53	Hear Dryer	2003	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
54	Skrin (alat sablon)	2003	10	49.000	49.000	-	-	49.000	-
55	Lampu TL	2003	10	40.000	40.000	-	-	40.000	-
56	Brankas	2003	10	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
57	Roll Master	2003	10	761.500	761.500	-	-	761.500	-
58	Peralatan mesin cetak	2003	10	269.830	269.830	-	-	269.830	-
59	Peralatan kebersihan	2003	10	461.000	461.000	-	-	461.000	-
60	Filter udara kendaraan dinas	2003	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
61	Meja kerja	2003	10	350.000	350.000	-	-	350.000	-
62	Kaca meja direktur	2003	10	37.000	37.000	-	-	37.000	-
63	Karpet meja	2003	10	9.500	9.500	-	-	9.500	-
64	Buku kesehatan	2003	10	217.400	217.400	-	-	217.400	-
65	Kalkulator	2003	10	11.000	11.000	-	-	11.000	-
66	Gergaji dan peralatan nomerik	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
37	Solder	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
38	AC Mobil	2003	10	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	-
39	Tape mobil	2003	10	925.000	925.000	-	-	925.000	-
70	Kunci	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
71	Peralatan kebersihan	2003	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
72	Kabel data komputer	2003	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
73	Penggaris	2003	10	46.000	46.000	-	-	46.000	-
74	Peralatan tukang	2003	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
75	Tali tampar	2003	10	12.000	12.000	-	-	12.000	-
76	Bendera	2003	10	35.000	35.000	-	-	35.000	-
77	Tali bendera	2003	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
78	Tiang bendera	2003	10	190.000	190.000	-	-	190.000	-
79	Kran air	2003	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
30	Penggaris	2003	10	40.000	40.000	-	-	40.000	-
31	Pithingan listrik	2003	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
32	Lampu	2003	10	57.500	57.500	-	-	57.500	-
33	Kunci	2003	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
34	Peralatan mesin printer	2003	10	7.000	7.000	-	-	7.000	-
35	Peralatan litrik mobil box	2003	10	12.500	12.500	-	-	12.500	-
36	Peralatan listrik	2003	10	14.000	14.000	-	-	14.000	-
37	Kuas	2003	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
38	Kran air	2003	10	16.000	16.000	-	-	16.000	-
39	Laker mesin	2003	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
90	Oven staker	2003	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
91	Kran air	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
92	Kran air	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
93	Linggis	2003	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
94	Penggaris	2003	10	16.000	16.000	-	-	16.000	-
95	Sikat mesin	2003	10	8.300	8.300	-	-	8.300	-
96	Peralatan dapur	2003	10	146.500	146.500	-	-	146.500	-
97	Laker mesin ryobi	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
98	Garisan kayu	2003	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
99	Laker mesin ryobi	2003	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
00	Slot pintu	2003	10	21.000	21.000	-	-	21.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
01	Peralatan kebersihan	2003	10	21.500	21.500	-	-	21.500	-
02	Sapu	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
03	Kabel	2003	10	34.000	34.000	-	-	34.000	-
04	Kabel tilpon	2003	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
05	Solder	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
06	Peralatan mesin cetak	2003	10	1.043.000	1.043.000	-	-	1.043.000	-
07	Masker	2003	10	9.000	9.000	-	-	9.000	-
08	Pir starter	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
09	Kursi plastik	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
10	Seperangkat pot bunga	2003	10	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-
11	Gembok mobil	2003	10	90.000	90.000	-	-	90.000	-
12	Fasilitas komputer	2003	10	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	-
13	Kipas angin	2003	10	375.000	375.000	-	-	375.000	-
14	Slot pintu kantor	2003	10	280.000	280.000	-	-	280.000	-
15	Peralatan dapur	2003	10	575.000	575.000	-	-	575.000	-
16	Kursi kerja	2003	10	1.125.000	1.125.000	-	-	1.125.000	-
17	Triplek loster	2003	10	200.000	200.000	-	-	200.000	-
18	Peralatan kebersihan	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
19	Lampu TL	2003	10	200.000	200.000	-	-	200.000	-
20	Peralatan tukang	2003	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
21	Mesin pompa air dap	2003	10	125.000	125.000	-	-	125.000	-
22	Kran	2003	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
23	Bak air	2003	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
24	Tempat sampah	2003	10	100.000	100.000	-	-	100.000	-
25	Kanebo	2003	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
26	Bar msn cetak	2004	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
27	Grendel kunci	2004	10	41.000	41.000	-	-	41.000	-
28	Plong kulit	2004	10	14.000	14.000	-	-	14.000	-
29	Gergaji	2004	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
30	Laker msn cetak	2004	10	32.000	32.000	-	-	32.000	-
31	Peralatan mesin fotocopy	2004	10	65.000	65.000	-	-	65.000	-
32	Filling kabinet	2004	10	1.250.000	1.250.000	-	-	1.250.000	-
33	Steker	2004	10	4.000	4.000	-	-	4.000	-
34	Peralatan mesin fotocopy	2004	10	180.000	180.000	-	-	180.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
35	Peralatan mesin risso	2004	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
36	Lampu L 300	2004	10	35.000	35.000	-	-	35.000	-
37	Kunci laci	2004	10	4.000	4.000	-	-	4.000	-
38	Laker mesin cetak	2004	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
39	Filter udara L 300	2004	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
40	Mouse kompt	2004	10	16.000	16.000	-	-	16.000	-
41	CD Case	2004	10	17.000	17.000	-	-	17.000	-
42	Pesawat telpon	2004	10	76.000	76.000	-	-	76.000	-
43	Taspen	2004	10	2.000	2.000	-	-	2.000	-
44	Gembok	2004	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
45	CD room	2004	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
46	Kran	2004	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
47	Senter	2004	10	34.000	34.000	-	-	34.000	-
48	Peralatan kompt	2004	10	-	-	-	-	-	-
49	Kursi kerja	2004	10	175.000	175.000	-	-	175.000	-
50	Meja kerja	2004	10	200.000	200.000	-	-	200.000	-
51	Sumur bor	2004	10	500.000	500.000	-	-	500.000	-
52	Kran	2004	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
53	Laker msn cetak	2004	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
54	Sumur bor	2004	10	650.000	650.000	-	-	650.000	-
55	Kampas rem L 300	2004	10	80.000	80.000	-	-	80.000	-
56	Sekring	2004	10	3.750	3.750	-	-	3.750	-
57	Baut msn nomerator	2004	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
58	Radio tape	2004	10	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-
59	Mike radio tape	2004	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
60	Roll mesin cetak	2004	10	330.000	330.000	-	-	330.000	-
61	Tangga	2004	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
62	Kotak P3K	2004	10	100.000	100.000	-	-	100.000	-
63	Laker msn cetak	2004	10	96.000	96.000	-	-	96.000	-
64	Kunci ring pas	2004	10	96.500	96.500	-	-	96.500	-
65	Korektor plate	2004	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
66	Korden ruang direktur	2004	10	750.000	750.000	-	-	750.000	-
67	Screen sablon	2004	10	165.000	165.000	-	-	165.000	-
68	Neon	2004	10	40.000	40.000	-	-	40.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
69	Meja kerja	2004	10	650.000	650.000	-	-	650.000	-
70	Filling kabinet	2004	10	650.000	650.000	-	-	650.000	-
71	Aki L 300	2004	10	390.000	390.000	-	-	390.000	-
72	Roll msn cetak	2004	10	600.000	600.000	-	-	600.000	-
73	Meja kerja	2004	10	325.000	325.000	-	-	325.000	-
74	Korektor	2004	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
75	Obeng	2004	10	4.500	4.500	-	-	4.500	-
76	Stop kontak	2004	10	7.000	7.000	-	-	7.000	-
77	Almari etalase	2004	10	1.850.000	1.850.000	-	-	1.850.000	-
78	Tempat nomerator	2004	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
79	Stempel perusahaan	2004	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
80	Travo	2004	10	35.500	35.500	-	-	35.500	-
81	Lampu dim L 300	2004	10	180.000	180.000	-	-	180.000	-
82	Pak mesin ryabi	2004	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
83	Kran	2004	10	12.500	12.500	-	-	12.500	-
84	Catride print	2004	10	210.000	210.000	-	-	210.000	-
85	Bendera	2004	10	55.000	55.000	-	-	55.000	-
86	Laker	2004	10	90.000	90.000	-	-	90.000	-
87	Peta kota	2004	10	85.000	85.000	-	-	85.000	-
88	Souvenir hari ibu	2004	10	200.000	200.000	-	-	200.000	-
89	Toner mesin fotocopy	2004	10	47.500	47.500	-	-	47.500	-
90	Pisau porporasi	2004	10	105.000	105.000	-	-	105.000	-
91	Catride print	2004	10	840.000	840.000	-	-	840.000	-
92	Lampu mobil L 300	2004	10	360.000	360.000	-	-	360.000	-
93	Peralatan mesin fotocopy	2004	10	380.000	380.000	-	-	380.000	-
94	Kalkulator	2004	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
95	Pigura	2004	10	180.000	180.000	-	-	180.000	-
96	Peralatan komputer	2004	10	450.000	450.000	-	-	450.000	-
97	Gembok pintu kantor	2004	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
98	Peralatan mesin cetak	2004	10	2.560.000	2.560.000	-	-	2.560.000	-
99	Alat pemadam kebakaran	2004	10	3.800.000	3.800.000	-	-	3.800.000	-
00	Meja finishing	2004	10	1.727.420	1.727.420	-	-	1.727.420	-
01	Landasan mesin cetak	2004	10	1.750.000	1.750.000	-	-	1.750.000	-
02	Mesin potong rumput	2004	10	250.000	250.000	-	-	250.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
03	Rak besi	2004	10	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-
04	Almari besi	2004	10	2.500.000	2.500.000	-	-	2.500.000	-
05	Pemb landasan msn nomerator	2004	10	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-
06	Kursi kerja	2004	10	450.000	450.000	-	-	450.000	-
07	Meja kerja	2004	10	900.000	900.000	-	-	900.000	-
08	Pigura	2005	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
09	Kanebo	2005	10	37.500	37.500	-	-	37.500	-
10	Kursi besi	2005	10	145.000	145.000	-	-	145.000	-
11	Dop	2005	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
12	Slot pintu gudang	2005	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
13	Pigura	2005	10	90.000	90.000	-	-	90.000	-
14	Speedometer L 300	2005	10	90.000	90.000	-	-	90.000	-
15	Alat nomerator	2005	10	744.000	744.000	-	-	744.000	-
16	Kran	2005	10	12.500	12.500	-	-	12.500	-
17	CD data kompt	2005	10	4.500	4.500	-	-	4.500	-
18	Gunting	2005	10	9.000	9.000	-	-	9.000	-
19	Laker	2005	10	40.000	40.000	-	-	40.000	-
20	Spion L 300	2005	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
21	Bendera	2005	10	110.000	110.000	-	-	110.000	-
22	Tespen	2005	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
23	Stop kontak	2005	10	13.500	13.500	-	-	13.500	-
24	Laker	2005	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
25	Laker	2005	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
26	Kran	2005	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
27	Slot kunci ktr	2005	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
28	Kunci ring pas	2005	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
29	Alat penghemat listrik	2005	10	1 050.000	1.050.000	-	-	1.050.000	-
30	Kran	2005	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
31	Gunting rumput	2005	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
32	Stempel spbu	2005	10	35.000	35.000	-	-	35.000	-
33	Kunci laci	2005	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
34	Tempat sampah	2005	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
35	Rambu spbu	2005	10	250.000	250.000	-	-	250.000	-
36	Stempel spbu	2005	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
37	Peralatan jenset	2005	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
38	Nosel	2005	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
39	FL. Violet / lampu uang palsu	2005	10	47.500	47.500	-	-	47.500	-
40	Bak plastik	2005	10	3.500	3.500	-	-	3.500	-
41	Peralatan tukang	2005	10	441.000	441.000	-	-	441.000	-
42	Kran	2005	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
43	Kunci mushola	2005	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
44	Lampu listrik	2005	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
45	Botol oli	2005	10	-	-	-	-	-	-
46	Peralatan mesin fotocopy	2006	10	225.000	225.000	-	-	225.000	-
47	Taplak	2006	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
48	Stop kontak	2006	10	7.500	7.500	-	-	7.500	-
49	Alat scren sablon	2006	10	112.500	112.500	-	-	112.500	-
50	Peralatan msn	2006	10	16.000	16.000	-	-	16.000	-
51	Laker	2006	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
52	Peralatan kompt	2006	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
53	Catride kompt	2006	10	370.000	370.000	-	-	370.000	-
54	Selang msn nomerator	2006	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
55	Peralatan kompt	2006	10	800.000	800.000	-	-	800.000	-
56	Buku perpajakan	2006	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
57	Kesed	2006	10	36.000	36.000	-	-	36.000	-
58	Kaca meja	2006	10	55.000	55.000	-	-	55.000	-
59	Karpet	2006	10	23.000	23.000	-	-	23.000	-
60	Kunci panel	2006	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
61	Laker	2006	10	20.000	20.000	-	-	20.000	-
62	Gembok kunci panel	2006	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
63	Roll msn cetak	2006	10	690.000	690.000	-	-	690.000	-
64	Laker	2006	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
65	Kran	2006	10	10.000	10.000	-	-	10.000	-
66	Bendera	2006	10	55.000	55.000	-	-	55.000	-
67	Kipas angin	2006	10	370.000	370.000	-	-	370.000	-
68	Saringan msn ctk	2006	10	35.000	35.000	-	-	35.000	-
69	Bor msn ctk	2008	10	10.000	8.000	2.000	1.000	9.000	1.000
70	Neon msn ctk	2008	10	86.500	69.200	17.300	8.650	77.850	8.650

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
71	Pesawat telp ceria	2008	10	275.000	220.000	55.000	27.500	247.500	27.500
72	Senter	2008	10	12.500	10.000	2.500	1.250	11.250	1.250
73	Buku telpon	2008	10	35.000	28.000	7.000	3.500	31.500	3.500
74	Flas disk	2008	10	92.500	74.000	18.500	9.250	83.250	9.250
75	Laker	2008	10	20.000	16.000	4.000	2.000	18.000	2.000
76	Umbul-umbul	2008	10	340.000	272.000	68.000	34.000	306.000	34.000
77	Flas disk	2008	10	65.000	52.000	13.000	6.500	58.500	6.500
78	Lampu TL	2008	10	18.000	14.400	3.600	1.800	16.200	1.800
79	Travo	2008	10	30.000	24.000	6.000	3.000	27.000	3.000
80	Laker	2008	10	30.000	24.000	6.000	3.000	27.000	3.000
81	Travo	2008	10	25.800	20.640	5.160	2.580	23.220	2.580
82	Lampu TL	2008	10	28.000	22.400	5.600	2.800	25.200	2.800
83	Laker	2008	10	40.000	32.000	8.000	4.000	36.000	4.000
84	Guci + aqua set	2009	10	150.000	105.000	45.000	15.000	120.000	30.000
85	Gelas	2009	10	99.450	69.615	29.835	9.945	79.560	19.890
86	AC	2009	10	2.900.000	2.030.000	870.000	290.000	2.320.000	580.000
87	Pesawat telpon	2009	10	299.000	209.300	89.700	29.900	239.200	59.800
88	Gunting	2009	10	5.000	3.500	1.500	500	4.000	1.000
89	Korden	2009	10	700.000	490.000	210.000	70.000	560.000	140.000
90	Dispenser	2009	10	155.000	108.500	46.500	15.500	124.000	31.000
91	HP Nokia	2009	10	550.000	385.000	165.000	55.000	440.000	110.000
92	Kaca/karpet meja kerja	2009	10	146.000	102.200	43.800	14.600	116.800	29.200
93	Tempat cuci ipate	2009	10	325.000	227.500	97.500	32.500	260.000	65.000
94	Katalog kalender	2009	10	25.000	17.500	7.500	2.500	20.000	5.000
	Nilai Peralatan Kantor Cetak			**126.257.150**	**124.429.155**	**1.827.995**	**646.275**	**125.075.430**	**1.181.720**
VIII	**Peralatan Kantor SPBU I**								
1	Satu set kunci shock	2003	10	97.500	97.500	-	-	97.500	-
2	Kursi kerja	2003	10	405.000	405.000	-	-	405.000	-
3	Kursi besi	2003	10	400.000	400.000	-	-	400.000	-
4	Meja kerja	2003	10	570.000	570.000	-	-	570.000	-
5	Meja kerja	2003	10	280.000	280.000	-	-	280.000	-
6	Nopel UPW	2003	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
7	Pagar SPBU	2003	10	700.000	700.000	-	-	700.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
3	Jam dinding	2003	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
9	Tali tiang bendera	2003	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
0	Kalkulator	2003	10	75.400	75.400	-	-	75.400	-
1	Tas setoran penjualan SPBU	2003	10	32.500	32.500	-	-	32.500	-
2	Mesin klep	2003	10	850.000	850.000	-	-	850.000	-
3	Meja kerja	2003	10	27.500	27.500	-	-	27.500	-
4	Meja kerja	2003	10	350.000	350.000	-	-	350.000	-
5	Meja kerja	2003	10	228.000	228.000	-	-	228.000	-
6	Kursi kerja	2003	10	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-
7	Filling kabinet	2003	10	450.000	450.000	-	-	450.000	-
8	Mesin ketik	2003	10	350.000	350.000	-	-	350.000	-
9	Meja kerja	2003	10	180.000	180.000	-	-	180.000	-
0	Meja kerja	2003	10	300.000	300.000	-	-	300.000	-
1	Alat penghisap udara	2003	10	400.000	400.000	-	-	400.000	-
2	Kursi besi	2003	10	100.000	100.000	-	-	100.000	-
3	Mesin potong rumput	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
4	Senter	2003	10	34.000	34.000	-	-	34.000	-
5	Bak plastik	2003	10	13.000	13.000	-	-	13.000	-
6	Bendera	2003	10	12.500	12.500	-	-	12.500	-
7	Stempel	2003	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
8	Selang SPBU	2003	10	96.000	96.000	-	-	96.000	-
9	Keset	2003	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
0	Ember	2003	10	18.000	18.000	-	-	18.000	-
1	Stapler	2003	10	21.500	21.500	-	-	21.500	-
2	Peralatan kebersihan	2003	10	115.000	115.000	-	-	115.000	-
3	Gembok	2003	10	36.000	36.000	-	-	36.000	-
4	Timbo	2003	10	9.500	9.500	-	-	9.500	-
5	Senter	2003	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
6	Stempel tgl	2003	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
7	Peralatan msn	2003	10	9.000	9.000	-	-	9.000	-
8	Gantungan papan nama	2005	10	13.500	13.500	-	-	13.500	-
9	Kotak surat	2005	10	9.050	9.050	-	-	9.050	-
0	Kotak saran	2005	10	30.000	30.000	-	-	30.000	-
1	Kran	2005	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
52	Sajadah	2005	10	33.000	33.000	-	-	33.000	-
53	Kran	2005	10	28.500	28.500	-	-	28.500	-
54	Kunci laci	2005	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
55	Papan nama	2005	10	100.000	100.000	-	-	100.000	-
56	Pompa air	2005	10	25.000	25.000	-	-	25.000	-
57	Lampu listrik	2005	10	60.000	60.000	-	-	60.000	-
58	Sajadah	2005	10	75.000	75.000	-	-	75.000	-
59	Tikar	2005	10	90.000	90.000	-	-	90.000	-
60	Payung	2005	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
61	Instalasi air	2005	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
62	Kunci mesin	2005	10	150.000	150.000	-	-	150.000	-
63	Sped oli	2005	10	50.000	50.000	-	-	50.000	-
64	Lampu TL SPBU	2005	10	120.000	120.000	-	-	120.000	-
65	Kursi besi SPBU	2005	10	450.000	450.000	-	-	450.000	-
66	Papan tulis	2005	10	180.000	180.000	-	-	180.000	-
67	Pipa jenset	2005	10	120.000	120.000	-	-	120.000	-
68	Travo	2005	10	38.500	38.500	-	-	38.500	-
69	Hand pond SPBJ	2006	10	350.000	350.000	-	-	350.000	-
70	Laker	2006	10	45.000	45.000	-	-	45.000	-
71	Kunci pintu	2006	10	7.000	7.000	-	-	7.000	-
72	Laker	2006	10	15.000	15.000	-	-	15.000	-
73	Printer	2006	10	620.000	620.000	-	-	620.000	-
74	Stapler max	2006	10	27.500	27.500	-	-	27.500	-
75	Aki	2006	10	42.000	42.000	-	-	42.000	-
76	Obeng	2006	10	6.000	6.000	-	-	6.000	-
77	Remote AC	2006	10	5.000	5.000	-	-	5.000	-
78	Bendera	2006	10	35.000	35.000	-	-	35.000	-
79	Peralatan nomerator	2006	10	750.000	750.000	-	-	750.000	-
70	Gembok	2006	10	33.500	33.500	-	-	33.500	-
71	Mouse kompt	2006	10	114.600	114.600	-	-	114.600	-
72	Flash disk	2006	10	105.000	105.000	-	-	105.000	-
73	Bak sampah	2007	10	250.000	225.000	25.000	25.000	250.000	-
74	Pompa KA sitory sweep	2007	10	575.000	517.500	57.500	57.500	575.000	-
75	Pompa dap	2007	10	125.000	112.500	12.500	12.500	125.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
76	Disel	2007	10	550.000	495.000	55.000	55.000	550.000	-
77	Bifet	2007	10	1.760.000	1.584.000	176.000	176.000	1.760.000	-
78	Gergaji	2007	10	22.500	20.250	2.250	2.250	22.500	-
79	Print out	2007	10	12.000.000	10.800.000	1.200.000	1.200.000	12.000.000	-
80	Sabit	2007	10	25.000	22.500	2.500	2.500	25.000	-
81	Sepul travo	2007	10	400.000	360.000	40.000	40.000	400.000	-
82	Gulung dinamo	2007	10	400.000	360.000	40.000	40.000	400.000	-
83	Sepul travo	2007	10	400.000	360.000	40.000	40.000	400.000	-
84	Senter	2007	10	19.000	17.100	1.900	1.900	19.000	-
85	Dispenser	2007	10	55.000	49.500	5.500	5.500	55.000	-
86	Senter	2007	10	18.000	16.200	1.800	1.800	18.000	-
87	Accu	2007	10	380.000	342.000	38.000	38.000	380.000	-
88	Umbul-umbul	2007	10	136.000	122.400	13.600	13.600	136.000	-
89	Sepul pompa	2007	10	110.000	99.000	11.000	11.000	110.000	-
90	Nosel	2007	10	500.000	450.000	50.000	50.000	500.000	-
91	Nosel	2007	10	150.000	135.000	15.000	15.000	150.000	-
92	Tangga alumunium	2007	10	700.000	630.000	70.000	70.000	700.000	-
93	Kursi	2007	10	870.000	783.000	87.000	87.000	870.000	-
94	Tas kantor	2007	10	107.300	96.570	10.730	10.730	107.300	-
95	HP	2007	10	670.000	603.000	67.000	67.000	670.000	-
96	Print out	2009	10	10.000.000	7.000.000	3.000.000	1.000.000	8.000.000	2.000.000
97	Tanter print out	2009	10	8.000.000	5.600.000	2.400.000	800.000	6.400.000	1.600.000
98	Kalkulator	2009	10	97.000	67.900	29.100	9.700	77.600	19.400
99	Kipas angin	2009	10	206.500	144.550	61.950	20.650	165.200	41.300
00	Peralatan	2013	10	3.475.000	1.390.000	2.085.000	347.500	1.737.500	1.737.500
01	Perolehan Januari 2017	Jan 2017	10	1.604.500	-	-	160.450	160.450	1.444.050
02	Perolehan Maret 2017	Mrt 2017	10	439.000	-	-	36.583	36.583	402.417
	Nilai Peralatan Kantor SPBU I			**56.558.350**	**44.916.520**	**9.598.330**	**4.397.163**	**49.313.683**	**7.244.667**
X.	**Peralatan Kantor SPBU II**								
1	Rak dispenser	2007	10	60.000	54.000	6.000	6.000	60.000	-
2	Papan WB	2007	10	40.000	36.000	4.000	4.000	40.000	-
3	Dispenser	2007	10	60.000	54.000	6.000	6.000	60.000	-
4	Kipas angin	2007	10	175.000	157.500	17.500	17.500	175.000	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

O.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
5	Jam dinding	2007	10	35.000	31.500	3.500	3.500	35.000	-
6	Bendera	2007	10	58.000	52.200	5.800	5.800	58.000	-
7	Kalkulator	2007	10	57.700	51.930	5.770	5.770	57.700	-
8	Kalkulator	2007	10	57.700	51.930	5.770	5.770	57.700	-
9	Water pas	2007	10	20.000	18.000	2.000	2.000	20.000	-
10	Aqua galon	2007	10	35.000	31.500	3.500	3.500	35.000	-
11	Karpet	2007	10	93.000	83.700	9.300	9.300	93.000	-
12	Payung	2007	10	55.000	49.500	5.500	5.500	55.000	-
13	Sensor uang	2007	10	115.000	103.500	11.500	11.500	115.000	-
14	Kotak kebersihan WC	2007	10	40.000	36.000	4.000	4.000	40.000	-
15	Kalkulator	2007	10	55.000	49.500	5.500	5.500	55.000	-
16	Mesin potong rumput	2007	10	700.000	630.000	70.000	70.000	700.000	-
17	Arit dan ungkal	2007	10	30.000	27.000	3.000	3.000	30.000	-
18	Kotak p3k	2007	10	40.000	36.000	4.000	4.000	40.000	-
19	Gunting tanaman	2007	10	36.800	33.120	3.680	3.680	36.800	-
20	Bak sampah tong	2007	10	300.000	270.000	30.000	30.000	300.000	-
21	Tatakan tera ukur	2007	10	300.000	270.000	30.000	30.000	300.000	-
22	Kursi plastik	2007	10	133.400	120.060	13.340	13.340	133.400	-
23	Brankas	2007	10	2.000.000	1.800.000	200.000	200.000	2.000.000	-
24	Senter batu	2007	10	20.000	18.000	2.000	2.000	20.000	-
25	Pastal minyak	2007	10	250.000	225.000	25.000	25.000	250.000	-
26	Papan stainlis P dan S	2007	10	2.700.000	2.430.000	270.000	270.000	2.700.000	-
27	Senter batu	2007	10	15.000	13.500	1.500	1.500	15.000	-
28	Kursi plastik	2008	10	227.600	182.080	45.520	22.760	204.840	22.760
29	Umbul-umbul dan bendera	2008	10	488.000	390.400	97.600	48.800	439.200	48.800
30	Bambu	2008	10	134.000	107.200	26.800	13.400	120.600	13.400
31	Tangga	2008	10	600.000	480.000	120.000	60.000	540.000	60.000
32	Nepel pompa	2008	10	300.000	240.000	60.000	30.000	270.000	30.000
33	Jet pump / dap	2008	10	275.000	220.000	55.000	27.500	247.500	27.500
34	Hidrometer	2008	10	450.000	360.000	90.000	45.000	405.000	45.000
35	Senter batu	2008	10	15.000	12.000	3.000	1.500	13.500	1.500
36	Brankas	2009	10	2.500.000	1.750.000	750.000	250.000	2.000.000	500.000
37	Kursi plastik	2009	10	185.000	129.500	55.500	18.500	148.000	37.000
38	Guci aqua	2009	10	65.000	45.500	19.500	6.500	52.000	13.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	URAIAN	TH. PEROLEHAN	%	HARGA PEROLEHAN	AKUM. PENYUSUTAN 2016	NILAI BUKU TAHUN 2016	BEBAN PENYUSUTAN 2017	AKUM. PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU TAHUN 2017
39	Tutup mesin	2009	10	235.000	164.500	70.500	23.500	188.000	47.000
40	Pesawat telpon	2009	10	75.000	52.500	22.500	7.500	60.000	15.000
41	Peralatan Kantor	2011	10	8.460.000	5.076.270	3.383.730	846.000	5.922.270	2.537.730
42	Perolehan April 2017	April 2017	10	65.000	-	-	4.875	4.875	60.125
43	Perolehan Mei 2017	Mei 2017	10	1.218.000	-	-	81.200	81.200	1.136.800
44	Perolehan Juni 2017	Juni 2017	10	59.000	-	-	3.442	3.442	55.558
	Nilai Peralatan Kantor SPBU II			**22.833.200**	**15.943.390**	**5.547.810**	**2.238.637**	**18.182.027**	**4.651.173**
	JUMLAH			**7.951.713.240**	**6.894.736.585**	**720.768.056**	**147.092.934**	**7.041.829.518**	**909.883.726**
	Rekapitulasi :								
1	Tanah			194.930.000	-	194.930.000	-	-	194.930.000
2	Gedung			3.447.214.237	2.930.524.816	516.689.421	117.062.899	3.047.587.716	399.626 521
3	Mesin SPBU Basuki Rahmad			1.085.607.052	1.085.607.052	-	-	1.085.607.052	-
4	Mesin SPBU Mayjen Sungkono			1.910.916.751	1.586.099.152	324.817.600	22.687.959	1.608.787.111	302.129.640
5	Kendaraan			21.200.000	21.200.000	-	-	21.200.000	-
6	Mesin Cetak			1.086.196.500	1.086.016.500	180.000	60.000	1.086.076.500	120.000
7	Peralatan Kantor Cetak			126.257.150	124.429.155	1.827.995	646.275	125.075.430	1.181.720
8	Peralatan Kantor SPBU I			56.558.350	44.916.520	11.641.830	4.397.163	49.313.683	7.244.667
9	Peralatan Kantor SPBU II			22.833.200	15.943.390	6.889.810	2.238.637	18.182.027	4.651.173
	Jumlah			7.951.713.240	6.894.736.585	1.056.976.656	147.092.934	7.041.829.518	909.883.722

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara